

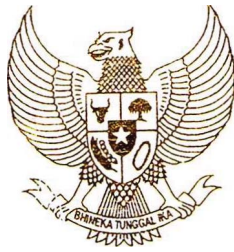


Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tangerang

Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah (RPJMD)

# Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029





SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
dan  
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana...



11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang Pembangunan Daerah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

#### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RTRW Tahun 2011-2031, dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. RKPD.

#### BAB II

#### SISTEMATIKA RPJMD

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
  - c. bab III memuat Visi, Misi, dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. bab IV memuat Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - e. bab V memuat penutup.

(2) RPJMD...

- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029

#### Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. goncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran Daerah; atau
  - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:  
(3,32/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.  
NIP. 19750813 200801 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Kabupaten Tangerang RPJMD Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Kabupaten Tangerang adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 terbagi dalam tahapan Perencanaan pembangunan pada periodisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 (satu) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2025;
- b. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2026;
- c. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2027;
- d. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2028; dan
- e. RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2029.

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Tangerang. Pentahapan rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RKPD Kabupaten Tangerang sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD Kabupaten Tangerang dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang yang merupakan rencana Pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas Pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.



RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. RPJMD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyusunan anggaran, serta sebagai panduan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun renstra.

Kesesuaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ini dengan dokumen Perencanaan di provinsi dan Perangkat Daerah mutlak diperlukan untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Daerah dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi Daerah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keunggulan lokal.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
- d. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- e. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan; dan
- g. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;

- e. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang; dan
- f. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0425

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan upaya dalam menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai dokumen perencanaan, sesuai Pasal 263 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sementara itu, dalam Pasal 264 ayat (4), disebutkan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2025-2030, yaitu Mochamad Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah, telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, dengan masa bakti 5 (lima) tahun, yaitu hingga 20 Februari 2030. Sebagai pemegang mandat kepemimpinan daerah, disusunlah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-

2029 disusun menjabarkan visi, misi, serta program prioritas Kepala Daerah untuk Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses, mencakup: (1) pendekatan teknokratik, (2) pendekatan politik, (3) pendekatan partisipatif, (4) pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik merupakan pendekatan perencanaan dengan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan tenaga ahli untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan *bottom up – top down* merupakan pendekatan dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan antar lembaga vertikal dan horizontal. Selain itu, penyusunan ini juga memperhatikan hasil Konsultasi Publik, Musrenbang, serta masukan dari perangkat daerah. Dokumen RPJMD ini dalam prosesnya akan mengalami penyesuaian substansi mengikuti sinkronisasi kebijakan antar lembaga, evaluasi dan masukan partisipatif dari masyarakat, dan pendekatan politis dari pokok pikiran Kepala Daerah dan anggota dewan Kabupaten Tangerang.

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang meliputi pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sementara itu, pendekatan spasial mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.

Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (*Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang*)”. Melalui visi pembangunan tersebut diterjemahkan ke dalam 6 (enam) misi serta 5 (lima) program prioritas pembangunan. Pada akhir kepemimpinan lima tahun kedepan diharapkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,56-8,56 persen seiring dengan peningkatan per-kapita menjadi 69,75 juta. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan daya saing sektor unggulan yaitu perindustrian dan perdagangan-jasa serta skalabilitas ekonomi mikro (UKM, koperasi, BUMD, dan kewirausahaan) yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 4,67 – 4,88 persen serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,62 persen. Selain itu, fokus pembangunan lima tahun ke depan adalah peningkatan daya saing SDM yang diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 77,93. Maka dari itu, Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan adalah Kabupaten Tangerang yang Berdaya Saing dengan landasan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keunggulan lokal Kabupaten.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
  16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924).

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang memiliki kedudukan



Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID); Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan 5 (lima) Tahun Terakhir, serta Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1.4.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

##### 1.4.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
4. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan;
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

### BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Memuat 3 (tiga) Subbab yang menjabarkan kondisi dan isu strategis pembangunan daerah, yaitu (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; (2) Gambaran Keuangan Daerah, menjelaskan kondisi keuangan daerah, yaitu gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan; dan (3) Permasalahan dan Isu Strategis, menjelaskan permasalahan pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta rumusan isu strategis daerah dengan memperhatikan isu di tingkat global, nasional, dan regional.

### BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat 2 (dua) Subbab yang menjabarkan arahan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (2) Strategi Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

### BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat 2 (dua) Subbab yang terdiri dari: (1) Program Perangkat Daerah, memuat rangkaian program perangkat daerah serta indikator program menurut bidang urusan; dan (2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat penjelasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai ukuran dan/atau indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kesejahteraan, aspek layanan, dan aspek daya saing.

### BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan singkat mengenai harapan pencapaian dari dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 serta kaidah pelaksanaan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAERAH

#### 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah secara detail. Analisis ini mencakup beberapa hal seperti geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, serta aspek pelayanan umum di suatu daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya. Selain itu, analisis gambaran kondisi daerah menjadi landasan dalam analisis isu dan permasalahan pembangunan Kabupaten Tangerang.

##### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Geografi wilayah dan demografi merupakan landasan dalam pembangunan wilayah. Maka dari itu, dalam membangun Kabupaten Tangerang diperlukan analisis mengenai kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung lingkungan serta mengetahui kondisi pertumbuhan dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah.

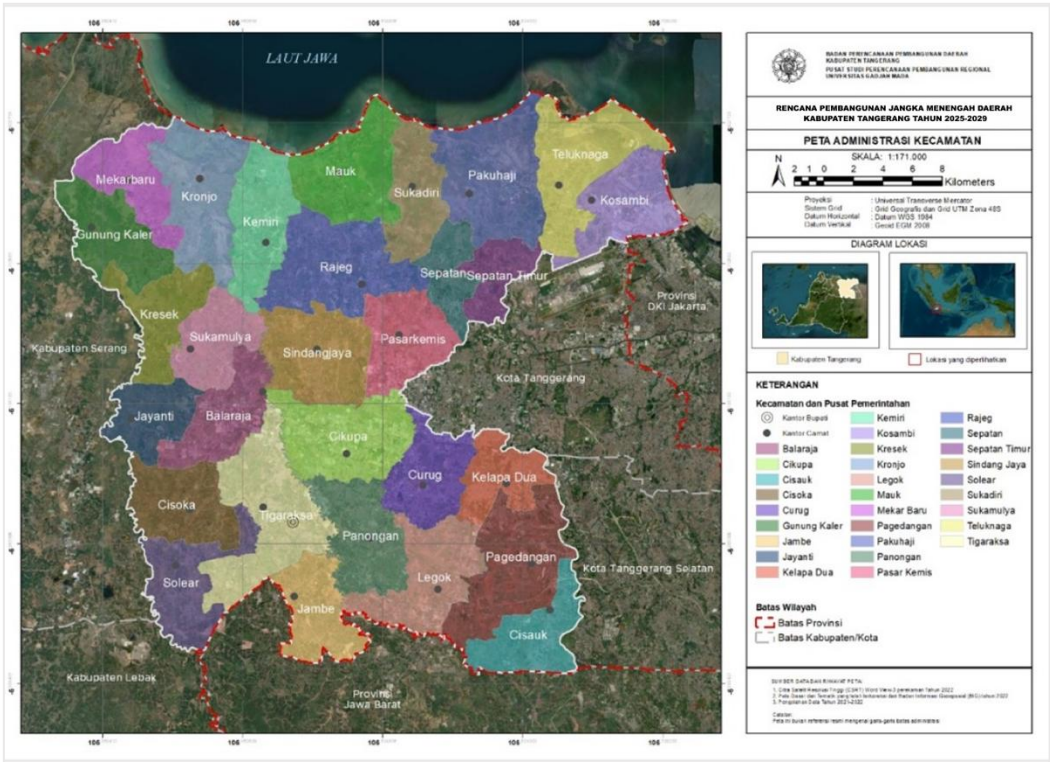
##### 2.1.1.1 POSISI DAN PERAN STRATEGIS DAERAH

###### A. Karakteristik Lokasi

###### 1. Letak Administrasi dan Geografis Wilayah

Wilayah Kabupaten Tangerang berada di koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 6°00'-6°21' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tangerang terletak yang strategis, berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada 9 November 2022, Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah 1.027,76 km<sup>2</sup> dengan Ibukota Kabupaten yaitu Tigaraksa Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Barat : Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak
- Sebelah Timur : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Jakarta Timur



Gambar 2.1  
Peta Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang  
Sumber: ArcMap dan Badan Informasi Geospasial, 2023

Tabel 2.1  
Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang

| No | Kecamatan | Kelurahan                     | Desa                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Balaraja  | Balaraja                      | 1. Cangkudu<br>2. Talagasari<br>3. Tobat<br>4. Sentul<br>5. Gembong<br>6. Sukamurni<br>7. Saga<br>8. Sentul Jaya                                                                         |
| 2  | Jayanti   | -                             | 1. Pangkat<br>2. Pabuaran<br>3. Pasir Muncang<br>4. Sumur Bandung<br>5. Jayanti<br>6. Dangdeur<br>7. Cikande<br>8. Pasir Gintung                                                         |
| 3  | Tigaraksa | 1. Tigaraksa<br>2. Kadu Agung | 1. Pasir Bolang<br>2. Matagara<br>3. Pasir Nangka<br>4. Pete<br>5. Tegalsari<br>6. Pematang<br>7. Cisereh<br>8. Margasari<br>9. Cileles<br>10. Sodong<br>11. Tapos<br>12. Bantar Panjang |
| 4  | Jambe     | -                             | 1. Sukamanah<br>2. Jambe<br>3. Tipar Raya<br>4. Taban<br>5. Daru<br>6. Kutruk<br>7. Ranca Buaya<br>8. Mekarsari<br>9. Ancol Pasir<br>10. Pasir Barat                                     |
| 5  | Cisoka    | -                             | 1. Cisoka<br>2. Caringin<br>3. Selapajang<br>4. Sukatani<br>5. Bojong Loa                                                                                                                |

| No | Kecamatan   | Kelurahan                                                     | Desa                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                               | 6. Cibugel<br>7. Cempaka<br>8. Carenang<br>9. Karang Harja<br>10. Jeungjing                                                                                                                                                            |
|    | Kresek      | -                                                             | 1. Pasir Ampo<br>2. Rancaliat<br>3. Kemuning<br>4. Renged<br>5. Talok<br>6. Koper<br>7. Jengkol<br>8. Patrasana<br>9. Kresek                                                                                                           |
|    | Kronjo      | -                                                             | 1. Kronjo<br>2. Pagenjahan<br>3. Pasir<br>4. Muncung<br>5. Pagedangan Ilir<br>6. Pagedangan udik<br>7. Pasilian<br>8. Bakung<br>9. Blukbuk<br>10. Cirumpak                                                                             |
|    | Mauk        | Mauk Timur                                                    | 1. Mauk Barat<br>2. Tegal Kunir Kidul<br>3. Tegal Kunir Lor<br>4. Sasak<br>5. Gunung Sari<br>6. Kedung Dalem<br>7. Marga Mulya<br>8. Tanjung Anom<br>9. Jatiwaringin<br>10. Banyu Asih<br>11. Ketapang                                 |
|    | Kemiri      | -                                                             | 1. Patramanggala<br>2. Karang Anyar<br>3. Lontar<br>4. Kemiri<br>5. Ranca Labuh<br>6. Klebet<br>7. Legok Suka Maju                                                                                                                     |
|    | Sukadiri    | -                                                             | 1. Sukadiri<br>2. Buaran Jati<br>3. Rawa Kidang<br>4. Pekayon<br>5. Karang Serang<br>6. Kosambi<br>7. Mekar Kondang<br>8. Gintung                                                                                                      |
|    | Rajeg       | Sukatani                                                      | 1. Rajeg<br>2. Rajeg Mulya<br>3. Pangarengan<br>4. Jambu Karya<br>5. Lembangsari<br>6. Sukamanah<br>7. Tanjakan<br>8. Tanjakan Mekar<br>9. Sukasari<br>10. Ranca Bango<br>11. Daon<br>12. Mekarsari                                    |
|    | Pasar Kemis | 1. Sindangsari<br>2. Kutabumi<br>3. Kuta Jaya<br>4. Kuta Baru | 1. Pasar Kemis<br>2. Sukamantri<br>3. Pangadegan<br>4. Gelam Jaya<br>5. Suka Asih                                                                                                                                                      |
|    | Teluknaga   | -                                                             | 1. Teluknaga<br>2. Bojong Renged<br>3. Babakan Asem<br>4. Keboncau<br>5. Pangkalan<br>6. Kmp Melayu Tim<br>7. Kmp Melayu Brt<br>8. Muara<br>9. Lemo<br>10. Tanjung Pasir<br>11. Tegal Angus<br>12. Tanjung Burung<br>13. Kampung Besar |
|    | Kosambi     | 1. Kosambi Barat                                              | 1. Kosambi Timur                                                                                                                                                                                                                       |



| No | Kecamatan  | Kelurahan                                   | Desa                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            | 2. Salembaran Jaya<br>3. Dadap              | 2. Salembaran Jati<br>3. Rawa Rengas<br>4. Rawa Burung<br>5. Cengklong<br>6. Belimbing<br>7. Jati Mulya                                                                                                      |
|    | Pakuhaji   | Pakuhaji                                    | 1. Paku Alam<br>2. Bonisari<br>3. Rawa Boni<br>4. Buaran Mangga<br>5. Buaran Bambu<br>6. Kalibaru<br>7. Kohod<br>8. Kramat<br>9. Sukawali<br>10. Surya Bahari<br>11. Kiara Payung<br>12. Laksana<br>13. Gaga |
|    | Sepatan    | Sepatan                                     | 1. Karet<br>2. Kayu Agung<br>3. Kayu Bongkok<br>4. Pondok Jaya<br>5. Pisangan Jaya<br>6. Mekar Jaya<br>7. Sarakan                                                                                            |
|    | Curug      | 1. Curug Kulon<br>2. Sukabakti<br>3. Binong | 1. Curug Wetan<br>2. Kadu<br>3. Kadu Jaya<br>4. Cukanggalih                                                                                                                                                  |
|    | Cikupa     | 1. Sukamulya<br>2. Bunder                   | 1. Cibadak<br>2. Talaga<br>3. Talagasari<br>4. Dukuh<br>5. Cikupa<br>6. Sukanagara<br>7. Bitung Jaya<br>8. Pasir Gadung<br>9. Sukadamai<br>10. Pasir Jaya<br>11. Budi Mulya<br>12. Bojong                    |
|    | Panongan   | Mekar Bakti                                 | 1. Ranca Iyuh<br>2. Peusar<br>3. Ranca Kalapa<br>4. Serdang Kulon<br>5. Mekar Jaya<br>6. Ciakar<br>7. Panongan                                                                                               |
|    | Legok      | Babakan                                     | 1. Caringin<br>2. Serdang Wetan<br>3. Babat<br>4. Ciangir<br>5. Legok<br>6. Palasari<br>7. Bojongkamal<br>8. Rancagong<br>9. Kemuning<br>10. Cirarab                                                         |
|    | Pagedangan | Medang                                      | 1. Cicalengka<br>2. Pagedangan<br>3. Cijantra<br>4. Lengkong Kulon<br>5. Situ Gadung<br>6. Jatake<br>7. Cihuni<br>8. Kadu Sirung<br>9. Malang Nengah<br>10. Karang Tengah                                    |
|    | Cisauk     | Cisauk                                      | 1. Mekar Wangi<br>2. Suradita<br>3. Sampora<br>4. Dangdang<br>5. Cibogo                                                                                                                                      |
|    | Sukamulya  | -                                           | 1. Benda<br>2. Sukamulya<br>3. Kaliasin<br>4. Buniayu<br>5. Parahu<br>6. Merak<br>7. Bunar                                                                                                                   |

| No | Kecamatan     | Kelurahan                                                                                     | Desa                                                                                                                                          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                               | 8. Kubang                                                                                                                                     |
|    | Kelapa Dua    | 1. Kelapa Dua<br>2. Bencongan<br>3. Bencongan Indah<br>4. Pakulonan Barat<br>5. Bojong Nangka | Curug Sangereng                                                                                                                               |
|    | Sindang Jaya  | -                                                                                             | 1. Sindang Jaya<br>2. Wanakerta<br>3. Sukaharja<br>4. Sindangasih<br>5. Sindangpanon<br>6. Sindangsono<br>7. Badak Anom                       |
|    | Sepatan Timur |                                                                                               | 1. Kedaung Barat<br>2. Lebak Wangi<br>3. Jati Mulya<br>4. Sangiang<br>5. Gempol Sari<br>6. Kampung Kelor<br>7. Pondok Kelor<br>8. Tanah Merah |
|    | Solear        | -                                                                                             | 1. Solear<br>2. Cikuya<br>3. Cikasungka<br>4. Cirendeu<br>5. Cikareo<br>6. Pasanggrihan<br>7. Munjul                                          |
|    | Gunung Kaler  | -                                                                                             | 1. Gunung Kaler<br>2. Sidoko<br>3. Rancagede<br>4. Kedung<br>5. Cipaeh<br>6. Onyam<br>7. Tamiang<br>8. Kandawati<br>9. Cibetok                |
|    | Mekar Baru    | -                                                                                             | 1. Mekar Baru<br>2. Kedaung<br>3. Cijeruk<br>4. Waliwis<br>5. Klutuk<br>6. Jenggut<br>7. Kosambi Dalam<br>8. Gandaria                         |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2-2138 Tahun 2025

## 2. Kondisi Topografi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 0-3%. Wilayah dengan dataran rendah berada di sisi utara Kabupaten Tangerang. Selain itu, terdapat wilayah dataran tinggi yang berada di bagian tengah ke arah selatan dengan kemiringan tanah rata-rata 0-8% menurun ke arah utara. Wilayah dataran rendah di Kabupaten Tangerang didominasi dengan ketinggian wilayah 0-25 mdpl yang tersebar pada bagian wilayah Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan dan Sepatan Timur. Sementara itu, pada sisi utara Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang memiliki garis pantai sepanjang  $\pm 50$  km.

## 3. Geologi

Kabupaten Tangerang memiliki struktur batuan yang terbentuk dari alluvium meliputi lempung, kerikil, dan kerakal serta Tuff Banten (Banten Tuff) yang terdiri atas batu apung dan batu pasir tufaan. Wilayah utara Kabupaten Tangerang adalah daerah dengan keadaan bergelombang lemah, yang termasuk dalam kategori lahan bentukan asal pengendapan atau berjenis aluvial. Secara umum, jenis tanah di wilayah ini terdiri atas aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecokelatan, podsolik kuning, asosiasi podsolik kuning,

asosiasi podsolik kuning dan hidromorf kelabu yang kaya akan zat hara sehingga membuka peluang pengembangan pertanian dan budidaya. Jenis tanah tersebut terbentuk melalui proses pengendapan dalam sungai dan danau di daerah dataran dan cekungan. Selain itu, di wilayah dataran rendah juga dapat ditemukan jenis tanah glei regosol dan sedikit podsolik.

Karakteristik jenis tanah di wilayah Kabupaten Tangerang ini memiliki tekstur tanah yang didominasi oleh tekstur halus dan tekstur sedang. Namun, juga terdapat tekstur kasar seluas 3.553 Ha. Berdasarkan teksturnya, tanah di wilayah ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kawasan budidaya pertanian dan tanaman keras.

4. Klimatologi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan rata-rata temperatur suhu yang cenderung sedang dengan kelembapan yang cukup tinggi. Sementara itu, jumlah curah hujan di wilayah ini berkisar pada 60,10 - 613,00 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 14 sampai 31 hari dalam satu bulan. Adapun jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember.

Tabel 2.2  
Kondisi Curah Hujan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

| Bulan     | Jumlah Curah Hujan<br>(mm/tahun) | Jumlah Hari<br>Hujan (hari) | Penyinaran Matahari<br>(jam) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Januari   | 322,60                           | 21                          | 3,30                         |
| Februari  | 191,00                           | 19                          | 2,50                         |
| Maret     | 149,50                           | 23                          | 3,70                         |
| April     | 483,60                           | 27                          | 3,70                         |
| Mei       | 102,60                           | 14                          | 2,80                         |
| Juni      | 123,40                           | 15                          | 4,00                         |
| Juli      | 88,70                            | 28                          | 3,60                         |
| Agustus   | 234,80                           | 31                          | 5,70                         |
| September | 76,50                            | 30                          | 5,50                         |
| Oktober   | 60,10                            | 31                          | 5,60                         |
| November  | 613,00                           | 30                          | 3,90                         |
| Desember  | 218,90                           | 31                          | 2,00                         |

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata temperatur di wilayah ini berkisar antara 26,46 - 28,22°C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai suhu 37,30°C dan temperatur terendah mencapai 20,40°C.

Tabel 2.3  
Kondisi Suhu Kabupaten Tangerang Tahun 2024

| Bulan     | Suhu (°C) |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
|           | Minimum   | Rata-Rata | Maksimum |
| Januari   | 23,10     | 27,08     | 34,90    |
| Februari  | 22,80     | 27,28     | 35,20    |
| Maret     | 21,40     | 27,05     | 34,40    |
| April     | 23,00     | 27,58     | 35,60    |
| Mei       | 23,40     | 28,22     | 35,40    |
| Juni      | 22,00     | 27,48     | 34,80    |
| Juli      | 19,70     | 26,46     | 34,20    |
| Agustus   | 20,80     | 27,33     | 34,80    |
| September | 21,30     | 27,59     | 36,30    |
| Oktober   | 20,40     | 28,10     | 37,30    |
| November  | 22,30     | 27,26     | 34,90    |
| Desember  | 22,60     | 26,93     | 33,60    |

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Tabel 2.4  
Kondisi Kelembapan Kabupaten Tangerang Tahun 2024

| Bulan     | Kelembapan (%) |           |          |
|-----------|----------------|-----------|----------|
|           | Minimum        | Rata-Rata | Maksimum |
| Januari   | 53,00          | 85,06     | 100,00   |
| Februari  | 45,00          | 85,08     | 99,00    |
| Maret     | 48,00          | 86,23     | 99,00    |
| April     | 42,00          | 86,54     | 99,00    |
| Mei       | 45,00          | 82,52     | 99,00    |
| Juni      | 40,00          | 82,56     | 99,00    |
| Juli      | 55,00          | 81,42     | 98,00    |
| Agustus   | 70,25          | 76,91     | 88,50    |
| September | 66,75          | 77,10     | 92,25    |
| Oktober   | 61,75          | 74,27     | 85,25    |
| November  | 63,00          | 83,15     | 92,75    |
| Desember  | 69,25          | 83,15     | 95,50    |

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan hasil pantauan Stasiun Meteorologi Budiarto Curug tahun 2024, rerata kelembapan di wilayah ini berkisar antara 74,27 – 86,54%. Kelembapan maksimum di wilayah ini mencapai 100% yang terjadi di bulan Januari. Sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Oktober.

5. Hidrologi

Sumber daya air Kabupaten Tangerang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah. Wilayah Kabupaten Tangerang potensi cadangan air tanah yang tinggi, meskipun di Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga, dan Kosambi mengalami intrusi air laut dan eksploitasi untuk kegiatan industri. Sementara itu, sumber air permukaan berasal dari aliran sungai yang memiliki debit relatif tinggi meski berfluktuasi pada musim kemarau. Namun demikian, kualitas air yang berasal dari aliran sungai ini mulai menurun karena pencemaran yang merupakan akibat dari kegiatan sehari-hari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kondisi pencemaran tersebut juga memerlukan perhatian khusus karena tingginya pertumbuhan penduduk dan kegiatan masyarakat dapat berakibat pada peningkatan kebutuhan air.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, Kabupaten Tangerang memiliki kawasan resapan air seluas 1.555 Ha yang meliputi daerah aliran sungai Cidurian, Ciujung, Cubareo, dan Cimanceuri. Keempat DAS tersebut keberadaannya harus dijaga untuk menjaga keseimbangan alam dan ketersediaan air di wilayah ini. Sumber air permukaan di wilayah ini terdiri atas sungai, situ, rawa, ataupun embung.

Wilayah Kabupaten Tangerang dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yang membentuk daerah aliran sungai yang cukup luas. Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Cisadane dengan debit tahunan mencapai 77.644 m<sup>3</sup>/detik, Sungai Cidurian dengan debit maksimum pada 1999 mencapai 21 m<sup>3</sup>/detik, dan Sungai Cimanceuri dengan debit rata-rata hingga 9,3042 L/detik. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 38 sungai kecil yang melintas di wilayah ini. Sumber air lain yang dimanfaatkan adalah situ dan rawa. Kabupaten Tangerang memiliki 6 situ dan 12 rawa yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain itu, terdapat juga sumber air baku permukaan lain, yaitu Embung Gagak dan Embung Cigarukgak. Embung Gagak seluas 86.460 m<sup>2</sup> di Kampung Kebon Cabe Desa Gagak Kecamatan Pakuhaji yang memiliki debit hingga 45.5 L/detik. Sementara itu, Embung Cigarukgak di Desa Kemuning Kecamatan Kresek memiliki luas 1.770.000 m<sup>2</sup> dan mampu menghasilkan air dengan debit hingga 180 L/detik. Kedua embung tersebut memiliki peran sebagai pengelola air hujan dan sumber air di wilayah sekitar.

Berdasarkan data dari hasil kajian RISPAM, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai potensi cadangan air tanah dengan debit 3 -10 L/detik/Km<sup>2</sup>. Selain itu, wilayah ini juga memiliki lima cekungan air bawah tanah (CABT) yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, yaitu potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m<sup>3</sup>/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m<sup>3</sup>/tahun. Namun demikian, akibat penggunaan yang dilakukan oleh pelaku industri, sebagian wilayah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga cadangan air di wilayah Kabupaten Tangerang.

6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah irigasi sebesar 50.709,86 Ha atau 49,52%. Sementara itu, wilayah terbangun di Kabupaten Tangerang didominasi oleh kawasan permukiman, baik permukiman perkotaan maupun permukiman perkotaan seluas 18.426,6 Ha atau 18%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menyebabkan tingginya alih fungsi lahan di wilayah ini. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri utamanya menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

Tabel 2.5  
Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang

| No | Guna Lahan                      | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|----|---------------------------------|-----------|----------------|
| 1  | Persawahan                      | 57.431    | 56,08          |
| 2  | Kebun Campuran                  | 16.835    | 16,44          |
| 3  | Perkampungan                    | 14.874    | 14,52          |
| 4  | Perairan Darat                  | 5.919     | 5,78           |
| 5  | Perkebunan                      | 2.183     | 2,13           |
| 6  | Tegalan/Ladang                  | 2.049     | 2              |
| 7  | Jasa, Industri, dan Pergudangan | 1.785     | 1,74           |
| 8  | Sungai/Danau                    | 1.126     | 1,1            |
| 9  | Pertambangan                    | 111       | 0,11           |
| 10 | Tanah Terbuka                   | 93        | 0,09           |
| 11 | Padang                          | 8         | 0,01           |

Sumber: RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kawasan lindung dan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki peruntukan preservasi. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung yang berupa hutan bakau di sisi pantai utara seluas 1.555,32 Ha, kawasan resapan air seluas 1.555 Ha, kawasan sempadan pantai sebesar 325 Ha, kawasan sempadan sungai dengan luas 529 Ha, dan kawasan sekitar danau dan situ seluas 310 Ha. Masing-masing guna lahan tersebut memiliki peranan dan ketentuan pemanfaatan tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.

Hutan lindung di Kabupaten Tangerang berlokasi di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi. Keberadaan hutan lindung ini pengelolaan dan pengembangannya diatur dalam RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, salah satu program yang dikembangkan adalah rehabilitasi dan peningkatan fungsi-fungsi lindung pada Kawasan Peruntukan Lindung.

2) Kawasan Budidaya

Kabupaten Tangerang memiliki kawasan budidaya yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.

B. Peran Strategis Daerah

Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Banten berada pada posisi geostrategis bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai lalu lintas perdagangan nasional dan internasional sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002. Dalam cakupan lebih makro, posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa. Hal ini selaras dengan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Tangerang yaitu Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan yang berpeluang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah.

Kabupaten Tangerang memegang peran strategis dalam kontribusi infrastruktur terhadap wilayah sekitarnya, khususnya bagi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan secara lebih luas Provinsi Banten serta Jabodetabek. Peran ini didorong oleh posisi geografis Kabupaten Tangerang sebagai pintu gerbang Jakarta dan pusat pertumbuhan ekonomi. Selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pembangunan kewilayahan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian Aglomerasi Jabodetabek dan Provinsi Banten, yaitu Pengembangan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor & Jakarta Global City Urban Tourism* (Central-South), *Northern Coast New Economic Hub & Jakarta Global City Urban Tourism* (North), serta Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten. Pembangunan kawasan strategis tersebut ditunjang dengan pengembangan infrastruktur terpadu yaitu Bandara Soekarno Hatta, Jalan Tol Merak-Jakarta, akses *double track* kereta api, MRT Balaraja-Cikarang, dan lain sebagainya. Hal tersebut menciptakan interaksi antar wilayah yang dapat menumbuhkan fenomena interdependensi. Fenomena tersebut mampu memicu pertumbuhan wilayah, *backwash effect*, dan *trickling down* yang membentuk hubungan sinergis

antar daerah. Kabupaten Tangerang tumbuh cepat melalui penyediaan infrastruktur, pusat kegiatan, dan permukiman. Maka dari itu, posisi strategis Kabupaten Tangerang menjadi potensi *Economic Engine* pembangunan jangka panjang Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang dengan segala dinamika pembangunan dan industrinya, memegang peran strategis yang signifikan dalam kontribusi lingkungan hidup terhadap wilayah sekitarnya. Sebagai salah satu pusat industri dan permukiman padat di Jabodetabek, Kabupaten Tangerang menghasilkan volume limbah dan sampah yang sangat besar. Peran strategisnya terletak pada upaya pengelolaan limbah ini agar tidak mencemari wilayah sekitarnya dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, termasuk tempat pemrosesan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan juga inisiatif pengurangan sampah dari sumbernya. Selain itu, melalui penerapan teknologi pengolahan limbah industri dan pengawasan ketat untuk mencegah pencemaran sungai dan udara yang dapat meluas dampaknya hingga ke daerah hilir dan sekitarnya. Sungai Cisadane sebagai salah satu sumber air baku Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, sangat penting diperhatikan dalam upaya pencegahan pencemaran dari limbah domestik dan industri. Pengelolaan tata air, normalisasi sungai, dan pemeliharaan situ (danau kecil) berkontribusi pada sistem pengendalian banjir, apalagi juga drainase dan serapan air di Kabupaten Tangerang buruk, maka risiko banjir di daerah hilir dan sekitarnya akan meningkat. Peran strategis lainnya dalam pelestarian ekosistem pesisir di bagian utara Kabupaten Tangerang juga sangat strategis. Konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Tangerang penting untuk mencegah abrasi pantai, menjaga keanekaragaman hayati laut, dan menyediakan habitat alami yang juga berfungsi sebagai penyangga ekologis bagi ekosistem pesisir regional. Dengan demikian, apa pun yang terjadi di Kabupaten Tangerang, baik positif maupun negatif dalam hal pengelolaan lingkungan, akan memiliki efek berantai dan signifikan terhadap kualitas lingkungan di wilayah sekitarnya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas batas administrasi dalam isu-isu lingkungan.

#### 2.1.1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang diatur dalam dokumen RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031, meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan cagar budaya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan wilayah yang terdiri atas kawasan hutan lindung dengan luas 1.555,32 Ha yang meliputi Kecamatan Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Kecamatan, dan Kosambi serta kawasan resapan air dengan luas 1.555 Ha yang berada di hulu DAS Cidurian, Ciujung, Cibareo, dan Cimanceuri. Sementara itu, kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai (325 Ha), sempadan sungai (559 Ha), dan kawasan sekitar situ/danau atau waduk (310 Ha). Adapun kawasan cagar budaya tersebar dalam 19 lokasi.

Kawasan peruntukan budidaya di Kabupaten Tangerang terdiri atas 8 (delapan) kawasan yang meliputi kawasan pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, pertahanan dan keamanan, serta transportasi. Kawasan pertanian terdiri atas 14.094 Ha kawasan tanaman pangan dan 49 Ha kawasan peternakan. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap dan 151 Ha kawasan perikanan budidaya. Selanjutnya, kawasan pertambangan dan



energi terdiri atas kawasan pembangkitan tenaga listrik seluas 95 Ha. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.878 Ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Adapun peruntukan pariwisata Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 3 yakni pariwisata alam, budaya, dan buatan. Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 2 yakni kawasan permukiman perkotaan dengan luas 66.543 Ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 2.900 Ha.

Meskipun terjadi konversi lahan yang masif, beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang, terutama di bagian selatan dan barat, masih memiliki potensi pertanian yang dapat dipertahankan dan dikembangkan. Sementara itu, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang sangat strategis dan memiliki berbagai potensi pengembangan wilayah. Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang, wilayah Kecamatan Jambe dan Kecamatan Mauk direncanakan sebagai kawasan strategis *dryport* dengan kegiatan utama meliputi transportasi dan pergudangan. Selain itu, kawasan reklamasi seluas 9.000 Ha di pantai utara direncanakan dikembangkan sebagai kawasan perumahan perkotaan, pelabuhan terpadu, dan industri.

Dari gambaran potensi sumber daya alam di atas, meskipun Kabupaten Tangerang lekat dengan citra industri dan urbanisasi, namun memiliki keunggulan komparatif untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

#### 2.1.1.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

##### A. Kapasitas D3TLH Penyediaan Pangan

Daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan dalam pemanfaatan ruang difokuskan pada kawasan budidaya pertanian pangan. Ketersediaan lahan menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pangan, yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan menjadi non-pertanian, serta peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi yang mengurangi kualitas lingkungan. Analisis daya dukung dan daya tampung pangan dilakukan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta status ambang batas daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah. Hasil analisis menunjukkan Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan daya dukung lahan, dengan 97.944,52 Ha atau 96% lahan terlampaui yang menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan pangan dan kebutuhan penduduk.

##### B. Daya Dukung Daya Tampung Air

Daya dukung dan daya tampung air ini ditentukan oleh kinerja jasa lingkungan hidup yang mencakup bentang alam, vegetasi alami, dan penutupan lahan. Daya dukung dan daya tampung air dipengaruhi oleh ketersediaan dan kebutuhan air. Saat ini, ketersediaan air di wilayah tersebut mencapai 1.123.896.242,78 m<sup>3</sup>/tahun, sementara kebutuhan air mencapai 1.797.028.714,27 m<sup>3</sup>/tahun. Ketersediaan maupun kemampuan lahan dalam penyediaan air didominasi oleh lahan yang telah terlampaui seluas 84.338,35 hektar atau 83% dari total luas daerah yang menunjukkan lahan tersebut berada dalam kategori krisis air, terutama di wilayah utara dan barat.

##### C. Jasa Ekosistem Lingkungan Hidup

##### 1. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir

Kondisi pengaturan tata air dan pengendalian banjir di Kabupaten Tangerang didominasi oleh jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir yang rendah sebesar 57% (2.785 ha). Sebanyak 34% luas lahan (1.688 ha)

dikategorikan golongan kelas sangat tinggi, dan kurang dari 1% (7 ha) merupakan kelas sedang.

## 2. Jasa Ekosistem Pengolahan dan Penguraian Limbah

Kondisi pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Tangerang didominasi jasa ekosistem pada kelas rendah sebesar 54% (2.657 ha). Sementara itu, sebesar 1% atau 45 ha lahan, merupakan jasa ekosistem dengan kelas sangat rendah.

Dominasi jasa ekosistem di kelas rendah tercermin pada keberadaan TPA Jatiwaringin yang sebelumnya menjadi lokasi pemrosesan limbah domestik di Kabupaten Tangerang. Namun, pada bulan Mei 2025, TPA ini ditutup secara permanen oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena belum dilakukannya peralihan dari sistem *open dumping*. Praktik *open dumping* menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk temuan kandungan logam berat yang melebihi ambang batas di hulu Kali Cirarab. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah membutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan.

## 3. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Dominasi penyediaan air bersih di Kabupaten Tangerang saat ini berada pada kelas sangat rendah dengan persentase 57% (2.811 ha), sementara penyediaan air bersih kelas sangat tinggi hanya mencapai 4% dari luas wilayah (186 ha).

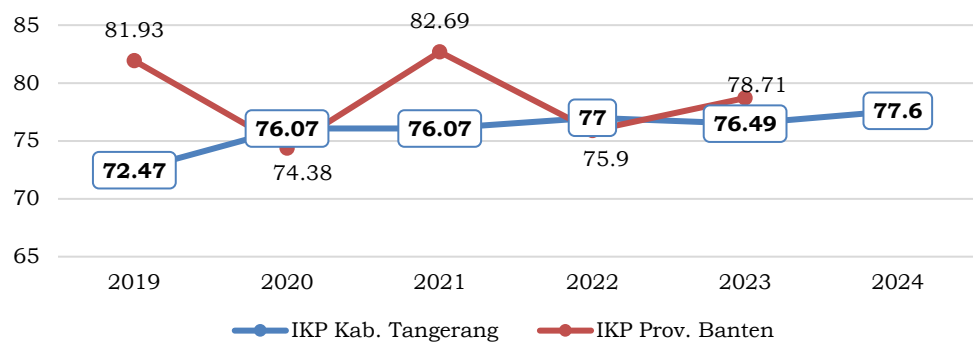
## 4. Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana

Perlindungan dan pencegahan bencana di Kabupaten Tangerang didominasi oleh wilayah dengan kelas rendah dan tinggi. Jasa ekosistem pada kelas rendah mencapai 54% (2.653 ha) dan 27% (1.308 ha) pada kelas tinggi.

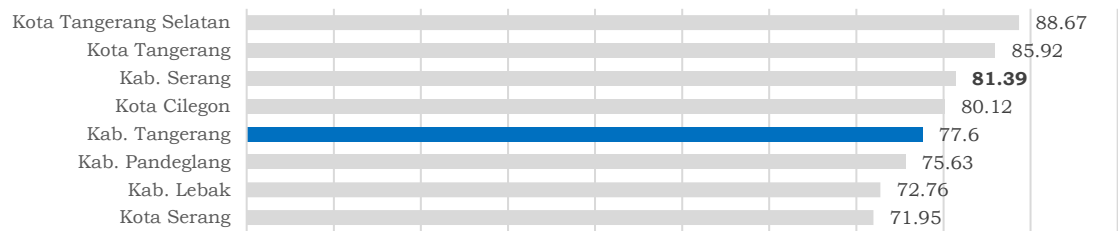
### 2.1.1.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN

#### A) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di wilayah tertentu. IKP terdiri atas ketersediaan, keterjangkauan/aksesibilitas pangan, dan pemanfaatan pangan.



Gambar 2.2  
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan

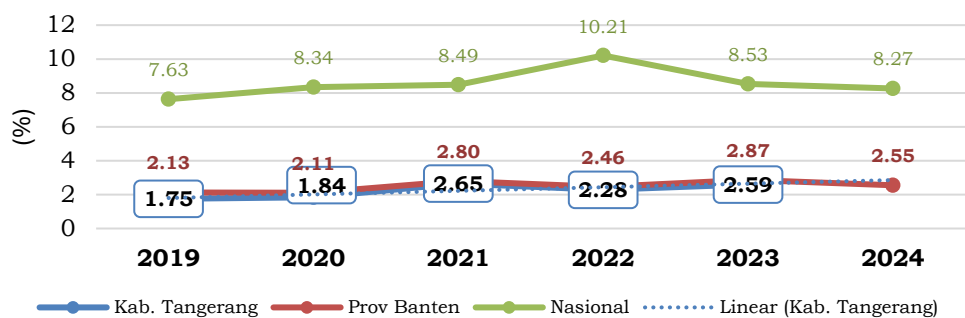


Gambar 2.3  
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Publikasi Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023

Capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 76,49 dan capaian ini lebih rendah dibandingkan IKP Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKP Kabupaten Tangerang tahun 2024 menempati peringkat ke-empat terendah. Di tahun 2024, capaian tersebut meningkat menjadi sebesar 77,6. Dalam enam tahun terakhir, IKP Kabupaten Tangerang cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan ketahanan pangan Kabupaten Tangerang semakin baik meski sempat stagnan pada tahun 2021.

B) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.



Gambar 2.4  
Perbandingan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Banten (diolah)

Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 2,59 dan capaian ini lebih baik dibandingkan Provinsi Banten (2,87) dan nasional (8,27). Akan tetapi, merujuk pada tren dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (semakin rendah/buruk). Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kecukupan pangan yang bergizi dan berkelanjutan.

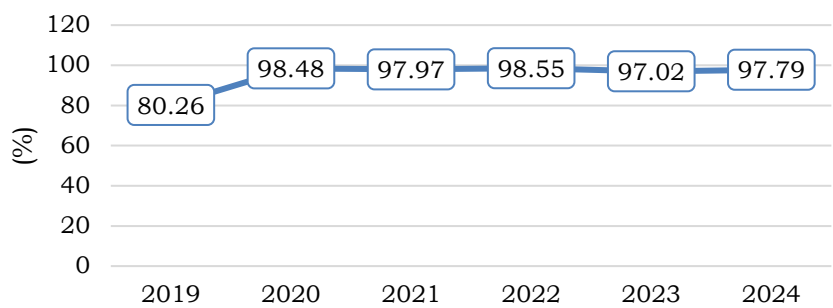
C) Penggunaan Listrik per Kapita  
Penggunaan listrik per kapita menunjukkan konsumsi listrik dari aktivitas perekonomian, aktivitas rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, pelanggan listrik di Kabupaten Tangerang meningkat dengan rata-rata 11,9% per tahun. Hal ini selaras dengan penggunaan listrik yang juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk optimalisasi pemenuhan listrik serta transisi untuk penggunaan EBT sebagai sumber energi listrik alternatif di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.6  
Penggunaan Listrik per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Tahun | Penggunaan Listrik (KWh)* | Pelanggan Listrik | Penggunaan Listrik per Kapita (KWh) |
|-------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2019  | 6.114.278.154,0           | 917.146,0         | 1.666,7                             |
| 2020  | 5.851.133.660,0           | 969.308,0         | 1.509,1                             |
| 2021  | 6.430.657.471,0           | 1.024.463,0       | 1.569,3                             |
| 2022  | 6.824.099.764,0           | 1.082.241,0       | 1.576,4                             |
| 2023  | 8.557.188.168,2           | 1.414.477,0       | 1.512,4                             |
| 2024  | 4,198,706,165             | 1,423,968         | 11.794                              |

Keterangan  
\*) Penggunaan Listrik (KWh) = Listrik yang Terjual (KWh) - Susut Hilang (KWh)  
\*\*) Penggunaan Listrik per Kapita (KWH) = Pengguna Listrik (KWh) / [Pelanggan Listrik ( x4 dengan asumsi 1 keluarga terdiri atas 4 jiwa)]  
Sumber : BPS Provinsi Banten dan Olahan Penyusun (2024)

D) Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan  
Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Penyediaan air di Kabupaten Tangerang terukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak. Persentase rumah tangga berakses air minum layak terus meningkat drastis pada tahun 2020. Sedangkan pada 2020-2024 persentase tersebut cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang telah terlayani air minum layak, meski terdapat beberapa rumah tangga yang belum berakses air minum layak.

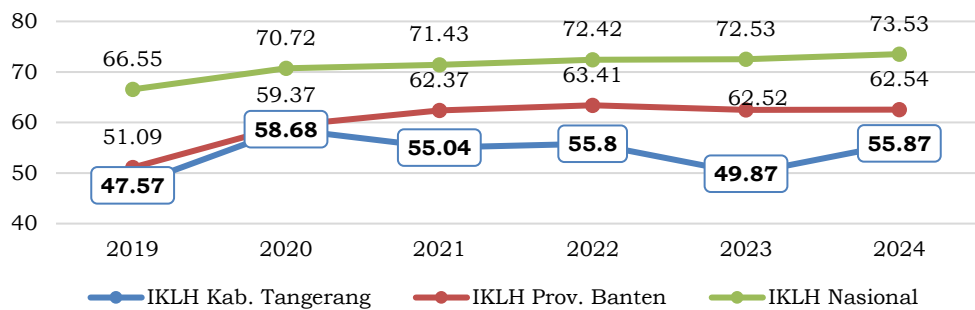


Gambar 2.5  
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)*

2.1.1.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

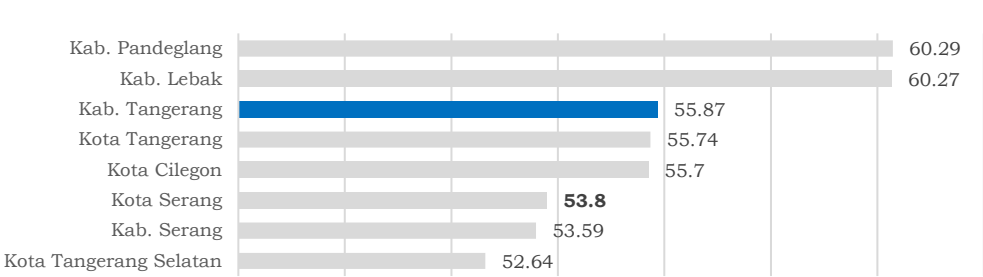
A) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini digunakan secara nasional dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Komponen IKLH ini meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).



*\*Menggunakan metode perhitungan lama*

Gambar 2.6  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup\* Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional  
Tahun 2019-2024  
*Sumber: Buku IKLH Menteri KLHK 2015, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022, RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dan Tangerang Satu Data (diolah)*



Gambar 2.7  
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Perhitungan Baru) Kabupaten/ Kota di  
Provinsi Banten Tahun 2024  
*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

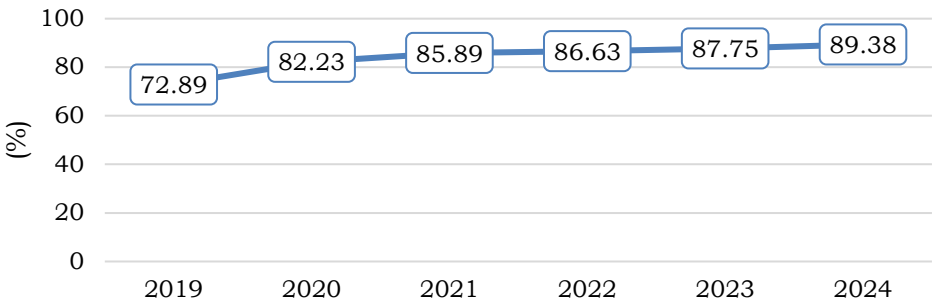
Pada tahun 2023, IKLH memiliki komponen perhitungan baru, yaitu (1) pada IKU berupa penambahan parameter PM 2.5; (2) pada IKA berupa perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-NA; serta (3) pada IKL berupa perubahan klasifikasi tutupan lahan dan memasukkan

faktor koreksi lahan gambut. Dengan konversi rumus baru, capaian IKLH Kabupaten Tangerang tahun 2024 adalah 55,87 dengan sub komponen IKU sebesar 73,33; IKA sebesar 55,69; serta IKL sebesar 23,86. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian IKLH Kabupaten Tangerang termasuk dalam ketiga terendah. Berdasarkan dokumen Profil IKLH, dijabarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan capaian IKLH Kabupaten Tangerang yaitu peningkatan pemantauan kualitas udara, meningkatkan pelayanan IPAL domestik dan industri, pemeliharaan tanaman mangrove, dan lain sebagainya.

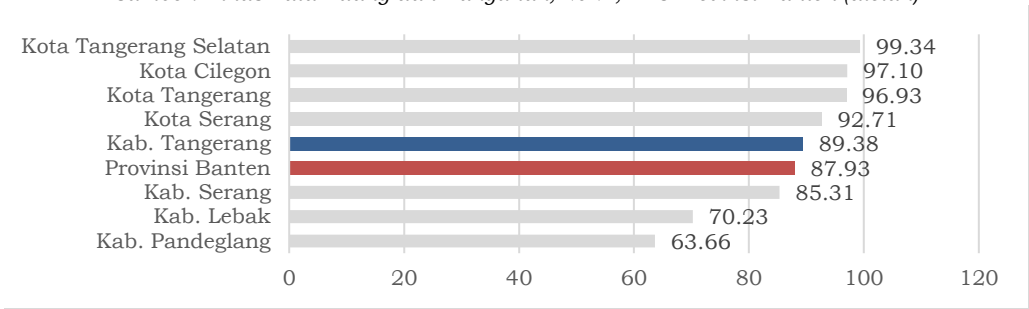
Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketahanan terhadap ancaman krisis iklim. Ancaman krisis iklim menjadi hal penting dalam arahan pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan berita menunjukkan ancaman krisis iklim di Kabupaten Tangerang yaitu El nino musim kemarau panjang dan kenaikan muka air laut di wilayah pesisir Tangerang.

B) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki akses sanitasi yang baik. Pada tahun 2024, persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 89,38%. Pada kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan yang mengindikasikan kualitas kebersihan di wilayah ini semakin meningkat. Meskipun begitu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, capaian Kabupaten Tangerang terbilang masih cukup rendah, yaitu berada di posisi 4 terendah.



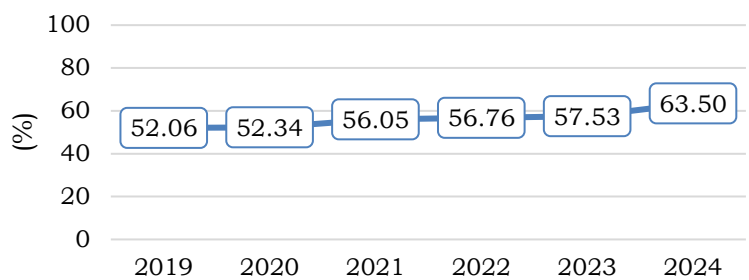
Gambar 2.8  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024; BPS Provinsi Banten (diolah)



Gambar 2.9  
Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

C) Timbulan Sampah yang Terkelola

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2019-2024), tren menunjukkan peningkatan persentase timbulan sampah yang terkelola di Kabupaten Tangerang dan pada tahun 2023 mencapai 57,53% dan capaian 2024 sebesar 63,50%. Akan tetapi, capaian ini masih jauh dari yang diharapkan 100% timbulan sampah yang terkelola.



Gambar 2.10  
Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

Tabel 2.7  
Fasilitas Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tangerang

| Fasilitas Pengelolaan Sampah | Jumlah (unit) | Timbulan Sampah yang Dikelola (ton/tahun) |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Bank Sampah                  | 102           | 732,46                                    |
| TPST 3R                      | 36            | 22.985,58                                 |
| TPA (TPA Jatiwaringin)       | 1             | 498.590,00                                |
| Jumlah                       |               | 522.308,04                                |

Sumber: Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dalam dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Tangerang dijelaskan bahwa rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah (tahun 2017-2019) stagnan pada angka 941 km<sup>2</sup>. Sementara itu dari sisi armada sampah yang dapat mengangkut 2.925 ton/hari atau 51% dari total sampah yang ada. Maka dari itu diperlukan langkah dalam penanganan sampah dari tingkat rumah tangga, TPS 3R, hingga layanan persampahan skala regional yaitu TPA.

2.1.1.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

3) Kebencanaan

Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, terutama terkait gempa bumi. Selain itu terdapat beberapa potensi kebencanaan seperti tsunami, banjir, dan kekeringan. Gempa bumi berpotensi terjadi di seluruh wilayah, sementara tsunami mengancam pesisir pantai utara, seperti Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk. Banjir rob dan kekeringan juga menjadi ancaman, dipicu oleh perubahan siklus iklim global. Berdasarkan data InaRisk 2023, tingkat kebencanaan di Kabupaten Tangerang dikategorikan dalam tiga kelas bahaya: rendah, sedang, dan tinggi, yang mencakup bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan, likuefaksi, tsunami, abrasi, dan sebaran multibahaya.

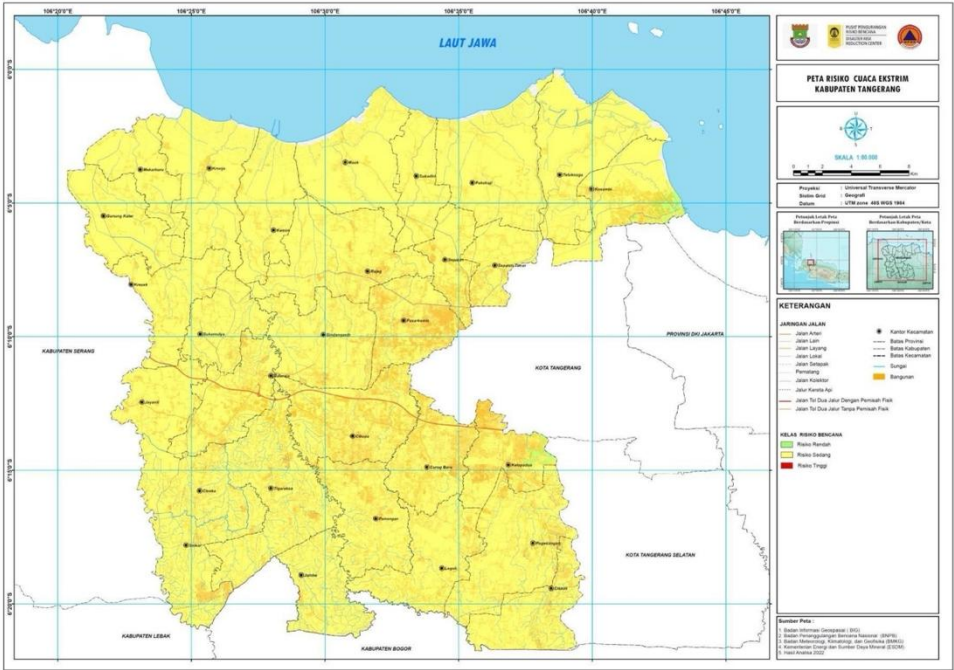
- Bencana Banjir

Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya banjir dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa sebagian besar wilayah memiliki dampak dan risiko bahaya banjir dengan klasifikasi tinggi seluas 34.891,52 hektar yang cenderung berdampak pada kawasan permukiman perkotaan mencapai 17.372,71 hektar. Selain itu bahaya banjir juga berdampak pada kawasan tanaman pangan dan kawasan peruntukan industri.





perkotaan akan sangat terdampak dari adanya potensi bahaya cuaca ekstrem dengan luas 65.928,34 hektar, diikuti kawasan peruntukan industri dan kawasan tanaman pangan.



Gambar 2. 13  
Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Tangerang  
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

- **Bencana Gelombang Ekstrem**  
Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir di wilayah utara yang berpotensi mengalami bahaya gelombang ekstrem. Dampak dari potensi gelombang ekstrem dan abrasi paling besar terjadi di kawasan lindung dengan klasifikasi rendah yang luasnya mencapai 291,66 hektar, sedangkan dampak tertinggi terdapat di kawasan permukiman perdesaan seluas 83,92 hektar.

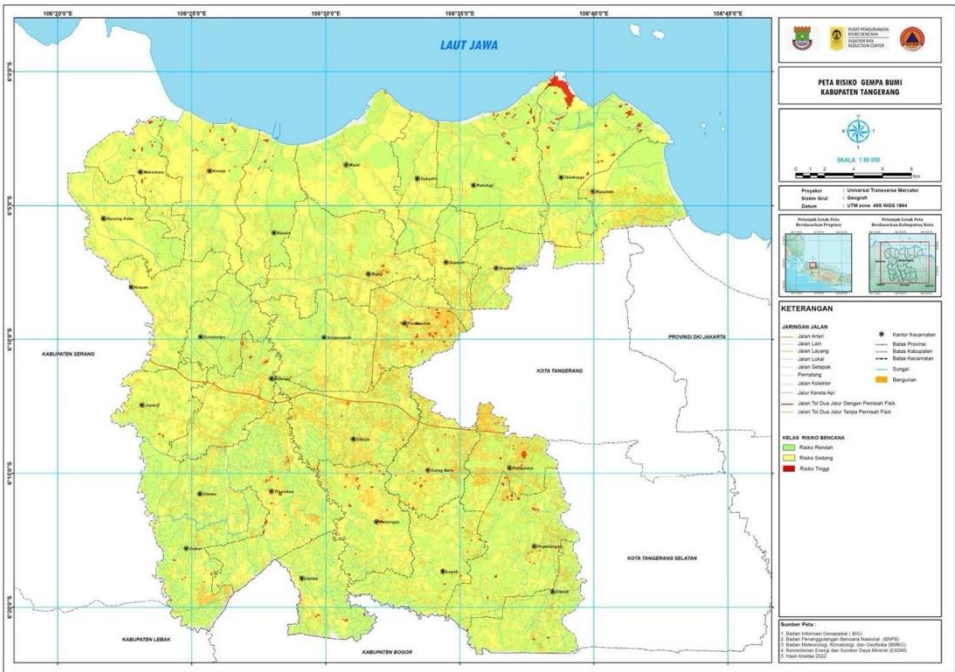


Gambar 2. 14  
Peta Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Tangerang  
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

- **Bencana Gempa Bumi**  
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya gempa bumi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa wilayah yang

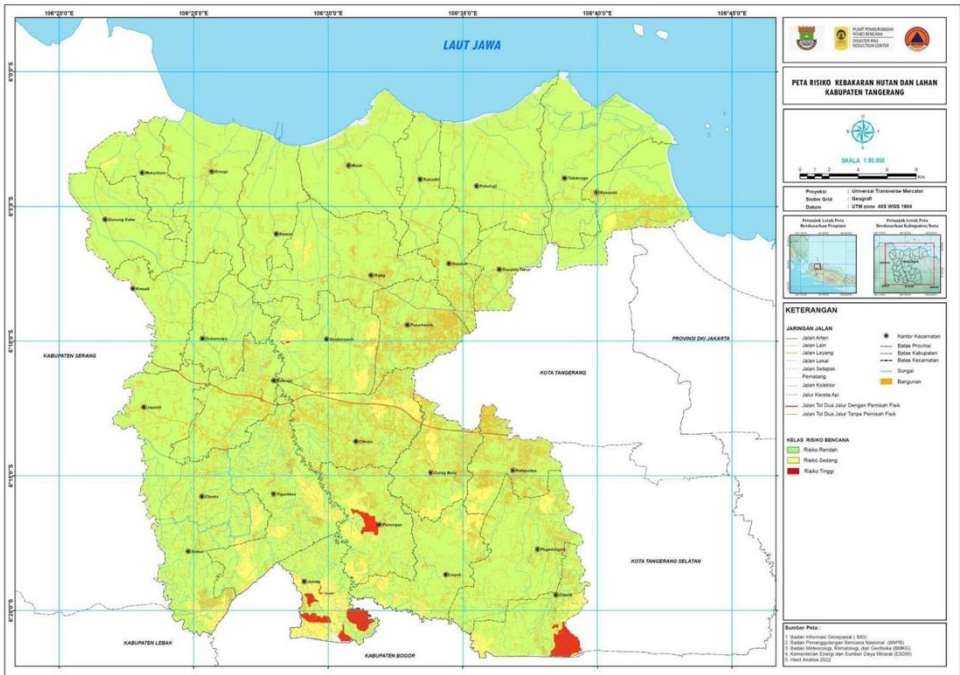


terdampak dengan status bahaya gempa bumi tinggi memiliki luasan paling kecil. Sebagian besar berada dalam kondisi bahaya gempa bumi rendah hingga sedang, terutama kawasan permukiman perkotaan yang memiliki klasifikasi sedang mencakup area seluas 48.136,67 hektar.



Gambar 2. 15  
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi  
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

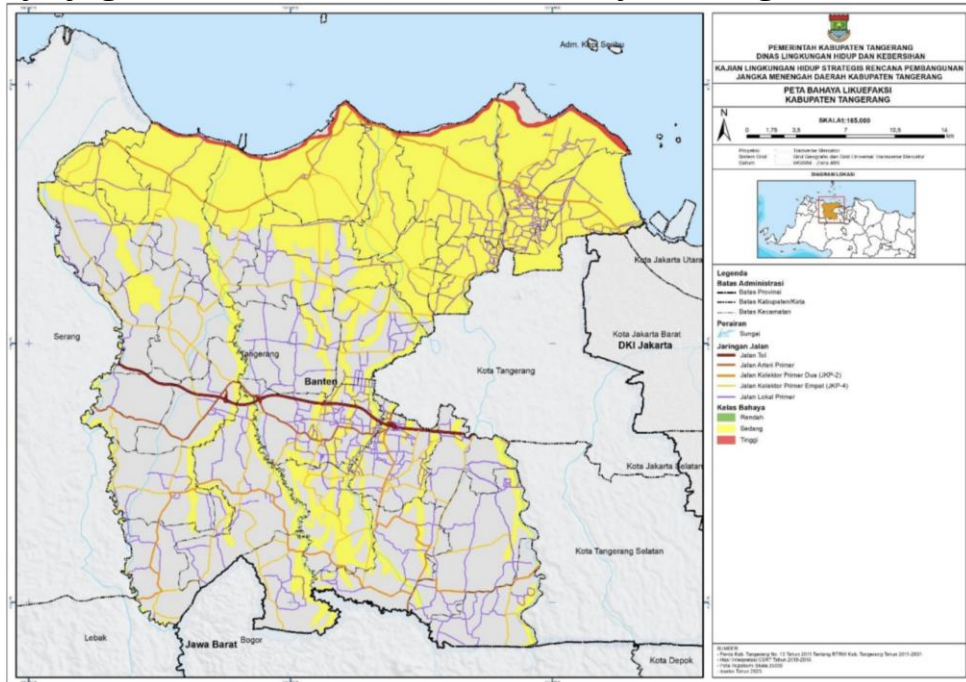
- **Bencana Kebakaran Hutan**  
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya kebakaran hutan dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan industri memiliki nilai bahaya tinggi mencapai 8,76, sementara sebagian besar area yang terdampak berada pada klasifikasi bahaya rendah hingga sedang, termasuk kawasan permukiman dan perkotaan.



Gambar 2. 16  
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tangerang  
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

- Bencana Likuefaksi

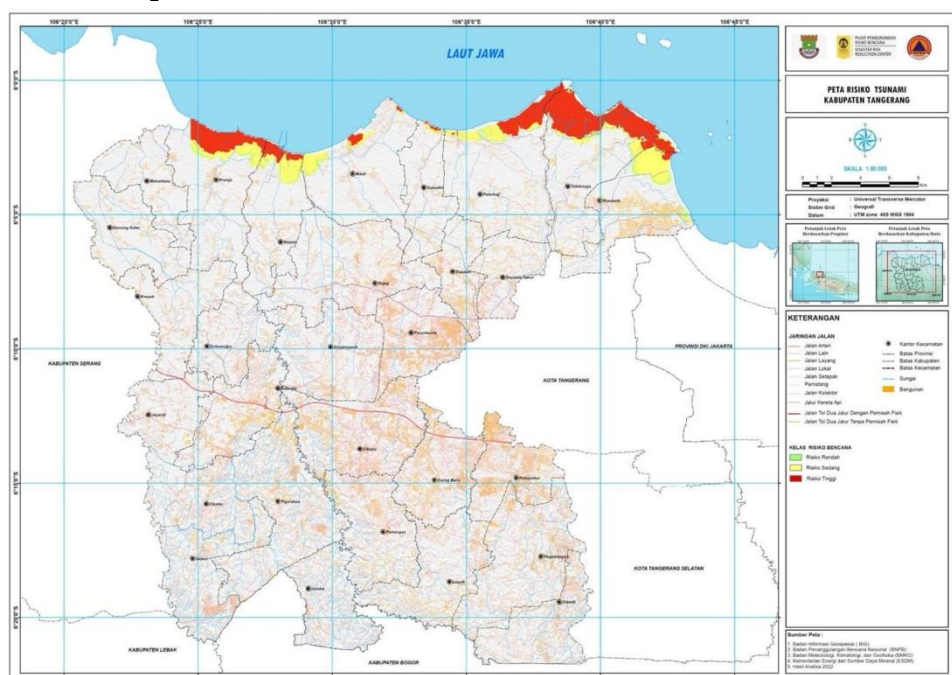
Berdasarkan hasil *overlay* peta bahaya likuefaksi dengan pola ruang Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa kawasan permukiman perkotaan memiliki luas terbesar dalam klasifikasi bahaya sedang, yaitu 25.378,40 hektar. Sementara itu, sebagian besar kawasan lainnya juga berada dalam klasifikasi bahaya sedang.



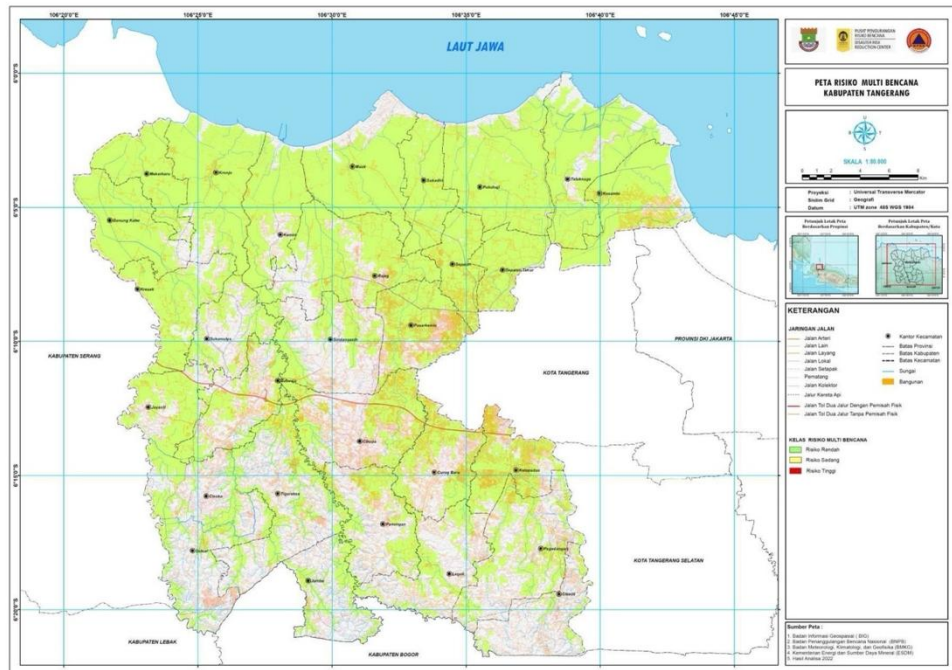
Gambar 2. 17  
Peta Bahaya Bencana Likuefaksi Kabupaten Tangerang  
*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029*

- Bencana Tsunami

Secara administratif, wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kawasan pesisir dengan risiko tsunami yang relatif rendah. Berdasarkan analisis, kawasan yang terdampak memiliki klasifikasi indeks bahaya rendah. Namun, ada beberapa area yang terkena dampak cukup luas, seperti kawasan hutan lindung seluas 341,79 hektar dan kawasan permukiman perkotaan seluas 264,55 hektar.



Gambar 2. 18  
Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Tangerang  
*Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025*



Gambar 2. 19  
Peta Risiko Multi Bencana Kabupaten Tangerang  
Sumber: BPBD Kabupaten Tangerang, 2025

### 1) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

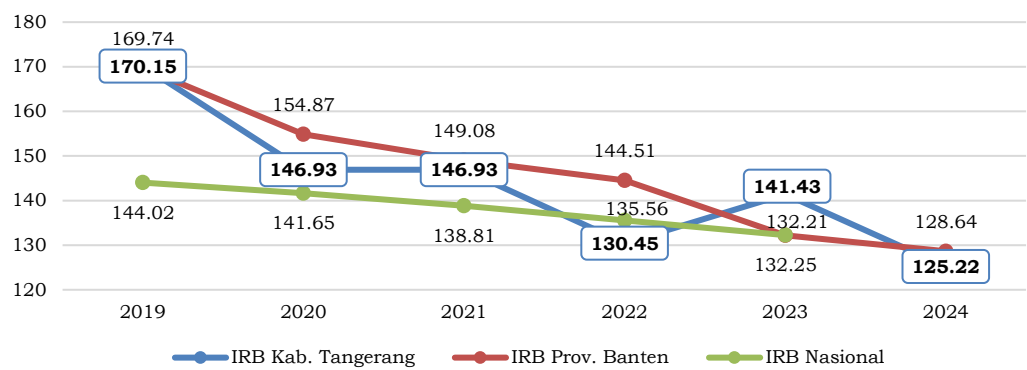
Pembangunan yang terus berkembang di Kabupaten Tangerang akan mempengaruhi lingkungan, terutama terkait dengan risiko bencana sehingga diperlukan *overlay* bahaya bencana dengan pola dan struktur ruang. Saat ini, perkembangan pola ruang di Kabupaten Tangerang akan sangat dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, dan beberapa proyek pembangunan diproyeksikan akan terpengaruh oleh perubahan dalam pola ruang.

Selain itu, bencana kebakaran sering terjadi di kawasan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan yang tidak tertata. Bencana angin puting beliung kerap melanda Kecamatan Kronjo, Gunung Kaler, Kresek, Jayanti, Solear, Mauk, Sukadiri, Panongan, Cisoka, Tigaraksa, Jambe, dan Legok. Selain itu, ada wilayah yang rawan bencana banjir di Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Di bagian utara Kabupaten Tangerang, terdapat area yang rentan terhadap erosi atau abrasi akibat gelombang laut, seperti di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, dan Kronjo.

### 2) Indeks Risiko Bencana

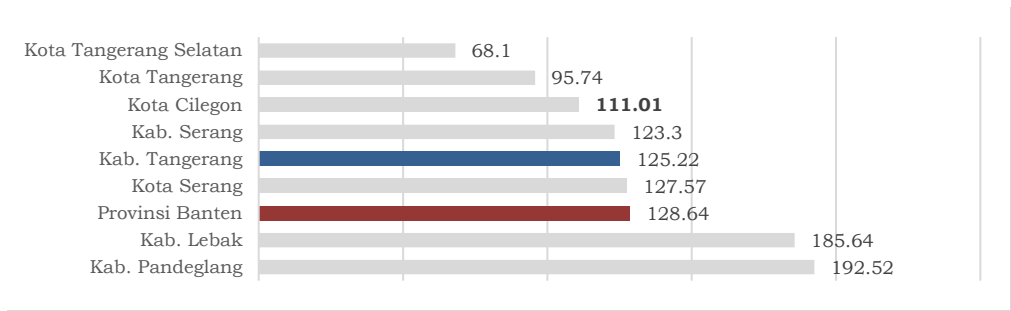
Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang memiliki kerawanan bencana pada beberapa jenis bencana. Bencana kebakaran rawan terjadi pada kawasan peruntukan industri, rumah kontrakan, pasar, dan perumahan tidak tertata. Bencana angin puting beliung juga rawan terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, banjir dapat diakibatkan oleh pasang surut di kawasan pesisir dan banjir akibat luapan aliran sungai Kecamatan Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Pasar Kemis, dan Kresek. Sedangkan bencana kekeringan juga rawan terjadi pada musim kemarau.





Gambar 2.20  
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional  
Tahun 2019-2024

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Gambar 2.21  
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2024, Kabupaten Tangerang memiliki indeks mencapai 125,22 yang tergolong ‘Sedang’ dan capaian tersebut lebih baik IRB Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki nilai indeks tertinggi keempat. Sementara itu, capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebesar 0,74 dalam kategori “Sedang”. Dalam lima tahun terakhir, IRB dan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tangerang menunjukkan tren perbaikan yang mengindikasikan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun demikian, ancaman bencana akibat perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Tangerang.

2.1.1.7 ASPEK DEMOGRAFI

Dinamika perubahan penduduk berubah secara pesat dan perlu dianalisis untuk mengetahui kondisi saat ini dan yang akan datang. Dalam analisis ini memuat struktur, distribusi, dan proyeksi penduduk Kabupaten Tangerang.

A) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 3.459.706 jiwa penduduk yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Pasar Kemis merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi dari wilayah lain yakni dengan penduduk 258.477 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Mekar Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 44.942 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara umum, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan yang terjadi secara signifikan dengan laju pertumbuhan 1,93% per tahun dari tahun 2020-2024.

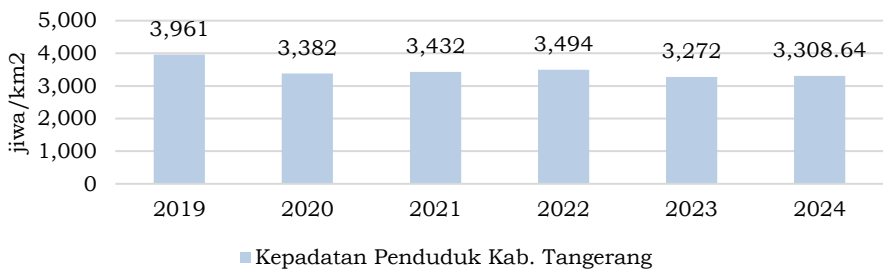


Gambar 2.22  
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

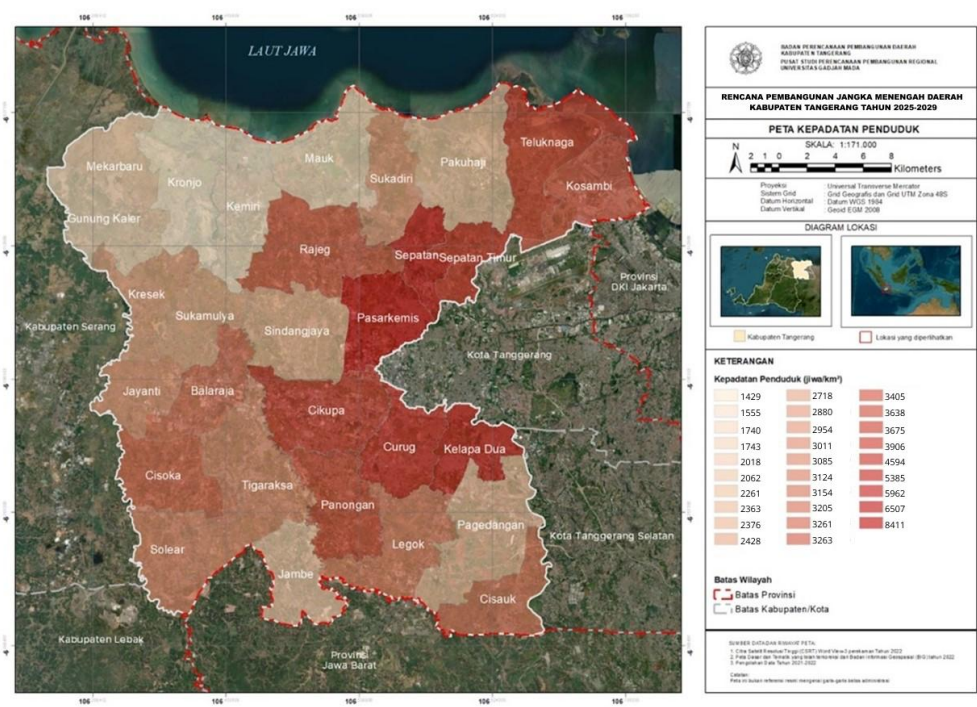
Fluktuasi penduduk di Kabupaten Tangerang merupakan cerminan dari dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di wilayah peyangga. Pergerakan ini tidak hanya disebabkan karena faktor alami seperti kelahiran dan kematian, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh migrasi (perpindahan penduduk) dan faktor eksternal. Pandemi covid-19 juga memiliki peran yang signifikan terhadap dinamika penduduk. Sebagai bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek, Kabupaten Tangerang merupakan daerah tujuan utama bagi pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.

B)      Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Kabupaten Tangerang memiliki kepadatan penduduk mencapai 3.308,64 jiwa/km<sup>2</sup> yang berarti tiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh kurang lebih 3.309 jiwa penduduk. Kecamatan terpadat di wilayah ini adalah Kecamatan Pasar Kemis (8.411 jiwa/km<sup>2</sup>), Kecamatan Kelapa Dua (6.507 jiwa/Km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Sepatan (5.962 jiwa/km<sup>2</sup>). Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kemiri dengan kepadatan 1.555 jiwa/km<sup>2</sup>.



Gambar 2.23  
Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.24

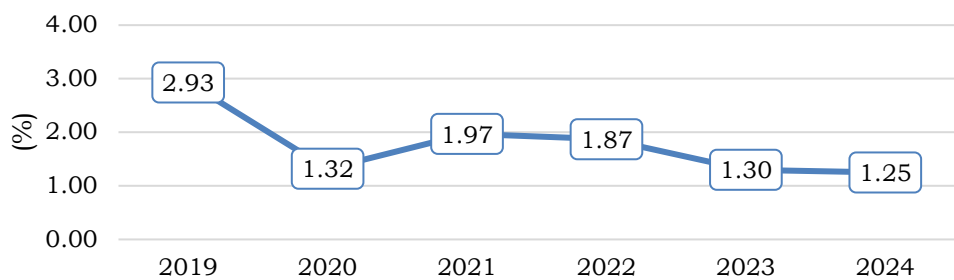
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Per Kecamatan Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

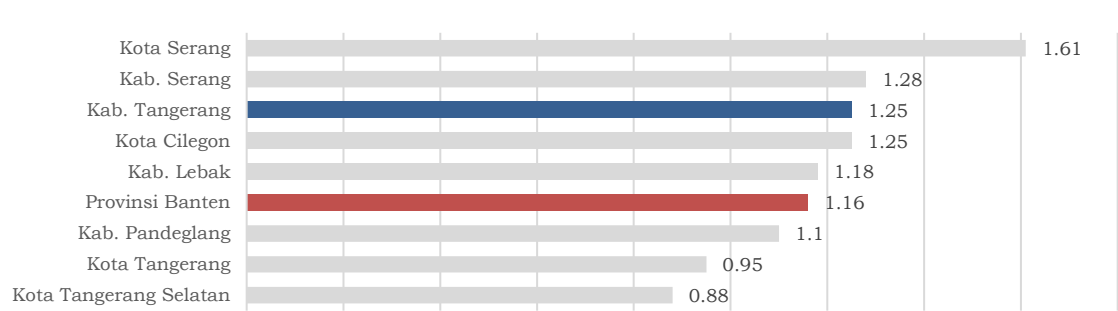
C) Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan fluktuatif, dengan laju pertumbuhan berkisar pada angka 1% sampai 3%. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mencapai nilai terendah hingga 1,25%. Laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini relatif rendah dengan tren yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah ini cenderung rendah yang berimplikasi terhadap *dependency ratio* dan bonus demografi.





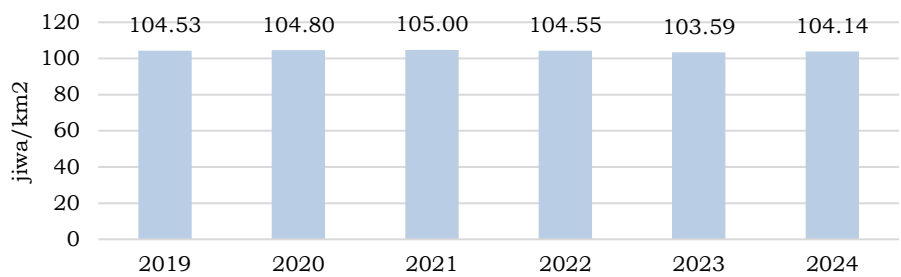
Gambar 2.25  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024



Gambar 2.26  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

D) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

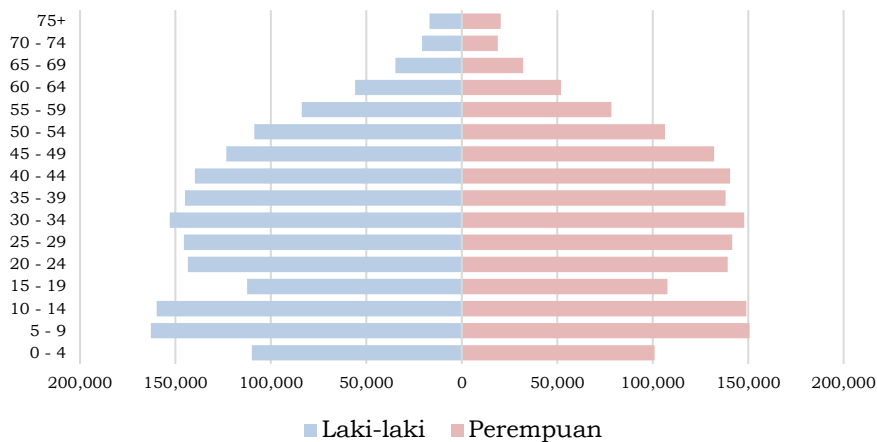
Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki di wilayah ini mencapai 1.716.760 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 1.645.840. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* di Kabupaten Tangerang mencapai 104,41 yang artinya terdapat 104 jiwa penduduk laki-laki setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Secara umum, rasio jenis kelamin Kabupaten Tangerang relatif sama pada kurun waktu 2019-2024, yakni berkisar pada angka 103-105.



Gambar 2.27  
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

E) Penduduk Menurut Kelompok Umur

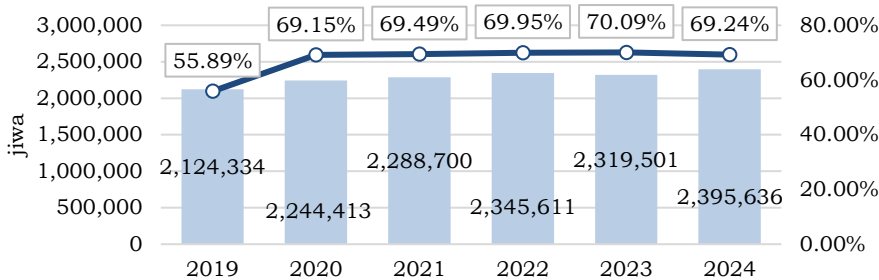
Penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini dapat dilihat dalam piramida penduduk yang tergolong dalam piramida ekspansif atau berbentuk seperti kerucut. Piramida tersebut menggambarkan jumlah masyarakat usia muda lebih tinggi dari kelompok umur lain yang dapat terjadi akibat tingginya angka kelahiran dan rendahnya tingkat kematian bayi. Tingginya jumlah penduduk usia muda ini menjadi peluang pada masa yang akan datang sebagai bonus demografi. Namun, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap rasio ketergantungan masyarakat non produktif.



Gambar 2.28  
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Tangerang Tahun 2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

F) Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang dianggap sudah produktif atau termasuk dalam rentang usia 15-64 tahun. Penduduk usia produktif Kabupaten Tangerang cenderung tinggi dan memiliki tren peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya jumlah penduduk usia produktif menjadi efek dari terjadinya bonus demografi. Tingginya angka produktif ini harus diseimbangkan dengan lapangan pekerjaan yang memadai untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.29  
Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

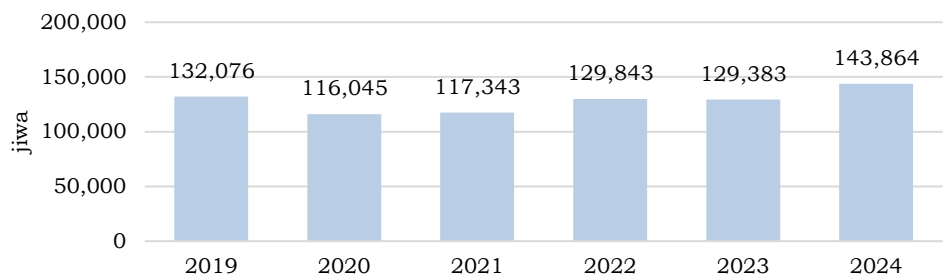
G) Bonus Demografi

Berdasarkan penduduk kelompok umur, Kabupaten Tangerang sedang menikmati bonus demografi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan usia non produktif. Kondisi seperti ini menjadi tantangan pembangunan daerah, diperlukan penanganan dan pengelolaan yang baik untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat.

H) Penduduk Usia Lanjut

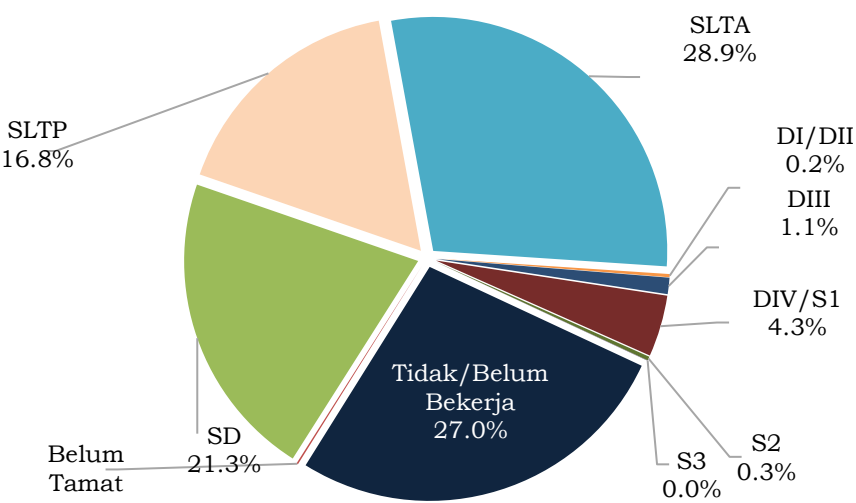
Penduduk usia lanjut adalah penduduk yang termasuk dalam usia lebih dari 65 tahun dan telah dianggap tidak produktif. Jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Tangerang sempat relatif stagnan. Penduduk usia lanjut Kabupaten Tangerang pada 2024 mencapai 143.864 jiwa penduduk.

Tingginya jumlah penduduk usia lanjut ini perlu didukung program ramah lansia untuk menjaga kesejahteraan lansia.



Gambar 2.30  
Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2025

I) Penduduk Menurut Pendidikan  
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah aglomerasi perkotaan yang didominasi oleh tingkat pendidikan sekolah dasar (28,7%) dan SLTA (27,1%). Tingginya masyarakat dengan pendidikan sekolah dasar dan tidak/belum bekerja selaras dengan komposisi masyarakat Kabupaten Tangerang yang masih tergolong pada usia anak-anak. Sementara itu, tingginya tamatan SLTA diserap oleh sektor industri yang berkembang pesat di wilayah ini. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki penduduk tamatan diploma, sarjana, pascasarjana, dan doktor yang cukup tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa akselerasi pendidikan berkembang secara pesat di Kabupaten Tangerang. Selain itu, hal tersebut juga menggambarkan tingginya kualitas masyarakat Tangerang.



Gambar 2.31  
Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2023  
Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2024

J) Penduduk Menurut Agama  
Agama Islam merupakan agama yang memiliki penganut paling banyak di Kabupaten Tangerang yaitu dengan 3.158.860 jiwa. Selain itu, hal ini juga didukung dengan keberadaan berbagai sarana prasarana yang terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. Selain itu, Kristen menjadi agama dengan penganut terbesar kedua di wilayah ini, yaitu sebesar

108.817 jiwa. Sementara itu, Agama Budha dan Katolik di urutan berikutnya dengan jumlah penganut sebanyak 56.288 jiwa dan 46.182 jiwa.

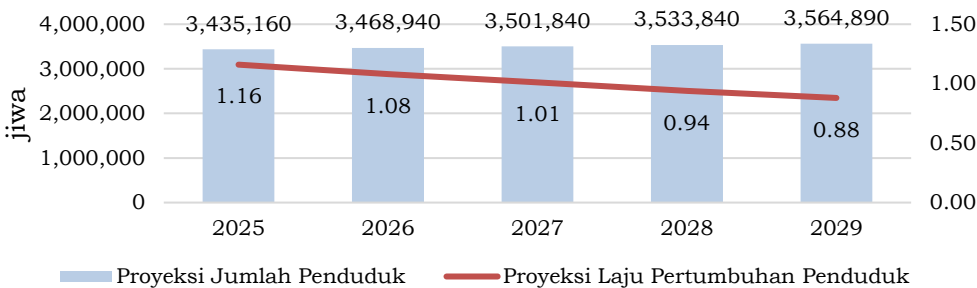
Tabel 2.8  
Penduduk Menurut Agama Kabupaten Tangerang Tahun 2024

| Agama   | Jumlah    |
|---------|-----------|
| Budha   | 56.288    |
| Hindu   | 1.958     |
| Islam   | 3.158.860 |
| Katolik | 46.182    |
| Kristen | 108.817   |
| Lainnya | 1.044     |

Sumber: Opendata Kabupaten Tangerang, 2025

K) Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

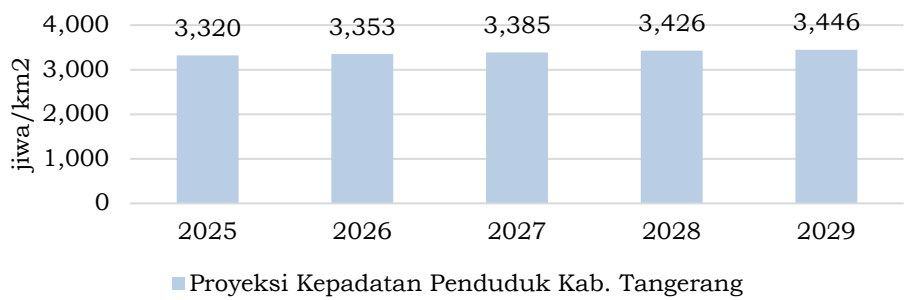
Proyeksi penduduk bermanfaat sebagai acuan dan target dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor pembangunan, seperti sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, perumahan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan yang diperkirakan melambat secara bertahap hingga tahun 2030. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 diperkirakan mencapai 3.564.900 jiwa.



Gambar 2.32  
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029  
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

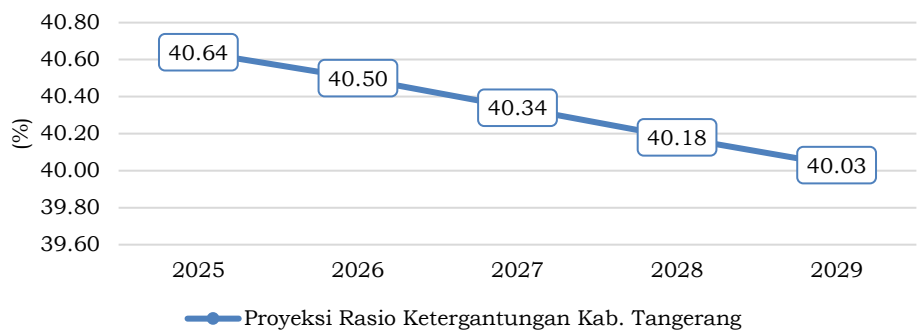
1) Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2029 mencapai 3.446 jiwa yang berarti tiap 1 km<sup>2</sup> wilayah Kabupaten Tangerang dihuni oleh 3.446 jiwa penduduk.



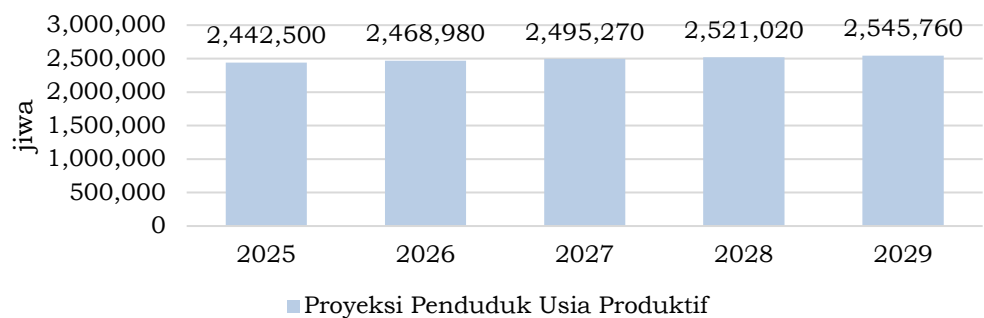
Gambar 2.33  
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029  
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

2) **Proyeksi Rasio Ketergantungan**  
Aspek penting dalam kependudukan yang perlu diperhatikan adalah beban ketergantungan, yaitu perbandingan antara penduduk produktif dengan usia non produktif. Semakin rendah angka beban ketergantungan, mengindikasikan bahwa penduduk usia produktif tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, rasio ketergantungan Kabupaten Tangerang cenderung menurun. Penurunan rasio ketergantungan ini terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2025 hingga 2029. Saat ini, Kabupaten Tangerang berada pada fase bonus demografi, ditandai dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0 hingga 14 tahun dan lebih dari usia 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 70 persen dari total penduduk, serta besaran rasio ketergantungan kurang dari 50 persen.



Gambar 2.34  
Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029  
Sumber: Olahan Penyusun, 2024

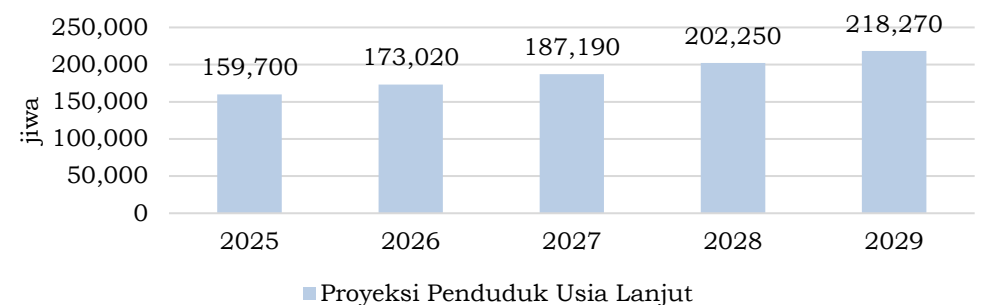
3) **Proyeksi Penduduk Usia Produktif**  
Penduduk usia produktif di Kabupaten Tangerang diproyeksikan mengalami peningkatan pada kurun waktu 2025-2029. Peningkatan ini berkisar pada angka 2,4 hingga 2,5 juta penduduk usia produktif. Peningkatan ini salah satunya dapat berdampak pada peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah ini.



Gambar 2.35  
Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029  
*Sumber: Olahan Penyusun, 2024*

4) Bonus Demografi  
Berdasarkan hasil proyeksi pada rentang waktu 2025-2029, Kabupaten Tangerang masih mendapatkan bonus demografi yang ditandai dengan tingginya penduduk usia produktif. Bonus demografi ini perlu dimanfaatkan khususnya dalam mengelola produktivitas penduduk.

5) Proyeksi Penduduk Usia Lanjut  
Dalam kurun waktu 2025-2029, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang cukup signifikan. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan fasilitas dan penanganan kesehatan maupun sosial bagi para lansia.



Gambar 2.36  
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029  
*Sumber: Olahan Penyusun, 2024*

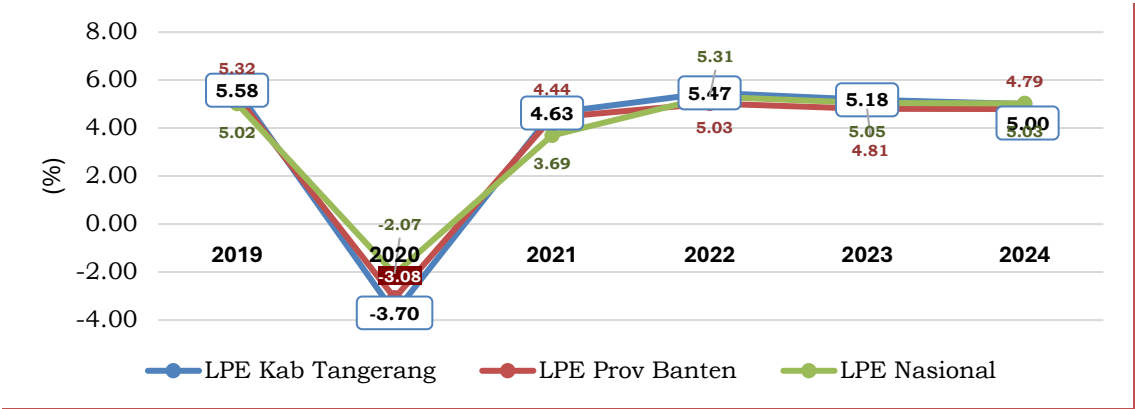
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ketercapaian masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat dan mengetahui permasalahan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini terdiri atas dua hal, yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

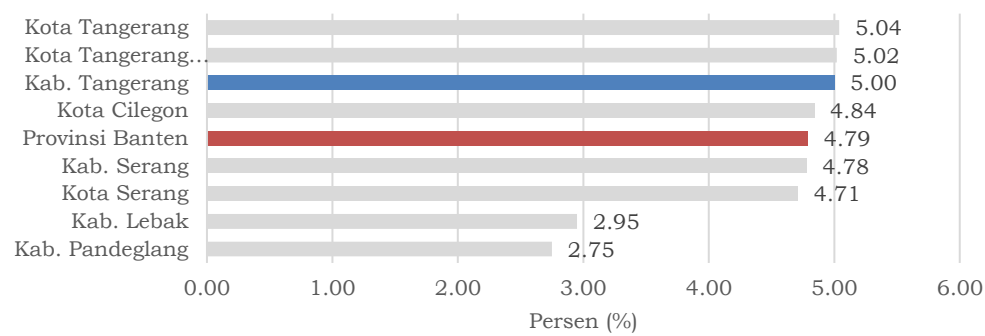
2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

A) Pertumbuhan PDRB  
Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang terukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan dari waktu ke waktu khususnya setelah adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi tren pada tahun 2022-2024 menunjukkan penurunan LPE. Capaian LPE tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi makro wilayah dari berbagai sektor.





Gambar 2.37  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar 2.38  
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023  
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tangerang sebesar 5,00 persen dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten dan nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian LPE Kabupaten Tangerang tertinggi ketiga. Secara lebih detail, lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tertinggi (2024), yaitu Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta jasa lainnya.

Tabel 2.9  
PDRB Per Sektor ADHK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Lapangan Usaha                 |                                                                 | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| A                              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 2,25  | 2,84   | -0,84 | 2,26   | 1,74  | -0,28  |
| B                              | Pertambangan dan Penggalian                                     | 2,30  | -5,90  | -9,45 | -12,35 | 0,25  | 4,80   |
| C                              | Industri Pengolahan                                             | 3,20  | -8,47  | 4,26  | 5,44   | 7,01  | 4,6    |
| D                              | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | -4,23 | -12,35 | 11,69 | 5,59   | -0,45 | -13,42 |
| E                              | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 6,71  | 8,60   | 5,81  | 1,35   | 5,69  | 1,93   |
| F                              | Konstruksi                                                      | 9,44  | -3,29  | 11,96 | 8,25   | 1,74  | 5,98   |
| G                              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 6,22  | -3,70  | 1,82  | 3,27   | 4,83  | 5,94   |
| KETENTRAMAN                    | Transportasi dan Pergudangan                                    | 9,55  | -5,32  | 9,90  | 7,89   | 5,84  | 6,04   |
| I                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 7,86  | -5,63  | 4,45  | 8,33   | 8,93  | 9,15   |
| J                              | Informasi dan Komunikasi                                        | 9,69  | 9,12   | 5,17  | 6,84   | 9,34  | 6,67   |
| K                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 0,72  | 1,56   | 6,07  | 6,81   | -0,48 | 0,90   |
| L                              | Real Estate                                                     | 9,49  | 1,96   | 3,07  | 5,19   | 5,20  | 5,33   |
| M, N                           | Jasa Perusahaan                                                 | 9,20  | -6,00  | -2,25 | 4,46   | 8,52  | 8,39   |
| O                              | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib | 8,75  | -0,38  | -0,76 | 1,09   | 3,17  | 26,36  |
| P                              | Jasa Pendidikan                                                 | 8,30  | 0,62   | -1,10 | -0,09  | 6,82  | 7,01   |
| Q                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 11,13 | 4,41   | 9,14  | 2,92   | 8,94  | 13,23  |
| R,S,T,U                        | Jasa Lainnya                                                    | 9,36  | -6,11  | 1,39  | 7,77   | 10,98 | 4,68   |
| Produk Domestik Regional Bruto |                                                                 | 5,56  | -3,76  | 4,70  | 5,47   | 5,18  | 5,00   |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha

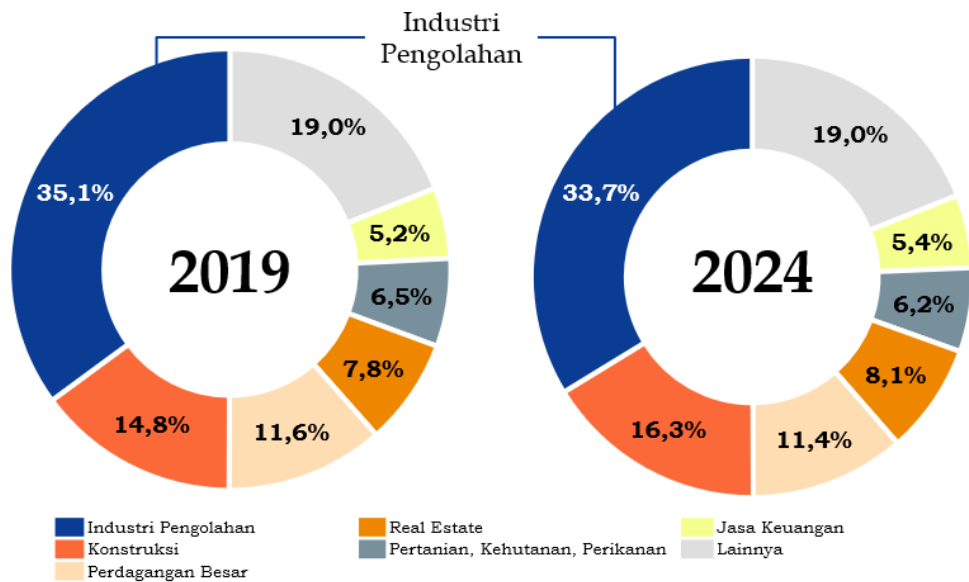
Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,15 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 62.789,24 miliar rupiah (33,7% dari PDRB), lapangan usaha Konstruksi sebesar 30.437,51 miliar rupiah (16,3% dari PDRB) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.127,95 miliar rupiah (11,4% dari PDRB). Jika melihat perbandingan kontribusi sektor lapangan usaha PDRB tahun 2019 dan 2024, sektor konstruksi dan *real estate* menunjukkan peningkatan karena berbagai proyek pembangunan strategis nasional dan daerah dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.10  
PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
(dalam Miliar Rupiah)

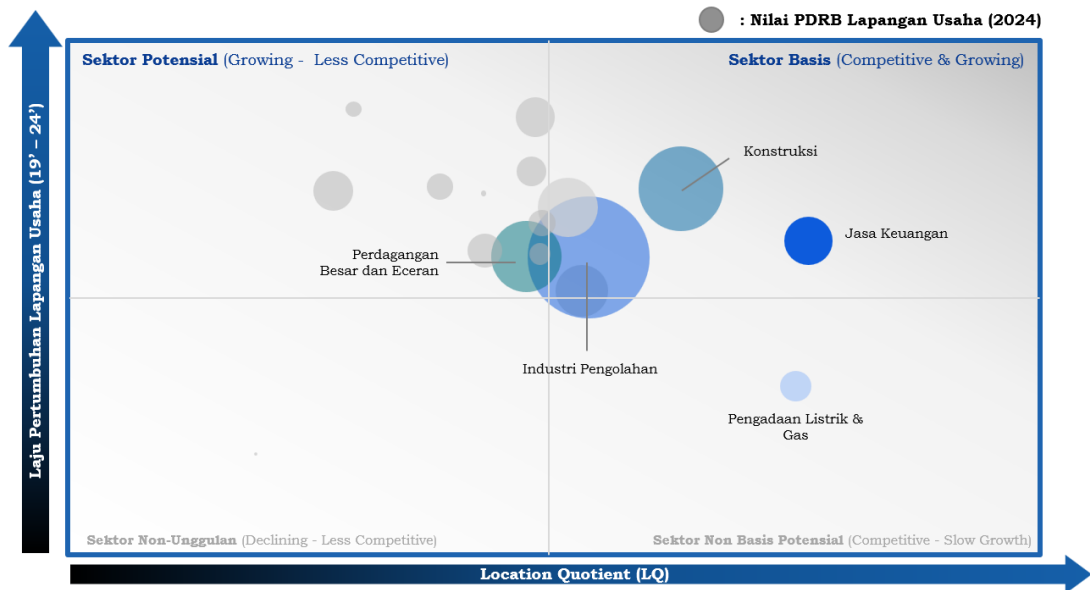
| Kode         | Lapangan Usaha PDRB                                               | PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah |           |           |           |           |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              |                                                                   | 2019                          | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| A            | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                               | 9.045,55                      | 9.435,98  | 9.473,10  | 10.135,98 | 10.921,46 | 11.456,58 |
| B            | Pertambangan dan Penggalian                                       | 58,54                         | 55,54     | 50,93     | 45,88     | 47,24     | 51,19     |
| C            | Industri Pengolahan                                               | 49.164,34                     | 45.200,55 | 48.117,52 | 53.176,12 | 58.318,29 | 62.789,24 |
| D            | Pengadaan Listrik dan Gas                                         | 4.693,53                      | 4.096,16  | 4.630,76  | 4.936,40  | 4.893,85  | 4.053,44  |
| E            | Pengadaan Air                                                     | 85,48                         | 93,49     | 100,24    | 102,87    | 110,40    | 119,98    |
| F            | Konstruksi                                                        | 20.797,30                     | 20.159,33 | 23.459,65 | 26.926,03 | 28.336,15 | 30.437,51 |
| G            | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 16.234,31                     | 15.934,12 | 16.403,33 | 17.698,47 | 19.324,82 | 21.127,95 |
| KETENTERAMAN | Transportasi dan Pergudangan                                      | 4.320,45                      | 4.148,08  | 4.651,38  | 5.330,79  | 6.083,52  | 6.711,58  |

| Kode                       | Lapangan Usaha PDRB                                            | PDRB ADHB dalam Miliar Rupiah |            |            |            |            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |                                                                | 2019                          | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| I                          | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2.133,60                      | 2.021,19   | 2.123,07   | 2.342,57   | 2.586,71   | 2.904,43   |
| J                          | Informasi dan Komunikasi                                       | 4.505,50                      | 4.898,70   | 5.144,75   | 5.553,03   | 6.132,02   | 6.587,77   |
| K                          | Jasa Keuangan                                                  | 7.290,26                      | 7.412,07   | 8.239,97   | 9.597,07   | 9.774,50   | 9.966,91   |
| L                          | Real Estate                                                    | 10.957,41                     | 11.392,27  | 11.859,43  | 12.706,97  | 13.853,03  | 15.035,63  |
| M.N                        | Jasa Perusahaan                                                | 1.537,10                      | 1.470,01   | 1.454,75   | 1.569,84   | 1.769,91   | 1.974,52   |
| O                          | Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.469,16                      | 2.571,45   | 2.618,05   | 2.742,84   | 2.941,08   | 3.813,07   |
| P                          | Jasa Pendidikan                                                | 3.899,57                      | 3.981,03   | 3.957,24   | 4.030,36   | 4.404,83   | 4.941,95   |
| Q                          | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 656,87                        | 695,57     | 774,48     | 811,76     | 917,22     | 1.063,50   |
| R.S.T.U                    | Jasa lainnya                                                   | 2.240,33                      | 2.166,13   | 2.225,00   | 2.461,19   | 2.886,59   | 3.068,90   |
| PDRB (dalam miliar rupiah) |                                                                | 140.089,29                    | 135.731,68 | 145.283,68 | 160.168,18 | 173.301,26 | 186.104,15 |

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)



Gambar 2.39  
Perbandingan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 dan Tahun 2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

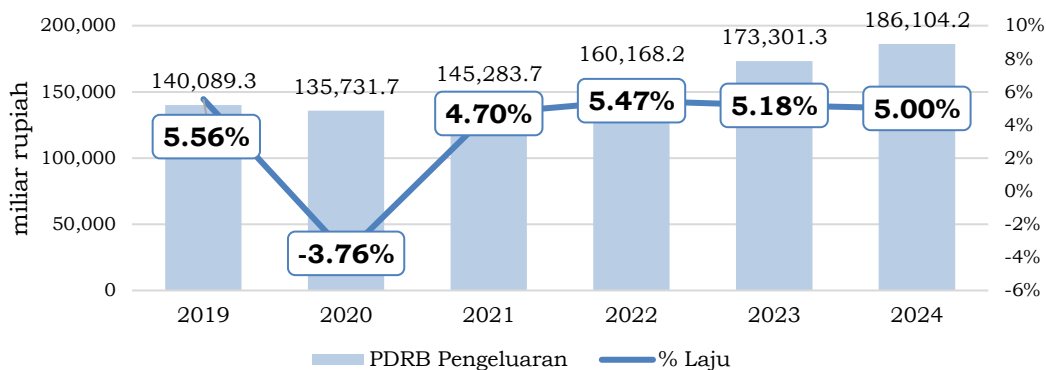


Gambar 2.40  
*Positioning Matrix* Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang  
Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Gambar di atas merupakan analisis *Positioning Matrix* Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tangerang untuk mengetahui sektor unggulan berdasarkan tren laju dan besaran nilai PDRB dari 17 sektor lapangan usaha. Berdasarkan analisis tersebut, sebagian besar jenis lapangan usaha PDRB (termasuk lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar) merupakan Sektor Potensial. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing melalui akselerasi produktivitas tenaga kerja, pengembangan pasar dan *value added* lapangan usaha tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar (Industri Pengolahan dan Konstruksi) dan jasa keuangan termasuk dalam kategori “Sektor Unggulan”, yaitu yang tumbuh cepat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan posisi Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari penyangga Jakarta dan Jabodetabek menjadikannya daerah strategis untuk pengembangan sektor perindustrian dan sektor jasa.

## 2) PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Pada tahun 2024, PDRB ADHB menurut pengeluaran Kabupaten Tangerang sebesar 186.104,2 miliar rupiah. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peningkatan utamanya setelah pandemi tahun 2019.



Gambar 2.41  
PDRB ADHB dan Laju PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
*Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)*

Tabel 2.11  
PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
(dalam Juta Rupiah)

| PDRB Pengeluaran              | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang (Juta Rupiah) |                |                |                |                |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|                               | 2019                                                                                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024        |
| Konsumsi Rumah Tangga         | 72.998.709,26                                                                          | 71.693.730,68  | 74.770.602,15  | 81.562.475,55  | 88.647.200,83  | 97.947.130  |
| Konsumsi LNPR                 | 710.429,81                                                                             | 679.685,90     | 701.768,54     | 749.881,39     | 811.729,66     | 951.440     |
| Konsumsi Pemerintah           | 5.031.644,99                                                                           | 4.621.839,02   | 4.890.012,15   | 5.219.166,20   | 6.001.089,65   | 6.914.430   |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto | 35.233.021,18                                                                          | 35.450.044,41  | 37.900.875,49  | 40.717.192,10  | 46.853.056,17  | 50.185.960  |
| Perubahan Inventori           | 4.346,34                                                                               | 716,21         | 61,28          | 300,11         | 49.843,77      | 240.860     |
| Net Ekspor                    | 26.111.136,01                                                                          | 23.285.665,67  | 27.020.356,91  | 31.919.161,45  | 30.945.748,91  | 29.864.320  |
| Ekspor                        | 98.587.772,18                                                                          | 94.833.778,71  | 105.562.340,92 | 132.194.567,86 | 150.386.973,45 |             |
| Impor                         | 72.476.636,17                                                                          | 71.548.113,04  | 78.541.984,01  | 100.275.406,41 | 119.441.224,54 |             |
| PDRB                          | 140.089.287,58                                                                         | 135.731.681,88 | 145.283.676,52 | 160.168.176,80 | 173.302.663,99 | 186.104.150 |

*Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)*

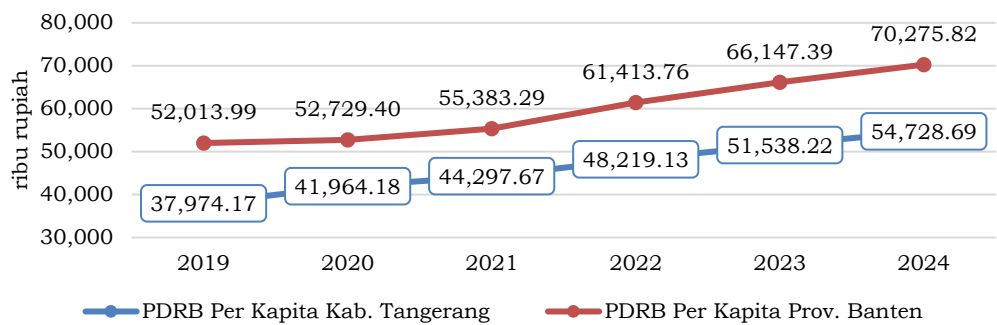
Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2024, komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 52,63%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Kabupaten Tangerang yang mempengaruhi dengan daya beli masyarakat konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Triwulan IV 2024, Tangerang mengalami inflasi yoy (*year on year*) sebesar 2,15%.. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai peran penting yaitu sebesar 82,53% produk wilayah Kabupaten Tangerang diekspor ke luar wilayah.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

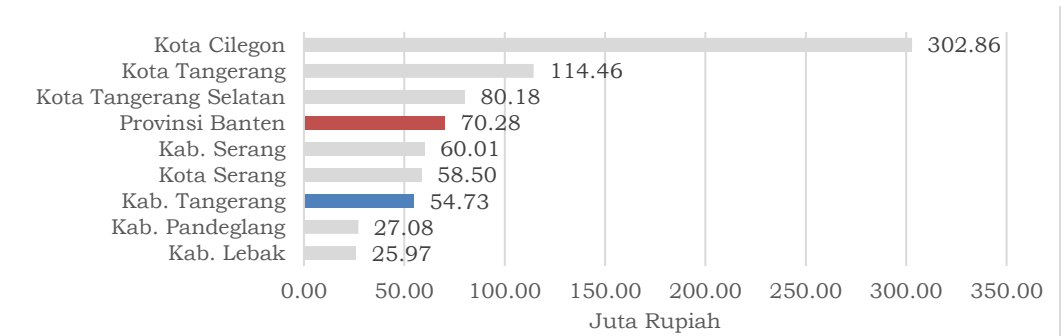
B) PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2019-2024. Hal ini

menunjukkan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang dapat mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, PDRB per kapita Kabupaten Tangerang di bawah Provinsi Banten.



Gambar 2.42  
PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



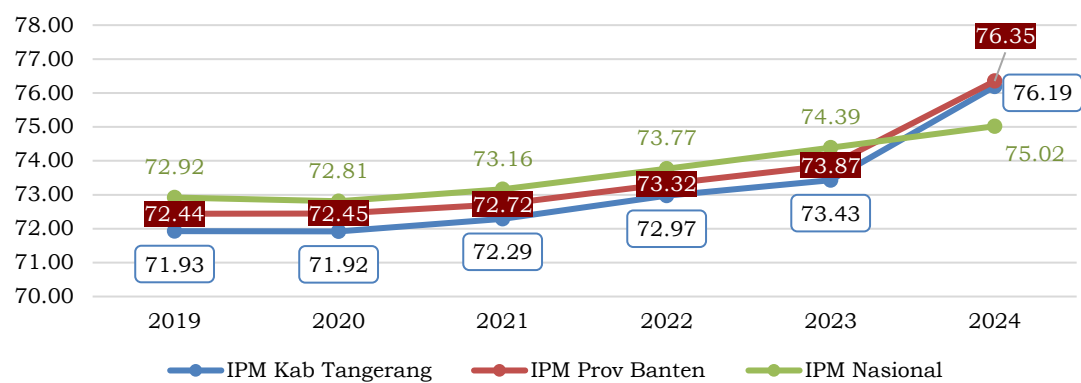
Gambar 2.43  
Perbandingan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada tahun 2024, capaian PDRB ADHB per kapita Kabupaten Tangerang sebesar 54,73 juta rupiah dan capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, capaian PDRB per kapita Kabupaten Tangerang terendah ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi dan nilai tambah sektor unggulan dalam rangka mendorong pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.

C) Indeks Pembangunan Manusia

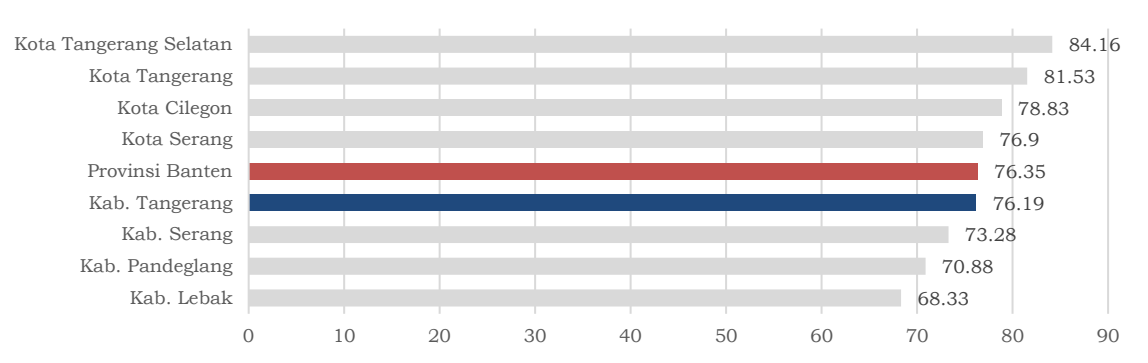
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 76,19 dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas masyarakat di wilayah ini. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten. Kondisi ini dimungkinkan terjadi akibat tingkat pengeluaran per kapita dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tergolong rendah dan di bawah Provinsi Banten dan Nasional. Maka dari itu, diperlukan fokus penanganan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing SDM di Kabupaten Tangerang.





Gambar 2.44  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional  
Tahun 2019-2024  
*Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2025 (Hasil Long Form SP2020)*

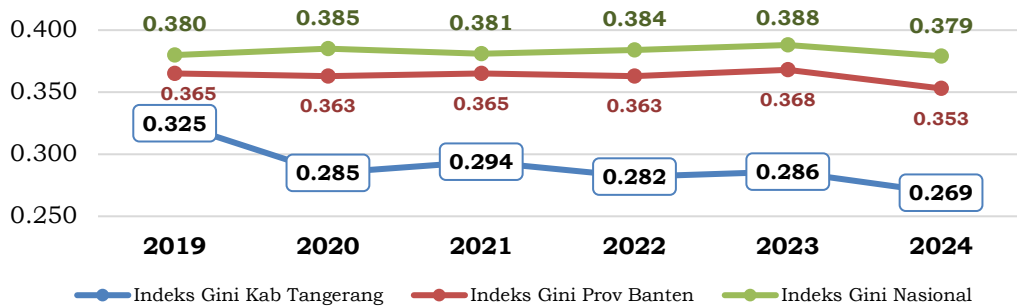
Dalam lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih menempati posisi keempat IPM terendah. Sementara itu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan (sebesar 84,16).



Gambar 2.45  
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
Tahun 2024  
*Sumber: BPS Provinsi Banten dan BPS Nasional, 2025 (Hasil Long Form SP2020)*

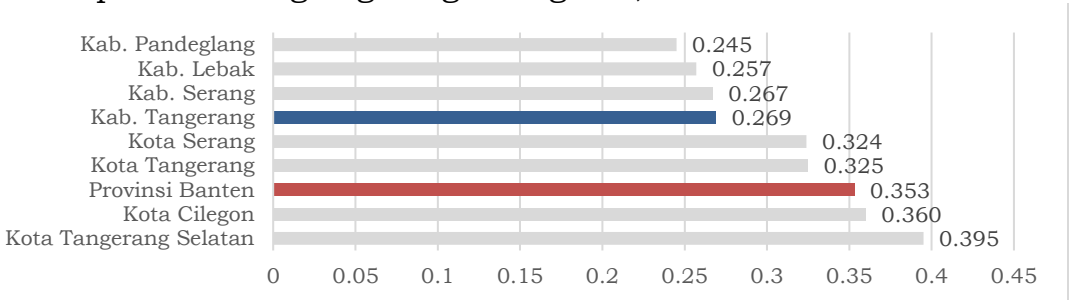
D) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu tolak ukur dalam mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Pada tahun 2024, Indeks gini Kabupaten Tangerang sebesar 0,269 dalam kategori ‘Rendah’. Indeks tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung merata dan tidak memiliki *gap* yang tinggi antar kelompok masyarakat yang dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah ini cenderung rendah. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini Kabupaten Tangerang cenderung menurun dan capaian tersebut lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan nasional.



Gambar 2.46  
Indeks Gini Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

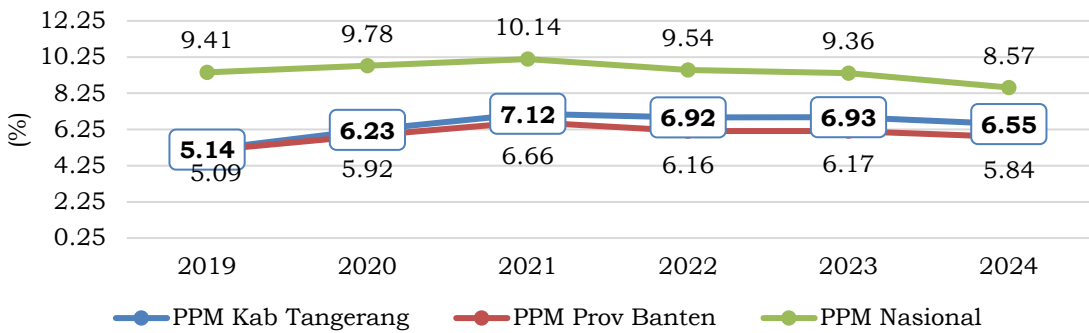
Indeks Gini Kabupaten Tangerang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-empat dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 0,353. Kabupaten/kota dengan indeks gini paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kota Tangerang dengan angka 0,395. Sementara itu, indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Pandeglang dengan angka 0,245.



Gambar 2.47  
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

E) Persentase Penduduk Miskin

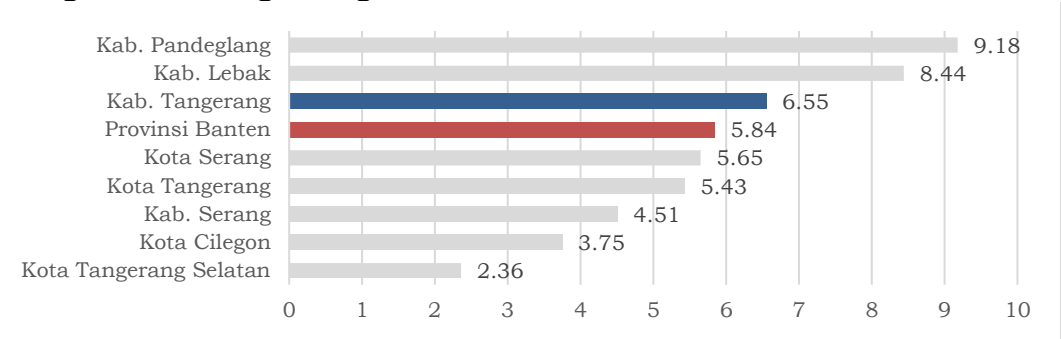
Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Dalam kurun waktu 2019-2021, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan akibat pandemi covid-19. Pada periode tahun 2022-2024, tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.48  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten pada tahun 2024. Kabupaten Tangerang berada pada posisi ke-tiga tertinggi dengan kedudukan di atas Provinsi Banten yang memiliki capaian sebesar 5,84%. Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling tinggi pada tahun 2024 yaitu Kabupaten Pandeglang

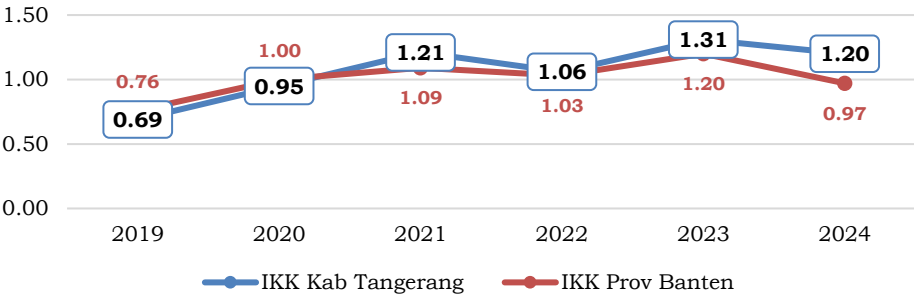
dengan angka 9,18%. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah yaitu Kota Tangerang Selatan dengan angka 2,36%.



Gambar 2.49  
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

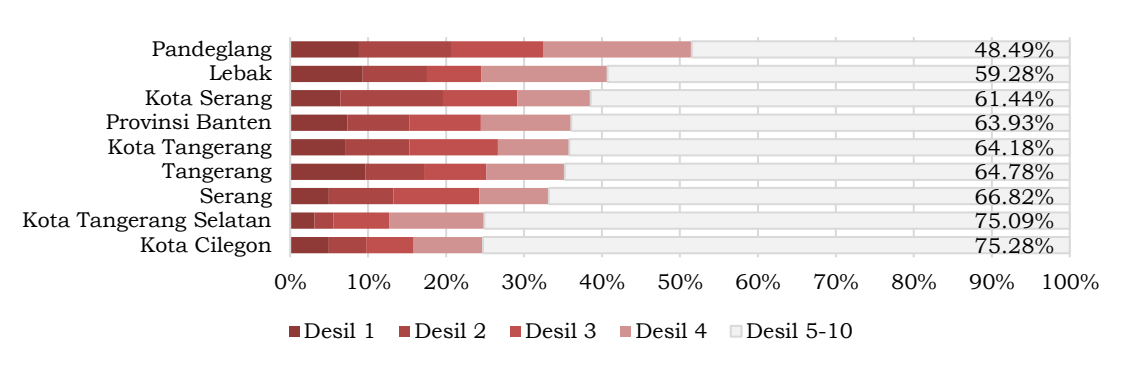
F) Rasio Kesenjangan Kemiskinan  
Rasio Kesenjangan Kemiskinan yang tinggi menunjukkan kualitas kesejahteraan yang belum optimal. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang relatif tinggi yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang mencapai nilai 1,20. Tingginya indeks ini mengindikasikan besarnya *gap* antara pendapatan masyarakat miskin dengan garis kemiskinan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.50  
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten  
Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

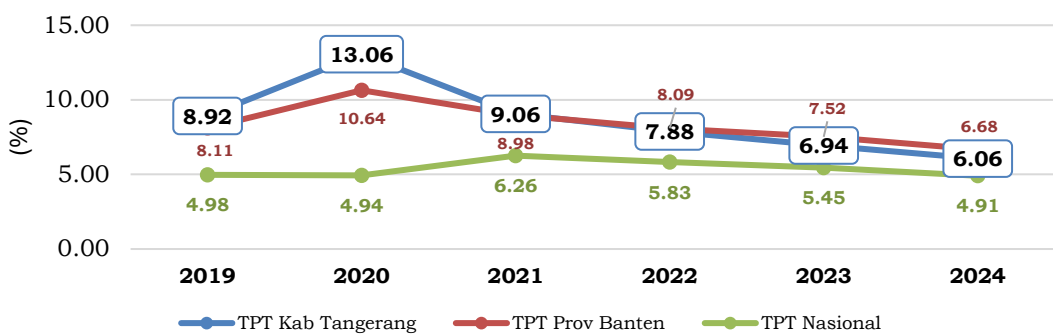
G) Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Desil dan/atau Kemiskinan)  
Tingkat kesejahteraan rumah tangga ditunjukkan dari persentase kelompok pendapatan dalam instrumen Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial bagi keluarga dan individu. Diagram di bawah ini menunjukkan persentase jumlah penduduk berdasarkan kelompok pendapatan desil 1 (10%), desil 2(20%), desil 3 (30%), desil 4 (40%), desil 5-10 (> 40%). Desil 1 termasuk dalam kelompok miskin dan Desil 2-4 termasuk dalam kelompok rentan miskin.



Gambar 2.51  
Perbandingan Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pendapatan (Desil) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Website P3KE Kemenko PMK (<https://p3ke.kemenkopmk.go.id/>)

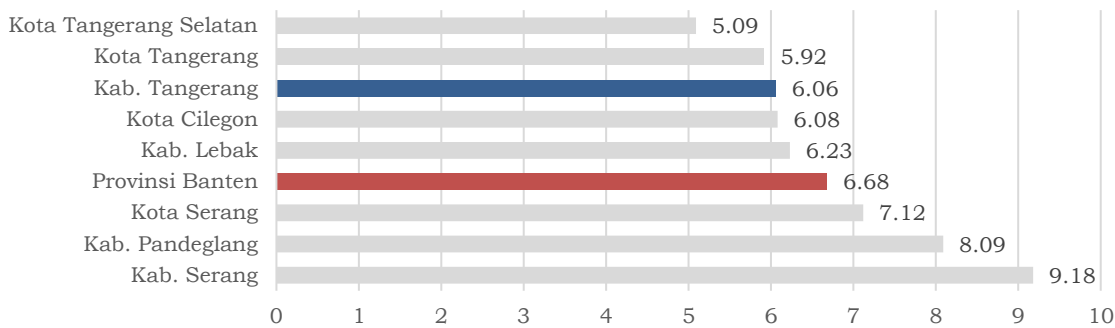
Berdasarkan gambar di atas, jumlah rumah tangga pada desil 1-4 di Kabupaten Tangerang terendah ke-4 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Jumlah rumah tangga dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 295.195 KK atau 35,2% dari total KK. Sementara itu, jumlah individu dengan pendapatan 40% terendah di Kabupaten Tangerang sebesar 1.169.049 jiwa.

H) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan nilai persentase jumlah masyarakat yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. TPT digunakan sebagai alat evaluasi kondisi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang tahun 2024 sebesar 6,06% (102.510) jiwa tergolong dalam kategori sedang dan berada di atas TPT nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya pengangguran di wilayah Kabupaten Tangerang yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan. Kondisi ini memerlukan penanganan untuk dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh masyarakat.



Gambar 2.52  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

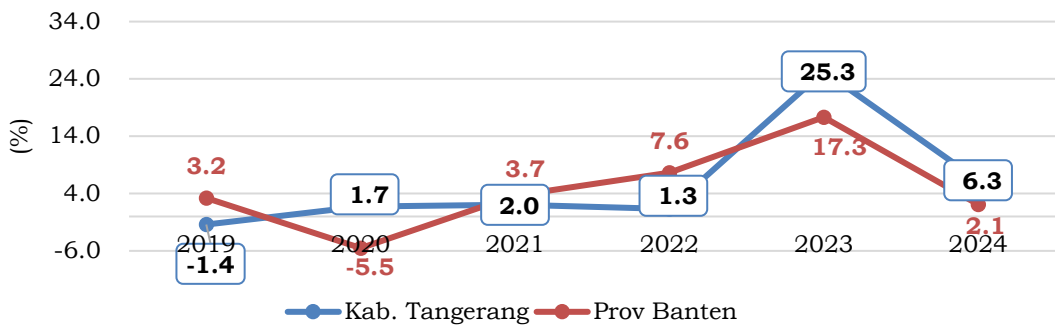
Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cenderung rendah dengan posisi ketiga terendah pada tahun 2024. Sementara itu, kabupaten/kota lain di Provinsi Banten dengan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kota Tangerang Selatan dengan TPT sebesar 5,09%, sementara TPT tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Serang sebesar 9,18%.



Gambar 2.53  
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

I) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

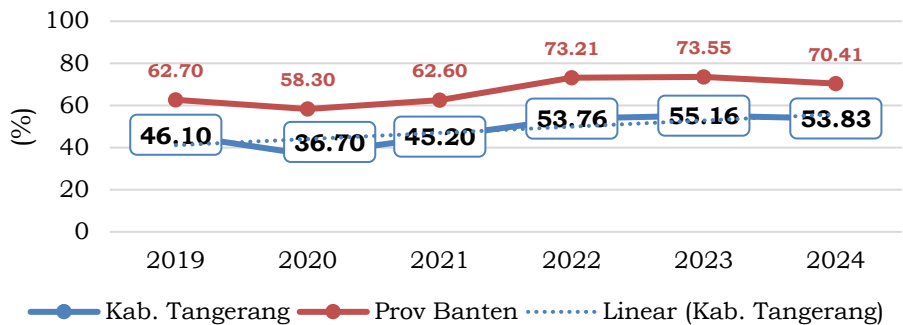
Laju pertumbuhan PDRB terhadap pekerja di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, tetapi menurun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan peningkatan partisipasi angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan PDRB Kabupaten Tangerang. Secara umum laju pertumbuhan PDRB ini tergolong rendah dan diperlukan strategi dalam mendorong produktivitas tenaga kerja dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.



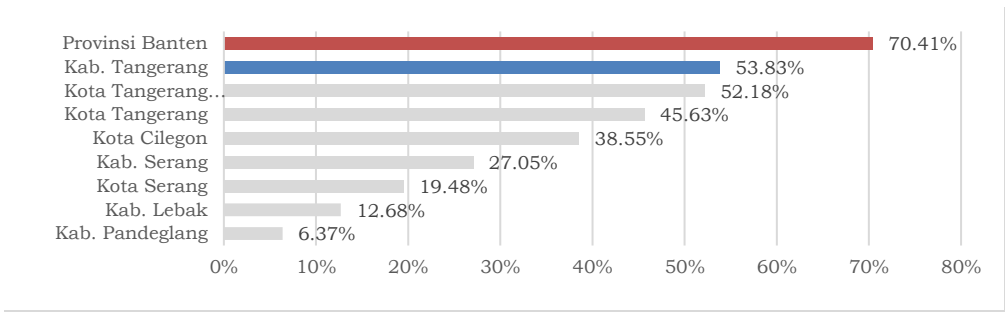
Gambar 2.54  
Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Analisis Penyusun, Badan Pusat Statistik, 2024

J) Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan tren relatif meningkat pada kurun waktu 2019-2024. PAD Kabupaten Tangerang menjadi salah satu sumber pendapatan yang memiliki proporsi terbesar. Akan tetapi, persentase PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Tangerang lebih rendah dibandingkan Provinsi Banten.



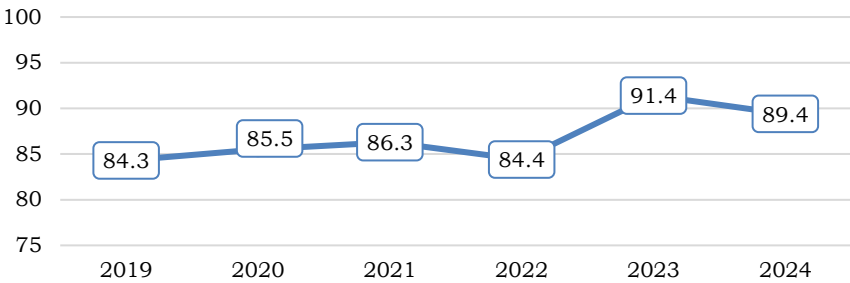
Gambar 2.55  
Persentase PAD terhadap Pendapatan Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024  
Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun



Gambar 2.56  
Perbandingan Persentase PAD terhadap Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Website DJPK Kementerian Keuangan RI, 2024; Analisis Penyusun

Pada tahun 2024, realisasi PAD Kabupaten Tangerang sebesar 4,56 triliun rupiah dengan pendapatan sebesar 8,48 triliun rupiah sehingga persentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 53,83%. Capaian tersebut paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, tetapi lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Banten.

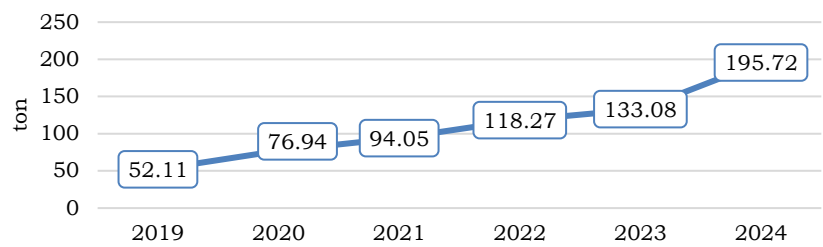
K) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)  
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui kondisi kualitas dan kuantitas cadangan pangan dalam suatu wilayah. Capaian Skor PPH Kabupaten Tangerang menunjukkan kecenderungan peningkatan selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, Skor PPH Kabupaten Tangerang 84,3 meningkat hingga tahun 2021. Capaian ini menurun pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 91,4 pada tahun 2023. Peningkatan Skor PPH ini menunjukkan ketercukupan gizi dan keragaman komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat semakin ideal.



Gambar 2.57  
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026

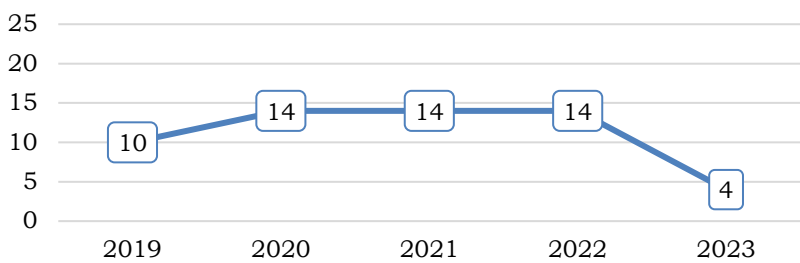
L) Penguatan Cadangan Pangan  
Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan. Dalam menjamin ketahanan pangan, Kabupaten Tangerang melakukan berbagai upaya penguatan cadangan pangan. Dalam kurun waktu 2019-2024, capaian penguatan cadangan pangan mengalami peningkatan.





Gambar 2.58  
Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

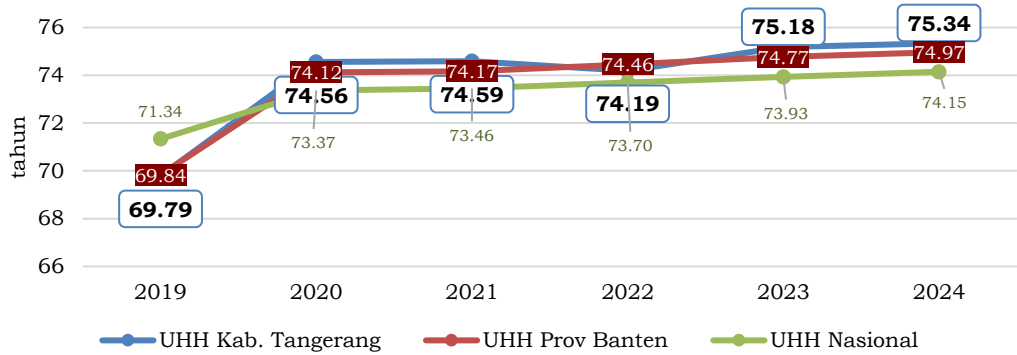
M) **Penanganan Daerah Rawan Pangan**  
Penguatan ketahanan pangan juga dilaksanakan melalui program penanganan daerah rawan pangan. Penanganan daerah rawan pangan berfokus pada pemenuhan cadangan pangan dalam suatu daerah. Pada 2020- 2023 jumlah daerah rawan pangan yang ditangani mencapai 14 daerah dan pada tahun 2023 menurun menjadi 4 daerah.



Gambar 2.59  
Jumlah Daerah Rawan Pangan yang Ditangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

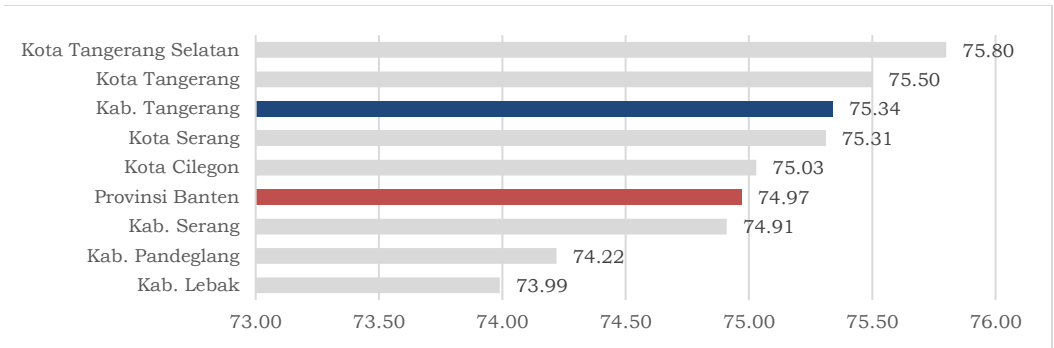
2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

A) **Usia Harapan Hidup**  
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan gambaran rerata perkiraan tingkat kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kesejahteraan melalui kondisi kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, UHH Kabupaten Tangerang mencapai nilai 75,34 tahun yang tergolong pada usia harapan hidup yang cukup tinggi. UHH masyarakat Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.



Gambar 2.60  
Usia Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2025 (Hasil Long Form SP2020)

Berdasarkan perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, di tahun 2024, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga dengan capaian tertinggi, berada di atas capaian Provinsi Banten dan Nasional. Namun, tetap diperlukan arahan strategis dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

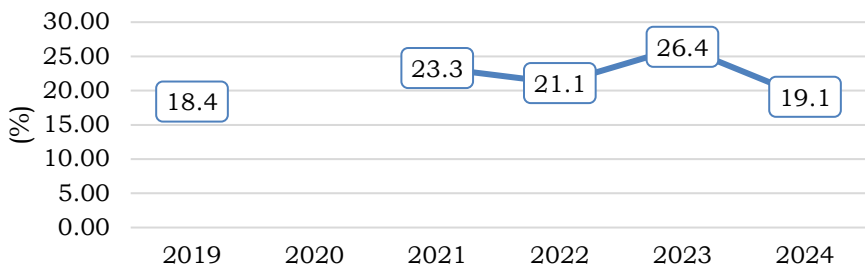


Gambar 2.61  
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025 dan BPS Nasional 2025 (Hasil Long Form SP2020)

B) Prevalensi *Stunting*

*Stunting* merupakan kondisi anak di bawah lima tahun yang tidak dapat berkembang karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. *Stunting* diukur menggunakan panjang/tinggi badan menurut umur bila Z-Score TB/U atau PB/U kurang dari -2 SD. Penyebab dari *stunting* dapat dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Pemberian kolostrum dan ASI eksklusif, pola konsumsi anak, dan penyakit infeksi merupakan faktor yang mempengaruhi status gizi anak dan berdampak pada *stunting*. Sementara itu faktor tidak langsung berupa akses dan ketersediaan bahan makanan serta sanitasi dan kesehatan lingkungan.

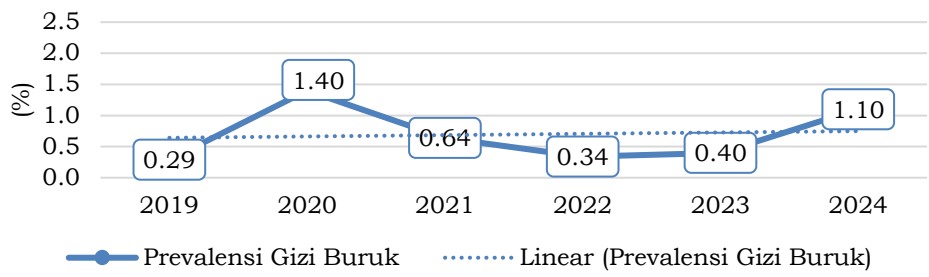
Angka *stunting* di Kabupaten Tangerang cenderung menurun pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2017. Angka *stunting* tertinggi ada di tahun 2021 dengan 23,3%, dan mengalami penurunan ditahun 2024 menjadi 19,1%. Kementerian Kesehatan di lain sisi menargetkan prevalensi *stunting* untuk ditekan menuju angka 18% pada tahun 2025. Terjadi peningkatan di tahun 2022-2023, sehingga untuk bisa mencapai target nasional, Kabupaten Tangerang perlu menurunkan angka *stunting* rata-rata 4,2% per tahun hingga periode 2025.



Gambar 2.62  
Prevalensi *Stunting* Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

C) Prevalensi Balita Gizi Buruk

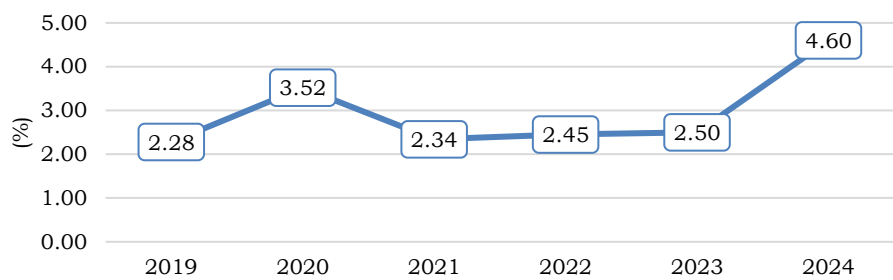
Gizi buruk merupakan kondisi berat badan balita yang lebih rendah dari rentang angka normal anak seusianya. Prevalensi balita gizi buruk menunjukkan kualitas kesehatan balita. Secara umum, prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan meski sempat naik pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Tangerang cenderung rendah. Meskipun begitu, di tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 1,10. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian terutama dalam hal asupan gizi balita.



Gambar 2.63  
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024

D) Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita gizi kurang adalah balita yang menunjukkan indikasi kurangnya asupan energi dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Prevalensi balita dengan gizi kurang di Kabupaten Tangerang relatif stagnan meski sempat meningkat pada tahun 2020. Prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Tangerang tahun 2024 meningkat cukup drastis, mencapai 4.6% dari total balita. Hal ini mengindikasikan perlunya penanganan dan penanggulangan agar menjaga kualitas gizi balita dan terhindar dari kondisi kurang gizi.



Gambar 2.64  
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2015 – 2023 dan Dinas Kesehatan dalam Dokumen RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2024

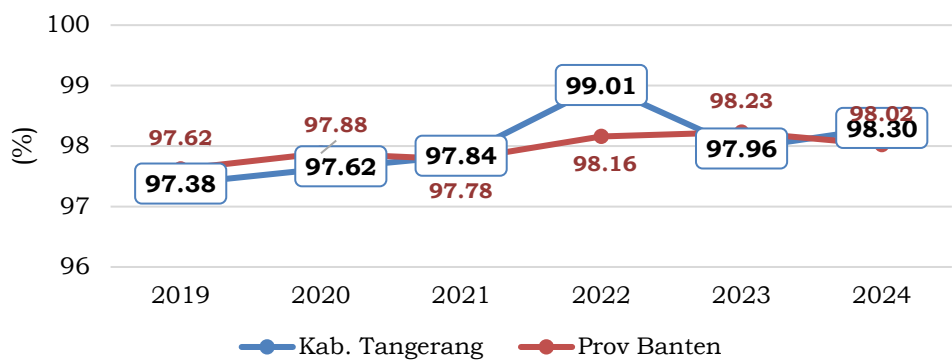
E) Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga aktif merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapsiagaan sumber daya, kemampuan, dan kemauan untuk mencegah dan menangani permasalahan kegawatdaruratan. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020, cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Tangerang berkisar pada angka 85,45%. Hal ini mengindikasikan masih adanya desa yang belum memiliki kesiapan dalam menangani dan menanggulangi kegawatdaruratan.

2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

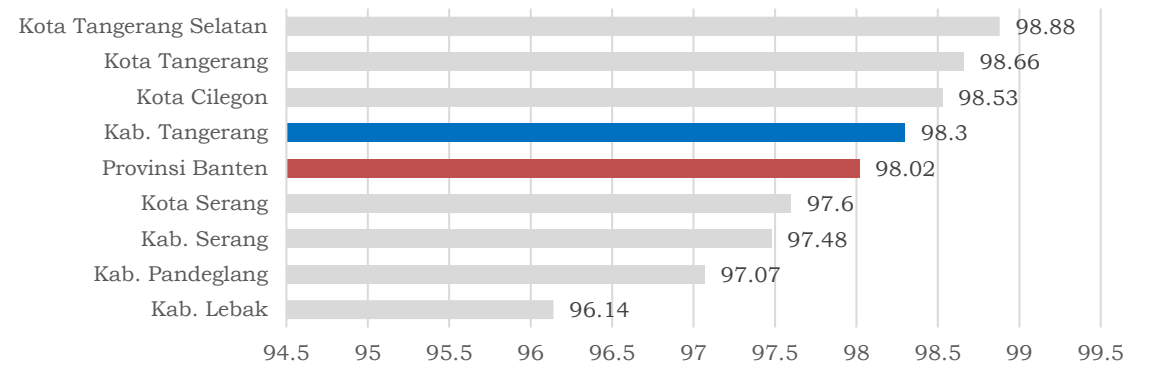
A) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan indikator pengukur kualitas dan kemampuan masyarakat di atas 15 tahun dalam membaca dan menulis huruf. Angka Melek Huruf Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kabupaten Tangerang memiliki angka melek huruf 97,96% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu membaca dan menulis secara lancar. Masyarakat buta huruf didominasi dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Namun, juga terdapat beberapa masyarakat dalam rentan usia 15-19 tahun dan 35-39 tahun yang masih belum memiliki kemampuan baca tulis.



Gambar 2.65  
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

Secara umum, angka melek huruf penduduk di atas 15 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada di atas capaian Provinsi Banten dan menempati peringkat keempat di antara Kabupaten/Kota lain. Kabupaten/Kota dengan angka melek huruf paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan angka sebesar 98,88. Sementara Kabupaten Lebak menjadi wilayah di Provinsi Banten dengan angka melek huruf paling rendah pada tahun 2024 dengan angka sebesar 96,16.



Gambar 2.66  
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

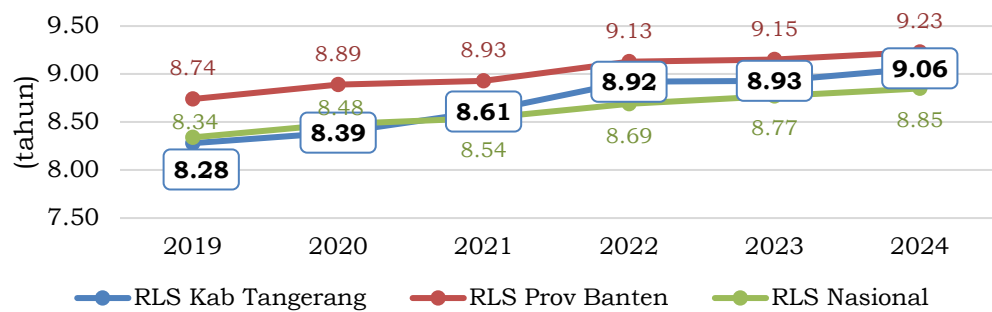
Tabel 2.12  
Persentase Penduduk di atas 15 Tahun yang Melek Huruf 2019-2023

| Kelompok Umur | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15-19         | 99,98%  | 100,00% | 99,84%  | 100,00% | 99,92%  |
| 20-24         | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 25-29         | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 30-34         | 100,00% | 100,00% | 99,38%  | 99,67%  | 100,00% |
| 35-39         | 99,97%  | 100,00% | 100,00% | 99,81%  | 99,35%  |
| 40-44         | 100,00% | 100,00% | 99,30%  | 99,91%  | 100,00% |
| 45-59         | 99,06%  | 96,66%  | 99,04%  | 100,00% | 100,00% |
| 50+           | 86,41%  | 89,22%  | 91,28%  | 95,81%  | 92,07%  |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

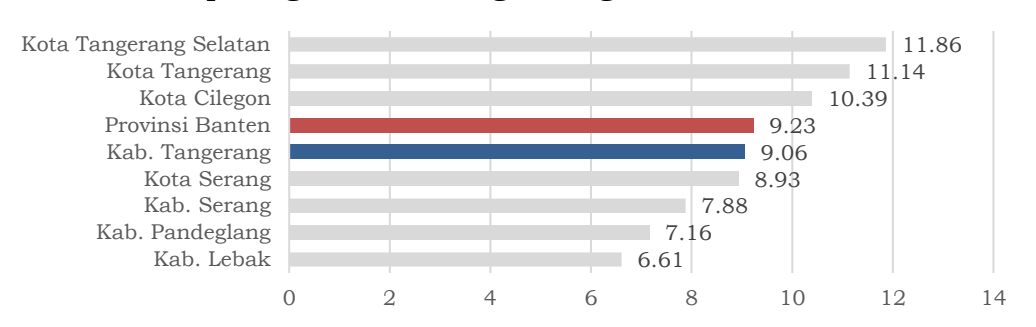
B) Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan nilai yang menunjukkan rerata lama waktu yang dihabiskan oleh masyarakat di atas 15 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Kabupaten Tangerang memiliki lama rerata sekolah 9,06 tahun atau hampir setara dengan waktu

menempuh pendidikan setara SMP. Secara umum RLS Kabupaten Tangerang terus meningkat dari waktu ke waktu yang menunjukkan peningkatan kualitas capaian pendidikan di wilayah ini. Namun, jika di sandingkan dengan wilayah yang lebih luas, Kabupaten Tangerang memiliki capaian RLS yang cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan diperlukannya upaya peningkatan dan pemupukan semangat dalam mengenyam pendidikan formal bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.



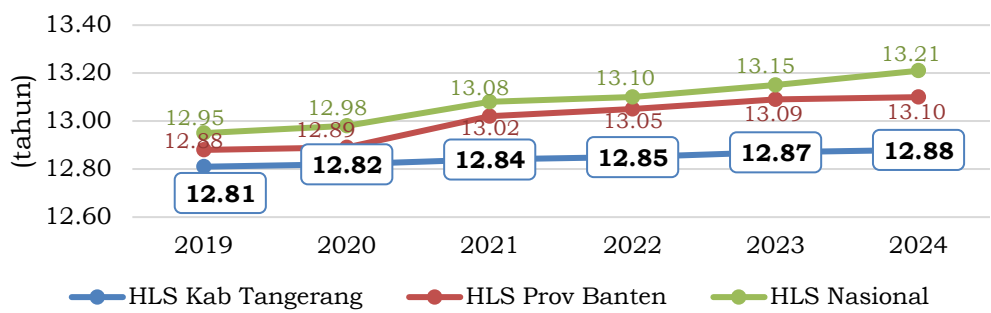
Gambar 2.67  
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2025

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 berada pada posisi standar atau di tengah-tengah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, dan masih di bawah capaian Provinsi Banten yang mencapai angka 9,23 tahun. Wilayah di Provinsi Banten dengan rata-rata lama sekolah paling tinggi dicapai oleh Kota Tangerang Selatan yang mencapai angka 11,86 tahun. Sementara Kabupaten Lebak memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dengan angka 6,61 tahun.



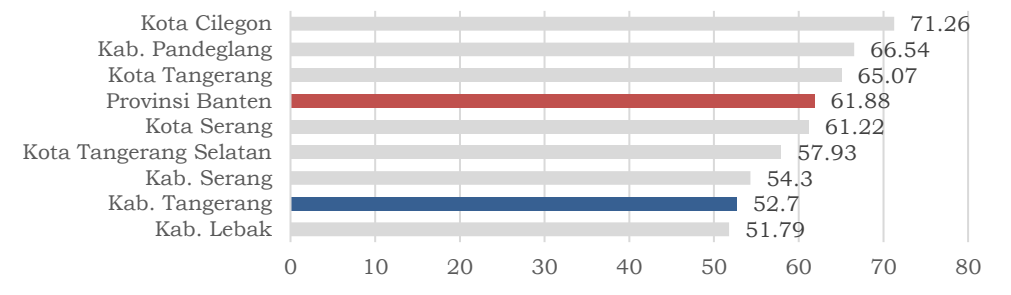
Gambar 2.68  
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

C) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)  
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun). Capaian HLS menunjukkan peluang anak di atas 7 tahun untuk mengenyam pendidikan formal di waktu tertentu. Dalam 6 tahun terakhir, capaian HLS di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dengan capaian yang masih di bawah capaian provinsi maupun nasional. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Tangerang memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 hingga 13 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan sampai tingkat Diploma I.



Gambar 2.69  
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional  
Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Nasional, 2025

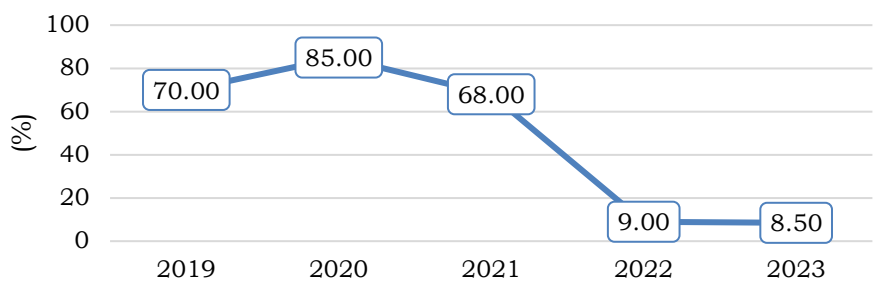
D) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, indikator kunci urusan perpustakaan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2023, IPLM Kabupaten Tangerang adalah 49,93. Meskipun capaian di tahun 2024 telah meningkat menjadi 52,7, IPLM Kabupaten Tangerang masih berada di urutan kedua terendah di Provinsi Banten sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan iklim literasi yang berkelanjutan.



Gambar 2. 70  
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Banten  
Tahun 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2025

2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

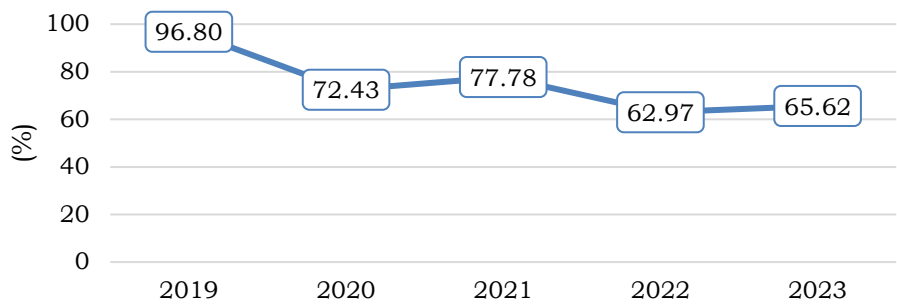
A) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial  
Persentase yang telah menerima jaminan sosial ditentukan dari jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah mendapatkan jaminan sosial dengan total jumlah penduduk yang menyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial. Diagram di bawah menunjukkan persentase penyandang cacat fisik di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dari tahun 2021 di mana persentase cakupan turun dari 68% menjadi 8,5% pada tahun 2023.



Gambar 2.71  
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024*

B) Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

PPKS merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau seseorang dan/atau keluarga yang karena suatu masalah, hambatan atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi angka persentase maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat. Pada grafik di bawah, persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial menurun tiap tahunnya dari tahun 2019 mencakup 96,8% hingga pada tahun 2023 mencakup 65,62%.

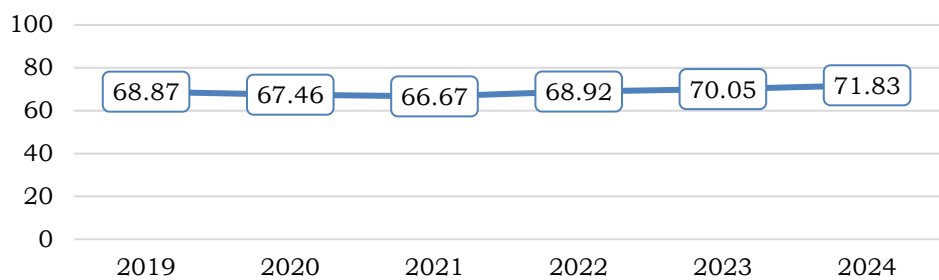


Gambar 2.72  
Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024*

2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

A) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan nilai kerukunan di antara aliran/pemahaman/mazhab yang ada serta pemeluk agama-agama yang telah diakui oleh negara, meliputi Islam, Hindu, Kristen, Budha, Katolik, dan Konghucu. Jika melihat dari standar kategori tinggi (61-80), Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir (2019-2024) memiliki nilai yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang rukun dalam hal agama.



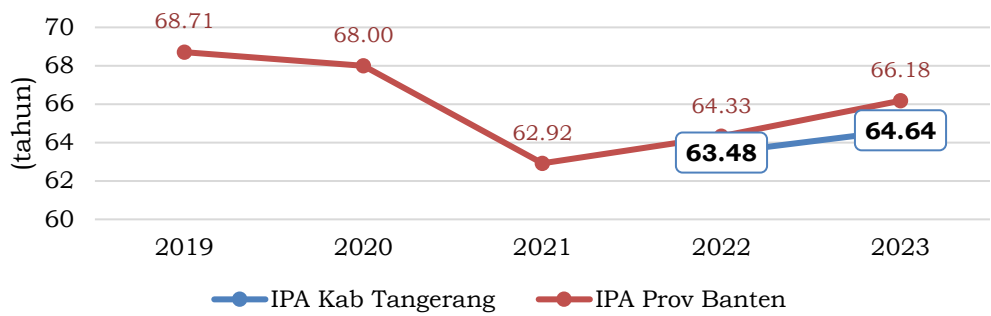
Gambar 2.73  
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2024*



2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

A) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Capaian IPA Kabupaten Tangerang sebesar 63,48 di tahun 2022 dan 64,64 di tahun 2023. Meskipun menunjukkan peningkatan dalam 2 tahun terakhir, capaian tersebut masih berada di bawah Provinsi Banten.

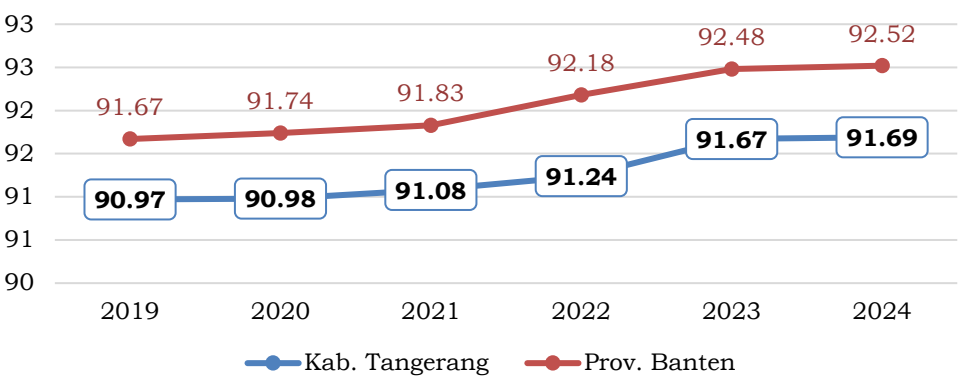


Gambar 2.74

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2023  
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021-2024

B) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

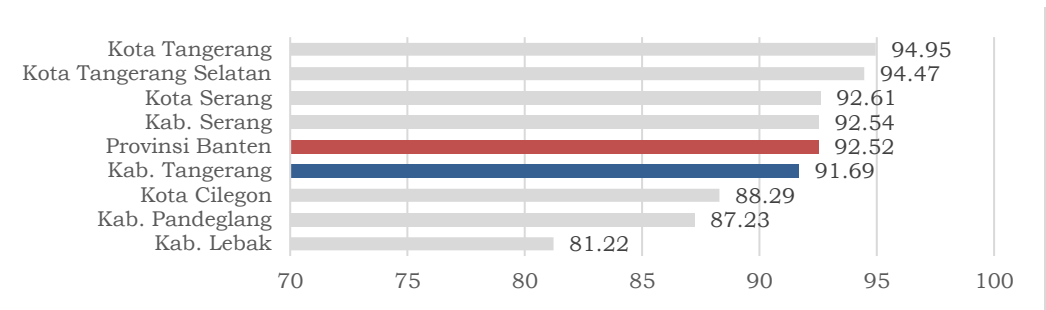
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati 100, maka semakin kecil ketimpangan pembangunan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang mengalami tren peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2019. Meskipun demikian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang selalu berada di bawah Provinsi Banten pada tahun 2019-2024.



Gambar 2.75

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, 2025

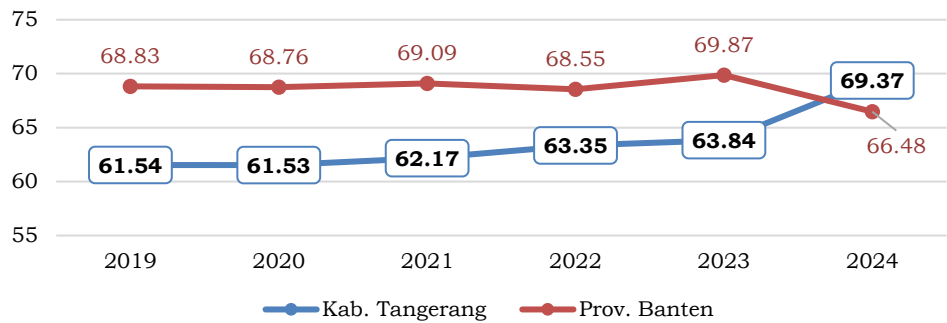
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 91,69 cenderung berada di posisi keempat terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak menjadi wilayah dengan capaian Indeks Pembangunan Gender paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 81,22 Sementara IPG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang dengan indeks sebesar 94,95.



Gambar 2.76  
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

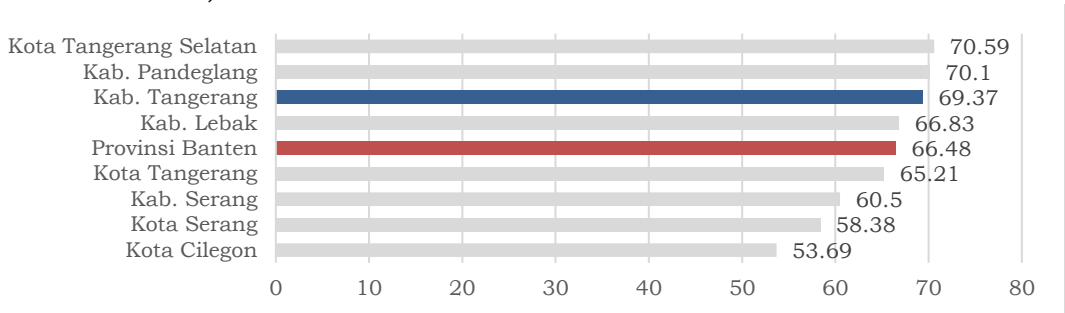
C) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur yang mencerminkan tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi dan politik. IDG fokus pada tingkat partisipasi dengan cara mengukur kesenjangan gender dalam sektor ekonomi, partisipasi politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG memiliki beberapa dimensi, termasuk representasi di lembaga parlemen, proses pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. IDG Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan mencapai 69,37 pada tahun 2024.



Gambar 2.77  
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024  
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

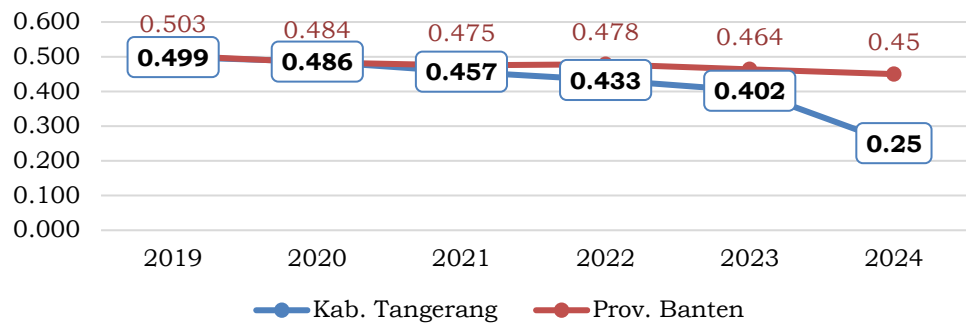
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Kota Cilegon menjadi wilayah dengan capaian IDG paling rendah di Provinsi Banten tahun 2024 dengan indeks 53,69. Sementara itu, IDG tertinggi di Provinsi Banten dicapai oleh Kota Tangerang Selatan dengan indeks sebesar 70,59.



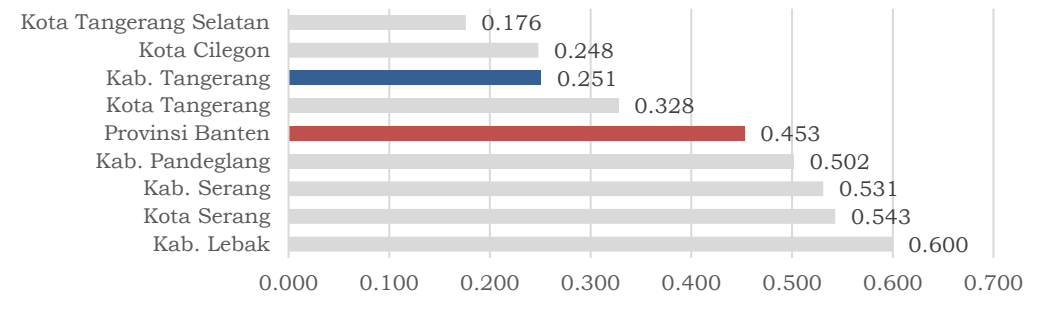
Gambar 2.78  
Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

D) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. Indikator yang digunakan dalam menghitung Indeks Ketimpangan Gender meliputi andil persalinan di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam populasi usia kerja. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang memiliki kecenderungan menurun, artinya perbaikan kesetaraan gender telah meningkat. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Tangerang tergolong cukup baik, dengan posisi 3 terbaik di Provinsi Banten.



Gambar 2.79  
Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.80  
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2025

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

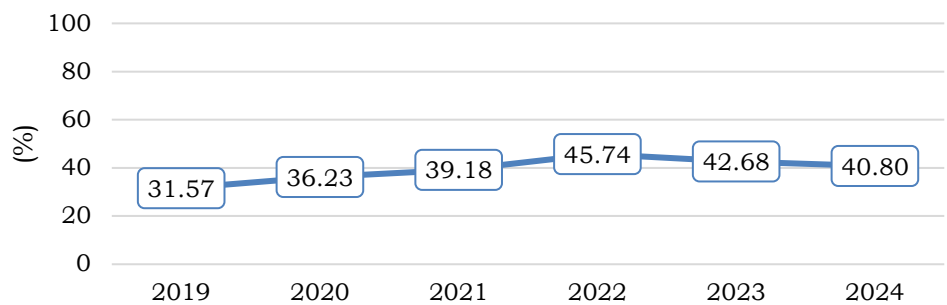
Aspek daya saing daerah bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing daerah. Aspek ini meliputi pemahaman mengenai (1) Daya saing SDM; (2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; (3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru; (4) Transformasi Digital; (5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; (6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; serta (7) Stabilitas Ekonomi Makro.

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

A) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pada Kabupaten Tangerang, Rasio Ketergantungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan tersebut merupakan 100 orang yang berusia kerja dan dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif atau

dianggap tidak produktif lagi. Hal ini menandakan bahwa jumlah penduduk yang belum produktif atau dianggap tidak produktif lagi semakin meningkat dan tidak seiring dengan peningkatan jumlah orang produktif dan berusia kerja.

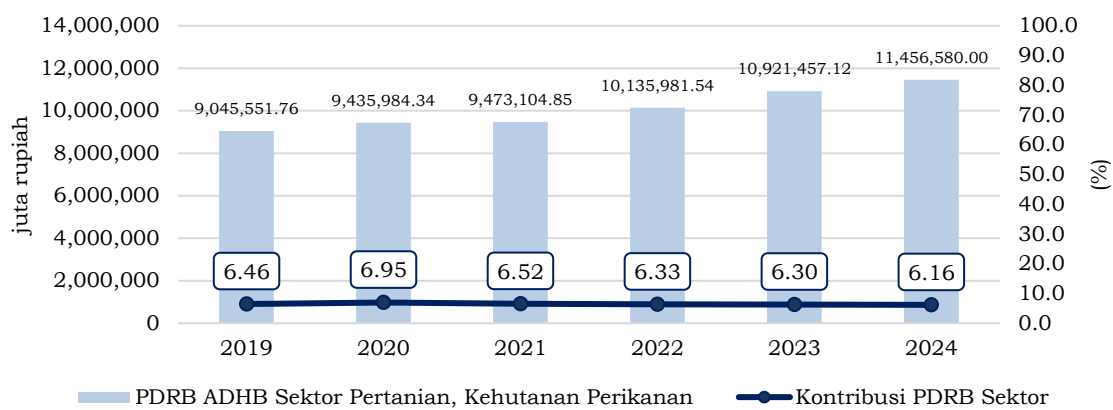


Gambar 2.81  
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

2.1.3.2 IPTEK INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

A) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

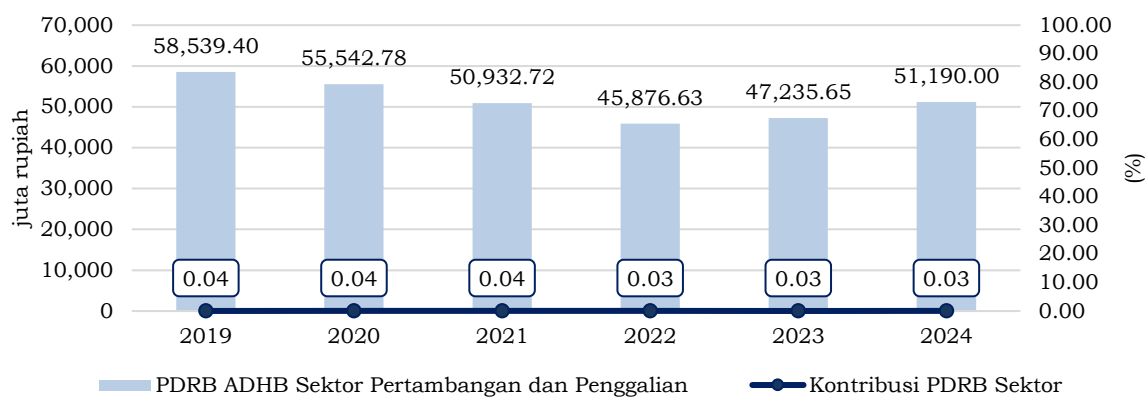
Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.82  
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

B) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

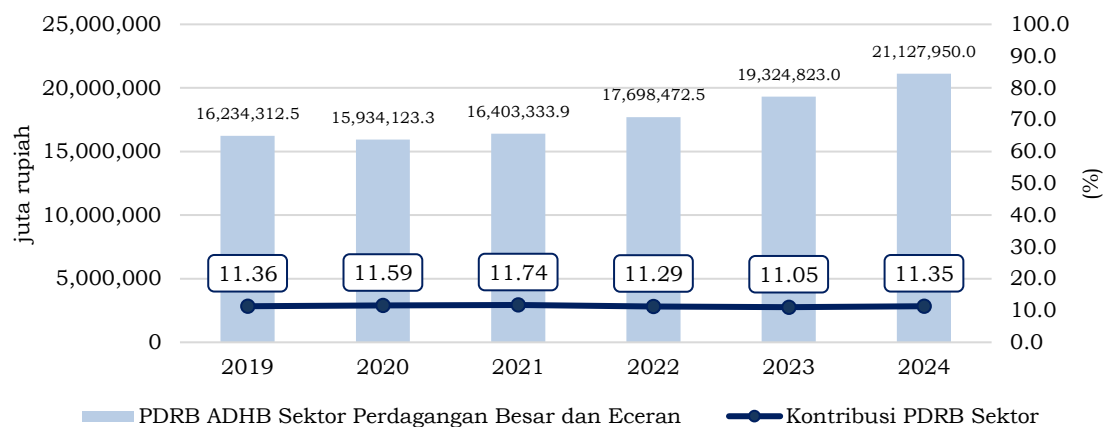
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor primer dalam perekonomian. Kontribusi sektor pertambangan Kabupaten Tangerang cenderung rendah dan mencapai nilai 0,03% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan bukan merupakan sektor yang menyokong perekonomian Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.83  
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

C) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

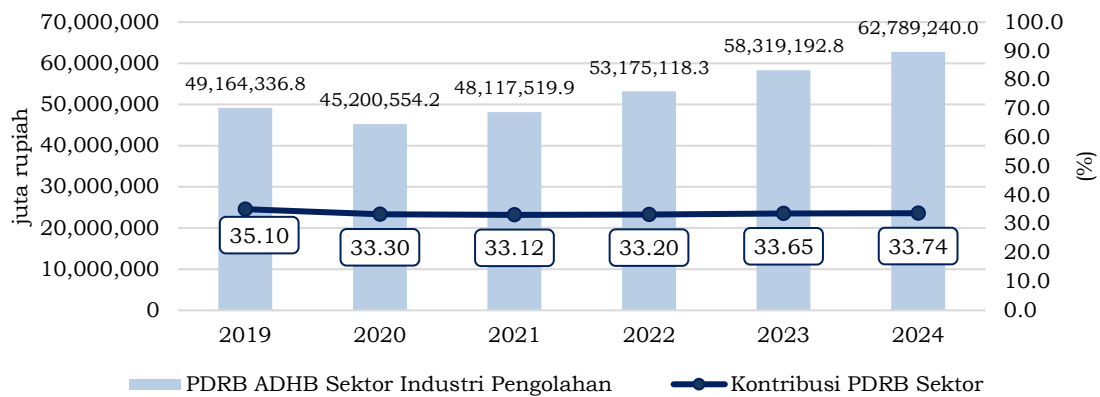
Sebagai salah satu kota penyangga Jabodetabek, Kabupaten Tangerang tumbuh didukung dengan kegiatan perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Tangerang cenderung tinggi meski mengalami tren penurunan. Dalam rentang waktu 2019-2024, kontribusi sektor perdagangan berkisar pada angka 11% dalam PDRB. Hal ini menunjukkan kuatnya perkembangan sektor perdagangan dalam menyokong ekonomi Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.84  
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

D) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

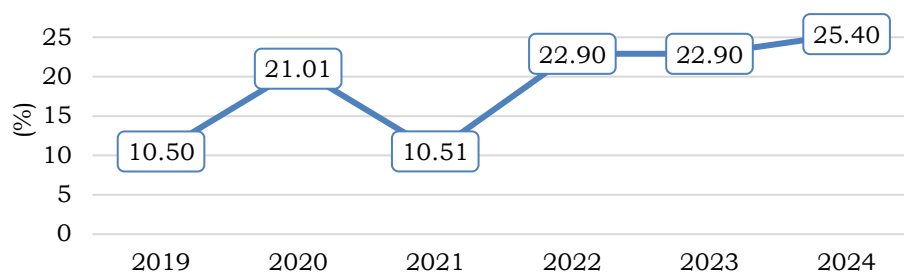
Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang. Sektor industri memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB meski tren pertumbuhannya cenderung stagnan. Kontribusi sektor industri dalam PDRB mencapai berkisar antara 34-35%. Hal ini menunjukkan bahwa industri menjadi sektor penyokong perekonomian Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.85  
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

E) Pertumbuhan Industri

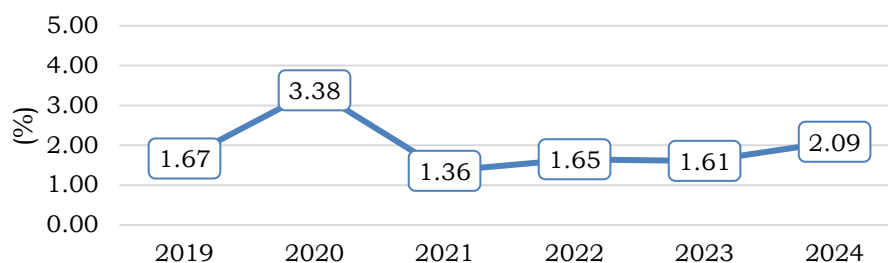
Industri sebagai salah satu sektor yang berkembang pesat di Kabupaten Tangerang tidak sering dengan pertumbuhan industri di wilayah ini. Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020-2021 dan meningkat pada tahun 2022-2024. Pertumbuhan industri di wilayah ini berkisar antara 10-25%.



Gambar 2.86  
Pertumbuhan Industri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang

F) Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio Kewirausahaan Daerah adalah perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio ini menunjukkan jumlah wirausaha yang mempekerjakan orang dalam suatu daerah. Pada tahun 2019-2024, Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi, capaian ini masih rendah sehingga diperlukan upaya untuk mendorong penciptaan wirausaha baru dan skalabilitas usaha.



Gambar 2.87  
Rasio Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

G) Partisipasi Angkatan Kerja

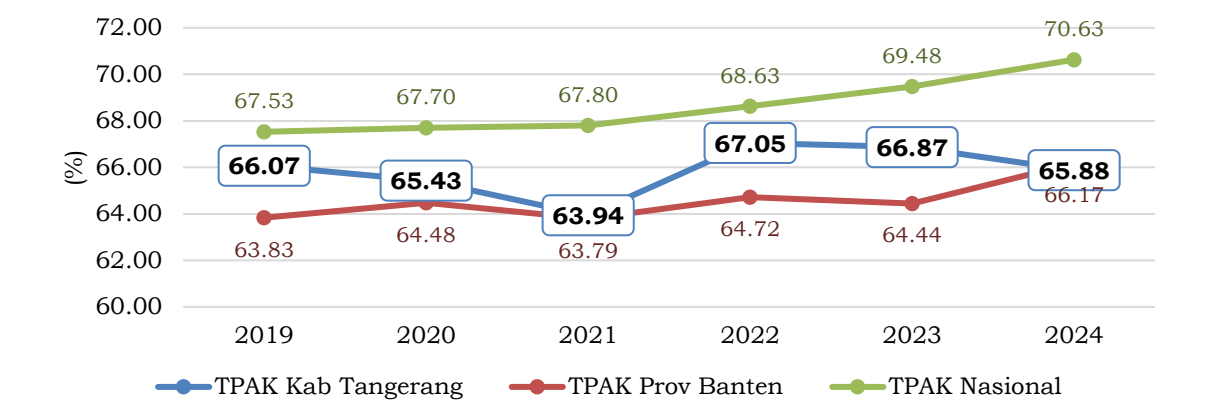
Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah angkatan kerja 15 tahun ke atas terhadap total penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang rasio penyerapan angkatan kerja dalam lapangan pekerjaan. Pada 2024, angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Tangerang tergolong rendah dalam nilai 65,88%. Hal tersebut menunjukkan serapan angkatan kerja di wilayah ini masih cenderung rendah dan masih tingginya jumlah angkatan kerja yang menganggur di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan lulusan sekolah dasar dan SLTP dalam lapangan pekerjaan. Sementara itu, masyarakat dengan lulusan SLTA dan perguruan tinggi cenderung sudah terserap dan mendapatkan pekerjaan lain.

Tabel 2.13  
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Tahun 2024

| SD    | SLTP  | SLTA  | PT    | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 58,54 | 55,73 | 74,82 | 79,27 | 65,88 |

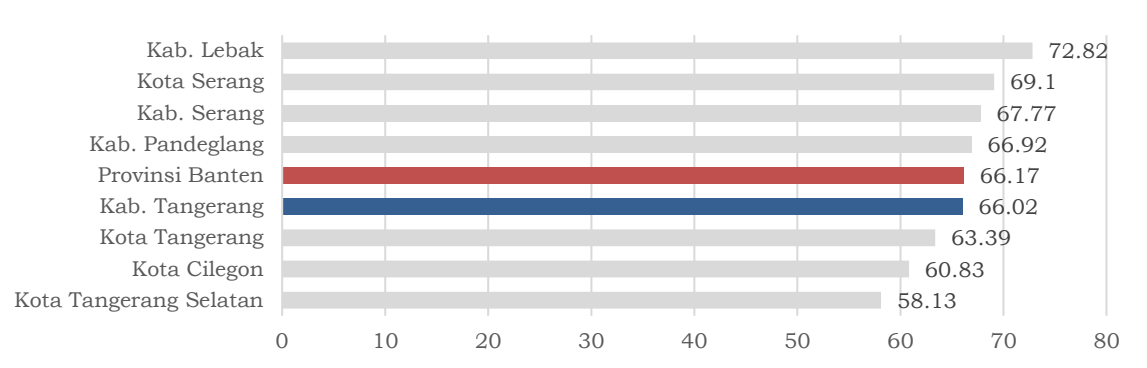
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sementara itu, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Capaian TPAK di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam enam tahun (2019-2024). Persentase ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Tangerang mencapai persentase stagnan dan memerlukan optimalisasi yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja.



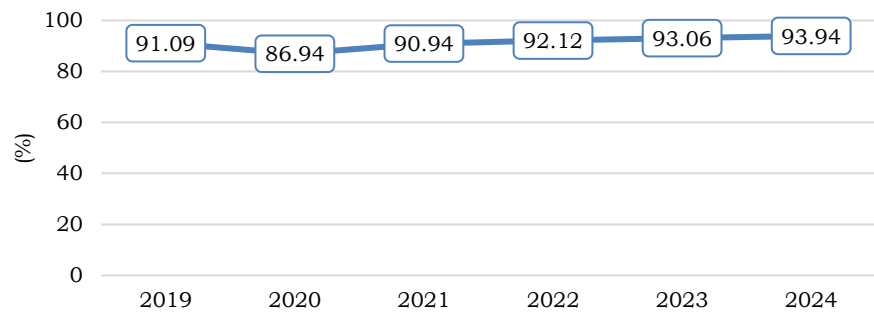
Gambar 2.88  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024





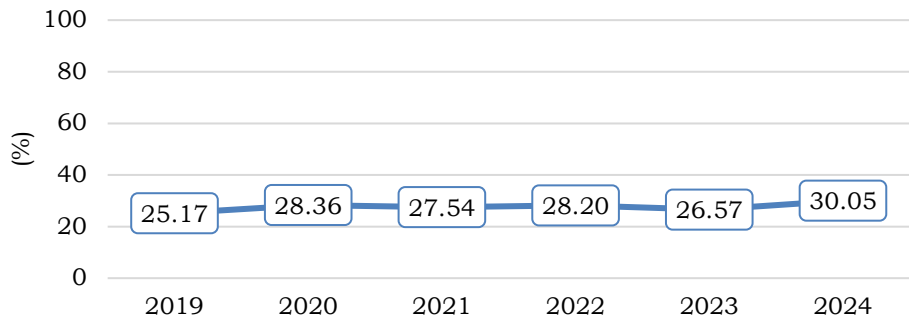
Gambar 2.89  
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di  
Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

H) Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Rasio Kesempatan Kerja atau *employment to population ratio* merupakan proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam 5 tahun (2019-2024). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tangerang sudah bekerja.



Gambar 2.90  
Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

I) Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja  
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri merupakan seseorang yang bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomi merupakan seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap. Sedangkan proporsi pekerja bebas keluarga terbagi menjadi tiga aspek yaitu pekerja bebas pertanian, pekerja keluarga dan pekerja bebas non pertanian. Pada grafik ini, kontribusi tenaga kerja ditambahkan dengan kontribusi pekerja berusaha sendiri dan dibandingkan dengan total kesempatan kerja akan menghasilkan nilai tingkat kesempatan kerja rentan.



Gambar 2.91

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

#### J) Kondisi Riset dan Inovasi

Mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, riset dan inovasi merupakan sebuah ekosistem terhubung yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di suatu daerah. Melalui ekosistem riset dan inovasi, daerah dapat melakukan akselerasi pembangunan dan menerapkan inovasi teknologi. Elemen-elemen yang membentuk ekosistem tersebut adalah: 1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; 2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di daerah; 3) kemitraan riset dan inovasi di daerah; 4) budaya riset dan inovasi di daerah; 5) keterpaduan riset dan inovasi di daerah; dan 6) penyelarasan dengan perkembangan global.

Menurut dokumen RIPJPID Kabupaten Tangerang, pelaksanaan riset dan inovasi saat ini terbagi dalam prioritas-prioritas pengembangan Program Unggulan Daerah (PUD) dan penyelesaian permasalahan utama daerah. Prioritas pengembangan PUD di Kabupaten Tangerang terdiri dari:

- 1) Prioritas 1 : Pengembangan PUD Produk Laksa
- 2) Prioritas 2 : Pengembangan PUD Alas Kaki
- 3) Prioritas 3 : Pengembangan PUD Bandeng (dan Olahannya)
- 4) Prioritas 4 : Pengembangan PUD Produk Garmen dan Tekstil
- 5) Prioritas 5 : Pengembangan PUD Produk Ikan Asin
- 6) Prioritas 6 : Pengembangan PUD Jahe Merah
- 7) Prioritas 7 : Pengembangan PUD Kerajinan Anyaman Bambu
- 8) Prioritas 8 : Pengembangan PUD Lele (dan Olahannya)
- 9) Prioritas 9 : Pengembangan PUD Tas Tali Kur
- 10) Prioritas 10 : Pengembangan PUD Olahan Singkong

Sementara, prioritas permasalahan utama daerah yang diatasi oleh inovasi dan riset adalah sebagai berikut:

- 1) Derajat kesehatan yang masih rendah
- 2) Ketimpangan pembangunan ekonomi
- 3) Penyediaan infrastruktur lingkungan
- 4) Pengelolaan kebencanaan dan lingkungan hidup
- 5) Tata kelola pemerintahan yang belum kolaboratif

#### 2.1.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Aspek pembangunan tersebut diukur melalui Indikator Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI), serta porsi EBT dalam Bauran Energi Primer. Akan tetapi, kedua indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten. Maka dari itu sebagaimana Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten, sehingga capaian

Provinsi Banten mencerminkan kondisi implementasi ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Tangerang.

Capaian *Green Economy Index* (GEI) Provinsi Banten tahun 2021 sebesar 41,83 (Bappenas, 2023). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, posisi tersebut mencerminkan kapasitas dan kesiapan Banten yang masih cenderung rendah dalam penerapan Ekonomi Hijau, terutama pada aspek yang berkaitan langsung dengan ekologi. Indikator lainnya yaitu Indeks Ekonomi Biru Indonesia untuk Provinsi Banten termasuk rendah yaitu 22,62. Selain itu, transisi EBT Provinsi Banten termasuk rendah yang ditunjukkan dengan realisasi EBT Provinsi Banten pada Tahun 2023 3,03% (0,83 MTOE) dari target 6,71%. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mendorong transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang, terlebih lagi tantangan ke depan yaitu menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

#### 2.1.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital merupakan berperan penting sebagai *enabler* percepatan pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi digital dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan *super platform*, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital.

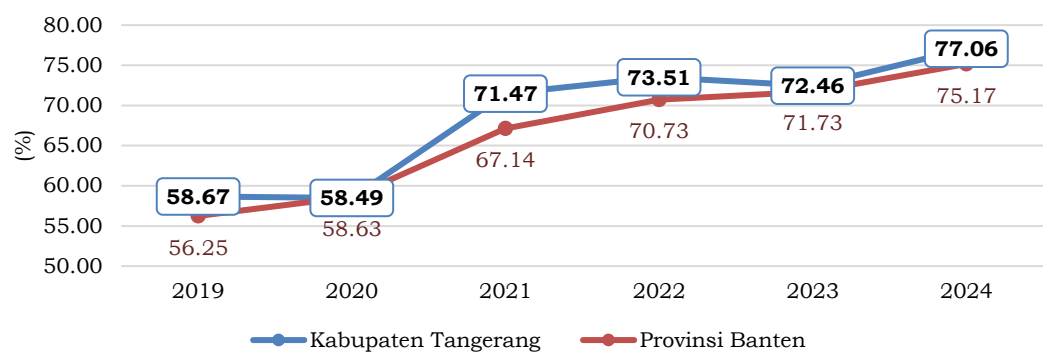
##### A) Indeks Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital suatu daerah dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Indeks Transformasi Digital Nasional. Akan tetapi, indikator tersebut belum dilakukan perhitungan di tingkat kabupaten. Maka dari itu sebagaimana Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Provinsi Banten, sehingga capaian Provinsi Banten mencerminkan transformasi digital di Kabupaten Tangerang.

Capaian Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) Provinsi Banten tahun 2022 sebesar 55,83. Capaian tersebut di atas rata-rata nasional yaitu 49,20, tetapi masih jauh tertinggal dari Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mendorong transformasi digital di Kabupaten Tangerang melalui pengembangan infrastruktur digital, produksi talenta digital, dan tata kelola layanan publik melalui *e-government*.

##### B) Rumah Tangga dengan Akses Internet

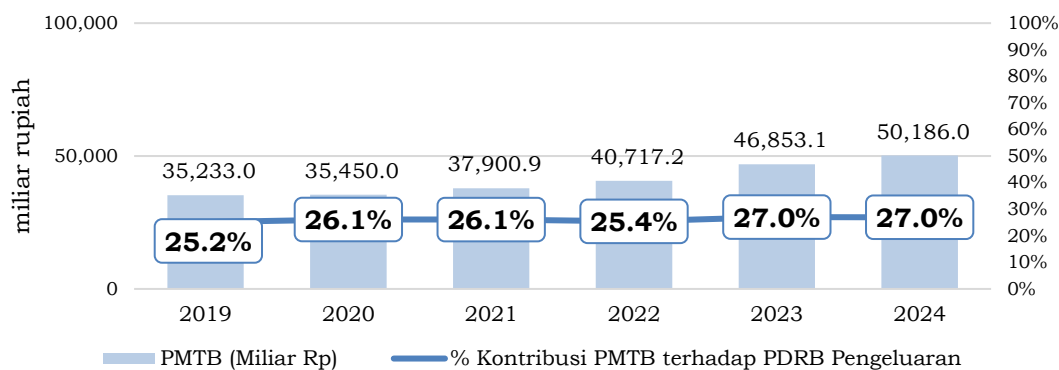
Jangkauan dan akses terhadap internet menunjukkan keterbukaan terhadap informasi layanan dasar, peluang ekonomi (*e-commerce*), pengembangan sumber daya manusia (literasi digital), dan lain sebagainya. Kabupaten Tangerang sendiri memperlihatkan tren yang positif dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Dalam hal ini, pengguna internet di Kabupaten Tangerang menempati posisi ketiga terbanyak di Provinsi Banten di bawah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.



Gambar 2.92  
Persentase Penduduk yang Mengakses Internet di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten

2.1.3.5 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

A) Pembentukan Modal Tetap Bruto  
Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi pengeluaran. PMTB mengukur besarnya investasi dalam aset tetap, yaitu aset yang digunakan dalam jangka panjang untuk menghasilkan barang atau jasa.



Gambar 2. 93  
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

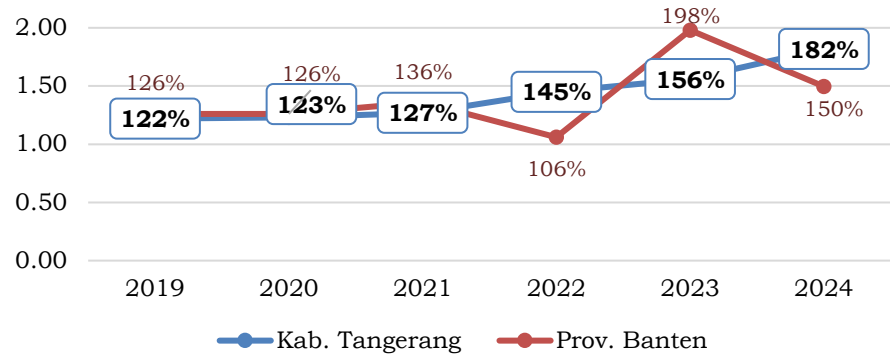
Pada tahun 2024, PMTB Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi sebesar 26,97% kepada perekonomian. Dalam lima tahun terakhir, Nilai PMTB mengalami peningkatan dengan rata-rata 7,3% per tahun dan selaras dengan peningkatan kontribusinya terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Tangerang.

Nilai PMTB berhubungan dengan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang. Kinerja investasi Kabupaten Tangerang terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif dan berhasil meningkat 55,3 dari tahun 2021-2022 (DPMPTSP, 2022). Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

B) Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio ekspor dan impor terhadap PDB merupakan indikator keterbukaan ekonomi suatu wilayah. Nilai indikator keterbukaan ekonomi dapat dihitung menggunakan perbandingan antara total nilai ekspor dan impor barang dan jasa pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan PDB dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi kegiatan ekspor dan impor,

semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah. Nilai ekspor dan impor Kabupaten Tangerang dapat dilihat melalui PDRB ADHB menurut pengeluaran.



Gambar 2.94  
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025*

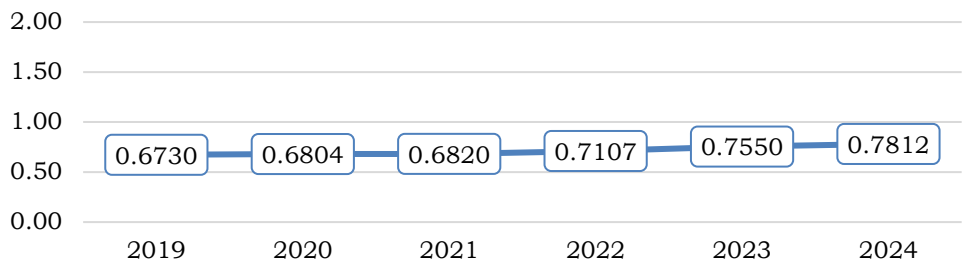
Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Kabupaten Tangerang perlahan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ekspor atau penjualan barang dan jasa keluar daerah lebih tinggi daripada impor yang berdampak kepada peningkatan pasar dan daya saing ekonomi daerah.

2.1.3.6 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

A) Indeks Desa

Indeks Desa merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan suatu desa dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memedomani Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Indeks Desa menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa dan digunakan sebagai indikator pembangunan dalam RPJP dan/atau RPJM nasional serta daerah. Pada periode sebelum tahun 2024, telah ada indikator Indeks Super untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Maka dari itu, dalam mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa dalam lima tahun terakhir menggunakan Indeks Desa Membangun.



Gambar 2.95  
Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*

Capaian indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 sebesar 0,7820 dengan status ‘Maju’. Capaian IDM Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten (0,6930) dan nasional

(0,7034). Dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tangerang.

B) Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan. Rasio rumah layak huni dapat dihitung dengan perbandingan jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Kabupaten Tangerang memiliki rasio rumah layak huni yang menurun pada tahun 2019-2021. Cakupan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk yang memiliki rumah layak huni.

Tabel 2.14

Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang

| Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|
| 2019                                       | 2020 | 2021 |
| 0,30                                       | 0,27 | 0,26 |

Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

C) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.

Tabel 2.15

Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

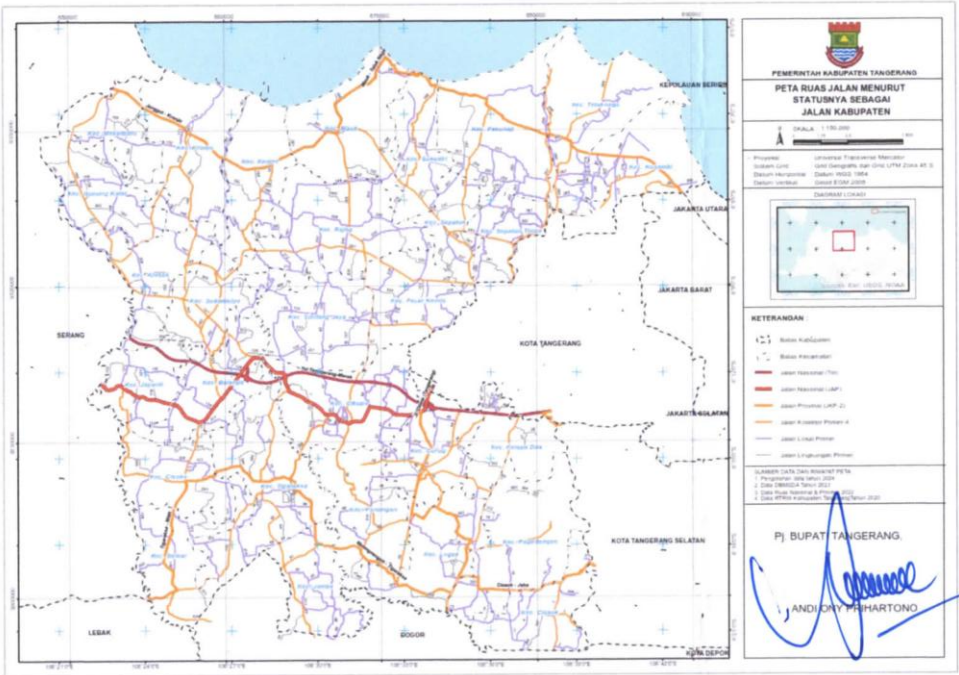
| Indikator                                        | Tahun  |        |        |        |        |         |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024*)  |
| Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (km)   | 566,25 | 569,28 | 752,7  | 774,86 | 802,16 | 463,74  |
| Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Sedang (km) | 312,75 | 299,79 | 148    | 114,21 | 132,86 | 243,92  |
| Panjang Jalan Total (km)                         | 992,61 | 992,61 | 992,61 | 992,61 | 992,61 | 1096,26 |
| Persentase Kondisi Jalan Mantap (%)              | 88,55% | 87,55% | 90,74% | 92,59% | 94,20% | 64,55%  |

Sumber: [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id), 2023

\*) Estimasi Kondisi sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten

Proporsi panjang jalan di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren yang meningkat. Jika dilihat dari persentase, jalan mantap berhasil naik dari 88,55% pada tahun 2019 menjadi 94,20% pada tahun 2023. Angka proporsi jalan dalam kondisi mantap memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan (kondisi baik dan sedang). Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara. Sementara itu, data tahun 2024 menunjukkan penurunan persentase jalan dalam kondisi mantap menjadi 64,55%, karena adanya penyesuaian status jalan kabupaten sesuai Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten. Berikut peta ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten sesuai surat keputusan tersebut.

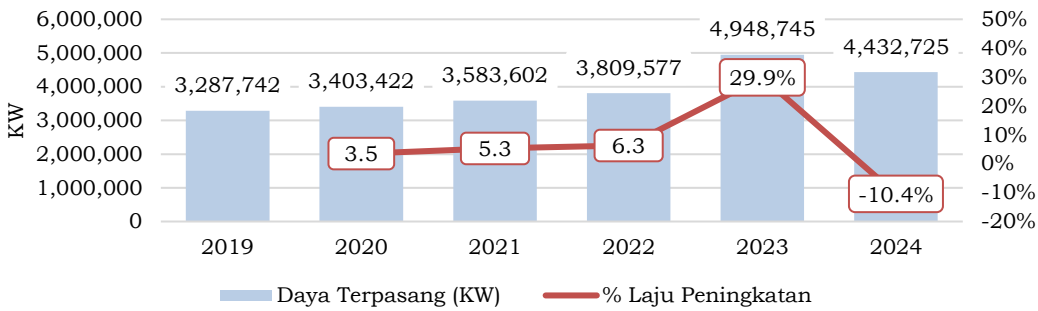




Gambar 2.84  
Peta Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten Tahun 2024  
Sumber: Lampiran II Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.1/Kep.899-Huk/2024

D) Daya Listrik Terpasang

Daya listrik yang terpasang menunjukkan jumlah kWh yang mampu digunakan di kabupaten/kota masing-masing. Daya ini dialirkan untuk memberikan layanan listrik kepada rumah tangga. Pada tahun 2024, besaran daya terpasang di Kabupaten Tangerang sebesar 4,43 juta KW dan menjadi kabupaten yang memiliki daya listrik terbesar di Provinsi Banten.



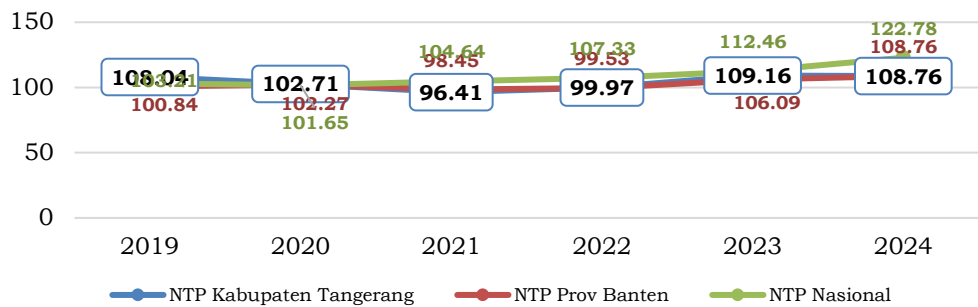
Gambar 2.85  
Daya Listrik Terpasang di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

E) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani padi dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani padi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jurnal *Social Economic of Agriculture*, NTP di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan angka NTP. Pada tahun 2023, NTP Kabupaten Tangerang sebesar 109,16 dan capaian ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Banten tetapi lebih rendah dibandingkan nasional. Capaian NTP Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2021 menunjukkan penurunan capaian NTP yang mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani Kabupaten Tangerang semakin menurun, meskipun angka tersebut tergolong cukup



tinggi. Meskipun sempat meningkat pada 2021-2023, capaian NTP kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 108,76



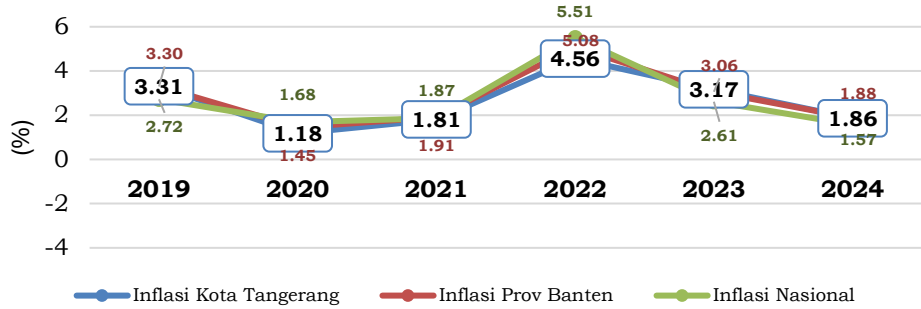
Gambar 2.96

Nilai Tukar Petani Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten; BPS Nasional; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2.1.3.7 STABILITAS EKONOMI MAKRO

A) Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase peningkatan kenaikan harga barang dan jasa konsumsi rumah tangga. Laju inflasi berpengaruh erat terhadap perekonomian masyarakat salah satunya adalah daya beli masyarakat. Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk pada inflasi Kota Tangerang<sup>1</sup>. Berdasarkan data BPD Kabupaten Tangerang, secara umum laju inflasi Kabupaten Tangerang meningkat drastis setelah menurun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari Bank Indonesia (2024), laju inflasi 2024 (yoy), inflasi tetap terjaga mengalami perlambatan dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Penurunan laju inflasi perlu diperhatikan, karena deflasi yang berkepanjangan bisa mengindikasikan pelemahan ekonomi. Maka dari itu diharapkan inflasi terus terjaga di 2,5%+1,0%.



Gambar 2.97

Laju Inflasi Kota Tangerang (termasuk Kabupaten Tangerang) dan Nasional Tahun 2019-2024

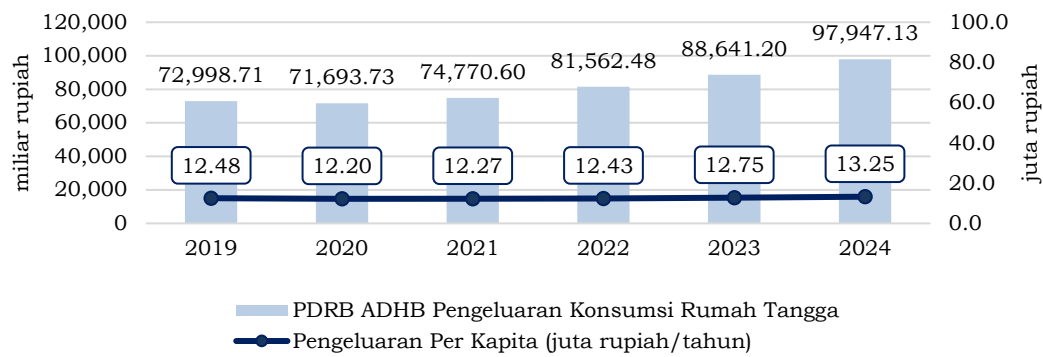
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024); Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Banten, Bank Indonesia (2025)

B) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

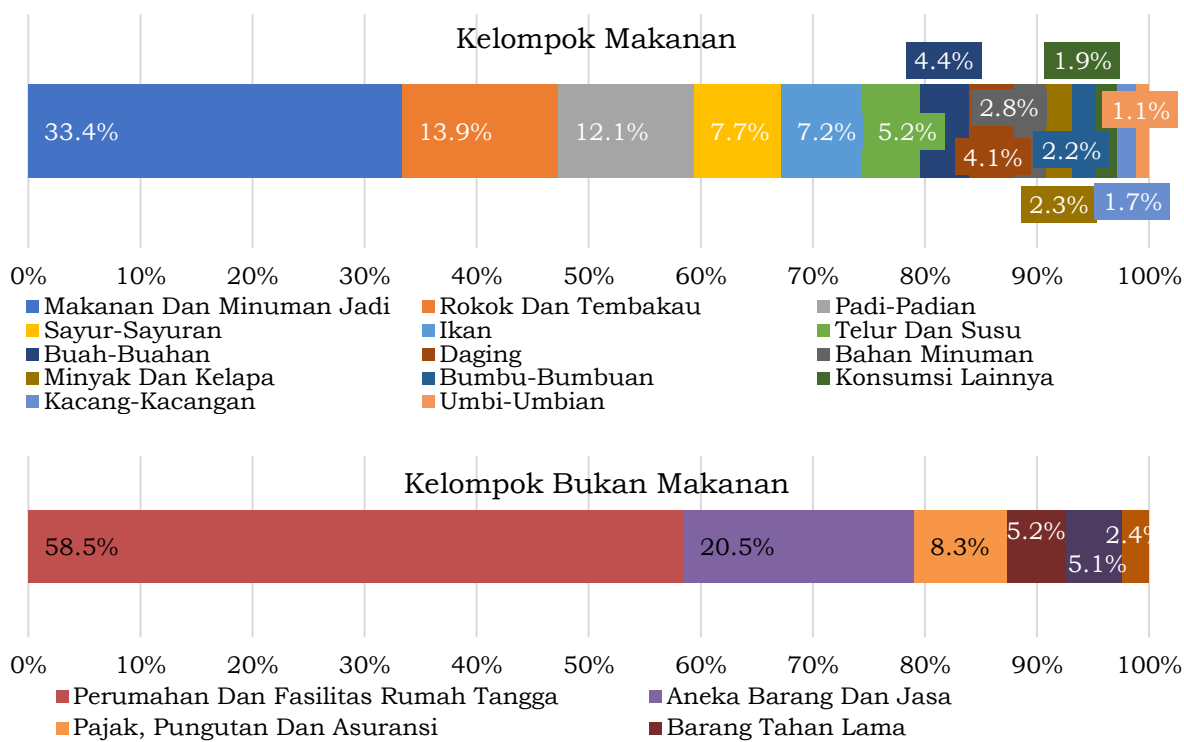
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dapat dilihat melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tangerang, pengeluaran konsumsi rumah tangga (2019-2024) meningkat 6,1% per tahun. Pada tahun 2021-2023 terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya peningkatan

<sup>1</sup> Inflasi Kabupaten Tangerang merujuk kepada inflasi Kota Tangerang sebagai *sister city* dengan pola konsumsi dan besaran PDRB yang hampir sama serta letak geografis yang berdekatan dengan Kabupaten Tangerang

penghasilan masyarakat yang tercermin pada peningkatan kinerja sektor Perdagangan, Transportasi, dan Pariwisata (Bank Indonesia, 2023)<sup>2</sup>.



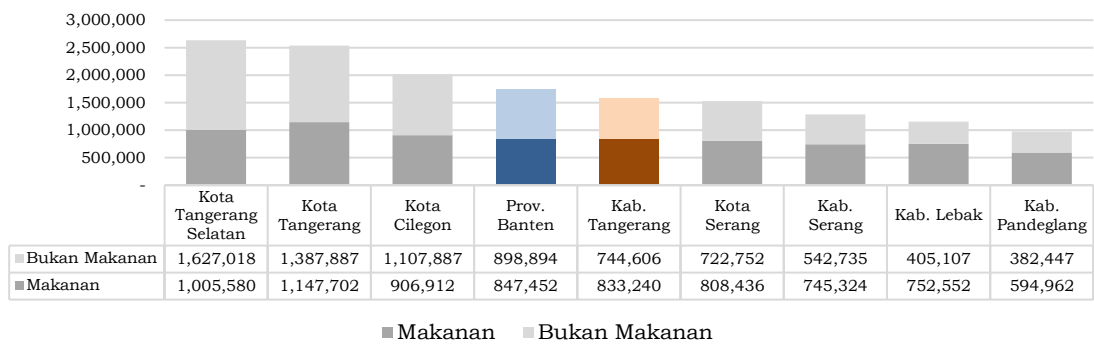
Gambar 2.98  
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025



Gambar 2.99  
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Tangerang Tahun 2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (diolah)

Pada tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.577.846 per jiwa/bulan dengan pengeluaran kelompok makanan sebesar Rp833.240 per jiwa/bulan (atau 52,43% dari total pengeluaran) dan pengeluaran kelompok bukan makanan sebesar Rp744.606 per jiwa/bulan (atau 47,57% dari total pengeluaran).

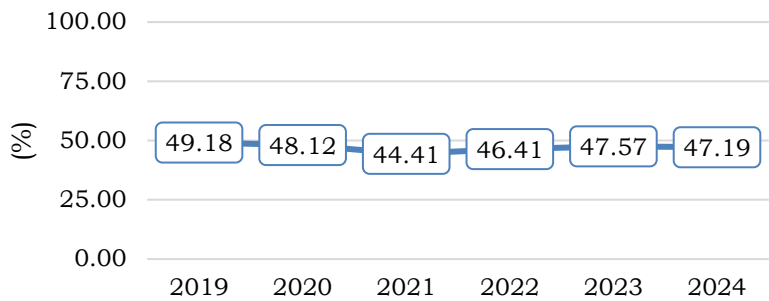
<sup>2</sup> Bank Indonesia (2023). Laporan Perekonomian Provinsi Banten November 2023.  
<https://ketenteraman.bi.go.id/id/publikasi/>



Gambar 2.100  
Perbandingan Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

Perbandingan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan perbandingan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan/atau kontribusi sektor ekonomi, serta potensi pasar dalam suatu daerah. Berdasarkan diagram di atas, bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Tangerang tertinggi keempat di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Selain itu, dari gambar di atas tercermin bahwa wilayah perkotaan memiliki kecenderungan pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran bukan makanan.

C) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita  
Pengeluaran konsumsi non pangan merupakan nilai seluruh kemampuan daya beli penduduk dalam bentuk non pangan. Konsumsi non pangan terdiri atas lima sektor dengan jumlah persentase terbesar adalah sektor perumahan dan fasilitas rumah tangga. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada kurun waktu 2019-2024 memiliki angka yang stagnan. Hal ini menandakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung tidak diinvestasikan kepada sektor lain selain konsumsi pangan. Maka dari itu, sektor konsumsi non pangan yang penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi terbatas.



Gambar 2.101  
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Aspek ini meliputi 4 (empat) sub-bab yaitu (1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif; (2) Hukum Berkeadilan Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial; (3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan serta (4) Kinerja Urusan Pemerintah

Daerah yang terbagi atas fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

A) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu penilaian atas upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Pada tahun 2019 hingga 2022, IRB cenderung mengalami peningkatan dengan capaian 62,74 dengan kategori BB/baik, perlu sedikit perbaikan.

Mulai tahun 2023, komponen penilaian Indeks RB berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 9 Tahun 2023. Didapatkan perolehan RB General sebesar 65,94 dan RB Tematik sebesar 10,73. Hasil akhir evaluasi menunjukkan bahwa capaian Indeks RB di Kabupaten Tangerang tahun 2023 adalah 76,67 dengan kategori BB. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 84,56 dengan kategori A-. Di tahun 2024, perolehan RB General adalah 75,14 dan RB Tematik sebesar 9,42.

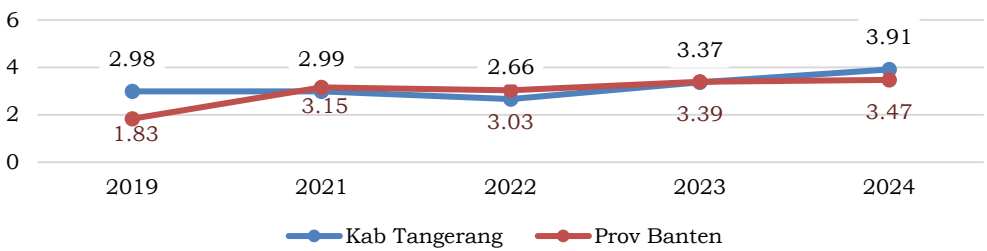
Tabel 2.16  
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Indeks Reformasi Birokrasi |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 50,37                      | 58,39 | 58,84 | 62,74 | 76,67 | 84,56 |

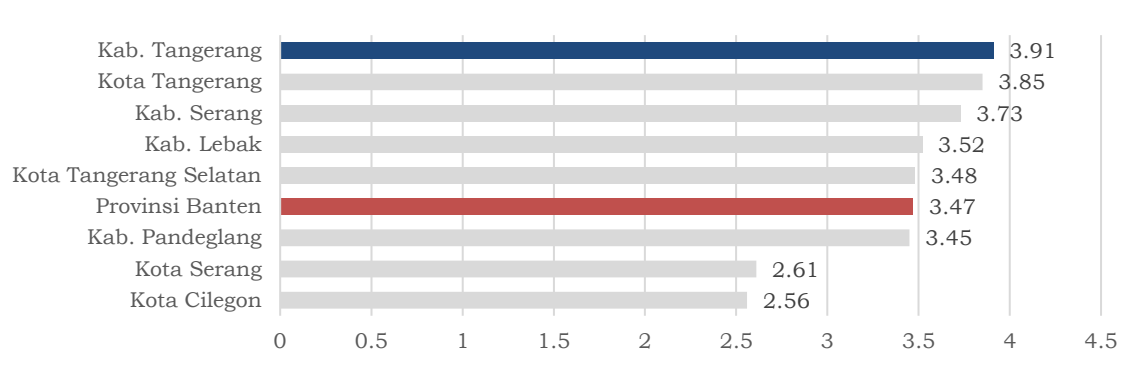
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

B) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Tangerang meningkat dalam 3 tahun terakhir, mencapai 3,91 dari nilai maksimal 5,00 di tahun 2024. Kabupaten Tangerang menduduki peringkat pertama dengan indeks SPBE tertinggi di Provinsi Banten, dibandingkan dengan kota/kabupaten lain, sekaligus lebih unggul dibandingkan capaian provinsi.



Gambar 2.102  
Indeks SPBE Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten Tahun 2019-2024  
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2020-2025



Gambar 2.103  
Perbandingan Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2025

C) Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. IPP diukur berdasarkan enam aspek, yaitu (1) kebijakan pelayanan; (2) profesionalisme SDM; (3) sarana dan prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) konsultasi dan pengaduan; serta (6) inovasi pelayanan. Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 adalah sebesar 4,08 dan meningkat di tahun 2024 menjadi sebesar 4,17.

Tabel 2.17  
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 – 2024

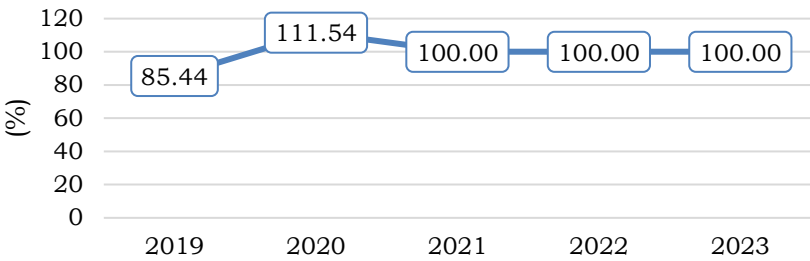
| Indeks Pelayanan Publik |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
| 2021                    | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3,91                    | 4,12 | 4,08 | 4,17 |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

A) Persentase Penegakan Perda

Dalam menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat diperlukan adanya penegakan peraturan daerah. Penyelesaian penegakan perda di wilayah ini sudah tergolong baik yakni pada 2020-2023 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjamin ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda.

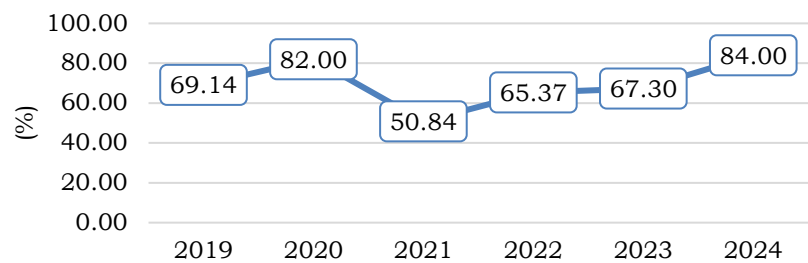


Gambar 2.104  
Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

B) Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas yang tertangani merupakan indikator keamanan di mana tindak kriminal sudah ditangani dalam suatu wilayah tertentu. Angka kriminalitas yang tertangani dapat dihitung dengan jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Pada Kabupaten Tangerang, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 1.309 kasus yang

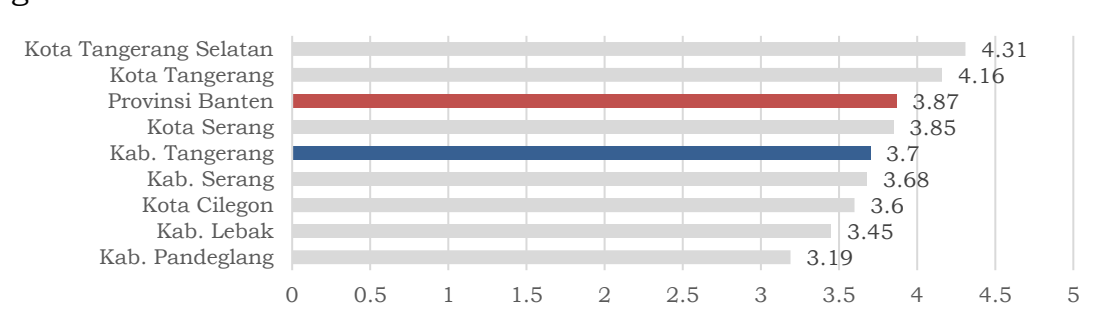
tertangani pada tahun 2023. Dalam 6 tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 84%. Hal ini menandakan bahwa instansi terkait dapat mengatasi kasus kriminalitas yang semakin meningkat dan tingkat keamanan juga semakin tinggi.



Gambar 2.105  
Persentase Angka Kriminalitas atau Tindak Pidana yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten

2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BUDAYA GENTAR KAWASAN

A) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)  
Indeks Daya Saing Daerah merupakan posisi relatif suatu daerah dengan standar faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta potensi yang dapat digali terhadap posisi daerah lain. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai 3,70 dan capaian ini berada di posisi keempat capaian IDSD tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan nilai IDSD Kabupaten Tangerang. Komponen pilar yang unggul di Kabupaten Tangerang adalah Pilar 10 “Ukuran Pasar”. Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 11 “Dinamisme Bisnis”.



Gambar 2.106  
Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

B) Indeks Inovasi Daerah  
Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur dan menilai penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Di tahun 2024, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebesar 63,15 dengan kategori sangat inovatif.

Tabel 2.18  
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Indeks Inovasi Daerah |       |      |      |       |       |
|-----------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 2019                  | 2020  | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  |
| 2.274                 | 41,16 | 54,7 | 54,7 | 61,49 | 63,15 |

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

2.1.4.4 KINERJA URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Layanan Urusan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Aspek ini meliputi tiga fokus utama yaitu fokus layanan urusan wajib dasar, fokus layanan urusan wajib non dasar dan fokus layanan urusan pilihan.

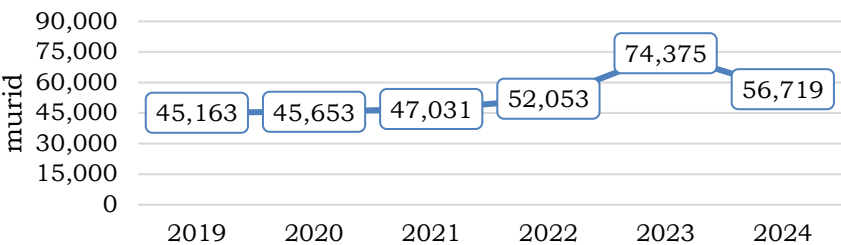
A) Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar merupakan pelayanan yang berfokus kepada kebutuhan wajib masyarakat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Fokus ini meliputi unsur pendidikan, unsur kesehatan, unsur pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur perumahan rakyat dan kawasan permukiman, unsur ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta unsur sosial.

1) Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan yang berfokus pada pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan tingginya jumlah murid PAUD. Selain itu, pertumbuhan PAUD juga memiliki tren positif pada kurun waktu 2019-2023. Namun, di tahun 2024 terjadi penurunan jumlah peserta didik PAUD yang cukup besar menjadi 56.719 siswa.

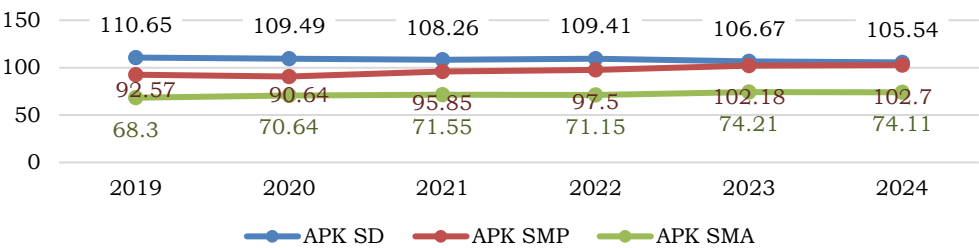


Gambar 2.90

Jumlah Murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024 dan Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2024

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar sekolah dasar di Kabupaten Tangerang di tahun 2024 menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 105,54. Selain itu, angka partisipasi kasar SLTP juga tergolong tinggi. Kedua hal tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah penduduk yang bersekolah pada tingkat sekolah dasar dan SLTP yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian usia dengan jenjang yang ditempuh. Sedangkan APK SLTA berkisar pada nilai 74,11 yang mengindikasikan bahwa masih adanya penduduk usia SLTA yang belum/tidak mengambil pendidikan setara SLTA.



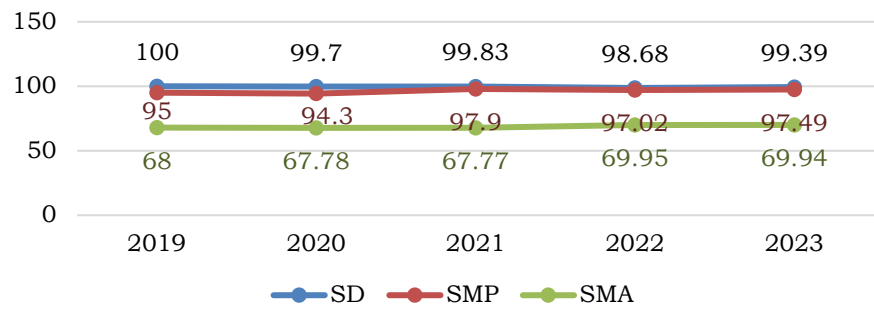
Gambar 2.91

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2020-2025



c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Tangerang didominasi oleh jenjang sekolah dasar. Hampir seluruh masyarakat telah mengenyam bangku sekolah dasar. Sedangkan pada jenjang SLTP, angka pendidikan yang ditamatkan berkisar di angka 90. Hal ini menunjukkan adanya masyarakat yang belum menempuh pendidikan SLTP. Di sisi lain, masyarakat yang mampu menamatkan bangku pendidikan SLTA masih tergolong rendah dan berkisar pada angka 70. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat Kabupaten Tangerang yang belum mengenyam pendidikan SLTA.



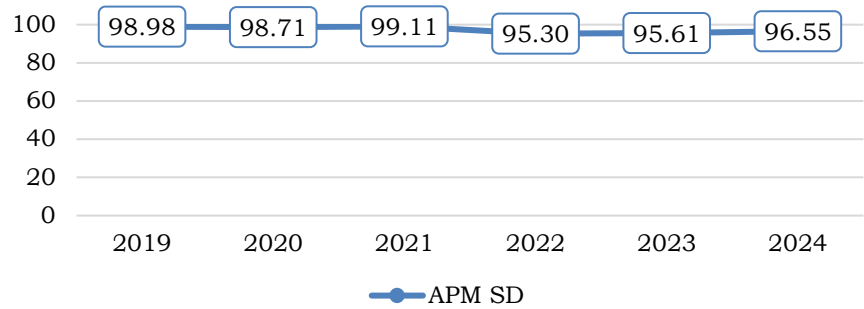
Gambar 2.107  
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2024

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah rasio antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai. APM merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian jumlah masyarakat yang bersekolah sesuai dengan usianya.

➤ Angka Partisipasi Murni (APM) SD

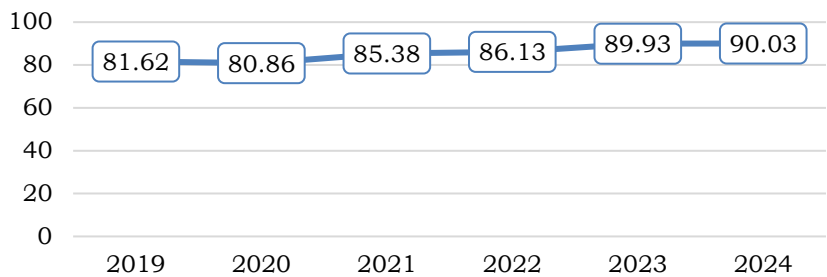
APM tingkat sekolah dasar di Kabupaten Tangerang tergolong pada tingkat tinggi. Namun selama 2 tahun terakhir, APM tingkat sekolah dasar mengalami penurunan yang dimungkinkan karena masih ditemukannya anak yang tidak bersekolah sesuai dengan usianya. Harapannya seiring berjalannya waktu kondisi ini dapat diperhatikan untuk memberikan pendidikan bagi seluruh anak-anak.



Gambar 2.108  
Angka Partisipasi Murni SD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

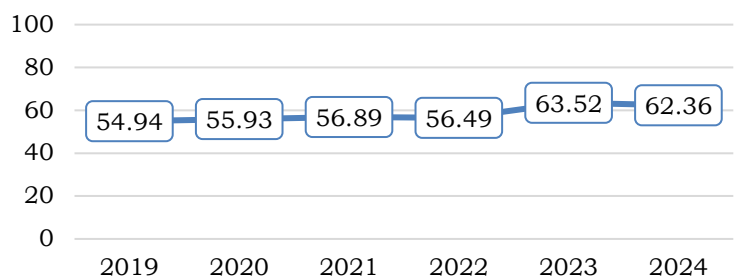
➤ Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP

Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP terus meningkat dari waktu ke waktu. Akan tetapi, peningkatan ini masih jauh dari ideal. APM SLTP di Kabupaten Tangerang berkisar dalam rentang nilai 80-90%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya masyarakat berusia SLTP yang tidak bersekolah. Maka dari itu diperlukan penanganan lebih lanjut untuk mengatasi kondisi ini.



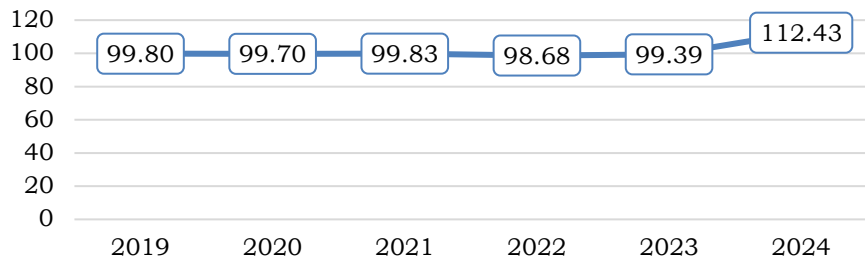
Gambar 2.109  
Angka Partisipasi Murni SMP/Mts/Paket B Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

- **Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA**  
Angka Partisipasi Murni tingkat SLTA tergolong rendah meski pada 2023 telah meningkat tajam. Nilai APM yang jauh dari ideal ini memerlukan penanganan khusus agar masyarakat mampu melanjutkan pendidikan secara merata.



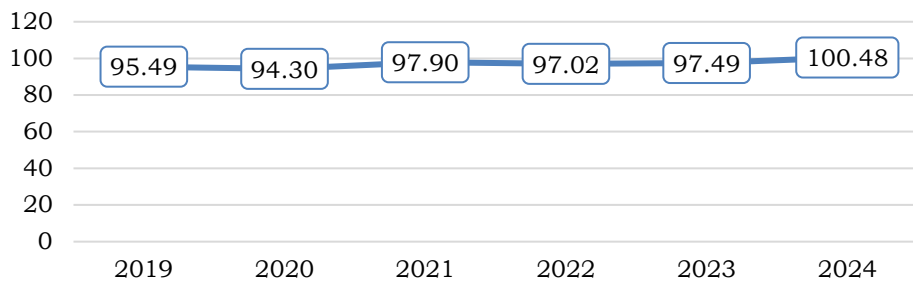
Gambar 2.95  
Angka Partisipasi Murni SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

- e. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio jumlah murid usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS menunjukkan ukuran daya serap sistem pendidikan dalam masyarakat sesuai dengan kelompok usianya.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD**  
Angka Partisipasi Sekolah PAUD menunjukkan angka partisipasi sekolah bagi siswa berusia 5-6 tahun atau setingkat TK/RA. Capaian APS PAUD di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 adalah 8,30%. Berdasarkan capaian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat setidaknya setengah penduduk Tangerang usia 5-6 tahun yang belum bersekolah dalam rangka persiapan pra-SD. Kecamatan yang penduduknya paling banyak bersekolah untuk persiapan pra-SD adalah Kec. Sepatan sebesar 72,9%. Sedangkan paling kecil pada Kec. Kemiri sebesar 26,47%.
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD**  
Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 7-12 tahun menunjukkan nilai yang baik meski belum sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7-12 tahun sebagian besar menempuh pendidikan dasar. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa anak yang tidak/belum mengenyam pendidikan dasar.



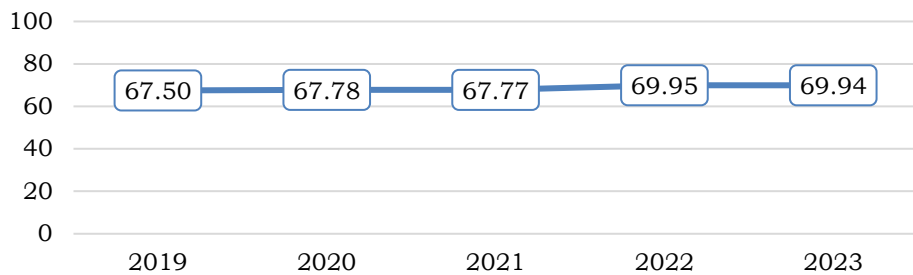
Gambar 2.110  
Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP**  
Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 13-15 tahun atau SLTP tergolong tinggi meski mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Tingginya nilai ini mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan setara SLTP. Meskipun demikian masih terdapat sebagian penduduk dalam rentang usia tersebut yang belum mengenyam pendidikan menengah.



Gambar 2.111  
Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

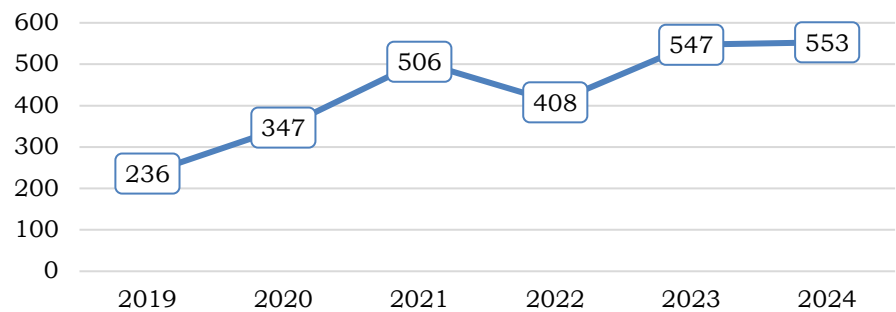
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA**  
Angka Partisipasi Sekolah rentang usia 16-18 tahun atau setingkat SLTA di Kabupaten Tangerang masih tergolong rendah meski telah meningkat dari waktu ke waktu. Rendahnya APS di rentang usia ini menunjukkan banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan tingkat atas di Kabupaten Tangerang. Hal ini seharusnya mampu menjadi perhatian tersendiri untuk memberikan pendidikan tingkat atas bagi masyarakat.



Gambar 2.112  
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

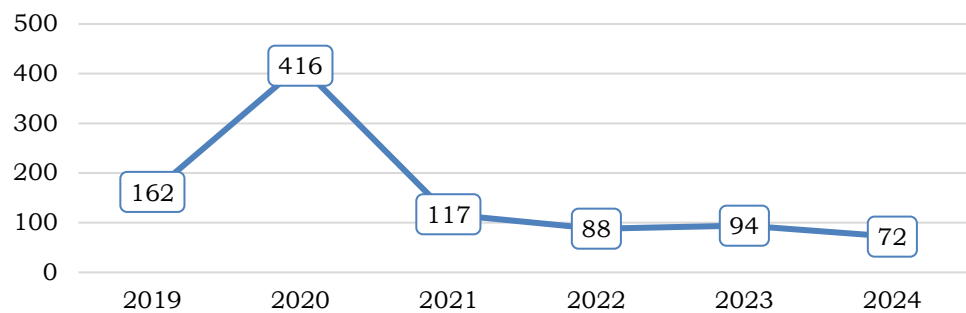
- f. **Angka Putus Sekolah**  
➤ **Angka Putus Sekolah SD**  
Putus sekolah merupakan fenomena yang masih terus berkembang di Kabupaten Tangerang. Jumlah siswa putus sekolah di wilayah ini cenderung berfluktuasi. Jumlah siswa SD yang putus sekolah mengalami

tren peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan masih tingginya masyarakat usia pendidikan dasar yang mengalami putus sekolah.



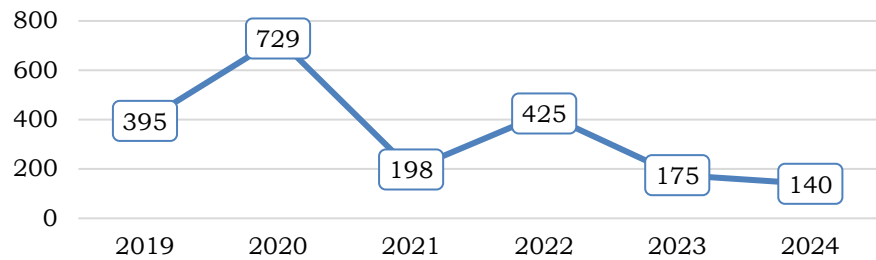
Gambar 2.113  
Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

➤ **Angka Putus Sekolah (APS) SLTP**  
Fenomena putus sekolah juga banyak berkembang pada siswa SLTP. Jumlah siswa putus sekolah melonjak drastis pada 2020. Meskipun demikian jumlah siswa SLTP yang putus sekolah menurun pada 2021 menurun dari waktu ke waktu. Permasalahan adanya siswa yang putus sekolah ini perlu menjadi penanganan tersendiri khususnya untuk menciptakan generasi yang berkualitas.



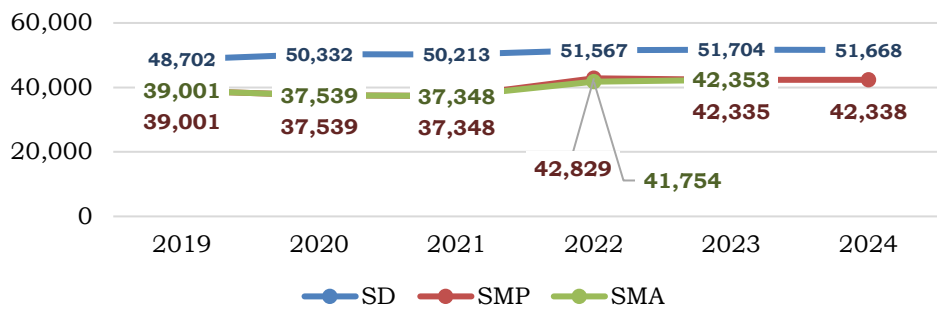
Gambar 2.100  
Angka Putus Sekolah (APS) SLTP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

➤ **Angka Putus Sekolah (APS) SLTA**  
Jumlah siswa SLTA yang putus sekolah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada 2020, jumlah siswa SLTA yang putus sekolah mencapai 729 siswa, sedangkan pada 2024 jumlah tersebut dapat menurun hingga angka 140 siswa. Tingginya jumlah siswa yang putus sekolah dapat mempengaruhi kualitas dan kesempatan kerja masyarakat Kabupaten Tangerang.



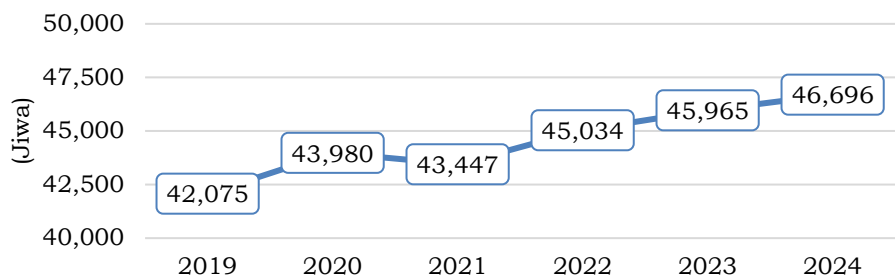
Gambar 2.101  
Angka Putus Sekolah (APS) SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

g. Jumlah Kelulusan Siswa  
Jumlah Kelulusan Siswa di Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2019-2024 secara umum relatif mengalami peningkatan dari waktu ke waktu hal ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang.



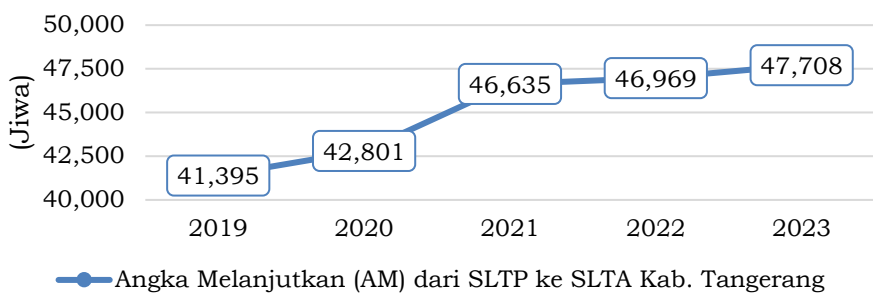
Gambar 2.102  
Jumlah Siswa Lulus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2025

h. Angka Melanjutkan  
➤ Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SLTP  
Angka melanjutkan dari SD ke SLTP merupakan persentase jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP. Angka melanjutkan dari SD ke SLTP Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.



Gambar 2.114  
Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SLTP Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

➤ Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA  
Angka melanjutkan dari SLTP ke SLTA merupakan persentase jumlah lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA. Angka melanjutkan dari SLTP ke SLTA Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya angka melanjutkan ini mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah. Meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan.



Gambar 2.115  
Angka Melanjutkan (AM) dari SLTP ke SLTA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

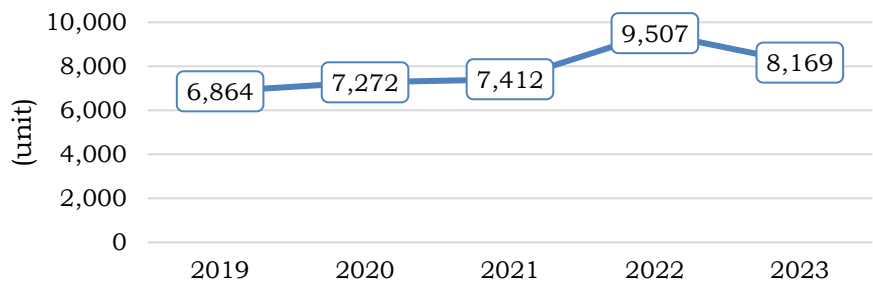
i. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Bentuk pendidikan nonformal diselenggarakan antara lain oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), dan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Data tahun 2024 menunjukkan, Kabupaten Tangerang memiliki 1.579 unit PAUD dengan status 16 PAUD negeri dan 1.563 PAUD swasta, 29,77% di antaranya telah terakreditasi. Kemudian terdapat 98 PKBM, 48,98% sudah terakreditasi, serta satu SKB terakreditasi.

j. Fasilitas Pendidikan

➤ Fasilitas Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik

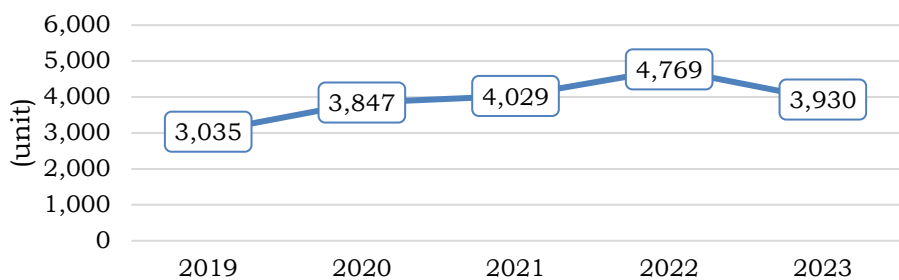
Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SD dengan kondisi baik relatif meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SD dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dapat memberikan layanan pendidikan dengan kualitas yang baik.



Gambar 2.116  
Jumlah Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

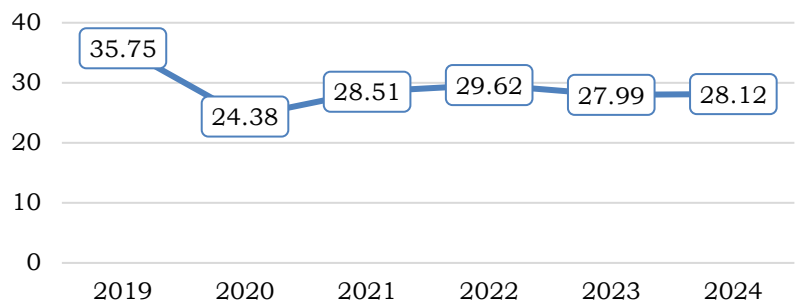
➤ Fasilitas Pendidikan SLTP Kondisi Bangunan Baik

Kualitas fasilitas pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam penyediaan layanan pendidikan. Penyediaan fasilitas SLTP dengan kondisi baik meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian pada 2023 jumlah fasilitas pendidikan SLTP dengan kondisi baik sempat mengalami penurunan yang cukup drastis.



Gambar 2.117  
Jumlah Fasilitas Pendidikan SLTP Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

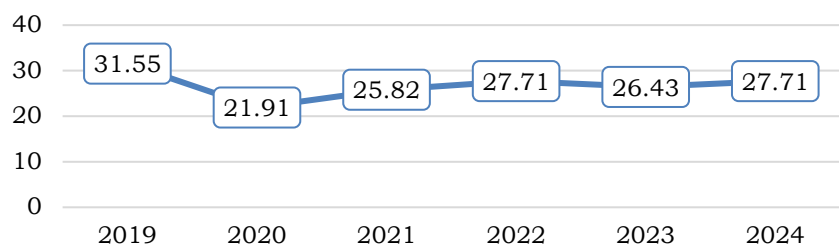
- k. Rasio Ketersediaan Sekolah
- Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2024, Kabupaten Tangerang cenderung stabil meski sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Rasio ini tergolong sedang dan menunjukkan ketersediaan pendidikan dasar di Kabupaten Tangerang berkisar antara 24-30 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dalam mengenyam pendidikan dasar.



Gambar 2.118  
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2025

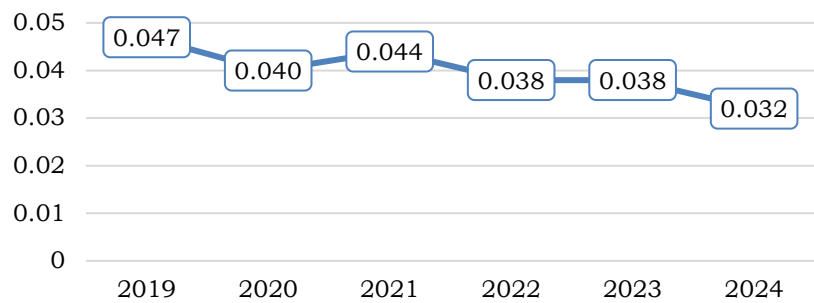
- Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah
- Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah adalah persentase ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2024, Kabupaten Tangerang mengalami cenderung stabil meski sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020. Rasio ini menunjukkan ketersediaan pendidikan menengah di Kabupaten Tangerang berkisar antara 21-31 sekolah untuk 10.000 penduduk. Meskipun demikian rasio tersebut masih menunjukkan daya tampung yang cukup baik untuk penduduk usia pendidikan menengah dalam mengenyam pendidikan menengah.





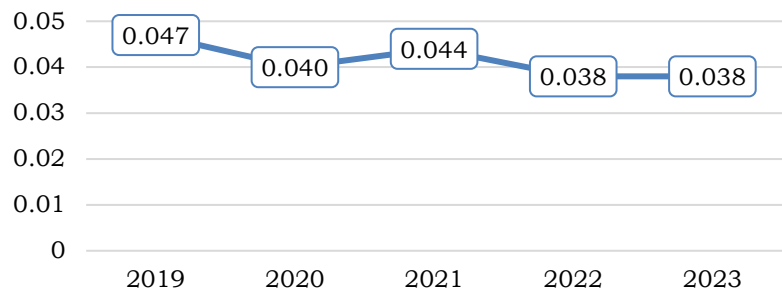
Gambar 2.119  
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2025

1. Rasio Guru Terhadap Murid
- Sekolah Pendidikan Dasar  
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan dasar. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang rendah hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 2019-2024, Kabupaten Tangerang cenderung stagnan dengan kecenderungan tren menurun.



Gambar 2.120  
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2025

- Sekolah Pendidikan Menengah  
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan jumlah guru per 10.000 murid pendidikan menengah. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang cenderung meningkat meski sempat mengalami penurunan pada kurun 2021-2022. Kabupaten Tangerang memiliki rasio yang cenderung rendah, hal ini menunjukkan jumlah guru yang masih sedikit dibanding dengan jumlah murid pendidikan menengah.

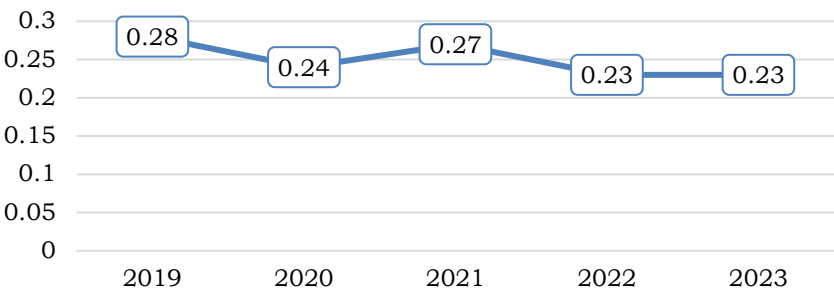


Gambar 2.121  
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2023  
Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

m. Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

➤ Sekolah Dasar

Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah dasar Kabupaten Tangerang berada pada kisaran angka 0,2. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah dasar.



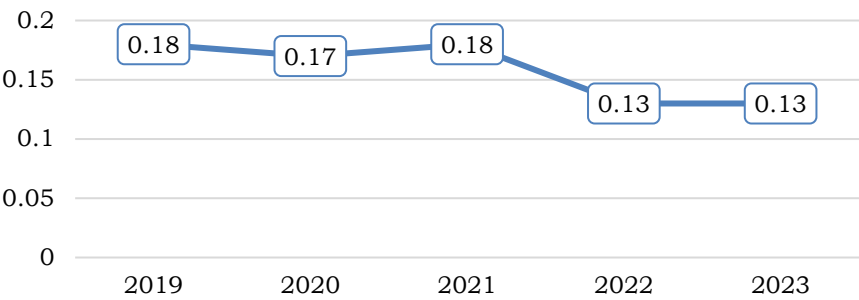
Gambar 2.122

Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

➤ Sekolah Menengah

Rasio guru terhadap murid per kelas di sekolah menengah Kabupaten Tangerang relatif menurun dan berada pada kisaran angka 0,13-0,18. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah guru pada setiap kelas di sekolah menengah.



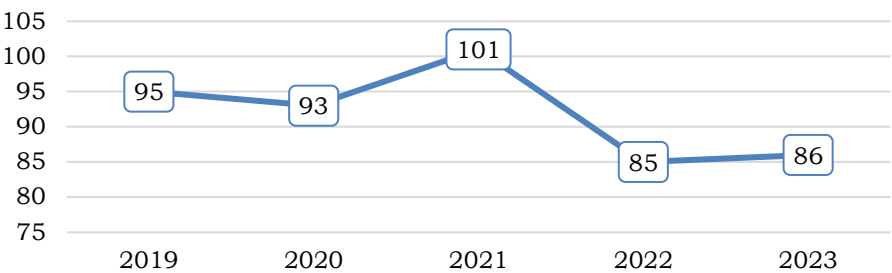
Gambar 2.123

Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sumber: Data Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2019 – 2023

n. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Proporsi murid kelas 1 yang dapat menamatkan sekolah dasar mengalami fluktuasi pada kurun waktu 2019-2023. Secara umum proporsi ini tergolong baik, tetapi jumlah tersebut belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya murid belum dapat menamatkan sekolah dasar.

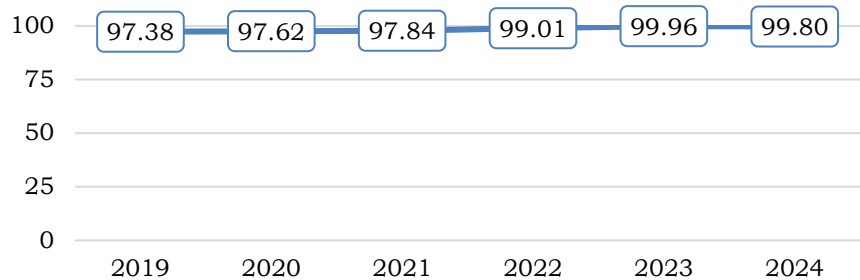


Gambar 2.124

Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

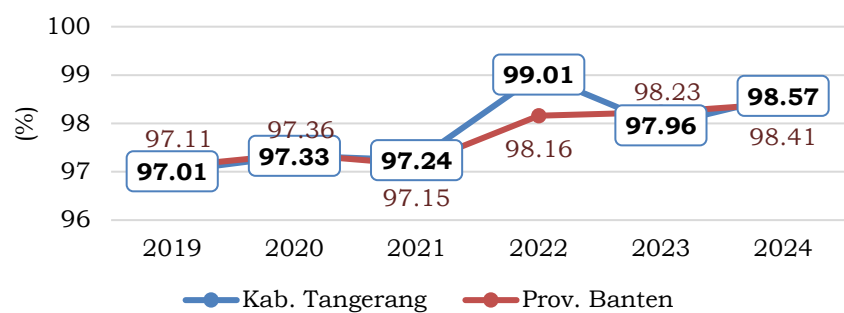
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

- o.      **Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun**  
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun merupakan persentase masyarakat dalam rentang usia 15-24 tahun yang mampu membaca dan menulis per jumlah masyarakat usia 15-24 tahun. Angka ini cenderung mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 99,90 pada tahun 2024. Capaian yang belum mencapai 100% tersebut menunjukkan masih adanya masyarakat yang masih mengalami buta aksara.



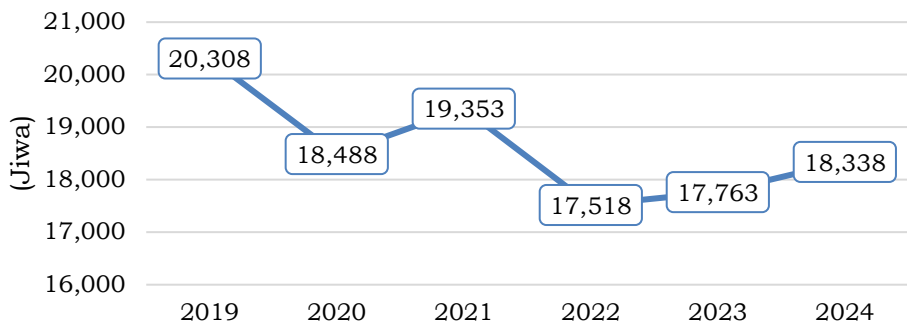
Gambar 2.125  
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- p.      **Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**  
Penduduk usia >15 tahun yang tidak buta aksara menunjukkan jumlah masyarakat dewasa yang memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Secara umum, Kabupaten Tangerang memiliki persentase memiliki tren meningkat dan belum menyentuh 100%. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.



Gambar 2.126  
Persentase Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

- q.      **Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**  
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV. Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2024. Meskipun demikian guru yang memenuhi kualifikasi ini cenderung tinggi. Tingginya jumlah ini menunjukkan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.127  
Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

r. Persentase Sekolah yang sudah Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Inklusivitas merupakan salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam bidang pendidikan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang adil dan tanpa diskriminasi, terutama bagi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2022, persentase sekolah yang telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Tangerang sebesar 45%. Angka tersebut kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 50%. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring perbaikan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas.

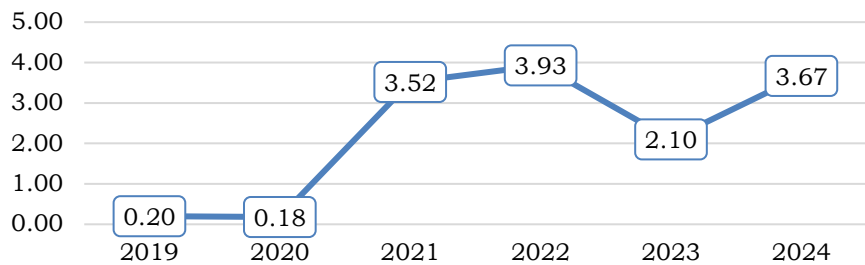
s. Persentase Sekolah yang Memenuhi Syarat Pendidikan Inklusi

Indikator lain yang menunjukkan inklusivitas di bidang pendidikan adalah persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan khusus. Sebuah sekolah dapat dikatakan siap melaksanakan pendidikan inklusif jika memenuhi persyaratan seperti tenaga profesional yang memadai, sarana-prasarana yang mendukung, kurikulum inklusif, hingga lingkungan kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Di tahun 2022, persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi di Kabupaten Tangerang sebesar 52,98% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 54,765%.

2) Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi atau AKB merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu tahun per 1.000 kelahiran bayi pada suatu tahun tertentu. Pada lima tahun terakhir, AKB Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang memuncak pada tahun 2022. Dimulai dengan angka 0,2 pada tahun 2019 dan 0,18 pada tahun 2020. Lalu diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022, yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 mencapai angka 3,52 dan 3,93. Lalu tahun berikutnya, nilai AKB turun dari lonjakan menjadi 2,1 pada tahun 2023. Namun di tahun 2024, capaian kembali meningkat sebesar 3,67.



Gambar 2.128  
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2025

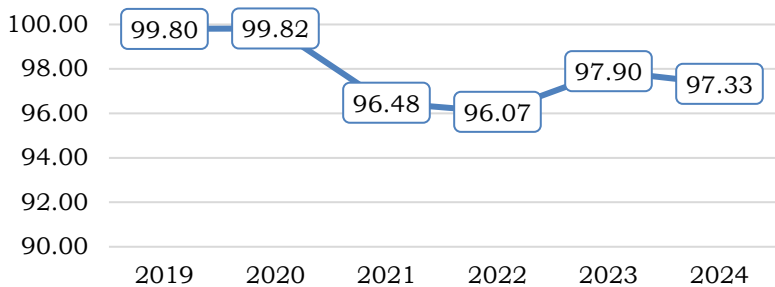
Tabel 2.19  
Penyebab Kematian Bayi Kabupaten Tangerang 2019-2024

| Penyebab Kematian Bayi |                         |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No                     | Penyebab                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1                      | BBLR                    | 42   | 84   | 76   | 42   | 125  | 96   |
| 2                      | Asfiksia                | 67   | 50   | 89   | 67   | 47   | 48   |
| 3                      | Tetanus                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 2    |
| 4                      | Sepsis                  | 39   | 24   | 24   | 39   | 1    | 0    |
| 5                      | Kelainan Kongenital     | 20   | 34   | 32   | 20   | 37   | 31   |
| 6                      | Ikterus                 | 2    | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 7                      | Pendarahan Intrakranial | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 8                      | Pneumonia               | 2    | 0    | 1    | 1    | 10   | 1    |
| 9                      | Diare                   | 0    | 0    | 5    | 0    | 5    | 1    |
| 10                     | Lain-lain               | 54   | 9    | 22   | 56   | 11   | 19   |
| Total                  |                         | 227  | 203  | 251  | 226  | 256  | 198  |

Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2024

b. Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

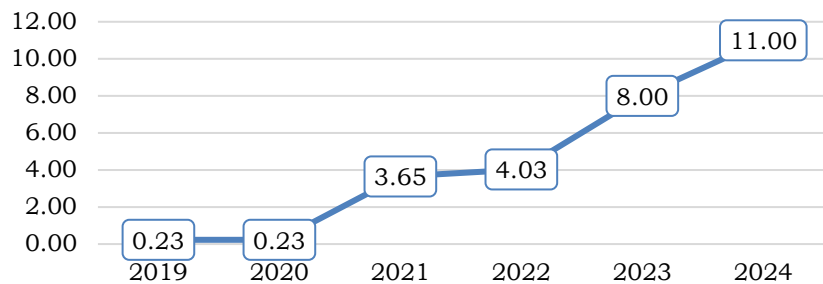
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan persentase bayi lahir dan mampu bertahan hidup hingga mencapai usia 1 tahun. Indikator ini memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan ibu dan anak dan efektivitas sistem kesehatan di sekitarnya. AKHB dapat dihitung dengan rumus (1-angka kematian bayi). Berdasarkan rumus tersebut, angka kematian bayi ditentukan dengan jumlah kematian bayi dengan usia di bawah 1 tahun dengan kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada waktu yang sama.



Gambar 2.129  
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2025

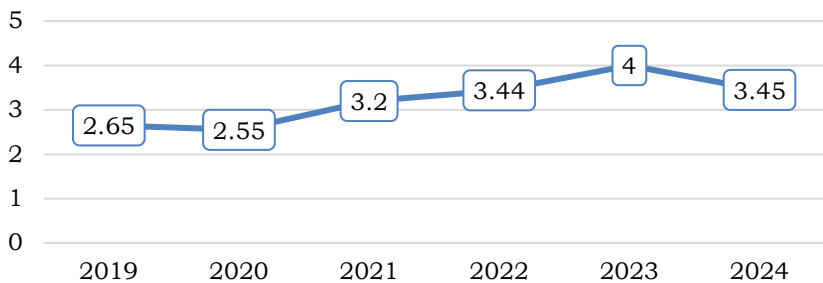
AKHB Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dan menurun lagi pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyebaran COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Lalu AKB kembali menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 97,33 dari tahun sebelumnya.

- c. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
- Angka kematian balita merupakan jumlah kematian anak yang berusia 0 - 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada tahun tersebut. Dalam lima tahun terakhir, angka kematian balita Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan setiap tahunnya.



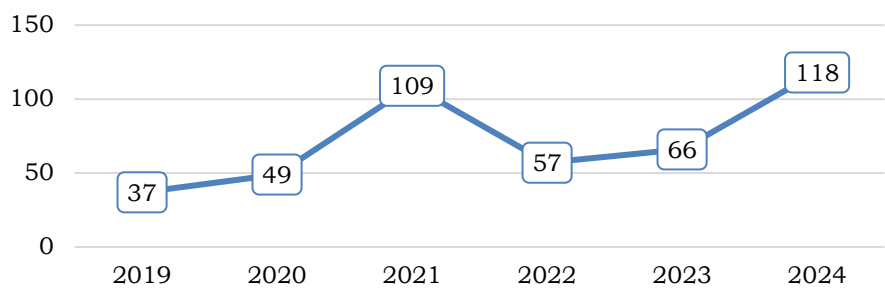
Gambar 2.130  
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 - 2024  
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2025

- d. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
- Angka kematian neonatal merupakan jumlah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian neonatal Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai sebesar 4. Angka tersebut kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 3,45.



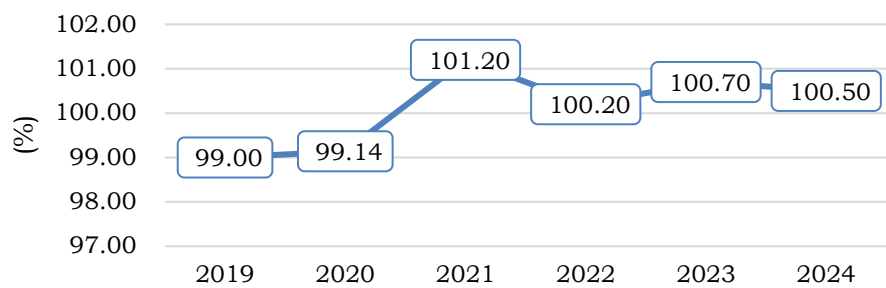
Gambar 2.131  
Angka Kematian Neonatal Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Buku Resume Analisis Statistik Sektor Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025

- e. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
- Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup ibu. AKI digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan ibu, baik dari kesehatan ibu, status gizi, perilaku hidup sehat, serta tingkat pelayanan kesehatan yang juga memberi fokus kepada ibu yang sedang hamil, melahirkan dan masa nifas. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 dan mencapai angka 109 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup ibu. Angka tersebut mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 mencapai angka 66. Pada tahun 2024 dilaporkan angka kematian ibu sekitar 34 jiwa dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 118.



Gambar 2.132  
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 - 2024  
Sumber : Profil Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2025

f. Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan  
Persentase persalinan ibu hamil di fasilitas kesehatan cenderung meningkat, bahkan di tahun 2021 hingga tahun 2024 persentasenya telah mencapai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah berupaya menekan angka kematian ibu melalui persalinan di lingkungan mendukung dengan bantuan tenaga medis terlatih.



Gambar 2.133  
Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2025

g. Rasio Posyandu per Satuan Balita  
Posyandu merupakan salah satu wadah kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dan dibimbing oleh petugas kesehatan. Kesuksesan posyandu dapat dinilai dari penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Terkait dengan hal tersebut, pemerintah menentukan rasio minimal posyandu tiap daerah 1 : 100. Rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Tangerang menurun dari tahun 2019 di angka 1 : 52 hingga pada tahun 2024 mencapai angka 1 : 120. Hal ini menandakan bahwa jumlah posyandu belum optimal dalam mengikuti perkembangan jumlah balita.

Tabel 2.20  
Rasio Posyandu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

| Rasio Posyandu per Satuan Balita |        |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uraian                           | 2019   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| Posyandu Aktif                   | 1.293  | 1.263   | 1.180   | 1.375   | 1.310   | 2.024   |
| Balita                           | 67.861 | 126.855 | 186.023 | 193.345 | 247.253 | 243.841 |
| Rasio Posyandu per Satuan Balita | 1 : 52 | 1 : 100 | 1 : 158 | 1 : 141 | 1 : 189 | 1:120   |

Sumber: Profil Statistik Kabupaten Tangerang, 2025

h. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk  
Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat lima tahun terakhir, terutama pada fasilitas dasar yaitu puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu (Pustu).



Tabel 2.21  
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk |            |            |            |            |            |          |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Uraian                              | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     |
| Rasio Puskesmas                     | 1 : 63.522 | 1 : 69.491 | 1 : 83.830 | 1 : 74.394 | 1 : 75.213 | 1:78.629 |
| Rasio Poliklinik                    | 1 : 6.639  | 1 : 7.263  | 1 : 6.045  | 1 : 5.288  |            | 1:6.313  |
| Rasio Pustu                         | 1 : 68.170 | 1 : 76.440 | 1 : 86.096 | 1 : 86.140 | 1 : 87.089 | 1:82.373 |

Sumber: Profil dan Data Statistik Kabupaten Tangerang, 2023-2025

- i. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
- Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan lanjut yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Ketersediaan fasilitas rumah sakit di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 25 unit menjadi 29 unit pada tahun 2024. Dengan membandingkan jumlah penduduk dan fasilitas rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang, rasio rumah sakit belum memenuhi dari sisi rasio 1 : 100.000.

Tabel 2.22  
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk |             |             |             |             |             |            |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Uraian                                | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024       |
| Rumah Sakit                           | 25          | 25          | 27          | 27          | 27          | 29         |
| Penduduk                              | 2.794.969   | 3.057.599   | 3.185.552   | 3.273.321   | 3.309.365   | 3,459,706  |
| Rasio                                 | 1 : 116.457 | 1 : 132.939 | 1 : 117.983 | 1 : 121.234 | 1 : 122.569 | 1: 119,300 |

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

- j. Rasio Dokter per Satuan Penduduk
- Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan dokter yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Sebagian besar rasio menurut jenis dokter menurun dalam enam tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dokter yang dapat memberikan pelayanan untuk penduduk Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.23  
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Rasio Dokter per Satuan Penduduk |            |            |            |            |            |          |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Jenis                            | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024     |
| Dokter Spesialis                 | 1 : 4.068  | 1 : 4.223  | 1 : 3.765  | 1 : 3.609  | 1 : 3,313  | 1:2,709  |
| Dokter Umum                      | 1 : 6.767  | 1 : 7.568  | 1 : 2.907  | 1 : 2.805  | 1 : 2,968  | 1: 1,520 |
| Dokter Gigi                      | 1 : 20.108 | 1 : 21.685 | 1 : 22.277 | 1 : 21.118 | 1 : 20,179 | 1:6,359  |
| Dokter Spesialis Gigi            | 1 : 64.999 | 1 : 67.947 | 1 : 69.251 | 1 : 68.194 | 1 : 68,945 | 1:34,254 |
| Rata-Rata                        | 1 : 2.180  | 1 : 2.327  | 1 : 1.495  | 1 : 1.438  | 1 : 1.423  | 1:11.210 |

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

- k. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
- Tenaga Medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang bisa memberikan pelayanan kepada penduduk Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019-2023, angka rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Tangerang menurun. Hal ini menandakan bahwa jumlah tenaga medis setiap tahunnya meningkat. Di tahun 2024, capaian rasio tenaga medis meningkat yang menunjukkan terjadi penurunan jumlah tenaga medis.

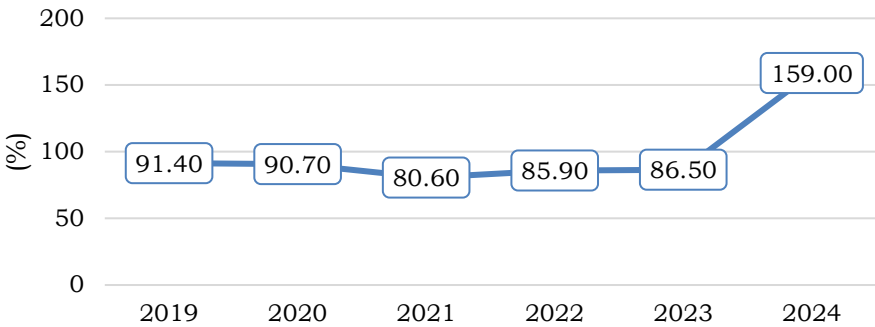
Tabel 2.24  
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk |            |            |            |            |            |           |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Tenaga Medis                           | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024      |
| Perawat                                | 1 : 1.481  | 1 : 932    | 1 : 843    | 1 : 895    | 1 : 919    | 1 :2.236  |
| Bidan                                  | 1 : 2.516  | 1 : 2.100  | 1 : 1.638  | 1 : 2.225  | 1 : 2.270  | 1 :5.179  |
| Farmasi                                | 1 : 9.671  | 1 : 6.304  | 1 : 8.824  | 1 : 9.949  | 1 : 9.592  | 1 :32.034 |
| Tenaga Kesehatan Masyarakat            |            | 1 : 40.232 | 1 : 96.532 | 1 : 32.409 | 1 : 33.428 | 1 :41,186 |
| Tenaga Kesehatan Lingkungan            |            | 1 : 48.533 | 1 : 46.846 | 1 : 39.919 | 1 : 40.358 | 1 :22,465 |
| Tenaga Gizi                            | 1 : 32.500 | 1 : 27.796 | 1 : 25.484 | 1 : 23.720 | 1 : 23.471 | 1 :9,970  |
| Ahli Teknologi Laboratorium Medik      |            | 1 : 20.116 | 1 : 10.548 | 1 : 10.732 | 1 : 10.573 | 1 :2,236  |

Sumber: BPS Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2025

1. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

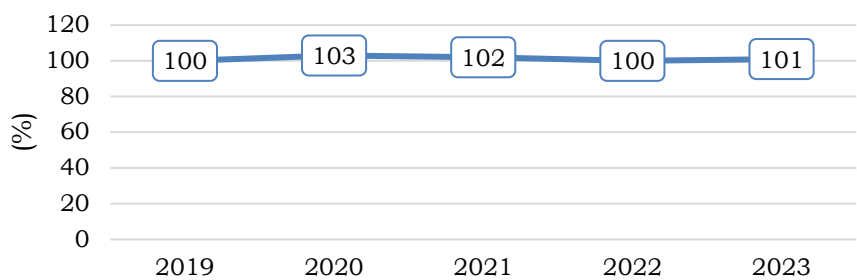
Kabupaten Tangerang memiliki cakupan komplikasi fluktuatif. Berdasarkan grafik di bawah ini, bahwa pada tahun 2019 mencapai cakupan yang cukup tinggi yaitu 91,4%, menurun pada tahun 2020 mencapai angka 90,7%, dan menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 80,6%. Pada tahun 2023, cakupan komplikasi yang bisa ditangani kebidanan meningkat menjadi 86,50%. Angka-angka ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan bidan kesulitan dalam menangani pasien. Pada tahun 2024, cakupan komplikasi yang bisa ditangani kebidanan meningkat di atas 100%, menjadi 159%.



Gambar 2.134  
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2023-2025

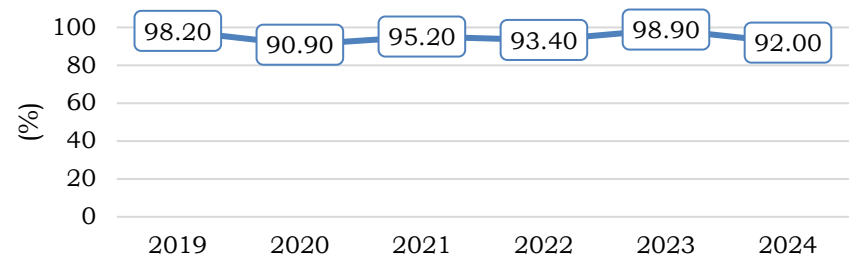
m. Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Dalam lima tahun terakhir, cakupan pertolongan oleh tenaga kerja kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tangerang selalu berada di angka 100% bahkan lebih, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 103%. Hal ini menandakan bahwa kualitas tenaga kesehatan pada Kabupaten Tangerang meningkat.



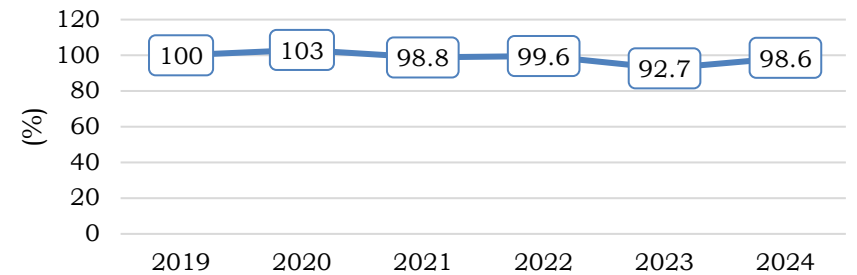
Gambar 2.135  
Cakupan Pertolongan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2025

- n. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
- UCI merupakan salah satu indikator dari unsur kesehatan dalam mengukur keberhasilan pemberian imunisasi kepada anak-anak. UCI yang diterapkan pada kelurahan/desa adalah gambaran daerah di mana angka UCI di atas 80% merupakan persentase bayi yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap di dalam daerah tersebut.
- Dalam enam tahun terakhir, cakupan UCI Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif. Dari tahun 2019 yang mencapai angka 98,2% lalu menurun pada tahun 2020 dengan angka 90,9%. Angka UCI kemudian naik pada tahun 2021 hingga mencapai 95,2% dan menurun lagi pada tahun 2022 dengan angka 93,4%. Pada tahun 2024, cakupan UCI menurun dengan capaian sebesar 92,00%. Hal ini menandakan bahwa upaya imunisasi anak-anak di Kabupaten Tangerang perlu ditingkatkan kembali.



Gambar 2.136  
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Open Data dan Data Sektoral Kabupaten Tangerang, 2025

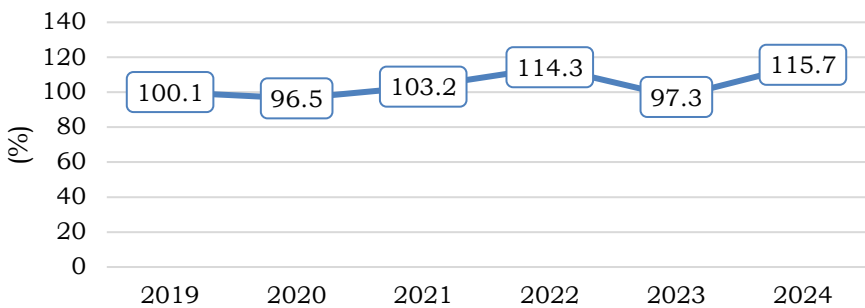
- o. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan merupakan persentase di mana jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di sarana pelayanan suatu wilayah kerja dibandingkan dengan jumlah seluruh balita gizi buruk yang dicatat pada suatu wilayah pada waktu yang sama.



Gambar 2.137  
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

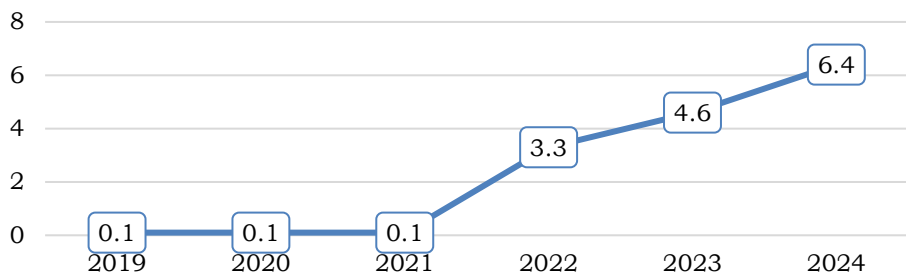
Dalam enam tahun terakhir, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuatif. Berdasarkan grafik diatas, capaian pada tahun 2019 sebesar 100% dan tahun 2024 mencapai 98,6% yang menandakan bahwa perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas dan kesadaran kesehatan baik dari instansi terkait dan masyarakat Kabupaten Tangerang.

- p. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
- Program imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu, dengan pertimbangan pembiayaan yang paling *cost effective*. Imunisasi campak merupakan imunisasi yang biasa dilakukan pada usia 1 tahun dengan pemberian vaksinasi. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak dihitung dengan jumlah anak usia 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah anak usia 1 tahun pada tahun sama. Dalam tahun 2019-2023, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang menurun. Di tahun 2024, Kabupaten Tangerang mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir sebesar 115,7%.



Gambar 2.138  
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Resume Analisis Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang

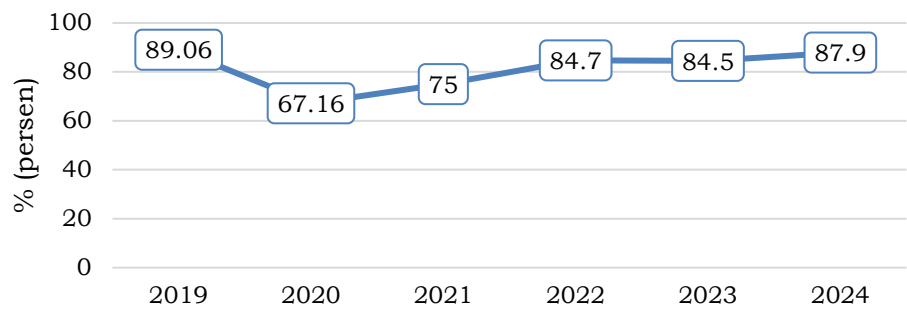
- q. Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk
- Kasus AFP (*Acute Flaccid Paralysis*) merupakan kasus kelumpuhan pada anak usia < 15 tahun. Non polio AFP Rate per 100.000 penduduk Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 0,1 menjadi 6,4 pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat menandakan bahwa semakin baik fasilitas kesehatan Kabupaten Tangerang untuk mendeteksi penyakit AFP.



Gambar 2.139  
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

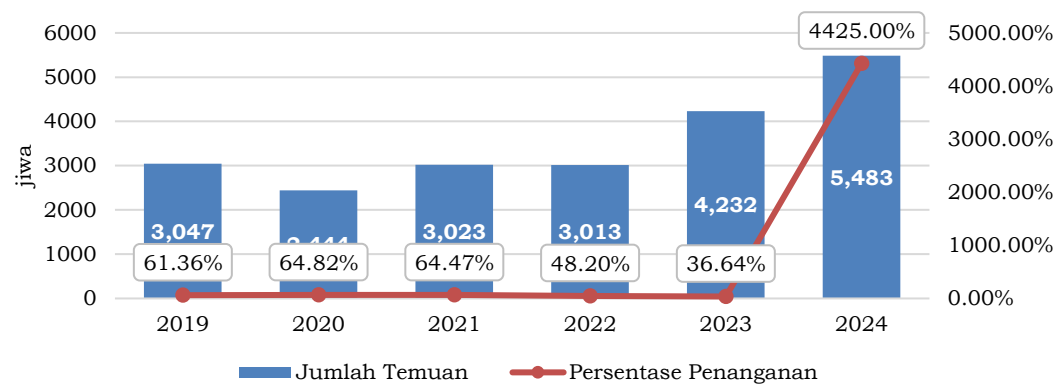
- r. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
- Pneumonia balita adalah balita mengalami batuk, kesukaran bernapas dan hasil perhitungan napas yang tidak normal. Cakupan balita pneumonia yang ditangani merupakan persentase penderita pneumonia balita (usia 0-59 bulan) yang ditangani sesuai standar di sarana kesehatan

daerah. Cakupan balita pneumonia yang ditangani oleh Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan, dari 89,06% pada tahun 2019 menjadi 87,9% pada tahun 2023. Meskipun persentase ini cukup tinggi, cakupan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas pendukung penanganan pneumonia di Kabupaten Tangerang.



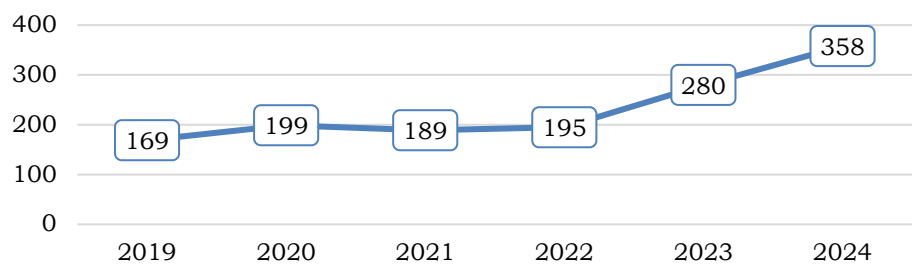
Gambar 2.140  
Persentase Balita Pneumonia yang Ditangani di Kab. Tangerang Tahun 2019 – 2024  
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2025

s. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA  
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (Tuberculosis Bakteri Tahan Asam) merupakan penderita baru TBC BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan penemuan yang ada di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2019 berjumlah 3.047 dan tahun 2024 mencapai 5.483 temuan. Sementara itu, persentase penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung mengalami penurunan dari 61,36% menjadi 44,25% pada tahun 2024 sehingga pencegahan dan penanganan penyakit TBC BTA perlu ditingkatkan.



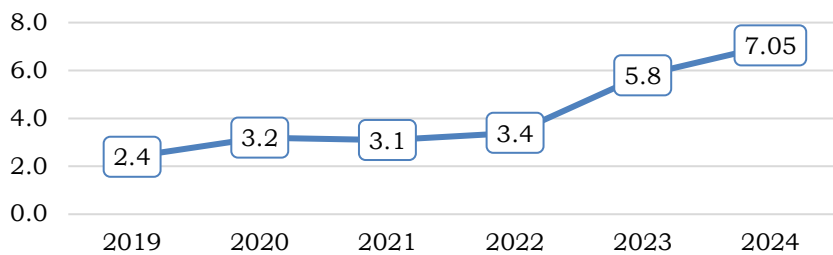
Gambar 2.141  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025

t. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)  
Prevalensi Tuberkulosis merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Prevalensi Tuberkulosis didapatkan dengan membandingkan jumlah kasus tuberkulosis dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu per 100.000 penduduk. Dalam lima tahun terakhir, tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Tangerang cenderung meningkat dan pada tahun 2024 mencapai angka 358 kasus tiap 100.000 penduduk. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang perlu ditingkatkan untuk menurunkan jumlah penduduk yang menderita tuberkulosis seperti pemberian edukasi kepada masyarakat setempat.



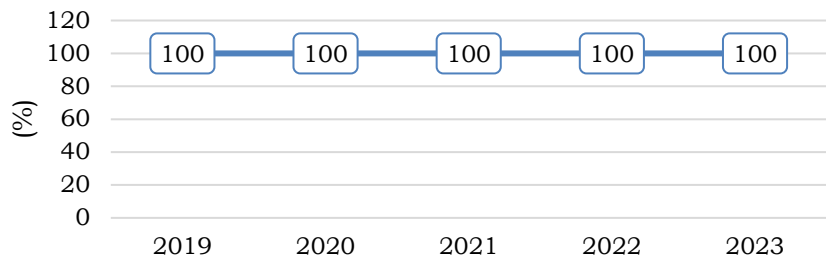
Gambar 2.142  
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
*Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2025*

u. Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)  
Tingkat kematian karena tuberkulosis di Kabupaten Tangerang meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kematian akibat tuberkulosis tercatat 2 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 7 kasus per 100.000. Hal ini menandakan bahwa selain upaya pencegahan, Kabupaten Tangerang juga perlu meningkatkan upaya penyembuhan baik dari kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan.



Gambar 2.143  
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
*Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2025*

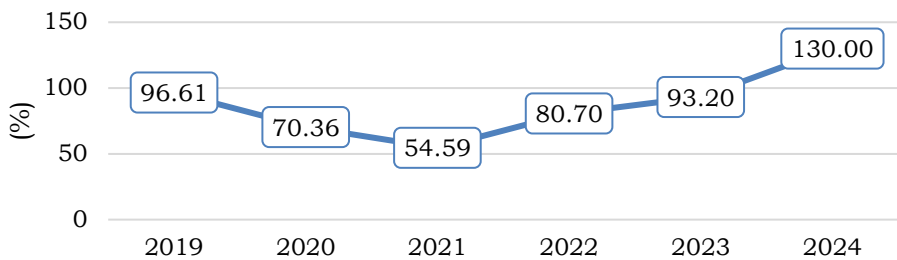
v. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD  
DBD atau Demam Berdarah Dengue merupakan penyakit yang menular melalui gigitan nyamuk dengan manifestasi klinis demam tinggi, fenomena hemoragik, dan dapat menyebabkan kematian. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Tangerang tertangani dengan baik hingga dalam lima tahun mencakup 100% pasien dapat ditangani.



Gambar 2.144  
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2023  
*Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024*

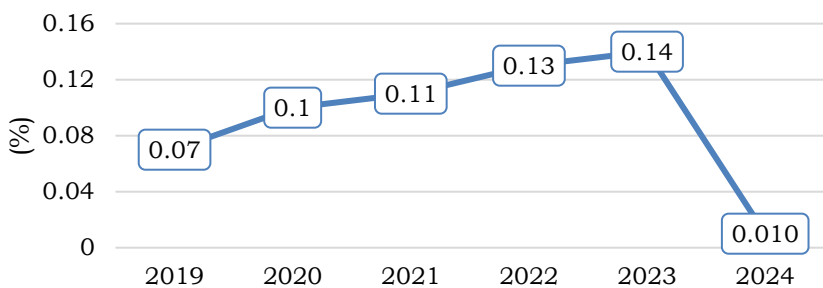
w. Penderita Diare yang Ditangani  
Diare merupakan penyakit yang memberikan dampak kepada pasien dengan sering buang air besar dengan kondisi cair. Pada Kabupaten

Tangerang, penderita diare yang ditangani mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 130%.



Gambar 2.145  
Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id), 2025

- x. Angka Kejadian Malaria  
Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit melalui gigitan nyamuk. Pada tahun 2019-2022 tidak ditemukan kejadian malaria di Kabupaten Tangerang, tetapi pada tahun 2023 terdapat 9 angka kejadian malaria yang tercatat oleh Dinas Kesehatan.
- y. Tingkat Kematian Akibat Malaria  
Pada tahun 2019-2023 tidak ditemukan kematian akibat malaria di Kabupaten Tangerang yang tercatat oleh Dinas Kesehatan. Capaian ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani angka kejadian malaria yang terjadi pada tahun 2023.
- z. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi  
Prevalensi HIV/AIDS merupakan salah satu indikator kualitas kesehatan masyarakat. Angka prevalensi HIV/AIDS didapatkan berdasarkan persentase jumlah pasien HIV/AIDS terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi yang meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 0,14%. Prevalensi yang meningkat berimplikasi bahwa fasilitas kesehatan dan instansi terkait di Kabupaten Tangerang masih kurang memadai dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Namun di tahun 2024, capaian prevalensi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,01 menunjukkan adanya peningkatan dalam penanganan dan pencegahan HIV/AIDS.

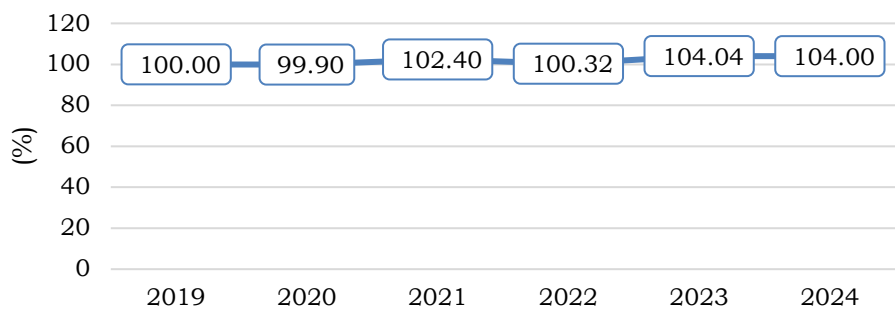


Gambar 2.146  
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025*

- aa. Cakupan Kunjungan Bayi  
Cakupan kunjungan bayi merupakan angka persentase kunjungan bayi yang berumur 29 hari hingga 11 bulan pada sarana pelayanan kesehatan seperti polindes, puskesmas, pustu, rumah sakit, rumah sakit bersalin ataupun di tempat lain seperti rumah, tempat penitipan anak, posyandu dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Cakupan kunjungan bayi

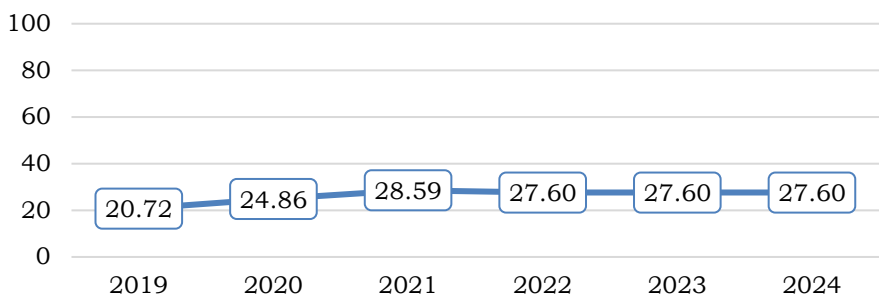


pada Kabupaten Tangerang telah mencapai klasifikasi tinggi yang bahkan melampaui 100% dalam kurun waktu empat tahun terakhir.



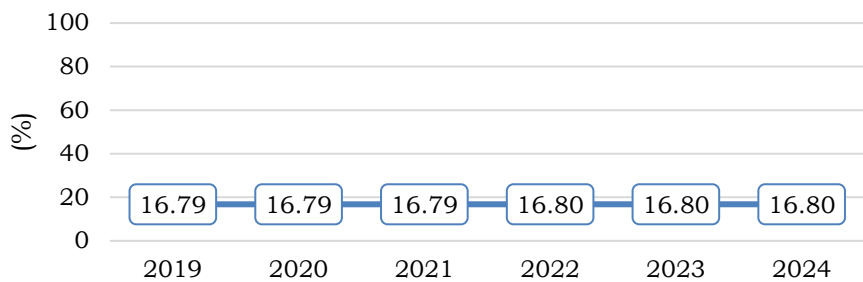
Gambar 2.147  
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2025*

bb. Cakupan Puskesmas  
Cakupan puskesmas merupakan persentase jumlah puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Cakupan puskesmas diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan puskesmas Kabupaten Tangerang mengalami kecenderungan meningkat dari tahun 2019 di angka 20,72% hingga pada tahun 2024 mencapai 27,6%.



Gambar 2.148  
Cakupan Puskesmas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025*

cc. Cakupan Puskesmas Pembantu  
Puskesmas pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Cakupan puskesmas pembantu ditentukan oleh persentase jumlah pembantu puskesmas terhadap jumlah seluruh kecamatan. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan puskesmas pembantu mengalami kecenderungan stabil dari tahun 2019 di angka 16,79% hingga pada tahun 2024 mencapai 16,8%.

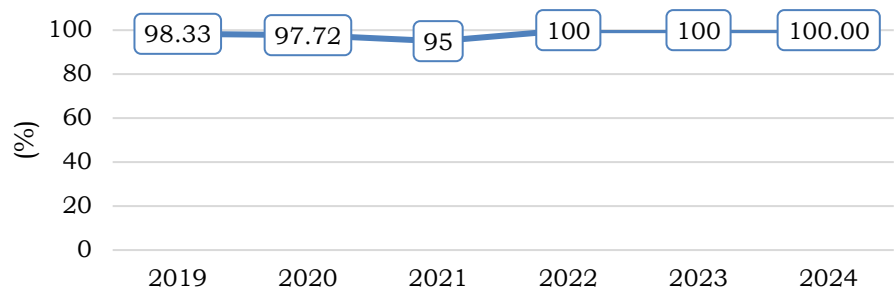


Gambar 2.149  
Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025*

dd. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan antenatal sesuai standar dan secara lengkap serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada triwulan ke-1, 1 kali pada triwulan ke-2 dan 2 kali pada triwulan ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 juga menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil dan manajemen program KIA dalam suatu wilayah.

Dalam lima tahun terakhir, persentase kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat. Pada tahun 2019, cakupan kunjungan ibu hamil K4 mencapai 98,33% dan menurun pada tahun 2020 di angka 97,72% dan 95% pada tahun 2021. Cakupan ini meningkat pesat di angka 100% pada tahun 2022 hingga 2024. Cakupan ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan yang sesuai standar.

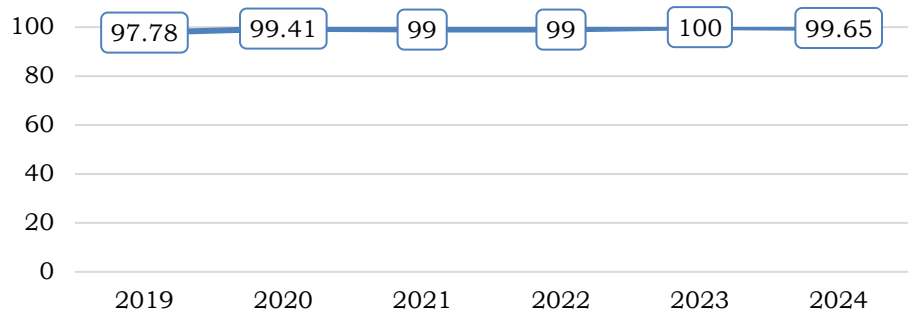


Gambar 2.150  
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

ee. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang sesuai standar, dimulai dengan 6 jam pasca melahirkan hingga 42 hari oleh tenaga kesehatan. Pada pelayanan nifas, untuk melakukan deteksi dini komplikasi pada ibu diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan minimal 3 kali dengan beberapa ketentuan waktu, yaitu:

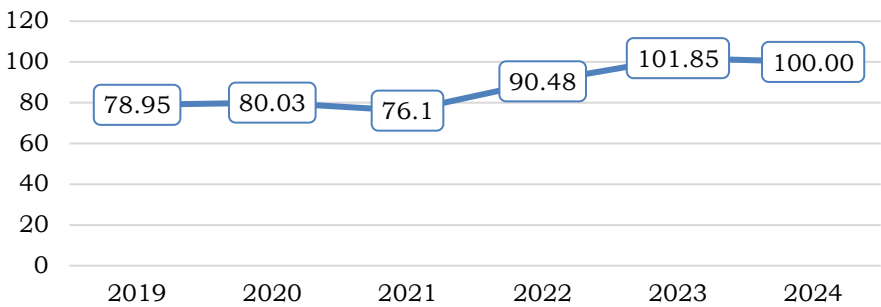
- a. Kunjungan nifas pertama pada lingkup waktu 6 jam hingga 3 hari setelah persalinan
- b. Kunjungan nifas kedua pada kurun waktu 2 minggu setelah persalinan
- c. Kunjungan nifas ketiga pada kurun waktu 6 minggu setelah persalinan.



Gambar 2.151  
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

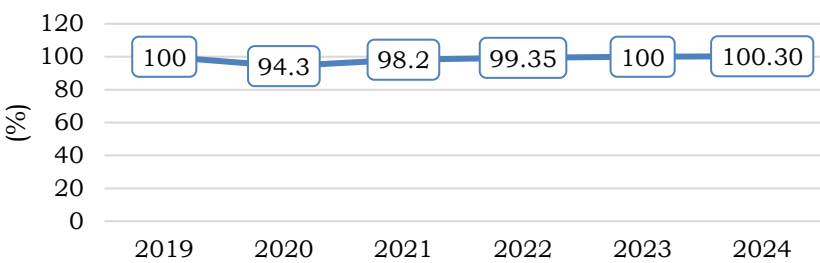
Berdasarkan grafik di atas, cakupan pelayanan nifas Kabupaten Tangerang dalam lima tahun mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 2019, cakupan pelayanan nifas mencapai angka 97,78% yang sudah mencapai target SPM cakupan pelayanan nifas yaitu 90%. Angka ini kemudian naik pada tahun 2020 yaitu 99,41% dan turun pada tahun 2021 di angka 99%. Angka ini kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2023 dan menurun menjadi 99,65% pada tahun 2024. Grafik ini menandakan bahwa kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu nifas sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.

ff. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani  
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani merupakan jumlah persentase bayi usia 0 - 28 hari dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat drastis hingga mencapai persentase 100. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan terhadap neonatus meningkat.



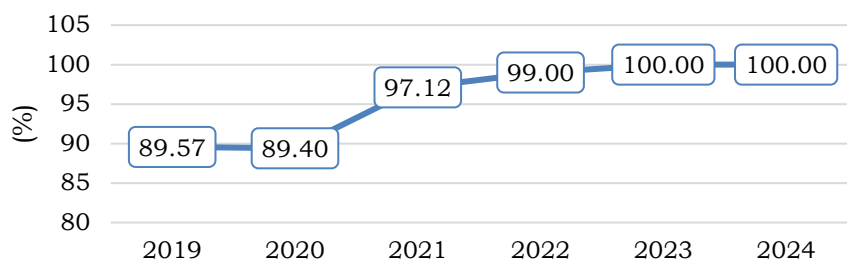
Gambar 2.152  
Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

gg. Cakupan Pelayanan Anak Balita  
Pelayanan Anak Balita merupakan salah satu skala kesehatan dalam suatu wilayah. Cakupan pelayanan anak balita pada Kabupaten Tangerang memiliki angka yang cukup stabil. Pada tahun 2019, angka cakupan mencapai 100%. Angka cakupan pelayanan anak balita kemudian turun pada tahun 2020 dengan angka 94% dan angka tersebut naik menjadi 98% pada tahun 2021. Angka tersebut terus naik hingga pada tahun 2024 mencapai 100,3%.



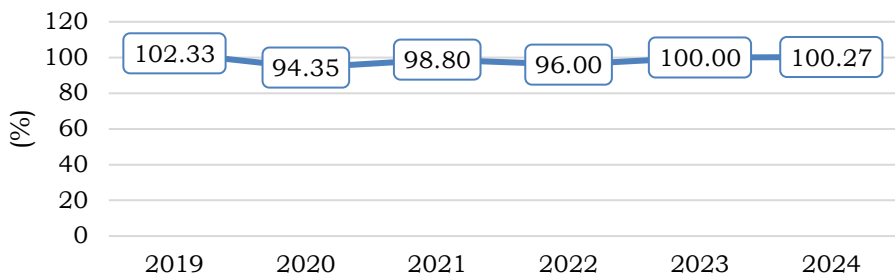
Gambar 2.153  
Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

hh. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat  
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, cakupan penjangkaran kesehatan telah mencapai 89,57%, sudah cukup tinggi, dan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki komitmen kuat dalam memastikan kesehatan siswa.



Gambar 2.154  
Pelayanan Anak Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

ii. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin  
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin merupakan persentase pasien miskin yang bisa mengakses sarana pelayanan kesehatan strata 1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin diharapkan untuk meningkat karena selaras dengan penyediaan fasilitas kesehatan setara dalam suatu wilayah. Cakupan ini ditentukan oleh jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dibandingkan dengan jumlah seluruh masyarakat miskin. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang mencakup pelayanan yang cukup stabil dengan persentase di atas 90%.



Gambar 2.155  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025

jj. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)  
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) merupakan persentase banyaknya rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan diagnosis dan penanganan permasalahan pada jalan nafas, ventilasi pernafasan, dan sirkulasi pembuluh darah, serta dapat melakukan resusitasi dasar, stabilisasi dan evakuasi. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% yang menandakan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan gawat darurat sudah sangat baik dan telah mencakup seluruh wilayah.

Tabel 2.25  
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

| Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| Jenis                                                                              | Uraian  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rumah Sakit Umum                                                                   | Jumlah  | 20   | 20   | 20   | 22   | 22   |
|                                                                                    | Cakupan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rumah Sakit Khusus                                                                 | Jumlah  | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
|                                                                                    | Cakupan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: opendata.tangerangkab.go.id, 2024

kk. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam adalah persentase timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang mencakup 4 desa/kelurahan dan tahun 2023 mencapai 5 desa/kelurahan. Peningkatan jumlah ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah meningkatkan pelayanan kesehatan dalam penyelidikan epidemiologi.

Tabel 2.26  
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

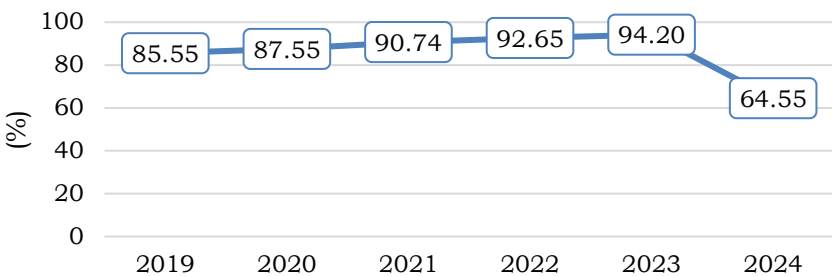
| Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam |               |               |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 2019                                                                                  | 2020          | 2021          | 2022        | 2023        |
| 4 desa/kel.                                                                           | 274 desa/kel. | 274 desa/kel. | 3 desa/kel. | 5 desa/kel. |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2024

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
a. Pekerjaan Umum

➤ Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

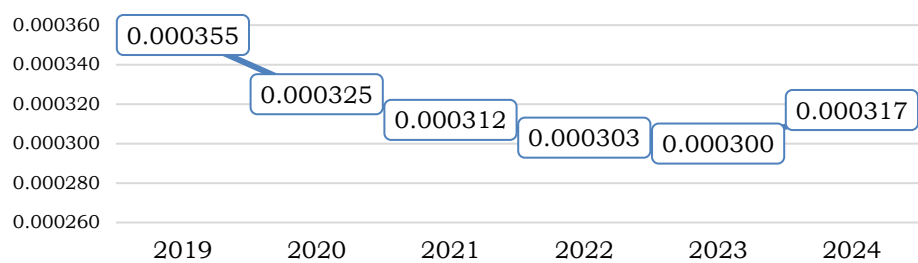
Sebagai wilayah dengan lokasi yang sangat strategis, Kabupaten Tangerang memiliki aksesibilitas yang baik didukung dengan kondisi yang baik sebesar 94,20%. Nilai ini cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2023. Kualitas jalan yang baik di wilayah ini menjadi peluang tersendiri untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang salah satunya menjadi pilihan jalan alternatif yang menghubungkan berbagai lokasi. Lokasinya yang strategis dan dilalui oleh berbagai kendaraan memberikan dampak buruk pada kondisi jalan yang menurun. Di tahun 2024, capaian tersebut mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 64,55%. Hal tersebut memerlukan perhatian untuk kembali meningkatkan kualitas jaringan jalan.



Gambar 2.156  
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang

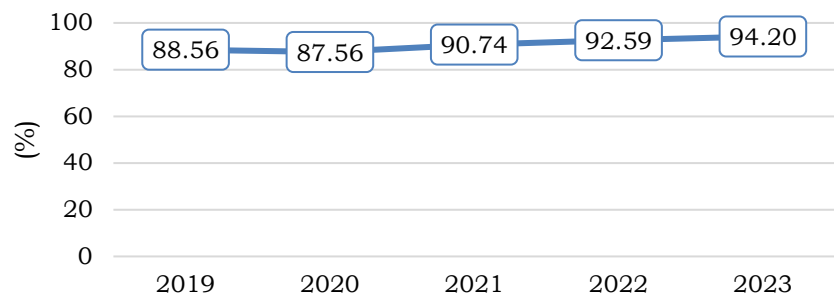
➤ Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan aksesibilitas yang baik. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mengalami penurunan dari kurun waktu 2019-2024. Rasio panjang jalan di Kabupaten Tangerang cenderung rendah berkisar di angka 0,0003, pembukaan jalan baru serta pembangunannya menambah panjang jalan di Kabupaten Tangerang menjadi sekitar 1.096,26 Km.



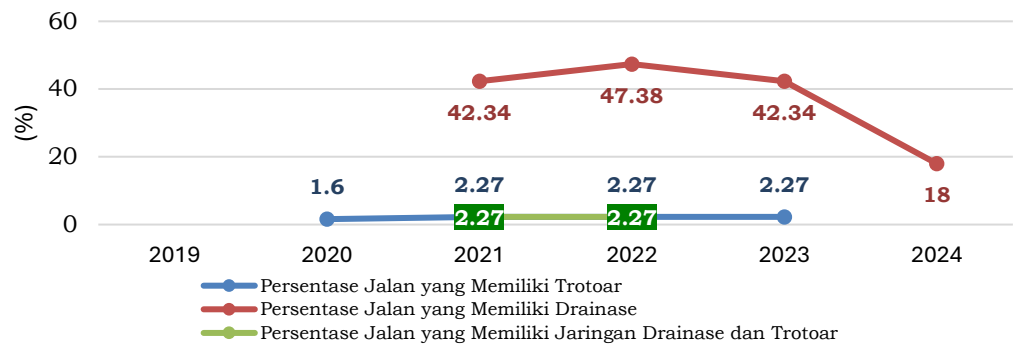
Gambar 2.157  
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

- Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
- Tumbuhnya permukiman yang tidak terencana berakibat pada munculnya kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Sebagai kawasan yang tumbuh dari aglomerasi Jabodetabek, sebagian besar permukiman di wilayah ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4. Hal ini menunjukkan aksesibilitas yang baik di wilayah ini.



Gambar 2.158  
Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024

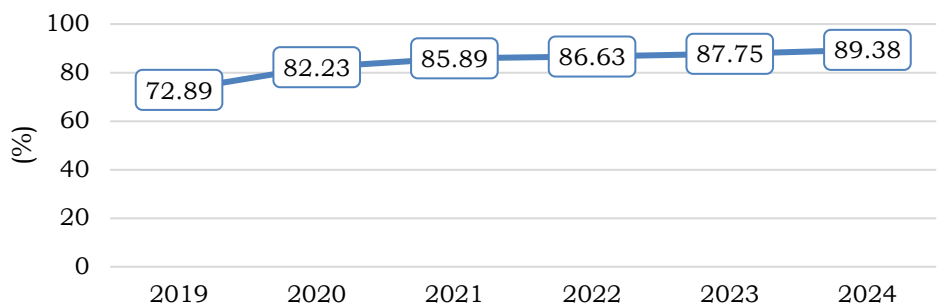
- Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 meter)
- Trotoar dan drainase merupakan elemen penting dalam pembangunan jalan. Penyediaan trotoar dan drainase di jalanan Kabupaten Tangerang masih sangat rendah dan belum menyeluruh di seluruh wilayah. Hanya 2,27% jalan di Kabupaten Tangerang yang memiliki trotoar dan drainase.



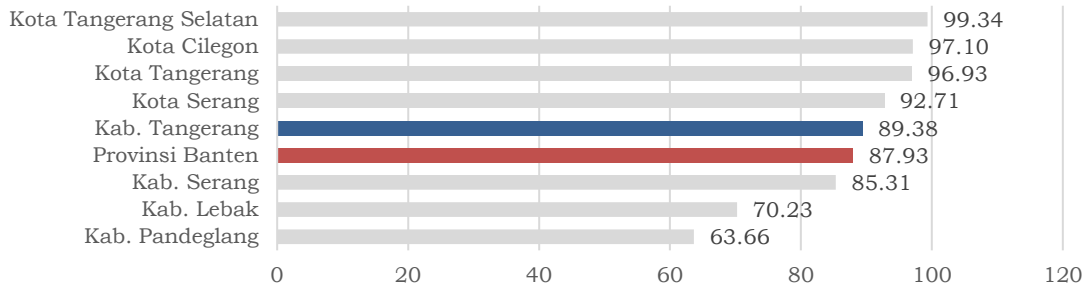
Gambar 2.159  
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2025

- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
- Sanitasi merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang memiliki akses sanitasi yang

baik. Pada tahun 2024, persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 89,38%. Pada kurun waktu 2019-2023, persentase rumah tinggal berakses sanitasi mengalami peningkatan yang mengindikasikan kualitas kebersihan di wilayah ini semakin meningkat. Meskipun begitu, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, capaian Kabupaten Tangerang terbilang masih cukup rendah, yaitu berada di posisi 4 terendah.



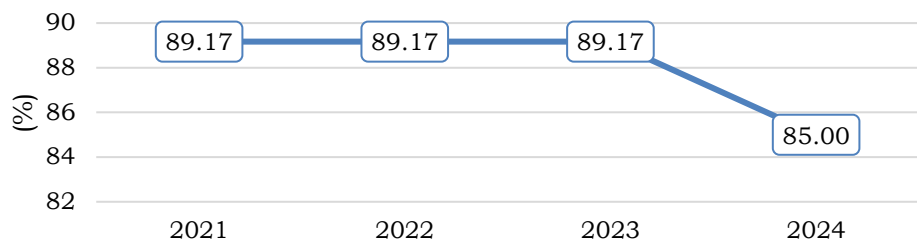
Gambar 2.160  
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024; BPS Provinsi Banten (diolah)



Gambar 2.161  
Perbandingan Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

➤ Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Dalam kurun waktu tahun 2021-2024, sebesar 85% dari total drainase di wilayah Kabupaten Tangerang memiliki kondisi yang baik atau tidak terdapat sumbatan. Sedangkan persentase sisanya atau 15% mengalami sumbatan dan memerlukan penanganan.



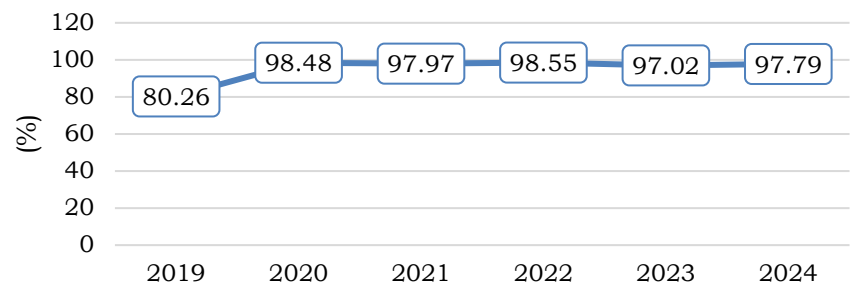
Gambar 2.162  
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2025

➤ Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Penyediaan air di Kabupaten Tangerang terukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum yang layak. Persentase rumah tangga berakses air minum layak terus meningkat drastis pada tahun 2020. Sedangkan pada 2020-2024 persentase tersebut



cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Tangerang telah terlayani air minum layak, meski terdapat beberapa rumah tangga yang belum berakses air minum layak.



Gambar 2.163  
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah)

➤ **Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**  
Sebagai wilayah yang terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan, Kabupaten Tangerang memiliki berbagai macam rumah ibadah. Masjid di wilayah ini menjadi jumlah terbesar sesuai dengan jumlah penganutnya yang mendominasi wilayah ini. Namun jika dilihat berdasarkan rasio terhadap jumlah penganutnya, rumah ibadah umat Konghucu memiliki cakupan yang lebih tinggi karena rasio yang cenderung rendah, yakni 1 rumah ibadah melayani 94 orang.

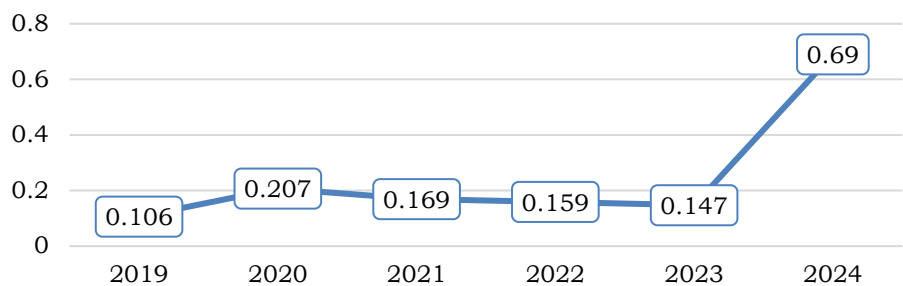
Tabel 2.27  
Rasio Jumlah Rumah Ibadah terhadap jumlah Penganut

|        | Budha     | Hindu  | Islam  | Khatolik  | Konghucu | Kristen  |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|
| Jumlah | 43        | 1      | 1395   | 5         | 8        | 341      |
| Rasio  | 1:1261,65 | 1:1935 | 1:2201 | 1:8654,60 | 1:94,13  | 1:299,96 |

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2024

b. Penataan Ruang

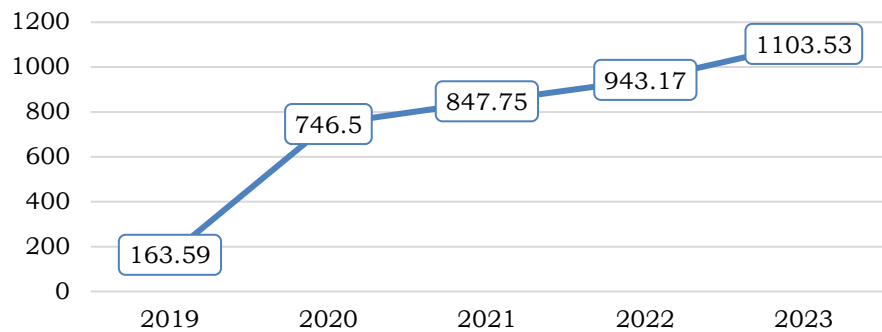
➤ **Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**  
Sebagai wilayah perkotaan, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah ruang terbuka hijau yang cukup terbatas. Ruang terbuka hijau tersebut belum banyak yang memiliki hak pakai atau hak guna. Rasio RTH tiap satuan wilayah yang ber HPL/HGB mengalami penurunan yang berkisar di angka 0,01. Di tahun 2024, capaian rasio RTH meningkat hingga 0,69.



Gambar 2.164  
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2025

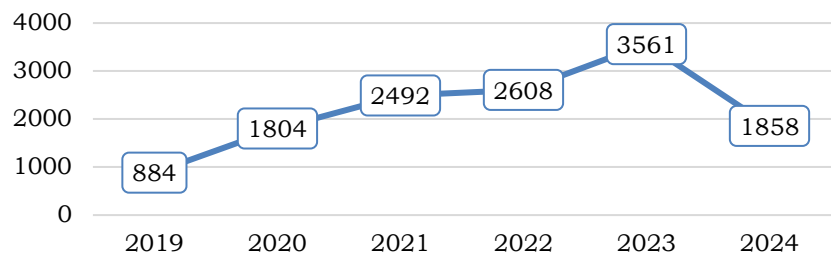
➤ **Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan**  
Ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsur perkotaan yang wajib dimiliki dalam suatu wilayah. Luasan RTH wajib yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu

ke waktu. Hal ini menunjukkan pentingnya penyediaan ruang hijau dalam pelayanan masyarakat.



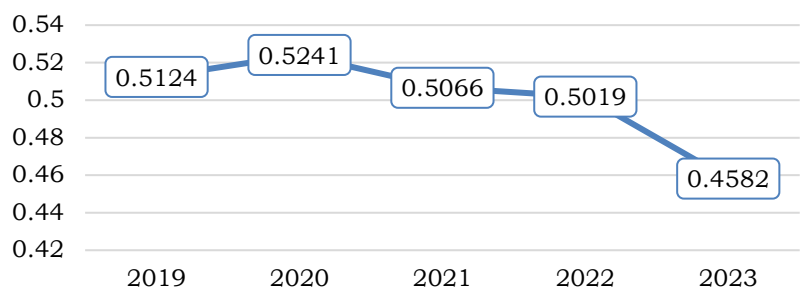
Gambar 2.165  
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024*

- **Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan**  
Izin membangun bangunan merupakan salah satu izin yang diperlukan dalam mendirikan bangunan. Jumlah bangunan di wilayah ini yang memiliki IMB mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan penataan ruang. Meskipun demikian jumlah IMB ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah bangunan yang ada di wilayah ini. Di tahun 2024, terjadi penurunan hingga sebesar 1858 sehingga perlu upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.



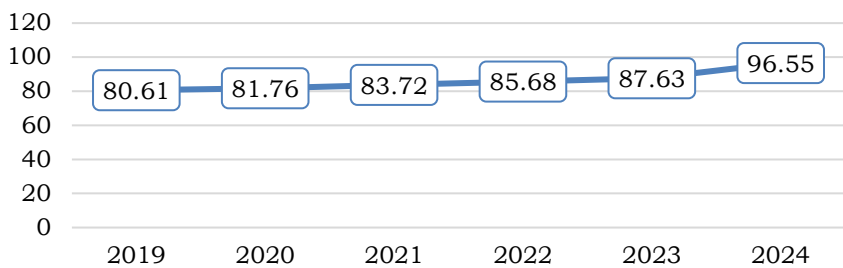
Gambar 2.166  
Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024*

- **Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya**  
Perubahan penggunaan ruang merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di lapangan. Salah satu bentuk perubahan penggunaan ruang adalah berubahnya peruntukan ruang publik. Perubahan penggunaan ruang di Kabupaten Tangerang mencapai 1.838,90 Ha pada 2020. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 1.969,92 Ha. Hal ini dapat berdampak dan peningkatan kebutuhan ruang publik di Kabupaten Tangerang.
- **Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan**  
Sebagai salah satu indikator kualitas tata ruang, tutupan lahan dapat terukur melalui pemotretan citra udara. Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan di Kabupaten Tangerang relatif stagnan dan berkisar pada angka 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa setengah dari luas daratan di Kabupaten Tangerang tertutup oleh pepohonan.



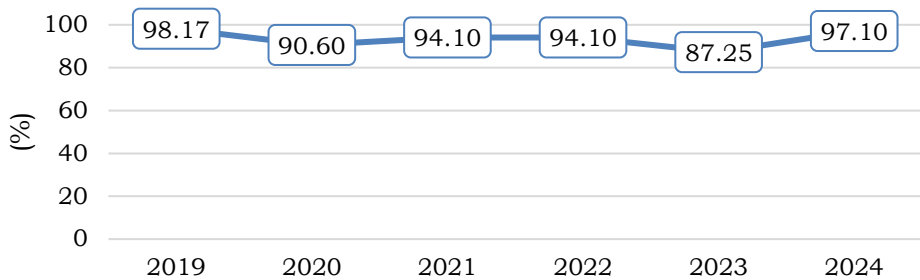
Gambar 2.167  
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024*

➤ **Ketaatan Terhadap RTRW**  
Rencana tata ruang wilayah digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang. Keterwujudan RTRW sangat dipengaruhi oleh ketaatan terhadap RTRW. Dalam rentang tahun 2019-2024, ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dalam upaya perwujudan penataan ruang.



Gambar 2.168  
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan, 2024*

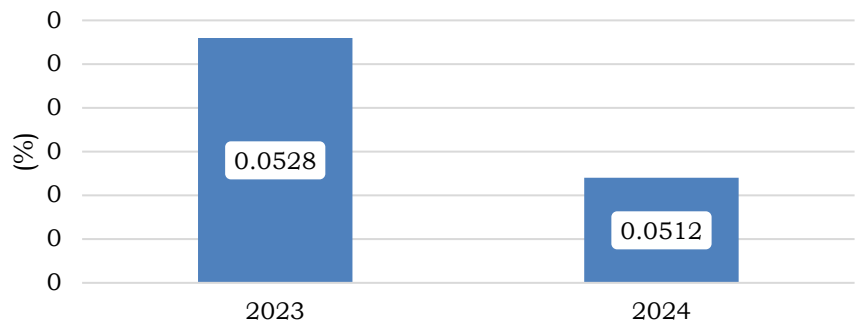
4) **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
a. **Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**  
Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren menurun dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, cakupan masih mencapai 98,17%. Tetapi persentase tersebut mengalami penurunan bertahap hingga pada tahun 2023 mencapai 87,25%, yang kemudian meningkat menjadi 97,10% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya program dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak dan aman untuk dihuni penduduk Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.169  
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024*

b. **Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**  
Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam tahun 2023-2024. Pada tahun 2023,

persentase permukiman kumuh tercatat sebesar 0,0528%, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,0512% pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan bahwa upaya penataan kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terus dilaksanakan.

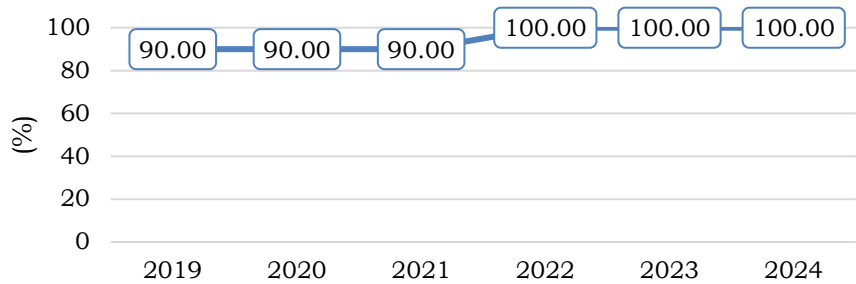


Gambar 2.170  
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Tangerang  
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan tren lima tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah memiliki fokus untuk penanganan dan perumahan dan permukiman kumuh. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor 600.2/Kep.1040-Huk/2024 tentang Peninjauan Ulang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwasanya jumlah luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Tangerang sebesar 2.863,22 Ha berada di 1.683 RT/RW, 241 Kelurahan/Desa dan 29 Kecamatan. Luasan kawasan kumuh tersebut terdiri atas (1) Kewenangan Kabupaten Tangerang dengan luas 1.446,98 Ha; (2) Kewenangan Provinsi dengan luas 847,48 Ha; dan (3) Kewenangan Pemerintah Pusat dengan luas 568,76 ha.

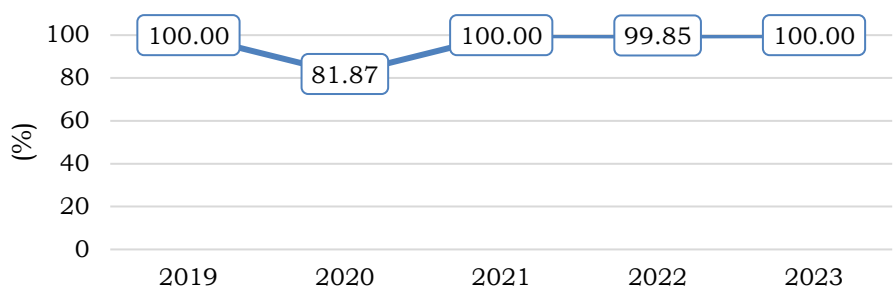
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- c. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Cakupan Linmas di Kabupaten Tangerang tergolong baik karena sudah mencapai angka 100% pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan layanan perlindungan masyarakat di wilayah ini sudah baik.



Gambar 2.171  
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024

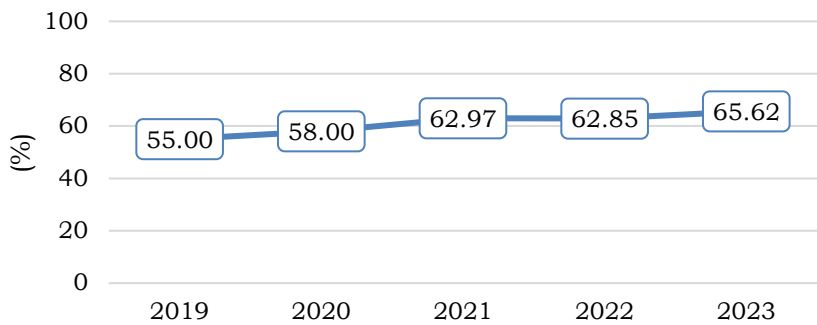
- d. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
- Penyelesaian pelanggaran K3 di wilayah Kabupaten Tangerang sudah baik ditandai dengan tingkat penyelesaian pelanggaran mencapai 100% pada 2019, 2021, dan 2023. Sedangkan pada tahun 2020, penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Gambar 2.172  
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, 2024*

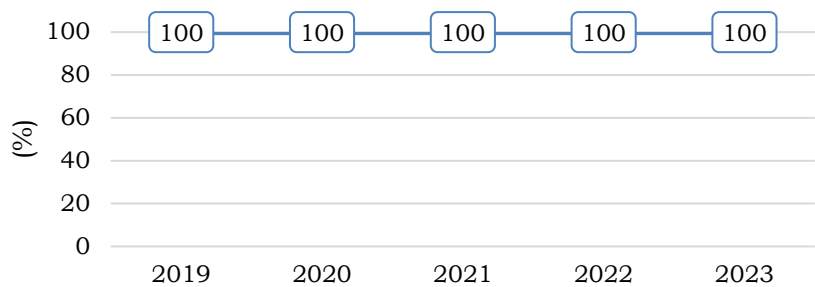
e. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten  
Bencana kebakaran merupakan salah satu bencana yang mengancam permukiman perkotaan. Dalam menangani kebakaran, cakupan pelayanan kebakaran di wilayah ini telah mencapai angka 100% pada kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan tingkat layanan kebakaran wilayah ini sudah tergolong baik.

6) Sosial  
a. Persentase PPKS yang Tertangani  
Persentase PPKS yang tertangani merupakan persentase PPKS yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dan juga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Persentase ini ditentukan oleh PPKS yang tertangani dibandingkan dengan total jumlah PPKS pada suatu wilayah. Pada grafik di bawah, dapat dilihat bahwa PPKS yang tertangani mengalami fluktuasi menurun dalam kurun lima tahun. Pada tahun 2019, persentase PPKS yang tertangani mencapai 55% dan cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 cakupannya menjadi 65,62%.



Gambar 2.173  
Persentase PPKS yang Tertangani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2024*

b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial  
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Persentase LKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial ditentukan berdasarkan jumlah LKS yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sosial dibandingkan dengan jumlah LKS yang seharusnya menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan sosial.

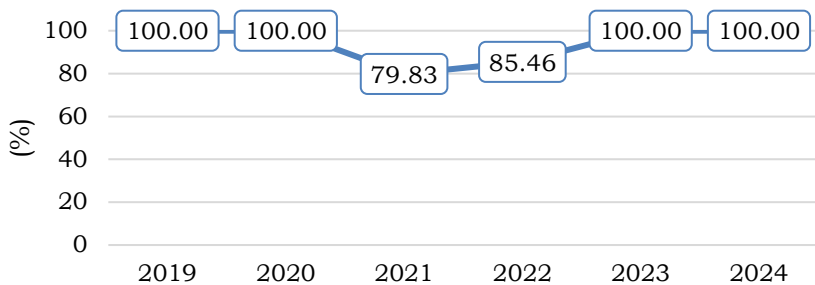


Gambar 2.174  
Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2024

Berdasarkan grafik di atas, lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tangerang memiliki capaian yang sangat baik dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebesar 100%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa lembaga kesejahteraan sosial sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan berupa fasilitas atau sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

c. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat ditentukan dengan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibandingkan dengan total korban bencana selama masa tanggap darurat. Berdasarkan grafik di bawah, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup stabil mendekati 100%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang dapat menangani masalah secara dini.



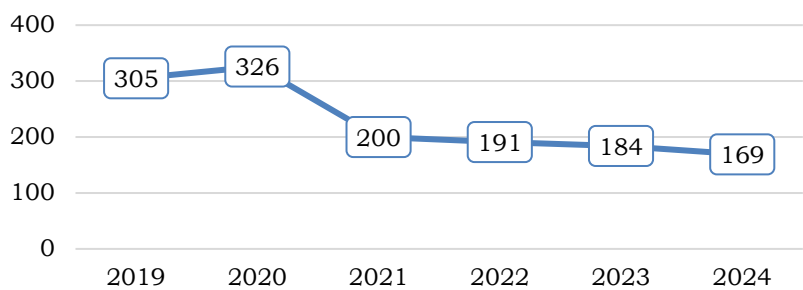
Gambar 2.175  
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Buku Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2023 dan 2025

B) Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja

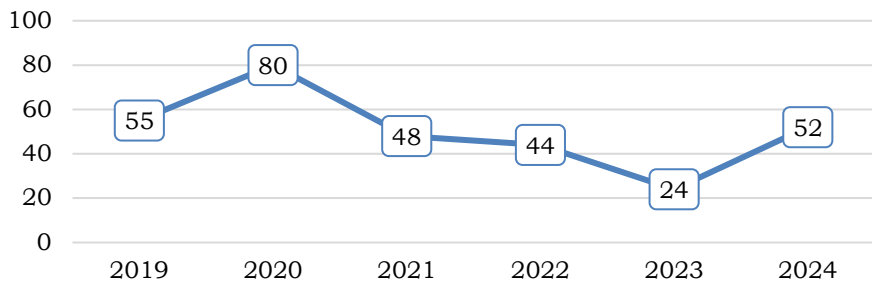
a. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja adalah fenomena yang banyak terjadi di dunia kerja. Pada 2021-2024, jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di Kabupaten Tangerang cenderung menurun drastis hingga angka 169. Meskipun demikian sengketa pengusaha-pekerja sempat meningkat pada tahun 2020 yakni saat Pandemi yang mungkin terjadi akibat tingginya kasus PHK.



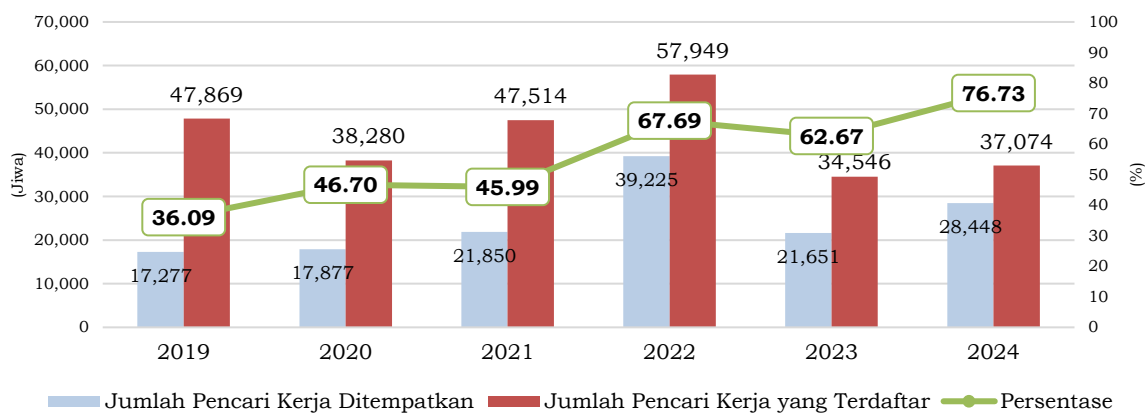
Gambar 2.176  
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)  
Sengketa perusahaan dengan pekerja sebagian diselesaikan melalui perjanjian bersama. Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama memiliki kecenderungan tren yang sama dengan jumlah sengketa pengusaha-pekerja. Namun, jumlah penyelesaian kasus ini masih jauh dari jumlah kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan masih adanya kasus ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan melalui perjanjian bersama.



Gambar 2.177  
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

c. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan  
Berdasarkan data tahun 2019-2024, menunjukkan peningkatan persentase pencari kerja yang ditempatkan. Akan tetapi, jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih belum mengakomodasi seluruh pencari kerja di wilayah ini.

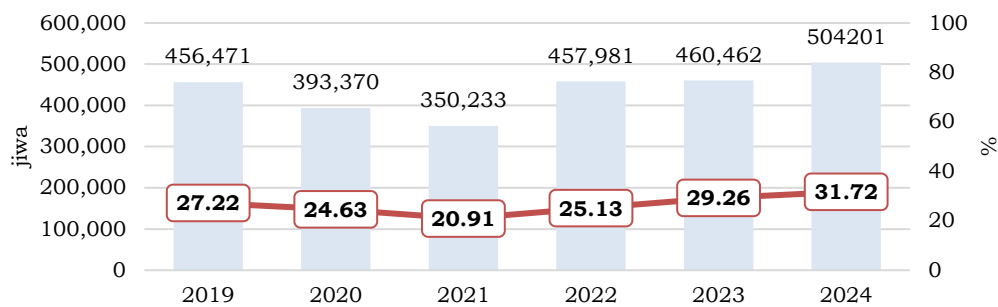


Gambar 2.178  
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek  
Program Jamsostek merupakan program penyediaan asuransi yang ditujukan bagi para pekerja. Besaran pekerja/buruh yang telah menjadi peserta program ini cenderung berfluktuasi dan mengalami penurunan yang



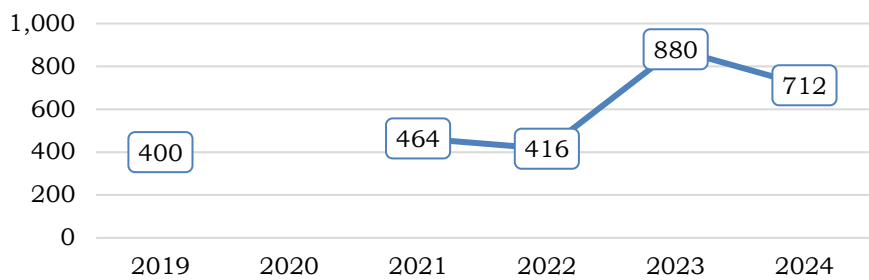
cukup signifikan pada tahun 2019-2021. Sementara itu, pada 2023 dan 2024 mengalami peningkatan hingga ke angka 460.462 dan 504.201 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan upaya penjaminan keselamatan pekerja/buruh. Akan tetapi, persentase besaran pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek masih rendah.



Gambar 2.179  
Besaran dan Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025*

e. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan sesuai kompetensi pekerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sesuai kompetensi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2023. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan pelatihan sesuai kompetensi karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan menurun hingga 712.



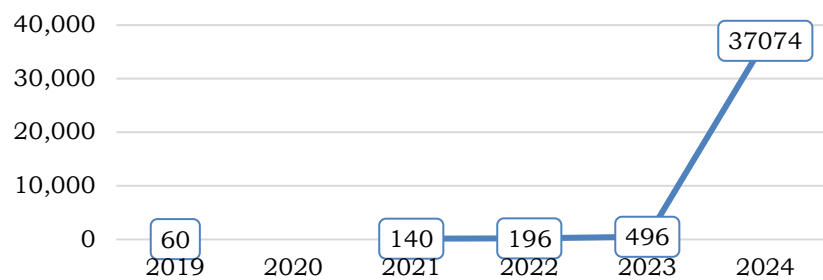
Gambar 2.180  
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025*

f. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain pelatihan sesuai kompetensi pekerja, juga terdapat pelatihan berbasis masyarakat. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada 2022 dan 2023 yakni 68 dan 204 jiwa.

g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Selain kedua pelatihan di atas, terdapat pelatihan lain yang dilakukan, yakni pelatihan kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada rentang waktu 2019-2024. Meskipun demikian pada 2020, tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19.



Gambar 2.181  
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

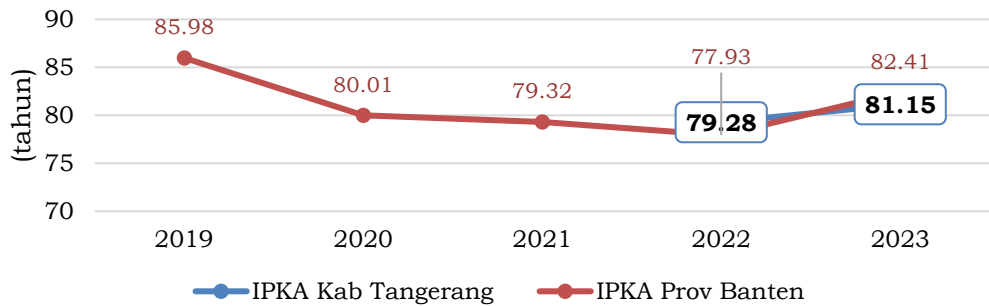
h. Rasio Lulusan S1/S2/S3  
Kualitas tenaga kerja salah satunya dapat digambarkan melalui pendidikan terakhir tenaga kerja. Berdasarkan data tahun 2021-2024, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terdapat 1 lulusan S1/S2/S3 di antara 10 pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.28  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Rasio Lulusan S1/S2/S3 |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| 2019                   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -                      | -    | 2:17 | 1:8  | 1:11 | 1:10 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2025

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
a. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)  
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pembangunan perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak dengan disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. Capaian IPKA Kabupaten Tangerang dihitung mulai tahun 2022 dengan capaian 79,28 dan meningkat hingga 81,15 di tahun 2023. Sementara, capaian IPKA di Provinsi Banten cenderung menurun hingga tahun 2022, dan baru meningkat di tahun 2023 menjadi 82,41.



Gambar 2.182  
Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2019-2023  
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021-2024

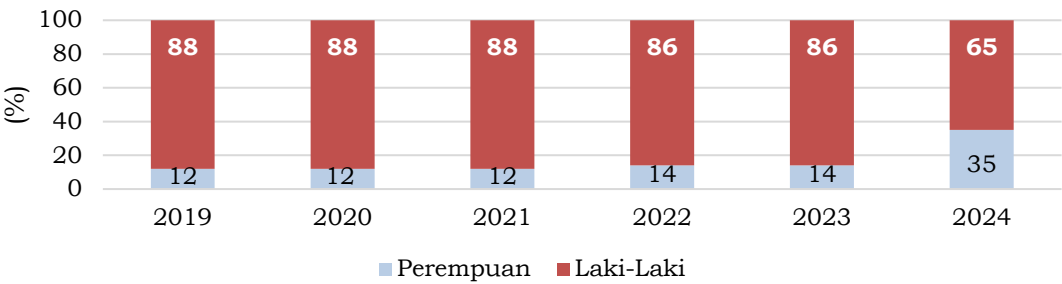
b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan memiliki jumlah yang meningkat tiap tahunnya yaitu PNS 58,2% dan PPPK mencapai 66,6%. Grafik peningkatan pada partisipasi perempuan berimplikasi bahwa perempuan diberdayakan dalam lembaga pemerintah.

Tabel 2.29  
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023

| Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah |                              |                              |       |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|-------|
| Uraian                                                 | 2020                         | 2021                         | 2022  | 2023  |
| PNS                                                    | 44,48%                       | 55,6%                        | 57,7% | 58,2% |
| PPPK                                                   | PPPK mulai ada di tahun 2022 | PPPK mulai ada di tahun 2022 | 67,8% | 66,6% |

Sumber: BPS dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2024

c. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR  
Berdasarkan hasil pemilu 2024, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Daerah belum mencukupi target keterwakilan 35% perempuan. DPRD perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 19 anggota legislatif perempuan dari 55 anggota legislatif DPRD Kabupaten Tangerang atau 65%.



Gambar 2.183  
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2025

d. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta  
Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemberdayaan perempuan pada lembaga swasta. Pada tahun 2019, partisipasi perempuan di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 23,18% lalu angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 58,17%.

Tabel 2.30  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

| Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta |      |        |        |        |
|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 2019                                    | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   |
| 23,18%                                  | -    | 55,58% | 57,70% | 58,17% |

Sumber: Buku Data Sektoral 2024 Kabupaten Tangerang

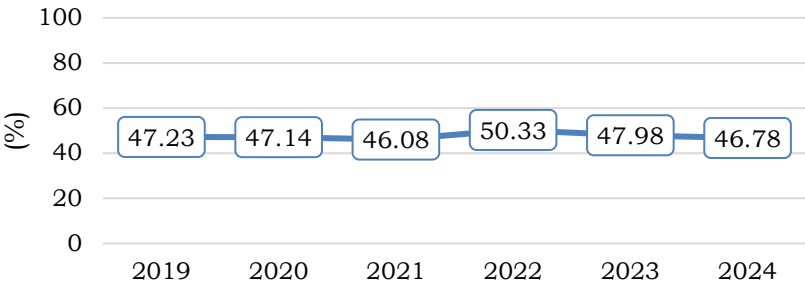
e. Rasio KDRT  
KDRT merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan dan dilakukan oleh pasangan suami istri. Pada Kabupaten Tangerang, rasio KDRT mengalami fluktuasi peningkatan jumlah kasus dari tahun 2019 Kabupaten memiliki rasio 1 kasus KDRT dari 37.140 rumah tangga. Namun angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 1 kasus dari 24.723 rumah tangga. Lalu rasio tersebut menurun pada tahun 2021 mencapai 1 kasus dari 25.987 rumah tangga, hingga pada tahun 2022 meningkat lagi di angka 1 kasus dari 20.621 rumah tangga.

Tabel 2.31  
Rasio KDRT Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

| Rasio KDRT |            |            |            |            |      |      |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| Uraian     | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023 | 2024 |
| KDRT       | 25         | 32         | 31         | 40         | 36   | 35   |
| RT         | 928.509    | 791.148    | 805.595    | 824.820    |      |      |
| Rasio KDRT | 1 : 37.140 | 1 : 24.723 | 1 : 25.987 | 1 : 20.621 |      |      |

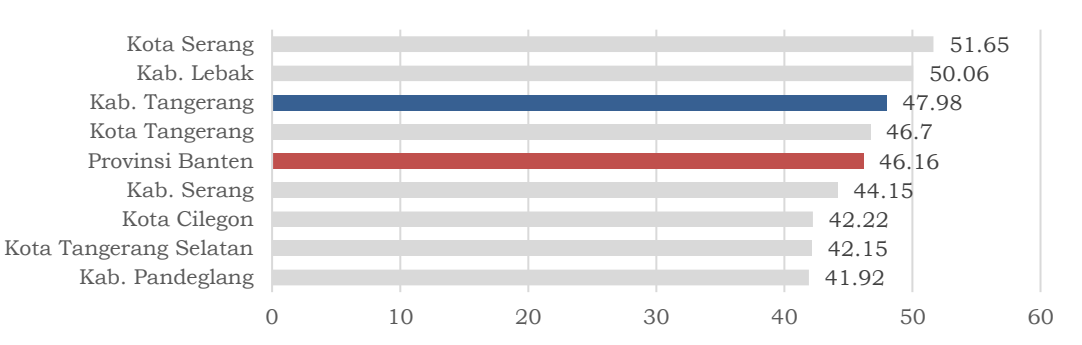
Sumber: [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

f. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun. Pada tahun 2019, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai persentase 47,23%. Persentase ini menurun pada tahun 2021 menjadi 46,08% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 50,33%. Lalu partisipasi angkatan kerja perempuan kembali menurun menjadi 46,78% pada tahun 2024.



Gambar 2.184  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Buku Data Sektorl 2024 Kabupaten Tangerang

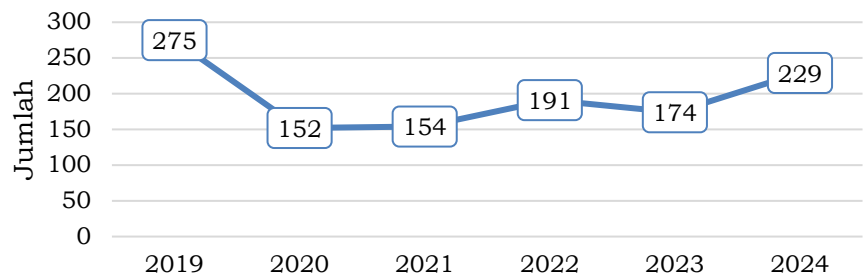
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Meskipun belum mencapai angka 50%, TPAK perempuan Kabupaten Tangerang berada di atas TPAK Provinsi Banten. Di samping itu, Kota Serang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling tinggi di Provinsi dengan angka 51,65%; sementara Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan TPAK perempuan paling rendah di Provinsi Banten dengan persentase 41,92%.



Gambar 2.185  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

g. **Jumlah Kasus korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu**  
Jumlah Kasus korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 275. Angka tersebut

berfluktuasi dengan kembali meningkat dari tahun sebelumnya hingga menjadi 229 pada tahun 2023.



Gambar 2.186

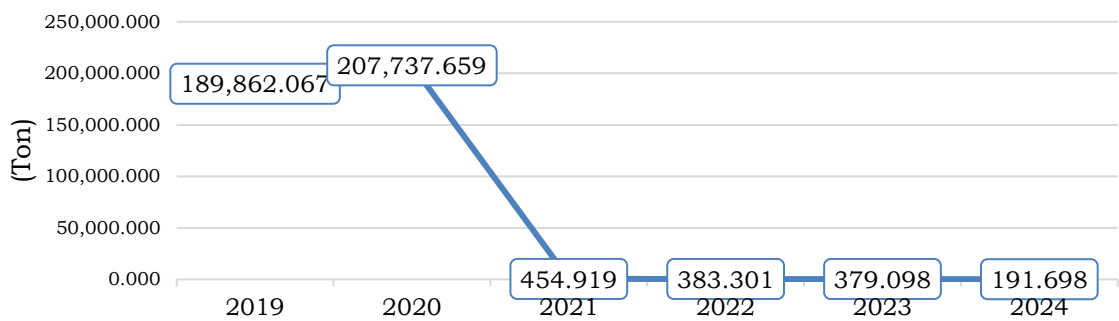
Jumlah Kasus Korban (Perempuan dan Anak) Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, 2025

- h. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD  
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio ini berada di angka 91,41%, yang berarti jumlah perempuan yang bersekolah di SD sedikit lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu rasio ini menurun pada tahun 2020 menjadi 91,3%. Tetapi pada tahun 2023, rasio APM meningkat signifikan menjadi 96,63% yang menandakan bahwa perempuan yang dapat mengenyam pendidikan dasar semakin meningkat dan upaya dalam kesetaraan gender berhasil.
- i. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP  
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMP di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, rasio APM berada di 93,87% dan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 94%. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bersekolah di SMP lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, rasio APM meningkat menjadi 110,43% yang menandakan bahwa jumlah perempuan melebihi laki-laki. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program kesetaraan gender berhasil.
- j. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA  
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio APM mencapai 121,65% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 119,34%. Pada tahun 2023, rasio tersebut turun lagi menjadi 102,93%. Meskipun rasio APM menurun, jumlah siswa perempuan di SMA masih melebihi jumlah siswa laki-laki.
- k. Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi  
Pada tahun 2023, rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang tercatat mencapai 109,96%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa perempuan sedikit melebihi jumlah mahasiswa laki-laki. Rasio ini menandakan bahwa program kesetaraan gender pada pendidikan terlaksana dengan baik.

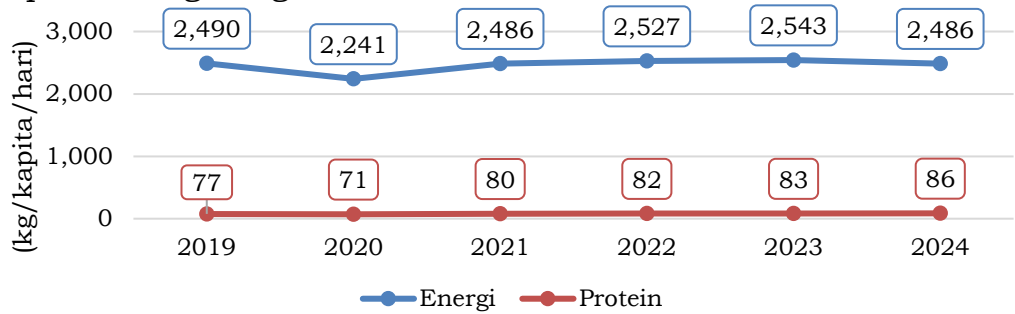
3) Pangan  
a. Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Penyediaan pangan Kabupaten Tangerang cenderung menurun terutama pada tahun 2021-2024. Pada tahun tersebut, ketersediaan pangan utama berkisar antara 370.000 - 450.000 ton. Sedangkan pada 2019-2020 ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang berkisar antara 180.000.000 - 207.737.659 ton. Penurunan yang signifikan ini memerlukan penanganan untuk memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Tangerang



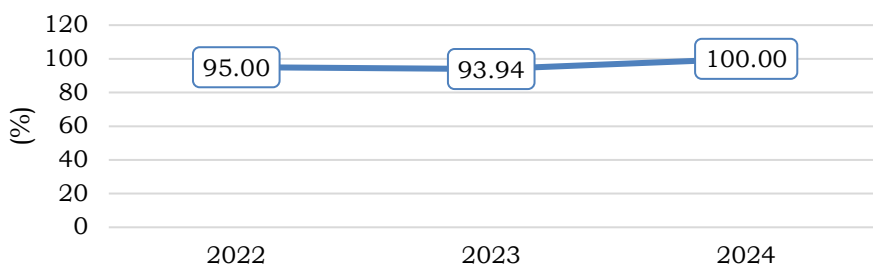
Gambar 2.187  
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2025

b. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita  
Energi dan protein sebagai salah satu kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam tubuh manusia memerlukan pasokan yang mencukupi. Ketersediaan energi di Kabupaten Tangerang relatif sama dari tahun 2019-2024, yakni berkisar antara 2.200-2.500 kg/kapita/hari. Sedangkan ketersediaan protein cenderung stagnan pada angka 70-86 kg/kapita/hari. Hal ini menunjukkan terpenuhinya kebutuhan protein dan energi per kapita di Kabupaten Tangerang.



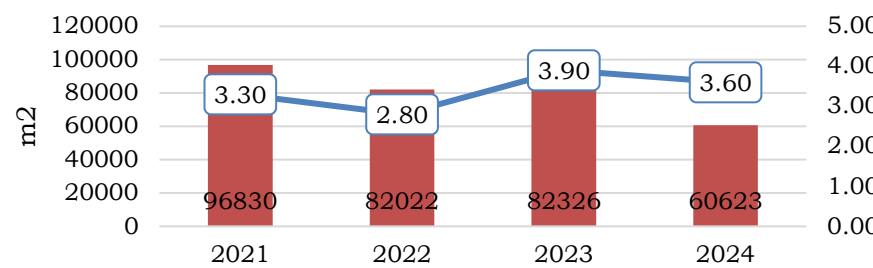
Gambar 2.188  
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2025

c. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan  
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah salah satu upaya menjamin kualitas ketahanan pangan dalam suatu wilayah. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan ini tergambar pada persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan. Persentase tersebut cenderung tinggi yakni berkisar di angka 90% dan telah mencapai 100% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kualitas pangan di wilayah ini cenderung baik. Pada tahun 2020-2021 tidak dilakukan pengukuran, karena *refocusing* untuk penanganan pandemi.



Gambar 2.189  
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2022-2024  
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2025

- 4) Pertanian
- a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat
- Kabupaten Tangerang memiliki grafik persentase luas lahan bersertifikat yang meningkat dalam tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, lahan di Kabupaten Tangerang yang memiliki sertifikat mencapai 37,839,610 m2 dengan persentase 3,3%. Angka tersebut terus menurun hingga pada tahun 2024 mencapai 60,623 bidang dengan luas 41,544,732 m2 dengan persentase 3,6%.



Gambar 2.190  
Persentase Luasan Lahan Bersertifikat Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2024  
Sumber: Buku Ranwal RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, 2025

- b. Penyelesaian Izin Lokasi
- Izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada seseorang/perusahaan untuk memperoleh dan menggunakan tanah. Bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Kabupaten Tangerang telah melakukan 100% penyelesaian izin lokasi dari tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang memudahkan penyelesaian izin lokasi di dalam daerah.
- 5) Lingkungan Hidup
- a. Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Tersusunnya RPPLH Kabupaten
- Penyusunan RPPLH Kabupaten Tangerang baru dimulai pada tahun 2021 yang berisi sub RPPLH atau peta D3LTH. Sementara itu, pada tahun selanjutnya tersusun dokumen *review* RPPLH Kabupaten Tangerang.



Tabel 2.32  
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota |                            |              |              |                             |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 2020                             | 2021                       | 2022         | 2023         | 2024                        |
| Tidak Ada                        | Ada (Sub RPPLH/Peta D3LTH) | Ada (Review) | Ada (Review) | Ada (revisi/verifikasi KLH) |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

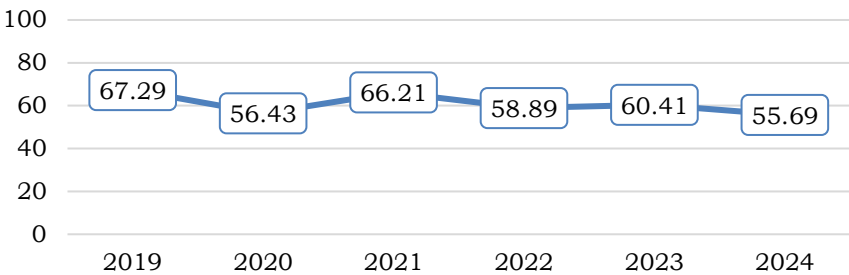
- c. Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten RPPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan harus seiring dengan rencana pembangunan. Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup, RPPLH tahun 2025-2055 menjadi dasar penyusunan RPJPD 2025-2045.
- d. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu dokumen yang menjadi bahan pertimbangan dalam berbagai perencanaan. Pada 2021, KLHS di Kabupaten Tangerang terdapat pada KLHS RDTR Cipati dan Cisojati. Sedangkan pada 2022 terdapat 4 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, dan 1 KLHS RPJPD. Tahun 2023 terdapat peningkatan pada KLHS yakni menjadi 6 KLHS RDTR, 1 KLHS RPJMD, 1 KLHS RPJPD. Di tahun 2024 terdapat 2 KLHS RDTR.

Tabel 2.33  
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

| Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P** tingkat daerah/provinsi |                                     |                                                   |                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 2020                                                        | 2021                                | 2022                                              | 2023                                              | 2024          |
| Tidak Ada                                                   | Ada (KLHS RDTR Cipati dan Cisojati) | KLHS RDTR = 4<br>KLHS RPJMD = 1<br>KLHS RPJPD = 1 | KLHS RDTR = 6<br>KLHS RPJMD = 1<br>KLHS RPJPD = 1 | KLHS RDTR = 1 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

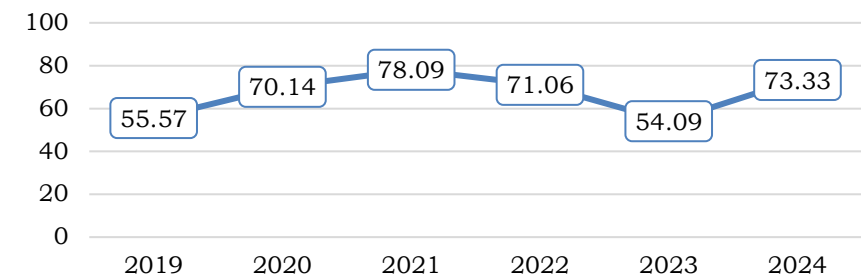
- e. Peningkatan Indeks Kualitas Air Indeks kualitas air adalah indeks yang menggambarkan kondisi/kualitas air pada suatu wilayah. Indeks kualitas air di Kabupaten Tangerang cenderung berfluktuasi pada tiap tahunnya. Secara umum kualitas air ini tergolong sedang hingga buruk yang berkisar pada angka 56-67. Rendahnya kualitas air ini disebabkan akibat adanya polutan dalam air permukaan dan air tanah.



Gambar 2.191  
Peningkatan Indeks Kualitas Air Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

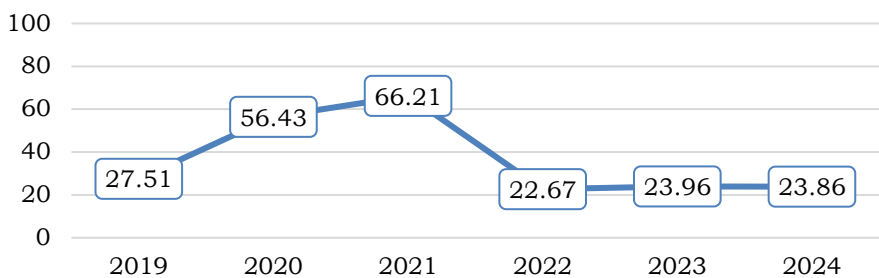
- f. Peningkatan Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Tangerang meningkat pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Kondisi ini kembali meningkat pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 berada pada angka 73,33 (51-100) menunjukkan kualitas udara yang "sedang" atau "tidak sehat" untuk

kelompok rentan. Kualitas udara ini cenderung sedang mengarah ke kondisi yang kurang baik sehingga diperlukan adanya penanganan untuk meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Tangerang.



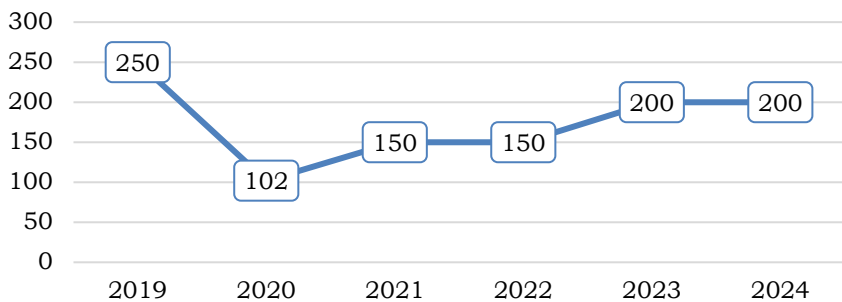
Gambar 2.192  
Peningkatan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

g. Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan  
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan yang pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini terjadi akibat perubahan penghitungan luasan area lahan *mangrove*. Secara umum kondisi tutupan lahan di wilayah ini cenderung buruk ditandai nilai indeks yang rendah. Hal ini terjadi akibat tingginya penggunaan lahan untuk lahan terbangun.



Gambar 2.193  
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025

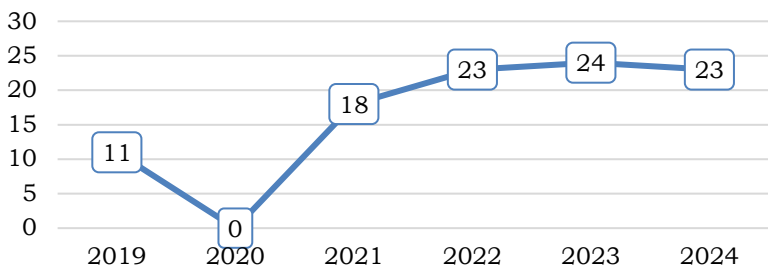
h. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  
Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Pembinaan dan pengawasan ini mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2023. Sedangkan pada 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Secara umum pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan besarnya upaya untuk menjaga lingkungan wilayah Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.194

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025*

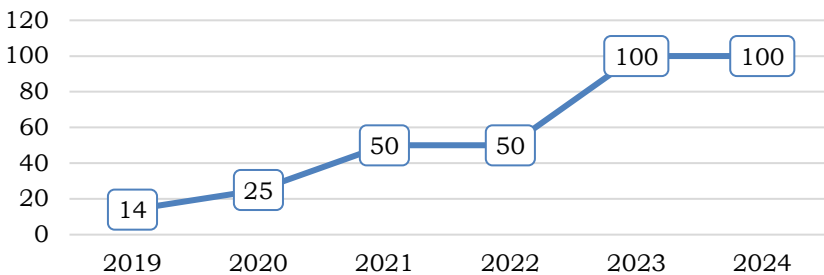
i. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup  
Penghargaan lingkungan hidup merupakan upaya menjaga kualitas lingkungan hidup. Penghargaan lingkungan hidup diberikan kepada instansi/ wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Meskipun sempat vakum pada masa pandemi Covid-19, pemberian penghargaan ini semakin meningkat dari 2021-2023. Pada tahun 2024 terdapat 23 penghargaan yang diberikan. Banyaknya jumlah penghargaan yang diberikan mengindikasikan peningkatan kualitas lingkungan hidup di berbagai instansi/wilayah.



Gambar 2.195

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025*

j. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampak lintas Kabupaten/Kota yang Ditangani  
Aduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemantauan terhadap perizinan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat terkait perizinan lingkungan hidup Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap perizinan lingkungan hidup.

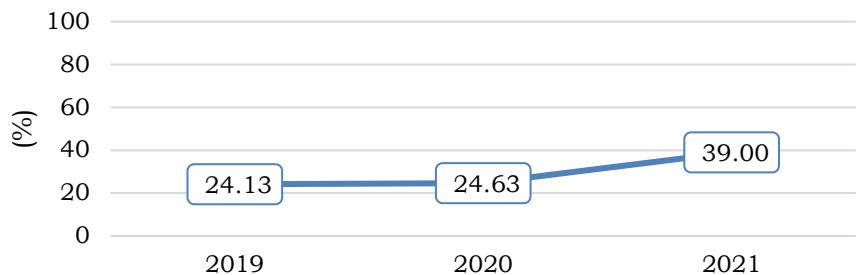


Gambar 2.196

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2025*

k. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten

Sampah memiliki cara penanganan tersendiri yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Penanganan sampah pada kondisi khusus di Kabupaten Tangerang masih terbatas. Dalam rentang waktu 2019-2021 sampah yang tertangani pada kondisi khusus hanya berkisar pada 20-27% yang tiap tahunnya meningkat perlahan. Hal ini memerlukan penanganan khususnya dalam mengelola sampah kondisi khusus.



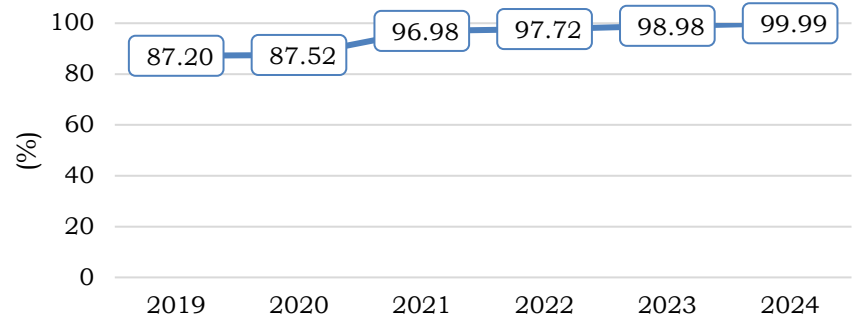
Gambar 2.197  
Jumlah Sampah yang Tertangani pada Kondisi Khusus di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, 2024

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

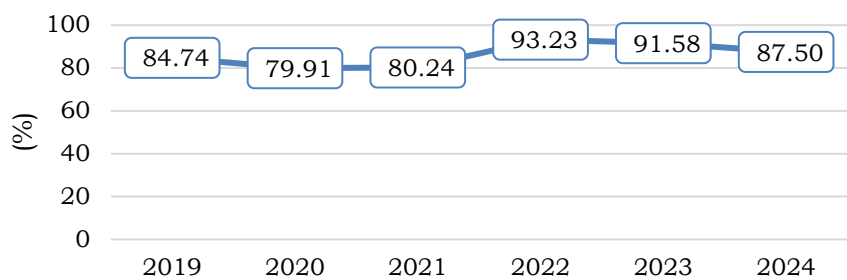
Kabupaten Tangerang memiliki rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk yang cenderung stabil pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mencapai 87,20%. Lalu rasio ini turun di angka 87,52% pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021 pada angka 96,98% dan terus meningkat mencapai 99,99% pada tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan terdaftar secara resmi menjadi penduduk Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.198  
Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025

m. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Rasio bayi berakta kelahiran ditentukan berdasarkan jumlah bayi yang berakta kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh bayi yang lahir pada tahun dan wilayah yang sama. Kabupaten Tangerang memiliki rasio bayi berakta kelahiran yang secara umum meningkat. Hal ini menandakan bahwa keluarga bayi yang lahir di Kabupaten Tangerang sudah cukup taat administrasi.



Gambar 2.199  
Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Open Data Kabupaten Tangerang, 2025

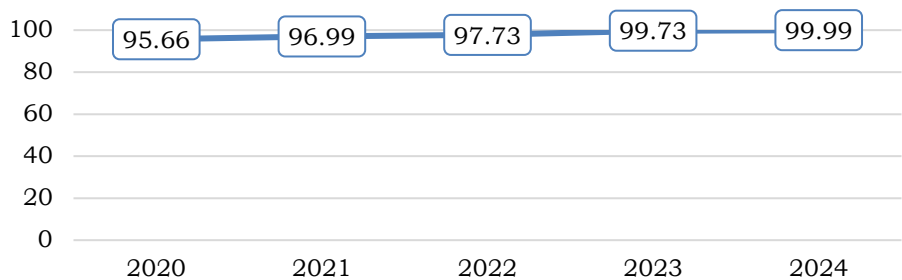
- n. Rasio Pasangan Berakta Nikah  
Rasio pasangan yang memiliki akta nikah di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, rasio tercatat mencapai 50,28%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 54,16%. Peningkatan ini menunjukkan upaya optimalisasi administrasi pencatatan pernikahan dan kesadaran masyarakat mengenai dokumen resmi.
- o. Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kabupaten  
Ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten merupakan salah satu aspek yang menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif mengenai data kependudukan. Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2023 telah tersedia *database* kependudukan skala kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah memiliki *database* yang baik untuk mendukung data kependudukan.
- p. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK  
Berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2009, KTP berbasis NIK merupakan KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus dan berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pada Kabupaten Tangerang, penerapan KTP Nasional sudah berbasis NIK yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sudah menciptakan lingkungan yang pemerintahnya memiliki keakuratan data penduduk.

Tabel 2.34  
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Sudah                               | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

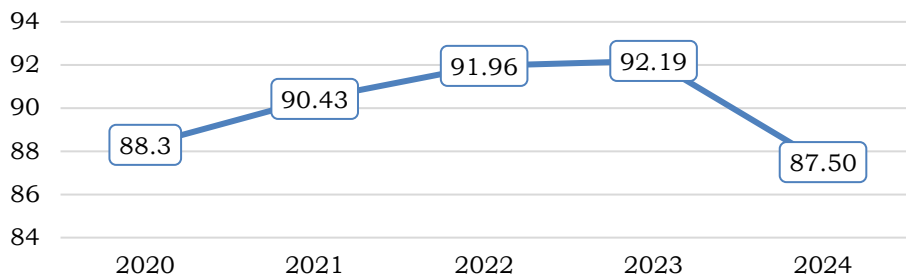
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024

- q. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Penerbitan KTP merupakan persentase jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk yang wajib ber-KTP. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan penerbitan KTP mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun tahun 2020-2024. Peningkatan ini menandakan bahwa penduduk Kabupaten Tangerang sudah taat administrasi dan memiliki KTP.



Gambar 2.200  
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2025

r. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran  
Akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerbitan akta kelahiran merupakan persentase jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah bayi pada kurun waktu yang sama. Berdasarkan grafik di bawah ini, Kabupaten Tangerang memiliki cakupan penerbitan akta kelahiran yang meningkat. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak bayi yang sudah terdaftar dalam administrasi pemerintah. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan hingga sebesar 87,50%.

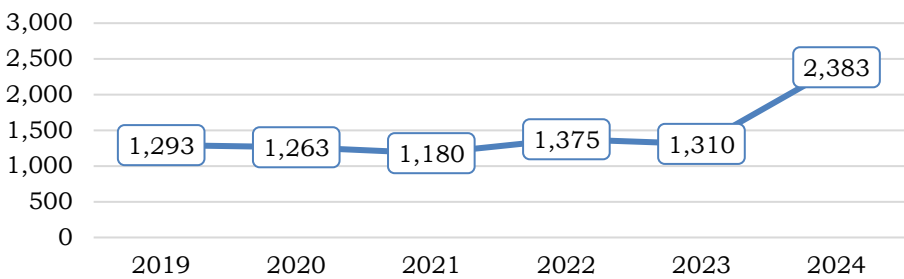


Gambar 2.201  
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2025

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
s. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  
Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini.

t. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK  
PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 cenderung stagnan di angka 274 kelompok atau sama dengan jumlah kelurahan/desa di wilayah ini.

- u. Jumlah BUMDes  
BUMDes berperan penting dalam mendorong optimalisasi potensi dan memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pada tahun 2022, Kabupaten Tangerang memiliki 83 BUMDes. Akan tetapi, pada tahun 2023 baru hanya 2 BUMDes yang mendapatkan bantuan penyertaan modal. Tahun 2024 BUMDes yang sudah mempunyai badan hukum sebanyak 15
- v. Persentase LSM Aktif  
LSM atau lembaga swadaya masyarakat berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan/atau mencapai haknya. Pada tahun 2023, terdapat 46 LSM yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang. Jumlah ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- w. Persentase LPM Berprestasi  
Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang berkembang pesat ditandai dengan 125 LPM yang tergolong dalam LPM berprestasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tangerang
- x. Persentase PKK Aktif  
PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan perempuan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga. Jumlah PKK yang bergerak aktif di Kabupaten Tangerang mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan seluruh PKK berpartisipasi aktif mendukung pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan keluarga.
- y. Jumlah Posyandu Aktif  
Posyandu adalah upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Jumlah posyandu yang aktif mengalami fluktuasi. Secara umum jumlah posyandu aktif di Kabupaten Tangerang berkisar antara 1.100-1.300. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2024, hingga sebesar 2.383. Tingginya jumlah posyandu yang aktif menunjukkan adanya upaya pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat bawah.

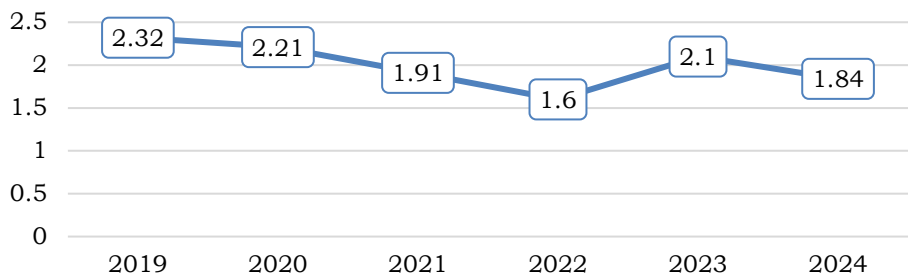


Gambar 2.202  
Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Data Statistik Sektoral

- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- z. Total Fertility Rate (TFR)  
Total fertility rate atau TFR merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksi. Kabupaten Tangerang memiliki rata-rata TFR pada tahun 2019-2024 mencapai angka 2. Hal ini menandakan bahwa wanita dengan usia 15-49 tahun secara rata-rata memiliki 2 anak selama masa usia suburnya. TFR 1,84 di tahun 2024,



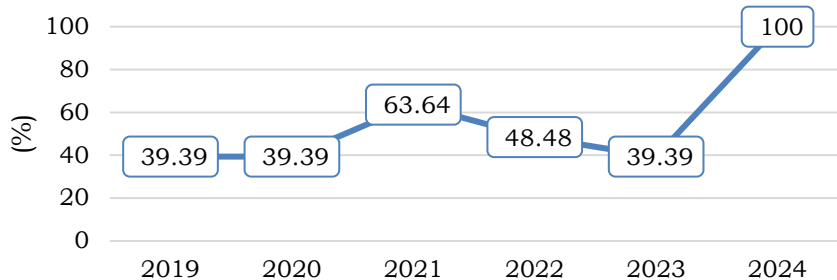
populasi cenderung mengalami penurunan alami dalam jangka panjang jika tidak ada faktor lain seperti imigrasi.



Gambar 2.203  
Total Fertility Rate Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, RPJMD 2019-2024

aa. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Kampung KB adalah yang melaporkan kegiatannya di Kampung KB ke Pokja Kampung KB tingkat kota. Semakin tinggi Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB maka menunjukkan semakin baik perhatian pemerintah daerah terhadap program kampung KB. Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cenderung stagnan dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 angka ini meningkat hingga 63,63% dan angka tersebut kembali menjadi 39,39%, tahun 2024 Kabupaten Tangerang melakukan integrasi program Kampung KB sehingga angka mencapai 100%.



Gambar 2.204  
Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber : Open data Kabupaten Tangerang, 2025

bb. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Rancangan Induk Pengendalian Penduduk adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh perangkat daerah untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk di wilayah tertentu. Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk mengacu pada proporsi atau persentase dari semua lembaga pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemanfaatan dokumen strategis. Di tahun 2019-2022, belum semua Perangkat Daerah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Di tahun 2023, terdapat 2% Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

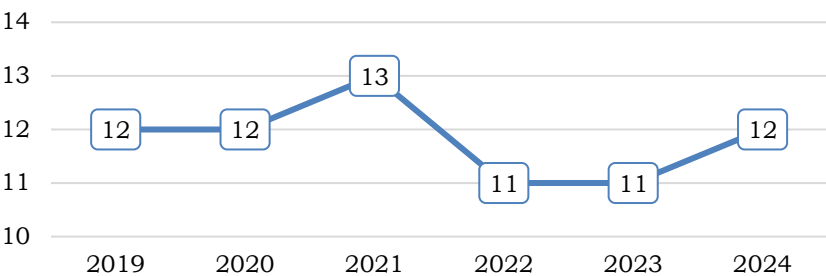
cc. Jumlah Kebijakan yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Pengendalian penduduk merupakan usaha pemerintah dalam mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah yang ditentukan oleh

kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Dalam kurun waktu 2019-2023, Kabupaten Tangerang baru memiliki 1 kebijakan berkaitan dengan program pengendalian penduduk di Kabupaten Tangerang. Adanya Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046 menjadi salah satu arah kebijakan dalam perencanaan kependudukan di Kabupaten Tangerang.

dd. Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan meningkat di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), selama kurun waktu 2019-2023, cenderung menurun dari capaian 13 sektor pada tahun 2021 menjadi 11 sektor pada tahun 2022 dan 2023 12 sektor di 2024.. Hal ini menandakan bahwa perlu peningkatan sektor-sektor di Kabupaten Tangerang dalam upaya memperhatikan masa depan penduduk dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

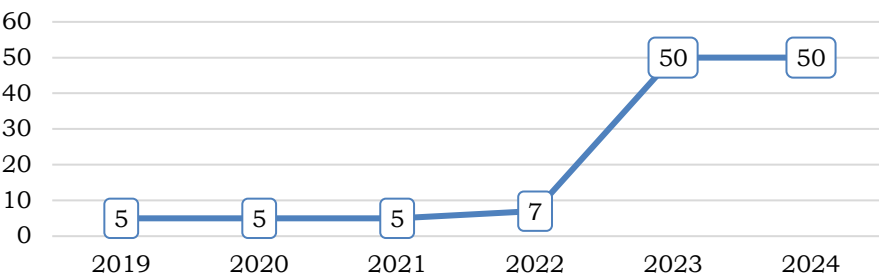


Gambar 2.205

Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2019-2024  
*Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, 2025*

ee. Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Pada tahun 2019-2023, jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan di Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memuncak pada tahun 2024 dengan besaran 50 kerja sama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan dan mengindikasikan bahwa kependudukan merupakan salah satu program prioritas.

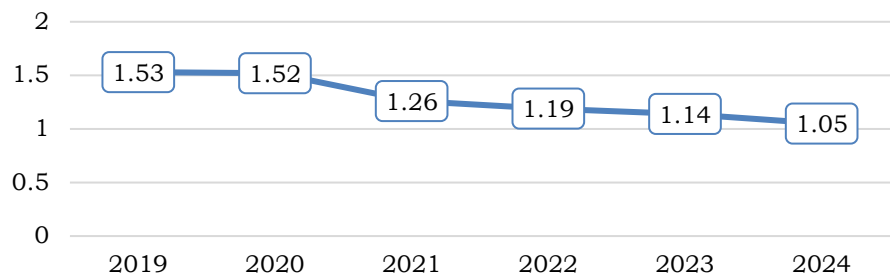


Gambar 2.206

Jumlah Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025*

ff. Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

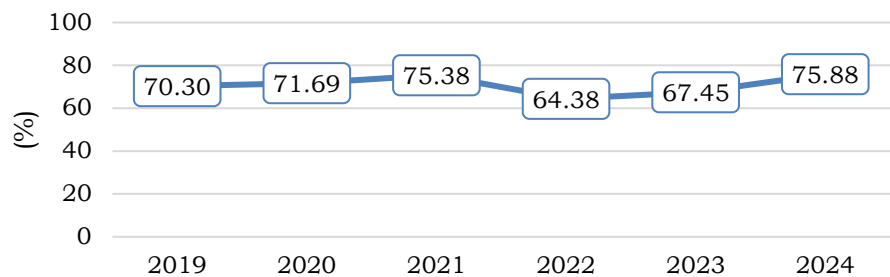
Rata-rata jumlah anak per keluarga ditentukan berdasarkan jumlah anak yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga) dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang ada di suatu daerah. Dalam tahun 2019-2023, rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, rata-rata tersebut mencapai 1,53 dan angka ini sedikit menurun pada tahun 2020 mencapai 1,52. Tetapi pada tahun 2024, jumlah tersebut menurun hingga mencapai 1,05 atau 1 anak. Penurunan ini menandakan bahwa program keluarga berencana di Kabupaten Tangerang berhasil.



Gambar 2.201  
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

gg. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 Tahun

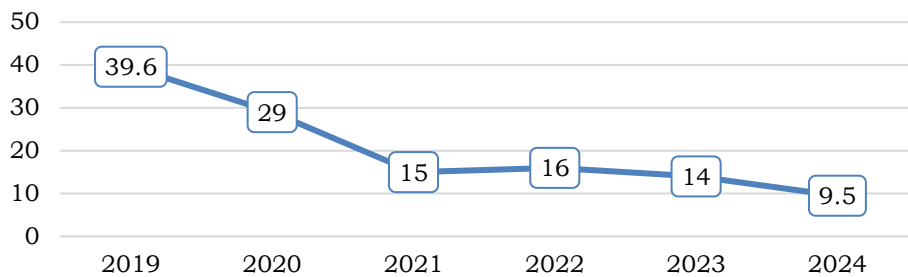
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49 tahun dihitung dengan jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur. Pada Kabupaten Tangerang, dalam kurun waktu 2019-2024, angka pemakaian kontrasepsi/CPR mengalami fluktuasi yang meningkat pada tahun 2024 pada persentase 75,88%. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya pemakaian kontrasepsi/CPR pada pasangan PUS di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.207  
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah 15-49 tahun  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

hh. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)

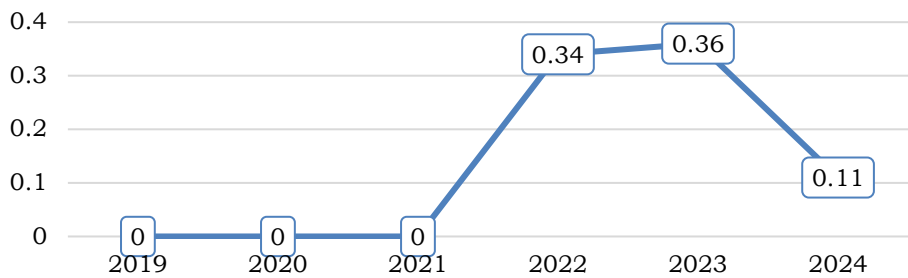
ASFR atau *age specific fertility rate* merupakan banyaknya kelahiran dari 1.000 wanita kelompok umur 15-19 tahun yang dibandingkan dengan jumlah wanita kelompok 15-19 tahun. ASFR Kabupaten Tangerang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019-2023. Pada tahun 2024, angka tersebut mencapai 9,5 yang menandakan bahwa dalam 1000 wanita usia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang terdapat 9 orang yang sudah memiliki anak. Dengan penurunan angka ASFR menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan masyarakat bahwa melahirkan di bawah 20 tahun menyebabkan risiko kesehatan tinggi bagi ibu dan anak.



Gambar 2.208  
Angka Kelahiran Remaja per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

ii. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

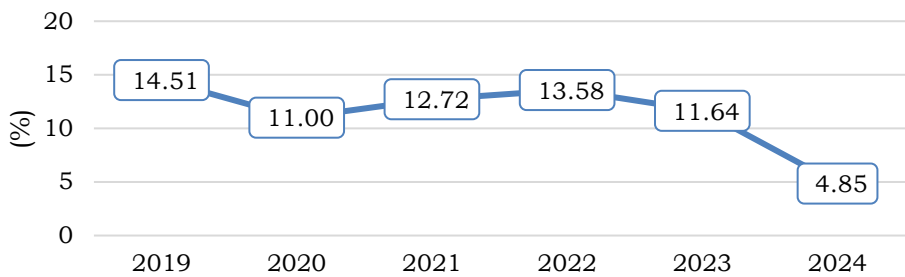
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2021 cakupannya nol (0). Pada tahun 2022, cakupannya mencapai 0,34 kemudian naik menjadi 0,36 di tahun 2023, mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,11. Hal ini menandakan bahwa perempuan di bawah 20 tahun di Kabupaten Tangerang sudah memiliki pengetahuan yang semakin baik mengenai menikah muda dan program pendewasaan usia kawin pertama sudah berhasil dilakukan.



Gambar 2.209  
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

jj. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

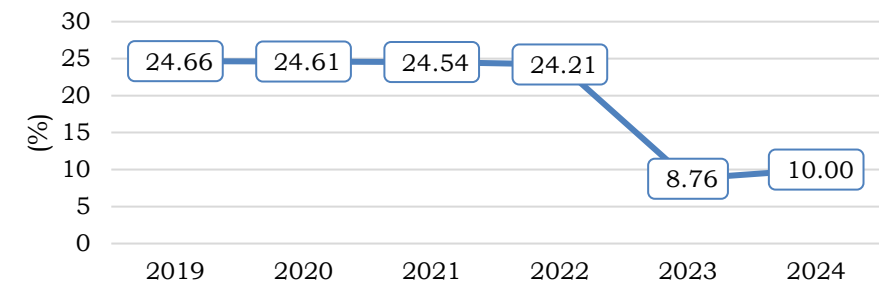
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tetapi belum terlayani KB. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses jangkauan, informasi, dana, dukungan dan kualitas (Sarana, prasarana dan tenaga) pelayanan KB. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan PUS yang rendah menurun pada tahun 2019-2024, dengan capaian 4,85% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pelayanan KB yang ada pada Kabupaten Tangerang semakin baik.



Gambar 2.210  
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019 - 2024  
Sumber : BPS 2024, RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023

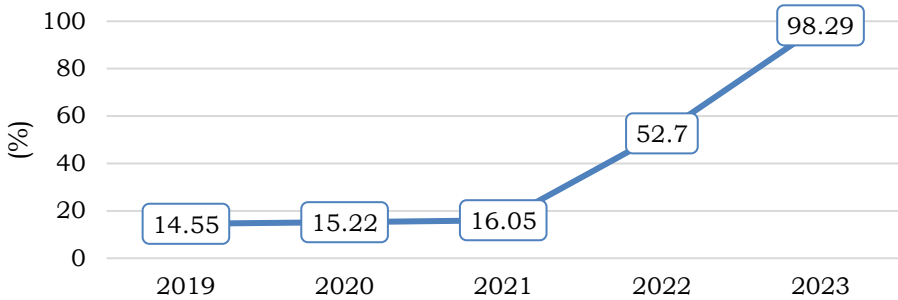
kk. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang adalah metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama dan terdiri dari metode operasi wanita, operasi pria dan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD dan alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Semakin tinggi pengguna MKJP maka menunjukkan semakin baik partisipasi masyarakat terhadap program kependudukan. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang cukup rendah dengan angka terendah pada tahun 2024 yaitu 10%.



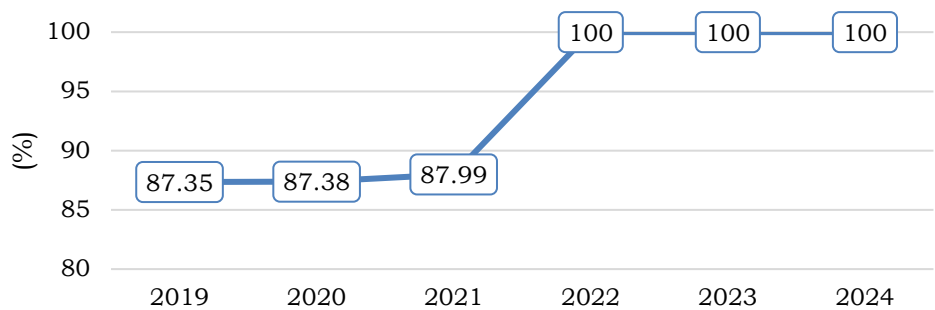
Gambar 2.211  
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : Buku Ranwal RPJPD Kabupaten Tangerang dan DPPKB, 2025

II. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi  
Kabupaten Tangerang memiliki persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi yang meningkat dalam tahun 2019-2023, dengan capaian telah mencapai 98,29% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga semakin baik.



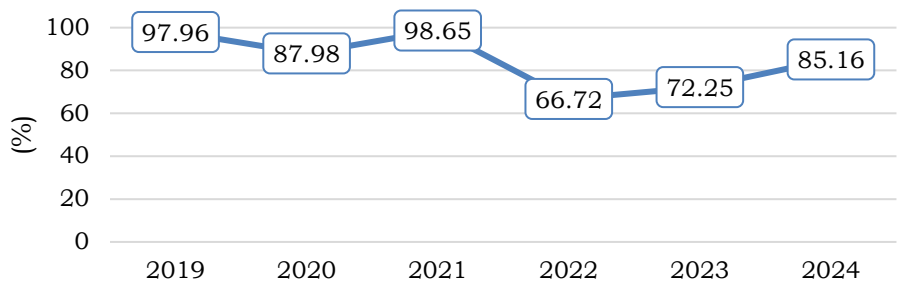
Gambar 2.212  
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2024

mm. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB  
Bina keluarga balita atau BKB merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dalam membina tumbuh dan berkembangnya anak usia balita. Pada tahun 2019-2023, cakupan BKB meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2022 hingga 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga balita semakin tinggi.



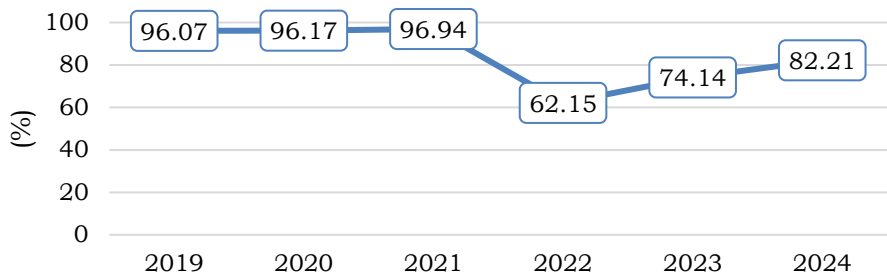
Gambar 2.213  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

nn. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB  
Bina keluarga remaja (BKR) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk membina tumbuh dan berkembangnya remaja usia 10-24 tahun. Pada tahun 2019-2024, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 85,16% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB terhadap pembinaan keluarga remaja semakin menurun.



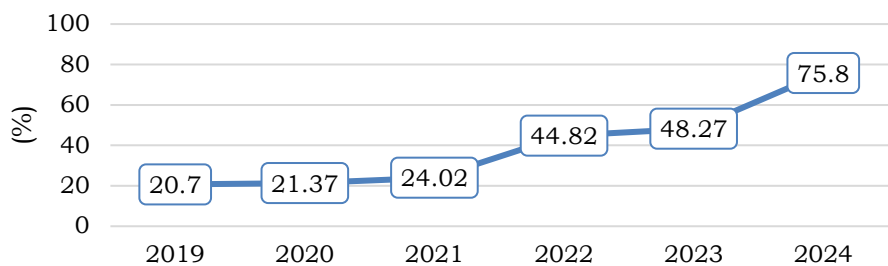
Gambar 2.214  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : RKPD dan DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

oo. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB  
Bina keluarga lansia atau BKL merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga lansia yang sehat, mandiri, dan produktif. Pada tahun 2019-2023, cakupan BKR menunjukkan penurunan dengan capaian 82,21% di tahun 2024. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keinginan peserta KB Kabupaten Tangerang terhadap pembinaan keluarga lansia semakin menurun.



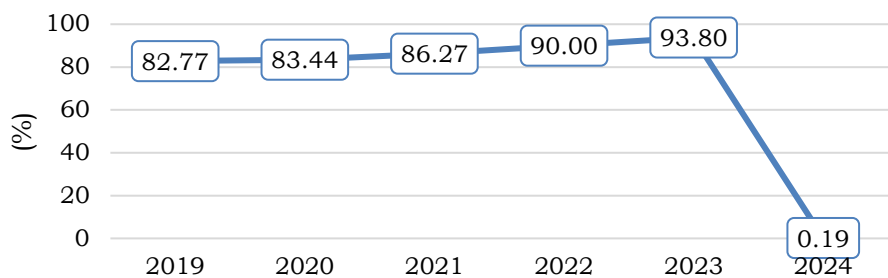
Gambar 2.215  
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

pp. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan  
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan pelayanan keluarga melalui konseling, bimbingan, pemberian KIE dan fasilitas keluarga sejahtera. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memiliki persentase yang meningkat, sebesar 75,8% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin baiknya penyediaan sarana konseling keluarga di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.216  
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

qq. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa  
PIK-R merupakan wadah bagi remaja untuk melaksanakan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja. Pada Kabupaten Tangerang, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Dapat dilihat dalam grafik di bawah, jika persentase tersebut sudah cukup baik, terutama dalam tahun 2023 mencapai 93,8%. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak remaja yang peduli dan ingin mempersiapkan diri mereka untuk memiliki ilmu berkeluarga. Tahun 2024 turun menjadi 0,19%.



Gambar 2.217  
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

rr. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk  
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan petugas program KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kabupaten Tangerang memiliki PKB/PLKB yang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023. Meskipun cakupan stabil 100% tiap tahunnya, jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan meningkat dari 7 pada tahun 2019 menjadi 60 pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang semakin peduli dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.



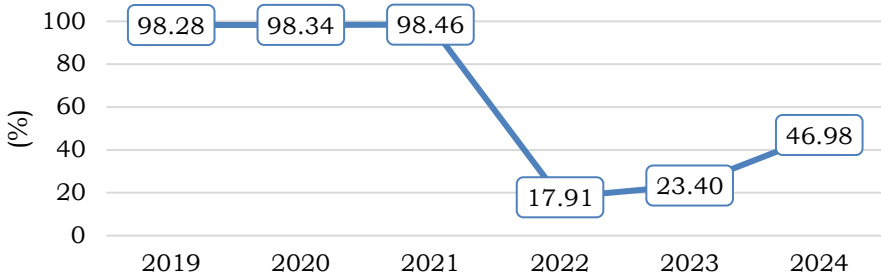
Tabel 2.35  
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Uraian                                                                                                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jumlah PKB/PLKB yang diberdayakan                                                                                                            | 7    | 7    | 8    | 23   | 60   | 31   |
| Total PKB/PLKB                                                                                                                               | 7    | 7    | 8    | 23   | 60   | 31   |
| Persentase                                                                                                                                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

ss. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

UPPKS merupakan salah satu kelompok kegiatan masyarakat yang melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 46,98% di tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit anggota UPPKS yang melakukan KB mandiri.



Gambar 2.218  
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025

tt. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

PPKBD merupakan petugas yang bekerja langsung di lapangan dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk. PPKBD bertujuan untuk memberikan penyuluhan, motivasi, dan konseling kepada masyarakat, serta melakukan pengarsipan program KB di desa/kelurahan tempat tugasnya. Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah menyediakan 1 petugas pada tiap desa/kelurahan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan pelayanan yang optimal.

Tabel 2.36  
Rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan  
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

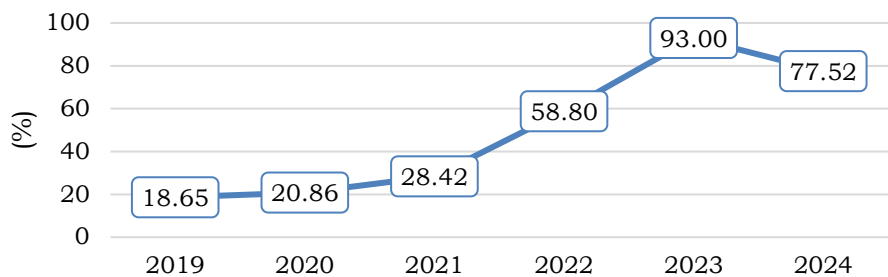
| Uraian                      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Petugas Pembantu Pembina KB | 274   | 274   | 274   | 274   | 274   | 274   |
| Jumlah Desa                 | 274   | 274   | 274   | 274   | 274   | 274   |
| Rasio                       | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |

Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

uu. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi ditentukan berdasarkan jumlah alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang daerah dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat. . Pada Kabupaten Tangerang, cakupan tersebut mengalami

peningkatan drastis dalam lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, cakupan tersebut hanya mencapai 18,65%, sedangkan pada tahun 2024 cakupan tersebut mencapai 77,52%. Peningkatan ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan kontrasepsi.



Gambar 2.219  
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi  
Permintaan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2025*

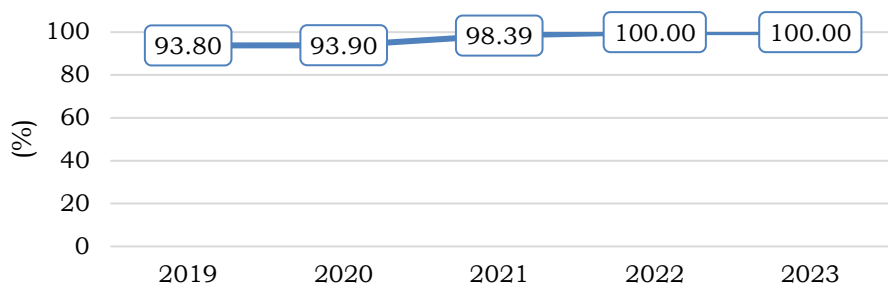
- vv. Persentase Faskes dan Jejaringnya (di seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama dengan BPJS dan Memberikan pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan

Seluruh faskes dan jejaringnya di Kabupaten Tangerang telah bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan. Hal ini menandakan bahwa fasilitas pendukung kesehatan Kabupaten Tangerang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat baik dari pelayanan program jaminan sosial maupun keluarga berencana. Tahun 2023 sekitar 100% faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR, sedang tahun 2024 sekitar 52,77%.

- ww. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa  
Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa merupakan ketersediaan informasi dan data anggota keluarga mengenai demografi, keluarga berencana dan ketahanan serta pembinaan keluarga. Kabupaten Tangerang telah mencakup 100% atau seluruh desa dalam kurun waktu 2019-2024. Cakupan tersebut dapat mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah sangat baik dalam penyediaan informasi.

- xx. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

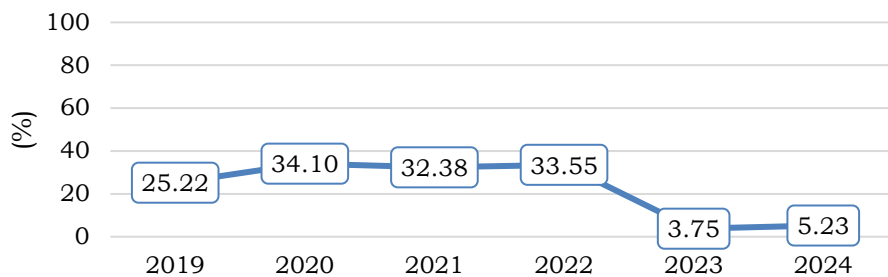
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga terhitung berdasarkan jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan dibandingkan dengan total jumlah kelompok kegiatan dalam suatu daerah. Kabupaten Tangerang memiliki cakupan yang meningkat selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. Selanjutnya, cakupan ini stabil di angka 100% ada tahun 2022 dan 2023. Grafik ini menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berupaya memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada keluarga.



Gambar 2.220  
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2024

yy. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

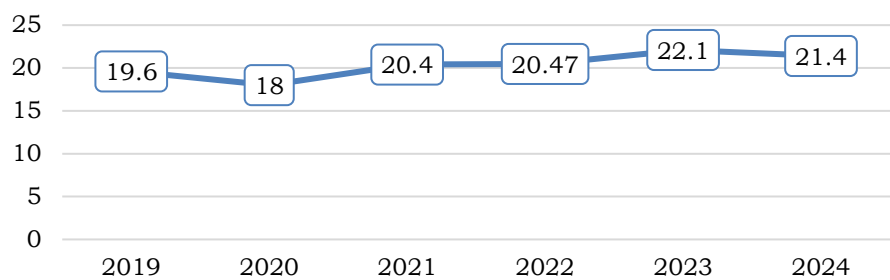
Pada Kabupaten Tangerang, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, cakupan ini mencapai angka 25,22% dan meningkat pada tahun 2020 mencapai 34,10% lalu stabil pada tahun 2021 dengan angka 32,38%, dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 33,55%. Akan tetapi, persentase tersebut menurun cukup signifikan pada tahun 2024 hingga di angka 5.23%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan pemantauan terhadap masyarakat, terutama dalam tumbuh kembang anak.



Gambar 2.221  
Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

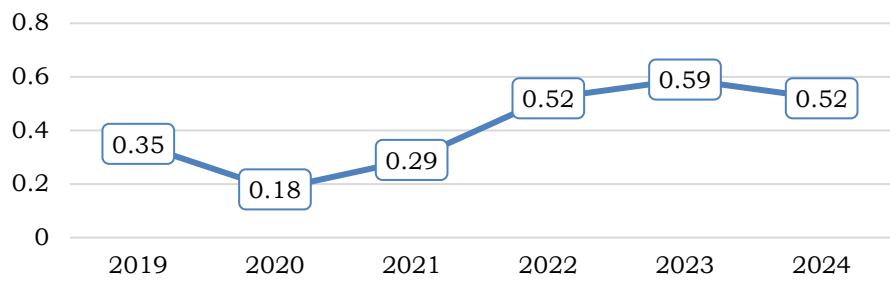
zz. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Umur kawin pertama atau UKP merupakan saat dimulainya masa reproduksi dan menjadi indikator penekanan laju pertumbuhan penduduk. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan usia dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023). Pada tahun 2019, rata-rata usia kawin pertama wanita berada di usia 19,6 tahun dan menurun pada tahun 2020 menjadi 18 tahun. Lalu pada tahun 2024, rata-rata tersebut meningkat menjadi usia 21,4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program penekanan jumlah penduduk menunjukkan keberhasilan dengan terus berupaya melalui pemantauan pernikahan usia muda.



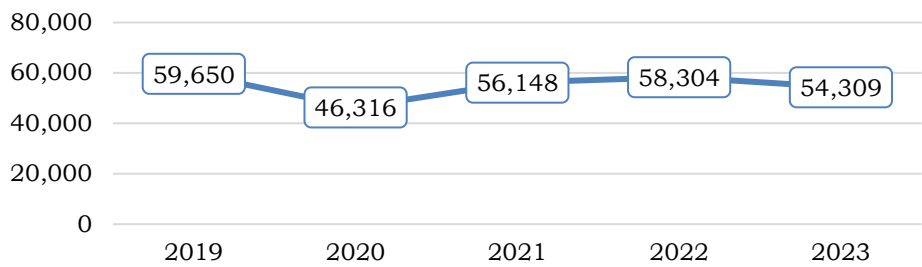
Gambar 2.222  
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

aaa. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes  
Pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (PPKB) melalui APBD dan APBDes pada tahun 2024 mencapai 0,52% di Kabupaten Tangerang. Dalam 6 tahun terakhir, persentase pembiayaan program cenderung mengalami peningkatan yang menandakan bahwa pemerintah semakin memperhatikan program-program yang terkait dengan kependudukan.



Gambar 2.223  
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Melalui APBD dan APBDes Tahun 2019-2024  
Sumber: DPPKB Kabupaten Tangerang, 2025

9) Perhubungan  
a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum  
Angkutan umum menjadi salah satu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat untuk bermobilisasi. Pengguna angkutan umum di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu meski sempat mengalami penurunan drastis pada 2020 yakni hanya mencapai 46.316 unit. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2023 di Kabupaten Tangerang mencapai 54.309 unit. Tingginya arus ini menunjukkan angkutan umum masih menjadi transportasi andalan masyarakat dalam mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari.



Gambar 2.224  
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

b. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek menjadi salah satu syarat dalam pengembangan angkutan umum. Berdasarkan informasi dari Dinas Perhubungan, selama tahun 2019 hingga 2023, jumlah izin trayek di wilayah ini stagnan di angka 1.408 izin. Jumlah izin trayek yang sama ini menunjukkan tidak adanya penambahan atau pengurangan trayek baru di wilayah Kabupaten Tangerang.

c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kir merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang. Uji kir menjadi salah satu syarat kendaraan untuk transportasi. Uji kir di Kabupaten Tangerang relatif berfluktuasi. Pada tahun 2020, jumlah uji kir mengalami penurunan hingga 46.316, namun kondisi tersebut dapat kembali meningkat menjadi 67.597 uji kir pada tahun 2024.

Tabel 2.37  
Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Jenis Angkutan Umum |               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mobil Barang        | Pick up       | 25.661 | 20.376 | 23.464 | 23.960 | 21.813 | 19.205 |
|                     | Light Truck   | 18.320 | 16.662 | 23.485 | 25.020 | 23.515 | 21.127 |
|                     | Truck         | 12.290 | 7.052  | 7.018  | 7.107  | 6.954  | 6.533  |
|                     | Tr. Head      | 0      | 161    | 187    | 16     |        |        |
|                     | Mobil Box     |        |        |        |        |        | 19.205 |
| Mobil Bus           | Bus           | 315    | 209    | 103    | 178    | 198    | 310    |
|                     | Micro Bus     | 823    | 514    | 562    | 847    | 804    | 735    |
| Mobil Penumpang     | Taxi          | 153    | 58     | 34     | 0      | 0      | 364    |
|                     | Angkutan Kota | 1.762  | 1.043  | 913    | 727    | 546    | 118    |
| Kend. Tempelan      |               | 326    | 235    | 371    | 431    | 447    |        |
| Kend. Khusus        |               | 0      | 6      | 11     | 18     | 32     |        |
| JUMLAH              |               | 59.650 | 46.316 | 56.148 | 58.304 | 54.309 | 65.957 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Sungai/Udara/Terminal Bus

Sarana transportasi memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat. Kabupaten Tangerang hanya memiliki 2 bandara yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Budiarto. Selain itu, Kabupaten Tangerang juga memiliki 2 dermaga, yaitu Dermaga Kronjo dan Derma Cituis. Sementara itu, untuk mendukung kelancaran transportasi darat, Kabupaten Tangerang yang memiliki 29 kecamatan tidak memiliki satu pun terminal. Satu-satunya terminal bus yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis sudah tidak berfungsi lagi.

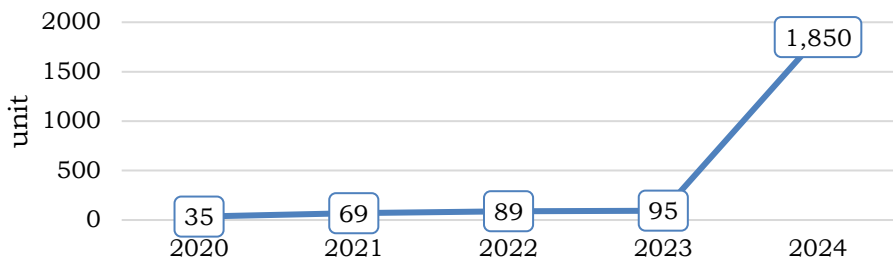
e. Layanan Angkutan Darat

Sesuai dengan jumlah izin trayek di wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah ini memiliki jumlah angkutan darat yang sama, yakni 1.408 angkutan penumpang darat. Jumlah ini stagnan dari tahun 2019-2023 menunjukkan tidak adanya penambahan angkutan darat untuk meningkatkan cakupan transportasi di wilayah ini.

f. Pemasangan Rambu-rambu

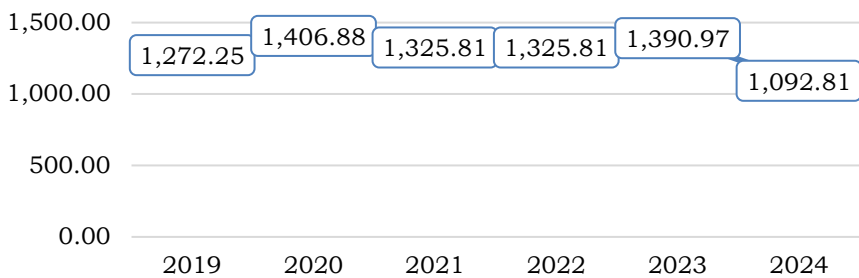
Pemasangan rambu-rambu sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan pemasangan rambu dari 35

unit menjadi 1.850 unit rambu. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan.



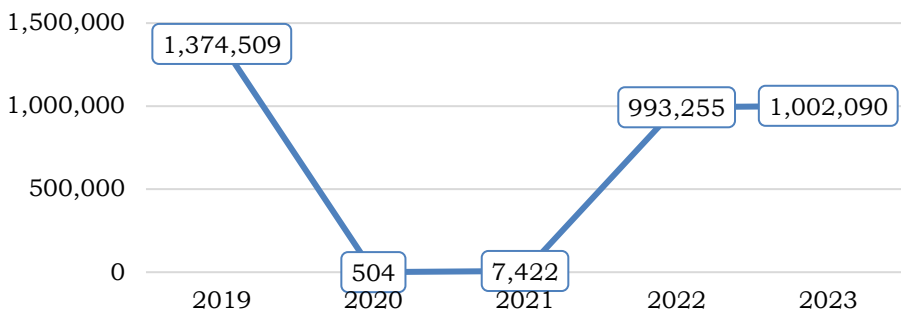
Gambar 2.225  
Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024  
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

g. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan  
Kendaraan menjadi kebutuhan penting dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta kegiatan ekonomi wilayah. Tingginya jumlah kendaraan ini juga berakibat pada penurunan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Tangerang berkisar di angka 1.200-1.400. Nilai tersebut menandakan tiap 1 km jalan melayani 1.200-1.400 kendaraan.



Gambar 2.226  
Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2025

h. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum  
Jumlah orang yang terangkut dalam angkutan umum di Kabupaten Tangerang tergolong besar yakni mencapai 1.002.090 pada tahun 2023. Angka ini sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021 yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19.



Gambar 2.227  
Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

i. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun  
Jumlah orang dan barang yang diangkut melalui Dermaga Kronjo dan Dermaga Cituis memiliki tren yang sama yakni sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020. Berdasarkan jumlahnya, Dermaga Cituis mengangkut barang dan orang yang lebih banyak daripada Dermaga Kronjo. Hal ini menunjukkan kapasitas dermaga Cituis yang lebih tinggi. Selain itu,

tingginya animo penggunaan transportasi laut ini menunjukkan eksistensi transportasi laut.

Tabel 2.38  
Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2023

| Jumlah Barang dan orang yang terangkut |             | Dermaga Kronjo | Dermaga Cituis |
|----------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 2019                                   | Barang (Kg) | 501.600        | 1.800.000      |
|                                        | Orang       | 2.012          | 14.400         |
| 2020                                   | Barang (Kg) | 1.003.200      | 3.600          |
|                                        | Orang       | 4.025          | 28.800         |
| 2021                                   | Barang (Kg) | 1.984.000      | 3.821.000      |
|                                        | Orang       | 5.660          | 15.321         |
| 2022                                   | Barang (Kg) | 714.000        | 13.333.000     |
|                                        | Orang       | 3.354          | 3.105.000      |
| 2023                                   | Barang (Kg) | 1.864.000      | 2.520.000      |
|                                        | Orang       | 5.982          | 21.600         |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 2024

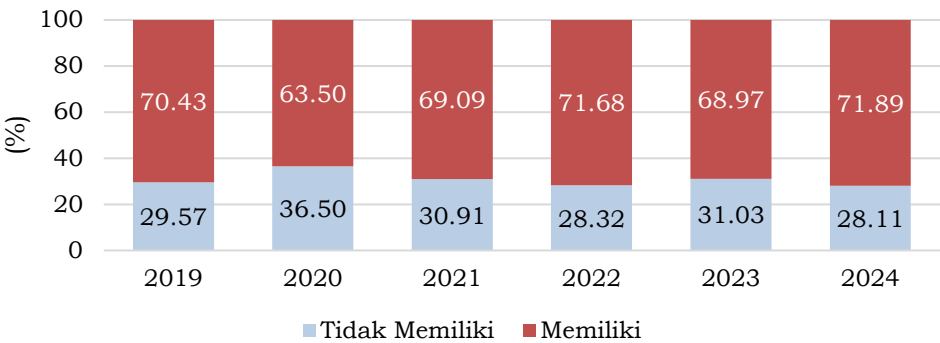
10) Komunikasi dan Informatika

a. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan Layanan telekomunikasi Kabupaten Tangerang telah dipenuhi oleh operator telepon seluler dengan cakupan 100% dan melayani 246 dari 246 desa. Hal ini menandakan bahwa daerah Kabupaten Tangerang sudah maju dan cepat dalam pertukaran informasi, baik jarak dekat maupun jarak jauh.

b. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2019-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2024, persentase penduduk yang memiliki HP/Telepon mencapai 71,89% dan yang tidak memiliki terdapat 28,11%.

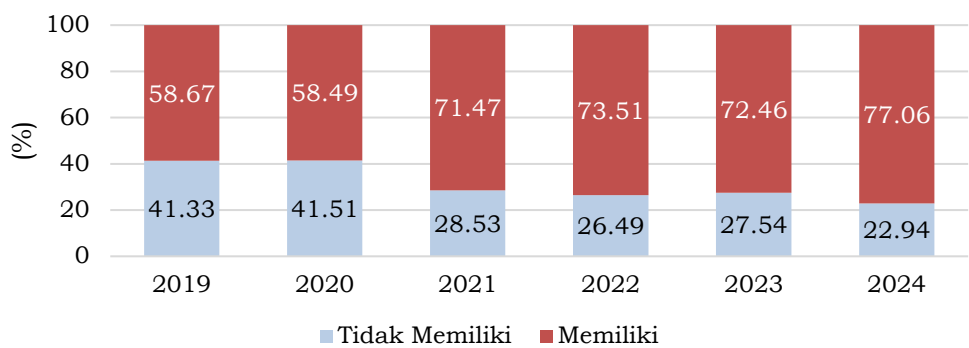


Gambar 2.228  
Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2025

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

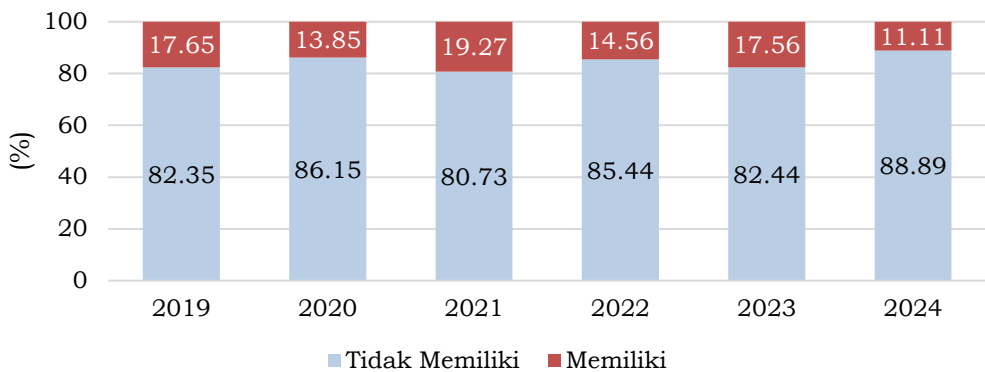
Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang dengan akses internet pada tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang mengakses internet mencapai 77,06% dan yang tidak sebesar 22,94%. Hal ini menandakan bahwa pengaruh akses internet pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang semakin besar, salah satunya pada penyebaran informasi dan telekomunikasi.





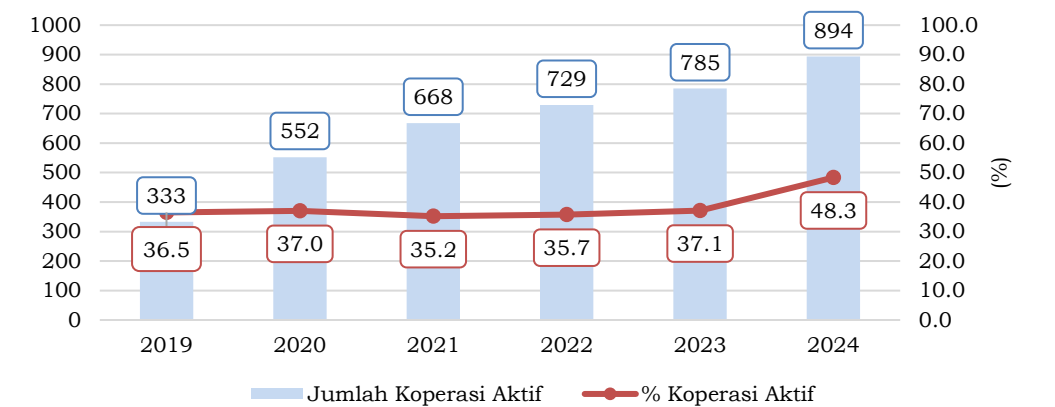
Gambar 2.229  
Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

d. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi  
Persentase rumah tangga Kabupaten Tangerang yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2019-2024 cenderung stagnan. Pada tahun 2024, persentase penduduk memiliki komputer pribadi mencapai 11,11% dan yang tidak memiliki terdapat 88,89%. Hal ini menandakan bahwa tren memiliki komputer pribadi pada kehidupan penduduk Kabupaten Tangerang tidak terjadi. Teknologi digital mengubah pola konsumsi media masyarakat dari konvensional menjadi digital. Pemanfaatan perangkat dari sistem kabel (*wire*) ke nirkabel (*wireless*) sudah banyak digunakan masyarakat.



Gambar 2.230  
Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Buku Profil Statistik Kab. Tangerang Tahun 2025

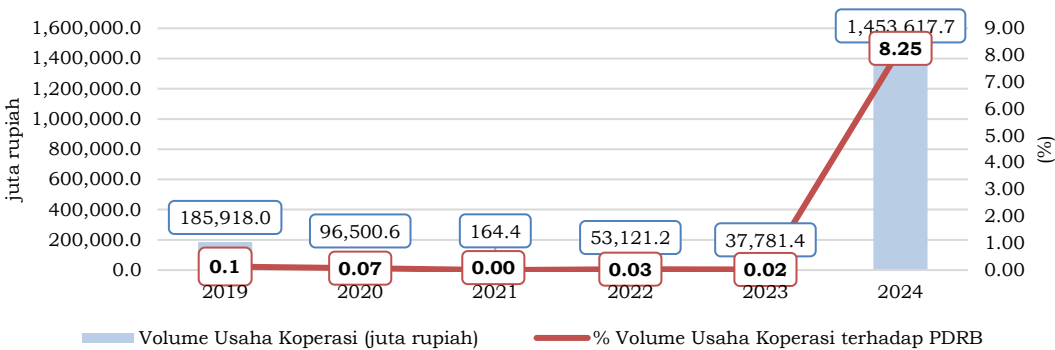
11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  
a. Persentase Koperasi Aktif  
Koperasi sebagai pemantik ekonomi masyarakat saat ini mulai tergeser dengan munculnya berbagai inovasi dalam bidang keuangan. Meskipun demikian, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tangerang relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu 2020-2024. Meskipun demikian jumlah ini cenderung rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain.



Gambar 2.231  
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025

b. Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi menunjukkan skalabilitas aktivitas usaha koperasi di Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2024, volume usaha koperasi di Kabupaten Tangerang mencapai 1,45 triliun rupiah dan capaian ini paling tinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan volume usaha koperasi melalui peningkatan akses koperasi terhadap pemodalán serta optimalisasi dan inovasi layanan koperasi.



Gambar 2.232  
Volume Usaha Koperasi Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

c. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Seiring berjalannya waktu, semakin tingginya jumlah usaha mikro dan kecil yang berkembang menyokong perekonomian masyarakat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu 2021-2023 terdapat peningkatan persentase usaha mikro dan kecil, yaitu dari 96,96 pada tahun 2021 menjadi 98,51% pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan tingginya dan pesatnya perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Tangerang.

12) Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor merupakan seseorang/sekelompok orang/perusahaan yang melakukan penanaman modal pada suatu daerah/perusahaan. Investor menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari sejumlah dana yang diberikan. Sedangkan daerah/perusahaan yang ditanamkan modal dapat mempercepat program dan pembangunan ekonominya. Pada Kabupaten Tangerang, jumlah investor dalam tahun 2019-2023 mengalami

peningkatan dengan tahun 2019 sejumlah 2.776 investor dan tahun 2023 sejumlah 15.399 investor. Peningkatan ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Tangerang akan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.39

Investor Berskala Nasional Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) |       |       |       |       |        |        |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Uraian                                       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |
| PMDN                                         | 1.140 | 2.173 | 3.223 | 4.009 | 10.863 | 17.630 |
| PMA                                          | 1.636 | 1.778 | 1.680 | 1.677 | 4.536  | 1.565  |
| Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 2.776 | 3.951 | 4.903 | 5.686 | 15.399 | 19.195 |

Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

- b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
- Semakin tinggi nilai suatu investasi atau penanaman modal yang ditanamkan oleh investor, maka semakin tinggi perputaran perekonomian dalam suatu wilayah. Perputaran ekonomi dalam suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.40

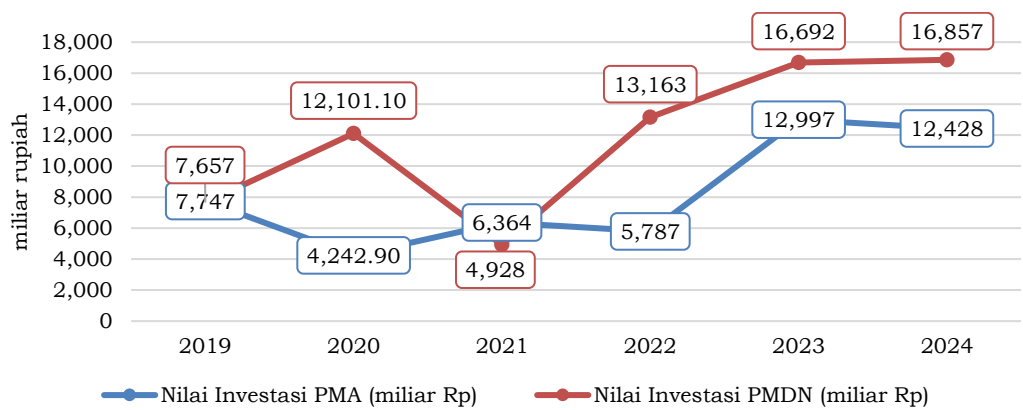
Nilai Investasi dan Jumlah Proyek PMA dan PMDN Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) |       |          |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|
| Uraian                                              | 2019  | 2020     | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
| PMA                                                 |       |          |       |        |        |        |
| Nilai Investasi (Miliar Rp)                         | 7.747 | 4.242,9  | 6.364 | 5.787  | 12.997 | 12.428 |
| Jumlah Proyek (proyek)                              | 1.636 | 1.778    | 1.680 | 1.677  | 4.536  | 1.565  |
| PMDN                                                |       |          |       |        |        |        |
| Nilai Investasi (Miliar Rp)                         | 7.657 | 12.101,1 | 4.928 | 13.163 | 16.692 | 16.857 |
| Jumlah Proyek (proyek)                              | 1.140 | 2.173    | 3.223 | 4.009  | 10.863 | 17.630 |

Sumber: Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

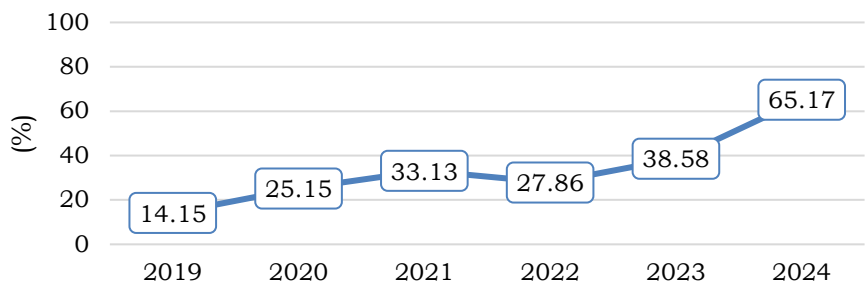
Pada tahun 2019-2024, jumlah nilai investasi berskala nasional Kabupaten Tangerang cenderung meningkat, baik dari nilai investasi maupun jumlah proyek. Dapat dilihat pada grafik di bawah, nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2019 mencapai 15.403 miliar rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 29.285 miliar rupiah, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tangerang semakin meningkat ditandai dengan semakin banyaknya investasi yang masuk. Selain itu, jika dilakukan perbandingan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi (ICOR) dalam lima tahun terakhir menunjukkan nilai ICOR Kabupaten Tangerang masih berada pada kisaran normal yaitu 3-4, yang dapat diinterpretasikan bahwa investasi digunakan secara efisien (Bappeda, 2024)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Analisis ICOR Kabupaten Tangerang dalam Dokumen Pengembangan Dan Penataan Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Tangerang Tahun 2024 (Bappeda Kabupaten Tangerang, 2024)



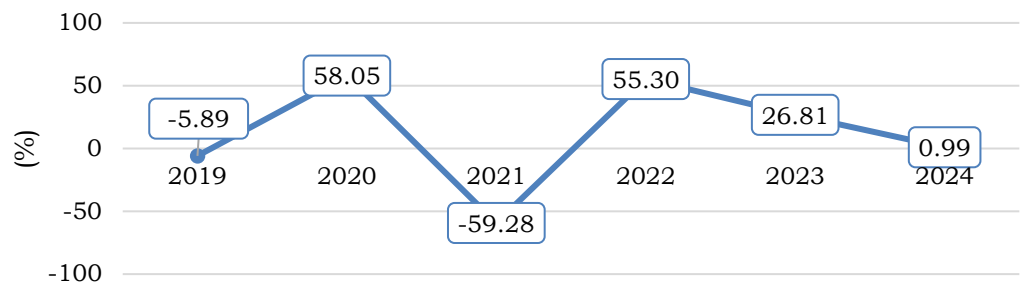
Gambar 2.233  
Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 dan Provinsi Banten dalam Angka 2023-2025

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Penanaman modal daerah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal. Rasio daya serap dapat dihitung dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dibandingkan Jumlah seluruh PMA/PMDN. Pada Kabupaten Tangerang, rasio tenaga kerja mengalami peningkatan dalam tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, rasio daya serap tenaga kerja sebesar 14,15% dan meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 65,16%. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang semakin meningkat.



Gambar 2.234  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (PMA/PMDN) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah), 2025

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)  
Kenaikan dan penurunan realisasi nilai investasi merupakan gambaran kondisi capaian investasi pada tahun evaluasi dikurangi dengan realisasi sebelum evaluasi yang dibandingkan dengan capaian realisasi sebelum evaluasi. Dapat dilihat pada grafik di bawah, Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi pada nilai realisasi PMDN. Hal ini menandakan bahwa penanaman modal dan investasi di Kabupaten Tangerang masih belum stabil.



Gambar 2.235  
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: BPS Provinsi Banten (diolah), 2025

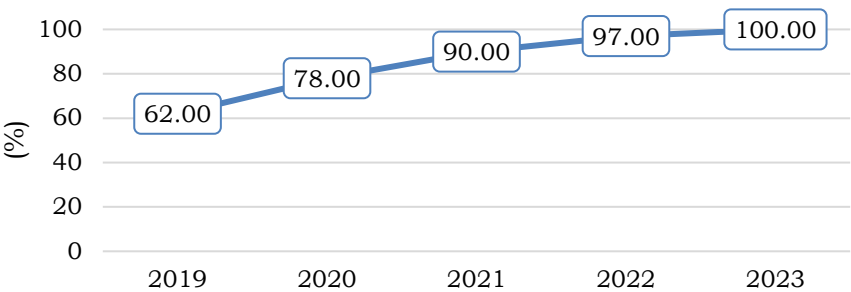
e. Lama Proses Perijinan

Sistem perijinan dan non-perijinan di Kabupaten Tangerang diatur dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Jenis perizinan dan non-perizinan diberikan berdasarkan urusan pemerintah daerah. Prosedur perizinan dan non-perizinan terdiri dari verifikasi, permohonan, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, serta pemberian keputusan. Jangka waktu pelayanan DPMPTSP ditetapkan paling lama 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non-perizinan secara lengkap dan benar. Selain itu, pemohon dapat mengajukan pengaduan melalui DPMPTSP paling lambat 30 hari kerja sejak pemohon menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sistem informasi pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis web di Kabupaten Tangerang yaitu “SIPINTER”.

13) Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

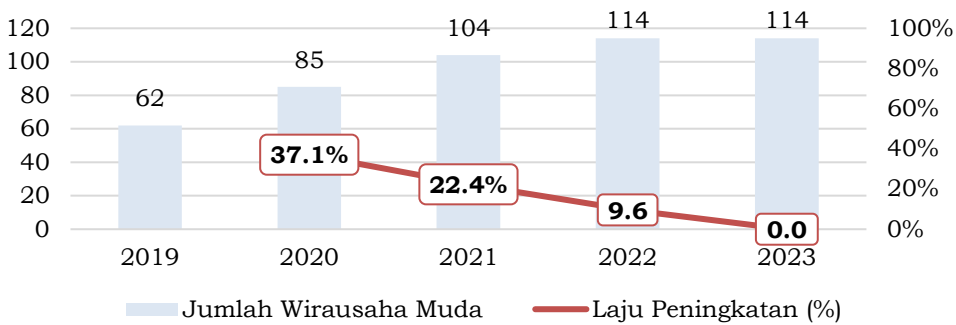
Organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang meningkat dalam kurun waktu 2019-2023 dan telah mencapai 100%. Pada tiap-tiap tahunnya, seluruh organisasi kepemudaan di Kabupaten Tangerang aktif menjalankan kegiatan masing-masing. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan kualitas pemuda di wilayah ini.



Gambar 2.236  
Jumlah Organisasi Kepemudaan Aktif Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

b. Wirausaha Muda

Wirausahawan muda di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas dan daya saing pemuda di wilayah ini. Perkembangan wirausahawan muda perlu didukung dengan adanya berbagai kegiatan pendukung.

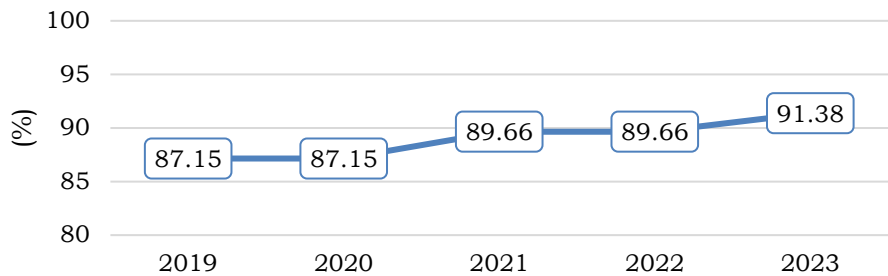


Gambar 2.237  
Jumlah Wirausahawan Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

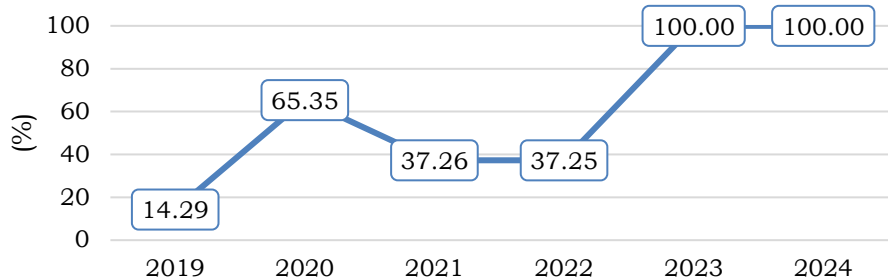
Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan dari kurun waktu 2019-2023. Peningkatan pembinaan olahraga ini menunjukkan bertambahnya jenis olahraga yang

dibina dan dikembangkan di wilayah Kabupaten Tangerang. Sayangnya jumlah ini cenderung belum optimal dan masih terdapat beberapa jenis olahraga yang belum dibina.



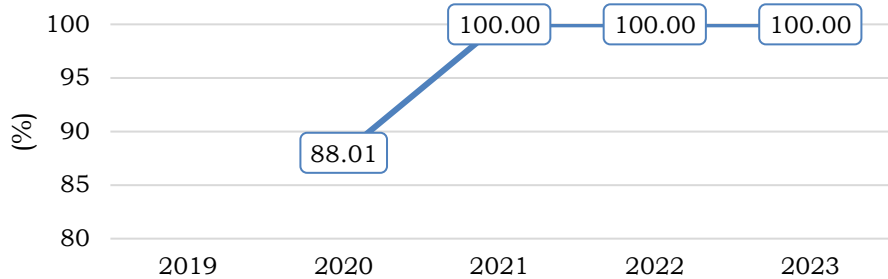
Gambar 2.238  
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi  
Sertifikasi pelatih menjadi salah satu indikator kinerja pelatih olahraga. Cakupan pelatih bersertifikasi mengalami peningkatan pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun sebelumnya cakupan pelatih bersertifikasi tergolong rendah. Di tahun 2023 dan 2024, cakupan pelatihan yang bersertifikasi telah mencapai 100%.



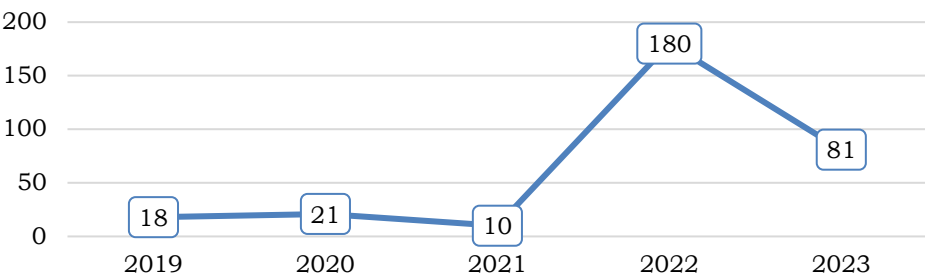
Gambar 2.239  
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Tangerang 2019-2024  
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2025

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda  
Atlet muda merupakan salah satu aset daerah yang harus dibina dan dilatih. Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Tangerang cenderung meningkat pada kurun waktu 2020-2023 dan telah mencapai 100%. Hal ini perlu dipertahankan untuk membentuk atlet yang berkualitas.



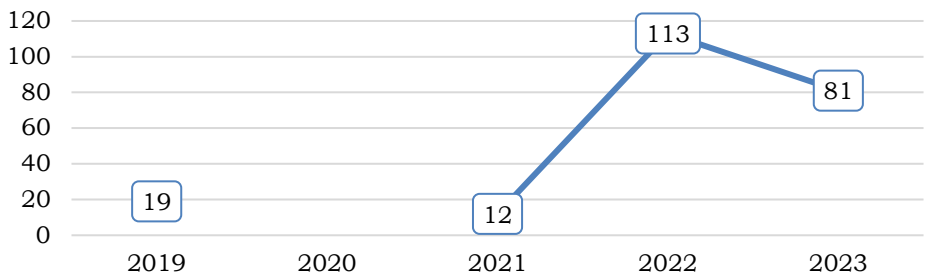
Gambar 2.240  
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Data Sektoral dan opendata.tangerangkab.go.id, 2024

f. Jumlah Atlet Berprestasi  
Atlet berprestasi merupakan atlet daerah yang mampu meraih prestasi di berbagai ajang. Tahun 2022 menjadi tahun dengan atlet berprestasi terbesar yakni terdapat 180 atlet berprestasi. Pada tahun 2023 jumlah atlet berprestasi menurun menjadi 81. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kualitas atlet dengan mempertimbangkan berbagai faktor.



Gambar 2.241  
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024*

- g. Jumlah Prestasi Olahraga
- Prestasi bidang olahraga erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan sebuah bangsa. Semakin tinggi prestasi olahraga, semakin sejahtera bangsa itu, demikian pula sebaliknya. Semakin banyak atlet berprestasi menunjukkan berhasilnya pembinaan atlet yang telah dilakukan.
- Berdasarkan data dari bidang Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang memiliki sebanyak 19 prestasi olahraga. Jumlah ini sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 12 prestasi. Seiring dengan tren jumlah atlet berprestasi, jumlah prestasi olahraga Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023.



Gambar 2.242  
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
*Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024*

- 14) Statistik
- a. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
- Sistem data dan statistik yang terintegrasi dalam Kabupaten Tangerang sudah tersedia dari tahun 2022. Sistem data ini berupa Portal Satu Data Kabupaten Tangerang yang dapat diakses melalui internet. Sistem data yang tersedia dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi dengan cepat dan tepat, baik dengan antar OPD maupun masyarakat.
- b. Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Pada tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku Kabupaten Dalam Angka yang merupakan hasil kerja sama dari BPS Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Publikasi buku ini dilakukan secara rutin untuk menyampaikan perkembangan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang.
- c. Buku “PDRB”
- PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto adalah pendataan statistik yang dapat mengetahui kondisi ekonomi dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan suatu daerah. PDRB diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tangerang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selama kurun waktu tahun 2019-2024, Kabupaten Tangerang telah mempublikasikan buku PDRB.

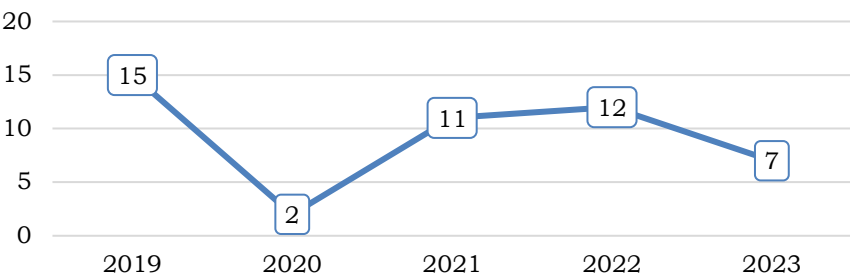


- 15) Persandian
- a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu tahun 2019-2024 belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam aktivitas komunikasi. Hal ini terjadi akibat keterbatasan sumber daya dalam penggunaan persandian.

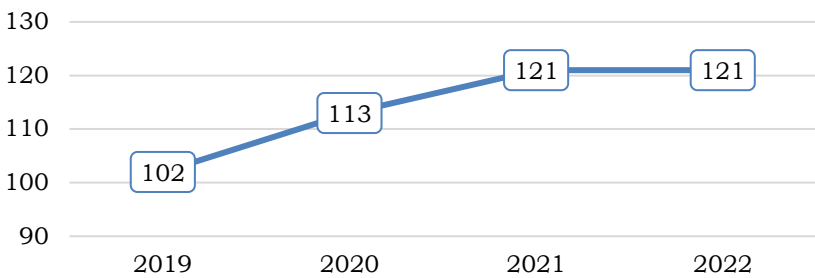
- 16) Kebudayaan
- a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi karena pandemi yang semakin menurun lima tahun terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa minat pertunjukan kebudayaan pada masyarakat Kabupaten Tangerang semakin menurun tiap tahunnya.



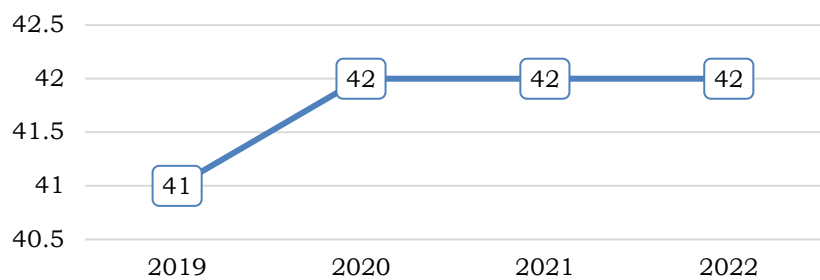
Gambar 2.243  
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

- b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
- Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada Kabupaten Tangerang mengalami sedikit peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan mulai adanya kesadaran penduduk Kabupaten Tangerang dalam menjaga warisan budaya.



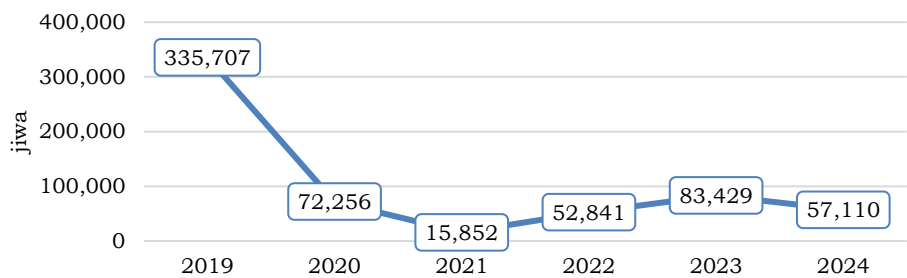
Gambar 2.244  
Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022  
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

- c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
- Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan revitalisasi dan inventarisasi pada karya budaya di wilayah. Grafik di bawah ini menunjukkan selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi masih belum banyak. Selama tiga tahun terakhir karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejumlah 42 karya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman budaya.



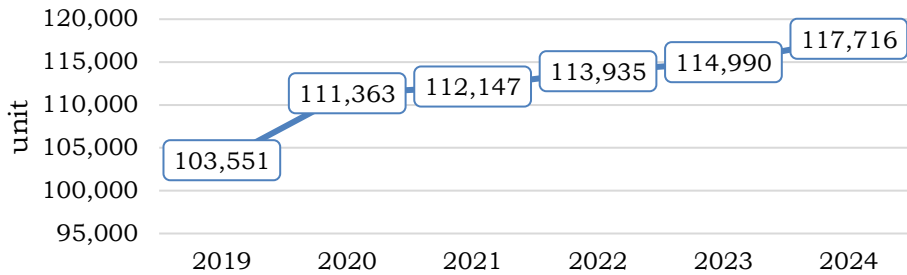
Gambar 2.245  
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022  
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

- 17) Perpustakaan
- a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
- Perpustakaan merupakan salah satu ruang publik yang bertujuan sebagai sarana pendukung kegiatan pendidikan sekarang mulai tergeser. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan pada kurun waktu 2020-2021 dan 2023-2024. Meskipun demikian pada tahun selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Peningkatan jumlah pengunjung tersebut masih jauh dari jumlah normal pada kondisi sebelum pandemi.



Gambar 2.241  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

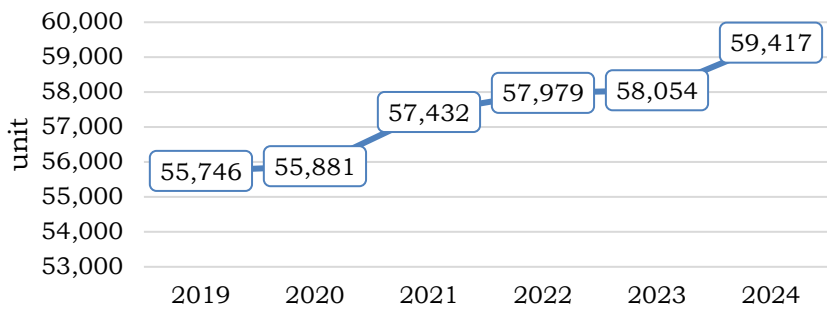
- b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
- Sebagai sumber pengetahuan, perpustakaan menyediakan berbagai sumber wawasan salah satunya adalah buku. Jumlah buku yang tersedia di Kabupaten Tangerang meningkat dari tahun 2019 ke 2024. Peningkatan jumlah buku ini merupakan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat maupun kualitas perpustakaan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.246  
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

- c. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
- Selain jumlah buku yang terus bertambah, koleksi judul buku di perpustakaan juga mengalami peningkatan. Koleksi judul buku pada tahun 2024 mencapai 59.417 judul atau jumlah terbesar pada kurun waktu 6 tahun

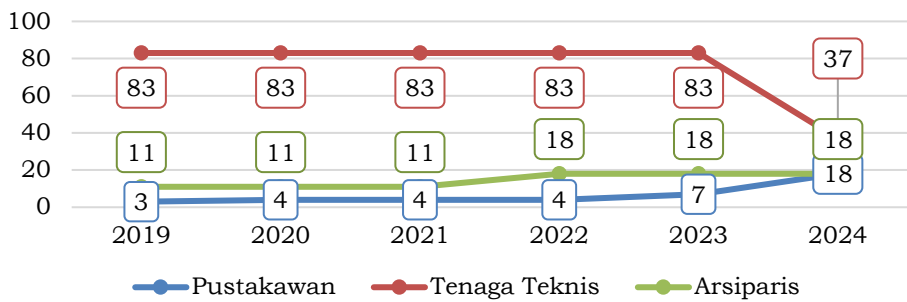
terakhir. Beragamnya judul buku di perpustakaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik di tiap perpustakaan.



Gambar 2.247  
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

d. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Tenaga yang bekerja di perpustakaan menjadi salah satu indikator kualitas perpustakaan. Selama tahun 2024 terdapat 18 orang pustakawan, dengan 37 tenaga teknis. Arsiparis di wilayah Kabupaten Tangerang juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 18 orang arsiparis yang sebelumnya hanya 7 orang.

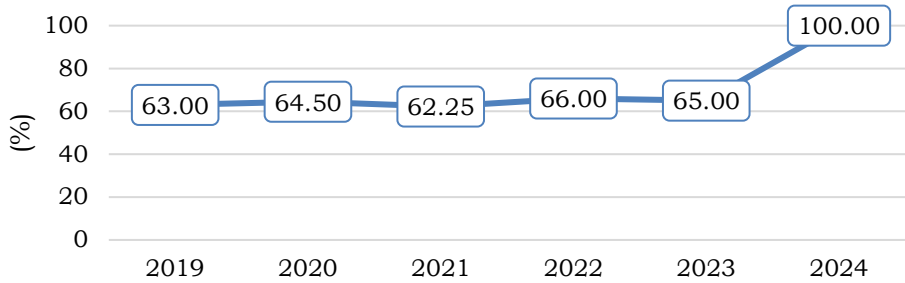


Gambar 2.248  
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Arsiparis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, 2025

18) Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Persentase perangkat daerah mengelola arsip secara baku di Kabupaten Tangerang cenderung sedikit meningkat dalam kurun waktu 2019-2024, dan telah mencapai 100% di tahun 2024. Peningkatan jumlah ini mengindikasikan bahwa beberapa perangkat daerah Kabupaten Tangerang telah mengikuti regulasi dalam mengelola kearsipan yang berlaku.



Gambar 2.249  
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Renstra Disperpusip Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

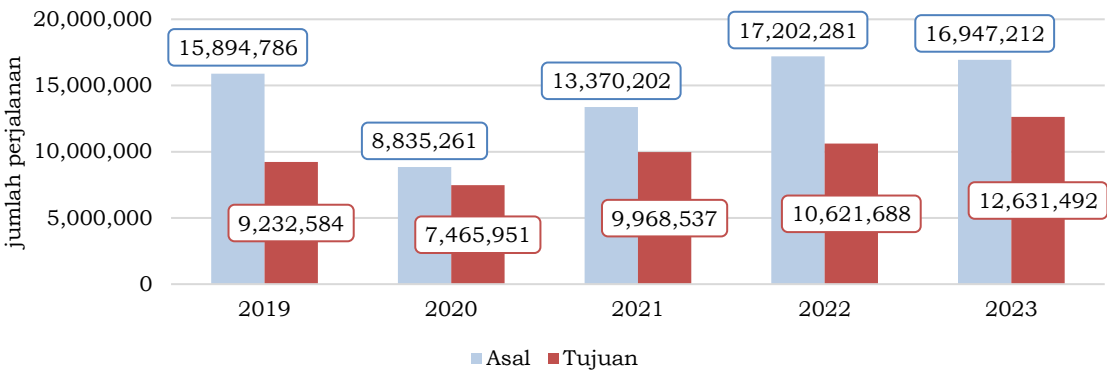
SDM dalam mengelola kearsipan bertanggung jawab untuk menata arsip data-data administrasi dan birokrasi. Dengan adanya SDM yang kompeten, kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang meningkatkan SDM pengelola kearsipan dengan mengadakan satu kegiatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang mendukung peningkatan kualitas SDM pengelolaan kearsipan.

C) Fokus Layanan Urusan Pilihan

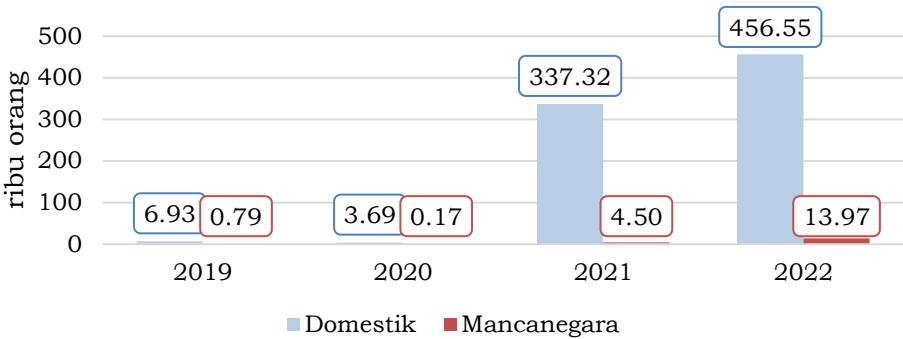
1) Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 29,58 juta perjalanan dengan 57,3% di antaranya merupakan perjalanan asal Kabupaten Tangerang. Tren menunjukkan penurunan drastis jumlah perjalanan pada pandemi (2020-2021) dan meningkat kembali hingga tahun 2023. Selain itu, tren menunjukkan jumlah perjalanan asal Kabupaten Tangerang ke luar wilayah lain lebih tinggi dibandingkan perjalanan dengan tujuan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.250  
Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Domestik) Asal dan Tujuan  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023  
Sumber: BPS Provinsi Banten, diolah (2024)



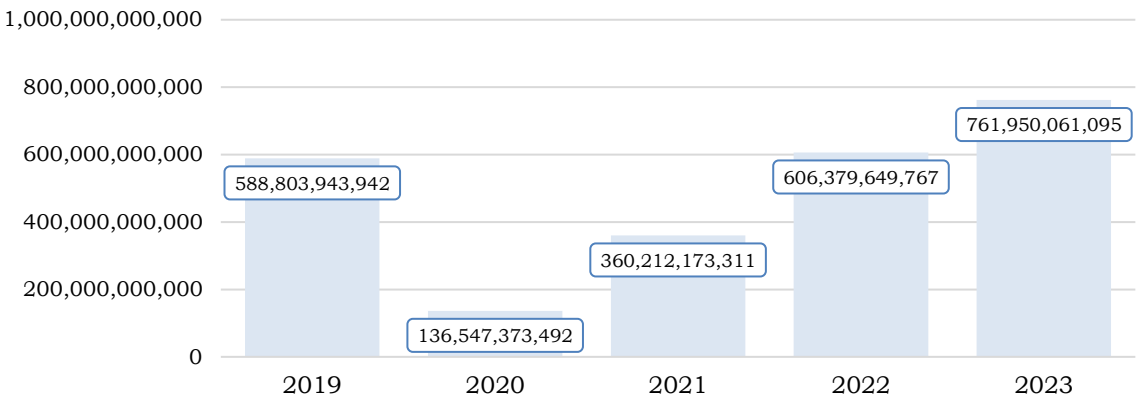
Gambar 2.251  
Jumlah Tamu (Domestik dan Mancanegara) pada Usaha Akomodasi di  
Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2022  
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Berdasarkan grafik di atas dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan jumlah tamu domestik dan mancanegara pada usaha akomodasi di Kabupaten Tangerang. Peningkatan drastis pada tahun 2021-2022 menunjukkan sektor pariwisata Kabupaten Tangerang kembali bangkit setelah pandemi. Namun, pada kurun waktu 2016-2018 jumlah tamu pada usaha akomodasi mencapai 450 – 550 ribu pengunjung. Selain itu, data dari BPS Provinsi Banten (2024) menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kabupaten Tangerang yaitu 1,67 hari. Maka dari

itu diperlukan arahan strategis dalam meningkatkan daya tarik wisata alam dan sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences*, dan *Exhibitions*) di yang diharapkan dapat meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang.

b. PAD Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang berkembang pesat dan terukur melalui PAD sektor pariwisata. PAD sektor pariwisata dihitung berdasarkan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak parkir. PAD pariwisata mengalami penurunan signifikan sebesar -46,22% pada tahun 2019-2020 karena pandemi covid. Akan tetapi dapat meningkat sebesar +28,37% pada tahun 2021-2023. Pada tahun 2023, PAD sektor pariwisata Kabupaten Tangerang sebesar Rp 761.95 miliar. Kontribusi terbesar adalah pajak restoran sebesar Rp 515,40 juta atau 67,64% dari total PAD pariwisata Kabupaten Tangerang. Hal ini menunjukkan adanya resiliensi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Tangerang.

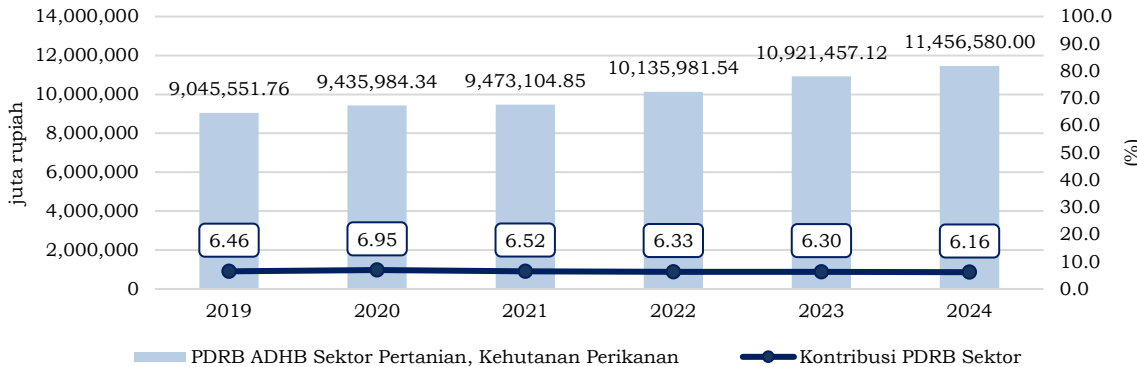


Gambar 2.252  
PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

2) Pertanian

a. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor penopang ekonomi berbagai wilayah. Sektor pertanian/perkebunan di Kabupaten Tangerang bukan menjadi penyokong ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor pertanian/perkebunan yang relatif rendah dan terus menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2024, PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11.456,58 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 6,16% terhadap total PDRB Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.253  
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2025

b. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB  
Berdasarkan data BPS Kabupaten Tangerang, kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 302.614 dan angka tersebut meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 357.704. Jumlah yang meningkat ini memberikan harapan bahwa kelompok petani dapat mendukung sektor pertanian.

c. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar  
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya merupakan nilai produksi rata-rata persatuan luas per komoditas tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada periode satu tahun. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada tahun 2019-2024. Tercatat pada tahun 2019, produktivitas mencapai 48,05 kuintal/ha dan meningkat menjadi 51,17 kuintal/ha pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan bahwa produktivitas pertanian pangan di Kabupaten Tangerang semakin meningkat dan dapat berkelanjutan mendukung kebutuhan masyarakat.

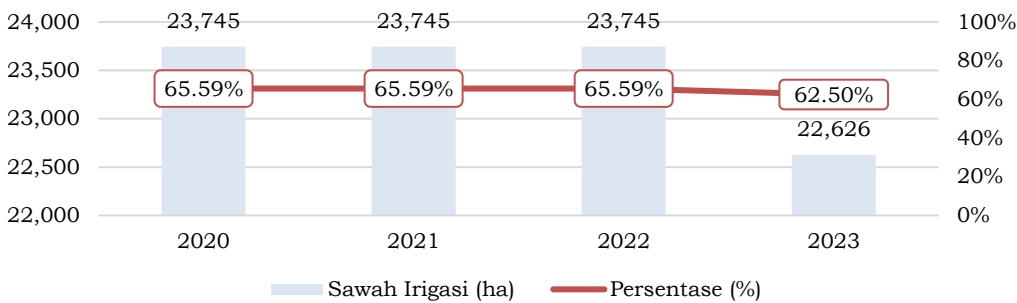
Tabel 2.41

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2019                                                                | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |
| 48,05 Ku                                                            | 48,37 Ku | 48,85 Ku | 49,24 Ku | 49,00 Ku | 51,17 Ku |

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2025

d. Cakupan Layanan Irigasi pada Lahan Pertanian  
Infrastruktur irigasi berperan penting dalam menjamin ketersediaan air dalam periode tanam di lahan pertanian untuk mendorong produktivitas hasil pertanian. Dengan adanya irigasi juga memungkinkan tanaman pertanian untuk ditanam tanpa mengikuti musim dan dengan adaptasi teknologi dalam irigasi dapat mendorong efisiensi dalam penggunaan air sehingga menekan biaya operasional. Luas dan persentase lahan pertanian dengan irigasi di Kabupaten Tangerang cenderung stagnan pada tahun 2020-2021 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 62,5%



Gambar 2.254

Luas dan Persentase Lahan Pertanian dengan Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2023

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2024

Adapun luas lahan sawah yang dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 seluas 14.094 Ha meliputi wilayah berikut:

Tabel 2.38  
Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Tangerang Tahun 2024

| No         | Kecamatan     | Luas (Ha) |
|------------|---------------|-----------|
| 1          | Balaraja      | 3,12      |
| 2          | Gunung Kaler  | 2.227,76  |
| 3          | Jambe         | 19,62     |
| 4          | Kemiri        | 1.607,04  |
| 5          | Kresiek       | 1.344,10  |
| 6          | Kronjo        | 1.899,26  |
| 7          | Legok         | 40,73     |
| 8          | Mauk          | 1.751,71  |
| 9          | Mekarbaru     | 1.634,30  |
| 10         | Pakuhaji      | 55,29     |
| 11         | Rajeg         | 1.129,15  |
| 12         | Sepatan       | 19,44     |
| 13         | Sepatan Timur | 117,11    |
| 14         | Sindang Jaya  | 73,17     |
| 15         | Sukadiri      | 1.280,73  |
| 16         | Sukamulya     | 891,47    |
| Total Luas |               | 14.094    |

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025

Sementara itu, dari data infrastruktur untuk pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi, masih terdapat daerah irigasi dengan kondisi rusak. Berikut kondisi daerah irigasi kecil di Kabupaten Tangerang tahun 2024.

Tabel 2.39  
Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2024

| No | Nama Daerah Irigasi | Keterangan           | Kondisi         | Kecamatan    | Desa                                                       |
|----|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | DI GUNUNG KALER 1   | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Gunung Kaler | Cibetok, Tamiang,                                          |
| 2  | DI GUNUNG KALER 2   | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Gunung Kaler | Sidoko, Cipaeh, Kedung, Ranca Gede, Tamiang                |
| 3  | DI GUNUNG KALER 3   | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Gunung Kaler | Kedung, Gunung Kaler, Onyam, Kandawati                     |
| 4  | DI KRONJO 1         | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Kronjo       | Bakung, Pasir, Cirumpak, Rancailat, Blukbuk                |
| 5  | DI KRONJO 2         | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Kronjo       | Blukbuk, Pagenjahan, Pagedangan Udik, Bakung               |
| 6  | DI KRONJO 3         | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Kronjo       | Kronjo, Klutuk, Pasilian, Pagenjahan                       |
| 7  | DI MAUK 1           | Terbangun Tahun 2020 | Rusak Sedang    | Mauk         | Jati Waringin, Kedung Dalam, Lembang Sari, Gunung Sari     |
| 8  | DI MAUK 2           | Terbangun Tahun 2021 | Rusak Sedang    | Mauk         | Margamulya, Tegalkunir Lor, Tegalkunir Kidul, Jatiwaringin |
| 9  | DI MEKARBARU 1      | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Mekarbaru    | Kedaung, Cijeruk, Jenggot                                  |
| 10 | DI MEKARBARU 2      | Terbangun Tahun 2022 | Rusak Sedang    | Mekarbaru    | Jenggot, Mekarbaru, Waliwis, Kosambi Dalam, Gandaria       |
| 11 | DI RAJEG 1          | Terbangun Tahun 2021 | Tidak Berfungsi | Rajeg        | Lembang Sari, Ranca Bango, Rajeg, Pangarengan              |
| 12 | DI RAJEG 2          | Terbangun Tahun 2021 | Tidak Berfungsi | Rajeg        | Pangarengan, Daon, Jambu Karya, Sukamanah, Sukatani        |
| 13 | DI SUKADIRI 1       | Terbangun Tahun 2021 | Rusak Sedang    | Sukadiri     | Pekayon, Buaran Jati, Gintung, Kosambi                     |



| No | Nama Daerah Irigasi | Keterangan           | Kondisi         | Kecamatan | Desa                                                         |
|----|---------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 14 | DI SUKADIRI 2       | Terbangun Tahun 2021 | Rusak Sedang    | Sukadiri  | Gintung, Sukadiri, Buaran Mangga, Rawa Kidang, Mekar Kondang |
| 15 | DI KEMIRI 1         | Konstruksi 2024      | Baik            | Kemiri    | Lontar, Karanganyar, Patramanggala                           |
| 16 | DI KEMIRI 2         | Konstruksi 2024      | Baik            | Kemiri    | Kemiri, Ranca Labuh, Klebet                                  |
| 17 | DI KEMIRI 3         | Konstruksi 2024      | Baik            | Kemiri    | Klebet, Karanganyar, Patramanggala                           |
| 18 | DI KRESEK 1         | Konstruksi 2024      | Baik            | Kresek    | Jengkol, Rengat, Patrasana, Koper, Pasir Ampo                |
| 19 | DI SUKAMULYA 2      | Konstruksi 2024      | Belum Terbangun | Sukamulya | Buni Ayu, Benda, Bunar, Merak                                |
| 20 | DI SUKAMULYA 1      | Konstruksi 2024      | Baik            | Sukamulya | Benda, Kali Asin, Merak, Perahu, Sukamulya, Kubang           |
| 21 | DI KRESEK 2         | DED 2024             | Belum Terbangun | Kresek    | Rancailat, Kemuning, Jengkol, Blukbuk                        |
| 22 | DI KRESEK 3         | DED 2024             | Belum Terbangun | Kresek    | Jengkol, Talok, Rengat                                       |

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025

Berdasarkan kondisi tersebut, telah diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan pada jaringan irigasi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) sebagai berikut.

Tabel 2.40  
Usulan Penanganan pada Jaringan Irigasi Kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2) Kementerian Pekerjaan Umum

| No | Nama Saluran                        | Panjang (Km) | Kewenangan | Usulan Penanganan                                                   | Kondisi      |
|----|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Saluran Induk Cisadane Barat        | 23,319       | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 2  | Saluran Induk Cisadane Barat Laut   | 13,829       | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 3  | Saluran Induk Cisadane Utara        | 12,059       | BBWS C2    | Normalisasi Saluran, Perbaikan Tanggul Saluran                      | Rusak Berat  |
| 4  | Saluran Induk Garukgak              | 1,553        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 5  | Saluran Sekunder Banyawakan         | 3,658        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 6  | Saluran Sekunder Belimbing          | 8,454        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 7  | Saluran Sekunder Bugel              | 3,701        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 8  | Saluran Sekunder Karang Serang Laut | 6,913        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 9  | Saluran Sekunder Kedaung            | 14,682       | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 10 | Saluran Sekunder Kendal             | 2,058        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 11 | Saluran Sekunder Kepuh              | 4,628        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 12 | Saluran Sekunder Keramat            | 1,989        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 13 | Saluran Sekunder Mauk               | 7,627        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran, Perbaikan Tanggul Saluran, Perbaikan Pintu Air | Rusak Berat  |
| 14 | Saluran Sekunder Nibung             | 4,491        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 15 | Saluran Sekunder Pabuaran           | 3,908        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |
| 16 | Saluran Sekunder Pagedangan         | 8,023        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran                                                 | Rusak Sedang |

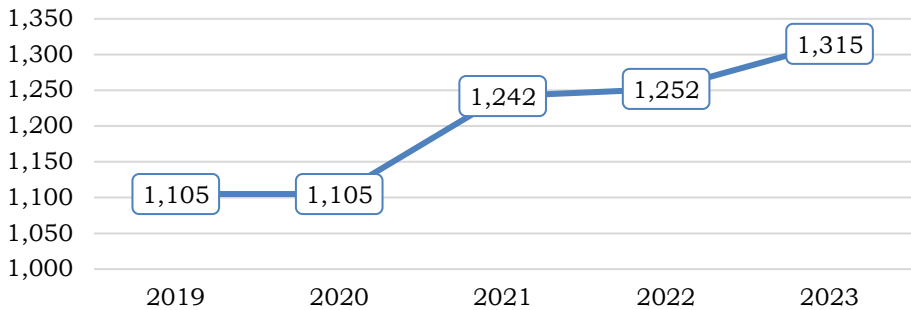
| No | Nama Saluran                    | Panjang (Km) | Kewenangan | Usulan Penanganan   | Kondisi      |
|----|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
| 17 | Saluran Sekunder Pekayon        | 1,261        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 18 | Saluran Sekunder Pisangan       | 8,876        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 19 | Saluran Sekunder Plawad         | 1,128        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 20 | Saluran Sekunder Rawa Kalem     | 1,481        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 21 | Saluran Sekunder Rawa Kidang    | 5,730        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 22 | Saluran Sekunder Sukadiri       | 1,128        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 23 | Saluran Sekunder Sumur Daon     | 3,689        | BBWS C2    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 24 | Saluran Induk Cidurian          | 27,387       | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 25 | Saluran Sekuder Semut           | 1,441        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 26 | Saluran Sekunder Bakung         | 1,354        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 27 | Saluran Sekunder Benda          | 2,572        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 28 | Saluran Sekunder Cayur          | 1,307        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 29 | Saluran Sekunder Cayur Ajeg     | 1,889        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 30 | Saluran Sekunder Cinamprak      | 0,968        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 31 | Saluran Sekunder Gabus          | 1,988        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 32 | Saluran Sekunder Garukgak       | 9,352        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 33 | Saluran Sekunder Glebeg         | 3,198        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 34 | Saluran Sekunder Karang Getak   | 0,879        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 35 | Saluran Sekunder Ketapang Barat | 0,621        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 36 | Saluran Sekunder Ketapang Timur | 0,962        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 37 | Saluran Sekunder Klutuk         | 1,028        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 38 | Saluran Sekunder Koper          | 7,515        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 39 | Saluran Sekunder Kosambi Dalam  | 2,390        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 40 | Saluran Sekunder Kramat         | 5,248        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 41 | Saluran Sekunder Kubang         | 1,924        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 42 | Saluran Sekunder Kwaron         | 3,242        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 43 | Saluran Sekunder Leweung Gede   | 13,608       | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 44 | Saluran Sekunder Malang Nengah  | 6,658        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 45 | Saluran Sekunder Merak          | 7,979        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 46 | Saluran Sekunder Pasir          | 2,912        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 47 | Saluran Sekunder Patrasana      | 10,071       | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 48 | Saluran Sekunder Putat          | 2,502        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 49 | Saluran Sekunder Ranca Bango    | 1,203        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 50 | Saluran Sekunder Rarangan       | 1,954        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |

| No | Nama Saluran                | Panjang (Km) | Kewenangan | Usulan Penanganan   | Kondisi      |
|----|-----------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
| 51 | Saluran Sekunder Ringleding | 7,984        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 52 | Saluran Sekunder Saga       | 3,885        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 53 | Saluran Sekunder Sarakan    | 0,951        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |
| 54 | Saluran Sekunder Talok      | 2,549        | BBWS C3    | Normalisasi Saluran | Rusak Sedang |

Sumber: Bappeda Kabupaten Tangerang, 2025

e. Cakupan Bina Kelompok Petani

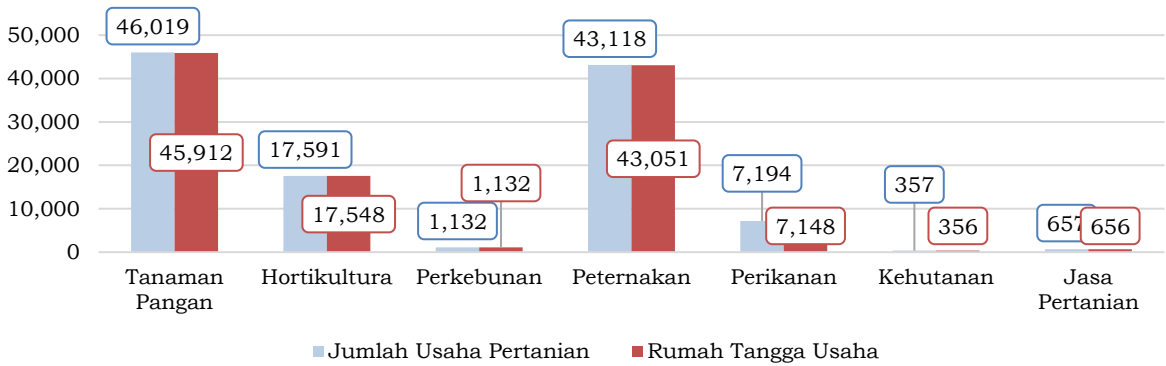
Kelompok Petani merupakan perkumpulan yang dikembangkan dari dan untuk petani dengan tujuan untuk memperkuat kepentingan petani. Cakupan bina kelompok tani pada Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dalam kurun tahun 2019-2023. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak jenis kelompok tani yang terbina maka semakin meningkat kesejahteraan petani di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.255  
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang, 2024

f. Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian

Berdasarkan Sensus Pertanian BPS (2024), Jumlah Usaha Pertanian adalah banyaknya unit usaha pertanian yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum, dan Usaha Pertanian Lainnya. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang memelihara / menguasai / melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ ditukar.

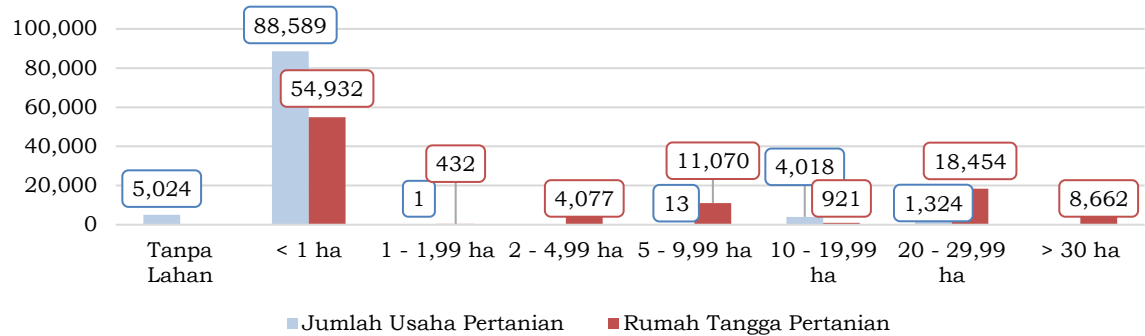


Gambar 2.256  
Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Subsektor di Kabupaten Tangerang Tahun 2023  
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Pada tahun 2023, Jumlah Unit Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang mencapai 99.008 unit usaha, 99,93% (98.936 unit) di antaranya merupakan Usaha Pertanian Perorangan. Jumlah unit usaha pertanian perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Sindang Jaya yaitu 8,89%

(8.798 unit) dari keseluruhan di Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kabupaten Tangerang sebesar 98.548 rumah tangga. Subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan merupakan sub sektor yang paling dominan dan/atau terbanyak dibandingkan sub sektor lainnya.

g. Penguasaan Lahan Pertanian  
Penguasaan lahan pertanian berpengaruh kepada kesejahteraan petani. Pentingnya penguasaan lahan bagi petani adalah pengaruhnya pada sistem bagi hasil, hak untuk berusaha petani, sumber daya lahan yang terbatas, dan tingkat pendapatan petani. Dampak lebih jauh jika penguasaan lahan petani yang sangat rendah berpengaruh pada kemiskinan struktural di suatu wilayah (Halim & Faisal, 2022)<sup>4</sup>.

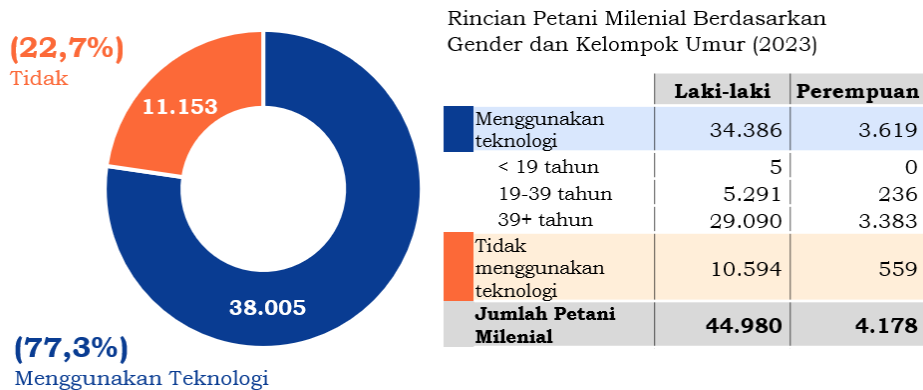


Gambar 2.257  
Jumlah Usaha Pertanian dan Rumah Tangga Pertanian Menurut Menurut Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang Tahun 2023  
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Pada tahun 2023, jumlah petani gurem di Kabupaten Tangerang yaitu 78.464 atau 85,25% dari keseluruhan petani pengguna lahan pertanian. Berdasarkan grafik di atas, penguasaan lahan pertanian didominasi oleh lahan < 1 ha dengan jumlah usaha pertanian sebesar 94,59% dan rumah tangga pertanian sebesar 55,74%. Berdasarkan sub sektor pertanian, sub sektor dengan jumlah dan persentase petani gurem terbesar adalah sub sektor peternakan yaitu sebesar 40.619 petani atau 94,8% dari keseluruhan petani pengguna lahan sub sektor peternakan. Selain itu, persentase petani gurem terbesar di sektor hortikultura (93,4%) dan perkebunan (87,2%).

h. Petani Milenial dan *Urban Farming*  
Petani milenial merupakan penduduk berumur 19-39 tahun yang melakukan usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, dan/atau melakukan usaha pertanian menggunakan teknologi digital dan/atau alat mesin pertanian (alsintan) modern.

<sup>4</sup> Halim, A., & Faisal, M. (2022). Analisis hubungan penguasaan lahan dan pola bagi hasil dengan tingkat kemiskinan petani penggarap. *Pallangga Praja*, 4(1), 11-22.



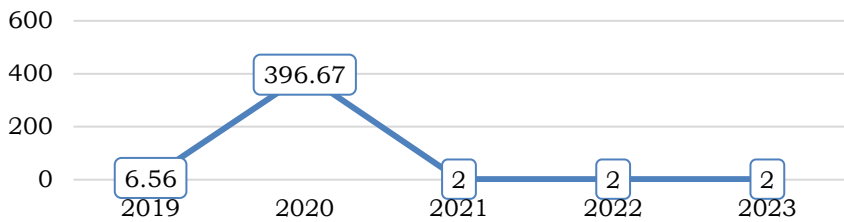
Gambar 2.258  
Jumlah Petani Milenial di Kabupaten Tangerang Tahun 2023  
Sumber: Sensus Pertanian 2023 BPS Kabupaten Tangerang (2024)

Berdasarkan diagram di atas, petani milenial di Kabupaten Tangerang tahun 2023 sebesar 49.158 petani dan 77,3% di antaranya menggunakan teknologi digital dan alat pertanian modern. Dukungan penyediaan dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur pertanian diperlukan untuk mendorong produktivitas pertanian dan regenerasi petani/

*Urban Farming* adalah kegiatan mengusahakan pertanian di lahan yang terbatas, sebagian besar menggunakan media tanam, tidak di permukaan lahan secara langsung atau menggunakan pot dan sejenisnya, serta menggunakan teknologi seperti hidroponik, aquaponik, vertikulture, media terpal, dan sejenisnya. Berdasarkan data dari Sensus Pertanian BPS Kabupaten Tangerang (2023), terdapat 118 Usaha Pertanian Perorangan dan 117 Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan *Urban Farming*. Kecamatan Cikupa merupakan kecamatan dengan jumlah UPP dan RTUP terbanyak (40,7% dari total usaha *Urban Farming*).

- 3) Kehutanan
- a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Hutan dan lahan kritis yang terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dilakukan proses rehabilitasi untuk mengembalikan ke fungsi awal. Rehabilitasi paling banyak dilakukan pada tahun 2020 yakni mencapai 396,67 Ha. Sedangkan pada tahun lain dalam kurun waktu 2019-2023, jumlah rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya dilakukan pada lahan seluas 2 Ha.



Gambar 2.259  
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka, 2024

- 4) Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik Kabupaten Tangerang telah mencapai 100% pada kurun waktu 2019-2022. Persentase ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu listrik PLN, listrik Non PLN dan bukan listrik. Pada tahun 2023, persentase listrik PLN mencapai 99,76%, listrik non PLN mencapai 0,02% dan bukan listrik 0,22%. Di tahun 2024, persentase rumah tangga pengguna listrik PLN telah mencapai 100%. Persentase ini

mengindikasikan bahwa energi listrik yang dibutuhkan masyarakat sudah bisa ditanggung oleh PLN.

Tabel 2.41

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

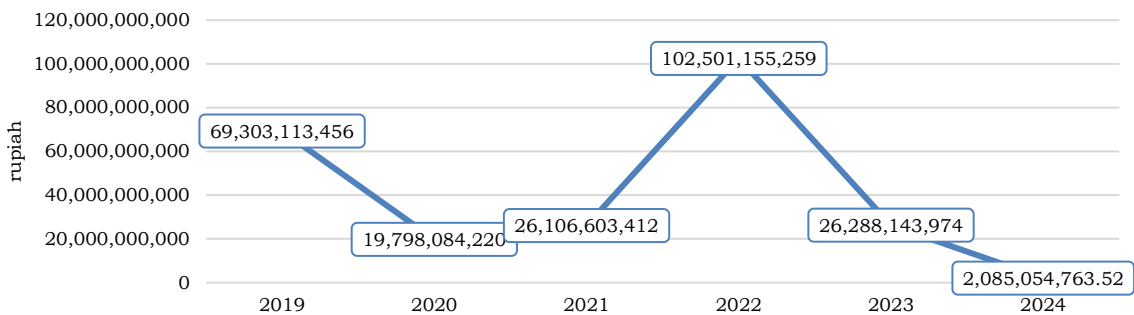
| Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik |        |        |        |        |        |      |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Jenis Listrik                            | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |
| Listrik PLN                              | 99,84% | 99,23% | 99,96% | 99,94% | 99,76% | 100% |
| Listrik Non-PLN                          | 0,16%  | 0,77%  | 0,04%  | 0,06%  | 0,02%  | 0    |
| Bukan Listrik                            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,22%  | 0    |

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

5) Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih adalah nilai total barang dan jasa ekspor suatu wilayah dikurangi nilai semua barang dan jasa yang diimpor. Nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2019-2024. Nilai ekspor bersih Kabupaten Tangerang cenderung tinggi yang menunjukkan kuatnya nilai ekspor dan perkembangan perdagangan wilayah Kabupaten Tangerang.



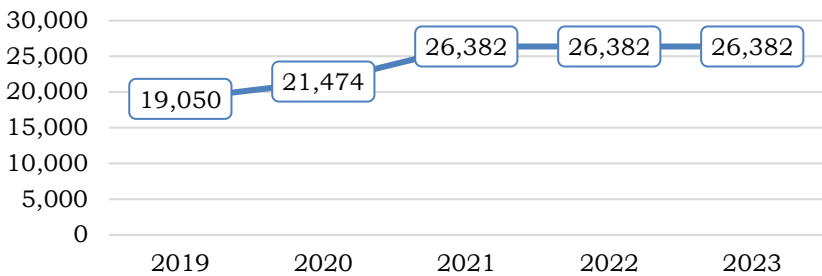
Gambar 2.260

Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2025

b. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang/usaha informal. Pada 2019-2021, cakupan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan Namun, pada tahun selanjutnya cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sama dengan jumlah 26.382 kelompok. Jumlah ini tergolong tinggi yang mengindikasikan cakupan pembinaan dan upaya pengembangan perdagangan yang semakin meningkat dan merata.



Gambar 2.261

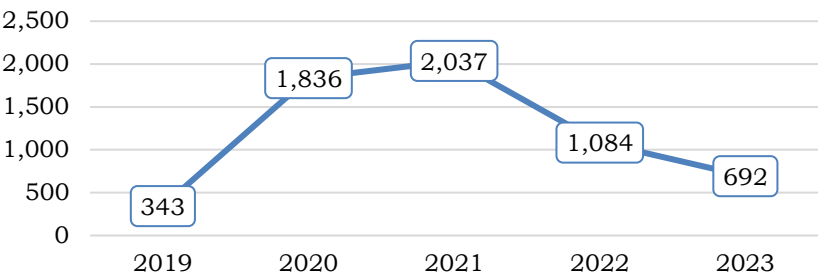
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024



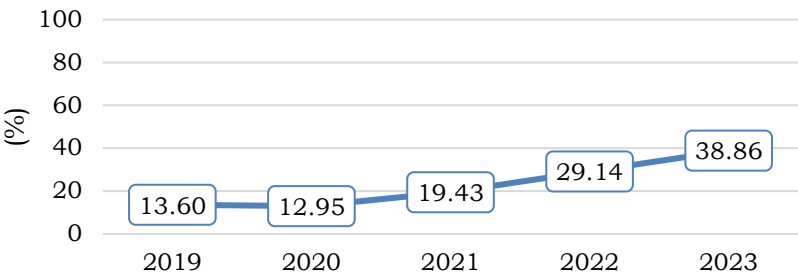
- 6) Perindustrian
  - a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Kabupaten Tangerang memiliki cakupan bina kelompok pengrajin yang berfluktuatif. Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2016 mencapai 343 perajin. Angka ini meningkat pesat ketika pandemi pada tahun 2020 menjadi 1.836 pengrajin dan 2.037 pengrajin pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2022, cakupan tersebut menurun menjadi 1.084 pengrajin dan 692 pengrajin pada tahun 2023. Fluktuasi ini menandakan bahwa program untuk mendukung pengrajin Kabupaten Tangerang masih belum optimal.



Gambar 2.262  
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

- b. Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor
- Pelaku usaha Industri Kecil-Menengah (IKM) yang memiliki kapasitas untuk ekspor menunjukkan daya saing dan inovasi produk di pasar internasional. Dalam lima tahun terakhir, beberapa IKM binaan pemerintah melakukan ekspor ke berbagai negara hingga Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Pada tahun 2021, 42 produk UMKM mengikuti *World Expo* Dubai 2021 serta 21 UMKM/IKM diikutsertakan dalam *Indonesia Trade Promotion Center* di Korea Selatan. Pada tahun 2023, ribuan produk makanan IKM di ekspor ke Taiwan. Pada awal tahun 2024, IKM binaan melakukan ekspor produk sepatu *dox* (4.044 pasang sepatu) ke Senegal.



Gambar 2.263  
Persentase Pelaku IKM yang Berpeluang Ekspor di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan grafik di atas, tren dalam lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan peningkatan pelaku IKM yang berpotensi ekspor. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk mengakselerasi kapasitas pelaku IKM untuk mengakses pasar ekspor melalui kemitraan inovasi produk, permodalan, manajemen bisnis usaha, promosi, dan lain sebagainya.

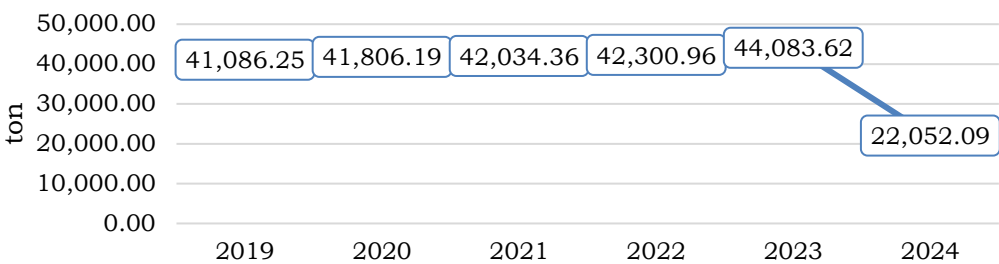
- 7) Transmigrasi
  - c. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi swakarsa merupakan pemberangkatan transmigrasi atas biaya sendiri di Kabupaten Tangerang tidak ada transmigrasi swakarsa, adapun Dinas Tenaga Kerja melakukan transmigrasi swakarya yaitu seleksi terhadap calon transmigran yang dibiayai oleh APBD.



8) Kelautan dan Perikanan  
a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan seluruh hasil kegiatan yang didapatkan dan diolah dari penangkapan dan budidaya ikan/binatang air yang dilakukan pada air tawar dan air laut. Jumlah produksi perikanan didapatkan dari perorangan maupun usaha perikanan. Produksi perikanan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, produksi perikanan mencapai 41.068,25 ton dan pada tahun 2024 mencapai 22.052,09 ton.



Gambar 2.264  
Produksi Perikanan (Ton) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Data Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2025

Kabupaten Tangerang memiliki produksi perikanan yang terbagi menjadi dua, yaitu penangkapan dan budidaya. Pada produksi perikanan penangkapan, sumber yang memiliki kontribusi tinggi yaitu perikanan tangkap di laut dengan jumlah tertinggi pada tahun 2024 yaitu 21,962.18 ton. Sedangkan pada jenis perikanan budidaya, sumber yang memiliki kontribusi tertinggi di Kabupaten Tangerang yaitu Tambak yang mencapai angka tertinggi 10,942 ton pada tahun 2024.

Tabel 2.42  
Proporsi Produksi Perikanan (Ton) Berdasarkan Jenis Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2024

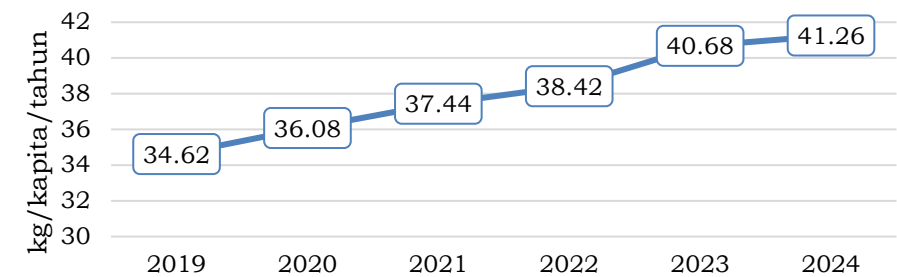
| Produksi Perikanan         |                |           |           |           |           |           |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jenis Perikanan            | Produksi (Ton) |           |           |           |           |           |
|                            | 2019           | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| Penangkapan                | 20.798,49      | 21.023,71 | 21.063,25 | 21.148,45 | 21.920,57 | 22,052.09 |
| Perikanan Tangkap di Laut  | 20.590,52      | 20.814,30 | 20.942,33 | 21.059,60 | 21.831,19 | 21,962.18 |
| Perikanan Perairan Daratan | 207,97         | 209,41    | 120,92    | 88,85     | 89,38     | 89.92     |
| Rawa/Swamp                 | 104,29         | 11,08     | 24,74     | 24,88     | 25,03     | 19.78     |
| Waduk/Situ/Danau           | 103,68         | 15,99     | 35,34     | 35,54     | 35,75     | 35.97     |
| Sungai                     | 0              | 182,34    | 60,84     | 28,43     | 28,6      | 34.17     |
| Budidaya                   | 20.287,80      | 20.705,65 | 20.907,51 | 21.088,55 | 22.073,67 | 20,604    |
| Tambak                     | 12.137,70      | 11.625    | 11.896    | 11.992    | 12.569,12 | 10,942    |
| Kolam Air Tenang           | 7.536,70       | 8.479,65  | 8.411,33  | 8.495,00  | 8.881,76  | 9.030,17  |
| Sawah                      | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Jaring Apung Tawar         | 613,4          | 601       | 600,18    | 601,55    | 622,79    | 632.43    |
| Budidaya Laut              | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| Total                      | 41.086,25      | 41.806,19 | 42.034,36 | 42.300,96 | 44.083,62 | 42.656,09 |

Sumber: Data Statistik Sektorial Kabupaten Tangerang, 2023 dan 2025; Analisis Penyusun

b. Konsumsi Ikan

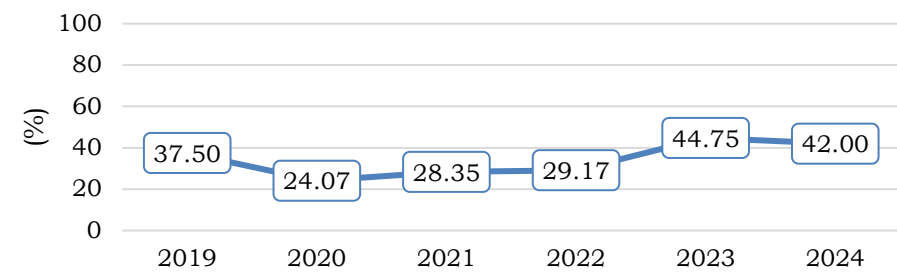
Konsumsi ikan didapatkan dari jumlah konsumsi ikan rumah tangga ditambahkan dengan konsumsi di luar rumah tangga dan konsumsi ikan tidak tercatat selama setahun per kapita. Pada lima tahun terakhir, konsumsi ikan Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 mencapai angka 41,26 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini dapat

berimplikasi bahwa ikan menjadi makanan yang semakin digemari oleh masyarakat.



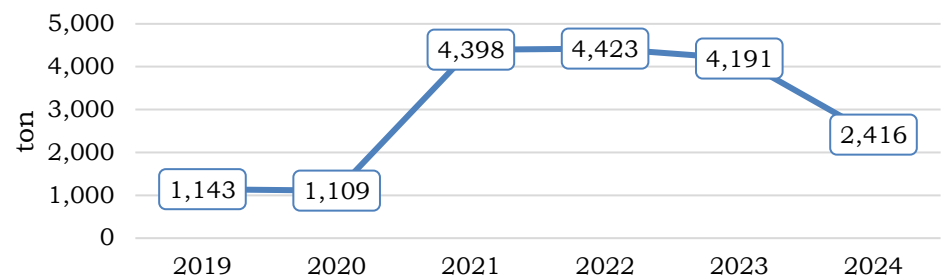
Gambar 2.265  
Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Data Sektoral dan [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id), 2025

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan  
Cakupan bina kelompok nelayan pada Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dalam kurun 2019-2023. Hal ini dapat berimplikasi bahwa upaya pembinaan yang dilakukan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, angka tersebut meningkat drastis hingga 44,75% yang menandakan bahwa upaya kesejahteraan nelayan juga sangat meningkat. Selain itu, pada tahun 2023-2024 hanya ada 1 nelayan (dari 4270 nelayan) yang mendapatkan bantuan permodalan. Di tahun 2024, capaian kembali menurun menjadi 42%. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan melalui pengadaan sarana-prasarana serta pendanaan dalam rangka mengakselerasi produktivitas perikanan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.266  
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: *Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2025*

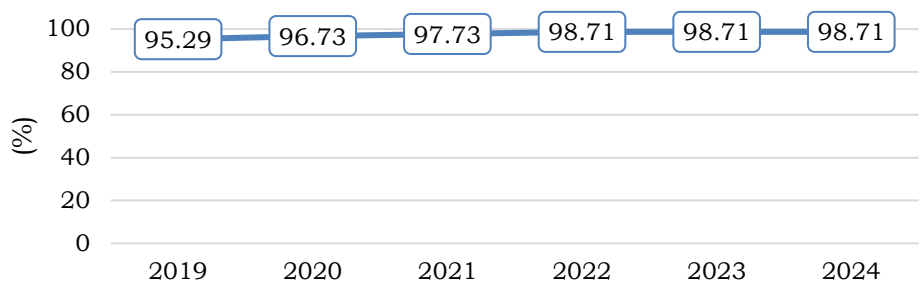
d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan  
Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan jumlah produksi ikan/binatang air yang dihasilkan oleh kelompok nelayan dalam kurun waktu tertentu. Di Kabupaten Tangerang, terdapat lonjakan yang tinggi dari tahun 2020 yang hanya 1.109 ton menjadi 4.398 ton pada tahun 2021. Peningkatan ini berimplikasi bahwa kebutuhan perikanan Kabupaten Tangerang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, meskipun capaian tersebut mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 2.416 ton.



Gambar 2.267  
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: *Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2025*

e. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dalam lima tahun terakhir proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman terjadi peningkatan di Kabupaten Tangerang. Grafik ini dapat berimplikasi bahwa semakin banyak ikan yang ditangkap aman untuk dikonsumsi karena masih mencapai 98.71% dari batasan 80% tangkapan maksimum lestari Kabupaten Tangerang.

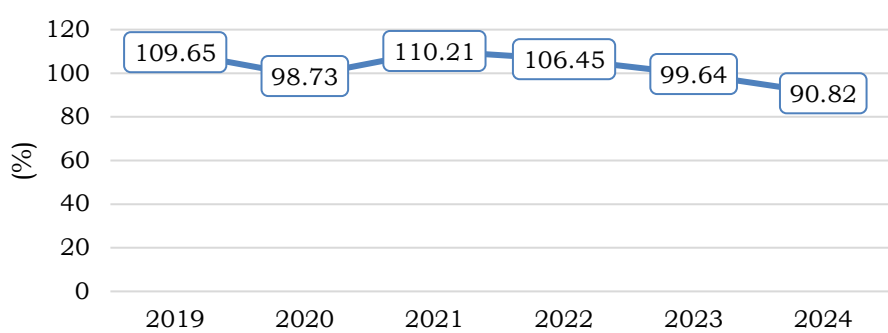


Gambar 2.268  
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman  
Kabupaten Tangerang 2019 - 2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2025

f. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Jika  $NTN > 100$ , harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus.  $NTN = 100$  memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Sementara itu, jika  $NTN < 100$ , kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit.

Dalam lima tahun terakhir, nilai tukar nelayan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022, nilai NTN lebih dari 100, dan menunjukkan kesejahteraan nelayan lebih baik. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2024 terjadi penurunan nilai NTN. Namun demikian, sektor perikanan Kabupaten Tangerang masih menjadi sumber penghasilan nelayan ke depannya.



Gambar 2.269  
Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang 2019 - 2024  
Sumber: Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2023 dan 2025

D) Fokus Layanan Urusan Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang layanan masyarakat. Capaian indeks meningkat di tahun 2020, tetapi terus menurun hingga tahun 2023,

sebesar 84,79. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan instansi pelayanan publik perlu kembali memaksimalkan pelayanan masyarakat.

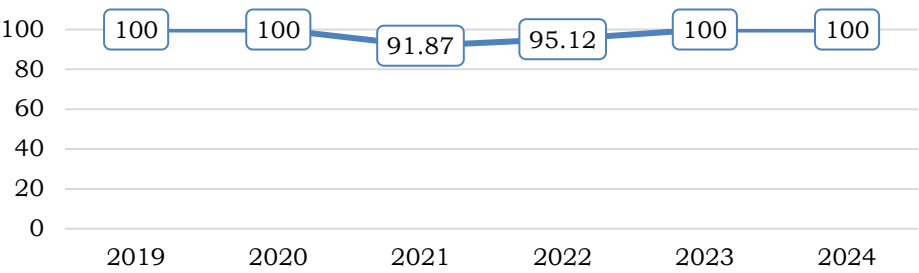
Tabel 2.43

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

| Indeks Kepuasan Masyarakat |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2019                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 83,66                      | 86,36 | 85,95 | 85,18 | 84,79 |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, 2024

- 2) Perencanaan Pembangunan
- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda
- RPJPD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan jangka panjang pembangunan suatu daerah. Selama kurun waktu 2019-2023 terdapat dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam Perda dalam tiap-tiap tahunnya.
- b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada
- Selaras dengan RPJPD, dokumen RPJMD juga menjadi salah satu instrumen perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu daerah, dalam kurun waktu 2019-2023, dalam tiap-tiap tahunnya terdapat dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam Perda/Perkada.
- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada
- Dokumen RKPD di wilayah ini juga telah ditetapkan dengan perkada pada tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini menunjukkan adanya tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan Perda
- Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang, Kabupaten Tangerang telah memiliki dokumen RTRW yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang 2011 – 2031.
- e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
- Secara umum, penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD telah terlaksana dengan baik meski mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Namun di tahun 2023 dan 2024 capaian tersebut kembali meningkat hingga 100%.



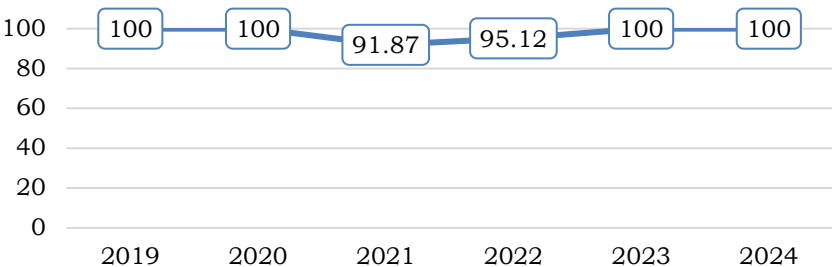
Gambar 2.270

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Data Sektoral dan [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id), 2025

f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Penjabaran program RKPD dalam APBD belum menunjukkan konsistensi yang baik. Pada tahun 2019 hingga 2020, program RKPD telah dijabarkan dengan baik ke dalam APBD. Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi penurunan, meskipun pada tahun 2022 kembali meningkat dan kembali ke capaian 100% di tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan penjabaran konsistensi untuk dapat mewujudkan perencanaan yang baik di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.271  
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2024  
Sumber: Data Sektoral dan [opendata.tangerangkab.go.id](https://opendata.tangerangkab.go.id), 2025

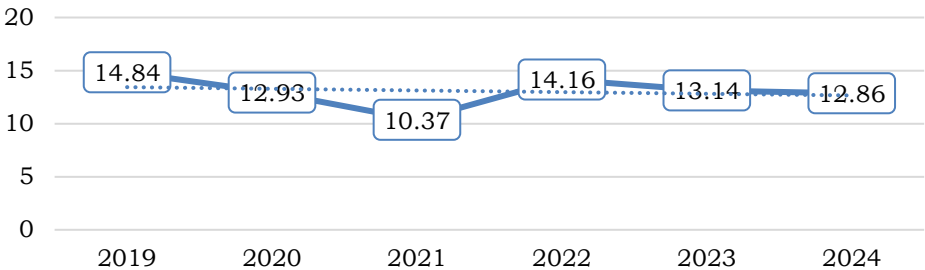
3) Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Selama 16 tahun berturut-turut, Kabupaten Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* dari BPK mengenai laporan keuangan Kabupaten Tangerang. Laporan keuangan yang telah disajikan meliputi hal-hal material, posisi keuangan daerah (neraca), laporan arus kas, laporan realisasi anggaran (LRA), serta data-data yang membersamai. Opini WTP yang didapatkan oleh Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang dilakukan telah disajikan secara wajar, memadai, dan informatif.

b. Persentase SILPA

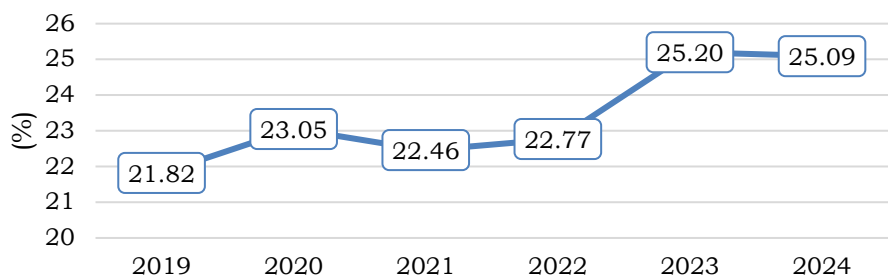
SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya mencapai angka nol, yang menandakan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Tetapi realisasinya, SILPA terbentuk karena pelampauan target pendapatan, tidak tercapainya target realisasi belanja serta SILPA tahun sebelumnya. Pada grafik di bawah, persentase SILPA yang ada menggambarkan besaran transaksi yang berjalan di Kabupaten Tangerang. Persentase SILPA fluktuatif cenderung menurun menandakan mulai stabilnya perencanaan dan penyerapan anggaran.



Gambar 2.272  
Persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Tangerang 2019 - 2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

c. Persentase Belanja Pendidikan

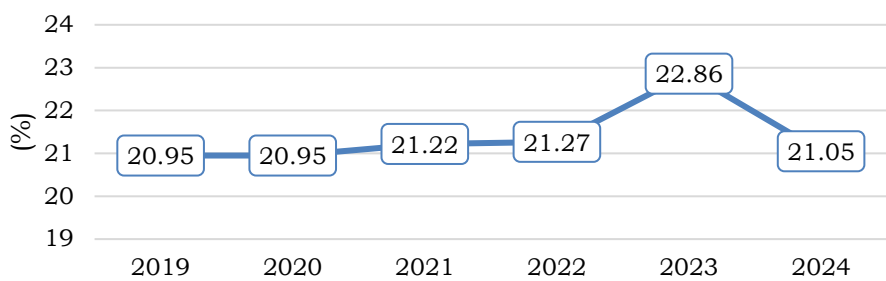
Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja pendidikan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2023 persentase yang semula berada di 21,82% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat terus hingga pada tahun 2024 mencapai 25,09%.



Gambar 2.269  
Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

d. Persentase Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Kabupaten Tangerang memiliki persentase belanja kesehatan yang stabil meningkat setiap tahunnya. Pada grafik di bawah, dalam tahun 2019 - 2023 persentase yang semula berada di 20,95% stabil pada tahun 2020. Lalu persentase tersebut meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 22,86%, dan 2024 sebesar 21,06%.



Gambar 2.273  
Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: BPKAD2 Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

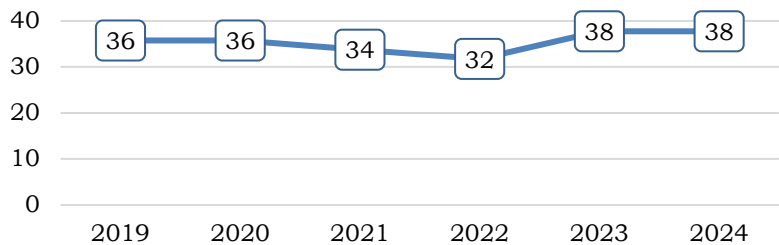
4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai di Kabupaten Tangerang mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan layanan di wilayah ini. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, rata-rata lama pegawai dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan mencapai lima hari. Nilai ini cenderung stagnan dalam kurun waktu 2019 - 2023.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, pengembangan kompetensi ASN dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan. Berdasarkan informasi dari instansi terkait, pejabat maupun ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan pelatihan formal masih relatif sedikit.

- b. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
- Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang cenderung sama tiap tahunnya, yakni berkisar pada jumlah 32-38 jabatan. Selanjutnya, jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, yakni mencapai angka 38 jabatan.

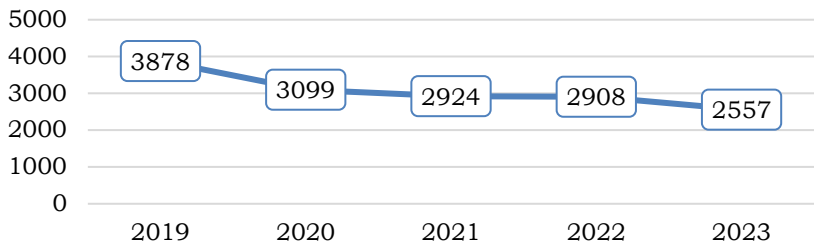


Gambar 2.271

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2025

- c. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
- Jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Tangerang mengalami penurunan pada kurun waktu 2019-2023. Pada 2023, terdapat 2557 jabatan administrasi di wilayah ini. Hal ini menunjukkan jabatan administrasi yang semakin terbatas dari waktu ke waktu.

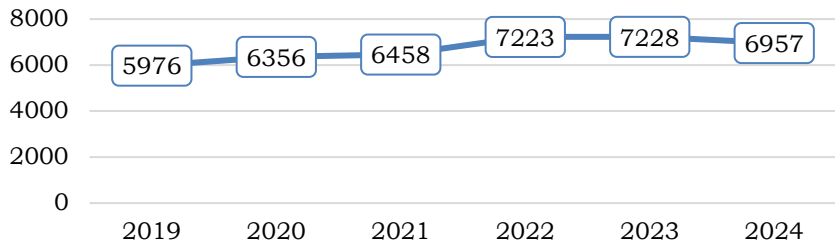


Gambar 2.274

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2024

- d. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah
- Jabatan fungsional tertentu di pemerintahan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2024. Hal ini menunjukkan bertambahnya jumlah jabatan fungsional tertentu dalam pemerintahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.275

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, 2025

- 5) Penelitian dan Pengembangan
- a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
- Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan hasil perbandingan antara jumlah kelitbangan (ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah) dalam



RKPD dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100% yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang semakin baik dalam implementasi rencana kelitbangan.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan merupakan persentase realisasi program inovasi dan invensi pemerintah. Persentase ini ditentukan dengan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan total jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memanfaatkan 100% hasil kelitbangan yang menandakan bahwa Kabupaten Tangerang terus berkembang untuk menerapkan nilai praktis dan konteks keilmuan.

c. Penerapan SIDA : Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan adalah persentase hasil perbandingan antara jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dengan jumlah inovasi yang diusulkan. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin baik kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA. Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang mencapai persentase 100%. Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan inovasi di Kabupaten Tangerang telah semakin berkembang.

d. Jumlah Inovasi yang diimplementasikan

Jumlah inovasi daerah yang diimplementasikan merupakan banyaknya dokumen inovasi daerah yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dan ditetapkan oleh keputusan kepala daerah. Kabupaten Tangerang memiliki peningkatan jumlah inovasi yang diimplementasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin inovatif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan potensi-potensi yang ada.

Tabel 2.44

Kebijakan Inovasi yang Diimplementasikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023

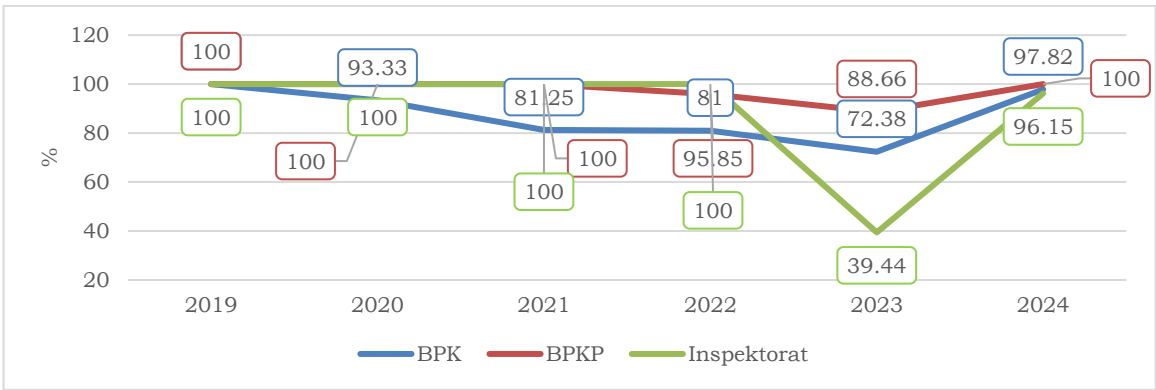
| Jumlah Inovasi yang diimplementasikan |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 2019                                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 45                                    | 45   | 56   | 68   | 81   |

Sumber: SK Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang dan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang 2019-2024

6) Pengawasan

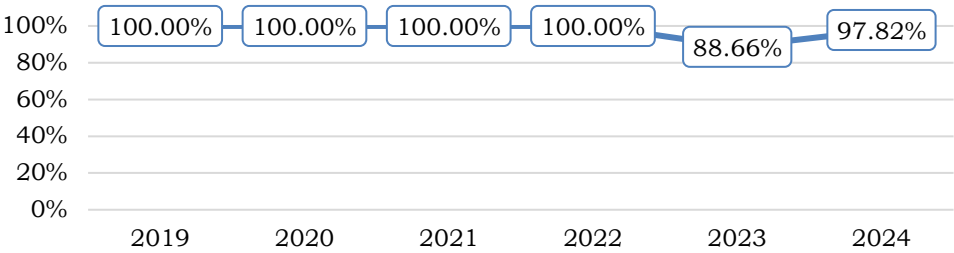
a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang belum sempurna. Baik temuan dari BPK maupun Inspektorat, masih menunjukkan adanya temuan yang belum ditangani. Hal ini semakin menurun dan pada 2023 mencapai nilai terendah dalam kurun waktu 2019-2023. Hal ini memerlukan pengoptimalan untuk meningkatkan tindak lanjut temuan di Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.276  
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2025

b. Jumlah Temuan BPK  
Jumlah temuan BPK merupakan temuan yang didapatkan dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah temuan ini mencerminkan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Tangerang. Jumlah temuan BPK di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2019-2022 dan menurun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya sistem pelaporan pemerintahan Kabupaten Tangerang.



Gambar 2.277  
Jumlah Temuan BPK Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2024  
Sumber: BPK Kabupaten Tangerang, 2025

- 7) Sekretariat Dewan
- a. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten  
Rencana kerja tahunan merupakan pedoman bagi sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang juga menunjukkan kegiatan akan terlaksana dengan lebih efisien. Kabupaten Tangerang telah menyediakan rencana kerja tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD kabupaten dalam kurun waktu 2019-2023.
- b. Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)  
Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dapat meningkatkan keselarasan visi, misi, dan isu strategis daerah yang akan diselesaikan dengan program kerja DPRD. Kabupaten Tangerang telah melakukan integrasi program kerja DPRD dalam RPJMD dan RPJPD dalam tahun 2019-2023.
- c. Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Program kerja DPRD Kabupaten Tangerang telah terintegrasi dalam kurun waktu 2019-2023 pada dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD, baik untuk fungsi pengawasan, pembentukan perda, serta fungsi anggaran.

2.1.5 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut. maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kabupaten Tangerang meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Tabel di bawah ini merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.45  
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang

| NO  | JENIS PELAYANAN DASAR            | INDIKATOR SPM                                          | SATUAN     | CAPAIAN |      |      |       |       |       | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|
|     |                                  |                                                        |            | 2019    | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                      |
| 1   | Bidang Urusan Pendidikan         |                                                        |            |         |      |      |       |       |       |                      |
| 1.1 | Pendidikan                       | APS PAUD                                               | persen (%) |         |      |      | 70,21 | 72,07 | 64,99 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | APS Dasar                                              | persen (%) |         |      |      | 98,13 | 98,78 | 98,99 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | APS Kesetaraan                                         | persen (%) |         |      |      | 0,12  | 9,7   | 13,43 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Literasi SD                                            | persen (%) |         |      |      | 51,59 | 58,16 | 56,17 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Literasi SMP                                           | persen (%) |         |      |      | 39,54 | 63,14 | 66,85 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Numerasi SD                                            | persen (%) |         |      |      | 60,03 | 45,97 | 50,92 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Numerasi SMP                                           | persen (%) |         |      |      | 52,97 | 57,41 | 60,51 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Proporsi Satpen PAUD Akre B                            | persen (%) |         |      |      | 54,58 | 49,02 | 48,64 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Proporsi Guru PAUD S1/D4                               | persen (%) |         |      |      | 55,16 | 55,01 | 55,01 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Iklim Inklusivitas SD                                  | nilai      |         |      |      | 81,91 | 54,46 | 56,68 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Iklim Inklusivitas SMP                                 | nilai      |         |      |      | 72,94 | 53,84 | 54,74 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Iklim Keamanan SD                                      | nilai      |         |      |      | 81,91 | 72,26 | 72,63 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Iklim Keamanan SMP                                     | nilai      |         |      |      | 75,96 | 65,07 | 66,70 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Iklim Kebhinekaan SD                                   | nilai      |         |      |      | 86,23 | 70,70 | 67,70 | Dinas Pendidikan     |
|     |                                  | Iklim Kebhinekaan SMP                                  | nilai      |         |      |      | 75,42 | 68,54 | 66,63 | Dinas Pendidikan     |
| 2   | Bidang Urusan Kesehatan          |                                                        |            |         |      |      |       |       |       |                      |
| 2.1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil    | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan    | persen (%) |         |      | 100  | 99,04 | 100   | 100   | Dinas Kesehatan      |
| 2.2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | persen (%) |         |      | 100  | 100   | 100   | 100   | Dinas Kesehatan      |

| NO   | JENIS PELAYANAN DASAR                                                                                                      | INDIKATOR SPM                                                                                                                                         | SATUAN     | CAPAIAN |      |       |       |       |       | OPD PENANGGUNG JAWAB                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|
|      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |            | 2019    | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                                            |
| 2.3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                                        | Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                             | persen (%) |         |      | 100   | 100   | 99,77 | 99,63 | Dinas Kesehatan                            |
| 2.4  | Pelayanan kesehatan balita                                                                                                 | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                      | persen (%) |         |      | 93,57 | 92,38 | 98,07 | 98,73 | Dinas Kesehatan                            |
| 2.5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar                                                                             | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                          | persen (%) |         |      | 89,32 | 96,32 | 95,08 | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 2.6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                                                                                    | Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                 | persen (%) |         |      | 53,24 | 86,33 | 98,61 | 98,56 | Dinas Kesehatan                            |
| 2.7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                                                                                       | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan                                                                                    | persen (%) |         |      | 84,45 | 70,8  | 97,27 | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 2.8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi                                                                                   | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                           | persen (%) |         |      | 85,62 | 87,34 | 100   | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 2.9  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus                                                                            | Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                     | persen (%) |         |      | 80,65 | 100   | 100   | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 2.10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                       | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                                                                               | persen (%) |         |      | 76,66 | 90,71 | 96,45 | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 2.11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis                                                                             | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                           | persen (%) |         |      | 53,42 | 72,19 | 98,75 | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 2.12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV                                                                     | Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan                         | persen (%) |         |      | 76,43 | 69,67 | 100   | 100   | Dinas Kesehatan                            |
| 3    | Bidang Urusan Pekerjaan Umum                                                                                               |                                                                                                                                                       |            |         |      |       |       |       |       |                                            |
| 3.1  | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                           | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                             | persen (%) |         |      | 36,46 | 34,78 | 72,43 | 100   | Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman |
| 3.2  | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                        | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                            | persen (%) |         |      | 0,52  | 2,11  | 91,89 | 100   | Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman |
| 4    | Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                      |                                                                                                                                                       |            |         |      |       |       |       |       |                                            |
| 4.1  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota                                       | Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni                                                                                    | persen (%) |         |      | 15,00 | 62,50 | 100   | 100   | Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman |
| 4.2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | persen (%) |         |      | 0     | 66,27 | 100   | 100   | Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman |
| 5    | Bidang Urusan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat                                                    |                                                                                                                                                       |            |         |      |       |       |       |       |                                            |
| 5.1  | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota                                              | persen (%) |         |      | 100   | 100   | 99,54 | 100   | Satpol PP                                  |
| 5.2  | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                                                                                          | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                                                                   | persen (%) |         |      | 59,56 | 100   | 100   | 100   | BPBD                                       |
| 5.3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana                                                                    | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                             | persen (%) |         |      | 100   | 100   | 92,8  | 100   | BPBD                                       |
| 5.4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                                                         | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pelayanan penyelamatan                                                                                    | persen (%) |         |      | 78,11 | 84,29 | 100   | 100   | BPBD                                       |

| NO  | JENIS PELAYANAN DASAR                                                                             | INDIKATOR SPM                                                                                                   | SATUAN     | CAPAIAN |      |       |       |       |      | OPD PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|-------|-------|-------|------|----------------------|
|     |                                                                                                   |                                                                                                                 |            | 2019    | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |                      |
|     |                                                                                                   | dan evakuasi korban bencana                                                                                     |            |         |      |       |       |       |      |                      |
| 5.5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                | persen (%) |         |      | 78,36 | 86,38 | 96,95 | 100  | BPBD                 |
| 6   | Bidang Urusan Sosial                                                                              |                                                                                                                 |            |         |      |       |       |       |      |                      |
| 6.1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                          | Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                     | persen (%) |         |      | 20,29 | 75,82 | 97,33 | 100  | Dinas Sosial         |
| 6.2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                            | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                          | persen (%) |         |      | 17,28 | 84,82 | 97,33 | 100  | Dinas Sosial         |
| 6.3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                                     | Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | persen (%) |         |      | 17,47 | 84,63 | 97,33 | 100  | Dinas Sosial         |
| 6.4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti               | Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | persen (%) |         |      | 65,55 | 90,00 | 93,33 | 100  | Dinas Sosial         |
| 6.5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                    | persen (%) |         |      | 40    | 69,91 | 88,37 | 100  | Dinas Sosial         |

Sumber : Dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Berdasarkan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tangerang dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan tahun 2025-2029 difokuskan untuk capaian SPM yang belum memenuhi standar, yaitu (1) Pendidikan kesetaraan; (2) Pendidikan anak usia dini; (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (4) Pelayanan kesehatan balita; serta (5) Pelayanan kesehatan pada usia produktif.

2.1.6 KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Kerja sama daerah merupakan usaha bersama yang melibatkan antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah di luar negeri. Penyelenggaraan kerja sama daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, yang didasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan saling menguntungkan pihak yang bekerja sama. Kerja sama daerah menjadi salah satu solusi kolaboratif dalam mengatasi keterbatasan bagi pemerintah daerah, baik dari segi pembiayaan, teknologi, maupun kapasitas SDM dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan segera melaksanakan program kolaborasi unggulan, yang fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pengembangan UMKM, dan pengurangan limbah makanan. Bentuk kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di 10 Desa

Program ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Swiss German University melalui *Academic Research*

and Community Service. Program kerja sama ini mencakup pembentukan 10 desa binaan di Kabupaten Tangerang dengan tujuan mengembangkan potensi lokal dan peningkatan ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknologi tepat guna, dan pendampingan pemasaran produk lokal. Bentuk inovasi yang dikembangkan melalui kerja sama ini adalah pengembangan tanaman mangrove, produksi minyak kemiri beromega, dan pemanfaatan tempe semangit. Selain itu, pemerintah daerah melalui kerja sama ini juga berupaya meningkatkan produksi sumber daya alam potensial di wilayah pesisir, yaitu bandeng melalui olahan sate sosis bandeng.

2) Program Inkubator Bisnis Ekonomi (Inkube)

Program dengan tujuan meningkatkan daya saing UMKM ini, diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang dan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis (PI2B) Institut Teknologi Indonesia. Program Inkube menjadi wadah yang mempertemukan pelaku usaha dengan investor serta sarana peningkatan kualitas UMKM. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan program, yaitu:

- Pra Inkubasi : tahap menyeleksi tenant yang potensial
- Inkubasi Tahap Awal : tahap menyusun strategi bisnis
- Inkubasi Tahap Pengembangan : tahap implementasi rencana bisnis
- Inkubasi Tahap Akhir : tahap peluncuran produk di pasar
- Paska Inkubasi : tahap evaluasi dan pengembangan jejaring

3) Workshop Internasional Hari Mangrove

Kegiatan *workshop* ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang dilakukan untuk membahas pengelolaan limbah makanan dan pembentukan ekonomi sirkular.

Selain ketiga program unggulan tersebut, Kabupaten Tangerang juga memiliki bentuk kerja sama lain, baik yang sudah, sedang maupun akan berjalan, sesuai tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.46  
Kerja Sama Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang

| No | Pihak Pertama              | Pihak Kedua       | Bentuk Kerja Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Kabupaten Tangerang        | PIK 2             | a. Program Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Tangerang. (Pihak PIK 2 dengan Dinas Kesehatan)<br>b. Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi Berkualitas dalam rangka Percepatan Desa <i>Open Defecation Free</i> (ODF) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tangerang (Pihak PIK 2 dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman)<br>c. Penyediaan fasilitas <i>shuttle</i> rute perintis yang memberikan akses PIK2 menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya. (Pihak PIK 2 dengan Aliansi Peduli Transportasi) |
| 2) | Kabupaten Tangerang        | Kabupaten Cirebon | Pengendalian inflasi terkait stabilisasi harga komoditas bawang merah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3) | Kabupaten Tangerang (DPKP) | Perum Bulog       | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Anggaran Perubahan Tahun 2024 melalui pengadaan beras sebagai cadangan pangan sebanyak 51.800 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| No  | Pihak Pertama                                             | Pihak Kedua                            | Bentuk Kerja Sama                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4)  | Kabupaten Tangerang                                       | IPB University                         | Program Beasiswa Utusan Daerah (BUD)                                                                                                                                              |
| 5)  | Bank Banten                                               | Kabupaten Tangerang                    | Penyediaan sarana prasarana serta pemanfaatan produk, jasa, dan layanan perbankan di Kabupaten Tangerang                                                                          |
| 6)  | Kabupaten Tangerang                                       | Kabupaten Sidrap                       | Penempatan transmigrasi di satuan permukiman Lagading, Kecamatan Pitu Riase Sidrap                                                                                                |
| 7)  | Kabupaten Tangerang (RSUD Tigaraksa)                      | BPJS Kesehatan                         | Perjanjian kerja sama fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan serta memperluas cakupan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di Kabupaten Tangerang. |
| 8)  | Kabupaten Tangerang (Dinas Tenaga Kerja)                  | Politeknik Penerbangan Indonesia Curug | Pelatihan ketenagakerjaan (Pelatihan <i>Hygiene and Sanitation</i> serta Pemeliharaan AC Gedung Bandara Udara)                                                                    |
| 9)  | Kabupaten Tangerang (Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan) | PLTU Banten 3 Lontar                   | Pengelolaan sampah di sungai Cisadane                                                                                                                                             |
| 10) | Kabupaten Tangerang (RSUD Balaraja)                       | Bank Banten                            | Pengelolaan pembayaran dan layanan rumah sakit melalui layanan perbankan yang modern dan terintegrasi                                                                             |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

## 2.1.7 RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN TANGERANG

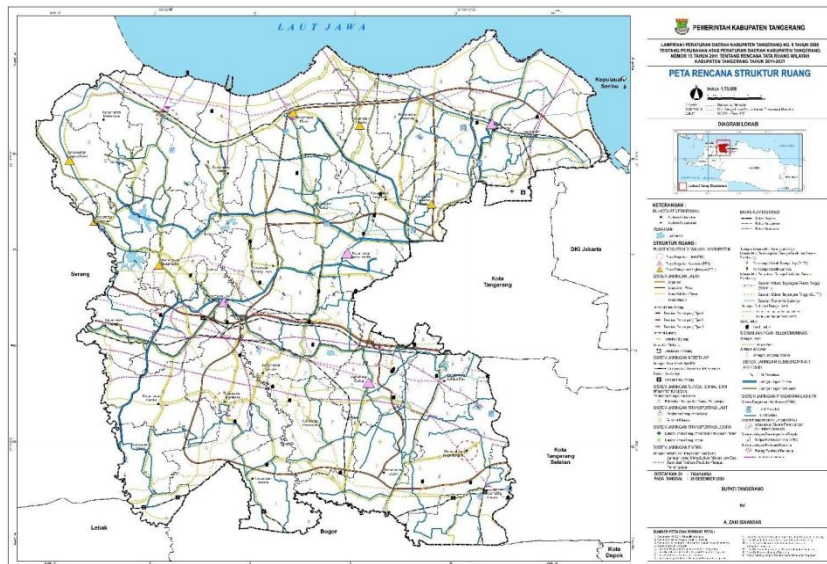
### A) Struktur Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang

Penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Upaya perwujudan kondisi tersebut lakukan melalui kebijakan penataan ruang meliputi:

- Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
- Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
- Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
- Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
- Rencana pengembangan RTH

Kelima kebijakan penataan ruang tersebut diwujudkan dalam rencana struktur dan pola ruang sebagai berikut:





Gambar 2.278

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031

- Sistem Pusat Permukiman
  - Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jabodetabek yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan.
  - Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Tangerang meliputi Kecamatan Kronjo, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Pagedangan.
- Sistem Jaringan Transportasi
  - Pengembangan terminal bus tipe A yaitu Terminal Balaraja serta terminal bus tipe B yaitu Terminal Pasar Kemis dan Terminal Teluk Naga.
  - Pengembangan Pelabuhan Sepatan dan Pelabuhan Pakuhaji sebagai Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pengembangan Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir sebagai Pelabuhan Penyeberangan
  - Pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai Bandar Udara Pengumpul
  - Pengembangan Bandar Udara Budiarto sebagai Bandar Udara Pengumpan
- Sistem Jaringan Energi
  - Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
  - Pengembangan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik
- Sistem Jaringan Telekomunikasi
  - Pengembangan jaringan tetap dan jaringan bergerak telekomunikasi di wilayah kabupaten/kota.
- Sistem Jaringan Sumber Daya Air
  - Pengembangan sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air di wilayah kabupaten/kota.
- Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
  - Pengembangan sistem manajemen pengelolaan persampahan dan sistem jaringan persampahan yang meliputi pengembangan TPS Kecamatan Curug, pengembangan TPA di Cilegon, pengembangan TPST Kronjo, pengembangan TPST Kresek, pengembangan TPA Jatiwaringin menjadi TPST Jatiwaringin.



## 2.1.8 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN TANGERANG

### A) PDAM Tirta Kerta Raharja

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (PERUMDAM TKR) merupakan perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang bergerak dibidang Air Bersih. PERUMDAM TKR didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan Perda No. 10/HUK/1976 tanggal 13 April 1976 dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2023, PERUMDAM TKR mencatatkan laba sebesar 106,03 miliar rupiah (+3,8% dari tahun 2022).

PERUMDAM TKR melayani 3 (tiga) daerah pelayanan kota/kabupaten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dari 186.433 SL, 54% berada di Kota Tangerang, 38% berada di Kabupaten Tangerang, dan 8% berada di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Cakupan Layanan untuk Kabupaten Tangerang saat ini baru mencapai 37,74% (1.393.608 jiwa) dari jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah IPA yang dimiliki PERUMDAM TKR saat ini adalah 13 IPA dengan kapasitas produksi sebesar 5.587,5 L/D. Kapasitas produksi tersebut dapat melayani Pelanggan sebesar 186.433 SL Domestik (Desember 2021) dan 14 SL Air Curah sebesar 382.200 SL.

Dalam upaya mengoptimalkan produksi dan meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air minum, PERUMDAM TKR melakukan kerjasama usaha dalam hal pengolahan IPA di antaranya dengan PT. Traya Tirta Cisadane dan PT. Tirta Kencana Cahaya Mandiri. Selain itu, juga dilakukan Kerjasama Air Curah (kegiatan penjualan air) oleh PERUMDAM TKR kepada mitra yaitu pengembang perumahan, perusahaan atau PDAM lain seperti PAM Jaya, BSD City, Lippo Karawaci, Bintaro, Alam Sutera, Bandara Soekarno Hatta, PERUMDAM Kota Tangerang dan lainnya

### B) PT Mitra Kerta Raharja (Perseroda)

PT Mitra Kerta Raharja merupakan BUMD *Holding Company* di Kabupaten Tangerang yang didirikan pada tahun 2006 dengan usaha di bidang Pertanian dan Agrobisnis, Farmasi, Kepelabuhan, Keuangan dan Permodalan, Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Bandara dan Dermaga, Multimedia, Pasar, Air bersih, Pengelolaan air limbah, Perbengkelan, Persampahan, Jasa konstruksi, Perparkiran, Pengelolaan jalan tol. Perseroan daerah ini didirikan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 19 Tahun 2006 tentang Pendirian PT. Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2018, PT Mitra Kerta Raharja mendirikan anak perusahaan / *sub-holding* yaitu PT. Gemilang Agung Raharja. PT. Gemilang Agung Raharja (GAR) memiliki bisnis usaha perpakiran yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.

Pada tahun 2023, PT Mitra Kerta Raharja memiliki total aset sebesar 19,88 miliar rupiah (+19% dari tahun 2022) dan pendapatan sebesar 3,63 miliar rupiah (+98,95% dari tahun 2022). Beberapa kegiatan / penugasan PT. Mitra Kerta Raharja (MKR) pada tahun 2023, yaitu (1) Pengelolaan Kawasan Ketapang Urban Aquaculture; (2) Pengelolaan Pusat Kawasan Agropolitan (Puskagro) bersama PT Benteng Pangan Utama; (3) Pengembangan Properti Eks Kantor Pemkab Tangerang; (4) Bekerjasama dengan PT Jaya Mitra Sarana dalam bidang pengelolaan air bersih.



Gambar 2.280

Kegiatan Bisnis Usaha PT Mitra Kerta Raharja Tahun 2023

*Sumber: Dokumen Company Profile PT. Mitra Kerta Raharja*

C) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja Gemilang

PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) merupakan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama-sama Pemerintah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Jabar Banten, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang, Nomor 06 tahun 2007, tanggal 06 Juni 2007, Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Lembaga Pinjaman Mikro (LPM). Komposisi kepemilikan PT. BPR Kerta Raharja Gemilang terdiri atas 79,34% Pemerintah Kab. Tangerang, 20% Pemerintah Prov. Banten, 0,24% Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 0,42% PT. Bank BJB. Pada tahun 2023, total aset PT. BPR Kerta Raharja Gemilang sebesar 588,78 miliar rupiah (+1,9% dari tahun 2022) dan laba sebesar 4,5 miliar rupiah (-52,3% dari tahun 2022).

BPR Kerta Raharja Gemilang memiliki 3 (tiga) produk atau layanan, yaitu Tabungan, Deposito, dan Kredit. Pada tahun 2023, total dana pihak ketiga deposito sebesar 67,26 miliar rupiah (+3,8% dari tahun 2022) dan tabungan sebesar 92,78 miliar rupiah (+19,0% dari tahun 2022).

D) LPM UMKM Kabupaten Tangerang

Lembaga Pinjaman Mikro (LPM) UMKM adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pinjaman dalam skala kecil untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lembaga Pinjaman Mikro (LPM) berperan dalam memberikan akses permodalan bagi UMKM dan mendorong inklusi keuangan UMKM yang diharapkan dapat mendorong skalabilitas usaha UMKM dan penguatan ekonomi lokal. Lembaga keuangan skala mikro tersebut bergerak dalam entitas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK). Kabupaten Tangerang memiliki 10 (sepuluh) PDPK, yaitu PDPK Balaraja, PDPK Kresek, PDPK Curug, PDPK Kronjo, PDPK Serpong, PDPK Mauk, PDPK Sepatan, PDPK Legok, PDPK Pasar Kamis, dan PDPK Tigaraksa.

E) Perumda Pasar Niaga Kerta Rahaja

Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) adalah perusahaan daerah yang mengelola pasar rakyat di Kabupaten Tangerang. Perumda Pasar NKR Kabupaten Tangerang, didirikan dengan Perda No. 25 Tahun 2004, tertanggal 14 Juli 2004, yang telah diperbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Perda No. 25 Tahun 2004 dan Perda No 17 Tahun 2014 Tentang perubahan kedua Perda No. 25 Tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005. Perumda ini didirikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sebagai pemegang saham tunggal Perusahaan Daerah Pasar sekaligus sebagai pemilik. Bupati Kabupaten Tangerang sebagai pemilik PERUMDA Pasar, mengangkat Dewan Pengawas untuk



melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan mengangkat Direksi untuk menjalankan Operasional PERUMDA Pasar.



Gambar 2. 281

Kegiatan Perumda Pasar Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) dalam Revitalisasi Pasar dan Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tangerang

*Sumber: Media Berita Online*

Perumda Pasar NKR memiliki fungsi dan tugas pokok dalam membangun, mengembangkan, merevitalisasi sarana perniagaan dengan target setiap tahun diharapkan satu unit pasar dapat direvitalisasi. Perumda Pasar NKR telah mengelola 19 pasar tradisional, di antaranya Pasar Kelapa Dua, Pasar Curug, Pasar Karawaci, Pasar Kutabumi, dan lain sebagainya. Kegiatan pengelolaan meliputi revitalisasi kios pasar, membangun fasilitas penunjang perniagaan (parkir, MCK, kantor pasar, *cold storage*, jaringan listrik, jaringan air bersih, dan lain sebagainya). Selain itu, Perumda Pasar NKR melakukan pemantauan operasi pasar kegiatan perniagaan utamanya pemantauan harga bahan pokok di pasar tradisional.

## 2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah. Gambaran keuangan daerah digunakan untuk mencermati dan mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah di masa lalu dan masa yang akan datang.

### 2.2.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari komponen Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah, terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah yang terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sementara itu, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, dengan komponen penyusunnya yaitu: (1) Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang selanjutnya diperinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan terhadap semua komponen APBD tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang, dengan mempertimbangkan segala peluang dan hambatan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

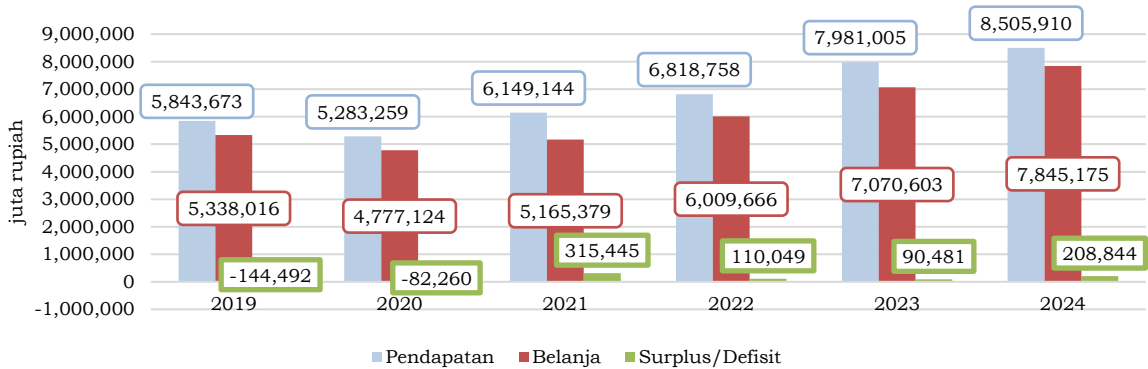
daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam peraturan tersebut disebutkan, keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak keluarga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

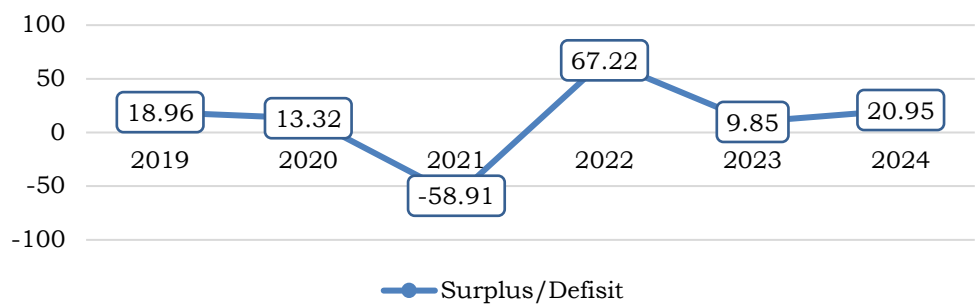
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang mengelola keuangan daerah berdasarkan pada asas umum, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kurun waktu 2019-2024, APBD Kabupaten Tangerang memiliki tren meningkat pada setiap tahunnya. Meskipun mengalami distraksi *covid-19*, pertumbuhan rata-rata APBD Kabupaten Tangerang meningkat. Peningkatan tersebut membuktikan resiliensi keuangan daerah saat mengalami pandemi *covid-19*.



Gambar 2. 282  
Realisasi Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

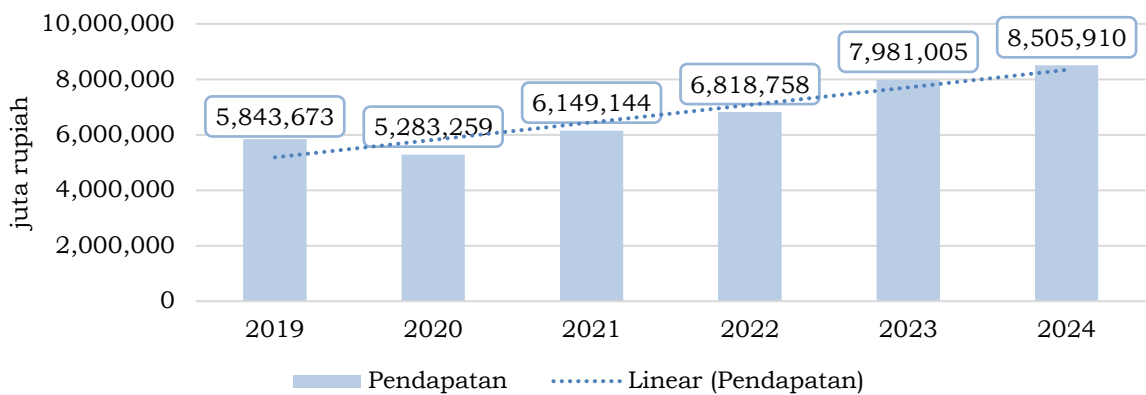
Meskipun tren surplus/defisit Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi, namun fluktuasi ekonomi yang berakibat pada defisit anggaran pada masa pandemi *covid-19* mampu ditutupi oleh net pembiayaan.



Gambar 2. 283  
Tren Surplus/Defisit Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

A) Pendapatan Daerah

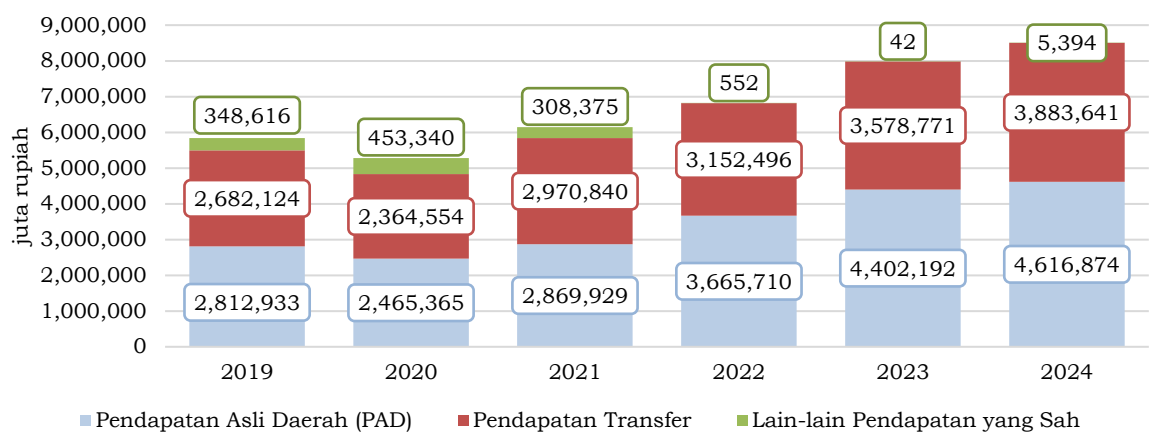
Pendapatan daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nilai pendapatan daerah sangat berpengaruh pada kemampuan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Maka dari itu, dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah sebagai alat ukur dan pembandingan pada masing-masing sumber pendapatan.



Gambar 2.284  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

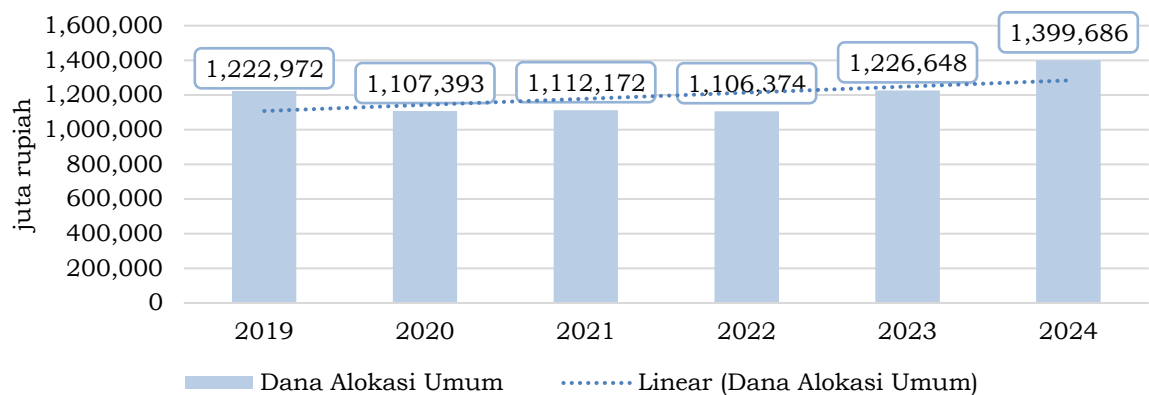
Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2019-2024), pendapatan daerah Kabupaten Tangerang memiliki tren peningkatan sebesar 7,8% per tahun. Akan tetapi, pendapatan daerah Kabupaten Tangerang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 saat kondisi pandemi covid-19. Pendapatan daerah terdiri atas beberapa komponen seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen-komponen tersebut semakin meningkat menandakan setiap tahunnya.





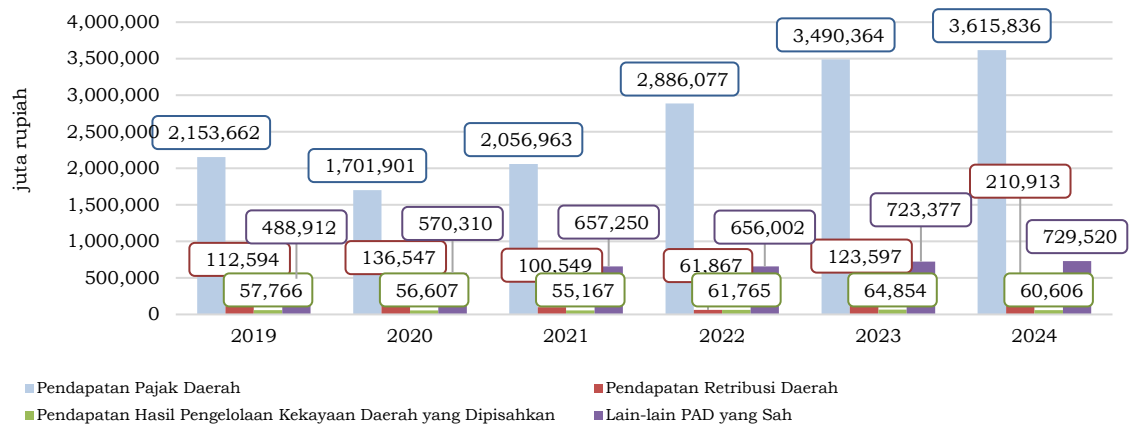
Gambar 2.285  
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Komponen yang memiliki proporsi terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari waktu ke waktu dengan sumbangan terbesar dari pendapatan pajak daerah dengan rata-rata yang mencapai angka 42,5% dari pendapatan daerah pada tahun 2024. Sementara itu, pendapatan transfer memiliki tren yang peningkatan yang meski sempat mengungguli PAD Kabupaten Tangerang pada tahun 2021. Proporsi terbesar yang menyokong dana transfer adalah pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum sebesar 16,45% terhadap pendapatan LRA tahun 2024.



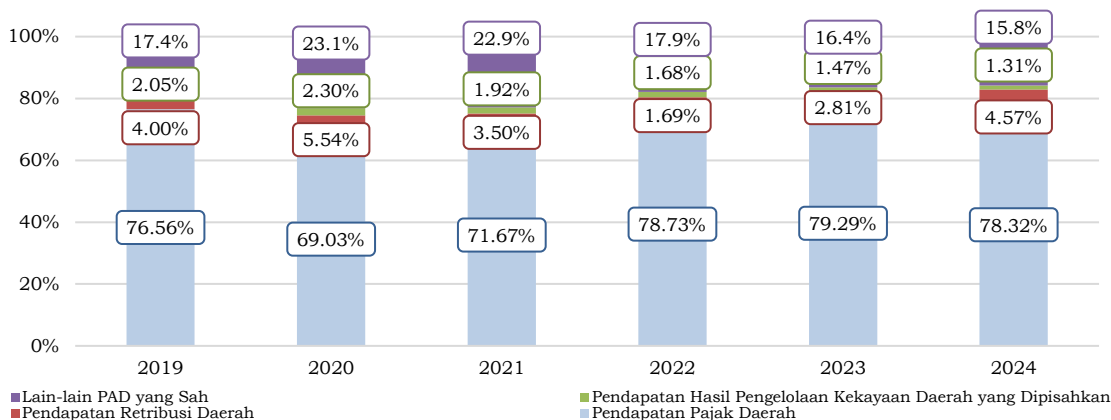
Gambar 2.286  
Dana Alokasi Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
PAD merupakan salah satu komponen variabel sumber pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPK DyD) dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2019-2023 memiliki tren pertumbuhan yang meningkat kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19.



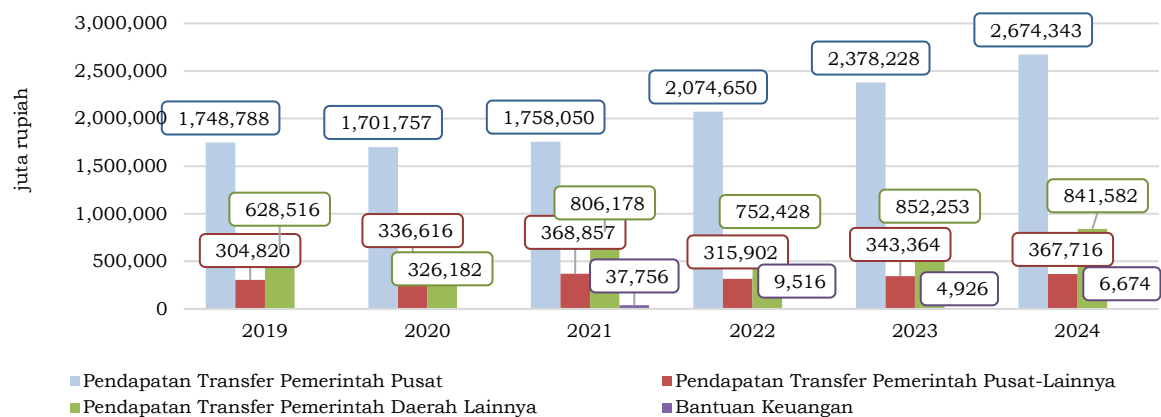
Gambar 2.287  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang disumbang oleh pajak daerah dengan proporsi terbesar pada tiap tahunnya. Proporsi pajak daerah tiap tahunnya selalu berkisar pada rentang 70-80% total PAD.



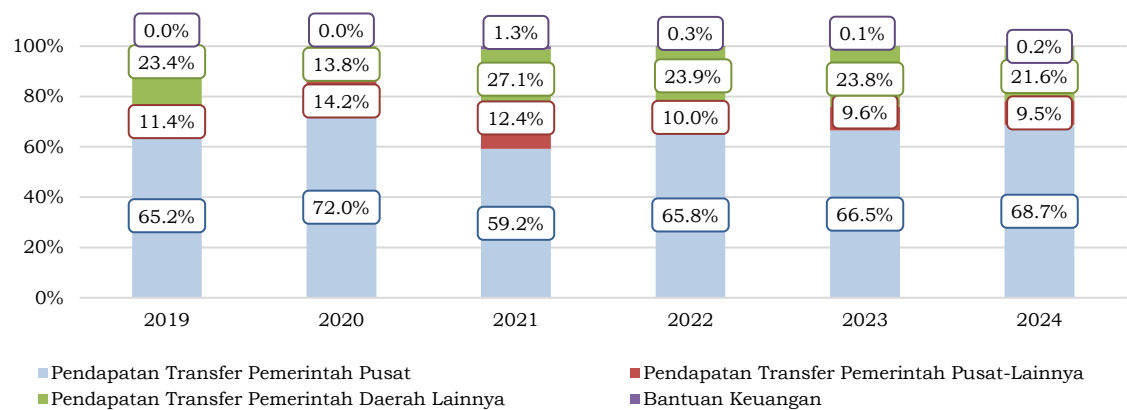
Gambar 2.288  
Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2) **Pendapatan Transfer**  
Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer Kabupaten Tangerang diperoleh dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Pendapatan transfer Kabupaten Tangerang kurun waktu 2019-2024 memiliki tren yang meningkat.



Gambar 2.289  
Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Pendapatan transfer Kabupaten Tangerang didominasi oleh proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat yang berkisar pada rentang 60-70% dari total jumlah pendapatan transfer. Transfer pemerintah pusat terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Sementara itu, proporsi terbesar lainnya disumbang oleh transfer daerah lainnya yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.



Gambar 2.290  
Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah  
Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari sumber ini mengalami penurunan drastis dalam kurun waktu 2019-2024.

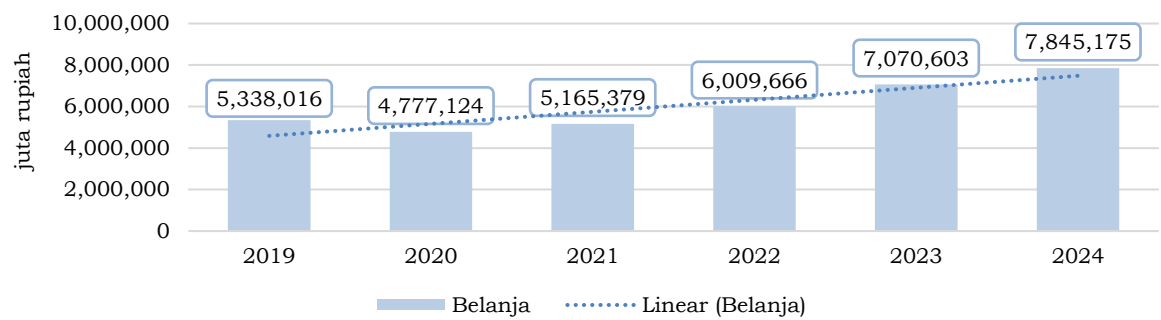
Tabel 2.52  
Pendapatan LRA Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| URAIAN                                                       | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| PENDAPATAN-LRA                                               | 5.843.672.646.281 | 5.283.259.300.737 | 6.149.143.629.405 | 6.818.758.206.108 | 7.981.005.385.558 | 8.505.910.087.435,54 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 | 2.812.933.124.762 | 2.465.364.759.567 | 2.869.928.724.492 | 3.665.710.323.870 | 4.402.192.318.342 | 4.616.874.819.974,54 |
| Pendapatan Pajak Daerah                                      | 2.153.661.721.883 | 1.701.900.649.848 | 2.056.962.543.593 | 2.886.076.753.678 | 3.490.363.924.921 | 3.615.835.888.430    |
| Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 112.593.677.767   | 136.547.373.492   | 100.548.519.872   | 61.867.064.298    | 123.597.357.167   | 210.912.730.996      |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 57.766.074.188    | 56.606.567.271    | 55.167.387.998    | 61.764.968.006    | 64.854.494.983    | 60.606.042.461       |
| Lain-lain PAD yang Sah                                       | 488.911.650.924   | 570.310.168.956   | 657.250.273.029   | 656.001.537.888   | 723.376.541.271   | 729.520.158.087,54   |
| PENDAPATAN TRANSFER                                          | 2.682.123.916.519 | 2.364.554.056.170 | 2.970.840.235.913 | 3.152.496.052.937 | 3.578.770.570.116 | 3.883.641.267.461    |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                         | 1.748.787.956.936 | 1.701.756.758.490 | 1.758.050.071.356 | 2.074.650.440.787 | 2.378.228.091.338 | 2.674.343.487.264    |
| Bagi Hasil Pajak                                             | 160.484.375.585   | 212.364.539.597   | 274.645.743.666   | 221.567.284.104   | 310.872.332.383   | 401.180.626.000      |
| Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                      | 1.602.889.923     | 1.586.590.101     | 2.438.853.402     | 3.559.626.000     | 6.468.973.603     | 5.391.595.000        |
| Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | 1.222.971.999.000 | 1.107.392.704.000 | 1.112.171.609.000 | 1.106.373.855.092 | 1.226.647.862.650 | 1.399.685.929.647    |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)                                    | 363.728.692.428   | 380.412.924.792   | 368.793.865.288   | 743.149.675.591   | 834.238.922.702   | 868.085.336.617      |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya                 | 304.820.252.828   | 336.615.552.000   | 368.856.747.000   | 315.901.807.430   | 343.363.714.000   | 367.715.943.900      |
| Dana Penyesuaian                                             | 304.820.252.828   | 336.615.552.000   | 67.576.212.000    | -                 | 6.477.097.000     | 12.391.928.500       |
| Transfer Dana Desa                                           | -                 | -                 | 301.280.535.000   | 315.901.807.430   | 336.886.617.000   | 355.324.015.400      |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya                | 628.515.706.755   | 326.181.745.680   | 806.177.824.517   | 752.428.103.428   | 852.252.763.778   | 841.581.836.297      |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak                                  | 628.515.706.755   | 326.181.745.680   | 806.177.824.517   | 752.428.103.428   | 852.252.763.778   | 841.581.836.297      |
| Bantuan Keuangan                                             | -                 | -                 | 37.755.593.040    | 9.515.701.292     | 4.926.001.000     | 6.673.741.700        |
| Bantuan Keuangan                                             | -                 | -                 | 37.755.593.040    | 9.515.701.292     | 4.926.001.000     | 6.673.741.700        |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                         | 348.615.605.000   | 453.340.485.000   | 308.374.669.000   | 551.829.301       | 42.497.100        | 5.394.000.000        |
| Pendapatan Hibah                                             | 348.615.605.000   | 453.340.485.000   | 308.374.669.000   | -                 | 42.497.100        | 5.394.000.000        |
| Pendapatan Lainnya                                           | -                 | -                 | -                 | 551.829.301       | -                 | -                    |

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

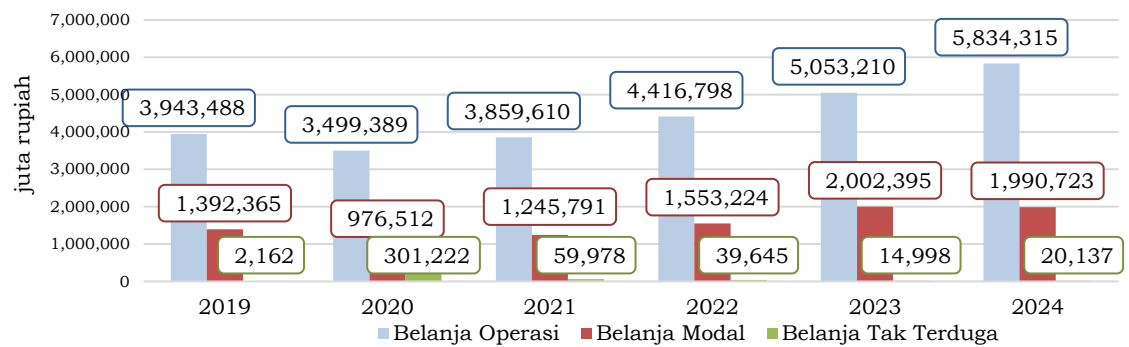
B) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam kurun waktu 2019-2024, menunjukkan peningkatan pada belanja daerah dengan rata-rata sebesar 8,0% per tahun meskipun pada 2020 sempat mengalami penurunan.



Gambar 2.291  
Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

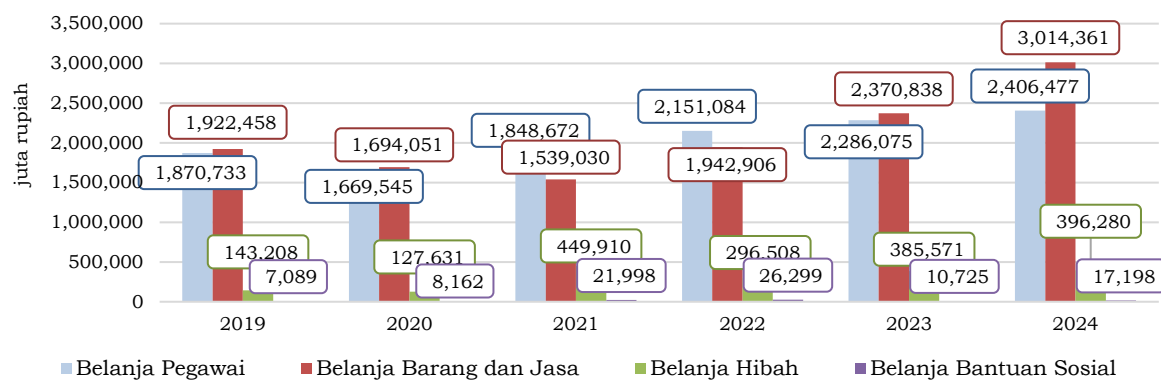
Belanja daerah di Kabupaten Tangerang terdiri atas tiga jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja daerah Kabupaten Tangerang didominasi oleh belanja operasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Belanja modal juga memiliki tren peningkatan yang sejalan dengan belanja operasi. Sementara itu, belanja tak terduga memiliki proporsi terendah dengan tren yang menurun kecuali pada 2020 saat terjadi pandemi covid-19.



Gambar 2.292  
Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

1) Belanja Operasi

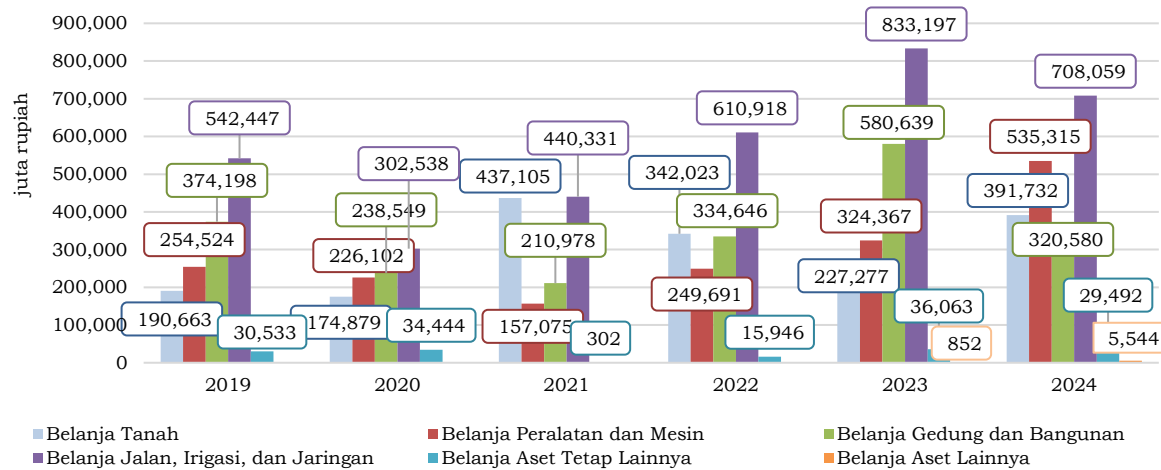
Belanja operasi terdiri atas empat jenis yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Belanja pegawai serta barang dan jasa menjadi sumber belanja terbesar yang mendominasi dalam proporsi belanja operasi yaitu sebesar 41,2% (2024). Kedua jenis belanja tersebut memiliki tren yang sama yaitu relatif meningkat meski keduanya sama-sama mengalami penurunan. Sementara itu, belanja hibah juga mengalami peningkatan meski nilainya relatif kecil. Belanja bantuan sosial menjadi jenis belanja operasi dengan proporsi terendah yaitu sebesar 0,3% pada tahun 2024.



Gambar 2.293  
Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal memiliki tren yang relatif meningkat meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Dalam realisasi belanja modal, proporsi belanja tertinggi digunakan dalam belanja jalan, irigasi, dan jaringan yaitu sebesar 35,6% pada tahun 2024.



Gambar 2.294  
Realisasi Belanja Modal Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Belanja tak terduga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2019-2024. Belanja tak terduga mengalami peningkatan drastis pada masa pandemi covid-19. Meskipun demikian, pada tahun berikutnya belanja tak terduga mengalami penurunan.

4) Belanja Transfer

Dalam kurun waktu 2019-2024, realisasi belanja transfer cenderung mengalami peningkatan sebesar 5,9% (rata-rata per tahun) dan hanya menurun saat pandemi. Pada tahun 2024, realisasi belanja transfer mencapai 869,6 miliar rupiah yang terdiri dari transfer bagi hasil sebesar 347,2 miliar rupiah dan transfer bantuan keuangan sebesar 522,2 miliar rupiah. Realisasi belanja transfer Kabupaten Tangerang tahun 2024 difokuskan untuk program/kegiatan pembangunan desa.

Tabel 2.47  
Realisasi Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

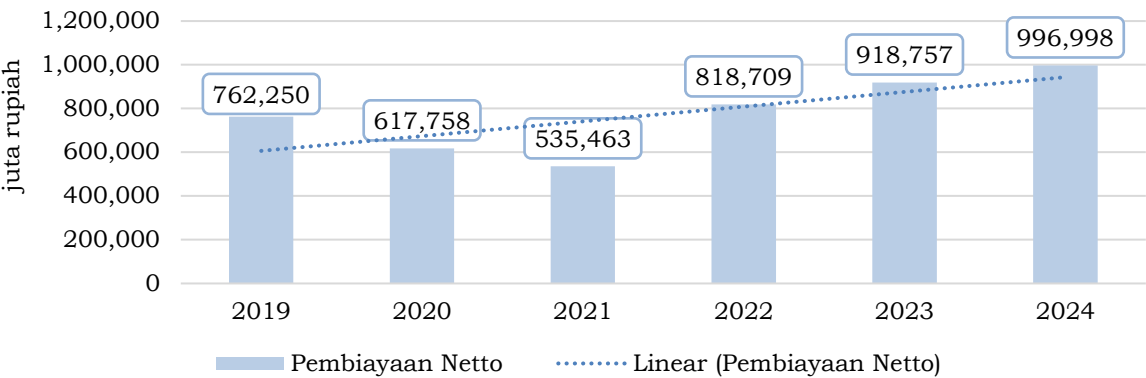
| URAIAN                               | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BELANJA                              | 5.338.015.766.404 | 4.777.124.008.370 | 5.165.378.967.163 | 6.009.666.292.139 | 7.070.603.058.354 | 7.845.174.721.433 |
| BELANJA OPERASI                      | 3.943.488.092.710 | 3.499.389.280.347 | 3.859.610.157.225 | 4.416.797.617.312 | 5.053.210.174.035 | 5.834.315.106.367 |
| Belanja Pegawai                      | 1.870.732.534.034 | 1.669.545.457.895 | 1.848.671.982.738 | 2.151.084.483.213 | 2.286.075.345.833 | 2.406.476.664.779 |
| Belanja Barang dan Jasa              | 1.922.458.206.350 | 1.694.051.144.953 | 1.539.029.767.368 | 1.942.905.906.358 | 2.370.838.280.571 | 3.014.360.678.622 |
| Belanja Hibah                        | 143.208.266.826   | 127.631.000.549   | 449.909.957.119   | 296.508.477.741   | 385.571.297.631   | 396.279.562.966   |
| Belanja Bantuan Sosial               | 7.089.085.500     | 8.161.676.950     | 21.998.450.000    | 26.298.750.000    | 10.725.250.000    | 17.198.200.000    |
| BELANJA MODAL                        | 1.392.365.179.428 | 976.512.264.804   | 1.245.790.580.493 | 1.553.223.517.661 | 2.002.395.147.585 | 1.990.722.872.612 |
| Belanja Tanah                        | 190.663.045.773   | 174.879.250.388   | 437.105.252.384   | 342.022.722.332   | 227.277.177.586   | 391.732.280.665   |
| Belanja Peralatan dan Mesin          | 254.524.178.235   | 226.101.911.006   | 157.074.680.027   | 249.690.508.222   | 324.366.940.867   | 535.315.347.072   |
| Belanja Gedung dan Bangunan          | 374.198.318.620   | 238.548.536.514   | 210.977.934.794   | 334.646.202.898   | 580.639.094.647   | 320.580.002.197   |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 542.446.989.238   | 302.538.105.154   | 440.330.930.828   | 610.918.173.051   | 833.196.833.734   | 708.059.201.545   |
| Belanja Aset Tetap Lainnya           | 30.532.647.562    | 34.444.461.742    | 301.782.460       | 15.945.911.158    | 36.063.250.751    | 29.492.455.730    |
| Belanja Aset Lainnya                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 851.850.000       | 5.543.585.403     |
| BELANJA TAK TERDUGA                  | 2.162.494.267     | 301.222.463.219   | 59.978.229.445    | 39.645.157.166    | 14.997.736.734    | 20.136.742.454    |
| Belanja Tak Terduga                  | 2.162.494.267     | 301.222.463.219   | 59.978.229.445    | 39.645.157.166    | 14.997.736.734    | 20.136.742.454    |
| BELANJA TRANSFER                     | 650.148.754.100   | 588.395.766.747   | 668.319.977.231   | 699.043.340.179   | 819.921.420.195   | 869.579.700.196   |
| Transfer Bagi Hasil                  | 202.796.024.306   | 157.385.248.029   | 210.492.145.819   | 246.063.603.379   | 327.417.814.437   | 347.428.524.162   |
| Transfer Bantuan Keuangan            | 447.352.729.794   | 431.010.518.718   | 457.827.831.412   | 452.979.736.800   | 492.503.605.758   | 522.151.176.034   |

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

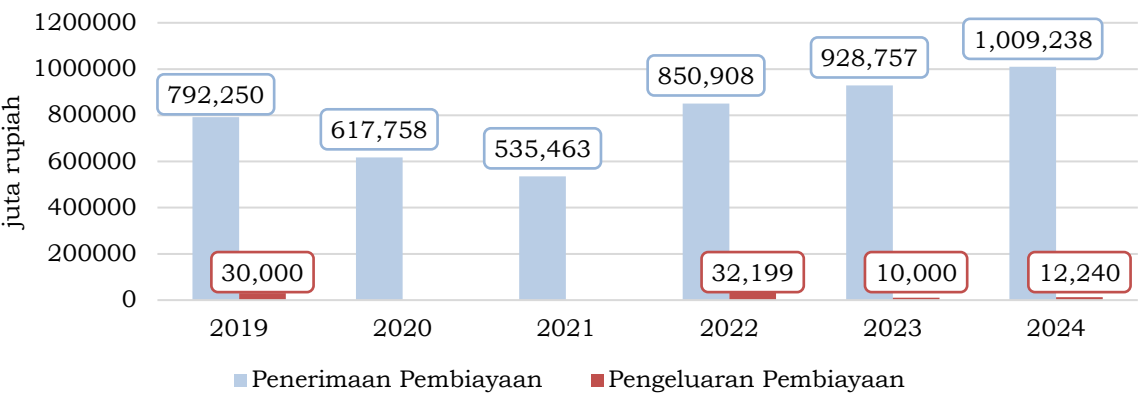


C) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan/pengeluaran daerah yang perlu/akan dibayar/diterima kembali dan terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan neto daerah mengalami peningkatan dari kurun waktu 2019-2024 sebesar 5,5% per tahun. Hal ini menunjukkan nilai yang positif yang mampu melebihi nilai defisit, sehingga memberikan SILPA yang positif.



Gambar 2.295  
Pembiayaan Neto Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025



Gambar 2.296  
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

- 1) Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan pembiayaan Kabupaten Tangerang terdiri atas penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Meski sempat berfluktuasi pada kurun waktu 2019-2021, penerimaan pembiayaan Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 hingga 2024.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi pada periode waktu 6 (enam) tahun terakhir.

Tabel 2.54  
Pembiayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| URAIAN                                          | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024              |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| PEMBIAYAAN                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                   |
| Penerimaan Pembiayaan                           | 792.249.631.880 | 617.757.759.057 | 535.463.426.368 | 850.908.111.379 | 928.757.388.059 | 1.009.238.295.068 |
| Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran      | 792.249.631.880 | 617.757.759.057 | 535.463.426.368 | 850.908.111.379 | 928.757.388.059 | 1.009.238.295.068 |
| Pencairan Dana Cadangan                         | -               | -               | -               |                 | -               |                   |
| Pengeluaran Pembiayaan                          | 29.999.998.600  | 0               | 0               | 32.199.297.110  | 10.000.000.000  | 12.240.000.000,00 |
| Pembentukan Dana Cadangan                       | 24.999.998.600  | -               | -               | 32.199.297.110  | 10.000.000.000  |                   |
| Penyetaraan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 5.000.000.000   | -               | -               |                 | -               | 12.240.000.000,00 |
| Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya      |                 | -               | -               |                 | -               |                   |
| PEMBIAYAAN NETTO                                | 762.249.633.280 | 617.757.759.057 | 535.463.426.368 | 818.708.814.269 | 918.757.388.059 | 996.998.295.068   |

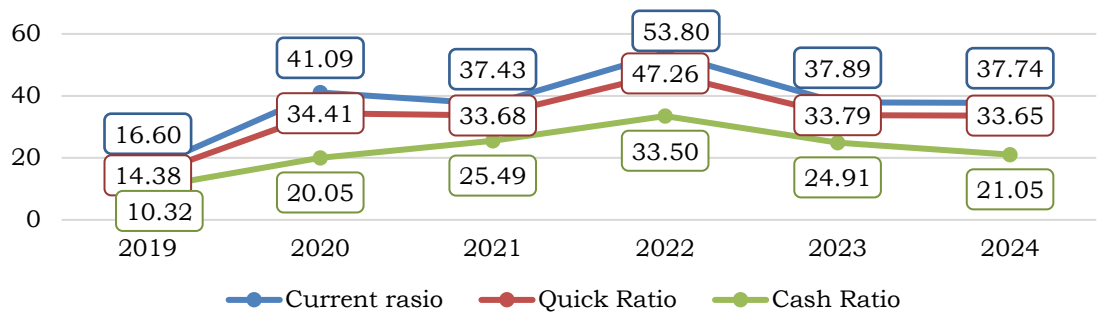
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Biro/Bagian Keuangan serta Kepala Dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

A) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri atas 3 jenis rasio yakni *current ratio*, *quick ratio*, dan *cash ratio*. *Current ratio* merupakan alat ukur kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya. *Current ratio* keuangan Kabupaten Tangerang memiliki tren meningkat dari tahun 2019-2023 meski sempat menurun pada 2021 dan 2023. Nilai *current ratio* Kabupaten Tangerang menunjukkan tingginya jumlah aset lancar yang dapat digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya tanpa harus memperhatikan persediaan. Sementara itu, *quick ratio* adalah alat ukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar. *Quick ratio* Kabupaten Tangerang memiliki tren yang sama dengan *current ratio* yakni meningkat meski mengalami penurunan pada 2021 dan 2024. Nilai *quick ratio* Kabupaten Tangerang tergolong tinggi menandakan tingginya jumlah aktiva lancar yang paling likuid untuk memenuhi kewajiban lancar tanpa memperhatikan persediaan. Sementara itu, *cash ratio* juga memiliki tren peningkatan meski sempat menurun pada tahun 2024.

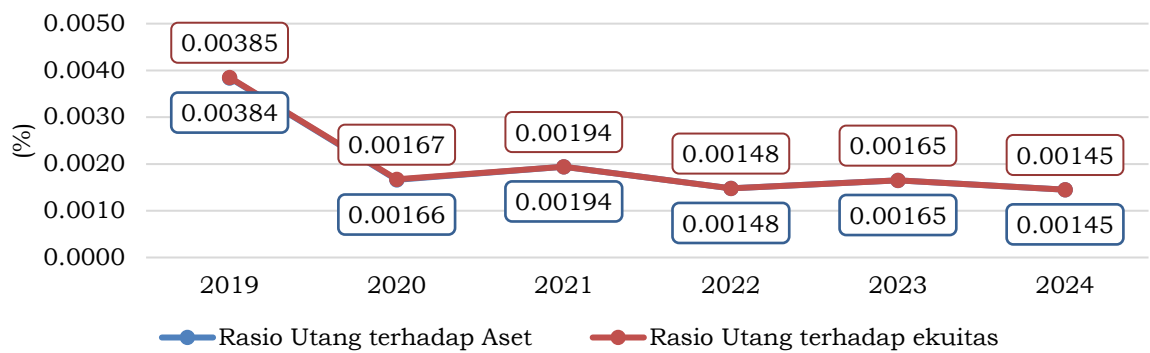


Gambar 2.297  
Likuiditas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

B) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan pemerintah daerah untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas. Rasio solvabilitas terdiri atas dua jenis yaitu rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya. Sementara itu, rasio utang terhadap ekuitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah untuk

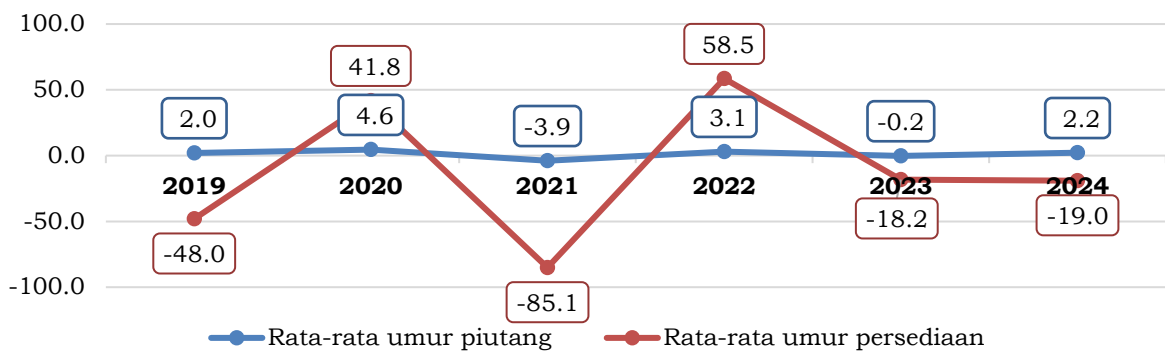
memenuhi seluruh kewajiban dengan ekuitas yang dimiliki. Kedua jenis rasio tersebut memiliki tren yang sama dengan nilai yang tidak jauh berbeda. Rasio tersebut memiliki tren cenderung menurun meski berfluktuasi dengan nilai berkisar antara 0,00145% - 0,0038% yang mengindikasikan aset Kabupaten Tangerang hanya dibiayai 0,00158% - 0,0038% kewajiban. Rasio tersebut masih sangat jauh di bawah 100% artinya Kabupaten Tangerang akan mampu membayar utang menggunakan ekuitas apabila mengalami kegagalan pembayaran utang.



Gambar 2.298  
Solvabilitas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

C) Rasio Aktivitas

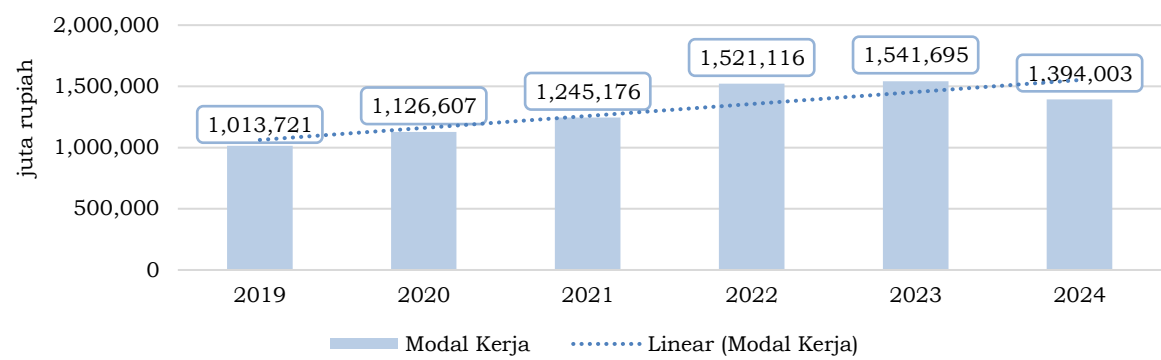
Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan sebagai alat identifikasi tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah yang terdiri atas rerata umur piutang dan rerata umur persediaan. Rata-rata umur piutang menunjukkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk melunasi piutang. Rata-rata umur piutang Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2024 berkisar dalam rentang -3,9 hingga 4,6 dengan tren yang berfluktuasi tiap tahunnya. Sementara itu, rata-rata umur persediaan adalah menunjukkan jumlah hari dana tertanam dalam bentuk persediaan. Rata-rata umur persediaan Kabupaten Tangerang menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu.



Gambar 2.299  
Aktivitas Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

D) Modal Kerja

Modal kerja adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan daerah dalam melaksanakan operasional harian tanpa menggunakan selain aset lancar. Nilai modal kerja Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan signifikan dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.300  
Modal Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
*Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025*

Tabel 2.48  
Aset Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| URAIAN                                                    | 2019               | 2020                 | 2021               | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ASET                                                      |                    |                      |                    |                      |                      |                      |
| ASET LANCAR                                               |                    |                      |                    |                      |                      |                      |
| Kas                                                       | 670.753.471.314,16 | 563.576.894.619,16   | 871.426.399.490,00 | 965.269.250.926,00   | 1.041.067.964.671,00 | 798.695.408.252,54   |
| Kas di Kas Daerah                                         | 526.631.115.391,16 | 382.036.355.068,16   | 643.703.360.122,00 | 678.514.220.262,00   | 727.106.142.239,00   | 621.028.924.781,00   |
| Kas di Bendahara Penerimaan                               | 6.940.000,00       | 7.295.165,00         | 681.940,00         | 7.498.645,00         | -                    | -                    |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                              | 15.680.570,00      | 41.115.681,00        | -                  | 66.479.350,00        | 5.247.344,00         | -                    |
| Kas BLUD                                                  | 105.469.801.746,00 | 161.893.532.313,00   | 224.847.574.769,00 | 284.304.419.675,00   | 309.753.994.557,00   | 176.376.586.014,54   |
| Kas di Bendahara FKTP                                     | -                  |                      |                    |                      |                      |                      |
| Kas di Bendahara BOS                                      | 12.323.666.501,00  | 5.595.339.172,00     | 2.874.782.659,00   | 2.345.048.694,00     | 1.772.475.007,00     | 466.232.990,00       |
| Kas Dana BOK Puskesmas                                    |                    |                      |                    |                      |                      | 817.618.138,00       |
| Kas Lainnya                                               | 1.306.268.506,00   | 14.003.257.220,00    | -                  | 31.584.300,00        | 2.430.105.524,00     |                      |
| Setara Kas                                                | 24.999.998.600,00  | -                    | -                  | -                    | -                    |                      |
| Investasi Jangka Pendek                                   |                    | -                    | -                  | -                    | -                    |                      |
| Piutang Pendapatan                                        | 896.093.177.901,00 | 1.028.176.883.119,00 | 897.083.066.453,00 | 1.011.325.417.556,00 | 1.000.892.217.146,77 | 1.083.587.719.787,01 |
| Piutang Pajak                                             | 699.356.732.658,00 | 711.426.978.175,00   | 706.139.886.445,00 | 757.008.077.164,00   | 796.677.320.421,00   | 827.435.304.231,00   |
| Piutang Retribusi                                         | 5.100.704.816,00   | 4.256.364.189,00     | 2.120.994.485,00   | 2.785.168.453,00     | 2.837.279.027,00     | 2.241.120.368,00     |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |                    |                      |                    | -                    | -                    |                      |
| Piutang Lain-lain (PAD yang Sah)                          | 87.109.928.801,00  | 22.140.679.045,00    | 34.178.385.358,00  | 74.819.850.969,00    | 31.638.726.663,77    | 21.708.536.334,01    |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat                         | 43.649.645.702,00  | -                    | -                  | -                    | -                    |                      |

| URAIAN                                     | 2019                        | 2020                        | 2021                        | 2022                        | 2023                        | 2024                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 60.876.165.924,00           | 290.352.861.710,00          | 154.643.800.165,00          | 176.712.320.970,00          | 169.738.891.035,00          | 232.202.758.854,00          |
| Penyisihan Piutang                         | (632.930.293.440,88)        | (624.805.879.991,82)        | (617.206.483.376,39)        | (615.171.812.638,87)        | (629.933.667.815,22)        | (647.419.237.205,55)        |
| Beban Dibayar Di Muka                      | 42.976.754,54               | 44.290.212,19               | 12.083.333,34               | 38.333.333,34               | 126.250.000,00              | 85.500.000,00               |
| Persediaan                                 | 144.729.374.357,84          | 187.717.297.245,92          | 128.044.978.299,36          | 188.465.363.654,19          | 171.335.392.331,60          | 167.776.665.534,32          |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                  | <b>1.078.688.706.886,66</b> | <b>1.154.709.485.204,45</b> | <b>1.279.360.044.199,31</b> | <b>1.549.926.552.830,66</b> | <b>1.583.488.156.334,15</b> | <b>1.402.720.010.039,32</b> |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>            |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Investasi Non Program                      | 37.293.058.088,00           | 48.707.031.554,00           | 44.471.125.330,00           | 35.250.308.229,00           | 37.648.052.974,00           | 59.776.718.160,00           |
| Dana Bergulir                              | 37.293.058.088,00           | 48.707.031.554,00           | 44.471.125.330,00           | 35.250.308.229,00           | 37.648.052.974,00           | 59.776.718.160,00           |
| Deposito Jangka Panjang                    |                             | -                           | -                           | -                           | -                           |                             |
| Investasi Permanen                         | 1.028.846.624.292,56        | 1.026.798.085.805,63        | 1.023.711.826.866,00        | 1.052.443.111.794,34        | 1.061.419.444.540,37        | 1.075.372.158.617,45        |
| Penyetaraan Modal Pemerintah Daerah        | 1.028.846.624.292,56        | 1.026.798.085.805,63        | 1.023.711.826.866,00        | 1.052.443.111.794,34        | 1.061.419.444.540,37        | 1.075.372.158.617,45        |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>     | <b>1.066.139.682.380,56</b> | <b>1.075.505.117.359,63</b> | <b>1.068.182.952.196,00</b> | <b>1.087.693.420.023,34</b> | <b>1.099.067.497.514,37</b> | <b>1.135.148.876.777,45</b> |
| <b>ASET TETAP</b>                          |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Tanah                                      | 7.605.873.762.094,00        | 7.859.447.998.418,00        | 8.352.273.885.332,00        | 9.466.070.944.967,70        | 13.939.404.254.737,70       | 14.302.726.461.242,70       |
| Peralatan dan Mesin                        | 1.721.964.560.982,69        | 1.900.778.880.283,07        | 2.077.110.389.680,35        | 2.243.975.527.855,94        | 2.580.837.724.336,43        | 3.011.248.023.355,19        |
| Gedung dan Bangunan                        | 4.407.089.959.051,00        | 4.646.736.675.138,00        | 4.772.916.867.901,00        | 5.085.826.398.575,89        | 5.468.263.632.549,29        | 5.884.337.520.893,27        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan               | 6.479.068.097.030,29        | 6.802.248.168.553,29        | 7.381.564.089.162,29        | 7.998.002.235.979,29        | 8.918.767.634.390,52        | 9.596.908.003.766,09        |
| Aset Tetap Lainnya                         | 68.802.025.396,22           | 73.929.801.578,73           | 76.115.654.215,52           | 78.153.399.019,52           | 83.227.014.575,52           | 92.553.092.386,52           |
| Konstruksi dalam Pengerjaan                | 14.381.592.639,00           | 14.891.220.719,00           | 24.941.650.856,00           | 113.952.437.839,00          | 21.123.573.313,00           | 21.998.732.760,00           |
| Akumulasi Penyusutan                       | (5.804.618.704.820,20)      | (6.587.583.589.045,85)      | (7.371.579.780.112,46)      | (8.179.660.097.500,27)      | (9.000.652.886.847,71)      | (9.945.186.666.644,74)      |



| URAIAN                                   | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| JUMLAH ASET TETAP                        | 14.492.561.292.373,00 | 14.710.449.155.644,20 | 15.313.342.757.034,70 | 16.806.320.846.737,10 | 22.010.970.947.054,70 | 22.964.585.167.759,03 |
| DANA CADANGAN                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Dana Cadangan                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Dana Cadangan                            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| JUMLAH DANA CADANGAN                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| ASET LAINNYA                             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Tagihan Jangka Panjang                   | 14.254.375,00         | -                     | 6.400.000,00          | -                     | -                     | -                     |
| Tagihan Piutang Penjualan Angsuran       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Tuntutan Ganti Rugi                      | 14.254.375,00         | -                     | 6.400.000,00          | -                     | -                     | -                     |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga            |                       |                       |                       |                       | 615.621.126.518,71    | 622.616.292.393,75    |
| Aset Pemanfaatan                         |                       |                       |                       |                       | 671.380.077.047,12    | 679.658.610.555,12    |
| Akumulasi Penyusutan Aset Pemanfaatan    |                       |                       |                       |                       | (55.758.950.528,41)   | (57.042.318.161,37)   |
| Aset Tidak Berwujud                      | 61.552.083,33         | 34.927.083,33         | 214.208.333,33        | 146.104.166,66        | 1.561.963.166,59      | 7.058.085.197,64      |
| Aset Tidak Berwujud Lainnya              | 106.500.000,00        | 106.500.000,00        | 303.500.000,00        | 303.500.000,00        | 1.807.448.000,00      | 8.028.864.840,00      |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (44.947.916,67)       | (71.572.916,67)       | (89.291.666,67)       | (157.395.833,34)      | (245.484.833,41)      | (970.779.642,36)      |
| Aset Lain-lain                           | 317.081.732.238,13    | 61.704.090.752,84     | 37.295.811.054,87     | 73.694.379.351,61     | 51.644.861.338,28     | 95.808.834.198,85     |
| Aset Lain-lain                           | 369.503.974.669,65    | 98.182.181.702,80     | 106.248.455.020,38    | 174.052.892.499,79    | 172.467.585.434,35    | 283.613.354.167,64    |
| Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat  | (52.422.242.431,52)   | (36.478.090.949,96)   | (68.952.643.965,51)   | (100.358.513.148,18)  | (120.822.724.096,07)  | (187.804.519.968,79)  |
| JUMLAH ASET LAINNYA                      | 317.157.538.696,46    | 61.739.017.836,17     | 37.516.419.388,20     | 73.840.483.518,27     | 668.827.951.023,58    | 738.442.115.790,24    |
| JUMLAH ASET                              | 16.954.547.220.336,70 | 17.002.402.776.044,50 | 17.698.402.172.818,20 | 19.517.781.303.109,30 | 25.362.354.551.926,80 | 26.240.896.170.366,04 |

| URAIAN                               | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KEWAJIBAN                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK              | 64.967.983.641,51     | 28.102.517.777,96     | 34.183.600.535,37     | 28.810.371.017,84     | 41.793.390.264,28     | 37.668.893.782,55     |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 282.373.112,00        | -                     | -                     | 345.541.609,00        | 487.849.788,00        | 1.979.028,00          |
| Pendapatan Diterima Dimuka           | 9.703.718.021,41      | 7.408.557.950,26      | 9.217.244.766,67      | 11.009.260.359,25     | 11.411.017.840,58     | 14.965.873.388,85     |
| Utang Belanja                        | 42.663.257.723,00     | 10.672.291.434,00     | 24.094.922.378,70     | 16.401.280.960,59     | 29.584.026.873,70     | 22.392.994.203,70     |
| Utang Jangka Pendek Lainnya          | 12.318.634.785,10     | 10.021.668.393,70     | 871.433.390,00        | 1.054.288.089,00      | 310.495.762,00        | 308.047.162,00        |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG             | 135.217.583,67        | 161.322.250,33        | 104.073.250,33        | 108.240.916,99        | 45.011.999,99         | 120.024.208,32        |
| Utang Jangka Panjang Lainnya         | 161.322.250,33        | 104.073.250,33        | 108.240.916,99        | 45.011.999,99         | 120.024.208,32        | 120.024.208,32        |
| JUMLAH KEWAJIBAN                     | 65.103.201.225,18     | 28.263.840.028,29     | 34.287.673.785,70     | 28.918.611.934,83     | 41.838.402.264,27     | 37.788.917.990,87     |
| EKUITAS                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Ekuitas                              | 16.889.444.019.111,50 | 16.974.138.936.016,20 | 17.664.114.499.032,50 | 19.488.862.691.174,50 | 25.320.516.149.662,50 | 26.203.107.252.375,17 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS         | 16.954.547.220.336,70 | 17.002.402.776.044,50 | 17.698.402.172.818,20 | 19.517.781.303.109,30 | 25.362.354.551.926,80 | 26.240.896.170.366,04 |

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2.2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

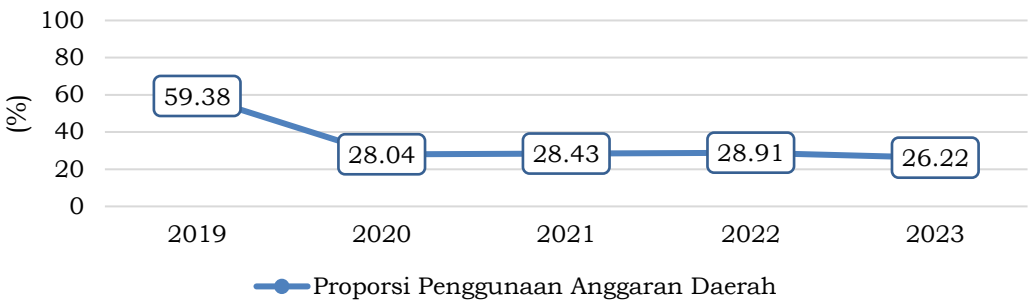
Proporsi penggunaan anggaran merupakan analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tangerang. Proporsi penggunaan anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk penentuan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.49  
Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

| NO  | Uraian              | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran + Transfer) | Persentase     |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                     | (a)                                              | (b)                                                             | (a)/(b) x 100% |
| I   | Tahun Anggaran 2019 | 3.943.488.092.710                                | 6.641.313.274.464                                               | 59,38%         |
| II  | Tahun Anggaran 2020 | 1.669.545.457.895                                | 5.953.915.541.864                                               | 28,04%         |
| III | Tahun Anggaran 2021 | 1.848.671.982.738                                | 6.502.018.921.625                                               | 28,43%         |
| IV  | Tahun Anggaran 2022 | 2.151.084.483.213                                | 7.439.952.269.607                                               | 28,91%         |
| V   | Tahun Anggaran 2023 | 2.286.075.345.833                                | 8.720.445.898.744                                               | 26,22%         |

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

Proporsi penggunaan anggaran Kabupaten Tangerang didapatkan dari persentase total pembelanjaan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran Kabupaten Tangerang, yang terdiri atas Belanja Daerah, Pembiayaan Pengeluaran, dan Transfer Daerah. Pada grafik di bawah, proporsi penggunaan anggaran daerah Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun telah mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019, proporsi penggunaan anggaran daerah mencapai persentase 59,38% dan angka tersebut menurun drastis di tahun 2020 mencapai 28,04%. Persentase tersebut kemudian stabil hingga di tahun 2023 mencapai angka 26,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Tangerang semakin baik, seiring dengan penurunan dalam proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.



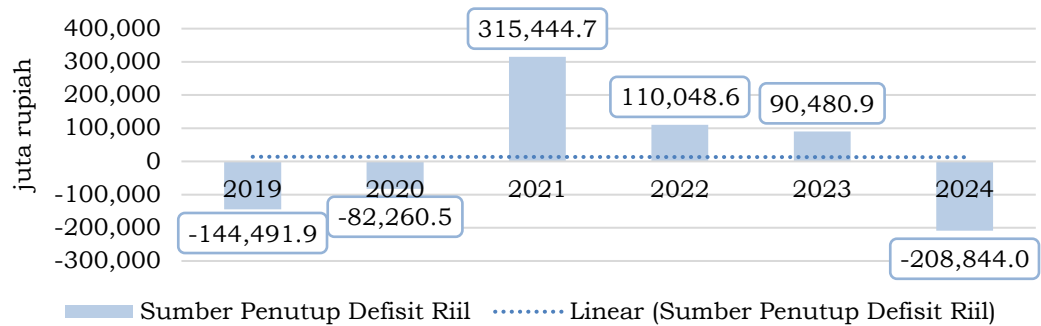
Gambar 2.301  
Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang merupakan gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran-anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan

daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis sumber penutup.

A) Analisis Sumber Penutup Defisit Riil  
Analisis sumber penutup defisit riil diterapkan untuk menutup defisit yang ada di dalam APBD. Dalam penutupan defisit anggaran di Kabupaten Tangerang, digunakan dua pos pemecah anggaran yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.



Gambar 2.302  
Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

Pada tahun 2019-2023, Kabupaten Tangerang memiliki APBD yang berfluktuasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang mengalami defisit sebesar -Rp144.491.874.223,- dan pada tahun 2023 surplus mencapai Rp90.480.907.009,-. Hal ini menandakan bahwa jumlah anggaran riil Kabupaten Tangerang semakin stabil surplus dan menunjukkan konsep APBD dan APBD riil bisa selaras. Namun di tahun 2024 defisit anggaran mencapai -Rp208.844.334.193,-.

Tabel 2.50  
Perhitungan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024

| Perhitungan Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| No                                                                               | Komposisi                   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024                 |
| 1                                                                                | Realisasi Pendapatan Daerah | 5.843.672.646.281 | 5.283.259.300.737 | 6.149.143.629.405 | 6.818.758.206.108 | 7.981.005.385.558 | 8.505.910.087.435,54 |
| Dikurang realisasi                                                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 2                                                                                | Belanja Daerah              | 5.338.015.766.404 | 4.777.124.008.370 | 5.165.378.967.163 | 6.009.666.292.139 | 7.070.603.058.354 | 7.845.174.721.433.00 |
| 3                                                                                | Pengeluaran Transfer        | 650.148.754.100   | 588.395.766.747   | 668.319.977.231   | 699.043.340.179   | 819.921.420.195   | 869.579.700.196,00   |
| Surplus/Defisit Riil                                                             |                             | -144.491.874.223  | -82.260.474.380   | 315.444.685.011   | 110.048.573.790   | 90.480.907.009    | -208.844.334.193,46  |

Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang 2020-2025

B) Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran anggaran (belanja) selama satu periode anggaran. SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja serta sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan lampiran Permendagri 86 Tahun 2017, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran, di mana dengan mengetahui besaran SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Semakin tinggi SiLPA menunjukkan kurang cermatnya penganggaran (perencanaan yang kurang baik) atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.51  
Komposisi Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  
Komposisi Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

| Uraian                                                     | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023                 | 2024               |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| Pelampauan penerimaan PAD                                  | 195.000.000.000 | 302.911.284.641 | 318.042.675.095 | 336.852.345.298 | 392.238.899.453      |                    |
| Pelampauan penerimaan dana perimbangan                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 99.550.851.840       |                    |
| Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 0               | 0               | 0               | 551.829.301     | 0                    |                    |
| Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya               | 422.757.759.057 | 207.592.000.036 | 532.865.436.284 | 591.353.213.460 | 517.448.543.775      |                    |
| Penerimaan Kembali Penyertaan Modal                        | 0               | 24.994.000.000  | 0               | 0               | 0                    |                    |
| Jumlah SiLPA                                               | 792.249.631.880 | 617.757.759.057 | 535.463.426.368 | 850.908.111.379 | 1.009.238.295.068.00 | 788.153.857.662,54 |

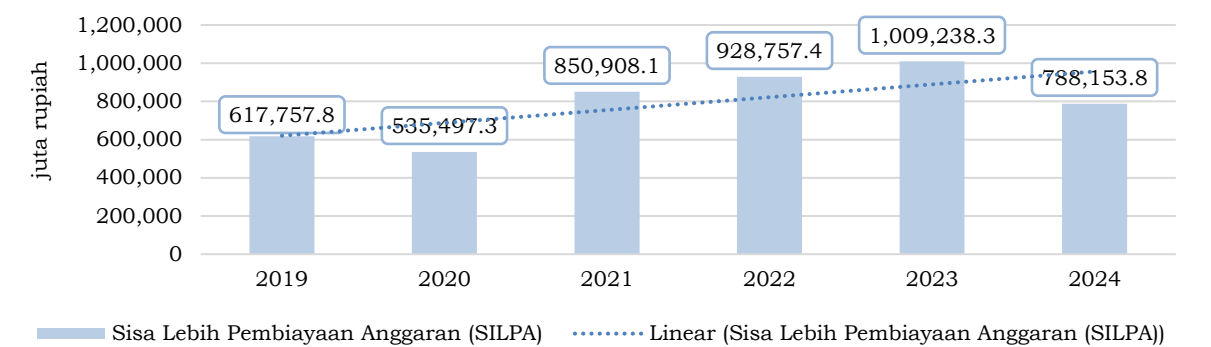
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang 2020-2025

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran SiLPA Kabupaten Tangerang menunjukkan fluktuasi. SiLPA mencapai titik terendah di tahun 2021 dengan angka Rp535.463.426.368,- yang terus menurun sejak tahun 2019. Penurunan SiLPA pada kurun waktu tersebut dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Sementara itu, titik tertinggi SiLPA Kabupaten Tangerang terjadi pada tahun 2023 yang mencapai angka Rp928.757.388.059,-. Besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin menurun, hal tersebut perlu diupayakan oleh pemerintah provinsi karena semakin kecil nilai SiLPA mengindikasikan semakin baik dan sinergisnya perencanaan penganggaran dengan realisasinya.

C) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, merupakan selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto pada tahun berkenaan. SILPA juga merupakan pembiayaan yang sengaja direalisasikan pada akhir tahun sebelumnya untuk operasionalisasi awal tahun. Analisis SILPA bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Besaran sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Tangerang didapatkan dari selisih saldo kas neraca daerah yang dihitung berdasarkan jumlah kas dan setara kas daerah dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan. Dalam

kurun waktu tahun 2019 hingga 2023, besaran sisa lebih (riil) pembiayaan di kabupaten ini menunjukkan besaran yang selalu meningkat.



Gambar 2.303  
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2024  
Sumber: LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2025

2.2.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk memberikan pendanaan kepada program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun anggaran 2019-2023 maka dapat disusun analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2025-2029.

Sebelum dilakukan alokasi dana ke berbagai pos pembelanjaan dan pengeluaran, besaran tiap sumber penerimaan memperhatikan peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, meliputi:

- a. Penerimaan retribusi pajak diutamakan alokasi dana kepada program yang berkaitan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi pajak diambil
- b. Penerimaan dana alokasi umum diutamakan bagi belanja umum, pegawai, dan operasional rutin pemerintah
- c. Penerimaan dana alokasi khusus diprioritaskan sesuai dengan tujuan pendanaan
- d. Penerimaan dana bagi hasil dialokasikan untuk perbaikan layanan dan perbaikan lingkungan

### 2.2.3.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menurut Lapangan Usaha

Berdasarkan perhitungan proyeksi yang mengacu pada rata-rata pertumbuhan tahunan, PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang diperkirakan akan tumbuh dari 113.998,21 miliar rupiah pada tahun 2024, menjadi 147.870,29 miliar rupiah di tahun 2030, dengan laju pertumbuhan rata-rata tahunan hampir mencapai 5%. Beberapa sektor yang mengalami peningkatan signifikan dan mendominasi adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.52  
Proyeksi PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030 (dalam Miliar Rupiah)

| Lapangan Usaha |                                                               | Realisasi (dalam miliar rupiah) |           |           |           |           |           |           |           | Proyeksi (dalam miliar rupiah) |           |           |           |           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                                                               | 2017                            | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024**    | 2025                           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 5.339,40                        | 5.498,45  | 5.622,08  | 5.781,50  | 5.732,64  | 5.863,37  | 5.964,17  | 5.947,36  | 6.039,69                       | 6.133,45  | 6.228,67  | 6.325,36  | 6.423,56  | 6.523,28  |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                   | 35,87                           | 37,92     | 38,79     | 36,50     | 33,05     | 29,02     | 29,04     | 30,44     | 29,73                          | 29,05     | 28,37     | 27,71     | 27,07     | 26,44     |
| C              | Industri Pengolahan                                           | 33.887,15                       | 34.778,08 | 35.890,71 | 32.752,13 | 34.147,21 | 36.003,68 | 38.528,02 | 40.305,36 | 41.316,54                      | 42.353,08 | 43.415,63 | 44.504,84 | 45.621,37 | 46.765,92 |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 1.408,41                        | 1.490,37  | 1.427,30  | 1.251,07  | 1.397,36  | 1.475,50  | 1.468,83  | 1.271,76  | 1.253,35                       | 1.235,21  | 1.217,33  | 1.199,71  | 1.182,35  | 1.165,23  |
| E              | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 70,53                           | 74,19     | 79,17     | 85,98     | 90,97     | 92,21     | 97,45     | 99,33     | 104,31                         | 109,54    | 115,03    | 120,80    | 126,85    | 133,21    |
| F              | Konstruksi                                                    | 10.909,63                       | 11.802,04 | 12.916,15 | 12.491,21 | 13.985,16 | 15.139,01 | 15.402,35 | 16.323,70 | 17.290,99                      | 18.315,60 | 19.400,92 | 20.550,55 | 21.768,31 | 23.058,23 |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10.113,12                       | 10.991,87 | 11.675,61 | 11.244,17 | 11.449,34 | 11.823,97 | 12.395,24 | 13.131,18 | 13.630,33                      | 14.148,46 | 14.686,28 | 15.244,54 | 15.824,03 | 16.425,54 |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                  | 2.461,27                        | 2.697,43  | 2.955,03  | 2.797,73  | 3.074,77  | 3.316,51  | 3.511,11  | 3.723,23  | 3.950,03                       | 4.190,64  | 4.445,90  | 4.716,72  | 5.004,03  | 5.308,85  |



| Lapangan Usaha                 |                                                                 | Realisasi (dalam miliar rupiah) |           |           |           |           |            |            |            | Proyeksi (dalam miliar rupiah) |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                |                                                                 | 2017                            | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022       | 2023       | 2024**     | 2025                           | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |
| I                              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.302,58                        | 1.414,83  | 1.525,99  | 1.440,15  | 1.504,19  | 1.629,58   | 1.775,02   | 1.937,37   | 2.050,42                       | 2.170,06   | 2.296,69   | 2.430,70   | 2.572,53   | 2.722,64   |
| J                              | Informasi dan Komunikasi                                        | 4.436,55                        | 4.807,00  | 5.272,80  | 5.753,68  | 6.051,14  | 6.465,40   | 7.069,44   | 7.527,07   | 8.117,52                       | 8.754,28   | 9.440,99   | 10.181,57  | 10.980,25  | 11.841,57  |
| K                              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 4.128,68                        | 4.659,19  | 4.692,76  | 4.765,93  | 5.055,38  | 5.399,38   | 5.373,70   | 5.421,83   | 5.637,04                       | 5.860,79   | 6.093,41   | 6.335,28   | 6.586,74   | 6.848,19   |
| L                              | Real Estat                                                      | 6.385,00                        | 7.681,62  | 8.410,61  | 8.575,46  | 8.838,72  | 9.297,47   | 9.780,36   | 10.301,27  | 11.029,77                      | 11.809,79  | 12.644,97  | 13.539,22  | 14.496,70  | 15.521,90  |
| M, N                           | Jasa Perusahaan                                                 | 764,55                          | 873,19    | 953,52    | 896,31    | 876,14    | 915,25     | 993,21     | 1.076,52   | 1.130,45                       | 1.187,09   | 1.246,56   | 1.309,02   | 1.374,60   | 1.443,47   |
| O                              | Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1.175,56                        | 1.332,18  | 1.448,75  | 1.443,24  | 1.432,30  | 1.447,94   | 1.493,84   | 1.887,52   | 2.019,62                       | 2.160,97   | 2.312,20   | 2.474,02   | 2.647,17   | 2.832,44   |
| P                              | Jasa Pendidikan                                                 | 1.844,48                        | 2.146,00  | 2.324,12  | 2.338,53  | 2.312,76  | 2.312,25   | 2.468,24   | 2.641,30   | 2.780,32                       | 2.926,67   | 3.080,71   | 3.242,86   | 3.413,55   | 3.593,22   |
| Q                              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 333,07                          | 400,78    | 445,38    | 465,03    | 507,53    | 522,45     | 569,05     | 644,33     | 708,02                         | 778,01     | 854,92     | 939,43     | 1.032,29   | 1.134,34   |
| R,S,T, U                       | Jasa Lainnya                                                    | 1.110,60                        | 1.326,26  | 1.450,39  | 1.361,78  | 1.380,70  | 1.487,98   | 1.651,37   | 1.728,64   | 1.841,43                       | 1.961,57   | 2.089,55   | 2.225,89   | 2.371,11   | 2.525,82   |
| Produk Domestik Regional Bruto |                                                                 | 82.183,60                       | 92.011,40 | 97.129,16 | 93.480,40 | 97.869,36 | 103.220,97 | 108.570,44 | 113.998,21 | 118.929,55                     | 124.124,23 | 129.598,15 | 135.368,23 | 141.452,53 | 147.870,29 |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

#### 2.2.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

##### A) Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam penggerakan struktur APBD. Pendapatan adalah sumber pendanaan atau roda yang menggerakkan penyelenggaraan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Pendapatan daerah didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

##### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen penting dalam pendapatan daerah yang dapat menentukan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Arah kebijakan daerah pendorong kenaikan PAD Kabupaten Tangerang antara lain:

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.
- c. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak bisa dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola dalam rangka meningkatkan PAD
- d. Optimalisasi kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
- e. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data seluruh potensi sumber pendapatan daerah.
- f. Peningkatan peran dan fungsi petugas pelayanan dan pengamatan potensi yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- g. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah.
- h. Pengoptimalan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
- i. Peningkatan pelayanan publik dalam hal kecepatan pelayanan pembayaran maupun dari kemudahan untuk memperoleh informasi.
- j. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah.
- k. Penerapan pola insentif dan disinsentif.
- l. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung peningkatan pendapatan daerah.

##### 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer atau dana perimbangan merupakan dana yang bertujuan untuk pelaksanaan desentralisasi atau mempersempit jarak ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pendapatan transfer meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak.

Arah kebijakan daerah yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan transfer Kabupaten Tangerang antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam rangka alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Mengintensifikan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga tingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan
- c. Mengoptimalkan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat dalam

memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berada di Kabupaten Tangerang, serta mendukung pencapaian visi dan misi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dana tersebut meliputi dana hibah, baik dari kementerian, lembaga, maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana darurat, dan dana lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan daerah yang dilakukan untuk meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dengan kementerian lembaga.

Berdasarkan capaian kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, maka pendapatan sampai dengan tahun 2029 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi.

Tabel 2.53  
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030

| Kode    | Uraian                                                                    | Baseline 2024        | Proyeksi          |                   |                   |                   |                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                                           |                      | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
| 4       | PENDAPATAN DAERAH                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4:01    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 4.616.874.819.974,54 | 4.829.025.720.935 | 4.975.700.000.000 | 5.196.850.000.000 | 5.499.000.000.000 | 5.638.125.000.000 |
| 4:01:01 | Pajak Daerah                                                              | 3.615.835.888.430    | 3.843.600.000.000 | 4.035.700.000.000 | 4.240.850.000.000 | 4.525.000.000.000 | 4.638.125.000.000 |
| 4:01:02 | Retribusi Daerah                                                          | 210.912.730.996      | 194.899.255.391   | 183.000.000.000   | 188.000.000.000   | 200.000.000.000   | 220.000.000.000   |
| 4:01:03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 60.606.042.461       | 67.312.451.838    | 62.000.000.000    | 63.000.000.000    | 64.000.000.000    | 65.000.000.000    |
| 4:01:04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 729.520.158.087,54   | 723.214.013.706   | 695.000.000.000   | 705.000.000.000   | 710.000.000.000   | 715.000.000.000   |
| 4:02    | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 3.883.641.267.461    | 3.543.189.648.887 | 3.543.189.648.887 | 3.543.189.648.887 | 3.543.189.648.887 | 3.543.189.648.887 |
| 4:02:01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      |                      | 3.184.669.699.000 | 3.184.669.699.000 | 3.184.669.699.000 | 3.184.669.699.000 | 3.184.669.699.000 |
| 4:02:02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          |                      | 358.519.949.887   | 358.519.949.887   | 358.519.949.887   | 358.519.949.887   | 358.519.949.887   |
| 4:03    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 5.394.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4:03:03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                      | 4.829.025.720.935 | 4.975.700.000.000 | 5.196.850.000.000 | 5.499.000.000.000 | 5.638.125.000.000 |
|         | Jumlah Pendapatan                                                         | 8.505.910.087.435,54 | 8.372.215.369.822 | 8.518.889.648.887 | 8.740.039.648.887 | 9.042.189.648.887 | 9.181.314.648.887 |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Penyusunan proyeksi keuangan Kabupaten Tangerang didasarkan pada kinerja dalam lima tahun terakhir dan target pendapatan asli daerah pada RPJMD tahun 2024 - 2029 dari instansi terkait. Selain itu, dalam penyusunan proyeksi ini juga menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Optimalisasi sektor perdagangan dan jasa wilayah Kabupaten Tangerang sebagai kawasan penyangga Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan pendapatan dapat terjadi seiring dengan pergeseran pertumbuhan pusat-pusat perkotaan.
- Optimalisasi pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pusat transportasi dan logistik nasional yang mendorong perekonomian wilayah khususnya pendapatan daerah

B) Kebijakan dan Proyeksi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah bertujuan untuk memberikan dorongan atau stimulan terhadap pengembangan ekonomi daerah secara makro dalam kerangka pengembangan yang memberikan efek *multiplier* kepada kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Tangerang terdiri atas:

- a. Belanja wajib dan mengikat ditentukan sesuai dengan perundang-undangan;
- b. Belanja program dan kegiatan diprioritaskan terhadap hal-hal yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memiliki efek *multiplier* dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- c. Belanja pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah ditentukan sesuai fungsi dan tugas pencapaian sasaran Perangkat Daerah dan Pembangunan daerah;
- d. Rasionalisasi terhadap belanja personil daerah secara selektif;
- e. Mengikuti *mandatory spending* yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan meliputi alokasi anggaran pendidikan, alokasi anggaran kesehatan, dana transfer umum, serta alokasi dana desa.

Tabel 2.54  
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030

| Kode    | Uraian                                     | Baseline 2024       | Proyeksi          |                   |                   |                   |                   |
|---------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                            |                     | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
| 5       | BELANJA                                    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5:01    | BELANJA OPERASI                            | 5.834.315.106.367   | 6.025.870.362.449 | 6.180.092.220.677 | 6.227.305.677.335 | 6.395.502.052.188 | 6.295.502.052.188 |
| 5:01:01 | Belanja Pegawai                            | 2.406.476.664.779   | 2.805.311.576.632 | 2.880.935.285.540 | 2.880.935.285.540 | 2.880.935.285.540 | 2.880.935.285.540 |
| 5:01:02 | Belanja Barang dan Jasa                    | 3.014.360.678.622   | 2.763.849.204.330 | 2.881.768.747.773 | 2.925.857.185.162 | 2.945.857.185.162 | 2.945.857.185.162 |
| 5:01:05 | Belanja Hibah                              | 396.279.562.966.00  | 436.792.287.368   | 397.470.893.245   | 400.595.912.514   | 548.792.287.367   | 448.792.287.367   |
| 5:01:06 | Belanja Bantuan Sosial                     | 17.198.200.000.00   | 19.917.294.119    | 19.917.294.119    | 19.917.294.119    | 19.917.294.119    | 19.917.294.119    |
| 5:02    | BELANJA MODAL                              | 1.990.722.872.612   | 1.576.196.389.334 | 1.550.628.735.710 | 1.703.550.279.052 | 1.807.888.904.199 | 2.033.701.404.198 |
| 5:02:01 | Belanja Modal Tanah                        | 391.732.280.665     | 164.207.760.806   | 138.640.107.182   | 120.844.091.105   | 85.717.477.439    | 85.717.477.439    |
| 5:02:02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 535.315.347.072     | 301.368.823.256   | 301.368.823.256   | 383.104.289.599   | 443.923.334.862   | 506.829.584.862   |
| 5:02:03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 320.580.002.197     | 419.511.745.882   | 419.511.745.882   | 457.632.650.940   | 657.632.650.940   | 657.632.650.940   |
| 5:02:04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 708.059.201.545     | 657.496.997.282   | 657.496.997.282   | 679.940.417.994   | 593.144.120.086   | 693.144.120.086   |
| 5:02:05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 29.492.455.730      | 26.055.698.667    | 26.055.698.667    | 50.558.964.487    | 16.001.455.944    | 78.907.705.944    |
| 5:02:06 | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 5.543.585.403       | 7.555.363.441     | 7.555.363.441     | 11.469.864.927    | 11.469.864.927    | 11.469.864.927    |
| 5:03    | BELANJA TIDAK TERDUGA                      | 20.136.742.454      | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    |
| 5:03:01 | Belanja Tidak Terduga                      | 20.136.742.454      | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    | 50.000.000.000    |
| 5:04    | BELANJA TRANSFER                           | 869.579.700.196     | 994.183.692.500   | 1.023.798.692.500 | 1.037.111.192.500 | 994.183.692.500   | 1.023.798.692.500 |
| 5:04:01 | Belanja Bagi Hasil                         | 347.428.524.162     | 442.885.000.000   | 472.500.000.000   | 485.812.500.000   | 442.885.000.000   | 472.500.000.000   |
| 5:04:02 | Belanja Bantuan Keuangan                   | 522.151.176.034     | 551.298.692.500   | 551.298.692.500   | 551.298.692.500   | 551.298.692.500   | 551.298.692.500   |
|         | Jumlah Belanja                             | 7.845.174.721.433   | 8.607.215.369.822 | 8.753.889.648.887 | 8.975.039.648.887 | 9.277.189.648.887 | 9.416.314.648.887 |
|         | Total Surplus/(Defisit)                    | -208.844.334.193,46 | -235.000.000.000  | -235.000.000.000  | -235.000.000.000  | -235.000.000.000  | -235.000.000.000  |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah juga mengalami peningkatan. Penyusunan proyeksi belanja daerah ini sesuai dengan kondisi lima tahun terakhir dengan beberapa asumsi meliputi:

- Optimalisasi penggunaan dana pada belanja operasional seiring dengan perkembangan isu strategis mengenai pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan layanan umum;
- Sementara itu, belanja modal diproyeksikan menurun seiring dengan mulai terpenuhinya kebutuhan pembangunan fisik wilayah di Kabupaten Tangerang. Adapun penggunaan dana dioptimalkan dalam upaya perwujudan pengentasan isu-isu strategis di Kabupaten Tangerang.

C) Kebijakan dan Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutup selisih, baik defisit maupun surplus, antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan terdiri atas dua yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman obligasi, dan hasil penjualan aset daerah serta penerimaan piutang. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran utang. Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang terdiri atas:

- a. Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperbaiki perencanaan dan penganggaran APBD;
- b. Optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat;
- c. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan keuangan daerah.



Tabel 2.55  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026-2030

| Kode    | Uraian                                                | Baseline 2024      | Proyeksi        |                 |                 |                 |                 |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |                                                       |                    | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |
| 6       | PEMBIAYAAN                                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6:01    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                 | 1.009.238.295.068  | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 |
| 6:01:01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya      |                    | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 |
|         | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                          |                    | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 | 250.000.000.000 |
| 6:02    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                | 12.240.000.000.00  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  |
| 6:02:02 | Penyertaan Modal Daerah                               |                    | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  | 15.000.000.000  |
|         | Pinjaman Daerah                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|         | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                         |                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|         | Pembiayaan Netto                                      |                    | 235.000.000.000 | 235.000.000.000 | 235.000.000.000 | 235.000.000.000 | 235.000.000.000 |
|         | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 788.153.857.662,54 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

2.2.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, kerangka pendanaan akan dilakukan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Kapasitas riil direncanakan memiliki prioritas dalam belanja, yaitu Belanja Prioritas I untuk pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan standar pelayanan minimal, Belanja Prioritas II untuk belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan Belanja Prioritas III yaitu Belanja Urusan Lainnya.

Tabel 2.56  
Proyeksi Pengeluaran Kapasitas Riil Kabupaten Tangerang Sesuai Prioritas Tahun 2025-2030

| URAIAN                                                                                                             | BASELINE TAHUN<br>2024 | PROYEKSI             |                      |                      |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    |                        | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                  |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan                                                                                  | 6.980.014.642.469,80   | 7.486.003.292.808,38 | 7.935.687.954.281,79 | 8.412.179.671.884,86 | 8.918.868.365.523,43 | 9.452.932.013.319,04 | 10.015.642.921.571,80 |
| Belanja Prioritas I (Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal) | 2.917.554.691.617,90   | 3.171.571.123.923,14 | 3.445.858.086.684,35 | 3.741.958.986.043,18 | 4.061.531.490.021,67 | 4.406.355.838.026,43 | 4.778.242.133.633,59  |
| Belanja Prioritas II (Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah)                                               | 2.843.721.965.596,33   | 3.020.102.518.219,67 | 3.142.880.907.318,21 | 3.269.154.480.089,18 | 3.400.135.812.851,23 | 3.532.603.322.704,83 | 3.666.323.447.092,49  |
| Belanja Urusan Lainnya                                                                                             | 1.218.737.985.255,57   | 1.294.329.650.665,57 | 1.346.948.960.279,23 | 1.401.066.205.752,50 | 1.457.201.062.650,53 | 1.513.972.852.587,78 | 1.571.281.477.325,32  |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

#### 2.2.3.4 Skema Pendanaan Pembangunan Daerah

Pendanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 yang bersumber dari pendanaan pemerintah dan pendanaan non-pemerintah harus digunakan secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan dampak pembangunan serta mendorong partisipasi swasta / non-pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pendanaan daerah.

Dalam lima tahun terakhir, tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan belanja dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas seiring dengan tuntutan penyediaan fasilitas pelayanan publik. Selain keterbatasan ruang fiskal daerah, ketergantungan pada dana transfer pusat menjadi tantangan utama dalam mendanai proyek pembangunan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan pendanaan yang lebih inovatif, yang dikenal sebagai *creative financing*.

*Creative financing* merujuk pada serangkaian mekanisme pembiayaan non-tradisional yang dirancang untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan instrumen pasar keuangan, serta partisipasi publik dan swasta secara lebih aktif. Mekanisme tersebut tidak sekadar inovasi finansial, melainkan strategi yang berorientasi pada *leveraging asset* dan potensi fiskal dengan tiga prinsip utama berupa diversifikasi sumber pendanaan, mitigasi risiko fiskal, serta efisiensi dan akuntabilitas.

Maka dari itu, diperlukan penajakan berbagai opsi instrumen *creative financing* dalam mendukung program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Skema pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antar pihak. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 22 jenis infrastruktur sosial dan ekonomi yang dapat dikerja samakan dalam KPBU seperti penyediaan hunian, SPAM, pengolahan sampah, dan lain sebagainya. Skema ini memungkinkan sektor swasta untuk berperan dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur publik dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan.

2. Penerbitan Sukuk Daerah

Sukuk atau obligasi syariah merupakan instrumen pembiayaan berbasis aset (*asset-backed securities*) yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah pusat telah sukses menerbitkan sukuk negara, termasuk untuk proyek infrastruktur melalui skema *project-based* sukuk. Inovasi ini berpotensi direplikasi di tingkat daerah.

3. Pinjaman Daerah

Skema pembiayaan alternatif melalui utang daerah dalam suatu perjanjian pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank dan non-bank maupun lembaga lainnya, penerbitan obligasi daerah, dan lain sebagainya. Skema ini dapat dilakukan dengan syarat pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai, tingkat risiko yang terkendali, jenis proyek strategis dan investasi jangka panjang.

4. *Green Bonds*

*Green bonds* adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Green Sukuk dan keberhasilan ini membuka peluang untuk replikasi di tingkat lokal.

5. Pemanfaatan Aset Daerah

Pemanfaatan aset daerah yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan melalui berbagai skema pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS). Selain itu, pemberian penugasan terhadap BUMD dalam melakukan kerja sama *Business-to-Business* (B2B) untuk pemanfaatan aset daerah.

6. *Crowdfunding* (Hibah) untuk Pembangunan Sosial

Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari publik melalui platform digital. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi atau berkolaborasi dengan *platform crowdfunding* untuk mendanai proyek-proyek berdampak langsung, seperti pembangunan fasilitas publik atau program beasiswa.

7. Pendanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Skema pembiayaan alternatif berupa dukungan perusahaan-perusahaan yang dapat disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah, misalnya pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kegiatan konservasi lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, dan lain sebagainya.

8. Pendanaan terkait Pemanfaatan Ruang

Alternatif pendanaan yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan ruang, seperti Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), peralihan hak membangun atau *Transfer Development Rights* (TDR), dan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

9. Pendanaan Berbasis Iklim atau *Green Climate Fund* (GCF)

Penyaluran dana penanggulangan dampak perubahan iklim menjadi salah satu pembiayaan kreatif dalam mendukung pembangunan rendah karbon.

Tabel 2.57  
Analisis Perbandingan Pemanfaatan *Creative Financing* dalam Pembiayaan Pembangunan Daerah

|                          | KPBU (PPP)                                                                                                                                                                                                       | Sukuk Daerah                                                                                                                                                                                                      | <i>Green Bonds</i>                                                                                                                                                                              | <i>Crowdfunding</i>                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Proyek yang Sesuai | Infrastruktur publik skala besar: jalan, jembatan, air minum, sanitasi, transportasi                                                                                                                             | Proyek dengan nilai keagamaan/sosial, pembangunan pasar, rumah sakit, sekolah                                                                                                                                     | Proyek ramah lingkungan: energi terbarukan, pengelolaan sampah, transportasi publik rendah emisi                                                                                                | Proyek kecil atau komunitas: fasilitas umum, UMKM, pendidikan, pelestarian budaya                                                                                                                               |
| Karakteristik Utama      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• jangka panjang</li> <li>• berbasis pengembalian investasi (<i>user charge/tariff</i> atau <i>availability payment</i>)</li> <li>• melibatkan investor swasta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• berbasis aset (<i>underlying asset</i>)</li> <li>• mengacu pada prinsip syariah</li> <li>• diterbitkan oleh Pemda dengan persetujuan pusat dan OJK</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengacu pada standar lingkungan (<i>green taxonomy</i>)</li> <li>• dapat diterbitkan daerah jika memenuhi persyaratan teknis dan regulatif</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• platform daring berbasis kontribusi publik</li> <li>• bersifat sosial atau investasi mikro</li> </ul>                                                                  |
| Kelebihan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengurangi beban APBD langsung</li> <li>• transfer risiko kepada mitra swasta</li> <li>• meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• menarik investor berbasis syariah</li> <li>• potensi meningkatkan inklusi keuangan syariah daerah</li> <li>• dapat memperkuat citra dan nilai religius daerah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• akses pada pasar keuangan berwawasan lingkungan</li> <li>• dapat menarik investor ESG</li> <li>• mendukung target pembangunan rendah karbon</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelibatan masyarakat secara langsung</li> <li>• transparan dan cepat dihipunk</li> <li>• cocok untuk proyek bernilai kecil-menengah</li> </ul>                         |
| Tantangan Implementasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• proses persiapan kompleks dan panjang</li> <li>• membutuhkan SDM dan kajian kelayakan yang kuat</li> <li>• resiko hukum dan kontraktual</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• regulasi ketat dan teknis kompleks</li> <li>• terbatasnya SDM yang memahami sukuk</li> <li>• harus ada aset yang jelas sebagai dasar penerbitan</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• harus memenuhi verifikasi “green”</li> <li>• perlu pelaporan berkelanjutan</li> <li>• proyek harus benar-benar ramah lingkungan</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tidak cocok untuk proyek berskala besar</li> <li>• daya tarik terbatas jika tidak dikomunikasikan dengan baik</li> <li>• perlu platform legal dan akuntabel</li> </ul> |

Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2025

Skema *creative financing* merupakan bentuk inovasi pendanaan pembangunan utamanya pengembangan infrastruktur strategis dan jangka panjang, terdapat beberapa poin penting peluang implementasi skema *creative financing*.

1. Diversifikasi Sumber Pendanaan Pembangunan

Salah satu pilar utama dalam strategi pembiayaan pembangunan daerah adalah diversifikasi sumber pendanaan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi belanja rutin dalam APBD sering kali membatasi ruang fiskal daerah untuk melakukan investasi publik yang bersifat strategis dan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu secara proaktif mengeksplorasi alternatif pendanaan di luar skema konvensional, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta, pemanfaatan aset daerah, atau penerbitan surat utang daerah. Diversifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas fiskal dan memperluas cakupan pembiayaan pembangunan tanpa membebani anggaran secara langsung.

Penerapan pendekatan *blended finance*, yang mengombinasikan dana publik dan swasta, juga memberikan peluang strategis untuk memanfaatkan potensi dana filantropi, pembiayaan berbasis hasil (*results-based financing*), maupun pendanaan dari lembaga keuangan internasional. Di sisi lain, pengembangan ekosistem keuangan daerah, termasuk pasar obligasi daerah dan pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan lokal, menjadi prasyarat penting dalam mendorong diversifikasi sumber dana yang efektif dan berkelanjutan. Strategi ini akan memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dasar, layanan publik, dan program strategis lainnya.

2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Proyek

Tata kelola proyek pembangunan yang efektif merupakan fondasi bagi keberhasilan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif. Skema seperti Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, maupun pembiayaan hijau memerlukan kepastian hukum, transparansi proses, serta akuntabilitas yang tinggi dalam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem pengelolaan proyek menjadi urgensi yang tidak terelakkan apabila pemerintah daerah ingin menjadi aktor yang kredibel di mata investor dan mitra pembangunan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan studi kelayakan, analisis risiko, dan manajemen kontrak menjadi aspek krusial. Selain itu, penyusunan daftar proyek prioritas (*project pipeline*) yang terstruktur dan terbuka akan meningkatkan daya tarik investasi serta mempermudah proses matching dengan skema pembiayaan yang sesuai. Dalam jangka panjang, perbaikan tata kelola proyek tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, tetapi juga memperkuat daya saing daerah sebagai destinasi investasi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pendekatan pembiayaan pembangunan yang inovatif menuntut adanya pergeseran paradigma dari model sentralistik menuju pendekatan kolaboratif. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha bukan hanya relevan dalam konteks sosial-politik, melainkan juga memiliki dimensi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Melalui skema seperti *crowdfunding*, *community bonds*, atau program

*corporate social responsibility* (CSR) yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat menghimpun dana sekaligus memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap program pembangunan.

Peningkatan partisipasi juga memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan legitimasi kebijakan publik. Melibatkan pelaku usaha lokal dalam proyek pembangunan daerah melalui model kolaboratif, baik sebagai penyedia jasa, mitra investasi, maupun konsultan teknis, juga dapat mempercepat alih teknologi dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Di era digital, platform partisipatif berbasis teknologi informasi juga membuka ruang baru untuk pelibatan warga secara real-time dalam proses perencanaan dan penganggaran.

#### 4. Dukungan Kebijakan Nasional dan Regulasi

Keberhasilan implementasi pembiayaan inovatif di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kerangka kebijakan dan regulasi nasional yang mendukung. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah menginisiasi berbagai langkah strategis, seperti pembentukan Komite KPBU, penerbitan Peraturan Presiden terkait pembiayaan infrastruktur non-APBN, serta penguatan kerangka hukum penerbitan obligasi daerah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengembangkan panduan penerbitan green bonds dan mendorong penguatan regulasi pasar modal daerah.

Namun, di sisi lain, masih terdapat sejumlah tantangan seperti ketidakterpaduan antar-regulasi, keterbatasan panduan teknis, serta lambatnya proses sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting, termasuk dalam bentuk penyediaan asistensi teknis, *capacity building*, serta insentif fiskal yang mendorong keberanian daerah untuk berinovasi. Harmonisasi regulasi dan penciptaan ekosistem hukum yang kondusif akan mempercepat penetrasi instrumen *creative financing* dalam kerangka pembangunan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Akan tetapi dalam menjalankan skema *creative financing*, terdapat beberapa risiko dan tantangan utamanya berkaitan dengan kapasitas pemerintah dan dukungan regulasi, yaitu sebagai berikut.

##### 1. Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan mendasar dalam penerapan skema pembiayaan inovatif di daerah adalah terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kekurangan dalam hal keahlian teknis yang diperlukan untuk merancang, mengevaluasi, dan mengelola skema pembiayaan alternatif seperti Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, maupun instrumen pasar modal lainnya. Keterbatasan ini mencakup pemahaman atas analisis kelayakan finansial, manajemen risiko, serta pemrosesan dokumen hukum dan kontrak kompleks.

Selain itu, kelembagaan di tingkat daerah sering belum memiliki unit khusus atau struktur organisasi yang secara permanen mengelola portofolio pembiayaan non-konvensional. Ketidadaan unit semacam ini membuat proses koordinasi internal menjadi tidak efisien dan memperlambat pengambilan keputusan. Tanpa adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM secara sistematis, sulit bagi daerah untuk menjadi mitra yang kredibel dan



kompetitif di mata investor maupun lembaga pembiayaan, sehingga berpotensi menghambat realisasi proyek pembangunan strategis yang berbasis *creative financing*.

## 2. Keterbatasan Aset dan Proyek Layak Finansial

Salah satu prasyarat dalam menarik pembiayaan kreatif adalah keberadaan proyek yang secara finansial layak (*bankable*) dan dapat menarik minat investor atau mitra pembiayaan. Namun, banyak daerah menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek pembangunan yang memenuhi standar kelayakan tersebut. Faktor-faktor seperti skala proyek yang kecil, ketidakpastian pendapatan, atau model bisnis yang belum jelas sering kali menjadi penghalang dalam mengakses skema pembiayaan alternatif.

Di sisi lain, aset milik pemerintah daerah yang berpotensi dimonetisasi atau dijadikan jaminan proyek sering kali belum terinventarisasi secara sistematis, atau menghadapi kendala hukum dan administrasi dalam pemanfaatannya. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam mengembangkan skema seperti *land value capture*, pemanfaatan aset melalui *securitization*, atau penggunaan barang milik daerah sebagai kontribusi non-tunai dalam KPBU. Tanpa pengelolaan aset yang aktif dan strategis, upaya diversifikasi pendanaan melalui mekanisme kreatif akan sulit diwujudkan secara optimal.

## 3. Kepastian Hukum dan Regulasi Teknis

Kerangka hukum dan regulasi yang mendukung merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi *creative financing*. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait pembiayaan alternatif, seperti Peraturan Presiden tentang KPBU dan regulasi OJK tentang penerbitan obligasi daerah, namun di tingkat teknis masih terdapat celah regulatif yang menjadi hambatan. Ketidakjelasan prosedur, tumpang tindih kewenangan antar-instansi, serta kurangnya panduan teknis sering menciptakan ketidakpastian dalam proses perencanaan dan implementasi proyek.

Ketiadaan standar operasional baku untuk skema pembiayaan baru juga menimbulkan risiko hukum bagi pejabat daerah yang mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, keraguan terhadap perlindungan hukum menghambat inisiatif-inisiatif inovatif, meskipun proyek tersebut potensial secara ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan sistem pendampingan hukum yang memadai, agar iklim kelembagaan di daerah lebih kondusif terhadap inovasi dalam pembiayaan pembangunan.

## 4. Tantangan Sosial dan Politik

Di samping aspek teknis dan kelembagaan, tantangan sosial dan politik juga mempengaruhi kelancaran implementasi skema *creative financing*. Persepsi publik terhadap kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta atau penggunaan dana publik untuk proyek berisiko sering kali bersifat skeptis. Ketika komunikasi publik tidak dilakukan secara efektif, potensi resistensi sosial meningkat, terutama jika masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau tidak melihat manfaat langsung dari proyek yang didanai.

Secara politik, dinamika dalam lembaga legislatif daerah juga dapat menjadi faktor penghambat, khususnya apabila terdapat ketidaksepahaman atau resistensi terhadap pendekatan baru dalam

pembiayaan pembangunan. Proses persetujuan proyek yang melibatkan modal swasta atau instrumen utang, seperti obligasi daerah, sering kali menghadapi perdebatan panjang yang tidak selalu berbasis pada analisis ekonomi, melainkan pertimbangan politis jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang transparan dan pendekatan partisipatif yang inklusif agar resistensi sosial-politik dapat diminimalkan dan legitimasi proyek dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi strategis dalam mewujudkan *creative financing* sebagai skema pembiayaan alternatif untuk pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Bappenas (2025)<sup>5</sup> merumuskan beberapa strategi dalam meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah antara lain

- Memperkuat kerangka perencanaan pendanaan/pembiayaan pembangunan daerah melalui alokasi pendanaan berbasis kriteria serta tata kelola yang akuntabel dalam seluruh tahapan mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan, implementasi, dan audit.
- Perluasan sumber-sumber pendanaan melalui dukungan regulasi sesuai peraturan perundang-undangan serta konsolidasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah untuk pendanaan jangka panjang
- Dukungan kebijakan insentif untuk menarik investasi pembiayaan non-pemerintah melalui fasilitasi skema-skema pendanaan yang dilakukan swasta.
- Berkolaborasi lintas sektor (nasional dan global) untuk menarik investasi swasta yang berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan.
- Memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pendanaan proyek-proyek pendanaan APBD dan sumber pendanaan lainnya
- Mengembangkan skema/strategi model bisnis kerja sama pemerintah dan badan usaha

Berdasarkan peluang, tantangan, dan arahan strategis dari kebijakan, maka dari itu dirumuskan poin-poin arah kebijakan dalam menjalankan *creative financing* dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Penguatan Perencanaan dan Identifikasi Proyek Potensial

Langkah awal yang fundamental dalam penerapan skema *creative financing* adalah penguatan sistem perencanaan pembangunan yang mampu mengidentifikasi proyek-proyek potensial dengan kelayakan finansial dan sosial yang tinggi. Proyek semacam ini harus disusun secara sistematis dalam bentuk *project pipeline* yang dapat dijadikan acuan bagi calon investor dan mitra pembiayaan. Penguatan perencanaan ini tidak hanya menyangkut aspek teknokratik, tetapi juga memerlukan integrasi antara proses perencanaan fiskal dan strategi pembiayaan non-konvensional.

Maka dari itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi kelayakan proyek tidak hanya dari sisi manfaat sosial (*social return*), tetapi juga dari aspek keekonomian dan kelayakan komersial (*bankability*). Dalam praktiknya, proyek-proyek prioritas pembangunan seperti infrastruktur transportasi, energi terbarukan, pengelolaan air bersih, dan sanitasi sering kali memiliki

---

<sup>5</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

potensi untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan alternatif. Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, potensi ini dapat dioptimalkan untuk mengurangi beban anggaran dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.

2. Pembentukan Unit Teknis Pendanaan Alternatif

Dalam mendukung implementasi *creative financing* secara terstruktur dan berkelanjutan, perlu dibentuk unit khusus di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas menangani perencanaan, negosiasi, dan pengelolaan pendanaan alternatif. Unit ini berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas perangkat daerah dan sekaligus menjadi *clearing house* bagi proyek-proyek yang potensial untuk dibiayai melalui skema non-APBD. Di beberapa negara, keberadaan *Project Development Facility* (PDF) atau *Public-Private Partnership Unit* (PPPU) telah terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek kreatif secara signifikan. Unit tersebut diharapkan memiliki kewenangan teknis dan administratif untuk melakukan evaluasi dokumen kelayakan, memfasilitasi penyusunan skema pembiayaan, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan calon mitra pembiayaan, baik dari sektor swasta, lembaga donor, maupun pasar modal. Dalam jangka panjang, unit ini dapat memainkan peran strategis sebagai katalisator bagi pengembangan ekosistem *creative financing* yang lebih mapan dan profesional di tingkat daerah.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

Keberhasilan implementasi kebijakan pendanaan inovatif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi reformasi pembiayaan pembangunan. Aparatur daerah perlu dibekali dengan kompetensi teknis yang memadai dalam aspek perencanaan proyek, analisis keuangan, manajemen risiko, serta pemahaman atas kerangka hukum dan regulasi pembiayaan alternatif. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan tematik, lokakarya terpadu, pertukaran pengetahuan antar-daerah (*peer learning*), maupun pendampingan langsung oleh lembaga teknis atau mitra pembangunan. Selain itu, sinergi dengan perguruan tinggi, asosiasi profesional, dan lembaga riset juga dapat dimanfaatkan untuk menyediakan basis pengetahuan yang kuat dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan program *creative financing* secara kredibel dan berkelanjutan.

4. Membangun Kolaborasi Multipihak

Pendekatan *creative financing* pada hakikatnya bersandar pada kolaborasi antar-aktor pembangunan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek berskala besar, terutama yang memerlukan pembiayaan jangka panjang dan kompleksitas teknis tinggi. Oleh karena itu, membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi krusial dalam menciptakan tata kelola kolaboratif yang produktif. Kolaborasi multipihak juga menciptakan ruang bagi inovasi sosial dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. Di sisi lain, keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan akan memperkuat legitimasi dan memperbesar kemungkinan keberhasilan proyek. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi ruang dialog, membentuk forum kemitraan

pembangunan, atau meluncurkan program partisipatif yang mendorong kontribusi nyata dari berbagai pihak dalam kerangka pembiayaan inovatif.

5. Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola

*Creative financing* membawa peluang besar, namun juga menuntut standar tata kelola yang lebih tinggi. Mengingat sebagian skema pembiayaan alternatif bersifat jangka panjang, kompleks, dan melibatkan aktor non-pemerintah, maka transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan menjadi sangat penting. Kegagalan dalam mengelola proyek dengan baik dapat berimplikasi pada risiko fiskal dan reputasi yang signifikan bagi pemerintah daerah. Maka dari itu, sistem pengawasan internal perlu diperkuat, termasuk dalam aspek audit proyek, pengendalian mutu, serta pelaporan kinerja secara berkala. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *value for money* (VfM) dan *good governance* harus dijadikan acuan dalam pemilihan mitra, penentuan skema pembiayaan, hingga penilaian dampak pembangunan. Keterbukaan informasi kepada publik dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan proyek juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan keberlanjutan inisiatif *creative financing* di tingkat daerah.

*Creative financing* tidak hanya sekadar pendekatan teknis pembiayaan, tetapi merupakan strategi pembangunan yang memadukan inovasi kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan optimalisasi aset daerah. Dalam konteks penyusunan RPJMD, integrasi pendekatan *creative financing* dapat menjadi instrumen kunci untuk mendorong percepatan pembangunan. Melalui pemanfaatan skema *creative financing* (e.g. KPBU, sukuk, *green bond*, *crowdfunding*, dan lain sebagainya), pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperkuat kapasitas pembiayaan dan tata kelola pembangunan. Keberhasilan implementasinya ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, serta komitmen politik terhadap inovasi. Dengan mengintegrasikan kerangka pendanaan inovatif ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat membangun fondasi pembangunan jangka menengah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

## 2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis permasalahan dan isu strategis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Tangerang lima tahun ke depan. Rumusan permasalahan dan isu ini menjadi dasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk menjaga keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan pembangunan yang dicanangkan.

### 2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan merupakan formulasi yang tersusun atas *gap* kondisi capaian pembangunan dan hasil jaringan permasalahan yang dirasakan oleh perangkat daerah. Analisis permasalahan digunakan untuk mengetahui kondisi yang menghambat pencapaian pembangunan Kabupaten Tangerang.

#### 2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Geografi dan demografi merupakan dua hal yang saling terkait dan mendasari pembangunan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, kondisi geografi dan demografi perlu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Tangerang.

##### A) Permasalahan Geografi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang strategis yang dilewati oleh jalur nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Letaknya yang strategis berdampak pada tingginya pertumbuhan wilayah ini. Pertumbuhan metropolitan Jabodetabek berpengaruh erat pada tumbuhnya perkotaan di wilayah ini. Di sisi lain pertumbuhan ini berakibat pada tingginya alih fungsi lahan dan pertumbuhan lahan terbangun di wilayah ini. Hal tersebut dapat berakibat pada makin menurunnya kualitas lingkungan.

Pesatnya pertumbuhan perkotaan ini dapat meningkatkan risiko bencana di wilayah ini seperti bencana banjir maupun abrasi. Peningkatan risiko kebencanaan ini dapat berpengaruh erat pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain mengancam kebencanaan, alih fungsi lahan pertanian dapat mengancam ketahanan pangan di wilayah ini.

##### B) Permasalahan Demografi

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini cenderung terpusat pada kawasan perkotaan seperti Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Kelapa Dua, dan Kecamatan Sepatan. Sedangkan di wilayah lain proporsi penduduk cenderung sedang. Tingginya penduduk di wilayah ini berakibat pada ketidaksesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, memerlukan perencanaan dan penataan yang matang untuk mengembangkan Kabupaten Tangerang.

Penduduk di wilayah ini memiliki rasio jenis kelamin yang berkisar di angka 100 yang berarti jumlah perempuan dan laki-laki di wilayah ini cenderung setara. Sedangkan jika dilihat dari distribusi usia, usia penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh penduduk usia muda atau piramida penduduk ekspansif. Hal ini menunjukkan bonus demografi yang sedang berlangsung di wilayah ini. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang.

#### 2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perekonomian Kabupaten Tangerang disokong oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi, pertumbuhan industri pengolahan cenderung melemah atau mengalami deindustrialisasi dini. Pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Tangerang cenderung stagnan ditandai dengan laju

pertumbuhan ekonomi yang cenderung sama dari tahun ke tahun. Selain itu, indikator Persentase Penduduk Miskin cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Permasalahan lainnya adalah ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan dengan indikator persentase penduduk berpendapatan Desil 1-4 (atau 40% terendah) sebesar 35,2% atau sekitar 1,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Kualitas masyarakat Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sayangnya nilai tersebut masih jauh jadi kondisi Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Tangerang. Selain itu, di Kabupaten Tangerang masih terdapat balita dengan gizi buruk dan kurang gizi. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi peningkatan kualitas gizi balita. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang masih belum optimal.

#### 2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing

Aspek daya saing Kabupaten Tangerang dilihat dari empat unsur yaitu ekonomi daerah, SDM, infrastruktur daerah, iklim investasi, serta riset dan inovasi. Berdasarkan perhitungan indeks daya saing daerah, Kabupaten Tangerang memiliki komponen pilar rendah pada unsur keterampilan, pasar tenaga kerja, serta sistem keuangan jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional. Hal ini menandakan bahwa produktivitas Kabupaten Tangerang terhadap tiga unsur tersebut masih belum optimal. Jika melihat dari unsur ekonomi daerah, Kabupaten Tangerang memiliki rasio kewirausahaan daerah dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita yang stagnan menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat belum meningkat.

Aspek daya saing dari unsur SDM, dapat dilihat dari data angka partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja serta proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak bekerja. Dari unsur infrastruktur dan iklim investasi, dapat dilihat dari angka kriminalitas yang tertangani meningkat, bahwa Kabupaten Tangerang memiliki masalah dalam ketenteraman dan keamanan masyarakat.

Sementara, dari unsur riset dan inovasi, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM peneliti, baik secara jumlah fungsional maupun keahlian dan keterampilan yang sesuai kebutuhan riset. Tidak hanya kualitas dan kuantitas SDM, terbatasnya anggaran daerah dalam pengadaan riset memengaruhi keberlanjutan kegiatan. Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan riset dan inovasi adalah hambatan kultural birokrasi, kolaborasi antar pihak belum optimal, serta hilirisasi dan komersialisasi yang belum optimal. Dibutuhkan penyelesaian yang dilakukan secara maksimal sehingga riset dan inovasi dapat menjadi peluang daerah dalam menyongsong era globalisasi dan transformasi digital. Untuk mendukung upaya tersebut, perlu penciptaan lingkungan riset yang kondusif melalui penetapan regulasi, dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyelesaian masalah-masalah di atas perlu diutamakan, mengingat kelima unsur tersebut merupakan dasar dari kemampuan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tangerang.

#### 2.3.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tangerang memiliki beberapa permasalahan yang terbagi dalam aspek pelayanan umum meliputi fokus pelayanan urusan wajib dasar, fokus pelayanan urusan wajib non dasar,

fokus layanan urusan pilihan, fokus pendukung urusan, fokus penunjang urusan, dan fokus pengawas urusan. Penjelasan permasalahan aspek pelayanan umum terdapat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.58  
Permasalahan Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Tangerang

| No.                                | Bidang Urusan | Masalah                                                                  | Indikasi Masalah                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar |               |                                                                          |                                                                                                                          |
| 1                                  | Pendidikan    | Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan | Masih kurangnya kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi minimal                         |
|                                    |               |                                                                          | Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata                                                                 |
|                                    |               |                                                                          | Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan murah                                             |
|                                    |               |                                                                          | Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat tentang pentingnya Pendidikan                                       |
|                                    |               |                                                                          | Belum tersedianya kebijakan daerah yang terbaru                                                                          |
|                                    |               | Belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik                      | Menurunnya karakter siswa dalam hal spiritual, kreativitas, kemandirian, nalar kritis, kolaborasi dan kebhinekaan global |
|                                    |               |                                                                          | Masih terjadi perundungan, kekerasan dan penyalahgunaan narkoba di Satuan Pendidikan                                     |
|                                    |               | Belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat                        | Minat baca masyarakat yang masih rendah                                                                                  |
|                                    |               |                                                                          | Kurangnya akses masyarakat terhadap buku fisik/digital                                                                   |
|                                    |               | Kurangnya ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas    | Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal                                      |
| 2                                  | Kesehatan     | Belum meratanya distribusi fasilitas kesehatan sesuai standar            | Belum optimalnya integrasi layanan kesehatan dan koordinasi lintas sektor                                                |
|                                    |               |                                                                          | Masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan sarana prasarana, akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar       |
|                                    |               |                                                                          | Pertambahan penduduk yang tidak terduga melebihi ketersediaan alat kesehatan di suatu wilayah                            |
|                                    |               |                                                                          | Kurangnya kesesuaian dan ketersediaan peralatan medis dan sediaan obat                                                   |
|                                    |               |                                                                          | Sistem informasi kesehatan yang kurang terintegrasi                                                                      |
|                                    |               |                                                                          |                                                                                                                          |

| No. | Bidang Urusan                     | Masalah                                                                                                        | Indikasi Masalah                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan                                                | Masih terdapat kesenjangan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan                                                                                                                               |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum optimalnya rekrutmen tenaga kesehatan spesialis                                                                                                                     |
|     |                                   |                                                                                                                | Masih banyak terjadi pengunduran diri tenaga kesehatan spesialis (PNS) dari RS pemerintah                                                                                 |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum optimalnya kompetensi SDM kesehatan                                                                                                                                 |
|     |                                   | Belum optimalnya pelayanan jaminan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat                                  | Kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan                                                                                                  |
|     |                                   |                                                                                                                | PHK dari perusahaan menyebabkan peralihan covering jaminan kesehatan bagi pekerja                                                                                         |
|     |                                   | Belum optimalnya tingkat kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat                                          | Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat (PHBS)                                                                                             |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum adanya fasilitator masyarakat/program yang mendukung pembentukan lingkungan sehat                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                | Rasio jumlah fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak belum sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk                                                                     |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil                                                                                                              |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan neonatal                                                                                                                    |
|     |                                   |                                                                                                                | Kurangnya asupan pangan bergizi pada masa kehamilan dan 1000 HPK                                                                                                          |
|     |                                   |                                                                                                                | Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular                                                                                                        |
|     |                                   |                                                                                                                | Belum ada sistem monitoring stunting yang terintegrasi                                                                                                                    |
|     |                                   |                                                                                                                | Perencanaan obat dengan metode konsumsi dan morbiditas untuk menganalisis kebutuhan obat, tetapi proses perencanaan belum berjalan dengan optimal.                        |
| 3   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penataan bangunan dan pemanfaatan lahan yang belum terintegrasi dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Masih banyak bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang                                                                                                |
|     |                                   |                                                                                                                | Masih banyaknya bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh                                                                                |
|     |                                   |                                                                                                                | Kurangnya pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya                                                                                              |

| No. | Bidang Urusan                                              | Masalah                                                                | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                    | Belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak     | Belum adanya konsep penataan bangunan dan lingkungan yang terintegrasi.                                                                                                                         |
|     |                                                            |                                                                        | Belum tersedianya data spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang                                                                                                          |
|     |                                                            |                                                                        | Menurunnya rasio rumah layak huni menjadi 87,25 persen di tahun 2023                                                                                                                            |
|     |                                                            |                                                                        | Belum optimalnya ketersediaan prasarana sarana umum perumahan dan Kawasan permukiman                                                                                                            |
|     |                                                            | Belum terpenuhinya dan meratanya prasarana permukiman yang memadai     | Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah                                                                                                                                              |
|     |                                                            |                                                                        | Belum optimalnya regulasi penanganan dan fungsi pengawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni                                                                                          |
|     |                                                            |                                                                        | Belum optimalnya pendataan wilayah dan infrastruktur perumahan dan permukiman                                                                                                                   |
|     |                                                            |                                                                        | Kecenderungan masyarakat menggunakan sarana-prasarana mandiri dan alami yang tidak sesuai dengan standar                                                                                        |
|     |                                                            | Berkembangnya industri rumah tangga polutif di kawasan perumahan padat | Belum optimalnya regulasi pengawasan (mekanisme insentif-disinsentif) untuk kegiatan industri dan permukiman                                                                                    |
|     |                                                            |                                                                        | Belum optimalnya pendataan wilayah kawasan permukiman dan industri rumah tangga yang sesuai/tidak sesuai standar                                                                                |
| 5   | Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | Belum optimalnya pencegahan gangguan kamtibmas                         | Belum optimalnya pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui deteksi dini dan cegah dini dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat |
|     |                                                            | Belum optimalnya penindakan gangguan kamtibmas                         | Belum optimalnya kegiatan patroli                                                                                                                                                               |
|     |                                                            |                                                                        | Belum optimalnya tindak penertiban gangguan keamanan                                                                                                                                            |
|     |                                                            | Belum optimalnya penanganan konflik di masyarakat                      | Belum terbentuknya forum di tingkat kelurahan dan desa                                                                                                                                          |
|     |                                                            |                                                                        | Masih rendahnya pelayanan kebencanaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana                                                                                                      |
|     |                                                            |                                                                        | Pelaksanaan kewaspadaan diri daerah belum optimal                                                                                                                                               |
|     |                                                            | Kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat                             | Masih ada masyarakat yang menyalahgunakan narkoba                                                                                                                                               |
|     |                                                            |                                                                        | Kurang optimalnya tindak pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba                                                                          |

| No. | Bidang Urusan | Masalah                                                                               | Indikasi Masalah                                                                                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | Sosial        | Belum optimalnya pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa | Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai tantangan zaman                                                                    |
|     |               |                                                                                       | Masih kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antar suku serta umat beragama                                                            |
|     |               | Belum optimalnya pemahaman politik dalam negeri                                       | Belum maksimalnya pengamalan nilai-nilai pancasila di masyarakat                                                                                  |
|     |               |                                                                                       | Masih adanya organisasi/keompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi pancasila sebagai dasar negara dan ingin mengganti dengan ideologi lain |
|     |               | Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan PPKS               | Masih rendahnya fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial                                                                 |
|     |               |                                                                                       | Belum optimalnya fungsi rumah singgah/UPT                                                                                                         |
|     |               |                                                                                       | Penyediaan sarana prasarana pendukung di rumah singgah/UPT masih kurang                                                                           |
|     |               | Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan PPKS                                        | Kurang optimalnya kualitas dan kuantitas SDM pada bidang sosial                                                                                   |
|     |               |                                                                                       | Terbatasnya Jumlah Pekerja Sosial (Peksos) dan Penyuluh Sosial (Pensos) dalam penanganan PPKS (berdasarkan analisa beban kerja                    |
|     |               |                                                                                       | Masih rendahnya SDM PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PPKS                                                              |
|     |               | Belum optimalnya ketersediaan data administrasi terkait layanan PPKS                  | Belum optimalnya koordinasi lintas lembaga atau sektor                                                                                            |
|     |               |                                                                                       | Pergantian operator desa tanpa disertai <i>knowledge transfer</i>                                                                                 |
|     |               |                                                                                       | Adanya kesulitan untuk mengikuti permintaan dari pusat mengenai penyediaan data (sumber data kemiskinan beragam)                                  |
|     |               |                                                                                       | Masih sulit mendapatkan data PPKS yang akurat                                                                                                     |
|     |               |                                                                                       | Adanya stigma negatif dan rasa malu dari keluarga                                                                                                 |
|     |               |                                                                                       | Ketersediaan data <i>By Name By Addres</i> (BNBA) belum tervalidasi secara <i>update</i>                                                          |
|     |               | Masih rendahnya bantuan sosial dan terbatasnya akses permodalan bagi PPKS             | Belum terbangunnya sistem data terpadu sebagai basis data dalam penyelenggaraan penanganan PPKS                                                   |
|     |               |                                                                                       | Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial                   |
|     |               |                                                                                       | Regulasi/kebijakan yang terlalu rumit membatasi PPKS untuk mendapatkan akses permodalan                                                           |

| No.                                    | Bidang Urusan                                | Masalah                                                                                         | Indikasi Masalah                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum optimalnya peran dan kontribusi seluruh perangkat daerah                                                                                                               |
| Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar |                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| 1                                      | Tenaga Kerja                                 | Belum optimalnya kompetensi dan daya saing ketenagakerjaan serta mismatch dengan lapangan kerja | Kompetensi pencari kerja yang masih rendah                                                                                                                                   |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Masih banyak pencari kerja yang tidak terserap di dunia kerja                                                                                                                |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum optimalnya kerja sama pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja pada perusahaan pemberi kerja                                                                        |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Masih banyak perusahaan yang tidak menyampaikan informasi lowongan dan penempatan tenaga kerja                                                                               |
|                                        |                                              | Belum optimalnya sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan                             | Keterbatasan pendataan dan sistem informasi layanan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja                                                                             |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum optimalnya sistem birokrasi dalam pelayanan jamsostek                                                                                                                  |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Masih tingginya kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan buruh                                                                                                     |
|                                        |                                              | Belum optimalnya kelembagaan dan sumber daya dalam pengelolaan tenaga kerja                     | Belum optimalnya digitalisasi pelayanan publik                                                                                                                               |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada perusahaan/pekerja/serikat pekerja/serikat buruh                                                |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum tersedianya data baku jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja formal dan non formal dan jumlah pengangguran yang valid dan terukur                                      |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Masih terbatasnya kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja                                                                                                                   |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Terbatasnya kuantitas tenaga fungsional mediator (tidak sebanding dengan luasan pekerjaan yang ditangani)                                                                    |
| 2                                      | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan anak-anak                       | Belum tercapainya sasaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak                                                                                                   |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum tercapainya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif                                                                                 |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Adanya Keterbatasan jumlah anak yang ikut serta pelatihan kreativitas anak                                                                                                   |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum optimalnya kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) karena masa transisi dari P2WKSS (Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) |
|                                        |                                              |                                                                                                 | Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kreatif, pendidikan, sosial, hukum dan politik tingkat kecamatan, desa dan kelurahan                            |

| No. | Bidang Urusan | Masalah                                                                                         | Indikasi Masalah                                                                                                                   |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya revitalisasi Gerakan Sayang Ibu di tingkat kecamatan, Rumah Sakit dan perusahaan                                  |
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan keterwakilan dalam pemerintahan                                      |
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan                                                                      |
|     |               | Terbatasnya kuantitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak     | Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                    |
|     |               |                                                                                                 | Rendahnya jumlah forum anak tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan                                                               |
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya koordinasi antara sekolah dengan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)                                              |
|     |               | Belum optimalnya kualitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak | Kurangnya pemahaman aparatur lintas sektoral dan desa/kelurahan dalam memahami pengetahuan tentang perlindungan perempuan dan anak |
|     |               |                                                                                                 | Rendahnya SDM Gugus Tugas Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terlatih KHA                                        |
|     |               |                                                                                                 | Rendahnya SDM Sekolah Ramah Anak (SRA) tingkat SD/MTs, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang terlatih KHA (Konvensi Hak Anak)                |
|     |               |                                                                                                 | Rendahnya SDM Forum Anak Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang terlatih KHA dan peran sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) |
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya kegiatan Serikat Perempuan Kepala Keluarga tingkat Kecamatan karena SDM belum terlatih                            |
|     |               | Belum optimalnya komunikasi antar pihak dalam program pemberdayaan perempuan dan anak-anak      | Kurangnya sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                       |
|     |               |                                                                                                 | Masih kurangnya koordinasi terkait pengumpulan data pengelolaan data gender dan anak                                               |
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya sinergitas Perangkat Daerah terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)             |
|     |               | Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan                       | Banyak anak-anak yang belum ikut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Anak Nasional tingkat kabupaten                                |
|     |               |                                                                                                 | Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang PERCANTIK (Perempuan Cerdas, Apresiatif, Negosiatif, Talen Inovatif, dan Kreatif)    |

| No. | Bidang Urusan | Masalah                                                                          | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                                  | Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang Pusat Pembelajaran Keluarga                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |               |                                                                                  | Belum optimalnya keterlibatan laki-laki dalam pemberdayaan perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |               | Belum optimalnya pembinaan penanganan kasus pemberdayaan perempuan dan anak-anak | Terbatasnya kapasitas anggaran daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                                                                                                                                                                                                       |
| 3   | Pangan        | Cadangan pangan daerah yang terbatas dan belum optimal                           | Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat belum optimal sehingga nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang untuk jenis pangan kacang-kacangan, biji berminyak, umbi-umbian, gula, sayur dan buah masih di bawah skor PPH yang ideal.                                                                                         |
|     |               |                                                                                  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Tangerang belum memenuhi target kebutuhan CPPD berdasarkan perhitungan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah sebanyak 204,56 Ton/Tahun dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pengadaan CPPD. |
|     |               |                                                                                  | Masih adanya pangan segar yang tidak aman beredar di masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |               | Kurang meratanya cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya                  | Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik, termasuk pasokan pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit, daerah rentan rawan pangan, dan daerah terdampak bencana alam.                                                                                                                   |
|     |               |                                                                                  | Masih rendahnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan di daerah rentan rawan pangan                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |               |                                                                                  | Masih kurangnya jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang memadai seperti Lumbung Pangan dan Lantaijemur Gabah.                                                                                                                                                                                                                  |
|     |               | Belum optimalnya kelembagaan dan SDM pengelola cadangan pangan                   | Masih kurangnya jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sehingga penguatan Cadangan Pangan di masyarakat belum optimal.                                                                                                                                                                                                             |
|     |               |                                                                                  | Masih kurangnya pengetahuan dan keinginan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) untuk melakukan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dihasilkan.                                                                                                                                                                        |
| 4   | Pertanahan    | Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang                                  | Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum<br>Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah<br>Belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang                                                                                                                     |



| No. | Bidang Urusan    | Masalah                                                                                 | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Lingkungan hidup | Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kompleksnya permasalahan lingkungan             | Penurunan kualitas udara                                                                                                                                                             |
|     |                  |                                                                                         | Penurunan kuantitas dan kualitas air bersih                                                                                                                                          |
|     |                  |                                                                                         | Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau                                                                                                                                                      |
|     |                  |                                                                                         | Kompleksitas permasalahan lingkungan yang ada dihadapi                                                                                                                               |
|     |                  |                                                                                         | Adanya dinamika perubahan peraturan lingkungan hidup                                                                                                                                 |
|     |                  |                                                                                         | luas lahan RTH sangat terbatas sedangkan target per tahun 5 Ha karna kebijakan lahan bukan pada DLHK                                                                                 |
|     |                  | Penanganan dan pengelolaan sampah yang belum optimal                                    | Kurangnya pengelolaan sampah                                                                                                                                                         |
|     |                  |                                                                                         | Masih kurangnya kelompok masyarakat yang mengolah sampah dari sumber                                                                                                                 |
|     |                  |                                                                                         | Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sehingga masih banyak yang membuang sampah sembarangan.                                                                         |
|     |                  |                                                                                         | Kurang optimalnya pengelolaan sampah di TPS 3R dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPS 3R serta tingginya biaya operasional pengolahan sampah di TPS 3R. |
|     |                  |                                                                                         | Masih kurangnya armada pengangkutan sampah serta masih terdapat beberapa kendaraan truk sampah yang umurnya sudah di atas 15 Tahun (tidak layak)                                     |
|     |                  |                                                                                         | Pengelolaan sampah TPA masih open dumping, dan diperlukan biaya tinggi untuk pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan                                         |
|     |                  | Rendahnya sumber daya dalam pemantauan, pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup      | Terbatasnya SDM yang memadai sesuai bidang dalam pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup                                                                                          |
|     |                  |                                                                                         | Kurangnya sarana prasarana pembinaan pengawasan dan pemantauan lingkungan seperti peralatan transportasi                                                                             |
|     |                  |                                                                                         | Kurang memadainya sarana dan prasarana keanekaragaman hayati                                                                                                                         |
|     |                  |                                                                                         | Terbatasnya lahan tanaman mangrove yang jelas kepemilikannya, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mangrove dalam menjaga ekosistem                               |
|     |                  | Belum optimalnya upaya untuk menurunkan GRK dan adaptasi-mitigasi terhadap krisis iklim | Belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT sebagai alternatif listrik ramah lingkungan                                                          |
|     |                  |                                                                                         | Belum ketatnya regulasi dan pengawasan limbah hasil industri                                                                                                                         |

| No. | Bidang Urusan                                  | Masalah                                                                                                                                                      | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                                                                                                                                              | Keterbatasan kapasitas untuk inovasi penanganan krisis iklim dan aksi penurunan GRK daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan                                                                                                       | Cakupan penerbitan akta kelahiran masih di bawah target 100 persen<br>Capaian rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di bawah 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Pemberdayaan masyarakat dan desa               | Rendahnya kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masy. desa) | Kurang efektifnyanya peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa<br>Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan kelembagaan desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                | Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas)                                                                                                     | Masih terjadinya berbagai permasalahan politik dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan<br>Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal<br>Belum optimalnya etika dan budaya politik<br>Masih banyak ormas yang belum melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART ormas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana   | Belum optimalnya layanan pengendalian kependudukan dan KB                                                                                                    | Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program-program yang diselenggarakan oleh DPPKB, seperti program KB, pendidikan keluarga, dan perlindungan anak. Hal ini dapat menghambat pencapaian target penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup keluarga<br>Masih adanya kendala dalam memperoleh data kependudukan yang akurat dan terkini, yang diperlukan untuk perencanaan strategis serta evaluasi program-program DPPKB<br>Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengendalian kependudukan<br>Perubahan pola hidup dan nilai budaya yang mungkin tidak selaras dengan tujuan pembangunan keluarga berencana dan perlindungan anak, seperti perubahan dalam pandangan terhadap ukuran keluarga dan peran gender |
| 9   | Perhubungan                                    | Belum optimalnya penyediaan transportasi umum                                                                                                                | Rasio konektivitas masyarakat terhadap layanan jasa transportasi masih rendah<br>Belum optimalnya tata kelola kelembagaan sistem angkutan perkotaan dan angkutan umum massal<br>Belum optimalnya integrasi peraturan mengenai rencana induk transportasi umum yang melibatkan kerjasama daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Bidang Urusan | Masalah                                                                        | Indikasi Masalah                                                                                                                                           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                                                                                | Belum terdapat terminal tipe C sebagai titik simpul dari berbagai trayek                                                                                   |
|     |               |                                                                                | Keterbatasan sarana prasarana penunjang angkutan umum massal                                                                                               |
|     |               | Banyaknya jumlah titik kemacetan yang belum tertangani                         | Belum adanya kesepakatan kesamaan data jumlah titik kemacetan yang dijadikan prioritas antar instansi terkait                                              |
|     |               |                                                                                | Belum adanya komitmen dari masing-masing instansi terkait dalam menangani titik kemacetan yang disepakati bersama sesuai dengan kewenangannya              |
|     |               |                                                                                | Belum adanya rencana tindak lanjut dari masing-masing instansi terkait dalam menangani titik kemacetan yang disepakati bersama sesuai dengan kewenangannya |
|     |               | Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan                       | Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terkait pelayanan publik yang efektif efisien dan akuntabel                                                      |
|     |               |                                                                                | Belum maksimal peningkatan kualitas SDM seiring berjalannya waktu                                                                                          |
|     |               | Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perhubungan | Banyaknya permintaan masyarakat akan penerangan jalan umum yang belum terpenuhi                                                                            |
|     |               |                                                                                | Banyaknya permintaan masyarakat akan marka jalan terutama speed trap dan zebra cross yang belum terpenuhi                                                  |
|     |               |                                                                                | Terbatasnya SDM untuk pemeliharaan lampu penerangan jalan umum                                                                                             |
|     |               |                                                                                | Terbatasnya armada mobil skylift untuk pemeliharaan                                                                                                        |
|     |               |                                                                                | Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana gedung, lajur dan alat uji, sehingga belum dapat melayani uji berkala KIR secara maksimal.                        |
|     |               |                                                                                | Belum maksimalnya zonasi atau pemetaan lokasi parkir, sehingga program parkir yang ada tidak berjalan dengan baik.                                         |
|     |               |                                                                                | Infrastruktur transportasi yang belum mendukung keselamatan, seperti kondisi jalan yang buruk atau minimnya fasilitas penyeberangan pejalan kaki           |
|     |               |                                                                                | Belum optimalnya pengawasan pemungutan liar oleh juru parkir                                                                                               |
|     |               |                                                                                | Kurangnya sosialisasi mengenai retribusi                                                                                                                   |
|     |               | Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan lalu lintas                     | Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pelayan pengujian terhadap pelaksanaan teknis kendaraan terhadap keselamatan jalan                            |
|     |               |                                                                                | Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas                                                                                                               |

| No. | Bidang Urusan                       | Masalah                                                                    | Indikasi Masalah                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |                                                                            | Kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas                                                                              |
| 10  | Komunikasi dan informatika          | Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika                      | Belum adanya regulasi yang cukup dalam pengelolaan SPBE (peta rencana dan arsitektur)                                                      |
|     |                                     |                                                                            | Kurangnya keterbukaan Perangkat Daerah sebagai badan publik terhadap kebutuhan akses informasi dari masyarakat                             |
|     |                                     |                                                                            | Keterbatasan dalam penegakan atau kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dalam menjaga keamanan informasi                              |
|     |                                     | Belum optimalnya pemanfaatan layanan komunikasi dan informatika            | Penerapan prinsip SDI pada penyelenggaraan statistik sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh produsen data                               |
|     |                                     |                                                                            | Kurangnya pemahaman masyarakat akan layanan kedaruratan (contoh: melakukan panggilan darurat namun tidak bertanggungjawab/prank panggilan) |
| 11  | Koperasi, usaha kecil, dan menengah | Belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah             | Jumlah koperasi aktif yang semakin menurun dari waktu ke waktu                                                                             |
|     |                                     |                                                                            | Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola koperasi                                                                   |
|     |                                     |                                                                            | Masih terbatasnya akses permodalan dalam mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah                                                   |
| 12  | Penanaman modal                     | Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam program penanaman modal         | Belum terakomodirnya pemberian insentif penanaman modal yang dituangkan dalam peraturan turunannya                                         |
|     |                                     |                                                                            | Sosialisasi yang belum massif mengenai Perda penyelenggaraan penanaman modal ke masyarakat dan investor                                    |
|     |                                     |                                                                            | Adanya perubahan regulasi secara cepat                                                                                                     |
|     |                                     | Kurang terintegrasinya data penanaman modal antar perangkat daerah terkait | Masih sulitnya mendapatkan data potensi investasi, lemahnya koordinasi dengan perangkat daerah terkait                                     |
|     |                                     |                                                                            | Kurangnya akurasi antara data di setiap wilayah dengan dinas yang dibutuhkan untuk penyampaian informasi pada sistem                       |
|     |                                     |                                                                            | Data profil peluang investasi belum up to date.                                                                                            |
|     |                                     |                                                                            | Kurangnya rekonsiliasi dan validasi data yang ada di wilayah kecamatan                                                                     |
|     |                                     |                                                                            | Pameran belum dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan semua Perangkat Daerah terkait                                              |

| No. | Bidang Urusan           | Masalah                                                                                     | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         | Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam peningkatan penanaman modal                      | Belum ada SDM yang menguasai bahasa asing (minimal Bahasa Inggris) dan mempunyai kemampuan publik speaking sebagai tenaga promosi dan fasilitator pada saat pameran dan mempromosikan Kabupaten Tangerang dalam menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri |
|     |                         | Belum optimalnya pengelolaan penanaman modal                                                | Terbatasnya SDM pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan baik secara kualitas maupun kuantitasnya                                                                                                                                                                     |
|     |                         |                                                                                             | Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                         |                                                                                             | Belum adanya IPRO (Investmen Project Ready to Offer) yang akan ditawarkan ke investor                                                                                                                                                                                       |
| 13  | Kepemudaan dan olahraga | Belum optimalnya daya saing pemuda dalam pembangunan                                        | Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi sektor riil yang optimal                                                                                                                                                                                          |
|     |                         |                                                                                             | Belum optimalnya pengembangan kegiatan kepemudaan                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                         | Belum optimalnya pengembangan dan daya saing olahraga                                       | Minimnnya pelatihan yang berkaitan dengan kepemudaan                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                         |                                                                                             | Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional                                                                                                                                                                                                    |
| 14  | Statistik               | Belum optimalnya interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah           | Belum optimalnya upaya pembinaan terhadap atlet                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                         |                                                                                             | Rendahnya cakupan pelatih yang bersertifikasi                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                         |                                                                                             | Penerapan Prinsip SDI pada penyelenggaraan statistik sektoral belum seluruhnya diterapkan oleh produsen data                                                                                                                                                                |
|     |                         |                                                                                             | Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral belum mengacu kepada Proses Bisnis Statistik/ Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)                                                                                                                                |
| 15  | Persandian              | Belum optimalnya operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE | Keterbatasan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia (pegawai) maupun sumber daya TIK (infrastruktur dan peralatan yang mendukung persandian dan keamanan informasi)                                                                                                |
|     |                         |                                                                                             | Keterbatasan dalam penegakan atau kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dalam menjaga keamanan informasi                                                                                                                                                               |
| 16  | Kebudayaan              | Belum optimalnya pembinaan pelaku seni dan budaya                                           | Kurangnya minat masyarakat, terutama pemuda dan remaja, untuk melestarikan kesenian tradisional                                                                                                                                                                             |
|     |                         |                                                                                             | Menurunnya permintaan untuk penampilan kesenian tradisional                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                         |                                                                                             | Generasi muda tidak berminat mengembangkan bakat seni yang dimiliki karena mereka beranggapan sektor seni tidak menjanjikan masa depan dan kesejahteraan                                                                                                                    |

| No.                          | Bidang Urusan          | Masalah                                                             | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                        |                                                                     | Pergeseran minat pemuda kepada budaya modern lain / budaya asing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                        | Belum optimalnya penyediaan fasilitas pendukung seni dan kebudayaan | Minimnya fasilitasi pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana seperti lapangan, museum, gedung kesenian, gedung opera, dan sebagainya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              |                        |                                                                     | Pembangunan sarana kesenian dan pariwisata masih sebatas perencanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |                        | Belum optimalnya pendataan cagar dan warisan budaya                 | Belum adanya warisan budaya khas Kabupaten Tangerang yang diresmikan/ terdaftar menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tingkat Provinsi dan Nasional<br>Belum adanya penetapan cagar budaya tingkat Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17                           | Perpustakaan           | Belum optimalnya layanan perpustakaan                               | Kurangnya dorongan yang visioner dan revolusioner terkait pengembangan perpustakaan perpustakaan<br>Koleksi buku digital dan fisik yang terbatas<br>Masih adanya egosektoral dan belum optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan terutama dalam menentukan kebijakan terkait<br>Belum terdapatnya data kepustakawanan yang valid, update dan up to date<br>Terbatasnya kuantitas tenaga perpustakaan baik fungsional maupun teknis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18                           | Kearsipan              | Belum optimalnya digitalisasi kearsipan                             | Belum semua Perangkat Daerah/BUMD menerapkan penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara optimal<br>Belum maksimalnya pengelolaan arsip statis secara profesional, salah satunya bersumber dari penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah yang berakibat kurang maksimalnya layanan akses arsip statis<br>Belum melaksanakan pengelolaan arsip secara maksimal dalam rangka mewujudkan ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa<br>Belum terpenuhinya SDM kearsipan (arsiparis) di setiap Perangkat Daerah yang berakibat rendahnya pengelolaan arsip dinamis secara profesional dan belum tertibnya administrasi kearsipan di Perangkat Daerah (pencipta arsip)<br>Rendahnya pemahaman ASN akan pentingnya penyelenggaraan kearsipan |
| Fokus Layanan Urusan Pilihan |                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                            | Kelautan dan perikanan |                                                                     | Pendapatan pelaku usaha perikanan masih rendah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | Bidang Urusan | Masalah                                                                                          | Indikasi Masalah                                                                                                                   |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | Belum optimalnya dukungan pemerintah dalam mempromosikan potensi perikanan                       | Belum optimalnya sistem pemasaran produk                                                                                           |
|     |               | Belum optimalnya pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan          | Terbatasnya kegiatan pembinaan kelompok nelayan dan kemitraan dengan pelaku usaha/pasar                                            |
|     |               |                                                                                                  | Rendahnya regenerasi petani atau minat generasi muda untuk bekerja di sektor perikanan                                             |
|     |               |                                                                                                  | Kesejahteraan peternak pembudidaya dan nelayan yang masih rendah                                                                   |
|     |               | Belum optimalnya produktivitas sektor perikanan                                                  | Tingginya biaya operasional produksi                                                                                               |
|     |               |                                                                                                  | Masih rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan sektor perikanan                                                        |
|     |               |                                                                                                  | Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, seperti kolam budidaya, pakan ikan, dan lain sebagainya                               |
|     |               |                                                                                                  | Kurangnya akses petani terhadap teknologi perikanan/ budidaya modern dan informasi terkait praktik perikanan yang efisien.         |
|     |               |                                                                                                  | Terbatasnya kapasitas riset dan pengembangan produk hasil perikanan yang memberikan nilai tambah                                   |
|     |               | Belum optimalnya gerakan gemar makan ikan untuk peningkatan gizi dan pencegahan kerawanan pangan | Masih rendahnya angka konsumsi ikan                                                                                                |
| 2   | Pariwisata    | Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan daerah                                               | Pelaku usaha pariwisata belum memenuhi standar usaha sesuai peraturan berlaku                                                      |
|     |               |                                                                                                  | Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi SDM bidang pariwisata                                                                 |
|     |               |                                                                                                  | Belum optimalnya kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah/pelaku usaha/ sektor privat untuk pengembangan aktivitas pariwisata |
|     |               |                                                                                                  | Belum terpadunya pengelolaan wisata di daerah                                                                                      |
|     |               | Kurangnya daya tarik objek dan produk wisata                                                     | Belum optimalnya perawatan dan perlindungan ekosistem wisata alam                                                                  |
|     |               |                                                                                                  | Keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata                                                                        |
|     |               |                                                                                                  | Terbatasnya akses informasi objek dan produk wisata sebagai bentuk promosi dan pemasaran wisata akomodasi                          |



| No. | Bidang Urusan | Masalah                                                                                      | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Pertanian     | Belum optimalnya produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah             | Keterbatasan lahan pertanian yang tersedia, akibat dari urbanisasi dan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri                                                               |
|     |               |                                                                                              | Kurangnya usaha diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan masyarakat                                                                                                                        |
|     |               |                                                                                              | Terbatasnya permodalan bagi petani untuk meningkatkan produksi, seperti akses terhadap kredit usaha pertanian                                                                                 |
|     |               |                                                                                              | Keadaan lingkungan yang tidak menentu karena perubahan iklim yang tidak terduga, seperti curah hujan yang tidak stabil sehingga menyebabkan kekeringan atau banjir                            |
|     |               | Belum optimalnya fasilitas pendukung pertanian                                               | Kurangnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern dan informasi terkait praktik pertanian yang efisien                                                                               |
|     |               |                                                                                              | Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi yang memadai, jalan yang baik, dan sarana transportasi untuk distribusi hasil pertanian.                                         |
|     |               | Rendahnya kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian                      | Belum optimalnya manajemen kelembagaan kelompok tani                                                                                                                                          |
|     |               |                                                                                              | Rendahnya regenerasi petani atau minat generasi muda untuk bekerja di sektor perikanan dan peternakan                                                                                         |
|     |               |                                                                                              | Kesejahteraan petani yang masih rendah                                                                                                                                                        |
|     |               | Rendahnya kualitas dan daya saing produk pertanian dan peternakan                            | Rendahnya daya saing harga produk pertanian di pasar                                                                                                                                          |
|     |               |                                                                                              | Terbatasnya kemampuan petani untuk mengakses pasar                                                                                                                                            |
|     |               |                                                                                              | Terbatasnya kapasitas riset dan pengembangan produk hasil pertanian yang memberikan nilai tambah                                                                                              |
| 4   | Perdagangan   | Belum optimalnya pengelolaan perdagangan                                                     | Kurang personil/petugas dalam pendataan harga bahan pokok dan barang penting lainnya                                                                                                          |
|     |               |                                                                                              | Luasnya wilayah pendataan sehingga tidak mencapai target                                                                                                                                      |
|     |               |                                                                                              | Belum tersedianya aplikasi untuk memudahkan dalam menyimpan data                                                                                                                              |
|     |               | Daya saing dan diversifikasi produk perdagangan-jasa (skala domestik dan global) yang rendah | Belum optimalnya fasilitas pendukung aktivitas perdagangan                                                                                                                                    |
|     |               |                                                                                              | Belum optimalnya riset dan inovasi dalam pengembangan produk pelaku usaha yang berdaya saing di pasar domestik dan global utamanya untuk membangun ekosistem perdagangan dan logistik digital |
|     |               |                                                                                              | Keterbatasan informasi dalam mengakses data sektor perdagangan dan jasa                                                                                                                       |

| No.                    | Bidang Urusan      | Masalah                                                                                         | Indikasi Masalah                                                                                                       |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                    |                                                                                                 | Belum terintegrasinya simpul logistik ( <i>backbone</i> )                                                              |
| 5                      | Perindustrian      | Belum optimalnya regulasi terkait pengembangan industri                                         | Adanya dinamika regulasi terkait pengembangan industri                                                                 |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum optimalnya fungsi pengawasan dan penindakan                                                                      |
|                        |                    | Belum optimalnya fasilitas pendukung perindustrian                                              | Belum optimanya sarana pendukung pengolahan limbah hasil industri yang mengakibatkan pencemaran dan polusi             |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum optimalnya riset dan inovasi dalam hilirisasi nilai tambah industri serta efisiensi kinerja operasional industri |
| 6                      | Transmigrasi       | Pelaksanaan program transmigrasi yang terbatas pada ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian | Kuota dan lokasi transmigran ditentukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi          |
| Fokus Pendukung Urusan |                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |
| 1                      | Sekretariat Daerah | Belum optimalnya reformasi birokrasi dan standar pelayanan                                      | Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan prima                                             |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum optimalnya kualitas SDM aparatur yang professional, kreatif, inovatif, dan berintegritas                         |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum optimalnya fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah                                        |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum optimalnya sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan                                                             |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum optimalnya waktu penyelesaian                                                                                    |
|                        |                    |                                                                                                 | Penanganan pengaduan belum optimal                                                                                     |
| 2                      | Sekretariat DPRD   | Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD                           | Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi                                      |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum meratanya pelaksanaan kegiatan Reses di daerah pemilihan                                                         |
| Fokus Penunjang Urusan |                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |
| 1                      | Perencanaan        | Belum optimalnya konsistensi penjabaran dokumen perencanaan                                     | Belum integrasi antara perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan                                               |
|                        |                    |                                                                                                 | Pengendalian belum maksimal                                                                                            |
|                        |                    |                                                                                                 | Belum ada perencanaan terkait pengukuran kinerja per individu                                                          |
|                        |                    |                                                                                                 | Pelibatan dan peran serta perguruan tinggi, akademisi, swasta, komunitas, media belum maksimal dilibatkan              |

| No. | Bidang Urusan                                    | Masalah                                                               | Indikasi Masalah                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                                                                       | Evaluasi terhadap kebijakan belum berjalan                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Keuangan                                         | Belum optimalnya tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah       | Belum optimalnya pengamanan fisik BMD                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                  |                                                                       | Belum optimalnya pemanfaatan BMD                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                  |                                                                       | Belum optimalnya pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia | Belum maksimalnya tata kelola dan manajemen ASN                       | Implementasi NSPK saat terjadinya penunjukan Bupati (Pj Bupati) mengakibatkan perlunya Persetujuan Teknis dari Kepala BKN dan Surat Persetujuan Tertulis Izin Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri, sehingga proses ini memakan waktu lebih lama                             |
|     |                                                  |                                                                       | Penghitungan dan penetapan formasi Jabatan Fungsional belum berdasarkan rekomendasi Instansi pembina dan penetapan formasi dari Kemenpan-RB berdampak pada perencanaan pengadaan jabatan fungsional kurang tepat                                                             |
|     |                                                  |                                                                       | Kebijakan Penyetaraan Jabatan berdampak pada tidak fleksibelnya mutasi dan rotasi jabatan fungsional (dalam rangka penyegaran organisasi) mengingat Jabatan Fungsional yang melekat pada pegawai terdampak penyetaraan, serta alokasi peta jabatan yang harus dihitung ulang |
|     |                                                  |                                                                       | Adanya hambatan pengembangan karir pejabat fungsional karena proses uji kompetensi di instansi pembina menunggu antrian dan kuota nasional                                                                                                                                   |
|     |                                                  | Belum optimalnya pelaksanaan program kepegawaian dan pengembangan SDM | Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan ASN, karena kurangnya pemahaman mengenai penilaian kompetensi                                                                                                                                                                           |
|     |                                                  |                                                                       | Belum optimalnya Pengembangan kompetensi berbasis Corporate University                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                  |                                                                       | Belum tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                  |                                                                       | Pelaksanaan penilaian kompetensi belum sepenuhnya secara digital karena sistem aplikasi masih dalam proses pembuatan                                                                                                                                                         |
|     |                                                  |                                                                       | Kinerja dan disiplin ASN masih belum optimal                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                  |                                                                       | Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                  |                                                                       | Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pengembangan kompetensi untuk bahan kebijakan pengembangan karir PNS dan PPPK                                                                                                                                                    |
|     |                                                  | Terbatasnya fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM      | Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelatihan                                                                                                                                                                                                                            |

| No.                   | Bidang Urusan               | Masalah                                             | Indikasi Masalah                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                     | Penelitian dan pengembangan | Belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan | Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan |
|                       |                             |                                                     | Belum optimalnya penerapan inovasi daerah                                                                         |
|                       |                             |                                                     | Masih terbatasnya kerjasama                                                                                       |
| Fokus Pengawas Urusan |                             |                                                     |                                                                                                                   |
| 1                     | Pengawasan                  | Belum optimalnya kinerja pengawasan daerah          | Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pengawasan                                          |
|                       |                             |                                                     | Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dalam mendukung fungsi pengawasan                                        |
|                       |                             |                                                     | Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah                                                                       |
|                       |                             |                                                     | Kompleksitas regulasi dan kebijakan yang sering berubah                                                           |
|                       |                             |                                                     | Pelaksanaan SPIP belum optimal                                                                                    |
|                       |                             |                                                     | Belum optimalnya pelaksanaan zona integritas                                                                      |

Sumber: Analisis Penyusun, FGD, Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang (2025)

### 2.3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan hasil identifikasi yang didasarkan pada evaluasi dan permasalahan pembangunan. Selain itu, isu strategis juga mengakomodir potensi dan tantangan dalam suatu wilayah. Rumusan isu strategis ini berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan di wilayah Kabupaten Tangerang.

#### 2.3.2.1 Isu Global

Pesatnya transformasi global dan nasional membawa banyak dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mendasari identifikasi isu global dan nasional untuk menjadi salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan di Kabupaten Tangerang. Penyusunan isu global dan nasional ini merupakan hasil formulasi yang bersumber pada SDG's serta isu strategis dalam Dokumen RPJPN Tahun 2025-2045 maupun Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029.

##### A) Demografi Dunia

Pertumbuhan penduduk memberikan dampak pada berbagai lini kehidupan salah satunya dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, pertumbuhan penduduk ini berkaitan erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pertumbuhan penduduk ini merupakan salah satu hal yang harus dikendalikan untuk menjaga kestabilan ekosistem. Di sisi lain, demografi nasional bergerak ke arah bonus demografi. Hal ini menunjukkan tingginya jumlah penduduk usia produktif atau angkatan kerja dan jumlah penduduk usia tua cenderung meningkat sehingga memerlukan peningkatan lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.

##### B) Perubahan Iklim

Pesatnya pertumbuhan kegiatan masyarakat berdampak banyak terhadap perubahan lingkungan salah satunya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu fenomena yang mampu mengancam stabilitas ekosistem. Perubahan iklim mampu meningkatkan berbagai risiko bencana. Selain itu, perubahan iklim juga mampu berdampak pada perubahan cuaca ekstrem dan penurunan keanekaragaman hayati. Tidak hanya berpengaruh pada alam, perubahan iklim juga dapat berdampak pada kehidupan manusia seperti halnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan pangan. Perubahan iklim yang terjadi perlu ditangani melalui program pengurangan emisi karbon. Berbagai program dicanangkan untuk mengurangi laju perubahan iklim dan meminimalisir dampak perubahan iklim bagi kegiatan sehari-hari.

##### C) Kemajuan Teknologi

Berbagai inovasi muncul selaras dengan percepatan perkembangan teknologi masyarakat. Perkembangan teknologi memberikan berbagai dampak dalam kehidupan seperti percepatan informasi, peningkatan produktivitas dan efektivitas. Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan untuk membantu penyelenggaraan kegiatan. Sayangnya kemajuan teknologi ini memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Saat ini teknologi mulai menggeser tenaga manusia dan menyebabkan pengurangan lapangan kerja. Selain itu, keamanan data dan risiko kejahatan siber menjadi salah satu ancaman dalam perkembangan teknologi.

##### D) Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal geopolitik khususnya mengenai kedaulatannya atas sumber daya alam, teritorial, dan

strategis di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah persaingan kepentingan antara kekuatan besar di Laut Cina Selatan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan klaimnya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kepulauan strategis. Di sisi lain, dari segi geoekonomi, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar konsumen terbesar di Asia Tenggara dan produsen utama sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang. Namun, tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap ada, yakni infrastruktur, regulasi bisnis, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Perkembangan geopolitik dan geoekonomi Indonesia memainkan peran penting dalam dinamika regional dan global, serta menentukan arah kebijakan domestik yang berdampak pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

E) Urbanisasi global

Pertumbuhan penduduk saat ini cenderung terpusat di wilayah perkotaan. Pesatnya pembangunan perkotaan memiliki dualisme. Selain mampu meningkatkan daya saing dan kualitas hidup, pembangunan perkotaan juga menyebabkan ketertinggalan di wilayah perdesaan. Hal ini terjadi akibat kuatnya arus urbanisasi untuk memenuhi kehidupan masyarakat. *Urban bias* atau pembangunan yang lebih diutamakan pada wilayah perkotaan merupakan salah satu hal yang memantik urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan. Hal ini menunjukkan perlunya pembangunan wilayah perdesaan untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan perkotaan.

2.3.2.2 Isu Nasional

A) Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi, Kabupaten, Kota) dan Rencana Kerja Pemerintah. Visi RPJM Nasional 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang diterjemahkan dalam 8 Misi (Asta Cita) yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), dan 320 program kerja. Kedelapan Asta Cita (Misi) dituangkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
  - 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.
  - 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan sasaran utama untuk mengukur kinerja pembangunan dalam lima tahun ke depan. Sasaran utama pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59  
Sasaran Utama Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

|   | Sasaran Utama Pembangunan                                    | Indikator Kinerja                           |               |               |
|---|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
|   |                                                              | Indikator Pembangunan                       | Target 2025   | Target 2029   |
| 1 | Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju                     | Pertumbuhan ekonomi (%)                     | 5,3           | 8,0           |
|   |                                                              | GNI Per Kapita (USD)                        | 5.410         | 8.000         |
|   |                                                              | Kontribusi PDB Maritim (%)                  | 8,1           | 9,1           |
|   |                                                              | Kontribusi PDB Manufaktur (%)               | 20,8          | 21,9          |
| 2 | Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang                 | Tingkat Kemiskinan (%)                      | 7,0 – 8,0     | 4,5 – 5,0     |
|   |                                                              | Rasio Gini (Indeks)                         | 0,378 – 0,382 | 0,372 – 0,375 |
|   |                                                              | Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (%) | 21,4          | 22,4          |
| 3 | Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat   | Global Power Indeks (Ranking)               | 33            | 29            |
| 4 | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)             | Indeks Modal Manusia (Indeks)               | 0,56          | 0,59          |
| 5 | Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i> | Penurunan intensitas Emisi GRK (%)          | 35,53         | 45,17         |
|   |                                                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)   | 76,49         | 77,20         |

Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Permasalahan utama pembangunan kewilayahan di Indonesia adalah ketimpangan antar wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin dari kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia mendominasi dengan mencapai 79,55% terhadap PDRB nasional serta capaian Indeks Williamson yang tinggi yaitu 0.709 pada tahun 2024. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia mencapai 10,5% dibandingkan Kawasan Barat Indonesia mencapai 8,5%.

Permasalahan dan tantangan pembangunan lainnya adalah pembangunan wilayah perdesaan. Isu utama pembangunan perdesaan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi sebesar 12,22%, kapasitas fiskal desa yang rendah, penghasilan masyarakat yang bergantung di sektor primer dengan nilai tambah rendah, serta kesenjangan infrastruktur dasar antara desa-kota. Permasalahan di wilayah perkotaan adalah urbanisasi dan *urban sprawl* yang berdampak pada masifnya perubahan alih fungsi lahan, penurunan daya dukung wilayah, dan kesenjangan infrastruktur perkotaan. Tantangan ke depan adalah mendorong perekonomian dan pendapatan per kapita masyarakat perkotaan melalui pengentasan kemiskinan, daya tarik investasi, serta kerja sama pengelolaan kawasan aglomerasi/ metropolitan dalam keterpaduan pembangunan kewilayahan.



Tabel di bawah ini menjabarkan berbagai isu prioritas nasional yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJM Nasional Tahun 2025-2029:

Tabel 2.60  
Prioritas Nasional dan Isu Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

|   | Prioritas Nasional – Asta Cita                                                                                                                                                                                                             | Isu Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                           | Memperkokoh Ideologi Pancasila<br>Memperkokoh Demokrasi<br>Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                   | Sistem Pertahanan dan Keamanan<br>Swasembada Pangan<br>Swasembada Energi<br>Swasembada Air<br>Ekonomi Syariah<br>Ekonomi Digital<br>Ekonomi Hijau<br>Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru                                                                     |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Infrastruktur Berkelanjutan<br>Pendalaman Sektor Keuangan<br>Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan<br>Produktivitas UMKM dan Koperasi<br>Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual                                                                                |
| 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   | Pendidikan<br>Kesehatan<br>Keluarga, Perempuan, Anak, dan Pemuda<br>Ilmu Pengetahuan dan Teknologi<br>Olahraga                                                                                                                                                                     |
| 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.                                                                                                               | Hilirisasi dan Industrialisasi<br>Konektivitas <i>Backbone</i> dan Logistik<br>Ekonomi Domestik dan Global                                                                                                                                                                         |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.                                                                                                                             | Kemiskinan<br>Perumahan dan Permukiman<br>Perdesaan<br>Perkotaan                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.                                                                                            | Reformasi Politik<br>Reformasi Hukum<br>Reformasi Birokrasi<br>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba<br>Pencegahan dan Pemberantasan Judi dan Penyelundupan<br>Produktivitas BUMN<br>Optimalisasi Pendapatan Negara<br>Pengendalian Inflasi |
| 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur                                                         | Keagamaan<br>Kebudayaan<br>Pembangunan Berketahanan Iklim<br>Pengelolaan Risiko Bencana                                                                                                                                                                                            |

Sumber : Dokumen Ringkasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Sementara itu, pembangunan kewilayahan Pulau Jawa juga memiliki berbagai isu dan tantangan dalam mewujudkan arah pembangunan “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Isu utama pembangunan kewilayahan Pulau Jawa adalah (1) Inefisiensi kawasan perkotaan dan metropolitan dalam melayani kota itu sendiri; (2) Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam perindustrian; (3) Infrastruktur logistik yang belum terintegrasi; (4) Kesenjangan keterampilan dan *mismatch* lapangan kerja; (5) Tingginya prevalensi stunting, wasting, dan *underweight*; serta (6) Tingginya kemiskinan rata-rata di Pulau Jawa mencapai 8,11% pada tahun 2023.

Target pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa di tahun 2029 sebesar 7,9 persen setiap tahunnya. Strategi untuk mencapai target tersebut adalah melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri, pembangunan

pusat-pusat pertumbuhan baru, dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang dijabarkan secara kewilayahan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan produktivitas melalui pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi yang tersebar di 11 Kawasan dan pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan yang tersebar di 10 Kawasan di wilayah Jawa
- 2) Pengembangan industri melalui pengembangan Kawasan Pengembangan Industri yang tersebar di 10 Kawasan di wilayah Jawa
- 3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan Kawasan Perkotaan baik Kawasan Aglomerasi, Wilayah Metropolitan, maupun Non-Wilayah Metropolitan, yang tersebar di 20 Kawasan di wilayah Jawa
- 4) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan, yang tersebar di 8 Kawasan di wilayah Jawa

Dalam mendukung pengembangan kawasan-kawasan di atas, dibutuhkan prasyarat baik dari tata ruang, pertanahan, infrastruktur dan layanan dasar, mitigasi bencana, desentralisasi dan otonomi daerah, kesetaraan gender serta pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan.

Target penurunan kemiskinan di Pulau Jawa dalam periode 2025-2029 adalah sebesar 3,79 4,79 persen dan target Indeks Modal Manusia (IMM) di Pulau Jawa dalam periode 2025-2029 sebesar 0,56-0,789. Guna mewujudkan target-target tersebut, utamanya dikembangkan tiga strategi, yaitu (1) Pemberdayaan Ekonomi Lokal Bernilai Tinggi, Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar & Konektivitas, serta Perluasan Akses & Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (2) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Universal; serta (3) Peningkatan Modal Manusia, yang dijabarkan secara kewilayahan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Lokal Bernilai Tinggi, Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar & Konektivitas, serta Perluasan Akses & Kualitas Pendidikan dan Kesehatan antara lain melalui percepatan pembangunan pada Kawasan Afirmasi (Kawasan Percepatan Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan), yang tersebar di 4 Kawasan di wilayah Jawa;
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Universal, antara lain melalui Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, yang tersebar pada 16 lokasi prioritas di wilayah Jawa;
- 3) Peningkatan Modal Manusia, antara lain melalui Penguatan Perguruan Tinggi Menuju World Class University, pada 4 lokasi prioritas, serta Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada 10 lokasi prioritas yang juga bertempat pada 10 Kawasan Pengembangan Industri.

B) Dokumen Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2030

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. Dalam mewujudkan Agenda TPB 2030, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan Dokumen Peta Jalan TPB Tahun 2023-2030. Peta jalan TPB ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemangku kebijakan dalam sinkronisasi

pencapaian target TPB di tingkat daerah, termasuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tabel di bawah ini merupakan strategi pencapaian TPB Nasional tahun 2023-2030.

Tabel 2.61  
Strategi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional Tahun 2023-2030

| Tujuan SDGs                                                                                                                                                                                                    | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan<br>Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pertumbuhan ekonomi “<i>Broad-based</i>” atau inklusif</li><li>✓ Investasi sumber daya manusia</li><li>✓ Perlindungan sosial</li><li>✓ Tidak ada yang tertinggal (<i>No one left behind</i>)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan<br>Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan, dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Meningkatkan produksi pangan dan mengembangkan pertanian berkelanjutan</li><li>✓ Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses pangan bagi semua orang</li><li>✓ Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera<br>Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Menekan kematian ibu dan anak, meningkatkan akses kepada pelayanan kesehatan reproduksi</li><li>✓ Pengendalian penyakit menular</li><li>✓ Penanggulangan penyakit menular</li><li>✓ Penanggulangan masalah penyalahgunaan zat (e.g. NAPZA)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tujuan 4 – Pendidikan Berkualitas<br>Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Mendorong berkembangnya kemampuan literasi dan numerasi dan penyelesaian sekolah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi</li><li>✓ Peningkatan kualitas pembelajaran melalui peningkatan kompetensi guru</li><li>✓ Menghilangkan disparitas partisipasi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Tujuan 5 – Kesetaraan Gender<br>Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Menekan perkawinan usia dini</li><li>✓ Pengawasan dan perlindungan anak</li><li>✓ Peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi anak perempuan dan juga pemberdayaan perempuan</li><li>✓ Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelantikan untuk mencapai posisi strategis / manajerial</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| Tujuan 6 – Air Bersih dan Sanitas Layak<br>Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pengembangan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman</li><li>✓ Pembinaan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman</li><li>✓ Pengaturan penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman</li><li>✓ Pengawasan kualitas air minum dan sanitasi</li><li>✓ Akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (90 % rumah tangga)</li><li>✓ Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah)</li></ul>                                         |
| Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau<br>Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik</li><li>✓ Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan dengan meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tujuan 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi<br>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pertumbuhan PDB riil per kapita melalui pengembangan infrastruktur, reformasi regulasi investasi, dan peningkatan kualitas SDM</li><li>✓ Mengakselerasi akses UMKM ke layanan keuangan melalui stimulus Subsidi Bunga Ultra Mikro, restrukturisasi kredit UMKM, penguatan akses modal untuk UMK</li><li>✓ Penurunan pengangguran dan peningkatan daya saing produktivitas tenaga kerja</li><li>✓ Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB dan peningkatan jumlah wisman</li></ul> |
| Tujuan 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur<br>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Meningkatkan nilai tambah sektor industri manufaktur melalui hilirisasi industri, inovasi penciptaan nilai tambah industri, serta pengurangan ketergantungan terhadap produk impor</li><li>✓ Upskilling dan reskilling tenaga kerja dengan kebutuhan pasar industri</li><li>✓ Peningkatan anggaran riset</li><li>✓ Peningkatan akses dan adopsi masyarakat terhadap TIK</li></ul>                                                                                                       |
| Tujuan 10 – Berkurangnya Kesenjangan<br>Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Redistribusi pendapatan melalui peningkatan nilai tambah sektor industri, insentif fiskal untuk industri padat karya, membatasi berkembangnya sektor padat modal</li><li>✓ Reformasi subsidi (misal subsidi energi BBM)</li><li>✓ Sistem registrasi penduduk yang terintegrasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                |

| Tujuan SDGs                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan<br>Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penyediaan akses perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau</li><li>✓ Penyediaan hunian yang sesuai dengan tata ruang serta memperhatikan kerawanan bencana dan dampak perubahan iklim</li><li>✓ Perluasan kebijakan dan program hunian layak kepada segmentasi rumah tangga yang belum terlayani, terutama rumah tangga dengan penghasilan tidak tetap/informal</li><li>✓ Penanganan permukiman kumuh dan permukiman kota secara inklusif dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh</li></ul>                                                                                             |
| Tujuan 12 – Konsumsi Produksi yang Bertanggungjawab<br>Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penerapan ekonomi sirkular</li><li>✓ Melakukan pengelolaan FLW secara bertahap sepanjang system makanan</li><li>✓ Meningkatkan kualitas pangan dengan pemanfaatan digitalisasi dan <i>Internet of Things</i> (IoT) dalam kegiatan di rantai pasokan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim<br>Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Peningkatan efisiensi energi</li><li>✓ Pembangunan dan pengelolaan energi baru terbarukan</li><li>✓ Pelaksanaan restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi melalui penanaman kembali lahan hutan yang telah rusak.</li><li>✓ Pelaksanaan upaya menahan laju deforestasi setiap tahun melalui penerapan moratorium hutan, primer, dan penerapan RTRW</li><li>✓ Peningkatan produktivitas pertanian terutama melalui peningkatan intensifikasi padi dan penambahan sawah irigasi.</li><li>✓ Penanganan sampah dan limbah industri melalui pola manajemen limbah yang lebih terstruktur</li></ul> |
| Tujuan 14 – Ekosistem Lautan<br>Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (<i>Code of Conduct for Responsible Fisheries</i>)</li><li>✓ Mengembangkan industri perikanan hulu-hilir</li><li>✓ Memperkuat efektivitas pengelolaan, instrumen, sinergi tata kelola dan institusi pengelola kawasan konservasi</li><li>✓ Menjaga kesehatan ekosistem dan mempromosikan pemanfaatan KKL secara berkelanjutan</li><li>✓ Menyediakan pendanaan kawasan konservasi jangka panjang</li></ul>                                                                                                                                |
| Tujuan 15 – Ekosistem Daratan<br>Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui pencegahan kebakaran lahan dan hutan serta restorasi lahan gambut</li><li>✓ Pelaksanaan upaya menahan laju deforestasi setiap tahun melalui penerapan moratorium hutan primer, dan penerapan RTRW</li><li>✓ Menjaga luas mangrove dan melaksanakan rehabilitasi mangrove</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Tujuan 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh<br>Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Penguatan Dukungan Manajemen yang dilakukan dengan memperluas pembangunan Zona Integritas (ZI), WBK dan WBBM</li><li>✓ Peningkatan kapasitas lembaga demokrasi dan pembinaan partai politik</li><li>✓ Peningkatan layanan pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan inovatif</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tujuan 17 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh<br>Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi administrasi yang berkelanjutan serta kebijakan perpajakan yang adaptif dengan tetap menjaga iklim investasi</li><li>✓ Mendorong penerapan teknologi dalam ekosistem ekonomi digital</li><li>✓ Mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri barang dan jasa Indonesia melalui pemanfaatan rantai produksi global dan perluasan produk serta pasar tujuan ekspor</li></ul>                                                                                                                                                                                  |

Sumber : Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2030, Kementerian PPN/Bappenas (2024)

2.3.2.3 Isu Regional Provinsi Banten dan Wilayah Sekitar

A) Arahan dalam RPJM Nasional untuk Pengembangan Wilayah Provinsi Banten dan Jabodetabek

Berdasarkan posisi geostrategis, Provinsi Banten merupakan pintu gerbang yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta sebagai daerah khusus pengembangan ekonomi. Dari sisi perdagangan, selain menjadi penghubung jalur perdagangan Sumatera dan Jawa, Provinsi Banten merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Lokasi

wilayah Provinsi Banten juga menjadi titik potensial aglomerasi perekonomian dan permukiman.

Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari aglomerasi Jabodetabek merupakan isu pembangunan jangka panjang dengan tantangan mendorong *Economic Engine* yang tetap berlandaskan daya dukung dan prinsip keberlanjutan. Tren dalam 10 tahun terakhir menunjukkan wilayah Jabodetabek mengalami transformasi struktur ekonomi ke tersier dengan sektor penopang perekonomian adalah sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, serta Perdagangan dan Reparasi. Tantangan pembangunan kedepan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari Jabodetabek mengarahkan ke sektor ekonomi tersier yang berorientasi pada pengembangan industri teknologi dan informasi digital untuk pasar global.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi kerjasama Jabodetabek dalam membangun *Economic Engine* terintegrasi. Sinergi kerjasama tersebut berupa kerjasama pengembangan sektor unggulan Jabodetabek, pengembangan potensi pasar dan skala ekonomi di tingkat global, serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jabodetabek<sup>6</sup>. Provinsi Banten dengan Kabupaten Tangerang sebagai bagian yang integral, memiliki beberapa tantangan rencana pembangunan yaitu pembangunan MRT Balaraja Cikarang, pembangunan Kota Baru Publik Maja, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan *coastal reservoir* di muara Sungai Cisadane.

Berdasarkan Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029, terdapat identifikasi isu kewilayahan yang meliputi:

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan;
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa;
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri;
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian;
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri;
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi *covid-19*.

Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan fokus pembangunan kewilayahan Pulau Jawa dan Provinsi Banten adalah membangun kawasan-kawasan strategis yang didukung dengan infrastruktur yang terpadu. Dalam dokumen tersebut dijabarkan Arah Pembangunan Kewilayahan Pulau Jawa khususnya Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian Aglomerasi Jabodetabek dan Provinsi Banten, yaitu Pengembangan Jakarta-Tangerang *International Business Corridor & Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South)*, *Northern Coast New Economic Hub & Jakarta Global City Urban Tourism (North)*, serta Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten.

Selain itu, isu strategis pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Provinsi Banten menjadi arahan *positioning* Kabupaten Tangerang

---

<sup>6</sup> Supriatna., KETENTERAMAN (2024). Paparan Masa Depan Aglomerasi Jabodetabek Pasca Ibukota. Musrenbang RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

dalam rencana pembangunan daerah. Di bawah ini merupakan isu strategis Provinsi Banten, yaitu:

- a. Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing  
Kualitas SDM dapat dibentuk berdasarkan unsur yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam mewujudkan SDM yang berdaya saing, Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan yaitu pendidikan berkualitas yang belum merata, aspek kesehatan yang belum menyentuh derajat kesehatan yang tinggi, serta aspek perlindungan sosial yang belum optimal pelaksanaannya.
- b. Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif  
Pembangunan perekonomian dapat terbentuk dari pemerataan ekonomi wilayah. Dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan inklusif, Provinsi Banten memiliki berbagai tantangan, yaitu pemerataan perekonomian belum optimal karena pertumbuhan perekonomian wilayah utara dan selatan masih belum merata, sektor unggulan yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri dan pariwisata belum dikelola secara maksimal, serta inovasi yang mendorong investasi dalam wilayah masih perlu ditingkatkan.
- c. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas  
Tata kelola pemerintahan Provinsi Banten memiliki isu dalam penyelenggaraan pemerintah, meliputi aspek pengaturan regulasi dan hukum, digitalisasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan integritas, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan dan integritas pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan akuntabel dapat mengurangi berbagai isu dan permasalahan yang terjadi dalam pembangunan wilayah.
- d. Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro berketahanan yang tangguh  
Provinsi Banten memiliki isu dalam pembangunan keamanan wilayah, meliputi keamanan, ketertiban dan kesadaran berdemokrasi masih rendah, kebijakan ekonomi makro belum stabil, ketahanan wilayah dan kerja sama daerah belum optimal. Beberapa isu tersebut dapat dipengaruhi oleh angka kriminalitas, kehidupan berdemokrasi, pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, fungsi intermediasi perbankan serta isu potensial yang terkait dalam pembangunan sumber daya alam, sosial budaya dan lingkungan.
- e. Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal  
Isu strategis pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal pada Provinsi Banten memiliki beberapa isu yang membawahnya. Isu-isu tersebut meliputi keaktifan kehidupan sosial belum optimal dan pembangunan keluarga dan gender masih lemah. Keaktifan kehidupan sosial belum optimal ditentukan berdasarkan kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya, serta kehidupan beragama yang juga ditentukan oleh dua indeks yakni Indeks Pembangunan Kebudayaan dan indeks Kerukunan Umat Beragama. Sementara itu, pada pembangunan keluarga dan gender masih lemah menggunakan standar nilai IKK, angka kesetaraan gender, serta kualitas ketahanan ekonomi.
- f. Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan  
Manajemen kewilayahan dapat dilihat dari aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Pada Provinsi Banten aspek isu strategis tersebut meliputi daya dukung lingkungan yang masih rendah, kualitas lingkungan hidup yang belum optimal, risiko bencana yang masih tinggi, serta kesesuaian penataan dan pemanfaatan ruang yang belum optimal. Aspek isu tersebut

ditentukan melalui penggunaan lahan kritis, laju pertumbuhan penduduk, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Risiko Bencana, kapasitas daerah, serta urbanisasi.

B) Isu Strategis PMO Jabodetabekpunjur

Kabupaten Tangerang merupakan bagian dari aglomerasi Jabodetabekpunjur yang akan mempengaruhi secara langsung dalam pembangunan daerah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan dokumen PMO TKPR Jabodetabekpunjur, terdapat beberapa isu strategis di Wilayah Aglomerasi Jabodetabekpunjur yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang, yaitu:

- 1) Tingginya Potensi Ancaman Banjir. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur berada pada Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Citarum dan Ciujung-Cidanau-Cidurian yang secara historis rawan terhadap bencana banjir. Kerugian ekonomi akibat bencana banjir di Jabodetabekpunjur dari tahun 2002 hingga 2020 mencapai 19,2 triliun rupiah.
- 2) Tingginya Kemacetan Lalu Lintas. Kemacetan wilayah Jabodetabekpunjur disebabkan oleh mode share angkutan umum yang rendah (19,5%) , sistem transportasi publik belum efektif dan menjangkau seluruh wilayah, ekspansi *urban sprawl* , serta sarana prasarana transportasi yang belum inklusif dan andal.
- 3) Ketersediaan Air Bersih Belum Terpenuhi. Pelayanan air bersih jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur hanya mencapai 29% serta dihadapkan dengan tantangan ketersediaan air baku serta efisiensi infrastruktur SPAM.
- 4) Kerentanan Bencana di Wilayah Pesisir dan Pantai. Wilayah pantai utara Jabodetabekpunjur termasuk wilayah Kabupaten Tangerang pesisir yang rentan terhadap bencana pesisir seperti banjir rob, *land subsidence*, dan abrasi.
- 5) Pengelolaan dan Kapasitas Penampungan Sampah yang Belum Optimal. Sebesar 13 juta ton sampah (40,71%) yang dihasilkan setiap tahunnya tidak dapat terkelola di kawasan Jabodetabekpunjur. Hal ini disebabkan oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang melebihi kapasitas, kurangnya infrastruktur pendukung, pencemaran *impermeable surface* yang tidak layak, dan minimnya kegiatan daur ulang sampah.
- 6) Tumbuhnya Permukiman Kumuh yang Tidak Terkendali. Hal ini disebabkan oleh disparitas ekonomi dan rendahnya kemampuan penyediaan perumahan layak huni dan terjangkau di kawasan perkotaan; belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya; dan penambahan penduduk dan semakin berkurangnya ketersediaan lahan.
- 7) Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir. Tipologi Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang berbentuk hamparan dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan serta memiliki curah hujan yang tinggi membuat area hulu memiliki kerentanan terhadap bencana tanah, longsor, dan banjir. Penyebab utama dari terjadinya bencana-bencana tersebut kebanyakan. Tingginya ancaman bencana ini juga diperparah dengan alih fungsi lahan yang menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama pada area hutan dan sempadan sungai.

C) Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 menjadi landasan penting dalam merumuskan Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045. Isu strategis dalam RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi: Provinsi Banten yang masih berada di posisi *upper-middle income*
- 2) Pendidikan dan inovasi: Peningkatan partisipasi sekolah melalui dukungan merdeka belajar dan pengembangan pola pikir berinovasi
- 3) Kesehatan: Peningkatan fasilitas kesehatan dan penyelesaian kasus-kasus kesehatan
- 4) SDM, kependudukan, dan pemberdayaan masyarakat dan desa: Peningkatan kapasitas SDM & pembangunan dan kemandirian desa terutama pembenahan pada desa tertinggal
- 5) Daya saing infrastruktur dan kewilayahan: Peningkatan infrastruktur laut, darat, dan udara serta pengembangan kewilayahan sektor pariwisata dengan dukungan interkoneksi telekomunikasi
- 6) Daya saing investasi, industri, dan perdagangan: Peningkatan investasi guna mendukung pengembangan industrialisasi dan perdagangan
- 7) Tata kelola pemerintahan: Mendorong birokrasi berdampak
- 8) Lingkungan dan kebencanaan: Peningkatan kualitas lingkungan & kewaspadaan bencana.

Visi RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 yaitu *“Provinsi Banten sebagai Gerbang Investasi Strategis yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa”*. Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui misi berikut:

- 1) Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Banten yang Produktif, Unggul, dan Berdaya Saing
- 2) Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Banten yang Tangguh, Inklusif, dan Kondusif
- 3) Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Berintegritas, Adaptif, dan Profesional
- 4) Misi 4 : Mewujudkan Keamanan Banten yang Tangguh, Demokrasi yang Substansial dan Perekonomian Daerah yang Stabil
- 5) Misi 5 : Mewujudkan Sosial Budaya Banten yang Beradab dan Ekologi yang Lestari

D) Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 juga menjadi landasan dalam penyusunan arah pembangunan dan kebijakan Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029. Isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani
- 2) Peningkatan produktivitas ekonomi wilayah
- 3) Penanggulangan kemiskinan
- 4) Peningkatan pemerataan kualitas layanan SDM
- 5) Penanggulangan pengangguran terintegrasi
- 6) Peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial
- 7) Peningkatan pemerataan dan interkoneksi pembangunan
- 8) Penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana

Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu *“Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi”*. Dalam mewujudkan visi tersebut, dirumuskan melalui misi berikut:

- 1) Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh
- 2) Misi 2 : Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial
- 3) Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif
- 4) Misi 4 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas
- 5) Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana



Gambar 2. 304

Arah Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

#### 2.3.2.4 Isu dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang

##### A) Dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 bersesuaian dengan periode tahap pertama RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dengan fokus pada Penguatan Modal Dasar. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 dengan visi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tangerang Gemilang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”.

Isu strategis jangka panjang merupakan isu yang dirumuskan berdasarkan kondisi Kabupaten Tangerang, kondisi luar yang memberikan pengaruh, dan kebijakan nasional dan regional selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 terdapat lima isu strategis yakni:

##### a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia merupakan isu strategis Kabupaten Tangerang. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam isu strategis tersebut meliputi partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, kurangnya pemberdayaan sosial, serta pembangunan dan pemberdayaan gender dan anak yang belum optimal. Selain itu, diperlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kapasitas SDM di daerah pesisir.

##### b. Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi

Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan konstruksi

melambat, memicu deindustrialisasi dini. Selain itu, sektor ekonomi berbasis sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan belum optimal karena masalah kapasitas SDM dan kelembagaan. Ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi isu, meskipun Indeks Gini menunjukkan ketimpangan rendah. Produktivitas tenaga kerja yang rendah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, investasi dalam pelatihan tenaga kerja, dan penerapan IPTEK diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Integrasi ekonomi domestik-regional dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur juga penting untuk mendukung posisi strategis Kabupaten Tangerang sebagai penyangga Jakarta.

c. Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kabupaten Tangerang memiliki penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur bagi pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan lingkungan menjadi salah satu isu strategis. Isu penyelenggaraan penataan ruang dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tangerang ditunjukkan oleh belum optimalnya perencanaan pembangunan permukiman, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi.

d. Ketahanan Sosial dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Pada Kabupaten Tangerang, isu strategis ketahanan sosial dan pengendalian lingkungan hidup memiliki target pembangunan yang membawahnya. Target pembangunan meliputi karakter masyarakat dalam keberagaman budaya, pembangunan dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta anak, pengelolaan sumber daya alam, kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, serta manajemen kebencanaan.

e. Tata Kelola Pemerintah

Tata kelola pemerintahan adalah aspek penting dalam pembangunan daerah karena terkait dengan kontrol dan pengawasan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan pembangunan. Isu tata kelola pemerintah Kabupaten Tangerang meliputi Profesionalitas ASN, kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, stabilitas perekonomian daerah, tata laksana pemerintah yang akuntabel serta penegakan hukum dan pembinaan demokrasi.

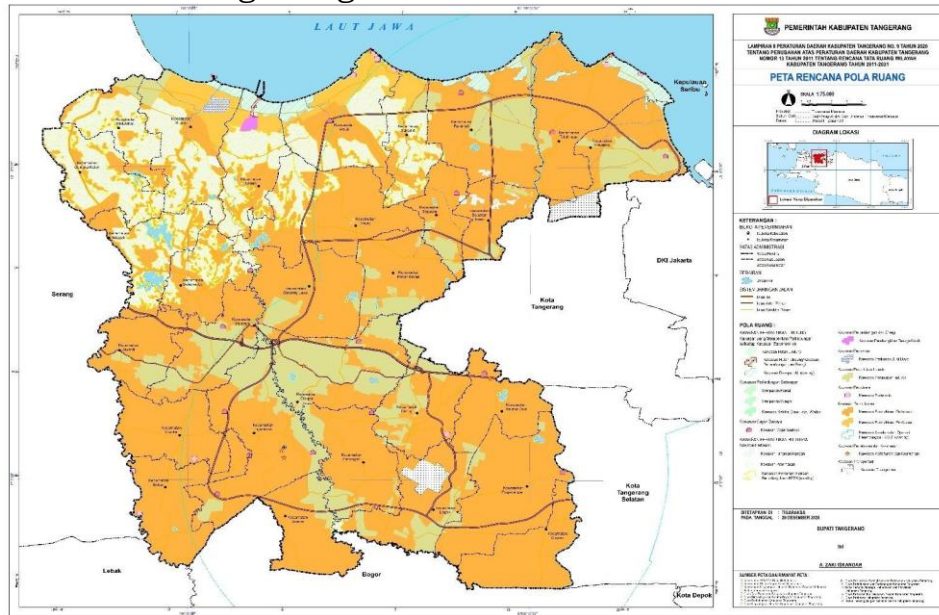
B) Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang perlu dipedomani dalam RPJMD adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penataan ruang wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Upaya perwujudan kondisi tersebut lakukan melalui kebijakan penataan ruang meliputi:

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
2. Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;

4. Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
5. Rencana pengembangan RTH

Kelima kebijakan penataan ruang tersebut diwujudkan dalam rencana pola dan struktur ruang sebagai berikut:



Gambar 2. 305  
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031  
*Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031*

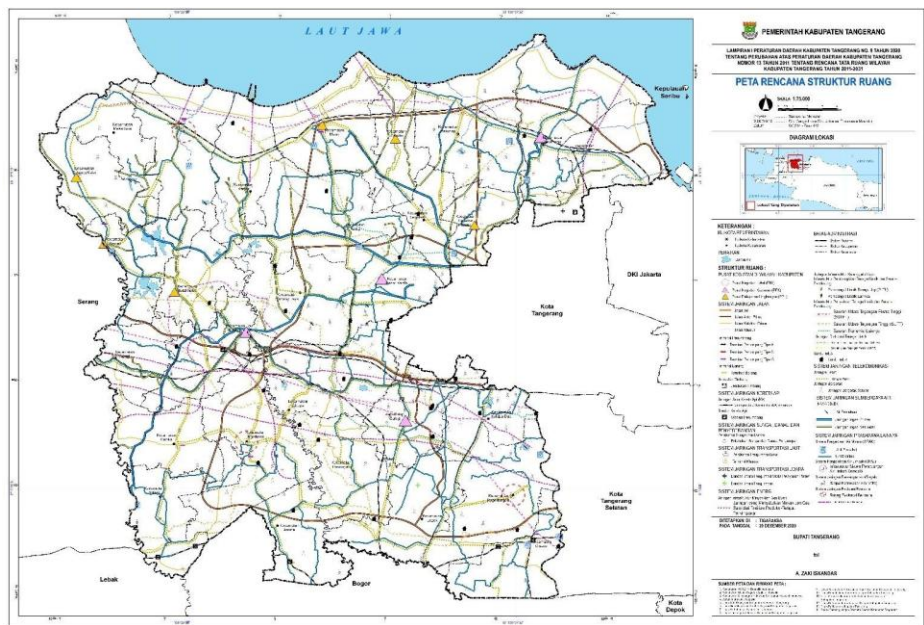
Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kawasan lindung dan budidaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki peruntukan preservasi. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung yang berupa hutan bakau di sisi pantai utara seluas 1.555,32 Ha, kawasan resapan air seluas 1.555 Ha, kawasan sempadan pantai sebesar 325 Ha, kawasan sempadan sungai dengan luas 529 Ha, dan kawasan sekitar danau dan situ seluas 310 Ha. Masing-masing guna lahan tersebut memiliki peranan dan ketentuan pemanfaatan tersendiri yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam.

2) Kawasan Budidaya

Kabupaten Tangerang memiliki kawasan budidaya yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, serta kawasan pertahanan dan keamanan.



Gambar 2. 306  
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031  
*Sumber: RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011-2031*

Rencana sistem perkotaan terdiri dari pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi kawasan perkotaan di sekitar Jabodetabekpunjur yaitu kecamatan Balaraja dan kecamatan Tigaraksa; pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kecamatan Kronjo, kecamatan Tigaraksa, dan kecamatan Pagedangan; serta pengembangan pusat-pusat kegiatan lain seperti PPK dan PPL yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Rencana jaringan prasarana diperlihatkan dengan perencanaan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Pengembangan jaringan transportasi didukung dengan rencana pembangunan jalan tol, peningkatan kelas terminal tipe A, tipe B, dan tipe C, dan reaktivasi sistem jaringan rel kereta api. Selain itu, perencanaan transportasi laut juga dilaksanakan melalui pengembangan pelabuhan meliputi pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpul lokal, dan terminal khusus laut. Kemudian, pengembangan bandar udara dilaksanakan di bandar udara Soekarno-Hatta dan bandar udara Budiarto.

C) Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi landasan perencanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah

Kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tangerang dapat berdampak negatif pada lingkungan, terutama dalam penyediaan pangan dan air, serta menghambat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa infrastruktur seperti jaringan jalan, rel kereta api, telekomunikasi, dan energi memiliki tingkat risiko multi bahaya yang tinggi, dengan panjang total yang signifikan. Keterbatasan infrastruktur juga mempengaruhi capaian SDGs, khususnya kualitas air bersih yang baru mencapai 56,43%. Oleh karena itu, diperlukan prioritas penanganan pembangunan infrastruktur untuk memastikan pembangunan daerah tidak terhambat dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.



- b. Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai

Rendahnya pengelolaan air limbah domestik dan industri di Kabupaten Tangerang menyebabkan penurunan kualitas penyediaan air dan meningkatkan risiko lingkungan, termasuk banjir seluas 17.372,71 Ha, banjir bandang 76,86 Ha, dan cuaca ekstrem 65.928,34 Ha. Kondisi ini memperburuk pencemaran lingkungan, terutama di kawasan permukiman dan industri, karena limbah yang terhubung dengan saluran drainase dan sungai akan membebani kapasitas aliran dan mempercepat pendangkalan aliran sungai. Dampak buruk ini juga mengurangi kualitas air, mengancam keanekaragaman hayati ekosistem sungai, serta menurunkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Penanganan yang lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan kewajiban pemenuhan standar industri.

- c. Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri

Hasil analisis menunjukkan bahwa penyediaan pangan dan air di Kabupaten Tangerang mengalami dampak signifikan akibat alih fungsi lahan yang mengurangi luas lahan produksi pangan dan kapasitas penyediaan air. Saat ini, lahan produksi pangan seluas 96% dari luas total lahan dan kapasitas penyediaan air di 83% wilayah Kabupaten Tangerang telah terlampaui oleh pembangunan permukiman dan industri, yang meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Perubahan ini juga menurunkan kualitas ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Saat ini belum ada upaya penanganan isu alih fungsi lahan sehingga capaian indikator SDGs terkait pertanian dan pengelolaan sumber daya alam belum tercapai. Meskipun ada regulasi perlindungan lahan sawah, dampak negatif alih fungsi lahan terus berlanjut, mengancam kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang.

- d. Optimalisasi tata kelola pemerintahan

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian SDGs, terutama pada indikator pertumbuhan PDRB dan validitas akta kelahiran, memerlukan perhatian lebih. Untuk mencapai target program SDGs, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya serta tata kelola yang efektif. Hal ini akan mendukung pemenuhan target pembangunan berkelanjutan (TPB) hingga 2030, terutama dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.

- D) Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat peran IPTEK, riset, dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. *Knowledge Based Policy* menjadi landasan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) guna peningkatan tata kelola pemerintah, pelayanan publik, kualitas kebijakan, serta daya saing daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjalankan fungsi pengembangan riset dan inovasi daerah untuk penyelenggaraan pembangunan merumuskan dokumen RIPJID Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Permasalahan dan isu pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tangerang, yaitu (1) keterbatasan SDM peneliti; (2) minimnya anggaran pengembangan riset dan inovasi daerah; (3) hambatan kultural birokrasi; (4) belum optimalnya kolaborasi riset dan inovasi; (5) belum optimalnya upaya komersialisasi dan hilirisasi hasil riset. Maka dari itu dalam dokumen ini dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan menjadi arahan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Tabel 2.62  
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tangerang

| No | Bidang Permasalahan      | Permasalahan Prioritas                                           | Strategi                                                                                                                                                                                                        | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kesejahteraan Masyarakat | Derajat kesehatan masyarakat masih rendah                        | Mengembangkan program pencegahan dan penanganan masalah kematian ibu dan bayi, stunting dan balita gizi buruk, serta prevalensi penyakit menular dan tidak menular (HIV AIDS, kasus ISPA, diare, TBC, dan DBD). | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas</li><li>▪ Optimalisasi respon kegawatdaruratan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan</li><li>▪ Meningkatkan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang</li><li>▪ Meningkatkan ketersediaan obat dan logistik kesehatan</li><li>▪ Meningkatkan program jaminan sosial dan bantuan langsung bagi masyarakat miskin dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dan balita gizi buruk</li></ul>                                                                                                            |
| 2  | Ekonomi                  | Ketimpangan pembangunan ekonomi                                  | Meningkatkan pemerataan dan pembukaan akses terhadap fasilitas bagi masyarakat demi mengurangi ketimpangan ekonomi                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyusunan dan penguatan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi</li><li>▪ Kebijakan <i>Job Matching</i> antara vokasi dan industri</li><li>▪ Pembangunan perumahan yang berada di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi, dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan</li><li>▪ Meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern</li></ul>                                                                                                                                          |
| 3  | Lingkungan               | Infrastruktur serta Pengelolaan kebencanaan dan lingkungan hidup | Meningkatkan riset dan inovasi di daerah serta kemitraan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dan menyelaraskan sesuai perkembangan global                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Optimalisasi kebijakan disertai dengan basis data riset dan inovasi</li><li>▪ Menyediakan anggaran guna memanfaatkan serta melindungi kekayaan intelektual</li><li>▪ Diperlukan kerja sama dengan kemitraan baik lokal maupun internasional untuk membentuk jaringan sehingga memudahkan dalam transfer teknologi dan memberikan penghargaan</li><li>▪ Mengadakan sosialisasi serta latihan teknis dan mengembangkan hingga implementasi</li><li>▪ Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga serta pelaku industri hingga terbentuk klaster guna menerapkan <i>predict and prevent</i></li></ul> |
| 4  | Tata Kelola Pemerintah   | Tata kelola pemerintahan yang belum kolaboratif                  | Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak (stakeholder) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan</li><li>▪ Mengembangkan forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta</li><li>▪ Mengimplementasikan sistem <i>e-governance</i> untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Sumber: Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029



#### 2.3.2.5 Rumusan Isu Strategis Jangka Menengah

Berdasarkan rumusan masalah, isu strategis, dan potensi Kabupaten Tangerang, rumusan isu strategis Kabupaten Tangerang lima tahun ke depan meliputi:

##### A) Tata Kelola Pemerintahan

###### 1) Penyelenggaraan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi berkaitan dengan integrasi sektor pelayanan publik, pengawasan daerah, dan berbagai sektor mulai dari kependudukan, kearsipan, persandian, komunikasi dan informatika, statistik pemberdayaan masyarakat dan desa, pengelolaan aset daerah hingga manajemen ASN. Penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Tangerang saat ini masih belum optimal dan efektif. Permasalahan terkait reformasi birokrasi berkaitan dengan beberapa aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi daerah, maupun koordinasi antar sektor.

###### 2) Penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan yang disusun oleh berbagai elemen pendukung. Mulai dari ideologi Pancasila, wawasan dan karakter masyarakat, kehidupan berpolitik, organisasi kemasyarakatan, pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang, serta secara umum mencakup ketahanan sosial, ekonomi dan budaya.

###### 3) Pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu pondasi penting yang berkorelasi positif dalam mewujudkan stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Keamanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban adalah : 1) belum optimalnya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, 2) belum optimalnya penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, serta 3) belum optimalnya penanganan konflik di masyarakat.

##### B) Perekonomian dan Daya Saing Daerah

Perekonomian dan daya saing daerah merupakan isu strategis Kabupaten Tangerang yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang komprehensif.

###### 1) Perekonomian yang Maju

Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan dua aspek yang saling terkait dalam menentukan kemajuan daerah. Produktivitas ekonomi mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dalam menghasilkan nilai tambah. Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam ekonomi suatu daerah yang dapat dilihat dari peningkatan pemasukan daerah. Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, perlu diidentifikasi performa komoditas unggulan (perindustrian, perdagangan, dan jasa) serta komoditas potensial (pertanian, perikanan, dan pariwisata).

Sektor perindustrian serta perdagangan-jasa menjadi tulang-punggung perekonomian Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, kedua sektor tersebut memiliki permasalahan dari sisi produktivitas, nilai tambah (hilirisasi), daya saing produk, infrastruktur pendukung, daya saing tenaga kerja, serta tata kelola berkelanjutan. Akar permasalahan ini adalah: (1) belum optimalnya sistem pengawasan dan kepastian regulasi; (2) keterbatasan infrastruktur penghubung pusat-pusat perekonomian (*supply*

dan pasar); (3) terbatasnya kemitraan untuk rantai hilirisasi dan inovasi produk; serta (4) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM.

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi komoditas potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Tangerang. Akan tetapi, sektor tersebut memiliki berbagai permasalahan dari sisi kapasitas SDM pertanian, produktivitas, daya saing produk, infrastruktur pendukung, manajemen/kelembagaan, serta faktor iklim dan geografis wilayah. Akar permasalahan ini adalah (1) keterbatasan infrastruktur dan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha; (2) rendahnya regenerasi petani/nelayan; (3) kesejahteraan petani; (4) belum optimalnya kemitraan dan manajemen kelompok tani dan nelayan; serta (5) adaptasi-mitigasi terhadap cuaca/iklim. Selain itu, Kabupaten Tangerang memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi sumber pendapatan daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola kawasan strategis pariwisata, kurangnya daya tarik objek wisata, belum optimalnya pemanfaatan sektor MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions*), serta keterbatasan sarana-prasarana penunjang aktivitas wisata.

## 2) Skalabilitas Ekonomi Mikro

Perekonomian yang maju harus diikuti dengan penurunan ketimpangan dan penguatan ekonomi mikro. Maka dari itu diperlukan upaya peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, BUMD, BUMDes, serta kewirausahaan. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah dapat dilihat dari sisi produktivitas, tata kelola usaha dan kelembagaan, rantai dan akses pasar, keterbatasan permodalan. Akar permasalahan ini adalah: (1) terbatasnya kemitraan untuk rantai hilirisasi dan inovasi produk; (2) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM; serta (3) keterbatasan informasi dan kemitraan untuk mengakses pasar.

## 3) Daya Saing dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Pembangunan kualitas dan penyerapan tenaga kerja merupakan aspek dalam isu strategis perekonomian dan daya saing daerah. Aspek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja di suatu daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah *missmatch* dengan lapangan pekerjaan, keterbatasan informasi lapangan kerja, keterbatasan pelatihan tenaga kerja, keterbatasan layanan perlindungan ketenagakerjaan. Akar permasalahan ini adalah: (1) terbatasnya kemitraan antara tenaga kerja dan perusahaan; (2) keterbatasan pendataan dan sistem informasi ketenagakerjaan; serta (3) belum optimalnya tata kelola, regulasi, dan pengawasan ketenagakerjaan.

## 4) Daya Saing Daerah dan Iklim Investasi

Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing daerah untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggulan kompetitif, terlebih posisi Kabupaten Tangerang menjadi bagian dari aglomerasi Jabodetabek. Maka dari itu diperlukan integrasi ekonomi atau kerja sama lintas wilayah dan lintas *stakeholder* (e.g. pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi dapat dilihat dari sisi kewenangan/kelembagaan, tata kelola pemerintah, kepastian regulasi, dan sistem informasi yang belum terintegrasi. Akar permasalahan ini adalah: (1) belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan serta koordinasi antar K/L dan OPD terkait; (2) belum optimalnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal; (3) belum optimalnya adaptasi terhadap perubahan sistem perijinan menjadi OSS; serta (4) keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM.

C) Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan gambaran kondisi kesehatan individu maupun masyarakat di Kabupaten Tangerang. Untuk itu perlu diwujudkan derajat kesehatan yang merata dan berkualitas sebagai bentuk keberhasilan pembangunan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Permasalahan kesehatan yang masih menjadi sorotan di Kabupaten Tangerang berkaitan dengan distribusi fasilitas kesehatan, kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, serta tingkat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, termasuk di dalamnya problem *stunting*. Akar permasalahan dari beberapa hal tersebut berakut seputar kualitas dan kapasitas SDM, pelaksanaan regulasi, serta koordinasi antar sektor yang mendukung penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

D) Kualitas Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek dasar yang membentuk daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang. Sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pendidikan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, masih terdapat beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang, yakni : 1) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, 2) belum optimalnya pembentukan karakter peserta didik, 3) belum optimalnya literasi dan numerasi masyarakat, 4) kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, 5) belum maksimalnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

E) Pemenuhan, Penataan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

1) Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Pemenuhan sarana dan prasarana dasar merupakan aspek dari isu pemenuhan, penataan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur lingkungan masyarakat. Lingkup infrastruktur dasar meliputi infrastruktur Standar Pelayanan Minimum (SPM), permukiman yang layak, infrastruktur perhubungan dan transportasi, serta sarana penunjang sektor perekonomian.

Infrastruktur Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi standar penghidupan yang layak dan pemerintah diharuskan menjamin akses masyarakat terhadap layanan/ infrastruktur tersebut. Akan tetapi permasalahannya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap infrastruktur tersebut dari sisi ekonomi, sarana prasarana pendukung (jalan dan transportasi), dan geografis wilayah. Sanitasi dan permukiman layak merupakan infrastruktur dasar dan meningkatkan *quality of life* masyarakat. Akan tetapi permasalahannya adalah belum optimalnya regulasi penanganan permukiman tidak layak huni, minimnya inventarisasi/ pendataan cakupan permukiman kumuh, serta kecenderungan masyarakat menggunakan sarana-prasarana bermukim mandiri/ alami yang tidak sesuai standar.

Dukungan infrastruktur berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi permasalahannya adalah terbatasnya infrastruktur pendukung pada komoditas unggulan (perindustrian dan perdagangan) serta komoditas potensial (pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata). Akar permasalahan tersebut adalah keterbatasan anggaran, minimnya kemitraan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur, serta belum optimalnya regulasi dan/atau skema insentif-disinsentif untuk pengembangan infrastruktur tersebut. Selain itu, infrastruktur perhubungan dan transportasi menjadi *backbone* pergerakan dan perekonomian daerah.

Akan tetapi permasalahannya adalah belum optimalnya tata kelembagaan bidang perhubungan, terbatasnya sarana-prasarana jalan dan pengawasan ketertiban lalu lintas, serta belum terintegrasinya moda transportasi umum.

2) Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Pengembangan Infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya regulasi dan skema insentif-disinsentif bagi infrastruktur berkelanjutan, belum optimalnya tata kelola dan koordinasi lintas OPD dan K/L untuk pengembangan infrastruktur berkelanjutan, belum optimalnya kemitraan untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur, serta keterbatasan anggaran dan kapasitas SDM dalam pengembangan infrastruktur.

3) Kerjasama Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas *stakeholder*. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang infrastruktur terintegrasi. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan serta koordinasi antar K/L dan OPD serta belum optimalnya tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi.

4) Pengembangan pembangunan wilayah utara dan tengah Kabupaten Tangerang

Isu kesenjangan wilayah utara dan tengah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam merespon kebutuhan masyarakat akan pemerataan dan efisiensi pembangunan. Pengembangan wilayah tidak akan berhasil tanpa dukungan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas harus terintegrasi dengan rencana tata ruang. Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah di bagian utara dan tengah Kabupaten Tangerang dapat tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

F) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1) Ketahanan Air, Energi, dan Pangan

Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Akan tetapi, terdapat berbagai permasalahan dalam menjamin ketahanan daerah. Tantangan ketahanan air adalah penurunan kualitas dan kuantitas air bersih yang ditunjukkan dengan hasil neraca air menunjukkan defisit air serta 83% wilayah merupakan daerah krisis air<sup>7</sup>. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih serta keterbatasan sarana-prasarana pengelolaan air baku dan air bersih.

Pengelolaan cadangan pangan daerah merupakan aspek yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dalam suatu daerah. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas serta belum meratanya cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam hal ketahanan energi, cakupan layanan infrastruktur energi telah memenuhi, tetapi tantangan kedepannya adalah transisi penggunaan

---

<sup>7</sup> Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

energi baru terbarukan. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya tata kelola dan manajemen dalam pengembangan EBT serta keterbatasan sarana-prasarana dalam pengadaan dan pengembangan EBT di Kabupaten Tangerang.

2) Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan meningkatkan *quality of life*. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, belum ketatnya regulasi dan fungsi pengawasan terhadap kawasan konservasi, belum optimalnya pendataan/ inventarisasi kawasan lindung/ konservasi, serta belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup.

3) Resiliensi terhadap Bencana

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi adalah: (1) belum optimalnya tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana; (2) terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana; serta (3) belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Tabel 2.63  
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                     | ISU KLHS                                                                                                                              | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ISU STRATEGIS DAERAH               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | GLOBAL                                                                                                    | NASIONAL                                                                                                                                                                           | REGIONAL                                                                                        |                                    |
| - Capaian indeks reformasi birokrasi 76,67/100 dengan kategori sangat baik (2023)<br>- Capaian indeks kepuasan masyarakat 84,79/100 (2023)                                                                                                                                                                                                             | Belum optimalnya reformasi birokrasi                                                                                                                                             | - Optimalisasi tata kelola pemerintahan<br>- Tingkat SDM rendah terhadap pelayanan pemerintah berbasis elektronik                     | - Demografi Dunia<br>- Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi<br>- Kemajuan Teknologi<br>- Urbanisasi Global | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia                                                                                                                   | Tata kelola pemerintahan yang berintegritas                                                     | Tata Kelola Pemerintah             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belum optimalnya kesatuan bangsa dan politik                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                           | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, judi, dan penyelundupan.                                    | Tata kelola pemerintahan yang berintegritas                                                     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belum optimalnya pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro berketahanan yang tangguh |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                    |
| - Sektor perindustrian dan sektor perdagangan-jasa berkontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Tangerang, akan di proyeksikan meningkat karena Kabupaten Tangerang menjadi wilayah aglomerasi Jabodetabek dan pengembangan kawasan strategis nasional<br>- Sektor pariwisata akan meningkat dengan adanya peningkatan daya tarik wisata di sektor MICE | Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan (perindustrian, perdagangan,jasa) dan komoditas potensial (pertanian, perikanan, pariwisata) berlandaskan prinsip berkelanjutan | - Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah<br>- Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri | - Perubahan Iklim<br>- Kemajuan Teknologi<br>- Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi                        | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.                                                       | - Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif                                           | Perekonomian dan Daya Saing Daerah |
| - Adanya program inkubasi bisnis untuk penciptaan wirausaha muda                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lemahnya daya saing kewirausahaan serta                                                                                                                                          | - Belum optimalnya                                                                                                                    | - Kemajuan Teknologi                                                                                      | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan                                                                                                                            | - Pembangunan perekonomian yang                                                                 |                                    |

| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERMASALAHAN                                                                             | ISU KLHS                                             | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                                         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | ISU STRATEGIS DAERAH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                      | GLOBAL                                                         | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                   | REGIONAL                                                                                                                         |                      |
| dan peningkatan skalabilitas usaha mikro kecil<br>- Peningkatan persentase IKM yang berpeluang ekspor (pada tahun 2023 mencapai 38,86%)                                                                                                                                                         | skalabilitas usaha mikro - kecil menengah, koperasi, dan BUMD                            | pembangunan infrastruktur wilayah                    | - Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi"                         | lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi                                                         | tanggung dan inklusif                                                                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan serta pemberdayaan masyarakat    | Peningkatan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran      | - Demografi Dunia                                              | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                                                              | - Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif<br>- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing         |                      |
| - Sektor perindustrian dan perdagangan-jasa yang berorientasi padat karya berpotensi meningkatkan serapan tenaga kerja                                                                                                                                                                          | Lemahnya daya saing tenaga kerja dan belum optimalnya jaminan kesejahteraan tenaga kerja | Peningkatan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran      | - Demografi Dunia<br>- Kemajuan Teknologi                      | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | - Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif<br>- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing         |                      |
| - Kabupaten Tangerang bagian dari wilayah aglomerasi Jabodetabek yang mendorong <i>spillover effect</i> dan daya saing daerah untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi<br>- Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN (pada tahun 2023 mencapai 26,81%) | Belum optimalnya daya saing daerah dan manajemen iklim investasi                         | - Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah | - Kemajuan Teknologi<br>- Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi" | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.                                                                                                               | - Pembangunan perekonomian yang tanggung dan inklusif<br>- Pembangunan keamanan wilayah, demokrasi substansial dan ekonomi makro |                      |



| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERMASALAHAN                                                                                                  | ISU KLHS                                           | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | ISU STRATEGIS DAERAH                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                    | GLOBAL                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                 | REGIONAL                                                                                                                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          | berketahanan yang tangguh                                                                                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                          |
| <p>- Usia Harapan Hidup di Kabupaten Tangerang tahun 2024 menempati urutan ketiga tertinggi apabila dibandingkan dengan kab/kota lain di Provinsi Banten dengan capaian 70,88 tahun</p> <p>- Beberapa cakupan pelayanan kesehatan (kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas, kunjungan bayi, pelayanan anak balita, penemuan dan penanganan DBD, dll) telah mencapai 100% pada tahun 2023</p> | Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat                                                                 | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah | <p>- Demografi Dunia</p> <p>- Perubahan Iklim</p> <p>- Urbanisasi Global</p> | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | <p>- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing</p> <p>- Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan</p> | Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Belum optimalnya layanan penyelenggaraan pendidikan                                                           | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah | <p>- Demografi Dunia</p> <p>- Kemajuan Teknologi</p>                         | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing                                                                        | Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belum optimalnya penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang terpadu, berkualitas, dan ramah lingkungan | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah | <p>- Perubahan Geopolitik dan Geoekonomi</p> <p>- Urbanisasi global</p>      | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan                                                                    | <p>- Pembangunan perekonomian yang tangguh dan inklusif</p> <p>- Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan</p>            | Pemenuhan, Penataan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah |

| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERMASALAHAN                                                                                                                           | ISU KLHS | ISU LINGKUNGAN DINAMIS |                                                                                                                                                                                                                                            |          | ISU STRATEGIS DAERAH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |          | GLOBAL                 | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                   | REGIONAL |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |          |                        | agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi                                                                                                                                                                       |          |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data potensial bidang perdagangan : 14 item hilir mudik jalur logistik</li> <li>Terdapat 50 pasar, agen LPG, pangkalan, SPBU dll (kurang lebih 3880 unit)</li> <li>- Terdapat beberapa rencana pengembangan kawasan sbb:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Tangerang memiliki kawasan Urban Akuakultur di Ketapang</li> <li>2. Rencana pembangunan kawasan pesisir di Desa Ketapang</li> <li>3. Rencana kawasan permukiman nelayan di Kronjo</li> <li>4. Rencana penataan kawasan permukiman Desa Surya Bahari</li> <li>5. Rencana Tanjung Pasir Mangrove</li> <li>6. Penataan permukiman nelayan kawasan Cituis</li> </ol> </li> <li>- Upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengadaan kolam budidaya dan kolam pakan ikan</li> </ul> | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur berlandaskan kesesuaian pemanfaatan ruang dan daya dukung wilayah                           |          |                        | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru                                                   |          |                      |
| Kabupaten Tangerang bagian dari wilayah aglomerasi Jabodetabek yang mendorong spillover effect dan daya saing daerah untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belum optimalnya kerjasama antar daerah (utamanya aglomerasi Jabodetabek) untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional |          |                        | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi |          |                      |

| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERMASALAHAN                                                                                                        | ISU KLHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                      | ISU STRATEGIS DAERAH                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GLOBAL                                                                                                                       | NASIONAL                                                                                                                                                                                 | REGIONAL                                             |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program dan kegiatan desa mandiri pangan (mis. Mandiri Tahan Pangan, ketahanan pangan kawasan pesisir Tangerang, dll)</li> <li>- Adanya program mengenai peningkatan kapasitas dan pelayanan air bersih (mis. Instalasi Pelayanan Air Bersih, Instalasi Pengolahan Air, dll)</li> <li>- Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi air baku dari DAS, sumber air permukaan, dan CAT</li> </ul> | Belum optimalnya ketahanan air, energi, dan pangan                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri</li> <li>- Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Industri</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Iklim</li> <li>- Kemajuan Teknologi</li> <li>- Demografi Dunia</li> </ul> | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Belum optimalnya perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai</li> <li>- Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri</li> <li>- Belum Optimalnya Kinerja Saluran Pengelolaan Air Limbah Domestik dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Iklim</li> </ul>                                                          | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur       | Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan |                                               |

| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERMASALAHAN                                 | ISU KLHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | ISU STRATEGIS DAERAH                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GLOBAL                                                                                            | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REGIONAL                                                                                                                                                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Belum optimalnya manajemen risiko bencana    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya Tingkat Mitigasi Bencana di Kawasan Permukiman dan Perumahan Perdesaan</li> <li>- Rendahnya kualitas lingkungan hidup</li> <li>- Pendangkalan aliran sungai serta terkendala dalam penanganan normalisasi fungsi sungai</li> <li>- Alih fungsi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Iklim</li> <li>- Kemajuan Teknologi</li> </ul> | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur                                                                                                                                                                                       | Manajemen kewilayahan yang adaptif dan berkelanjutan                                                                                                                                         |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, meski capaian indeksnya baru 63,84</li> <li>- Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial telah</li> </ul> | Belum optimalnya ketahanan sosial masyarakat | Belum Optimal dalam Kesetaraan Gender, serta Perlindungan Perempuan dan Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demografi Dunia                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia</li> <li>- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing</li> <li>- Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal</li> </ul> | Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial |

| POTENSI DAERAH                                                          | PERMASALAHAN                                           | ISU KLHS                                           | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | ISU STRATEGIS DAERAH |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                         |                                                        |                                                    | GLOBAL                                    | NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REGIONAL                                                                                                                             |                      |
| mencapai 100% pada tahun 2019 - 2023                                    |                                                        |                                                    |                                           | - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                      |
| - Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2023 mencapai 100% | Belum optimalnya pengembangan seni budaya dan olahraga | Belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah | - Demografi Dunia<br>- Kemajuan Teknologi | - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.<br>- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | - Sumber daya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing<br>- Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berkearifan lokal |                      |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

### BAB III

## VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan merupakan landasan dalam merumuskan visi dan misi pembangunan. Visi dan misi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan visi dan misi dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode kepemimpinan tahun 2025-2029. Visi dan misi pembangunan diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang. Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

#### 3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

##### 3.1.1 Visi dan Misi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang.

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG  
SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”  
(*Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang*)

Penjabaran visi di atas merujuk pada kata kunci sebagai berikut:

a) Sejahtera

Sejahtera diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Selain itu, diwujudkan melalui harmonisasi kehidupan sosial (seperti kerukunan umat beragama, kualitas keluarga, dll) serta daya dukung lingkungan sebagai landasan pembangunan untuk mencapai kemajuan bersama.

Didefinisikan dan diindikasikan dengan, Menurunnya Angka Kemiskinan serta Menurunnya Angka Pengangguran, Menipisnya Angka Gini Rasio, Tingginya Kerukunan Umat Beragama, Tingginya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana keagamaan, serta adanya stimulan/dukungan Pemda terhadap Kelompok Masyarakat yang berfokus didunia keagamaan.

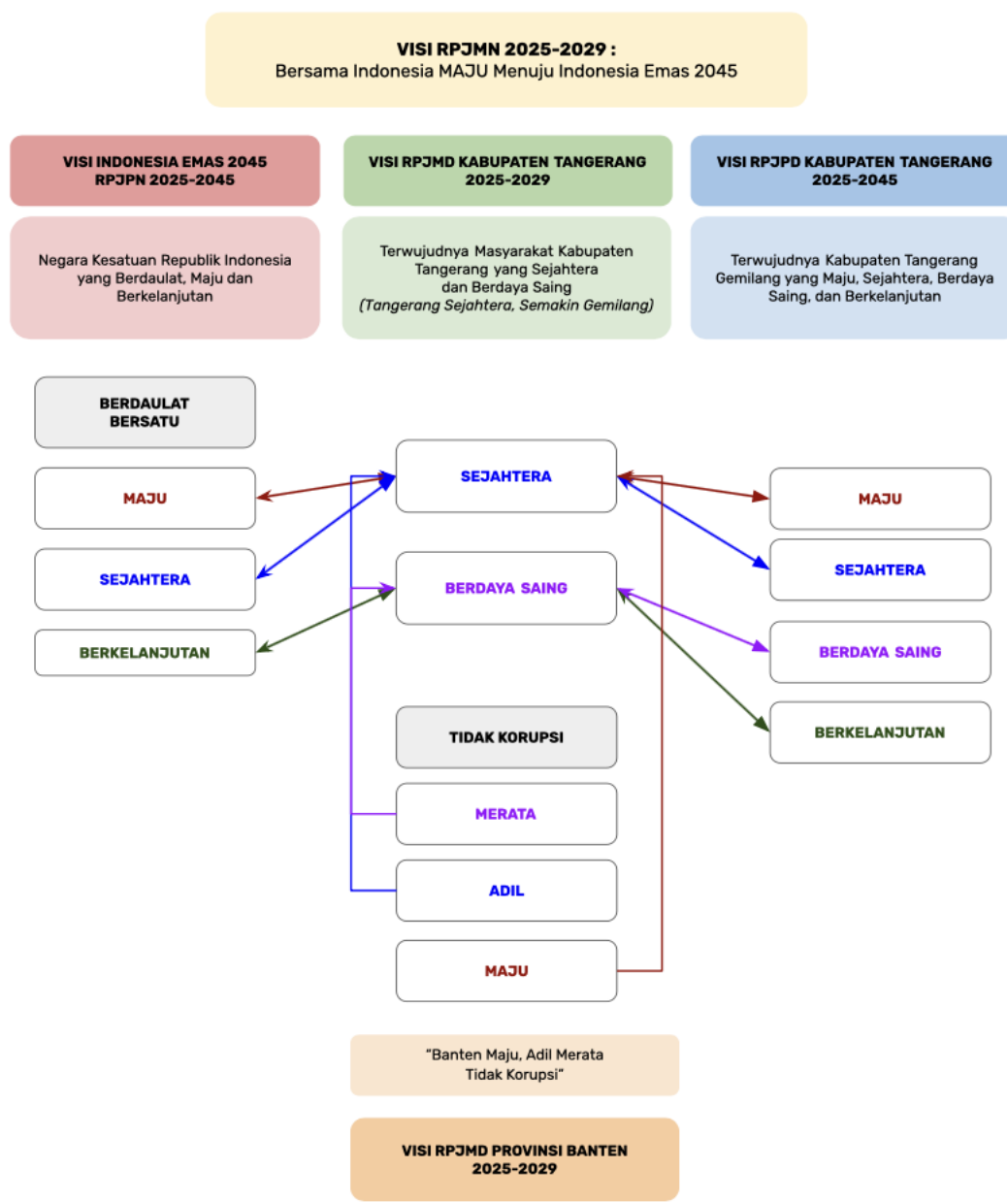
b) Berdaya Saing

Berdaya saing digambarkan melalui inovasi dalam kebijakan/program dengan tetap memperhatikan nilai-nilai daerah dan kualitas sumber daya manusia yang adaptif. Selain itu, berdaya saing diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, serta perekonomian yang maju, sejalan dengan lingkungan hidup yang berkualitas.

Didefinisikan dan diindikasikan dengan Menurunnya angka stunting dan gizi buruk, Kemudahan berinvestasi, Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, Infrastruktur yang Merata, Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif serta Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Tangerang selaras dengan Visi Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diterjemahkan dalam 8 Misi (Asta Cita) yang didukung

oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 yaitu “*Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi*” yang diterjemahkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan. Kata kunci Visi RPJMD Kabupaten Tangerang telah selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten, yaitu pembangunan yang maju dan berdaya saing yang berlandaskan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.1  
Penyelarasan Visi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, RPJPN, RPJMD Provinsi Banten dan RPJPD Kabupaten Tangerang  
*Sumber: Analisis Penyusun, 2025*

Visi Pembangunan Daerah diterjemahkan dalam Misi Pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, serta arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Rumusan misi di bawah ini didasarkan pada permasalahan dan isu strategis pembangunan serta misi calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah yang diformulasikan ke dalam 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:



1. Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Pemerintahan yang akuntabel dan efisien merupakan bagian dari prinsip *good governance*. Prinsip akuntabel menjadi acuan dalam menjalankan program dan kebijakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat mendorong tingkat kepercayaan publik. Efisiensi diperlukan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif.

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal serta pencegahan terhadap gangguan keamanan masyarakat yang efektif. Perwujudan pelayanan publik yang optimal mulai dari administrasi hingga layanan pengaduan masyarakat, dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan melalui pendekatan yang lebih responsif. Melalui penerapan sistem yang lebih sederhana dan efisien dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan keperluan administrasi tanpa melewati birokrasi yang berbelit. Selain itu, hal yang menjadi prioritas adalah penguatan SDM sektor pelayanan yang diharapkan dapat menciptakan aparat/birokrat memiliki kompetensi dan sikap profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan tindakan preventif yang integratif dengan pelayanan publik. Koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum perlu diperkuat melalui program-program keamanan lingkungan dan sosialisasi keamanan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, lingkungan aman dan kondusif sangat sesuai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial.

2. Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang kuat, produktif, dan berdaya saing menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang solid, penurunan tingkat kemiskinan, menekan ketimpangan, kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing, serta adaptif terhadap tantangan global dan nasional (e.g. geoekonomi, pembangunan berkelanjutan, penurunan GRK, transisi EBT, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pondasi ekonomi kerakyatan serta memperkuat sistem perdagangan dan jasa untuk pengembangan ekonomi daerah.

Perekonomian yang maju ditunjukkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan nilai tambah sektor unggulan (e.g. industri, perdagangan dan jasa, serta manufaktur) dan sektor potensial (e.g. pertanian, perikanan, peternakan, serta pariwisata). Peningkatan nilai tambah perekonomian didorong melalui daya saing tenaga kerja untuk berinovasi dan menghasilkan produk dengan keunggulan kompetitif. Selain itu, perekonomian yang maju ditunjang dengan infrastruktur penghubung dalam integrasi ekonomi domestik dan regional dalam mengakses pasar dan kemudahan pergerakan orang – barang. Selain itu, akses terhadap pasar juga berhubungan dengan menjaga kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah. Integrasi ekonomi membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas *stakeholder* (e.g. pemerintah, badan usaha, swasta, dan lain sebagainya) yang dilandasi dengan kepastian regulasi dan iklim investasi yang kondusif.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkeadilan diwujudkan melalui peningkatan daya saing dan skalabilitas ekonomi di akar rumput yang meliputi UMKM, koperasi, badan usaha desa, serta kewirausahaan. Skalabilitas ekonomi mikro didorong melalui kemudahan akses terhadap

pemodalan, pengembangan kapasitas tenaga kerja dalam manajemen usaha, inkubasi bisnis kewirausahaan, serta kemudahan akses terhadap pasar.

Perekonomian Kabupaten Tangerang yang berkelanjutan menunjukkan komitmen untuk transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Hal ini diwujudkan melalui pengetatan regulasi untuk aktivitas perekonomian dengan prinsip berkelanjutan dan sirkular serta investasi terhadap transisi energi baru terbarukan (EBT).

3. Misi Ketiga: Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas

Kesehatan masyarakat yang berkualitas di Kabupaten Tangerang dapat diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh optimalisasi pemberian layanan kesehatan dengan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas di setiap kecamatan, serta peningkatan pola hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat. Pengoptimalan layanan kesehatan diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan. Selain peningkatan kuantitas, perlu ditunjang dengan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi rekrutmen tenaga kesehatan serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemberian jaminan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu perlu dilakukan secara merata di seluruh wilayah dan untuk seluruh lapisan.

Terwujudnya kesehatan yang berkualitas juga perlu didukung melalui pemenuhan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Pembangunan dan perbaikan unit-unit layanan kesehatan menjadi prioritas untuk memastikan pemerataan layanan serta pemenuhan kebutuhan peralatan medis yang sesuai standar. Upaya tersebut juga sejalan dengan target untuk menekan angka kesakitan dan stunting, yang diimbangi dengan peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di seluruh lapisan masyarakat. Berbagai program kesehatan yang bersifat preventif, seperti edukasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pemenuhan gizi masyarakat, dan penerapan PHBS, digalakkan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat.

4. Misi Keempat : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, optimalisasi layanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi salah satu komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya yang memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, baik dari kelompok disabilitas maupun anak-anak di daerah terpencil, dengan fasilitas pendidikan sesuai standar yang tersedia secara merata. Peningkatan kualitas pembelajaran salah satunya ditunjukkan dengan penguatan literasi dan numerasi sebagai dasar kemampuan akademik peserta didik. Kemampuan akademik perlu diimbangi dengan pembentukan karakter peserta didik melalui pendekatan kurikulum muatan lokal. Selain penghayatan nilai budaya, nilai-nilai toleransi perlu disisipkan dalam pendidikan sejak dini, sebagai modal dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tangerang.

Upaya-upaya sebelumnya perlu didukung dengan pengoptimalan kuantitas dan kualitas maupun kompetensi tenaga pendidik, melalui pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan pengadaan pelatihan yang berkelanjutan bagi tenaga pendidik. Di samping itu, perwujudan sistem pendidikan yang berkualitas juga didukung melalui pengembangan potensi kepemudaan, seni budaya, dan olahraga. Hal tersebut dapat menumbuhkan kecakapan dalam bekerja sama, memiliki kedisiplinan tinggi, serta akan menciptakan sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai luhur.

5. Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur terpadu merupakan landasan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan *Quality of Life* bagi wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui peningkatan penyediaan dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan. Infrastruktur dasar menjadi fondasi dalam mendorong daya saing sumber daya manusia (e.g. pendidikan, kesehatan, dan permukiman) serta mengakselerasi aktivitas perekonomian wilayah (e.g. nilai tambah sektor, perhubungan dan perdagangan, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya). Strategi untuk pencapaian misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar serta mewujudkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tangerang.

Pengembangan infrastruktur wilayah harus berlandaskan pada prinsip berkelanjutan dan daya dukung wilayah. Hal ini terwujud melalui (1) Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara, (2) pengembangan *Blue-Green Infrastructure* dan infrastruktur penunjang Energi Baru Terbarukan (EBT); serta (3) Keterpaduan penataan bangunan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan perencanaan tata ruang serta daya dukung lingkungan.

Pengembangan infrastruktur yang terpadu dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi lintas wilayah dan lintas *stakeholder*. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Tangerang dalam bagian aglomerasi Jabodetabek yang memiliki agenda kerjasama pembangunan dan layanan yang infrastruktur terintegrasi. Selain itu, juga beberapa proyek strategis nasional di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan kerjasama lintas K/L dan *stakeholder* terkait. Berbagai opsi skema pembiayaan kreatif seperti KPBU diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Tangerang. Kerjasama dan kolaborasi juga membuka peluang untuk mendorong realisasi investasi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur.

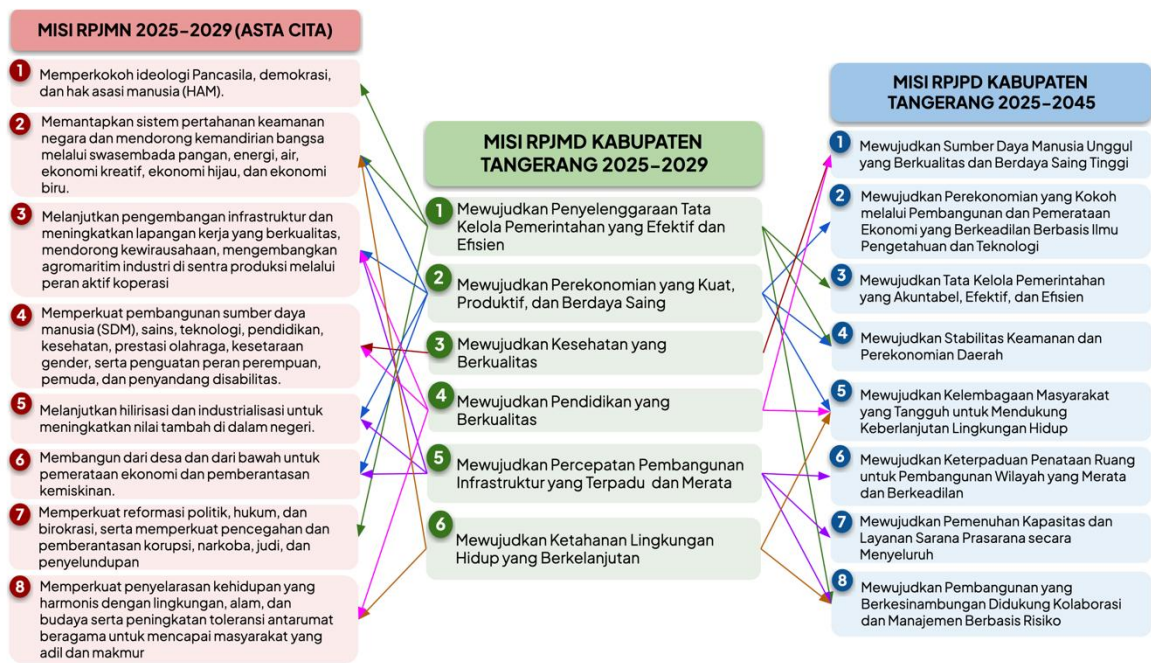
6. Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologis menjadi landasan dan penyangga pembangunan wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini terwujud melalui (1) Peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan daerah; (2) Peningkatan perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup; (3) Peningkatan manajemen risiko bencana yang responsif. Strategi dalam pencapaian misi ini adalah meningkatkan penanganan masalah lingkungan, serta melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati untuk generasi masa depan.

Ketahanan air, pangan, dan energi merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus dapat terpenuhi dalam jangka panjang. Dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi memerlukan langkah strategis dalam efisiensi pendayagunaan sumber daya alam, diversifikasi dan konservasi energi, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Perlindungan kawasan konservasi dan lindung berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Maka dari itu, diperlukan arahan strategis dalam perlindungan ekosistem melalui optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi, penegakan regulasi pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, serta pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki risiko terhadap bencana, sehingga manajemen risiko bencana yang responsif dan terpadu menjadi kunci dalam adaptasi dan mitigasi bencana. Manajemen risiko bencana diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana



Gambar 3.2  
Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang dengan Visi RPJMN, dan  
RPJPD Kabupaten Tangerang  
Sumber: Analisis Penyusun, 2025

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang sesuai dengan arah Provinsi Banten, khususnya indikator makro pembangunan dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Perbandingan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan  
RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

| No | Target RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 |             |               | Target RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029 |            |             |
|----|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
|    | Indikator                              | 2025        | 2029          | Indikator                                  | 2025       | 2029        |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)           | 5,20-5,30   | 7,23-7,90     | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)               | 5,27       | 7,56        |
| 2  | PDRB Per Kapita (Rp. Juta)             | 72,35-75,10 | 104,00-106,40 | PDRB Per Kapita (Rp. Juta)                 | 57,51      | 69,75       |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi (%)           | 4,0         | 3,8           | Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)               | 21,18      | 21,00       |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)                 | 4,50-5,50   | 2,42-3,42     | Tingkat Kemiskinan (%)                     | 5,94       | 4,67        |
| 5  | Rasio Gini (nilai)                     | 0,344-0,365 | 0,326-0,330   | Rasio Gini (nilai)                         | 0,266-2,70 | 0,243-0,258 |
| 6  | Indeks Modal Manusia (nilai)           | 0,56        | 0,59          | Indeks Pembangunan Manusia (nilai)         | 76,62      | 79,42       |
| 7  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)     | 39,45       | 56,65         | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)         | 18,21      | 19,62       |
| 8  | IKLH (nilai)                           | 66,92       | 67,93         | IKLH (nilai)                               | 61,57      | 72,26       |
| 9  | TPT (%)                                | 6,87-7,24   | 6,39-6,82     | TPT (%)                                    | 6,06-6,62  | 5,50-5,62   |

Sumber : Dokumen Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029; Analisis Penyusun

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan sebagai arahan strategis dalam kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran adalah penjabaran tujuan dan dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sebagai tolak ukur pembangunan daerah.

Adapun penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. Dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 terdapat 8 Misi (Asta Cita)

dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Dalam RPJMD Provinsi Banten memiliki arah pembangunan kewilayahan untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 3.2  
Penyelarasan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Prioritas dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

| RPJM Nasional 2025-2029                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RPJMD PROVINSI BANTEN 2025-2029                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | RPJMD KABUPATEN TANGERANG 2025-2029                                                                                         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VISI<br>Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VISI<br>Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi                                                                                                         |                                                                                                                                                                      | VISI<br>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                                              |
| ASTA CITA                                                 | QUICK WINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISI                                                                                                                                                     | INTERVENSI SUPER PRIORITAS                                                                                                                                           | ISU STRATEGIS                                                                                                               | MISI                                                                         |
| PRIORITAS 1<br>PRIORITAS 2<br>PRIORITAS 7                 | ✓ Menaikkan gaji ASN (TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta pensiunan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem.                                                                                                                                                                                                                   | Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh | Percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Digitalisasi tata kelola pemerintah                                                               | Tata Kelola Pemerintahan                                                                                                    | Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien |
| PRIORITAS 2<br>PRIORITAS 3<br>PRIORITAS 5<br>PRIORITAS 6  | ✓ Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.<br>✓ Menambah dan memberikan program kartu-kartu kesejahteraan serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.<br>✓ Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. | Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial                                                     | Pengembangan hilirisasi industri dan optimalisasi pengembangan KEK dan PSN                                                                                           | Perekonomian dan Daya Saing Daerah                                                                                          | Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing              |
| PRIORITAS 4                                               | ✓ Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.<br>✓ Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten                                                                                              | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif                                         | Penataan tata kelola rumah sakit dan pelayanan kesehatan serta pengembangan konsep <i>hospital tourism/ medical tourism</i>                                          | Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                                                | Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas                                      |
| PRIORITAS 3<br>PRIORITAS 4<br>PRIORITAS 8                 | ✓ Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.<br>✓ Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak.                                                                                                              |                                                                                                                                                          | Pengembangan <i>Center of Excellence, Science Park</i> dan <i>Technopark</i> . pengembangan layanan pendidikan dasar-menengah dan pendidikan tinggi                  | Kualitas Layanan Pendidikan                                                                                                 | Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas                                       |
| PRIORITAS 3<br>PRIORITAS 5<br>PRIORITAS 6                 | ✓ Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk infrastruktur transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).                                                                                                                           | Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas                                                                        | Pengembangan transportasi publik massal yang terintegrasi serta pengembangan jalan tol, nasional, provinsi, dan kab/kota sebagai penunjang mobilitas barang dan jasa | Pemenuhan, Penataan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah                                                                    | Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur               |
| PRIORITAS 2<br>PRIORITAS 8                                | ✓ Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.                                                                                                                                                                                                                                           | Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana                                                                     | Pengembangan energi terbarukan serta peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana                                                                                   | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                               | Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan                               |

Sumber : Dokumen RPJM Nasional Tahun 2025-2029; Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (diolah)

Misi Pertama : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

1) Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif  
Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing

1) Tujuan Pertama : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah  
Sasaran :

- Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial

- Meningkatnya skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD
  - Mengendalikan Harga Bahan Pokok
- 2) Tujuan Kedua : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Sasaran :
- Meningkatnya Kemandirian Desa
  - Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
  - Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

Misi Ketiga : Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas

- 1) Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal
- Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat

Misi Keempat : Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas

- 1) Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Sasaran:

- Meningkatnya Pelayanan Pendidikan
- Meningkatnya Daya Saing Pemuda
- Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama

Misi Kelima : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

- 1) Tujuan : Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas
- Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu

Misi Keenam : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- 1) Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Sasaran :

- Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
- Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan

Tabel 3.3  
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

| VISI                                                                                                                     | MISI                                                                         | TUJUAN                                                       | SASARAN                                                                        | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                                              | BASELINE |       | TARGET CAPAIAN |               |               |               |               |               | Kondisi Akhir |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                |                                                                         | 2023     | 2024  | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |               |
| “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”<br>(Tangerang Sejahtera. Semakin Gemilang) | Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien | Mewujudkan Birokrasi yang Responsif. Akuntabel. dan Inovatif |                                                                                | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)                                     | 76,67    | 84,56 | 85,12          | 85,68         | 86,24         | 87,38         | 87,96         | 88,54         | 88,54         |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik                         | Indeks Pelayanan Publik (indeks) **)                                    | 4,08     | 4,17  | 4,23           | 4,27          | 4,30          | 4,34          | 4,37          | 4,40          | 4,40          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                            | Indeks PEMDI                                                            | N/A      | N/A   | N/A            | 1,91          | 2,1           | 2,3           | 2,50          | 2,70          | 2,70          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN (indeks) **)                                 | 83,71    | 82,28 | 82,40          | 82,5          | 82,55         | 82,60         | 82,70         | 83,00         | 83,00         |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (indeks)                      | 73,456   | 73,96 | 74,46          | 74,96         | 75,46         | 75,96         | 76,46         | 76,96         | 76,96         |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Nilai AKIP (nilai) **)                                                  | 73,01    | 75,2  | 76             | 77            | 78            | 79            | 80,10         | 80,20         | 80,20         |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (indeks)             | N/A      | 99,8  | 91             | 92            | 93            | 94            | 95            | 96            | 96            |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Maturitas SPIP (indeks) **)                                             | 3        | 3     | 4              | 4             | 4,1           | 4,1           | 4,1           | 4,1           | 4,1           |
|                                                                                                                          | Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing              | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah       |                                                                                | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                                            | 5,18     | 5,00  | 5,27           | 5,77          | 6,31          | 6,91          | 7,56          | 8,27          | 8,27          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Tingkat Inflasi (%) **)                                                 | 3,17     | 1,8   | 2,00           | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              | Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) **)             | 33,65    | 33,74 | 33,55 - 33,75  | 33,55 - 33,75 | 33,60 - 33,80 | 33,60 - 33,80 | 33,65 - 33,85 | 33,70 - 33,90 | 33,70 - 33,90 |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)                         | 11,05    | 11,35 | 11,15 - 11,35  | 11,21 - 11,37 | 11,25 - 11,40 | 11,29 - 11,43 | 11,31 - 11,45 | 11,33 - 11,50 | 11,33 - 11,50 |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB (%) | 6,3      | 6,16  | 6,07           | 6,1           | 6,14          | 6,14          | 6,2           | 6,21          | 6,21          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (%) **)        | 1,49     | 1,56  | 1,76           | 1,83          | 1,91          | 1,99          | 2,07          | 2,15          | 2,15          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              |                                                                                | Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (%) PDRB) **)               | 26,97    | 26,97 | 27,02          | 27,08         | 27,14         | 27,20         | 27,26         | 27,32         | 27,32         |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              | Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD       | Rasio Volume Usaha Koperasi (%) **)                                     | 1,25     | 1,25  | 1,26           | 1,27          | 1,29          | 1,30          | 1,31          | 1,33          | 1,33          |
|                                                                                                                          |                                                                              |                                                              | Mengendalikan Harga Bahan Pokok                                                | Indeks Perkembangan Harga (Indeks)                                      | 5,08     | 4,13  | 5,11           | 5,14          | 5,16          | 5,18          | 5,23          | 5,28          | 5,28          |



| VISI | MISI                                                           | TUJUAN                                            | SASARAN                                                                          | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                            | BASELINE |        | TARGET CAPAIAN |        |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  |                                                       | 2023     | 2024   | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |               |
|      |                                                                | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat             |                                                                                  | Tingkat Kemiskinan (%)**)                             | 6,93     | 6,55   | 5,94           | 5,59   | 5,27   | 4,96   | 4,67   | 4,4    | 4,4           |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya Kemandirian Desa                                                    | Indeks Desa (Indeks)                                  | 0,755    | 0,7812 | 0,7830         | 0,7850 | 0,7910 | 0,8010 | 0,8100 | 0,8190 | 0,8190        |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja                                             | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**)             | 66,87    | 65,88  | 68,08          | 68,69  | 69,31  | 69,93  | 70,56  | 71,19  | 71,19         |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif                                  | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) (indeks)         | N/A      | 57,8   | 58             | 59     | 60     | 61     | 62     | 63     | 63            |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Indeks Ketimpangan Gender (indeks) **)                | N/A      | 0,400  | 0,397          | 0,395  | 0,392  | 0,390  | 0,388  | 0,388  | 0,388         |
|      | Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas                          | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat         |                                                                                  | Usia Harapan Hidup (tahun) **)                        | 75,18    | 75,34  | 77,70          | 78,90  | 80,12  | 81,37  | 82,63  | 83,89  | 83,89         |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal                                  | Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis         | N/A      | N/A    | 20             | 46     | 55     | 61     | 70     | 70     | 70            |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Prevalensi Stunting (%)**)                            | 26,4     | 26,4   | 20,09          | 17,5   | 17     | 16,5   | 16     | 15,5   | 15,5          |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat                        | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)**) | N/A      | N/A    | 98             | 99     | 99     | 99     | 99     | 99     | 99            |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (indeks) **)    | 64,71    | 64,24  | 65             | 66     | 67     | 68     | 69     | 70,00  | 70,00         |
|      | Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas                         | Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat       |                                                                                  | Indeks Pendidikan (indeks)                            | N/A      | 0,68   | 0,68           | 0,69   | 0,69   | 0,70   | 0,71   | 0,72   | 0,72          |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Indeks Harmoni (indeks)                               | N/A      | 7,06   | 7,09           | 7,12   | 7,15   | 7,18   | 7,21   | 7,24   | 7,24          |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya Pelayanan Pendidikan                                                | Rata Rata Lama Sekolah (tahun) **)                    | 8,93     | 9,06   | 9,63           | 9,88   | 10,13  | 10,39  | 10,66  | 10,66  | 10,66         |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Harapan lama sekolah (tahun) **)                      | 12,87    | 12,88  | 13,43          | 13,63  | 13,83  | 14,03  | 14,24  | 14,24  | 14,24         |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya Daya Saing Pemuda                                                   | Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)                    | 5,08     | N/A    | 5,11           | 5,14   | 5,16   | 5,18   | 5,23   | 5,28   | 5,28          |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) **)               | 49,93    | N/A    | 52             | 52,73  | 53,48  | 54,23  | 54,55  | 56,00  | 56,00         |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)       | 52,70    | 52,70  | 60             | 61     | 62     | 63     | 64     | 65     | 65            |
|      |                                                                |                                                   |                                                                                  | Indeks Karakter Masyarakat (indeks)                   | N/A      | N/A    | 69,00          | 73,50  | 78,00  | 82,50  | 87,00  | 91,50  | 91,50         |
|      | Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur | Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur |                                                                                  | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (indeks)        | N/A      | N/A    | 78             | 80     | 82     | 84     | 86     | 88     | 88            |
|      |                                                                |                                                   | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas               | Indeks Infrastruktur (indeks)                         | N/A      | N/A    | 38,98          | 46,44  | 52,66  | 58,23  | 58,23  | 65,33  | 65,33         |

| VISI | MISI                                           | TUJUAN                                                                                 | SASARAN                                                                                | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                                                        | BASELINE |        | TARGET CAPAIAN |        |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|      |                                                |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                   | 2023     | 2024   | 2025           | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |               |
|      |                                                | Dasar yang Terpadu. Berkualitas. dan Berkelanjutan                                     | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu                                 | Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW (%) **)                                | 87,63    | N/A    | 96             | 96,49  | 96,98  | 97,48  | 98     | 98,52  | 98,52         |
|      |                                                |                                                                                        |                                                                                        | Persentase RTH (%) **)                                                            | N/A      | N/A    | 21,10          | 21,10  | 22,45  | 21,10  | 22,50  | 25,00  | 25,00         |
|      | Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan | Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan         |                                                                                        | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**)                                             | N/A      | N/A    | 18,21          | 18,55  | 18,9   | 19,26  | 19,62  | 19,99  | 19,99         |
|      |                                                |                                                                                        |                                                                                        | Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)                                                  | 76,49    | 77,6   | 78,16          | 79,01  | 79,87  | 80,73  | 81,61  | 82,49  | 82,49         |
|      |                                                | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) **)                                     | 49,79    | 55,87  | 61,57          | 61,74  | 61,91  | 62,09  | 62,26  | 62,43  | 62,43         |
|      |                                                |                                                                                        |                                                                                        | Indeks Risiko Bencana (indeks) **)                                                | 141,43   | 125,22 | 125,00         | 124,00 | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 | 120,00        |
|      |                                                |                                                                                        | Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan                                         | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)                                   | 64,67    | 63,91  | 65,59          | 71,47  | 83,17  | 87,05  | 88,73  | 90,41  | 90,41         |
|      |                                                |                                                                                        |                                                                                        | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)**) | 2,59     | N/A    | 2,20           | 2,06   | 1,92   | 1,80   | 1,68   | 1,56   | 1,56          |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, strategi RPJMD dijelaskan sebagai rencana tindakan komprehensif pembangunan daerah lima tahunan untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD serta dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan dan harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode terkait. Dalam penyusunan RPJMD, strategi dapat berfungsi sebagai peta jalan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Strategi memegang poin penting untuk memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, strategi menjadi wawasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola setiap program dan kegiatan dengan menyusun langkah serta tahapan untuk mencapai tujuan.

Strategi pembangunan disusun berdasarkan kondisi yang diharapkan pada akhir pelaksanaan RPJMD yang ditarik dari tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan strategi pembangunan dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebijakan lintas sektor dan bidang urusan yang berkontribusi terhadap pencapaian kondisi akhir periode RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4  
Strategi Pembangunan Menurut Tujuan, Sasaran, dan Bidang Urusan Perangkat Daerah

| TUJUAN / SASARAN RPJMD                                                                      | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD                                                                                                                                      | STRATEGI PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BIDANG URUSAN/PD UTAMA                                                                     | BIDANG URUSAN / PD PENDUKUNG        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tujuan 1 : Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                     |
| Sasaran 1<br>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik                         | Tata kelola pemerintah yang terstandarisasi, transparan, dan efektif yang ditunjukkan melalui capaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,37                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar</li><li>• Optimalisasi digitalisasi kearsipan</li><li>• Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)</li><li>• Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS</li><li>• Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</li><li>• Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan (meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa)</li><li>• Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik</li></ul> | Kecamatan; DISDUKCAPIL; Dinas Perpustakaan dan Arsip; DPMPPTSP; DISKOMINFO                 | Seluruh OPD                         |
| Sasaran 2<br>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                            | Kinerja organisasi daerah yang akuntabel dalam menjamin keterpaduan pembangunan daerah yang diukur dengan capaian indikator nilai AKIP sebesar 80,64                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD</li><li>• Meningkatkan kinerja pengawasan daerah</li><li>• Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE</li><li>• Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika</li><li>• Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah</li><li>• Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal</li><li>• Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah</li><li>• Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan</li><li>• Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah</li><li>• Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang obyektif dan transparan</li></ul>             | Inspektorat; BKPSDM; BPKAD; Badan Pendapatan Daerah; Bappeda; Setda                        | Seluruh OPD                         |
| Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                     |
| Sasaran 1<br>Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial | Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 7,56-8,56% yang didukung dengan daya saing sektor unggulan (perindustrian, perdagangan-jasa) serta peningkatan realisasi investasi daerah. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan daya saing industri</li><li>• Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok</li><li>• Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan</li><li>• Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan</li><li>• Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif</li><li>• Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional</li><li>• Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                               | DISPERINDAG, DISPORBUDPAR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, DPMPPTSP | DLHK, Dinas Tata Ruang dan Bangunan |
| Sasaran 2<br>Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD       | Meningkatnya skalabilitas usaha ekonomi lokal yang meliputi UMKM, koperasi, BUMD, BUMDes, serta adanya wadah inklusif pengembangan usaha bagi wirausaha baru.               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD</li><li>• Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                                             | DISPERINDAG, DPMPPTSP               |

| TUJUAN / SASARAN RPJMD                                                                                          | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD                                                                                                                                                    | STRATEGI PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BIDANG URUSAN/PD UTAMA                                                                              | BIDANG URUSAN / PD PENDUKUNG                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran 3 Mengendalikan Harga Bahan Pokok                                                                       | Terjaganya kestabilan kebutuhan pokok agar distribusi barang dan daya beli masyarakat tetap terjaga demi ketahanan sosial-ekonomi daerah.                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DISPERINDAG                                                                                         | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                                       |
| Tujuan 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                            |
| Sasaran 1 Meningkatkan Kemandirian Desa                                                                         | Meningkatnya jumlah desa dengan status mandiri dalam aspek kemandirian perekonomian, lingkungan berkelanjutan, dan tata keloa pemerintahan desa                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa</li><li>Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPMPD; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro                                                               | Dinas Sosial                                                               |
| Sasaran 2 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja                                                                  | Peningkatan partisipasi angkatan kerja menjadi 70,56% melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja atau Job Matching dengan pasar kerja | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya kompetensi dan daya saing ketenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja</li><li>Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        | Dinas Tenaga Kerja; Dinas Sosial                                                                    | DISPERINDAG                                                                |
| Sasaran 3 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif                                                       | Penurunan angka kemiskinan menjadi 4,67-4,88% dan jaminan perlindungan sosial untuk semua utamanya kaum rentan (PPKS, disabilitas, perlindungan perempuan & anak, lansia, dll)            | <ul style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi implementasi kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan kesejahteraan sosial dan pengelolaan sumber dana bantuan sosia</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dinas Sosial; DP3A                                                                                  | Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                                                                 | Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga yang diukur dengan capaian Indeks Desa sebesar 0,8100                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DPPKB; Dinas Sosial; DP3A                                                                           | Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,                                         |
| Tujuan 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                            |
| Sasaran 1 Meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal                                                       | Peningkatan angka harapan hidup dan berkurangnya prevalensi stunting secara signifikan                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan</li><li>Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar</li><li>Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan</li><li>Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil dan anak</li><li>Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus stunting</li></ul>                                                                                              | Dinas Kesehatan; Dinas Sosial                                                                       | DP3KB                                                                      |
| Sasaran 2 Meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat                                             | Akses terhadap layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan</li><li>Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit</li><li>Meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas hidup</li></ul>                                                                                                                                                                                                             | Dinas Kesehatan; DP3KB; Dinas Sosial                                                                | DPMPD                                                                      |
| Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                            |
| Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan                                                                     | Akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah hingga mendekati 11 tahun                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang berkualitas</li><li>Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan</li><li>Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan</li><li>Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama</li></ul> | Dinas Pendidikan                                                                                    | Dinas Sosial; DISPORBUDPAR; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan               |
| Sasaran 2 Meningkatkan Daya Saing Pemuda                                                                        | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan daerah                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan daya saing olahraga</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dinas Pendidikan; DISPORBUDPAR                                                                      |                                                                            |
| Sasaran 3 Meningkatkan Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama                      | Meningkatnya literasi, numerasi, dan usaha pelestarian terhadap budaya lokal                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat</li><li>Meningkatkan pengembangan potensi kebudayaan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dinas Pendidikan; DISPORBUDPAR; Dinas Perpustakaan dan Arsip                                        | Badan Kesbangpol; Setda Bag Kesra; Satuan Polisi Pamong Praja              |
| Tujuan 6 : Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                            |
| Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas                                    | Akses terhadap layanan dasar (permukiman layak, transportasi terintegrasi, jaringan persampahan dan limbah terpadu, air bersih yang layak, dll) yang melayani mayoritas rumah tangga      | <ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu</li><li>Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan ramah lingkungan</li><li>Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara</li><li>Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi</li></ul> | DBMSDA; Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Dinas Perumahan, Permukiman,dan Pemakaman; Dinas Perhubungan | DISPERINDAG; DLHK                                                          |
| Sasaran 2 Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu                                                | Penyelenggaraan pembangunan berlandaskan daya dukung dan daya tampung wilayah yang diatur dalam ketentuan pemanfaatan ruang                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya,</li><li>Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        | DLHK; Dinas Tata Ruang dan Bangunan                                                                 | DBMSDA; Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemukiman; Dinas Perhubungan      |
| Tujuan 7 : Meningkatkan Ketahanan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan                       |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                            |

| TUJUAN / SASARAN RPJMD                                                                              | KONDISI YANG DIHARAPKAN DI AKHIR RPJMD                                                                        | STRATEGI PEMBANGUNAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BIDANG URUSAN/PD UTAMA                             | BIDANG URUSAN / PD PENDUKUNG                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran 1<br>Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan                                         | Peningkatan ketahanan daerah (air, energi, dan pangan) yang berkelanjutan dan melayani mayoritas rumah tangga | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah</li><li>• Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan</li><li>• Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah</li></ul>                                                                                                                                      | DLHK; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; DBMSDA | Dinas Perumahan. Permukiman. dan Pemakaman                                |
| Sasaran 2<br>Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan | Lingkungan yang bersih, minimnya pencemaran, resilien terhadap bencana, serta sumber daya alam yang lestari   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup,</li><li>• Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup</li><li>• Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana</li><li>• Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana</li></ul> | DLHK; BPBD                                         | Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Dinas Perumahan. Permukiman. dan Pemakaman |

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dapat didefinisikan sebagai rangkaian prioritas kerja yang menjadi dasar rencana dan pedoman untuk pelaksanaan rencana pembangunan pada sebuah periode. Arah kebijakan merupakan bentuk turunan dari strategi untuk dijabarkan menjadi program pembangunan yang secara operasional dan melalui upaya nyata digunakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD selama periode lima tahun. Secara komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Arah kebijakan membantu merasionalkan pilihan strategi sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

Adapun penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Banten. Dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 terdapat 8 Misi (Asta Cita) dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Dalam RPJMD Provinsi Banten memiliki arah pembangunan kewilayah untuk masing-masing kabupaten/kota. Penyelarasan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang tergadap RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Banten terdapat pada Tabel 3.1 atau pada subbab sebelumnya.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Mempertimbangkan Periode Pertama RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045

Berdasarkan Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Tangerang difokuskan pada Penguatan Modal Dasar. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui: (1) Peningkatan ketersediaan, kualitas, aksesibilitas sarana serta kelembagaan pembangunan SDM; (2) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan komoditas sektor ekonomi; (3) Penguatan Kualitas Aparatur Pemerintahan; (4) Penataan regulasi hukum serta peningkatan kapasitas kelembagaan demokrasi dan keuangan daerah; (5) Penguatan nilai agama dan budaya serta peningkatan kelembagaan masyarakat yang tangguh dalam membentuk lingkungan hidup berkelanjutan; (6) Pemenuhan infrastruktur dasar serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah; (7) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dan pengentasan permukiman kumuh; serta (8) Reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dalam perumusan arah kebijakan dan/atau tema pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 juga merujuk pada RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu pada tabel berikut.

Tabel 3.5  
Penyelarasan Arah Kebijakan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

|                                                         | Nasional                                                                     | Provinsi Banten                                                                                              | Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | VISI RPJMN Tahun 2025-2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 | VISI RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 Banten Maju, Adil, Merata, Tidak Korupsi                          | VISI RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |
| Arah Kebijakan RPJP 2025-2045 (Periode 1)               | "Penguatan Transformasi"                                                     | "Penguatan Modal Dasar"                                                                                      | "Penguatan Modal Dasar"                                                                                                                                            |
| Arah Kebijakan RPJM 2025-2029 dan/atau Tema Tahunan RKP |                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |
| 2026                                                    | Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif      | Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan | Penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kolaborasi antar sektor untuk menciptakan pondasi ketahanan pangan                                         |
| 2027                                                    | -                                                                            | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegrasi dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global            | Optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan.                                                                            |
| 2028                                                    | -                                                                            | Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian                                                          | Pengembangan Riset, Inovasi, dan Daya Saing Tenaga Kerja                                                                                                           |
| 2029                                                    | -                                                                            | Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi                                                       | Akselerasi Pembangunan Daerah yang Inklusif untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat                                                                             |
| 2030                                                    | -                                                                            | Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat                                                  | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing                                                                                        |

Sumber : Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029; Dokumen RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 (diolah)

3.2.2.2 Arah Kebijakan Mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029

Perumusan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 turut mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025-2029 utamanya pada Arah Pembangunan Kewilayahan Provinsi Banten. Tema pembangunan Provinsi Banten yaitu sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional, indikasi dan intervensi RPJMN terhadap rekomendasi kerja Provinsi Banten, khusus untuk wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6  
Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

| Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Highlight Indikasi Intervensi<br>*(khusus Kabupaten Tangerang)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kawasan Aglomerasi Jakarta                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kawasan Aglomerasi Jakarta / WM Jakarta <ul style="list-style-type: none"><li>Provinsi DKI Jakarta</li><li>Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur</li><li>Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan</li></ul> | ✓ Pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta<br>✓ Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di Kawasan Aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya), termasuk penerapan SIH3 dan FEWS                                                   |
| Jakarta-Tangerang International Business Corridor & Jakarta Global City Urban Tourism (Central-South) <ul style="list-style-type: none"><li>Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan</li><li>Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang</li></ul>       | ✓ Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD)<br>✓ Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja<br>✓ Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja<br>✓ Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan<br>✓ Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya |
| Northern Coast New Economic Hub & Jakarta Global City Urban Tourism (North) <ul style="list-style-type: none"><li>Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Utara</li></ul>                                                                                                                            | ✓ Penyediaan SPAM perpipaan pada kawasan permukiman di sepanjang pesisir utara Kawasan Aglomerasi Jakarta                                                                                                                                                                                                          |



| Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Highlight Indikasi Intervensi<br>*(khusus Kabupaten Tangerang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Provinsi Banten: Kab. Tangerang</li><li>Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wilayah Provinsi Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang (A1),</li><li>Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-SerangTangerang (A2), dan Jakarta-Tangerang International Business Corridor<ul style="list-style-type: none"><li>Kota Cilegon</li><li>Kota Serang</li><li>Kab. Serang</li><li>Kab. Tangerang</li><li>Kota Tangerang</li><li>Kota Tangerang Selatan</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pengembangan koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, Industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, &amp; baja)</li><li>✓ Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas</li><li>✓ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Banten (PHTC)</li><li>✓ Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan</li><li>✓ Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD)</li><li>✓ Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja</li><li>✓ Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja</li><li>✓ Pengembangan SPAL Regional Perkotaan Tangerang dan Tangerang Selatan</li><li>✓ Pembangunan TPST Regional Tangerang Raya</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah</li><li>✓ Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)</li><li>✓ Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)</li><li>✓ Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura</li><li>✓ Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura</li><li>✓ Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian-Cimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung,DAS Cikadubuluh-Cipuntenageung-Cibama</li><li>✓ Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS CidurianCimanceuri, DAS Cibungur-Ciliman, DAS Cibaliung, DAS Cikadubuluh Cipuntenageung-Cibama</li><li>✓ Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik</li><li>✓ Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih &amp; bibit berkualitas/pupuk &amp; pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen</li><li>✓ Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar &amp; pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi &amp; korporasi petani; pembiayaan dana bergulir &amp; kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama</li><li>✓ Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan</li></ul> |



| Lokasi Prioritas                                                                                                                      | Highlight Indikasi Intervensi<br>*(khusus Kabupaten Tangerang)                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kab. Pandeglang</li><li>• Kab. Tangerang</li><li>• Kab. Lebak</li><li>• Kab. Serang</li></ul> | ✓ Indikasi Daerah Prioritas Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC) |

Sumber : Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

3.2.2.3 Arah Kebijakan Mempertimbangkan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 juga perlu memerhatikan pembangunan kewilayahan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Selaras dengan Dokumen RPJMN tahun 2025-2029, Kabupaten Tangerang memiliki beberapa lokasi prioritas, yakni 1) Kawasan Pertumbuhan, yaitu Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang Kawasan Perkotaan Tangerang Raya (Bagian dari Aglomerasi DKJ); dan 2) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi. Arah kebijakan kewilayahan dan indikasi intervensi lokasi prioritas di Kabupaten Tangerang adalah:

Tabel 3.7  
Arah Pembangunan Kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029

| Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arah Kebijakan Kewilayahan                                              | Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Pertumbuhan Perdesaan Mandiri Dan Bagian Pertumbuhan Kawasan Aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta</li><li>• Kawasan Pertumbuhan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang</li><li>• Jakarta-Tangerang <i>International Bussiness Corridor</i></li><li>• Kawasan Swasembada Pangan, Air, Dan Energi Banten</li></ul> | Tata Kelola Pemerintahan Tidak Korupsi Dan Sistem Merit Dalam Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pembentukan Unit Layanan Berpredikat Zona Integritas</li><li>✓ Sinergi Peningkatan Pendapatan Daerah</li><li>✓ Dukungan Transformasi, Efisiensi Reformasi Birokrasi Dan Perkuatan Reformasi Hukum, Melalui: I) Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu); Ii) Penanggulangan Judi Dan Penyelundupan; Dan Iii) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn)</li><li>✓ Dukungan Pengembangan Dan Transformasi Pemerintahan Digital, Melalui: I) Penguatan Tata Kelola Dan Infrastruktur Pemerintahan Digital; Ii) Pengembangan Kompetensi Dan Budaya Digital Asn; Iii) Digitalisasi Layanan Publik Prioritas; Dan Iv) Pengembangan Ekosistem Layanan Publik Digital</li><li>✓ Percepatan Pembangunan Dan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Terkait Akses Layanan Pemerintahan Dan Pengembangan Wilayah Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru</li></ul>                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Investasi, Kemudahan Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja               | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dukungan Kemudahan Izin Usaha Dalam Mendorong Penyediaan Lapangan Kerja Dengan Padat Karya, Akses Dukungan Permodalan Bagi Tuna Karya Serta Pengutamaan Tenaga Kerja Lokal</li><li>✓ Dukungan Pengelolaan Kawasan Industri Berbasis Padat Karya Berprinsip Esg (Environmental, Social, Governance) Dan Penyediaan Infrastruktur Ramah Lingkungan, Mencangkup: Transportasi Hijau, Energi Terbarukan, Pengelolaan Air Dan Limbah, Serta Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan Dan Ekonomi Sirkular</li><li>✓ Dukungan Hilirisasi Lanjutan Sawit Bioplastik, Bioavtur, Graphene, Surfaktan, Kelapa, Perikanan Tangkap Dan Produk Unggulan Sesuai Karakteristik Wilayah Lainnya</li><li>✓ Dukungan Pembangunan Dan Pengembangan Industri Halal/Industri Hijau/Industri Biru Khususnya Pada Industri Unggulan, Potensial, Dan Berorientasi Ekspor Sesuai Potensi Daerah Yang Ditetapkan Oleh Rtrw Daerah</li><li>✓ Dukungan Pengembangan Koridor Industri Cilegon-Serang-Tangerang (Sektor Industri</li></ul> |

| Lokasi Prioritas | Arah Kebijakan Kewilayahan                                           | Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                      | Prioritas: Industri Kimia, Industri Makanan Dan Minuman, Industri Logam, Besi, Dan Baja)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Zona Ekonomi Baru, Penguatan Umkm, Dan Pemerataan Ekonomi            | <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Umkm Terhadap Akses Pasar, Perbankan, Peningkatan Kompetensi Dan Kualitas Produk Usaha Sesuai Unggulan Wilayah, Pendampingan Terhadap Inovasi Produk Dan Layanan, Menciptakan Regulasi Yang Mendukung Pertumbuhan Wirausaha</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pembangunan/Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (Ikm) Sebagai Rantai Pasok Industri Sedang Besar Yang Ada Di Kawasan Industri (Ki)/Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Prioritas</div> <div><div>✓</div>Dukungan Optimalisasi Koperasi Merah Putih</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | Pengembangan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                          | <div><div>✓</div>Dukungan Pelestarian Dan Pemajuan Kebudayaan Di Banten, Melalui: I) Desa Budaya; Ii) Pelindungan, Pelestarian, Dan Revitalisasi Warisan Budaya; Iii) Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan (Cagar Budaya, Permuseuman, Dan Pusat Kebudayaan Lainnya); Dan Iv) Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, Sertifikasi Kompetensi Pelaku Budaya Dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Pariwisata Yang Terintegrasi, Berkualitas, Berbasis Masyarakat Lokal Dan Berkelanjutan</div> <div><div>✓</div>Pengembangan Pariwisata Berupa Event Tourism Internasional, Wisata Alam, Wisata Sejarah/Budaya, Wisata Religi, Wisata Buatan Dan Event Lainnya Yang Akan Diintervensi Lintas Sektoral</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau, Maupun Ekosistem Ekonomi Lainnya</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Infrastruktur Dan Sistem Informasi Wisata Memanfaatkan Percepatan Transformasi Digital, Melalui: I) Perluasan Infrastruktur Digital; Dan Ii) Peningkatan Kapasitas Sdm Digital Dan Literasi Digital</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Dan Peningkatan Event, Infrastruktur, Dan Sistem Informasi Destinasi Wisata Berbasis Mice (Meetings, Incentives, Conventions, And Exhibitions)</div> |
|                  | Sekolah Gratis Untuk Sma/Smk/Ma Negeri Dan Swasta Di Provinsi Banten | <div><div>✓</div>Dukungan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah Dan 12 Tahun Pendidikan Dasar Dan Menengah) Melalui: I) Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud); Ii) Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Sekolah Dan Madrasah Yang Berkualitas; Iii) Penyaluran Bantuan Pendidikan Yang Tepat Sasaran; Iv) Pencegahan Dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; V) Revitalisasi Pendidikan Nonformal; Vi) Penguatan Pengelolaan Dan Akselerasi Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; Vii) Modernisasi Dan Akselerasi Stem (Science, Technology, Engineering, And Mathematics)</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pemberian Makan Bergizi Di Sekolah, Madrasah, Dan Dayah/Pesantren, Serta Pemberian Makan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita</div> <div><div>✓</div>Dukungan Percepatan Transformasi Digital, Melalui: I) Penyederhanaan Proses Bisnis; Ii) Perluasan Jaringan Telekomunikasi Dan Akses Internet Cepat; Iii) Pengembangan Sdm Tik Dan Digitalisasi Masyarakat; Iv) Perluasan Layanan Penyiaran Digital; Dan V) Layanan Digital Terpadu, Terpersonalisasi Dan Berfokus Pada User Centric</div> <div><div>✓</div>Dukungan Penguatan Pendidikan, Pelatihan Vokasi, Penyediaan, Dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maupun Layanan Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi Dengan Sektor Ketenagakerjaan,</div>                    |

| Lokasi Prioritas | Arah Kebijakan Kewilayahan                                         | Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                    | <p>Melalui Pembangunan/Pengembangan/Peningkatan Balai Latihan Kerja Sesuai Kebutuhan Wilayah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pelaksanaan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Menengah Dan Khusus Ditunjang Dengan Tenaga Pendidik Yang Berkompeten Sesuai Keahlian</li><li>✓ Pembangunan Unit Sekolah Baru Sma, Smk Dan Pendidikan Khusus (Untuk Anak Berkebutuhan Khusus) Dengan Memperhatikan Kondisi Wilayah</li><li>✓ Dukungan Pengembangan Kek Edukasi, Teknologi, Dan Kesehatan Internasional Banten (Kek Bsd)</li><li>✓ Dukungan Pembangunan Sdm Perdesaan Kabupaten Tangerang</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Akses Kesehatan Bagi Warga Dan Pelayanan Sosial Tanpa Diskriminasi | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dukungan Optimalisasi Fasilitas Kesehatan (Sarana Dan Prasarana Yang Memadai) Dan Program Kesehatan Yang Adil Dan Merata</li><li>✓ Dukungan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Untuk Menangani Kasus Gigi Dan Mulut/Kasus Kesehatan Mental/Kasus Multi-Penyakit Pada Lanjut Usia/Kasus Ketergantungan Obat Serta Pembudayaan Hidup Sehat</li><li>✓ Dukungan Peningkatan Kesehatan Dan Gizi Masyarakat, Melalui: I) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Promotif, Preventif, Rehabilitatif, Dan Kuratif; Ii) Penyediaan Sarana-Prasarana Kesehatan Primer Dan Rujukan; Iii) Pemerataan Pelayanan Kesehatan Serta Penuntasan Eliminasi Penyakit Prioritas, Menular, Dan Tropis Terabaikan; Iv) Penurunan Kematian Ibu Dan Anak; V) Pencegahan Dan Penurunan Stunting Dan Penuntasan Tbc; Vi) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Gizi Bagi Usia Sekolah, Usia Produktif, Dan Lansia Serta Kb Dan Kesehatan Reproduksi; Dan Vii) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis</li><li>✓ Dukungan Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Dari Kekerasan, Melalui: I) Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas Dari Kekerasan; Dan Ii) Penguatan Tata Kelola Dan Pelembagaan Pug (Pengarusutamaan Gender) Dalam Proses Pembangunan</li><li>✓ Dukungan Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Secara Inklusif Dalam Proses Pembangunan</li><li>✓ Dukungan Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif Sebagai Salah Satu Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan Dengan Mengupayakan Pengoptimalan Pemanfaatan Satu Sistem Regsosek Maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DtSEN)</li><li>✓ Dukungan Pengembangan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Dan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi Di Rsd Provinsi Dan Kab/Kota</li><li>✓ Dukungan pencapaian UHC</li><li>✓ Dukungan Pemberian Makan Bergizi Untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Dan Balita</li><li>✓ Dukungan Pengembangan Kek Edukasi, Teknologi, Dan Kesehatan Internasional Banten (Kek Bsd)</li><li>✓ Dukungan Pembangunan Dan Pelaksanaan Sekolah Rakyat</li></ul> |
|                  | Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan                                | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dukungan Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, Dan Penanganan Rawan Pangan (PhTC)</li><li>✓ Dukungan Peningkatan Ketahanan Air, Energi, Dan Pangan Yang Berkelanjutan</li><li>✓ Dukungan Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang, Dan Aman Sesuai Karakteristik Dan Potensi Daerah Guna Mendukung Kemandirian Pangan (Seperti Pangan Akuatik/<i>Blue Food</i>, Dsb)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Lokasi Prioritas | Arah Kebijakan Kewilayahan                                                      | Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                 | <div><div>✓</div><div>Peningkatan Manajemen Usaha Tani, Perluasan Akses Pasar Dan Pembiayaan Usaha Tani, Perluasan Akses Asuransi Pertanian Dan Perikanan, Serta Pengendalian Kepastian Pasar, Melalui: I) Peningkatan Literasi Keuangan Petani Dan Penguatan Manajemen Poktan/Gapoktan; Ii) Penguatan Kelembagaan Koperasi Dan Korporasi Petani; Iii) Pembiayaan Dana Bergulir Dan Kredit Lunak Petani; Iv) Perluasan Akses Asuransi Usaha Tani; V) Peningkatan Infrastruktur Logistik Dan Perluasan Akses Layanan Sistem Resi Gudang; Vi) Pengelolaan Dan Pengendalian Penyerapan Hasil Panen Komoditas Pangan Utama</div><div>✓</div><div>Dukungan Peningkatan Produktivitas Peternakan/Pangan Hewani (Termasuk Pengembangan Kawasan Peternakan, Pengembangan Serta Peningkatan Produktivitas Hortikultura Dan Peningkatan Produktivitas Perikanan (Tangkap Dan Budidaya)</div><div>✓</div><div>Dukungan Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian Dan Produktivitas Melalui Intensifikasi Dan Peningkatan Prasarana Produksi, Melalui: I) Penyediaan Dan Perluasan Akses Alsintan <i>Modern</i>/Benih Dan Bibit Berkualitas/Pupuk Dan Pestisida Berkualitas; Ii) Mitigasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) DanmKesehatan Hewan; Iii) Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Dan Digital Bagi Petani; Dan Iv) Peningkatan Kualitas Pascapanen Melalui Peningkatan Prasarana Pascapanen</div><div>✓</div><div>Dukungan Pengelolaan Dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Melalui: I) Kebijakan Tata Ruang Untuk Perlindungan Lahan Pertanian; Ii) Reforma Agraria, Redistribusi, Dan Konsolidasi Lahan Pertanian; Iii) Optimalisasi Dan Revitalisasi Lahan Pertanian; Dan Iv) Peningkatan Penggunaan Pupuk/Pestisida/Pakan Organik</div><div>✓</div><div>Penguatan Kawasan Agrikultur Pangan Berkelanjutan Guna Mendukung Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pendekatan Terpadu Few Nexus (<i>Food, Energy, Water</i>)</div><div>✓</div><div>Dukungan Pengembangan Pusat/Laboratorium Riset Pertanian Skala Lokal Dalam Rangka Pengembangan Varietas Unggul Dan Budidaya Lokal, Peningkatan Produktivitas Petani, Serta Penguatan Implementasi Hasil Riset Pertanian</div><div>✓</div><div>Dukungan Pemberdayaan Aktivitas Ekonomi <i>High Value</i> Unggulan: Perikanan, Pertanian Tanaman Pangan, Dan Pertanian Hortikultura</div><div>✓</div><div>Dukungan Optimalisasi Kawasan Agrikultur Kabupaten Tangerang</div><div>✓</div><div>Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis Menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai</div></div> |
|                  | Pembangunan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Sumber Daya Air Dan Hunian Layak | <div><div>✓</div><div>Dukungan Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Dan Rencana Tata Ruang Yang Mengintegrasikan Potensi Dan Masalah Secara Terpadu</div><div>✓</div><div>Pembangunan Konektivitas Kawasan Produktif Ekonomi (Infrastruktur Dan Sistem Logistik)</div><div>✓</div><div>Pembangunan Pju, Sarana Dan Prasarana Perhubungan Serta Transportasi Publik Massal Yang Ramah Lingkungan, Nyaman, Mudah Diakses, Aman, Dan Efisien</div><div>✓</div><div>Dukungan Pembangunan Spam Regional Karian Timur</div><div>✓</div><div>Dukungan Pembangunan Iplt/Ipal Dan Spal</div><div>✓</div><div>Pembangunan Kebinamargaan</div><div>✓</div><div>Pembangunan Psu Permukiman, Pos Layanan Desa Sejahtera, Dan Penataan Permukiman Kumuh Terpadu Kewenangan Provinsi</div><div>✓</div><div>Dukungan Pembangunan Rumah/Hunian Murah Bersanitasi Baik Bagi Pekerja, Mbr, Gen Z, Dan Milenial</div><div>✓</div><div>Dukungan Penyelesaian Masalah Persampahan Terintegrasi Hulu-Hilir</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lokasi Prioritas | Arah Kebijakan Kewilayahan                                                        | Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                   | <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Kawasan Tangerang Raya (Bagian Dari Kawasan Aglomerasi Jakarta)</div> <div><div>✓</div>Dukungan Rintisan Kerata Api Tangerang Raya-Serang</div> <div><div>✓</div>Dukungan Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar (Air Baku, Air Minum, Penanganan Limbah/Sanitasi, Infrastruktur Jaringan Transmisi, Infrastruktur Distribusi Dan Listrik Perdesaan, Rumah/Hunian Layak Huni Dan Ruang Terbuka Hijau)</div> <div><div>✓</div>Dukungan Reformasi Pengelolaan Sampah Dan Sanitasi Yang Terintegrasi Dari Hulu Ke Hilir Yang Berkelanjutan, Melalui: I) Perubahan Perilaku Dan Penguatan Tata Kelola Persampahan; Ii) Peningkatan Pengumpulan Dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Di Tpa/Lur; Dan Iii) Adopsi Teknologi Pemrosesan Sampah Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan</div> <div><div>✓</div>Dukungan Rehabilitasi Dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kewenangan Daerah</div> <div><div>✓</div>Dukungan Konservasi Sumber Daya Air Melalui Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pada <i>Cathment Area</i>, Terutama Pada Das Ciujung, Das Cibanten, Das Cidurian- Cimanceuri, Das Cibungur-Ciliman, Das Cibaliung, Das Cikadubuluh- Cipuntenageung-Cibama</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Air Di Sungai Dan Danau, Terutama Pada Das Ciujung, Das Cibanten, Das Cidurian-Cimanceuri, Das Cibungur-Ciliman, Das Cibaliung, Das Cikadubuluh Cipuntenageung-Cibama</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pembangunan Transportasi Massal Aglomerasi Dkj (Mrt East-West Dan Transjakarta), Transportasi Massal Perkotaan, Dan Tod (<i>Transit Oriented Development</i>)</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serpong-Balaraja Dan Tol Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja</div> <div><div>✓</div>Dukungan Optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane Dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Konservasi, Air Minum Dan Air Pertanian</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pembangunan Perlindungan Abrasi Pantura Tangerang Pembangunan Dermaga Penyebarangan Pelabuhan Cituis Dukungan Pembangunan Waduk Lepas Pantai Muara Cisadane, Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut Pesisir Utara Jakarta/Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa</div> <div><div>✓</div>Dukungan Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa</div> |
|                  | Lingkungan Hidup Yang Lestari Dan Berkelanjutan Serta Resiliensi Terhadap Bencana | <div><div>✓</div>Dukungan Peningkatan Ketahanan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Khususnya Ketangguhan Terhadap Banjir Periode Kala-Ulang 25-50 Tahunan Di Kawasan Aglomerasi Jakarta (Tangerang Raya) Termasuk Penerapan Sih3 Dan Fews)</div> <div><div>✓</div>Dukungan Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Dan Danau Melalui Pengurangan Beban Pencemar Dari Sumber Domestik, Industri, Peternakan, Pertanian Dan Hal Lainnya Sebagai Upaya Mengembalikan Mutu Air</div> <div><div>✓</div>Resiliensi Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Daerah Melalui Proses Pendidikan Dan Penyadaran Sejak Dini</div> <div><div>✓</div>Dukungan Nature-Based Solution Dan Gray Infrastructure Untuk Mitigasi Ancaman Tsunami</div> <div><div>✓</div>Dukungan Percepatan Transisi Energi Menuju Emisi Karbon Yang Lebih Rendah, Melalui: I) Pengembangan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan; Ii) Penerapan Jaringan Cerdas (Smart Grid) Untuk Memaksimalkan Efisiensi Dan Pemantauan Konsumsi Energi; Iii) Adopsi Teknologi Penyimpanan Energi Untuk Menjaga Stabilitas Pasokan Listrik; Iv) Penerapan Internet Of Things (Iot) Di Sektor Energi Guna Meningkatkan Keterhubungan Dan Analitik</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Lokasi Prioritas | Arah Kebijakan Kewilayahan | Highlight Indikasi Intervensi Kabupaten Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | <div>Data Secara Real-Time; Dan V) Perluasan Penggunaan Kendaraan Listrik</div> <div>✓ Dukungan Perlindungan, Pemulihan, Pengelolaan Ekosistem Dan Area Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi</div> <div>✓ Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan Mendukung Bioekonomi</div> <div>✓ Dukungan Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses Dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik</div> <div>✓ Dukungan Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Kota, Dan Hutan Mangrove Sesuai Kondisi Daerah)</div> <div>✓ Dukungan Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Kota, Dan Hutan Mangrove Sesuai Kondisi Daerah)</div> <div>✓ Dukungan Perlindungan Dan Pengamanan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Kota, Dan Hutan Mangrove Sesuai Kondisi Daerah)</div> <div>✓ Dukungan Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri</div> |

Sumber : *Peyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten/ Kota Provinsi Banten Tahun 2025-2029*

Oleh karena itu, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 serta penyelarasan dengan arah kebijakan dari RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 (Periode 1), RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, disusun arah kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.8  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                                | STRATEGI                                                                                                                                                      | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                                        |                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif                                                                 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar                                                                                                      | Optimalisasi sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Optimalisasi waktu penyelesaian pelayanan publik                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Meningkatkan layanan penanganan dan pengaduan                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Mengimplementasikan sistem <i>e-governance</i> untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                        | Optimalisasi digitalisasi kearsipan                                                                                                                           | Mengoptimalkan penggunaan aplikasi srikandi di level OPD                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                        | Optimalisasi interoperabilitas data statistik sektoral antar perangkat daerah                                                                                 | Mendorong penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang mengacu kepada Proses Bisnis Statistik                                                                                                                                      |
|                                                                                                                              |                                                        | Meningkatkan kualitas layanan pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) yang responsif gender dan inklusif terhadap seluruh kelompok masyarakat   | Integrasi sistem data kependudukan secara optimal                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Meningkatkan sosialisasi terkait KB dan kependudukan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                        | Optimalisasi pengelolaan administrasi kependudukan yang menjamin pemenuhan hak identitas hukum yang setara bagi setiap warga negara                           | Mendorong terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi teknologi/elektronik yang menjamin kesetaraan akses bagi setiap warga                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                        | Optimalisasi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang adil, sensitif dan inklusif                                                          | Optimalisasi pemberdayaan dan perlindungan pada perempuan dan anak                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                        | Optimalisasi pemberdayaan dan pelayanan bagi PPKS yang berkeadilan dan inklusif melalui pendekatan berbasis hak                                               | Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan PPKS terutama pemenuhan hak kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                        | Optimalisasi pencegahan dan penindakan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                              | Meningkatkan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Optimalisasi penindakan gangguan kamtibmas                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Optimalisasi penanganan konflik di masyarakat                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                        | Mendorong kemampuan desa dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif, dengan melibatkan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas | Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan tingkat desa yang efektif dan akuntabel yang melibatkan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                               | Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa                                                                                                                                  |



| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                                                        | STRATEGI                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                | Mendorong pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada prinsip demokrasi, ideologi nasional, dan kesadaran politik | Meningkatkan pemahaman politik dalam negeri                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (ormas)                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Menekan kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat                                                                                                                     |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                            | Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program Sekretariat DPRD                                                    | Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembahasan Raperda yang difasilitasi                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                | Optimalisasi operasional persandian dan pengamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE                              | Mendorong peningkatan kesadaran keamanan informasi dan kepatuhan prosedur bagi seluruh pegawai lingkup Kabupaten Tangerang                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                | Meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika                                                                    | Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan satu pintu                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                | Mendorong tata kelola SDM kepegawaian dan manajemen ASN yang optimal                                                 | Optimalisasi pengisian jabatan melalui fleksibilitas mutasi dan rotasi dalam memenuhi kebutuhan ASN                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Mendorong pengembangan kompetensi ASN                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi uji kompetensi ASN                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Meningkatkan ketersediaan fasilitas pendukung kepegawaian dan pengembangan SDM                                                                                         |
|                                                                                                                              |                                                                                | Optimalisasi kinerja perencanaan pembangunan daerah                                                                  | Optimalisasi pelaksanaan perencanaan kinerja                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi pelaksanaan pengukuran kinerja                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi pelaksanaan evaluasi kinerja                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi konsistensi penjabaran dokumen perencanaan                                                                                                                |
|                                                                                                                              |                                                                                | Optimalisasi fungsi penelitian dan pengembangan                                                                      | Optimalisasi kebijakan disertai dengan basis data riset dan inovasi                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                                                | Optimalisasi tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah                                                          | Optimalisasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)                                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Mendorong penguatan dan percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                                | Meningkatkan kinerja pengawasan daerah                                                                               | Mengoptimalkan pelaksanaan SPIP                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                | Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang obyektif dan transparan                                              | Optimalisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                                                                           |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan                                                                                                       |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Optimalisasi kebijakan administrasi umum                                                                                                                               |
| MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing                                                     |                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah                                                                       | Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial | Peningkatan daya saing industri dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung inklusi sosial                         | Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas yang menjamin kesetaraan kesempatan usaha bagi semua warga |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Penegakan regulasi pengembangan perindustrian dan kawasan industri                                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      | Meningkatkan sinkronisasi antar lembaga serta pelaku industri hingga terbentuk klaster guna menerapkan <i>predict and prevent</i>                                      |
|                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |

| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                                                  | STRATEGI                                                                                                                                                       | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                          | Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan stabilitas kebutuhan pokok                                                                                          | Meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pengembangan dan optimalisasi rantai yang menjembatani UKM dengan pasar                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Menjamin ketersediaan barang dan kebutuhan pokok daerah                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                          | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan                                                                                     | Peningkatan kapasitas petani, peternak, dan pelaku usaha sektor pertanian                                                                                                                |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Mendorong produktivitas hasil pertanian dan peternakan                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro/agribisnis) pertanian dan peternakan                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                          | Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan                                                                                                    | Pengembangan kapasitas kelembagaan perikanan dan bina kelompok nelayan                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pengembangan sarana-prasarana dan teknologi yang mendukung sektor perikanan (e.g. peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai)                       |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Peningkatan kualitas dan daya saing produk (industri mikro) hasil perikanan                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                                          | Optimalisasi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                                                 | Pengembangan tata kelola kawasan strategis pariwisata serta pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan wisata                                                                         |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata berbasis MICE ( <i>Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions</i> )                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Optimalisasi pengelolaan pelestarian cagar budaya dan objek budaya tak benda                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Peningkatan kunjungan wisata melalui peningkatan daya tarik objek dan produk ekonomi kreatif (e.g. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan digital)                                   |
|                                                                                                                              |                                                                          | Peningkatan kerjasama antar daerah untuk pengembangan infrastruktur skala regional dan nasional                                                                | Sinkronisasi regulasi dan kewenangan lintas hirarki vertikal (nasional - daerah) dan horizontal (daerah, K/L)                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Optimalisasi tata kelola kelembagaan pengelolaan kawasan aglomerasi                                                                                                                      |
|                                                                                                                              |                                                                          | Peningkatan realisasi investasi dan kemudahan iklim investasi                                                                                                  | Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam penanaman modal dan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan insentif terhadap investor                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Optimalisasi pengelolaan penanaman modal daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif                                                                                   |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD | Meningkatnya daya saing mikro-kecil menengah, koperasi, dan BUMD                                                                                               | Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas UMKM, koperasi, BUMD dengan menjembatani pelaku usaha dan pasar domestik/internasional serta akses terhadap permodalan usaha dan digitalisasi |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi desa                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi koperasi, UMKM, dan BUMD                                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                                          | Mendorong terciptanya wirausaha muda dan daya saing usaha kewirausahaan yang memberi kesempatan setara untuk kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas | Peningkatan kapasitas usaha / skalabilitas wirausaha yang menjangkau usaha kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pengembangan kapasitas pembinaan dan inovasi wirausahaan                                                                                                                                 |

| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                         | STRATEGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | Mengendalikan Harga Bahan Pokok                 | Mendorong pengelolaan distribusi rantai pasok dan stabilitas harga bahan pokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pengembangan infrastruktur distribusi dan tata kelola yang terintegrasi antara produksi (suplier) dengan distributor serta pasar<br>Digitalisasi pemantauan harga dan stok pangan                                                                                                                            |
| Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat                                                                                        | Meningkatnya Kemandirian Desa                   | Penguatan Ekonomi Desa dan pengelolaan aset desa berdasar prinsip kesetaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan Sektor Unggulan Desa serta pengembangan UMKM Desa dan BUMDES<br>Pengembangan infrastruktur dasar serta pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi desa mandiri                                                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                 | Pengelolaan Sumber Daya Alam lokal (desa) yang Berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan kegiatan konservasi lingkungan melalui pemberdayaan kelompok di desa (pokdarwis, PKK, karang taruna Bank Sampah, BUMDes,dll)                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja            | Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenagakerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang memberi kesempatan setara bagi kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas                                                                                                                                                                                                                            | Pengembangan pembinaan dan pelatihan tenaga kerja dan pendidikan vokasi secara inklusif<br>Peningkatan kesempatan kerja dengan menjembatani supply-demand tenaga kerja melalui kebijakan Job Matching antara vokasi dan industri termasuk kesempatan yang setara bagi kelompok rentan dan kelompok minoritas |
|                                                                                                                              |                                                 | Optimalisasi sistem jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi semua, tanpa diskriminasi bagi pekerja penyandang disabilitas dan kelompok rentan                                                                                                                                                                                                                                                       | Peningkatan cakupan dan jangkauan penerima layanan jamsostek<br>Menekan kasus perselisihan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              | Penguatan Ekonomi dan kesejahteraan Keluarga    | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga<br>Peningkatan partisipasi remaja dan kelompok rentan dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga<br>Penguatan ketahanan dan keluarga berkualitas melalui pemberdayaan dan edukasi berkelanjutan<br>Pengembangan keterampilan untuk perempuan, terutama dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MISI 3 : Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas                                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat                                                                                    | Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal | Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemerataan distribusi tenaga kesehatan<br>Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mendorong integrasi antar layanan kesehatan menjadi satu sistem layanan inklusif                                                                                                                                                                                                                             |

| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                                   | STRATEGI                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                           | Mendorong pemerataan fasilitas kesehatan yang sesuai standar dan ramah kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas                              | Meningkatkan pemerataan alat kesehatan dan ketersediaan obat di seluruh fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan                                                    |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Optimalisasi respon kegawatdaruratan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                           | Meningkatkan akses menuju fasilitas layanan kesehatan yang ramah kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas                                    | Mendorong peningkatan jumlah dan cakupan fasilitas kesehatan sebanding dengan jumlah peningkatan penduduk                                                              |
|                                                                                                                              |                                                           | Optimalisasi pemberian asupan gizi bagi ibu hamil dan anak                                                                                            | Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan gizi terutama perempuan kelompok rentan, perempuan kepala keluarga dan perempuan dari kelompok minoritas |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Dukungan pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita                     |
|                                                                                                                              |                                                           | Mengoptimalkan pengawasan dan penanganan terhadap kasus <i>stunting</i>                                                                               | Meningkatkan integrasi sistem <i>monitoring stunting</i>                                                                                                               |
|                                                                                                                              | Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat | Mendorong jaminan kesehatan masyarakat yang merata di seluruh lapisan tanpa diskriminasi                                                              | Mendorong peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Meningkatkan kemudahan/aksesibilitas masyarakat menuju layanan kesehatan                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Mengoptimalkan kualitas pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                           | Meningkatkan pemerataan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit                                                                              | Mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai lingkungan sehat dan PHBS                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                           | Meningkatnya ketahanan dan kualitas hidup keluarga                                                                                                    | Penguatan kemitraan strategis dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan keluarga dan pencegahan <i>stunting</i>                                                   |
| MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat                                                                                  | Meningkatnya Pelayanan Pendidikan                         | Meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan inklusif | Meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan aksesibilitas untuk kelompok rentan dan perempuan                                                            |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Meningkatkan dukungan percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)                          |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Mendorong pelaksanaan Pendidikan gratis tingkat Pendidikan Menengah dan Khusus                                                                                         |
|                                                                                                                              |                                                           | Mengoptimalkan akses peserta didik penyandang disabilitas terhadap pendidikan                                                                         | Integrasi pendidikan inklusif dalam kurikulum                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Mendorong pemerataan sarana prasarana yang menunjang pendidikan inklusif                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                           | Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan                                                                                   | Meningkatkan kuantitas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kompetensi                                                                                       |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Mengoptimalkan kualitas SDM kependidikan                                                                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Mendorong pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan                                                                                                |
|                                                                                                                              |                                                           | Optimalisasi pembentukan karakter peserta didik melalui penghayatan nilai budaya dan kerukunan umat beragama                                          | Optimalisasi metode pembelajaran yang efektif                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                           |                                                                                                                                                       | Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi beragama melalui pendekatan kurikulum muatan lokal pendidikan                                                                   |

| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                                                                                 | STRATEGI                                                                                                                                                                                        | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Daya Saing Pemuda                                                                          | Peningkatan daya saing olahraga                                                                                                                                                                 | Mengoptimalkan upaya pembinaan terhadap atlet yang berkualitas                                                                                            |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama                        | Optimalisasi literasi dan numerasi masyarakat                                                                                                                                                   | Meningkatkan minat baca masyarakat                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                         | Meningkatkan pengembangan potensi kebudayaan                                                                                                                                                    | Mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Meningkatkan fasilitasi pemerintah dalam pembangunan sarana prasarana kesenian                                                                            |
| MISI 5 : Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu, Berkualitas, dan Berkelanjutan                         | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas                                      | Pengembangan sarana prasarana dan utilitas permukiman yang terpadu                                                                                                                              | Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni                                                                               |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan sarana-prasarana permukiman yang memadai dan terjangkau untuk kelompok rentan, perempuan, dan kelompok minoritas                             |
|                                                                                                                              |                                                                                                         | Optimalisasi manajemen pengelolaan kegiatan perhubungan yang meliputi pergerakan orang dan logistik yang terpadu dan responsif bagi kebutuhan kelompok rentan, perempuan dan kelompok minoritas | Optimalnya tata kelola dan kelembagaan perhubungan                                                                                                        |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pemenuhan serta pengembangan sarana-prasarana jalan (PJU) dan pengawasan ketertiban lalu lintas                                                           |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pembangunan dan pengembangan konektivitas antar kawasan produktif ekonomi (e.g. Pembangunan Dermaga Penyebarangan Pelabuhan Cituis)                       |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan sistem dan moda transportasi umum yang terintegrasinya (e.g. MRT, BRT, Kawasan TOD dan lain sebagainya)                                      |
|                                                                                                                              |                                                                                                         | Optimalisasi pengelolaan infrastruktur persampahan, limbah, serta peningkatan kualitas udara                                                                                                    | Pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah dan limbah (e.g. insinerator) yang terintegrasi hulu ke hilir dan bersertifikasi                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan dan pengadaan infrastruktur persampahan dan limbah (e.g. skema KPBU)                              |
|                                                                                                                              | Penegakan regulasi dan fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah dan limbah                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu                                                  | Pemenuhan dan pemerataan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi                                                                                                 | Penyediaan infrastruktur pendukung / utilitas jaringan listrik dan telekomunikasi melalui kerjasama dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                                                                                                         | Penegakan regulasi pemanfaatan kawasan bangunan dan fasilitas publik sesuai fungsinya,                                                                                                          | Penegakan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang,                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Penegakan bangunan yang tidak berizin maupun tidak sesuai dengan izin yang diperoleh,                                                                     |
| Peningkatan luas dan pengelolaan RTH publik                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              | Optimalisasi sistem data dan informasi spasial sektoral yang menyeluruh untuk mendukung penataan ruang, | Pengembangan kapasitas SDM dalam pendataan dan pengolahan sistem informasi spasial                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| MISI 6 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Kualitas                                                                                   |                                                                                                         | Peningkatan kuantitas dan kualitas air bersih dalam mendukung ketahanan air daerah                                                                                                              | Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengelolaan air baku dan air bersih                                                                          |
|                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 | Pengembangan sarana dan prasarana dalam pengelolaan air baku dan air bersih                                                                               |

| TUJUAN                                                                                                                       | SASARAN                                                                                | STRATEGI                                                                                                                                      | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
| Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan                                                                                          | Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Pangan                                         |                                                                                                                                               | Mendukung pengembangan SPAM Regional (lintas wilayah) (ie. pemanfaatan air Beku Bendungan Karian dan Rencana Bendung Lepas Pantai Muara Sungai Cisadane)                     |
|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               | Optimalisasi Wilayah Sungai Cisadane dalam mendukung pemenuhan kebutuhan konservasi, air minum dan air pertanian                                                             |
|                                                                                                                              |                                                                                        | Mendorong pengembangan EBT untuk ketahanan energi yang ramah lingkungan                                                                       | Optimalisasi tata kelola dan manajemen dalam pengadaan dan pengembangan EBT                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               | Pengembangan sarana dan prasarana pendukung elektrifikasi berbasis EBT                                                                                                       |
|                                                                                                                              | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan | Optimalisasi pengelolaan pangan daerah untuk menjamin ketahanan pangan daerah                                                                 | Peningkatan ketersediaan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang berkualitas                                                                              |
|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               | Pemerataan cadangan pangan dan infrastruktur pendukungnya                                                                                                                    |
|                                                                                                                              |                                                                                        | Optimalisasi tata kelola pemerintah dalam perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup, | Pengembangan sistem terintegrasi dalam manajemen perlindungan kawasan konservasi dan lindung serta pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup                          |
|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               | Pemetaan kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan penyangga di tingkat detail (di tingkat persil lahan) dan sinkronisasi dengan aturan penataan ruang                    |
|                                                                                                                              |                                                                                        | Pengembangan infrastruktur yang bersinergi dengan pengelolaan lingkungan hidup                                                                | Mendorong inovasi dalam pengembangan infrastruktur berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               | Penegakan regulasi untuk mendorong pengadaan dan pengembangan infrastruktur yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup                                              |
|                                                                                                                              |                                                                                        | Peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap risiko bencana                                                                                | Optimalisasi tata kelola manajemen penanggulangan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                               | Pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana yang terpadu (eg. penerapan SIH3 dan FEWS untuk bencana banjir serta pembangunan Perlindungan Abrasi Pantura Tangerang) |
|                                                                                                                              |                                                                                        | Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana                                                                       | Optimalisasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana                                                                 |

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

Tabel 3.9  
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

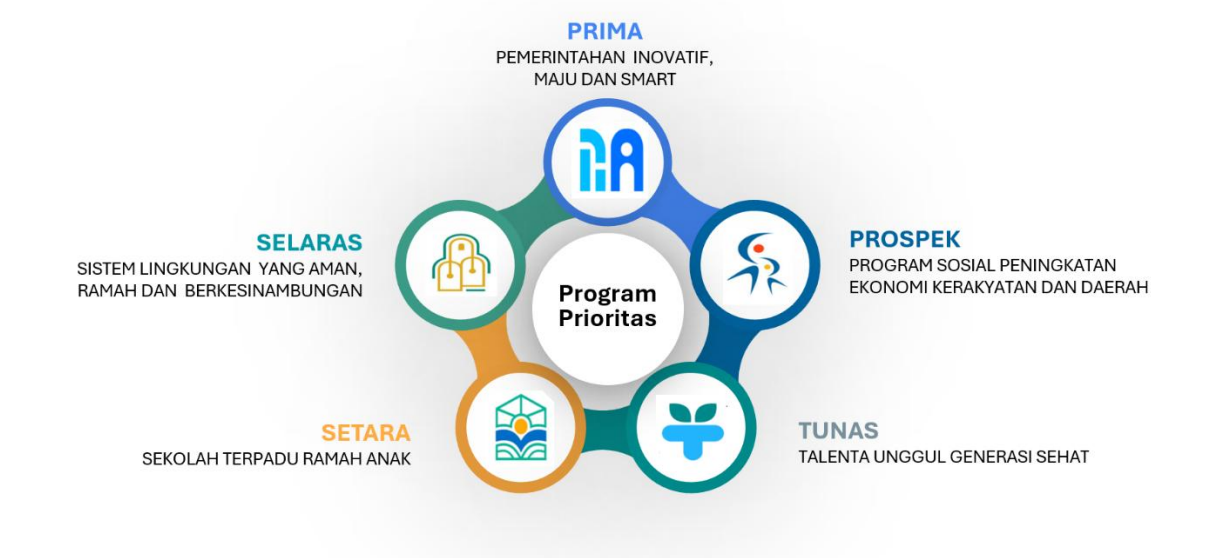
| Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang Periode 1 (2025-2029)<br>“Penguatan Modal Dasar” |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Arah Kebijakan Tahun 2026                                                                                                                               | Arah Kebijakan Tahun 2027                                                                                                                                                 | Arah Kebijakan Tahun 2028                                                                                                      | Arah Kebijakan Tahun 2029                                                                                              | Arah Kebijakan Tahun 2030                                                                                             |
|                                                                                           | Penguatan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kolaborasi antar sektor untuk menciptakan pondasi ketahanan pangan                              | Optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan.                                                                                   | Pengembangan Riset, Inovasi, dan Daya Saing Tenaga Kerja                                                                       | Akselerasi Pembangunan Daerah yang Inklusif untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat                                 | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing                                           |
| Misi 1<br>Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien    | Mendorong digitalisasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif                                                                  | Penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam rangka mendorong efektivitas kebijakan dan akselerasi pembangunan                                                          | Penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik                                      | Percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan inklusif yang merata                      | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah          |
| Misi 2<br>Mewujudkan Perekonomian yang Kuat, Produktif, dan Berdaya Saing                 | Penguatan kemandirian desa, peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi                                                                                     | Mendorong implementasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat                                                                                     | Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah                                  | Akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Mendorong perekonomian yang kuat, produktif, dan berdaya saing                                                        |
| Misi 3<br>Meningkatkan Kesehatan yang Berkualitas                                         | Peningkatan kapasitas tenaga medis dan pemanfaatan teknologi untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan mengawal penurunan stunting                       | Mendorong optimalisasi sistem kesehatan yang terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat                                                                  | Pengembangan inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan                                         | Pemantapan akses dan integrasi layanan kesehatan dalam mendukung pembangunan daerah                                    | Optimalisasi sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat               |
| Misi 4<br>Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas                                          | Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan                                                                                                   | Penguatan kolaborasi dalam dunia pendidikan untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas kompeten                                                                     | Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan                                                   | Percepatan pemerataan pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan wilayah maupun kelompok rentan          | Optimalisasi pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata dalam rangka memperkuat daya saing sumber daya manusia |
| Misi 5<br>Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur                  | Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui integrasi angkutan umum serta infrastruktur penghubung perdesaan-perkotaan dan antar wilayah | Pengelolaan infrastruktur berbasis lingkungan berkelanjutan dan sirkular serta peningkatan ketaatan kesesuaian penataan ruang dengan daya dukung dan daya tampung wilayah | Pengembangan Infrastruktur berbasis riset dan inovasi serta Peningkatan kerja sama lintas wilayah dan investasi infrastruktur. | Akselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah    | Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang merata untuk peningkatan daya saing wilayah                               |
| Misi 6<br>Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan                                  | Peningkatan ketahanan daerah (ketahanan air, pangan, energi) dan konervasi keanekaragaman hayati                                                        | Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon                                  | Pengembangan infrastruktur transisi EBT dan transformasi sistem pangan berkelanjutan                                           | Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui konservasi lingkungan dan ketahanan daerah terhadap risiko bencana         | Optimalisasi ketahanan lingkungan hidup dan penguatan daya dukung wilayah                                             |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025



3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 mengacu pada rumusan indikator kinerja program dan sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Pada Bab ini, dijabarkan program pembangunan daerah prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang terdiri atas lima program prioritas dengan beberapa kegiatan prioritas turunannya, yaitu:



Gambar 3.3  
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029  
*Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang*

Tabel 3.10  
Penjabaran Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029

| No.                                                                | Kegiatan Prioritas                                                                                    | Target 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRIMA - PEMERINTAHAN INOVATIF, MAJU DAN SMART                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                  | Digitalisasi Akses Layanan Kemasyarakatan kecamatan                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemenuhan pelayanan terpadu di kecamatan untuk pencetakan KTP dan KK di seluruh Kecamatan Target Tahun 2026 seluruh kecamatan sudah mulai pencetakan mandiri</li><li>• Rehab Ruang Pelayanan Target sampai dengan Tahun 2030 semua ruang pelayan di kecamatan sudah sesuai dengan standar pelayanan</li></ul>                        |
| 2                                                                  | Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan Rancang Bangun Command Centre Target Tahun 2025</li><li>• Penyiapan ruang command centre dan design interior target Tahun 2026</li><li>• Penyediaan Sarana Prasarana Command Centre Target Tahun 2027-2029</li></ul>                                                                                                       |
| 3                                                                  | Penyediaan Mobile Training Unit (MTU)                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• MTU Tata Busana dan otomotif Target Tahun 2025</li><li>• MTU Las dan Referifrasi (AC) Target Tahun 2026</li><li>• MTU Design Grafis, Barista dan Basic Office Target Tahun 2027</li><li>• MTU Tata Boga, Tata Rias dan Tata Busana Target Tahun 2028</li><li>• MTU Bahasa, Teknik Listrik dan Multimedia Target Tahun 2029</li></ul> |
| 4                                                                  | Pembangunan Gedung Diorama Daerah                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Gedung Diorama Tahun 2026 dan Tahun 2027</li><li>• Digital Konten Diorama Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2029</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 5                                                                  | Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Renovasi Gedung Graha Pemuda (Eksterior, Interior) Tahun 2025</li><li>• Pembangunan Inovator Hub (Ruang/tempat berkumpulnya komunitas wira usaha baru yang dibangun oleh para pemuda) Tahun 2026</li></ul>                                                                                                                           |
| PROSPEK - PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                  | Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan, Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan kawasan ekonomi kreatif di setiap kecamatan target sampai dengan tahun</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

| No.                                   | Kegiatan Prioritas                                                                                       | Target 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                          | 20230 terbentuknya Kawasan ekonomi kreatif di seluruh kecamatan (KECAMATAN) <ul style="list-style-type: none"><li>• Inkubasi usaha Mikro pada Pelaku UMKM (DINKOP)</li><li>• Pengembangan Produk unggulan Daerah di 10 Kecamatan (DINKOP)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                     | Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan)                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Mandiri Pangan Pertanian Target Tahun 5 desa (DPKP)</li><li>• Desa Mandiri Pangan Perkebunan Target Tahun 5 desa (DPKP)</li><li>• Desa Mandiri Pangan Peternakan Target Tahun 5 desa (DPKP)</li><li>• Desa Mandiri Pangan Perikanan Target tahun 5 desa (DISKAN)</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| 3                                     | Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan Usaha Ekonomi Produktif (UWEP) target 50 desa sampai dengan 2029 (DINSOS)</li><li>• Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah target 50 unit sampai dengan tahun 2029 (KECAMATAN)</li><li>• Pengembangan Budidaya ikan target 50 desa sampai dengan tahun 2029 (DISKAN)</li><li>• Penyediaan pangan dan nutrisi untuk MBR (masyarakat berpenghasilan Rendah) Target 50 desa sampai dengan 2029 (DPKP)</li></ul> |
| 4                                     | Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan                                                | Bazar murah di 29 kecamatan 4 kali dalam 1 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                     | Pembangunan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Tekno Park) Target Tahun 2026-Tahun 2029 (BAPPEDA, DTRB)</li><li>• Pengembangan sarana prasarana Target Tahun 2028-2030 (DTRB)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| TUNAS - TALENTA UNGGUL GENERASI SEHAT |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                     | Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanganan 32.650 balita stunting/gizi buruk melalui PMT target selama 5 tahun (DINKES, BLUD)</li><li>• Penanganan 6150 ibu hamil KEK melalui PMT lokal target selama 5 tahun (DINKES, BLUD)</li><li>• Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas target 12.500 keluarga risiko stunting selama 5 tahun (DPPKB)</li></ul>                                                                            |
| 2                                     | Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Sarana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 4 RSUD (4 RSUD)</li><li>• Relokasi Puskesmas target 5 puskesmas selama 5 tahun (DINKES)</li><li>• Penyediaan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance target selama 5 tahun 57 mobil (DINKES)</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| 3                                     | Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sanitasi Target selama 5 tahun 1250 unit, tahun 250 unit yang dibangun (DPPP)</li><li>• Sarana Air Bersih selama 5 tahun 250 unit, per tahun 50 unit yang dibangun (DPPP)</li><li>• Pembangunan PA Komunal Target selama 5 tahun 10 unit, 2 unit tahun yang akan dibangun (DPPP)</li></ul>                                                                                                                                                           |
| 4                                     | Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan (DPMPD)                    | Mobil Siaga Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                     | Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Posyandu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan Sarana Prasarana untuk peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas Target sampai dengan tahun 2030, 44 puskesmas (DINKES, BLUD)</li><li>• Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Pustu dan Posyandu target sampai dengan tahun 2030, 43 pustu (DINKES, BLUD)</li></ul>                                                                                                                           |
| SETARA - SEKOLAH TERPADU RAMAH ANAK   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                     | Pembangunan Perpustakaan Modern di Setiap Kecamatan                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan pojok baca/gedung Perpustakaan target salam 5 tahun di 29 kecamatan</li><li>• Penyediaan Sarana dan prasarana target selama 5 tahun di 29 kecamatan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No.                                                                | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                                                                        | Target 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                  | Pembangunan <i>Trauma Healing Centre</i> dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Rumah Trauma Healing Target Tahun 2025</li><li>• Penyediaan Sarpras dan SDM Target Tahun 2026-2027</li><li>• Pembangunan Sentra Olahraga Kabupaten Target Tahun 2026-2027</li><li>• Pengembangan Sarana Prasarana Sentra Olahraga target Tahun 2027-2028</li></ul>                                                                                               |
| 3                                                                  | Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan aspontren beserta sarana pendukung Target selama 5 tahun 915 Aspontren</li><li>• Sekolah inklusif Target selama 5 tahun 5 sekolah inklusif</li><li>• Pembangunan boarding School Target Tahun 2026-2027</li><li>• Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Target Tahun 2027-2029</li></ul>                                                                         |
| 4                                                                  | Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Pusat pembelajaran dan inovasi pendidikan target tahun 2026-2027</li><li>• Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Target Tahun 2027-2028</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 5                                                                  | Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beasiswa Sekolah Swasta Gratis Tingkat SD dan Sederajat Target selama 5 tahun 67.000 siswa</li><li>• Beasiswa Sekolah Swasta Gratis tingkat SMP dan Sederajat Target selama 5 tahun 25.869 siswa</li><li>• Beasiswa Perguruan Tinggi Target Selama 5 Tahun 1.735 Mahasiswa/siswi</li></ul>                                                                                   |
| SELARAS - SISTEM LINGKUNGAN YANG AMAN, RAMAH, DAN BERKESINAMBUNGAN |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                  | Pembangunan Rumah Layak Huni, Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Target selama 5 tahun 5.000 rumah, 1 tahun 1.000 rumah</li><li>• Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional<ul style="list-style-type: none"><li>-Pembangunan Pusat Riset Mangrove Target Tahun 2027</li><li>-Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Target Tahun 2027-2029</li></ul></li></ul> |
| 2                                                                  | Pengelolaan dan Pengolahan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi TPS3R target selama 5 tahun 25 TPS3R Tahunan 5 unit</li><li>• Pembentukan Bank Sampah Target Selama 5 tahun 150 Bank Sampah tahunan 30 bank Sampah</li><li>• Revitalisasi TPA Jatiwaringin target selama 5 tahun</li></ul>                                                                                                                                      |
| 3                                                                  | Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, rehabilitasi jalan Penghubung antar kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Target selama 5 tahun 15 km</li><li>• Pembangunan Jalan, Drainase, dan Pedestrian Bojong-Pemda Target 5 tahun</li><li>• Bus Sekolah Gratis Target selama 5 tahun 84 Bus Sekolah Gratis</li><li>• Bus rapid Transit (BRT) transportasi umum gratis Target selama 5 tahun 30 bus</li></ul>                                              |
| 4                                                                  | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                     | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 29 kecamatan selama 5 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                                                  | Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, sekaligus Kawasan Wisata Baru                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lanjutan Tandon Sudirman Target Tahun 2025-2027</li><li>• Polder Cibadak Baru Target Tahun 2025-2026</li><li>• Tandon Solear Target Tahun 2027</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang

Tabel 3.11  
Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                              |                                                        |                                                      |                                           |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN                                                       | SASARAN                                                | OUTCOME                                              | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                | TARGET CAPAIAN |       | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                              |                                                        |                                                      |                                           | 2025           | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                                                 | Mewujudkan Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Inovatif |                                                        |                                                      | Indeks Reformasi Birokrasi                | 85,12          | 88,54 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                              | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik               | Indeks Pelayanan Publik (indeks)          | 4,23           | 4,40  | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK<br><br>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK<br><br>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL<br><br>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN<br><br>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP<br><br>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD<br><br>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT<br><br>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | PRIMA<br>1) Penyediaan Mobil Training Unit (MTU)<br>2) Digital Konten Gedung Diorama<br>3) Pembangunan Pusat Inovasi Pemuda |
|                                                                                                                              |                                                              | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah    | Meningkatnya kematangan penerapan pemerintah digital | Indeks PEMDI                              | N/A            | 2,7   | 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRIMA<br>1) Digitalisasi Akses Layanan Kemasyarakatan di kecamatan<br>2) Penyelenggaraan Command Center Data Terpadu        |
|                                                                                                                              |                                                              |                                                        | Meningkatnya kompetensi, kinerja dan kualitas ASN    | Indeks Profesionalitas ASN                | 82,40          | 83,00 | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH<br><br>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                                              |                                                        | Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah     | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | 74,46          | 76,96 | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |

| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                        |                                                                                |                                                          |                                                         |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN                                                 | SASARAN                                                                        | OUTCOME                                                  | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                              | TARGET CAPAIAN |               | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                                                          |                                                         | 2025           | 2030          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah   | Nilai AKIP                                              | 76             | 80,20         | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH<br><br>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH<br><br>6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN<br><br>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                | Meningkatnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah | Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah      | 91             | 96            | 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                | Meningkatnya maturitas SPIP                              | Maturitas SPIP                                          | 3,370          | 3,500         | 6.01.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI<br><br>6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| Mewujudkan Perekonomian yang Kuat. Produktif. dan Berdaya Saing                                                              | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah |                                                                                |                                                          | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                            | 5,27-6,27      | 8,27          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                                                          | Tingkat Inflasi (%)                                     | 2,00           | 2,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        | Meningkatnya Produktivitas dan Kontribusi Sektor Unggulan dan Sektor Potensial | Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan       | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%) | 33,55 - 33,75  | 33.70 - 33.90 | 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI<br><br>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI<br><br>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                       | PROSPEK<br>1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian. Peternakan. Perkebunan dan Perikanan)<br>2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan               | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)         | 11,15 - 11,35  | 11.33 - 11.50 | 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN<br><br>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING<br><br>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                |                                                          |                                                         |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |

| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |        |                                                                          |                                                                                                   |                                                                         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN | SASARAN                                                                  | OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                                              | TARGET CAPAIAN |       | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |        |                                                                          |                                                                                                   |                                                                         | 2025           | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |        |                                                                          | Meningkatnya kontribusi sektor pertanian. peternakan. dan perikanan                               | Kontribusi sektor pertanian. kehutanan. dan perikanan terhadap PDRB (%) | 6,07 - 6,30    | 6,21  | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br><br>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN<br><br>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP<br><br>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA<br><br>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |        |                                                                          | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata                                                         | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku (%)            | 1,76           | 2,15  | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA<br><br>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |        |                                                                          | Meningkatnya investasi daerah                                                                     | Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB (% PDRB)                    | 27,02          | 27,32 | 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL<br><br>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL<br><br>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |        | Meningkatnya Skalabilitas usaha mikro-kecil, menengah, koperasi dan BUMD | Meningkatnya peran koperasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah                           | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)                           | 1,26           | 1,33  | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)<br><br>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                                      | PROSPEK<br>1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM<br>2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan<br>3) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park) |
|                                                                                                                              |        | Mengendalikan Harga Bahan Pokok                                          | Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Indeks Perkembangan Harga (Indeks)                                      | 5,11           | 5,28  | 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING<br><br>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                                                                                            | PROSPEK<br>1) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                              |        |                                                                          |                                                                                                   |                                                                         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                           |                                                 |                                                                       |                                                |                |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN                                    | SASARAN                                         | OUTCOME                                                               | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                     | TARGET CAPAIAN |       | Program Prioritas                                                                                                                     | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                           |                                                 |                                                                       |                                                | 2025           | 2030  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat     |                                                 |                                                                       | Tingkat Kemiskinan (%)                         | 5,94-6,17      | 4,40  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                           | Meningkatnya Kemandirian Desa                   | Meningkatnya status desa dan capaian Indeks Desa                      | Indeks Desa (Indeks)                           | 0,783          | 0,819 | 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                         | PROSPEK<br>1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian. Peternakan. Perkebunan dan Perikanan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                           | Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja            | Meningkatnya serapan tenaga kerja daerah                              | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)         | 68,08          | 71,19 | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA<br><br>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                         | PROSPEK<br>1) Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan. Pusat Pengembangan Pemberdayaan UMKM dan IKM<br>2) Pembangunan dan Pengembangan Pusat Inovasi dan Teknologi serta Kewirausahaan (Tangerang Techno Park)                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                           | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat                    | Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)           | 58             | 63    | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL<br><br>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL<br><br>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | PROSPEK<br>1) Penanganan Kolaborasi pengentasan kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                           |                                                 | Meningkatnya kesetaraan gender, peran perempuan dan perlindungan anak | Indeks Ketimpangan Gender (indeks)             | 0,397          | 0,388 | 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br><br>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                              |                                           |                                                 |                                                                       | Usia Harapan Hidup (tahun)                     | 77,7           | 83,89 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mewujudkan Kesehatan yang Berkualitas                                                                                        | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya pelayanan kesehatan secara optimal | Meningkatnya kemajuan pembangunan layanan kesehatan masyarakat        | Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis) | 20             | 70    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                   | TUNAS<br>1) Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia<br>2) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan<br>3) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih<br>4) Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan (DPMPD)<br>5) Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Posyandu |
|                                                                                                                              |                                           |                                                 | Menurunnya angka stunting pada balita                                 | Prevalensi Stunting                            | 20,09          | 15,5  | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                             |                                                                                  |                                                                         |                                                    |                |       |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN                                      | SASARAN                                                                          | OUTCOME                                                                 | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                         | TARGET CAPAIAN |       | Program Prioritas                                                                                                             | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                                                         |                                                    | 2025           | 2030  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                             | Meningkatnya kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat                        | Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan                      | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) | 98             | 99    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                           | TUNAS<br>1) Pencegahan dan penanganan Balita Stunting/gizi buruk serta penanganan ibu hamil KEK/Anemia                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                             |                                                                                  | Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga                              | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)              | 65             | 70    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)<br><br>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 2) Penambahan Sarana-Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan<br>3) Pembangunan Sarana Sanitasi dan Air Bersih<br>4) Penyediaan mobil siaga dan sarana Prasarana pendukung bagi desa dan kelurahan (DPMPD)<br>5) Penambahan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, dan Posyandu |
| Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas                                                                                       | Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat |                                                                                  |                                                                         | Indeks Pendidikan (indeks)                         | 0,68           | 0,72  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                             |                                                                                  |                                                                         | Indeks Harmoni (indeks)                            | 7,09           | 7,24  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                             | Meningkatnya Pelayanan Pendidikan                                                | Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia produktif             | Rata Rata Lama Sekolah                             | 9,63           | 10,66 | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                        | SETARA<br>1) Pembangunan Sekolah Inklusif dan Boarding School untuk Tingkat SMP dan Asrama Pondok Pesantren (ASPONTREN)                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                              |                                             |                                                                                  | Meningkatnya ekspektasi lama waktu pendidikan formal                    | Harapan lama sekolah (tahun)                       | 13,43          | 14,24 | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                        | 2) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan<br>3) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                              |                                             | Meningkatnya Daya Saing Pemuda                                                   | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pembangunan bidang keolahragaan | Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)                 | 5,11           | 5,28  | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                  | SETARA<br>1) Pembangunan Trauma Healing Centre dan Pembangunan sentra Olahraga Kabupaten                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                              |                                             | Meningkatnya Karakter Masyarakat yang Berbasis pada Nilai-Nilai Budaya dan Agama | Meningkatnya tata kelola dan keberlanjutan pembangunan kebudayaan       | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                | 52             | 56    | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                       | SETARA<br>1) Pembangunan Pusat Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                              |                                             |                                                                                  | Meningkatnya budaya membaca dan akses masyarakat terhadap literasi      | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat             | 60             | 65    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                        | 2) Pemberian Beasiswa bagi siswa Kurang Mampu jenjang Perguruan Tinggi dan Subsidi dana Pendidikan ke Sekolah Swasta                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                              |                                             |                                                                                  | Meningkatnya pembentukan karakter                                       | Indeks Karakter Masyarakat                         | 69             | 91,5  | 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER                                                                     | 3) Pojok baca digital dan internet gratis di setiap kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN                                                                                               | SASARAN                                                            | OUTCOME                                                          | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                     | TARGET CAPAIAN |       | Program Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                         | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    |                                                                  |                                                | 2025           | 2030  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    | dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat                          |                                                |                |       | KEBANGSAAN<br><br>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA<br><br>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT<br><br>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mewujudkan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur                                                               | Mewujudkan Penyediaan dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Terpadu. Berkualitas. dan Berkelanjutan |                                                                    |                                                                  | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur          | 78             | 88    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                      | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Secara Merata dan Berkualitas | Meningkatnya cakupan dan kualitas infrastruktur dasar            | Indeks Infrastruktur                           | 38,98          | 65,33 | 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN<br><br>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)<br><br>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE<br><br>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN<br><br>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | SELARAS<br>1) Pembangunan Rumah Layak Huni, Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional<br>2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, rehabilitasi jalan Penghubung antar kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik                                              |
|                                                                                                                              |                                                                                                      | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Terpadu             | Meningkatnya kepatuhan dan kesesuaian terhadap tata ruang daerah | Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW (%) | 96             | 98,52 | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                                                                                                                            | SELARAS<br>1) Pembangunan Rumah Layak Huni, Kawasan Permukiman Baru di Pesisir serta Pembangunan Pusat Riset Mangrove skala Nasional<br>2) Revitalisasi Drainase pada ruas jalan Strategis Kabupaten, Rekonstruksi Jalan, rehabilitasi jalan Penghubung antar kawasan Perumahan dan Permukiman serta Penyediaan Angkutan Sekolah dan Angkutan Publik<br>3) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)" |
|                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    | Meningkatnya penyediaan ruang terbuka hijau                      | Persentase RTH (%)                             | 21,10          | 25    | 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG<br><br>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)<br><br>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mewujudkan Lingkungan                                                                                                        | Meningkatnya Ketahanan                                                                               |                                                                    |                                                                  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)             | 18,21          | 19,99 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing" (Tangerang Sejahtera, Semakin Gemilang) |                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                                                         |                |       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                                         | TUJUAN                                                  | SASARAN                                                                                | OUTCOME                                               | INDIKATOR TUJUAN - SASARAN                                                              | TARGET CAPAIAN |       | Program Prioritas                                                                                                                                                          | Program Prioritas Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                                                         | 2025           | 2030  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hidup yang Berkelanjutan                                                                                                     | Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan |                                                                                        |                                                       | Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)                                                        | 78,16          | 82,49 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                         | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                        | 61,57          | 62,43 | 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                | SELARAS<br>1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, sekaligus Kawasan Wisata Baru<br>2) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                         |                                                                                        | Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana | Indeks Risiko Bencana                                                                   | 125            | 120   | 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                         | Meningkatnya Ketahanan Energi. Air. dan Pangan                                         | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih     | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)                                         | 65,59          | 90,41 | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                                   | SELARAS<br>1) Pembangunan Kolam Retensi/Polder/Bendung/Tandon Pengendali Banjir, Penyediaan Air Baku, sekaligus Kawasan Wisata Baru<br><br>PROSPEK<br>1) Pembangunan Desa Mandiri Pangan (Pertanian. Peternakan. Perkebunan dan Perikanan)<br>2) Penyelenggaraan Pasar Murah Setiap Kecamatan per Triwulan |
|                                                                                                                              |                                                         |                                                                                        | Meningkatnya pemenuhan konsumsi pangan berkualitas    | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 2,2            | 1,56  | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                              |                                                         |                                                                                        |                                                       |                                                                                         |                |       | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT<br><br>2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Sumber : Analisis Penyusun, 2025



[illegible]



| N<br>o | Program<br>Unggulan                                                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Satuan    | Target 5 Tahun |                | Target |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    | OPD<br>Penanggung<br>jawab |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----|------|----|----------------------------|
|        |                                                                    |                                                                                                                                                                 |           |                |                | 2025   |               | 2026 |               | 2027 |               | 2028 |               | 2029 |    | 2030 |    |                            |
|        |                                                                    |                                                                                                                                                                 |           | K              | Rp             | K      | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp | K    | Rp |                            |
|        |                                                                    | - Renovasi Gedung Graha Pemuda (Eksterior, Interior)                                                                                                            | Unit      | 1              | 1.500.000.000  | 1      | 1.500.000.000 |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    | DTRB                       |
|        |                                                                    | Pengadaan Sarana Prasarana                                                                                                                                      |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        | 02.19.02                                                           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        | 2.19.02.2.01                                                       | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        | 2.19.02.2.01.00 016                                                | Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota                                                                             |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        |                                                                    | - Pembangunan Inovator Hub (Ruang/tempat berkumpulnya komunitas wira usaha baru yang dibangun oleh para pemuda)                                                 | Unit      | 1              | 2.000.000.000  | -      |               |      | 2.000.000.000 |      |               |      |               |      |    |      |    | Disporabudpar              |
|        |                                                                    | a. Ruang Diskusi dan rapat                                                                                                                                      |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        |                                                                    | b. Ruang pelatihan                                                                                                                                              |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        |                                                                    | c. Ruang Laboratorium                                                                                                                                           |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        |                                                                    | d. Ruang Auditorium                                                                                                                                             |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        |                                                                    | e. Ruang Teknologi Informasi                                                                                                                                    |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
| 2      | PROGRAM SOSIAL PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAERAH (PROSPEK) |                                                                                                                                                                 |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
| 1      |                                                                    | Pembentukan dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Kreatif di setiap kecamatan dan Pusat Pengembangan UMKM dan IKM:                                                    |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    | DINKOP                     |
|        | 07.01.03                                                           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                              |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        | 7.01.03.2.01                                                       | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                           |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        | 7.01.03.2.01.00 03                                                 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                   |           |                |                |        |               |      |               |      |               |      |               |      |    |      |    |                            |
|        |                                                                    | a. Pembangunan kawasan ekonomi kreatif di setiap kecamatan                                                                                                      | Kecamatan | 29             | 14.500.000.000 |        |               | 12   | 6.000.000.000 | 12   | 6.000.000.000 | 5    | 2.500.000.000 |      |    |      |    | Kecamatan                  |



[illegible]





[illegible]

[illegible]

| N o | Program Unggulan    | Kegiatan                                                                                                                                                               | Satuan     | Target 5 Tahun |                 | Target |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                | OPD Penanggung jawab |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|----------------------|
|     |                     |                                                                                                                                                                        |            |                |                 | 2025   |                | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                |                      |
|     |                     |                                                                                                                                                                        |            | K              | Rp              | K      | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp             |                      |
|     |                     | RSUD, Puskesmas, posyandu dan pustu bagi balita, ibu hamil, remaja dan lansia;                                                                                         |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 01.02.02            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                            |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 1.02.02.2.02        | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 1.02.02.2.01.00 02  | Pembangunan Puskesmas                                                                                                                                                  |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 1.02.02.2.01.00 06  | Pengembangan Puskesmas                                                                                                                                                 |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 1.02.02.2.01.00 014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                            |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 1.02.02.2.01.00 020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                       |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     | 1.02.02.2.02.00 022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                                               |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |
|     |                     | - Penambahan Sasrana Prasarana dan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada RSUD pada 4 RSUD:                                                                           |            |                |                 |        |                |      |                |      |                |      |                |      |                |      |                | 4 RSUD               |
|     |                     | - RSUD Tangerang                                                                                                                                                       | RSUD       | 1              | 210.000.000.000 |        |                | 1,00 | 10.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | - RSUD Tangerang     |
|     |                     | - RSUD Balaraja                                                                                                                                                        | RSUD       | 1              | 230.000.000.000 |        |                | 1,00 | 30.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | - RSUD Balaraja      |
|     |                     | - RSUD Pakuhaji                                                                                                                                                        | RSUD       | 1              | 215.000.000.000 |        |                | 1,00 | 15.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | - RSUD Pakuhaji      |
|     |                     | - RSUD Tigaraksa                                                                                                                                                       | RSUD       | 1              | 240.000.000.000 |        |                | 1,00 | 40.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | 1,00 | 50.000.000.000 | - RSUD Tigaraksa     |
| 3   |                     | - Penambahan Sasrana Prasarana untuk Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu dan Posyandu (rehabiltasi dan penambahan alkes dan pemeliharaan alkes) : | Puskes mas | 44             | 88.000.000.000  | 8      | 16.000.000.000 | 8    | 16.000.000.000 | 7    | 14.000.000.000 | 7    | 14.000.000.000 | 7    | 14.000.000.000 | 7    | 14.000.000.000 | Puskesmas            |
|     |                     |                                                                                                                                                                        | Pustu      | 43             | 64.500.000.000  | 8      | 12.000.000.000 | 7    | 10.500.000.000 | 7    | 10.500.000.000 | 7    | 10.500.000.000 | 7    | 10.500.000.000 | 7    | 10.500.000.000 | Dinas Kesehatan      |
|     |                     | - Relokasi Puskesmas                                                                                                                                                   | Unit       | 5              | 119.150.000.000 |        |                | 1,00 | 23.000.000.000 | 1,00 | 24.000.000.000 | 1,00 | 24.000.000.000 | 1,00 | 24.150.000.000 | 1,00 | 24.000.000.000 | Dinas Kesehatan      |

[illegible]



[illegible]





| No | Program Unggulan | Kegiatan                                                                                                                                              | Satuan   | Target 5 Tahun |                | Target |             |      |                |      |                |      |                |      |                | OPD Penanggung jawab |                |                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------|-------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                       |          | K              | Rp             | 2025   |             | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                |                      | 2030           |                  |
|    |                  | d. Modifikasi sarana prasarana sekolah inklusi                                                                                                        | Sekolah  |                |                |        |             | 5    | 350.000.000    |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | e. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan pada Pendidikan formal                                                               | Orang    |                |                | 15     | 375.000.000 |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | f. peningkatan kompetensi guru secara bertahap dan berkelanjutan baik pada Pendidikan pelatihan                                                       | Orang    |                |                | 500    | 200.000.000 |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | g. penyediaan layanan konsultasi atas layanan inklusi kepada sekolah dan masyarakat                                                                   | Orang    |                |                | 3      | 360.000.000 |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | h. penyediaan layanan klinis kepada peserta didik penyandang disabilitas pembentukan komunitas belajar Pendidikan inklusif pada masing-masing jenjang | Paket    |                |                | 1      | 500.000.000 |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | i. Pembentukan komunitas belajar pendidikan inklusi                                                                                                   | Kegiatan |                |                | 1      | 100.000.000 |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | -Boarding School                                                                                                                                      |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                        |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                              |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                   |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | a. Penyiapan DED                                                                                                                                      | Dokumen  | 1              | 200.000.000    | 1      | 200.000.000 |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | b. Pembangunan Boarding Scholl                                                                                                                        | Unit     | 1              | 20.000.000.000 |        |             |      |                | 1    | 20.000.000.000 |      |                |      |                |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | c. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung                                                                                                              | Paket    | 1              | 3.000.000.000  |        |             |      |                | 1    | 1.000.000.000  | 1    | 1.000.000.000  | 1    | 1.000.000.000  |                      |                | Dinas Pendidikan |
|    |                  | -Rehabilitasi SD dan SMP                                                                                                                              |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                        |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | KEG Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama                                                                                 |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | Rehabilitasi                                                                                                                                          |          |                |                |        |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | a. Penyiapan DED                                                                                                                                      | Dokumen  | 1              | -              | 1      |             |      |                |      |                |      |                |      |                |                      |                |                  |
|    |                  | b. Rehabilitasi SD dan SMP                                                                                                                            | Unit     | 1              | 50.000.000.000 |        |             | 1    | 10.000.000.000 | 1    | 10.000.000.000 | 1    | 10.000.000.000 | 1    | 10.000.000.000 | 1                    | 10.000.000.000 |                  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| N<br>o | Program<br>Unggulan   | Kegiatan                                                                                                                              | Satuan        | Target 5 Tahun |                | Target |               |      |                |      |                |      |               |      |               |      |               | OPD<br>Penanggung<br>jawab |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|----------------------------|
|        |                       |                                                                                                                                       |               |                |                | 2025   |               | 2026 |                | 2027 |                | 2028 |               | 2029 |               | 2030 |               |                            |
|        |                       |                                                                                                                                       |               | K              | Rp             | K      | Rp            | K    | Rp             | K    | Rp             | K    | Rp            | K    | Rp            | K    | Rp            |                            |
|        | 2.11.04.2.01.00<br>09 | Pengelolaan Taman<br>Keanekaragaman Hayati<br>di Luar Kawasan Hutan                                                                   |               |                |                |        |               |      |                |      |                |      |               |      |               |      |               |                            |
|        |                       | - Penyiapan Design RTH                                                                                                                |               | 29             | 500.000.000    | 5      | 500.000.000   |      |                |      |                |      |               |      |               |      |               | DLHK                       |
|        |                       | - Pembangunan Ruang<br>Terbuka Hijau (RTH)                                                                                            | Kecama<br>tan | 29             | 15.000.000.000 |        |               | 5    | 3.750.000.000  | 5    | 3.750.000.000  | 5    | 3.750.000.000 | 5    | 3.750.000.000 | 6    | 4.500.000.000 | DLHK                       |
| 5      |                       | Pembangunan Kolam<br>Retensi/Polder/Bendung<br>/Tandon Pengendali<br>Banjir, Penyediaan Air<br>Baku, Sekaligus<br>Kawasan Wisata Baru |               |                |                |        |               |      |                |      |                |      |               |      |               |      |               |                            |
|        |                       | PROGRAM<br>PENGELOLAAN SUMBER<br>DAYA AIR (SDA)                                                                                       |               |                |                |        |               |      |                |      |                | -    | -             | -    | -             | -    | -             | DBMSDA                     |
|        |                       | Pengelolaan SDA dan<br>Bangunan Pengaman<br>Pantai pada Wilayah<br>Sungai (WS) dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota             |               |                |                |        |               |      |                |      |                | -    | -             | -    | -             | -    | -             | DBMSDA                     |
|        |                       | Pembangunan<br>Polder/Kolam Retensi                                                                                                   |               |                |                |        |               |      |                |      |                | -    | -             | -    | -             | -    | -             | DBMSDA                     |
|        |                       | 1.Lanjutan Tandon<br>sudirman                                                                                                         | Unit          | 1              | 26.000.000.000 | 1      | 5.000.000.000 | 1    | 14.000.000.000 | 1    | 7.000.000.000  |      |               |      |               |      |               | DBMSDA                     |
|        |                       | 2. polder cibadak baru                                                                                                                | Unit          | 1              | 8.500.000.000  | 1      | 7.000.000.000 | 1    | 1.500.000.000  |      |                |      |               |      |               |      |               | DBMSDA                     |
|        |                       | 3. Tandon Solear                                                                                                                      | Unit          | 1              | 14.000.000.000 | -      | -             |      |                | 1    | 14.000.000.000 |      |               |      |               |      |               | DBMSDA                     |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

## BAB IV

### PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat rangkaian program perangkat daerah menurut urusan (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan). Rangkaian program tersebut menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab.

#### 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Selain mencakup pemenuhan urusan konkuren dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang.

Tabel 4.1  
Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                                                          |                  |           | 2026                            |                       | 2027   |                       | 2028   |                       | 2029   |                       | 2030   |                       |                                                       |
|                                                                                               |                                                                                                                          |                  |           | TARGET                          | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  |                                                       |
| (01)                                                                                          | (02)                                                                                                                     | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)                  | (07)   | (08)                  | (09)   | (10)                  | (11)   | (12)                  | (13)   | (14)                  | (15)                                                  |
| 1.01 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N BIDANG<br>PENDIDIKAN                                       |                                                                                                                          |                  |           |                                 | 2.400.000.00<br>0.000 |        | 2.450.000.00<br>0.000 |        | 2.500.000.00<br>0.000 |        | 2.550.000.00<br>0.000 |        | 2.600.000.00<br>0.000 |                                                       |
| 1.01.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                                          |                  |           |                                 | 1.299.650.88<br>2.964 |        | 1.299.348.88<br>6.464 |        | 1.299.848.88<br>6.464 |        | 1.299.348.88<br>6.464 |        | 1.299.848.88<br>6.464 |                                                       |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintah                                | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                                          | 100              | 100       | 100                             | 1.299.650.88<br>2.964 | 100    | 1.299.348.88<br>6.464 | 100    | 1.299.848.88<br>6.464 | 100    | 1.299.348.88<br>6.464 | 100    | 1.299.848.88<br>6.464 | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
| 1.01.02 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                             |                                                                                                                          |                  |           |                                 | 1.098.296.27<br>7.036 |        | 1.148.598.27<br>3.536 |        | 1.198.098.27<br>3.536 |        | 1.248.598.27<br>3.536 |        | 1.298.098.27<br>3.536 |                                                       |
| Meningkatnya<br>partisipasi anak<br>usia sekolah                                              | Jumlah Warga<br>Negara Usia 7-15<br>Tahun yang<br>berpartisipasi<br>dalam pendidikan<br>dasar (APS)<br>(Persentase)      | 98,99            | 99,2<br>3 | 99,48                           | 1.098.296.27<br>7.036 | 99,72  | 1.148.598.27<br>3.536 | 99,97  | 1.198.098.27<br>3.536 | 100    | 1.248.598.27<br>3.536 | 100    | 1.298.098.27<br>3.536 | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
|                                                                                               | Jumlah Warga<br>Negara Usia 5-6<br>tahun yang<br>berpartisipasi<br>dalam pendidikan<br>(APS) (Persentase)                | 64,99            | 68,0<br>3 | 71,07                           |                       | 74,11  |                       | 77,15  |                       | 80,19  |                       | 83,16  |                       | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
|                                                                                               | Jumlah Warga<br>Negara Usia 7-18<br>Tahun yang<br>berpartisipasi<br>dalam pendidikan<br>kesetaraan (APS)<br>(Persentase) | 13,43            | 14,1<br>9 | 14,95                           |                       | 15,72  |                       | 16,48  |                       | 17,24  |                       | 18,01  |                       | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
|                                                                                               | Persentase<br>Bangunan Sekolah<br>dalam Kondisi Baik<br>(%)                                                              | 58,26            | 62,2<br>6 | 64,26                           |                       | 64,26  |                       | 66,26  |                       | 68,26  |                       | 70,26  |                       | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
|                                                                                               | Rasio Ketersediaan<br>Sekolah terhadap                                                                                   | 27,06            | 28,0<br>6 | 28,56                           |                       | 28,56  |                       | 29,06  |                       | 29,56  |                       | 30,06  |                       | Dinas/Badan yang<br>menangani                         |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                               |                  |           | 2026                            |                       | 2027   |                       | 2028   |                       | 2029   |                       | 2030   |                       |                                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                               |                  |           | TARGET                          | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  |                                                           |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                                          | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)                  | (07)   | (08)                  | (09)   | (10)                  | (11)   | (12)                  | (13)   | (14)                  | (15)                                                      |
|                                                                                              | penduduk usia<br>sekolah (%)                                                                                                  |                  |           |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | Bidang<br>Pendidikan                                      |
| 1.01.03 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN<br>KURIKULUM                                        |                                                                                                                               |                  |           |                                 | 1.052.840.00<br>0     |        | 1.052.840.00<br>0     |        | 1.052.840.00<br>0     |        | 1.052.840.00<br>0     |        | 1.052.840.00<br>0     |                                                           |
| Meningkatnya<br>Kualitas<br>Kurikulum<br>Pendidikan                                          | Persentase Satuan<br>Pendidikan yang<br>Mengembangkan<br>Kurikulum Muatan<br>Lokal (%)                                        | 8,55             | 28,5<br>5 | 43,55                           | 1.052.840.00<br>0     | 58,55  | 1.052.840.00<br>0     | 68,55  | 1.052.840.00<br>0     | 78,55  | 1.052.840.00<br>0     | 88,55  | 1.052.840.00<br>0     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
| 1.01.04 -<br>PROGRAM<br>PENDIDIK DAN<br>TENAGA<br>KEPENDIDIKAN                               |                                                                                                                               |                  |           |                                 | 700.000.000           |        | 700.000.000           |        | 700.000.000           |        | 700.000.000           |        | 700.000.000           |                                                           |
| Meningkatnya<br>mutu dan<br>distribusi<br>pendidik dan<br>tenaga<br>kependidikan             | Persentase Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Berkualifikasi<br>minimal D4/S1 (%)                                 | 89,14            | 90,6<br>4 | 91,64                           | 700.000.000           | 92,64  | 700.000.000           | 93,64  | 700.000.000           | 94,64  | 700.000.000           | 95,64  | 700.000.000           | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
| 1.01.05 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N PERIZINAN<br>PENDIDIKAN                             |                                                                                                                               |                  |           |                                 | 300.000.000           |        | 300.000.000           |        | 300.000.000           |        | 300.000.000           |        | 300.000.000           |                                                           |
| Meningkatnya<br>Kualitas dan<br>Distribusi<br>Instansi<br>Pendidikan                         | Persentase<br>Rekomendasi<br>perizinan<br>Pendidikan yang<br>diterbitkan<br>(PAUD/SD/SMP<br>dan Pendidikan<br>Non Formal) (%) | 80,08            | 80,5<br>8 | 81,58                           | 300.000.000           | 82,58  | 300.000.000           | 83,58  | 300.000.000           | 84,58  | 300.000.000           | 85,58  | 300.000.000           | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan |
| 1.02 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>KESEHATAN                                        |                                                                                                                               |                  |           |                                 | 2.000.000.00<br>0.000 |        | 2.100.000.00<br>0.000 |        | 2.200.000.00<br>0.000 |        | 2.300.000.00<br>0.000 |        | 2.300.000.00<br>0.000 |                                                           |
| 1.02.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                                               |                  |           |                                 | 1.268.985.41<br>4.129 |        | 1.271.386.19<br>7.342 |        | 1.294.365.12<br>2.408 |        | 1.344.781.56<br>9.946 |        | 1.278.588.54<br>6.991 |                                                           |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan                              | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                                               | 100              | 100       | 100                             | 1.268.985.41<br>4.129 | 100    | 1.271.386.19<br>7.342 | 100    | 1.294.365.12<br>2.408 | 100    | 1.344.781.56<br>9.946 | 100    | 1.278.588.54<br>6.991 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                       | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                                 |                  |      | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                       |                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                 |                  |      | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                  |                                                          |
| (01)                                                                                                          | (02)                                                                                                                            | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                  | (15)                                                     |
| Kabupaten/<br>Kota                                                                                            |                                                                                                                                 |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                       |                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                                                 |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
| 1.02.02 -<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT |                                                                                                                                 |                  |      |                                 | 711.297.680.<br>109 |        | 808.859.594.<br>639 |        | 885.523.633.<br>712 |        | 934.323.838.<br>838 |        | 1.001.545.33<br>8.228 |                                                          |
| Meningkatkan<br>kualitas<br>kesehatan<br>perorangan dan<br>masyarakat                                         | Cakupan imunisasi<br>bayi lengkap<br>(Persentase)                                                                               | 100              | 100  | 100                             | 711.297.680.<br>109 | 100    | 808.859.594.<br>639 | 100    | 885.523.633.<br>712 | 100    | 934.323.838.<br>838 | 100    | 1.001.545.33<br>8.228 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               | Jumlah Kematian<br>Ibu (Orang)                                                                                                  | 39               | 38   | 37                              |                     | 36     |                     | 35     |                     | 34     |                     | 32     |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               | Persentase fasilitas<br>kesehatan yang<br>terintegrasi dalam<br>sistem informasi<br>kesehatan nasional<br>(%)                   | 100              | 100  | 100                             |                     | 100    |                     | 100    |                     | 100    |                     | 100    |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               | Persetase fasilitas<br>pelayanan<br>kesehatan<br>terakreditasi<br>paripurna (%)                                                 | 85               | 88   | 88                              |                     | 90     |                     | 90     |                     | 90     |                     | 92     |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               | Prevalensi wasting<br>(berat badan/tinggi<br>badan) anak pada<br>usia kurang dari 5<br>tahun, berdasarkan<br>tipe. (Persentase) | 5,8              | 5,2  | 5,1                             |                     | 5      |                     | 4,9    |                     | 4,8    |                     | 4,7    |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               |                                                                                                                                 |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
| 1.02.03 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA                                               |                                                                                                                                 |                  |      |                                 | 9.752.199.33<br>3   |        | 9.770.649.44<br>1   |        | 9.947.243.32<br>1   |        | 10.334.695.5<br>64  |        | 9.825.999.76<br>1     |                                                          |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                    | 2030   |                   |                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU              |                                                          |
| (01)                                                                                                          | (02)                                                                                               | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)               | (13)   | (14)              | (15)                                                     |
| MANUSIA<br>KESEHATAN                                                                                          |                                                                                                    |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                   |                                                          |
| Meningkatnya<br>mutu dan<br>distribusi<br>tenaga<br>kesehatan                                                 | Persentase<br>Peningkatan<br>Kompetensi SDM<br>Bidang Kesehatan<br>(Persentase)                    | 22               | 22   | 25                              | 9.752.199.33<br>3 | 27     | 9.770.649.44<br>1 | 27     | 9.947.243.32<br>1 | 29     | 10.334.695.5<br>64 | 29     | 9.825.999.76<br>1 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               | Persentase<br>Puskesmas dengan<br>SDMK sesuai<br>standar (%)                                       | 0                | 10   | 11                              |                   | 50     |                   | 100    |                   | 100    |                    | 100    |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               | Persentase<br>Peningkatan<br>Kompetensi SDM<br>Bidang Kesehatan<br>(Persentase)                    | 69               | 69   | 69                              |                   | 76     |                   | 76     |                   | 84     |                    | 84     |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                                               |                                                                                                    |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
| 1.02.04 -<br>PROGRAM<br>SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT<br>KESEHATAN<br>DAN MAKANAN<br>MINUMAN                       |                                                                                                    |                  |      |                                 | 899.958.896       |        | 901.661.522       |        | 917.958.075       |        | 953.713.198        |        | 906.769.397       |                                                          |
| Meningkatnya<br>kualitas dan<br>distribusi<br>sediaan<br>farmasi, alat<br>kesehatan dan<br>makanan<br>minuman | Persentase<br>Cakupan Sediaan<br>Farmasi, Alat<br>Kesehatan dan<br>Makanan Minuman<br>(Persentase) | 80               | 80   | 85                              | 899.958.896       | 85     | 901.661.522       | 87,5   | 917.958.075       | 87,5   | 953.713.198        | 88     | 906.769.397       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
| 1.02.05 -<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N<br>MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN                                 |                                                                                                    |                  |      |                                 | 9.064.747.53<br>3 |        | 9.081.897.05<br>6 |        | 9.246.042.48<br>4 |        | 9.606.182.45<br>4  |        | 9.133.345.62<br>3 |                                                          |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat                                                        | Persentase<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan yang<br>Diberdayakan<br>(Persentase)                  | 85               | 85   | 85                              | 9.064.747.53<br>3 | 87     | 9.081.897.05<br>6 | 87     | 9.246.042.48<br>4 | 89     | 9.606.182.45<br>4  | 89     | 9.133.345.62<br>3 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB       |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      | 2026                            |                       | 2027   |                       | 2028   |                       | 2029   |                       | 2030   |                       |                                                          |                                                          |
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      | TARGET                          | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  |                                                          |                                                          |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                              | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                  | (07)   | (08)                  | (09)   | (10)                  | (11)   | (12)                  | (13)   | (14)                  | (15)                                                     |                                                          |
| bidang<br>kesehatan                                                                   |                                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |                                                          |                                                          |
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |                                                          | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
|                                                                                       | Persentase<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan yang<br>Diberdayakan<br>(Persentase) | 85               | 85   | 85                              |                       | 87     |                       | 87     |                       | 89     |                       | 89     |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       | Persentase<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan yang<br>Diberdayakan<br>(Persentase) | 85               | 85   | 87                              |                       | 87     |                       | 87     |                       | 89     |                       | 89     |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       | Persentase<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan yang<br>Diberdayakan<br>(Persentase) | 85               | 85   | 85                              |                       | 87     |                       | 87     |                       | 89     |                       | 89     |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       | Persentase<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan yang<br>Diberdayakan<br>(Persentase) | 85               | 85   | 85                              |                       | 87     |                       | 87     |                       | 89     |                       | 89     |                       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |                                                          |
|                                                                                       |                                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |                                                          | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kesehatan |
| 1.03 - URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N BIDANG<br>PEKERJAAN<br>UMUM DAN<br>PENATAAN<br>RUANG |                                                                                   |                  |      |                                 | 1.058.338.10<br>0.000 |        | 1.084.024.86<br>7.513 |        | 1.118.880.47<br>6.592 |        | 1.153.809.86<br>3.089 |        | 1.179.247.26<br>3.081 |                                                          |                                                          |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                       |                  |           | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                                           |
|                                                                                                                                            |                                                                                       |                  |           | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                                           |
| (01)                                                                                                                                       | (02)                                                                                  | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                                      |
| 1.03.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA                                                |                                                                                       |                  |           |                                 | 69.408.497.6<br>33  |        | 72.859.873.1<br>97  |        | 74.273.818.0<br>82  |        | 76.216.570.7<br>75  |        | 77.504.521.1<br>45  |                                                                                           |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintah                                                                             | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                       | 100              | 100       | 100                             | 44.949.827.6<br>33  | 100    | 46.183.934.9<br>97  | 100    | 47.474.558.9<br>43  | 100    | 48.641.157.4<br>82  | 100    | 49.765.827.0<br>72  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| Presentase<br>Pemenuhan<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah                                                                               | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                       | 100              | 15        | 16                              | 24.458.670.0<br>00  | 17     | 26.675.938.2<br>00  | 17     | 26.799.259.1<br>39  | 18     | 27.575.413.2<br>93  | 18     | 27.738.694.0<br>73  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| 1.03.02 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>AIR (SDA)                                                                            |                                                                                       |                  |           |                                 | 126.616.754.<br>898 |        | 141.551.700.<br>645 |        | 151.519.044.<br>580 |        | 153.006.344.<br>686 |        | 170.003.984.<br>037 |                                                                                           |
| Meningkatnya<br>Panjang<br>Tanggul Sungai,<br>Infrastruktur<br>Pengendali<br>banjir dan<br>Layanan Irigasi<br>Permukaan<br>yang Tertangani | Persentase<br>infrastruktur<br>Sungai dan saluran<br>pembuang<br>Terbangun (%)        | 9,98             | 7,02      | 10,72                           | 126.616.754.<br>898 | 14,42  | 141.551.700.<br>645 | 18,11  | 151.519.044.<br>580 | 21,81  | 153.006.344.<br>686 | 25,51  | 170.003.984.<br>037 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
|                                                                                                                                            | Jumlah luas<br>layanan irigasi yang<br>direhabilitasi dan<br>ditingkatkan<br>(Hektar) | 879,9            | 920,<br>4 | 950                             |                     | 976    |                     | 991    |                     | 1,006  |                     | 1,021  |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
|                                                                                                                                            |                                                                                       |                  |           |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                           |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                 |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030                                                                                      |                    |                                                                                           |
|                                                                                                  |                                                                                                 |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET                                                                                    | PAGU               |                                                                                           |
| (01)                                                                                             | (02)                                                                                            | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)                                                                                      | (14)               | (15)                                                                                      |
| 1.03.03 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN SISTEM<br>PENYEDIAAN<br>AIR MINUM |                                                                                                 |                  |           |                                 | 55.000.000.0<br>00 |        | 55.000.000.0<br>00 |        | 55.000.000.0<br>00 |        | 55.000.000.0<br>00 |                                                                                           | 55.000.000.0<br>00 |                                                                                           |
| Meningkatnya<br>Fasilitas Air<br>bersih bagi<br>masyarakat                                       | Cakupan Sarana<br>Air Bersih (%)                                                                | 62,48            | 64,9<br>8 | 67,48                           | 55.000.000.0<br>00 | 69,98  | 55.000.000.0<br>00 | 72,48  | 55.000.000.0<br>00 | 74,98  | 55.000.000.0<br>00 | 77,48                                                                                     | 55.000.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
|                                                                                                  | Persentase<br>Terpenuhinya<br>Pelayanan<br>Pendistribusian Air<br>Bersih Bagi<br>Masyarakat (%) | 100              | 100       | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |                    |                                                                                           |
|                                                                                                  |                                                                                                 |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |                    |                                                                                           |
| 1.03.05 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN SISTEM AIR<br>LIMBAH              |                                                                                                 |                  |           |                                 | 23.337.500.0<br>00 |        | 25.524.867.5<br>13 |        | 26.880.476.5<br>92 |        | 28.309.863.0<br>89 |                                                                                           | 30.247.263.0<br>81 |                                                                                           |
| Meningkatnya<br>sanitasi layak<br>dan aman                                                       | Persentase Sarana<br>Sanitasi yang<br>Dibangun (%)                                              | 98,89            | 99,0<br>1 | 99,12                           | 23.337.500.0<br>00 | 99,22  | 25.524.867.5<br>13 | 99,33  | 26.880.476.5<br>92 | 99,44  | 28.309.863.0<br>89 | 99,54                                                                                     | 30.247.263.0<br>81 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
|                                                                                                  | Persentase cakupan<br>layanan penyedotan<br>lumpur tinja (%)                                    | 0,521            | 1,06<br>3 | 1,695                           |                    | 2,417  |                    | 3,229  |                    | 4,132  |                    | 5,126                                                                                     |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan                      |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                               | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                    |                  |      | 2026                            |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                 | 2030   |                 |                                                                     |
|                                                                |                                                                    |                  |      | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            |                                                                     |
| (01)                                                           | (02)                                                               | (03)             | (04) | (05)                            | (06)            | (07)   | (08)            | (09)   | (10)            | (11)   | (12)            | (13)   | (14)            | (15)                                                                |
|                                                                |                                                                    |                  |      |                                 |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Penataan Ruang                                                      |
| 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |                                                                    |                  |      |                                 | 64.877.000.000  |        | 68.287.100.000  |        | 72.567.205.000  |        | 76.228.065.250  |        | 79.865.718.513  |                                                                     |
| Meningkatnya Drainase Jalan yang Tertangani                    | Persentase Drainase Jalan yang tertangani (%)                      | 4,18             | 7,99 | 11,87                           | 64.877.000.000  | 15,75  | 68.287.100.000  | 19,63  | 72.567.205.000  | 23,51  | 76.228.065.250  | 27,39  | 79.865.718.513  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                                                                |                                                                    |                  |      |                                 |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                     |                                                                    |                  |      |                                 | 331.288.330.000 |        | 333.913.091.800 |        | 339.017.980.861 |        | 342.400.195.707 |        | 345.098.347.352 |                                                                     |
| Meningkatnya kualitas bangunan gedung                          | Jumlah Bangunan Gedung yang Berkualitas sesuai Perencanaan (Angka) | 85               | 15   | 17                              | 331.288.330.000 | 17     | 333.913.091.800 | 17     | 339.017.980.861 | 17     | 342.400.195.707 | 17     | 345.098.347.352 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|                                                                |                                                                    |                  |      |                                 |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA          |                                                                    |                  |      |                                 | 15.960.000.000  |        | 16.160.000.000  |        | 16.989.000.000  |        | 17.656.755.000  |        | 18.354.558.975  |                                                                     |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                    |                  |      | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                                           |
|                                                                        |                                                                                                    |                  |      | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                                           |
| (01)                                                                   | (02)                                                                                               | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                                      |
| Meningkatnya<br>bangunan dan<br>lingkungan<br>yang tertata             | Persentase<br>Penataan<br>Bangunan dan<br>Lingkungan yang<br>terselenggara (%)                     | 100              | 11   | 17                              | 15.960.000.0<br>00  | 17     | 16.160.000.0<br>00  | 18     | 16.989.000.0<br>00  | 18     | 17.656.755.0<br>00  | 19     | 18.354.558.9<br>75  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
|                                                                        |                                                                                                    |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| 1.03.10 -<br>PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN JALAN                      |                                                                                                    |                  |      |                                 | 363.556.417.<br>469 |        | 363.977.264.<br>358 |        | 378.439.191.<br>477 |        | 402.124.432.<br>582 |        | 400.364.470.<br>378 |                                                                                           |
| Meningkatnya<br>aksesibilitas<br>masyarakat<br>yang nyaman<br>dan aman | Persentase<br>Preservasi Jalan<br>Kabupaten<br>Tertangani (%)                                      | 4,67             | 6,13 | 16,63                           | 363.556.417.<br>469 | 27,13  | 363.977.264.<br>358 | 37,63  | 378.439.191.<br>477 | 48,13  | 402.124.432.<br>582 | 58,63  | 400.364.470.<br>378 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
|                                                                        |                                                                                                    |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| 1.03.11 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN JASA<br>KONSTRUKSI            |                                                                                                    |                  |      |                                 | 156.600.000         |        | 170.970.000         |        | 188.760.000         |        | 207.636.000         |        | 228.399.600         |                                                                                           |
| Meningkatnya<br>Kompetensi<br>Tenaga<br>Kosntruksi                     | Jumlah tenaga<br>kerja konstruksi<br>kualifikasi ahli<br>terlatih dan<br>tersertifikasi<br>(Orang) | 0                | 0    | 16                              | 156.600.000         | 18     | 170.970.000         | 20     | 188.760.000         | 22     | 207.636.000         | 24     | 228.399.600         | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang |
| 1.03.12 -<br>PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN                            |                                                                                                    |                  |      |                                 | 8.137.000.00<br>0   |        | 6.580.000.00<br>0   |        | 4.005.000.00<br>0   |        | 2.660.000.00<br>0   |        | 2.580.000.00<br>0   |                                                                                           |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                    | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                         |                  |      | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                                               |
|                                                                                              |                                                                                                         |                  |      | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                                               |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                    | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                                          |
| PENATAAN<br>RUANG                                                                            |                                                                                                         |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |                                                                                               |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>penyelenggaraa<br>n penataan<br>ruang                            | Ketaatan Terhadap<br>RTRW (%)                                                                           | 100              | 17   | 28                              | 8.137.000.00<br>0   | 23     | 6.580.000.00<br>0   | 14     | 4.005.000.00<br>0   | 9      | 2.660.000.00<br>0   | 9      | 2.580.000.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pekerjaan<br>Umum dan<br>Penataan<br>Ruang     |
| 1.04 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>PERUMAHAN<br>DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN           |                                                                                                         |                  |      |                                 | 151.270.448.<br>888 |        | 164.099.130.<br>247 |        | 170.429.893.<br>261 |        | 176.320.944.<br>427 |        | 181.671.428.<br>202 |                                                                                               |
| 1.04.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                         |                  |      |                                 | 20.615.154.2<br>43  |        | 21.645.911.9<br>55  |        | 22.728.207.5<br>52  |        | 23.864.617.9<br>30  |        | 25.057.848.8<br>27  |                                                                                               |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                         | 100              | 100  | 100                             | 20.615.154.2<br>43  | 100    | 21.645.911.9<br>55  | 100    | 22.728.207.5<br>52  | 100    | 23.864.617.9<br>30  | 100    | 25.057.848.8<br>27  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
|                                                                                              |                                                                                                         |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
| 1.04.02 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN<br>PERUMAHAN                                        |                                                                                                         |                  |      |                                 | 1.975.569.85<br>0   |        | 2.569.348.34<br>3   |        | 2.692.815.76<br>0   |        | 3.322.456.54<br>8   |        | 3.488.579.37<br>5   |                                                                                               |
| Terpenuhinya<br>rumah layak<br>huni bagi warga<br>negara korban<br>bencana                   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pembinaan<br>Pengelolaan<br>Penyelenggaraan.<br>pendataan dan<br>Perencanaan | 100              | 100  | 100                             | 1.975.569.85<br>0   | 100    | 2.569.348.34<br>3   | 100    | 2.692.815.76<br>0   | 100    | 3.322.456.54<br>8   | 100    | 3.488.579.37<br>5   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                               |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                             |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030                                                                                          |                     |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                                             |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET                                                                                        | PAGU                |                                                                                               |
| (01)                                                                                      | (02)                                                                        | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)                                                                                          | (14)                | (15)                                                                                          |
|                                                                                           | Perumahan. rumah<br>susun dan<br>Apartemen (%)                              |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                               |                     | Permukim<br>an                                                                                |
|                                                                                           | Persentase<br>Pemenuhan<br>Rehabilitasi Rumah<br>bagi Korban<br>Bencana (%) | 100              | 100       | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |                     |                                                                                               |
|                                                                                           |                                                                             |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |                     |                                                                                               |
| 1.04.03 -<br>PROGRAM<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN                                             |                                                                             |                  |           |                                 | 44.625.000.0<br>00 |        | 46.750.000.0<br>00 |        | 48.875.000.0<br>00 |        | 51.000.000.0<br>00 |                                                                                               | 53.125.000.0<br>00  |                                                                                               |
| Meningkatnya<br>hunian layak<br>yang ter huni                                             | Cakupan<br>Ketersediaan<br>Rumah Layak Huni<br>(%)                          | 97,11            | 97,2<br>2 | 97,33                           | 44.625.000.0<br>00 | 97,44  | 46.750.000.0<br>00 | 97,55  | 48.875.000.0<br>00 | 97,65  | 51.000.000.0<br>00 | 97,76                                                                                         | 53.125.000.0<br>00  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
|                                                                                           |                                                                             |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                               |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
| 1.04.05 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PRASARANA,<br>SARANA DAN<br>UTILITAS<br>UMUM (PSU) |                                                                             |                  |           |                                 | 84.054.724.7<br>95 |        | 93.133.869.9<br>49 |        | 96.133.869.9<br>49 |        | 98.133.869.9<br>49 |                                                                                               | 100.000.000.<br>000 |                                                                                               |
| Meningkatnya<br>Prasarana<br>sarana utilitas                                              | Persentase PSU<br>dalam Asset (%)                                           | 47,05            | 50,0<br>8 | 53,1                            | 84.054.724.7<br>95 | 56,13  | 93.133.869.9<br>49 | 59,15  | 96.133.869.9<br>49 | 62,18  | 98.133.869.9<br>49 | 65,2                                                                                          | 100.000.000.<br>000 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang                                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                 |        |                |        |                 |        |                 | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                              |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                 | 2028   |                | 2029   |                 | 2030   |                 |                                                    |     |                                                                                               |
|                                                                                                  |                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            |                                                    |     |                                                                                               |
| (01)                                                                                             | (02)                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)            | (09)   | (10)           | (11)   | (12)            | (13)   | (14)            | (15)                                               |     |                                                                                               |
| perumahan dan permukiman                                                                         |                                                              |                  |      |                                 |                |        |                 |        |                |        |                 |        |                 | Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an     |     |                                                                                               |
|                                                                                                  | Presentase Peningkatan Kualitas Permukiman Yang dibangun (%) | 99,17            | 100  | 100                             |                |        |                 | 100    |                |        |                 | 100    |                 |                                                    | 100 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
|                                                                                                  | Persentase Sarana dan Prasarana TPU yang terbangun (%)       | 100              | 100  | 100                             |                |        |                 | 100    |                |        |                 | 100    |                 |                                                    | 100 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
|                                                                                                  | Persentase sarana dan prasarana TPU yang terpelihara (%)     | 100              | 100  | 100                             |                |        |                 | 100    |                |        |                 | 100    |                 |                                                    | 100 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
|                                                                                                  |                                                              |                  |      |                                 |                |        |                 |        |                |        |                 |        |                 |                                                    |     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perumaha<br>n dan<br>Kawasan<br>Permukim<br>an |
| 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                              |                  |      |                                 | 94.674.994.715 |        | 101.285.572.775 |        | 99.834.538.093 |        | 102.071.727.543 |        | 101.740.446.730 |                                                    |     |                                                                                               |
| 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG                                                                      |                                                              |                  |      |                                 | 65.387.744.715 |        | 64.632.322.775  |        | 67.236.288.093 |        | 65.152.477.543  |        | 65.721.196.730  |                                                    |     |                                                                                               |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                     |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                   |
|                                                                                          |                                                     |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                   |
| (01)                                                                                     | (02)                                                | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                                                              |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                          |                                                     |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                                   |
| Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%) | 100              | 100  | 100                             | 33.000.000.000 | 100    | 33.000.000.000 | 100    | 33.000.000.000 | 100    | 33.000.000.000 | 100    | 33.000.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
| Meningkatnya pemenuhan penunjan urusan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja           | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%) | 100              | 100  | 100                             | 32.387.744.715 | 100    | 31.632.322.775 | 100    | 34.236.288.093 | 100    | 32.152.477.543 | 100    | 32.721.196.730 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                           |                                                     |                  |      |                                 | 9.847.250.000  |        | 16.053.250.000 |        | 9.863.250.000  |        | 12.069.250.000 |        | 12.069.250.000 |                                                                                                   |
| Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada                             | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)    | 100              | 100  | 100                             | 1.100.000.000  | 100    | 1.100.000.000  | 100    | 1.100.000.000  | 100    | 1.100.000.000  | 100    | 1.100.000.000  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
| Meningkatnya Penanganan Gangguan                                                         | Persentase Penyelenggaraan                          | 100              | 100  | 100                             | 6.071.250.000  | 100    | 6.071.250.000  | 100    | 6.071.250.000  | 100    | 6.071.250.000  | 100    | 6.071.250.000  | Dinas/Badan yang menangani                                                                        |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                       |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                                        |
|                                                        |                                                                       |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                                        |
| (01)                                                   | (02)                                                                  | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                                                                   |
| Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                  | Tibumtranmas<br>(Persentase)                                          |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Bidang<br>Ketentera<br>man dan<br>Ketertiban<br>Umum,<br>serta<br>Perlindung<br>an Masyaraka<br>t                                      |
|                                                        | Persentase<br>gangguan<br>Trantibum yang<br>dapat diselesaikan<br>(%) | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Ketentera<br>man dan<br>Ketertiban<br>Umum,<br>serta<br>Perlindung<br>an Masyaraka<br>t |
| Meningkatnya<br>Perlindungan<br>Terhadap<br>Masyarakat | Persentase<br>Cakupan<br>Perlindungan<br>Masyarakat<br>(Persentase)   | 100              | 100  | 100                             | 1.176.000.00<br>0 | 100    | 7.382.000.00<br>0 | 100    | 1.192.000.00<br>0 | 100    | 3.398.000.00<br>0 | 100    | 3.398.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Ketentera<br>man dan<br>Ketertiban<br>Umum,<br>serta<br>Perlindung<br>an Masyaraka<br>t |
| Meningkatnya<br>Kapasitas SDM<br>PPNS                  | Persentase PPNS<br>yang Ditingkatkan<br>Kompetensinya<br>(Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 1.500.000.00<br>0 | 100    | 1.500.000.00<br>0 | 100    | 1.500.000.00<br>0 | 100    | 1.500.000.00<br>0 | 100    | 1.500.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Ketentera<br>man dan<br>Ketertiban<br>Umum,<br>serta<br>Perlindung<br>an Masyaraka<br>t |
| 1.05.03 -<br>PROGRAM<br>PENANGGULAN<br>GAN BENCANA     |                                                                       |                  |      |                                 | 2.940.000.00<br>0 |        | 3.100.000.00<br>0 |        | 3.235.000.00<br>0 |        | 4.350.000.00<br>0 |        | 3.450.000.00<br>0 |                                                                                                                                        |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                      |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                      |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                   |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                                                 | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                                                              |
| Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)                                       | 50               | 50   | 50                              | 1.250.000.000  | 50     | 1.405.000.000  | 50     | 1.525.000.000  | 50     | 1.640.000.000  | 50     | 1.740.000.000  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
|                                                                             | Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Persentase) | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat                   | Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)                                                                    | 100              | 100  | 100                             | 1.000.000.000  | 100    | 1.000.000.000  | 100    | 1.000.000.000  | 100    | 2.000.000.000  | 100    | 1.000.000.000  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana                     | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)                                                                     | 100              | 100  | 100                             | 690.000.000    | 100    | 695.000.000    | 100    | 710.000.000    | 100    | 710.000.000    | 100    | 710.000.000    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat |
| 1.05.04 - PROGRAM                                                           |                                                                                                                      |                  |      |                                 | 16.500.000.000 |        | 17.500.000.000 |        | 19.500.000.000 |        | 20.500.000.000 |        | 20.500.000.000 |                                                                                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                                                                        |
|                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                                                                        |
| (01)                                                                                                         | (02)                                                                                 | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                                                                   |
| PENCEGAHAN,<br>PENANGGULAN<br>GAN,<br>PENYELAMATA<br>N KEBAKARAN<br>DAN<br>PENYELAMATA<br>N NON<br>KEBAKARAN |                                                                                      |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                                                                        |
| Meningkatnya<br>layanan<br>pencegahan<br>kebakaran                                                           | Cakupan<br>Penyebaran<br>Informasi dan<br>Edukasi Rawan<br>Kebakaran<br>(Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 1.000.000.00<br>0  | 100    | 1.000.000.00<br>0  | 100    | 2.000.000.00<br>0  | 100    | 1.000.000.00<br>0  | 100    | 1.000.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Ketentera<br>man dan<br>Ketertiban<br>Umum,<br>serta<br>Perlindung<br>an Masyaraka<br>t |
| Meningkatkan<br>pelayanan<br>penyelamatan<br>dan evakuasi<br>korban<br>kebakaran                             | Cakupan Layanan<br>Penyelamatan dan<br>Evakuasi Korban<br>Kebakaran<br>(Persentase)  | 100              | 100  | 100                             | 15.500.000.0<br>00 | 100    | 16.500.000.0<br>00 | 100    | 17.500.000.0<br>00 | 100    | 19.500.000.0<br>00 | 100    | 19.500.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Ketentera<br>man dan<br>Ketertiban<br>Umum,<br>serta<br>Perlindung<br>an Masyaraka<br>t |
| 1.06 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>SOSIAL                                                           |                                                                                      |                  |      |                                 | 78.027.627.3<br>20 |        | 89.938.027.0<br>00 |        | 91.449.499.0<br>00 |        | 92.197.999.0<br>00 |        | 92.609.999.0<br>00 |                                                                                                                                        |
| 1.06.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA                 |                                                                                      |                  |      |                                 | 17.298.000.0<br>00 |        | 17.323.500.0<br>00 |        | 17.932.500.0<br>00 |        | 18.508.000.0<br>00 |        | 18.508.000.0<br>00 |                                                                                                                                        |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                                | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                      | 100              | 100  | 100                             | 17.298.000.0<br>00 | 100    | 17.323.500.0<br>00 | 100    | 17.932.500.0<br>00 | 100    | 18.508.000.0<br>00 | 100    | 18.508.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial                                                                                  |
| 1.06.02 -<br>PROGRAM                                                                                         |                                                                                      |                  |      |                                 | 3.836.999.00<br>0  |        | 3.901.999.00<br>0  |        | 3.901.999.00<br>0  |        | 3.904.999.00<br>0  |        | 3.914.999.00<br>0  |                                                                                                                                        |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                       |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                            |                  |            | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                                  |                   |                                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                            |                  |            | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                                | PAGU              |                                                       |
| (01)                                                                                             | (02)                                                                                                                                       | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                                  | (14)              | (15)                                                  |
| PEMBERDAYAA<br>N SOSIAL                                                                          |                                                                                                                                            |                  |            |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                       |                   |                                                       |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan<br>sosial                                                           | Persentase SDM<br>Kesejahteraan<br>Sosial yang<br>Meningkat<br>Kompetensinya<br>dalam Pelayanan<br>Sosial (%)                              | 49,14            | 79,4<br>0  | 83,71                           | 3.836.999.00<br>0 | 88,88  | 3.901.999.00<br>0 | 88,88  | 3.901.999.00<br>0 | 88,88  | 3.904.999.00<br>0 | 89,74                                                 | 3.914.999.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
| 1.06.03 -<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>WARGA<br>NEGARA<br>MIGRAN<br>KORBAN<br>TINDAK<br>KEKERASAN |                                                                                                                                            |                  |            |                                 | 10.000.000        |        | 10.000.000        |        | 10.000.000        |        | 10.000.000        |                                                       | 10.000.000        |                                                       |
| Meningkatnya<br>layanan<br>penanganan<br>warga negara<br>migran korban<br>tindak<br>kekerasan    | Persentase Warga<br>Negara Migran<br>Korban Tindak<br>Kekerasan yang<br>Tertangani<br>(Persentase)                                         | 100              | 100        | 100                             | 10.000.000        | 100    | 10.000.000        | 100    | 10.000.000        | 100    | 10.000.000        | 100                                                   | 10.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
| 1.06.04 -<br>PROGRAM<br>REHABILITASI<br>SOSIAL                                                   |                                                                                                                                            |                  |            |                                 | 2.740.000.00<br>0 |        | 3.210.000.00<br>0 |        | 3.695.000.00<br>0 |        | 3.865.000.00<br>0 |                                                       | 4.215.000.00<br>0 |                                                       |
| Meningkatnya<br>rehabilitasi<br>sosial                                                           | Persentase Anak<br>Terlantar yang<br>Terpenuhi<br>Kebutuhan<br>Dasarnya (%)                                                                | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 2.090.000.00<br>0 | 100,00 | 2.560.000.00<br>0 | 100,00 | 2.995.000.00<br>0 | 100,00 | 3.165.000.00<br>0 | 100,00                                                | 3.515.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
|                                                                                                  | Persentase<br>Gelandangan dan<br>Pengemis yang<br>Terpenuhi<br>Kebutuhan<br>Dasarnya (%)                                                   | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          |                   | 100,00 |                   | 100,00 |                   | 100,00 |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |                   |                                                       |
|                                                                                                  | Persentase Lanjut<br>Usia Terlantar yang<br>Terpenuhi<br>Kebutuhan<br>Dasarnya (%)                                                         | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          |                   | 100,00 |                   | 100,00 |                   | 100,00 |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |                   |                                                       |
|                                                                                                  | Persentase Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan<br>Sosial di luar<br>HIV/AIDS dan<br>NAPZA yang<br>terpenuhi<br>kebutuhan<br>Dasarnya (%) | 5,28             | 13,2<br>1  | 18,19                           |                   | 23,36  |                   | 28,72  |                   | 34,26  |                   | 39,81                                                 |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                       |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                |                  |            | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030                                                  |                    |                                                       |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                |                  |            | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET                                                | PAGU               |                                                       |
| (01)                                                              | (02)                                                                                                                                                                           | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)                                                  | (14)               | (15)                                                  |
|                                                                   | Persentase<br>Penyandang<br>Disabilitas<br>Terlantar yang<br>Terpenuhi<br>Kebutuhan<br>Dasarnya (%)                                                                            | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          |                    | 100,00 |                    | 100,00 |                    | 100,00 |                    | 100,00                                                |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
| Meningkatnya<br>Layanan<br>Rehabilitasi<br>UPTD PMKS              | Persentase<br>Pemenuhan<br>Pelayanan UPT<br>Rehabilitasi PMKS<br>(%)                                                                                                           | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 650.000.000        | 100,00 | 650.000.000        | 100,00 | 700.000.000        | 100,00 | 700.000.000        | 100,00                                                | 700.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
| 1.06.05 -<br>PROGRAM<br>PERLINDUNGA<br>N DAN<br>JAMINAN<br>SOSIAL |                                                                                                                                                                                |                  |            |                                 | 52.947.463.9<br>20 |        | 64.200.000.0<br>00 |        | 64.500.000.0<br>00 |        | 64.500.000.0<br>00 |                                                       | 64.500.000.0<br>00 |                                                       |
| Meningkatnya<br>perlindungan<br>dan jaminan<br>sosial             | Persentase Daerah<br>Yang Melaksanakan<br>Pengelolaan dan<br>Pendataan Data<br>Fakir Miskin (%)                                                                                | 16,6             | 27,1<br>7  | 37,74                           | 52.947.463.9<br>20 | 48,31  | 64.200.000.0<br>00 | 58,88  | 64.500.000.0<br>00 | 69,45  | 64.500.000.0<br>00 | 69,45                                                 | 64.500.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
|                                                                   | Persentase<br>Pemenuhan Anak-<br>anak yang<br>Dijangkau dan<br>Dipelihara (%)                                                                                                  | 0                | 0          | 100,00                          |                    | 100,00 |                    | 100,00 |                    | 100,00 |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |                    |                                                       |
|                                                                   | Persentase<br>Penerima Manfaat<br>yang Terpenuhi<br>Kebutuhan Dasar<br>(Persentase)                                                                                            | 52,16            | 53,5<br>7  | 55,72                           |                    | 59,15  |                    | 59,15  |                    | 60,86  |                    | 60,86                                                 |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
| 1.06.06 -<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA                     |                                                                                                                                                                                |                  |            |                                 | 877.528.000        |        | 917.528.000        |        | 1.000.000.00<br>0  |        | 1.000.000.00<br>0  |                                                       | 1.000.000.00<br>0  | v                                                     |
| Meningkatnya<br>perlindungan<br>sosial korban<br>bencana          | Persentase korban<br>bencana alam dan<br>sosial yang<br>terpenuhi<br>kebutuhan<br>dasarnya pada saat<br>dan setelah tanggap<br>darurat bencana<br>daerah<br>kabupaten/kota (%) | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 877.528.000        | 100,00 | 917.528.000        | 100,00 | 1.000.000.00<br>0  | 100,00 | 1.000.000.00<br>0  | 100,00                                                | 1.000.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sosial |
| 1.06.07 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TAMAN MAKAM<br>PAHLAWAN    |                                                                                                                                                                                |                  |            |                                 | 317.636.400        |        | 375.000.000        |        | 410.000.000        |        | 410.000.000        |                                                       | 462.000.000        |                                                       |
| Meningkatnya<br>tata kelola                                       | Persentase Taman<br>Makam Pahlawan                                                                                                                                             | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 317.636.400        | 100,00 | 375.000.000        | 100,00 | 410.000.000        | 100,00 | 410.000.000        | 100,00                                                | 462.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang                                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                       |                                                                                |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                  | (02)                                                                           | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| taman makam pahlawan                                                  | Nasional yang terkelola dengan Baik (%)                                        |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | menangani Bidang Sosial                            |
| 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                        |                                                                                |                  |      |                                 | 57.415.299.169 |        | 62.248.847.050 |        | 66.017.154.148 |        | 69.941.086.393 |        | 72.534.076.177 |                                                    |
| 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                |                  |      |                                 | 20.418.137.514 |        | 20.274.751.724 |        | 20.428.326.093 |        | 20.274.751.724 |        | 20.439.533.530 |                                                    |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah                     | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)                            | 100              | 100  | 100                             | 20.418.137.514 | 100    | 20.274.751.724 | 100    | 20.428.326.093 | 100    | 20.274.751.724 | 100    | 20.439.533.530 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja     |
| 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                            |                                                                                |                  |      |                                 | 13.771.739.080 |        | 16.407.186.000 |        | 17.173.186.000 |        | 18.313.186.000 |        | 19.803.186.000 |                                                    |
| Terkelolanya informasi tenaga kerja                                   | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%) | 100              | 100  | 100                             | 13.771.739.080 | 100    | 16.407.186.000 | 100    | 17.173.186.000 | 100    | 18.313.186.000 | 100    | 19.803.186.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja     |
| 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA      |                                                                                |                  |      |                                 | 16.407.186.000 |        | 18.003.931.000 |        | 20.103.931.000 |        | 22.203.931.000 |        | 22.203.931.000 |                                                    |
| Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja                               | Presentase Lulusan Pelatihan Yang Kompeten (%)                                 | 94,8             | 75   | 77,78                           | 16.407.186.000 | 80     | 18.003.931.000 | 82,5   | 20.103.931.000 | 85     | 22.203.931.000 | 87,5   | 22.203.931.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja     |
|                                                                       | Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) Yang terakreditasi (%)                | 14,5             | 17   | 20                              |                | 23     |                | 26     |                | 29     |                | 32     |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja     |
|                                                                       |                                                                                |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                              | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                   |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                                              |
|                                                                                                       |                                                                                   |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                                              |
| (01)                                                                                                  | (02)                                                                              | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                                         |
|                                                                                                       |                                                                                   |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Tenaga<br>Kerja                                                                                              |
| 2.07.04 -<br>PROGRAM<br>PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                                    |                                                                                   |                  |           |                                 | 3.687.730.89<br>5  |        | 3.962.896.79<br>4  |        | 4.171.617.29<br>3  |        | 4.388.109.84<br>3  |        | 4.612.151.64<br>7  |                                                                                                              |
| Meningkatkan<br>penempatan<br>tenaga kerja                                                            | Persentase Tenaga<br>Kerja yang<br>Ditempatkan di<br>Dalam Negeri<br>(Persentase) | 75,76            | 76,7<br>6 | 78,76                           | 3.687.730.89<br>5  | 79,76  | 3.962.896.79<br>4  | 80,76  | 4.171.617.29<br>3  | 81,76  | 4.388.109.84<br>3  | 82,76  | 4.612.151.64<br>7  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Tenaga<br>Kerja                                               |
| 2.07.05 -<br>PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL                                                        |                                                                                   |                  |           |                                 | 3.130.505.68<br>0  |        | 3.600.081.53<br>2  |        | 4.140.093.76<br>2  |        | 4.761.107.82<br>6  |        | 5.475.274.00<br>0  |                                                                                                              |
| Meningkatnya<br>pekerja<br>Indonesia yang<br>terlindungi                                              | Presentase Angka<br>sengketa<br>pengusaha dan<br>pekerja (%)                      | 2,6              | 2,6       | 2,4                             | 3.130.505.68<br>0  | 2,3    | 3.600.081.53<br>2  | 2,2    | 4.140.093.76<br>2  | 2,1    | 4.761.107.82<br>6  | 2      | 5.475.274.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Tenaga<br>Kerja                                               |
| 2.08 - URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N BIDANG<br>PEMBERDAYAA<br>N PEREMPUAN<br>DAN<br>PERLINDUNGA<br>N ANAK |                                                                                   |                  |           |                                 | 21.413.000.0<br>00 |        | 22.470.000.0<br>00 |        | 22.925.000.0<br>00 |        | 23.450.000.0<br>00 |        | 23.725.000.0<br>00 |                                                                                                              |
| 2.08.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA           |                                                                                   |                  |           |                                 | 15.548.000.0<br>00 |        | 16.570.000.0<br>00 |        | 17.000.000.0<br>00 |        | 17.500.000.0<br>00 |        | 17.750.000.0<br>00 |                                                                                                              |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah                                            | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                   | 100              | 100       | 100                             | 15.548.000.0<br>00 | 100    | 16.570.000.0<br>00 | 100    | 17.000.000.0<br>00 | 100    | 17.500.000.0<br>00 | 100    | 17.750.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
|                                                                                                       |                                                                                   |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan                                              |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                              |
| (01)                                                                                                                                                 | (02)                                                                                                       | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                                         |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak                                                                    |
| 2.08.02 -<br>PROGRAM<br>PENGARUSUTA<br>MAAN GENDER<br>DAN<br>PEMBERDAYAA<br>N PEREMPUAN                                                              |                                                                                                            |                  |      |                                 | 1.200.000.00<br>0 |        | 1.200.000.00<br>0 |        | 1.200.000.00<br>0 |        | 1.200.000.00<br>0 |        | 1.200.000.00<br>0 |                                                                                                              |
| Meningkatnya<br>Kualitas dan<br>Efektivitas<br>Penyelenggaraa<br>n PUG dan<br>Peran<br>Perempuan<br>dalam<br>Pembangunan                             | Persentase<br>Anggaran Responsif<br>Gender (ARG)<br>(Persentase)                                           | 53               | 53   | 53,25                           | 1.200.000.00<br>0 | 53,5   | 1.200.000.00<br>0 | 53,75  | 1.200.000.00<br>0 | 54     | 1.200.000.00<br>0 | 54     | 1.200.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
| 2.08.03 -<br>PROGRAM<br>PERLINDUNGA<br>N PEREMPUAN                                                                                                   |                                                                                                            |                  |      |                                 | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |                                                                                                              |
| Menurunnya<br>Kekerasan<br>terhadap<br>Perempuan                                                                                                     | Persentase<br>Perempuan Korban<br>Kekerasan dan<br>TPPO yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Komprehensif (%) | 100              | 100  | 100                             | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
| 2.08.04 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA                                                                                          |                                                                                                            |                  |      |                                 | 565.000.000       |        | 600.000.000       |        | 625.000.000       |        | 650.000.000       |        | 675.000.000       |                                                                                                              |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>keluarga dalam<br>mendukung<br>kesetaraan<br>gender,<br>pemenuhan<br>hak, serta<br>perlindungan<br>perempuan dan<br>anak | Pembelajaran<br>Keluarga (Puspaga)<br>yang Berperspektif<br>Gender dan Hak<br>Anak Sesuai<br>(Indeks)      | 298              | 298  | 299                             | 565.000.000       | 300    | 600.000.000       | 310    | 625.000.000       | 325    | 650.000.000       | 325    | 675.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
| 2.08.05 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN                                                                                                                  |                                                                                                            |                  |      |                                 | 100.000.000       |        | 100.000.000       |        | 100.000.000       |        | 100.000.000       |        | 100.000.000       |                                                                                                              |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                                              |
| (01)                                                                                                                                                                     | (02)                                                                                   | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                                         |
| SISTEM DATA<br>GENDER DAN<br>ANAK                                                                                                                                        |                                                                                        |                  |      |                                 |                   |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                                              |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan<br>data gender dan<br>anak                                                                                                                   | Tingkat<br>Pemanfaatan Data<br>Gender dan Anak<br>dalam Perencanaan<br>(Persentase)    | 100              | 100  | 100                             | 100.000.000       | 100    | 100.000.000        | 100    | 100.000.000        | 100    | 100.000.000        | 100    | 100.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
| 2.08.06 -<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>HAK ANAK<br>(PHA)                                                                                                                   |                                                                                        |                  |      |                                 | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0  |        | 1.000.000.00<br>0  |        | 1.000.000.00<br>0  |        | 1.000.000.00<br>0  |                                                                                                              |
| Terjaminnya<br>Pemenuhan<br>Hak Semua<br>Anak secara<br>Komprehensif                                                                                                     | Indeks Pemenuhan<br>Hak Anak (IPHA)<br>(Indeks)                                        | 60,17            | 60,2 | 60,26                           | 1.000.000.00<br>0 | 60,31  | 1.000.000.00<br>0  | 60,37  | 1.000.000.00<br>0  | 60,42  | 1.000.000.00<br>0  | 60,42  | 1.000.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
| 2.08.07 -<br>PROGRAM<br>PERLINDUNGA<br>N KHUSUS<br>ANAK                                                                                                                  |                                                                                        |                  |      |                                 | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0  |        | 2.000.000.00<br>0  |        | 2.000.000.00<br>0  |        | 2.000.000.00<br>0  |                                                                                                              |
| Meningkatnya<br>Pencegahan<br>dan<br>Penanganan<br>Tindak<br>Kekerasan,<br>Eksplotasi,<br>Penelantaran,<br>Perkawinan dan<br>Perlakuan<br>Salah Lainnya<br>terhadap Anak | Persentase anak<br>korban kekerasan<br>yang mendapatkan<br>layanan<br>komprehensif (%) | 100              | 100  | 100                             | 2.000.000.00<br>0 | 100    | 2.000.000.00<br>0  | 100    | 2.000.000.00<br>0  | 100    | 2.000.000.00<br>0  | 100    | 2.000.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Perempuan<br>dan<br>Perlindung<br>an Anak |
| 2.09 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>PANGAN                                                                                                                       |                                                                                        |                  |      |                                 | 9.860.000.00<br>0 |        | 10.053.000.0<br>00 |        | 10.255.650.0<br>00 |        | 10.468.432.5<br>00 |        | 10.691.854.1<br>25 |                                                                                                              |
| 2.09.02 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA<br>EKONOMI                                                                                                            |                                                                                        |                  |      |                                 | 1.300.000.00<br>0 |        | 1.365.000.00<br>0  |        | 1.433.250.00<br>0  |        | 1.504.912.50<br>0  |        | 1.580.158.12<br>5  |                                                                                                              |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                       |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                           |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                                  |                   |                                                       |
|                                                                                                        |                                                                                           |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                                | PAGU              |                                                       |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                                                      | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                                  | (14)              | (15)                                                  |
| UNTUK<br>KEDAULATAN<br>dan<br>KEMANDIRIAN<br>PANGAN                                                    |                                                                                           |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                       |                   |                                                       |
| Meningkatnya<br>pengelolaan<br>sumber daya<br>ekonomi untuk<br>kedaulatan dan<br>kemandirian<br>pangan | Persentase<br>Lumbung Pangan<br>yang Aktif<br>(Persentase)                                | 39,47            | 67,3<br>4 | 70                              | 1.300.000.00<br>0 | 72,66  | 1.365.000.00<br>0 | 75,32  | 1.433.250.00<br>0 | 77,98  | 1.504.912.50<br>0 | 80,64                                                 | 1.580.158.12<br>5 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan |
| 2.09.03 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI<br>DAN<br>KETAHANAN<br>PANGAN<br>MASYARAKAT       |                                                                                           |                  |           |                                 | 5.950.000.00<br>0 |        | 6.047.500.00<br>0 |        | 6.149.875.00<br>0 |        | 6.257.368.75<br>0 |                                                       | 6.370.237.18<br>8 |                                                       |
| Meningkatnya<br>diversifikasi<br>dan ketahanan<br>pangan<br>masyarakat                                 | Jumlah Desa<br>Mandiri Pangan<br>yang terbentuk<br>(Angka)                                | 3                | 5         | 5                               | 5.950.000.00<br>0 | 5      | 6.047.500.00<br>0 | 5      | 6.149.875.00<br>0 | 5      | 6.257.368.75<br>0 | 5                                                     | 6.370.237.18<br>8 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan |
|                                                                                                        | Persentase<br>Cadangan Pangan<br>(Persentase)                                             | 95,68            | 100       | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan |                   |                                                       |
|                                                                                                        | Skor Pola Pangan<br>Harapan (PPH)<br>(Skor)                                               | 0                | 85,5      | 86                              |                   | 87     |                   | 88     |                   | 89     |                   | 90                                                    |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan |
| 2.09.04 -<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>KERAWANAN<br>PANGAN                                              |                                                                                           |                  |           |                                 | 2.445.000.00<br>0 |        | 2.467.250.00<br>0 |        | 2.490.612.50<br>0 |        | 2.515.143.12<br>5 |                                                       | 2.540.900.28<br>1 |                                                       |
| Meningkatnya<br>penanganan<br>kerawanan<br>pangan                                                      | Persentase Desa<br>Rentan Rawan<br>Pangan Yang<br>Tertangani<br>(Persentase)              | 50,91            | 83,6<br>3 | 85,2                            | 2.445.000.00<br>0 | 86,77  | 2.467.250.00<br>0 | 88,34  | 2.490.612.50<br>0 | 89,91  | 2.515.143.12<br>5 | 91,48                                                 | 2.540.900.28<br>1 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan |
|                                                                                                        | Persentase jumlah<br>desa rentan rawan<br>pangan<br>berdasarkan peta<br>FSVA (Persentase) | 38               | 35        | 33                              |                   | 31     |                   | 29     |                   | 27     |                   | 25                                                    |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan |
| 2.09.05 -<br>PROGRAM<br>PENGAWASAN                                                                     |                                                                                           |                  |           |                                 | 165.000.000       |        | 173.250.000       |        | 181.912.500       |        | 191.008.125       |                                                       | 200.558.531       |                                                       |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                        |                  |           | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                     |
|                                                                                             |                                                                                                        |                  |           | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                     |
| (01)                                                                                        | (02)                                                                                                   | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                |
| KEAMANAN<br>PANGAN                                                                          |                                                                                                        |                  |           |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |                                                                     |
| Meningkatnya<br>pengawasan<br>mutu dan<br>keamanan<br>pangan                                | Pengawasan dan<br>Pembinaan<br>Keamanan Pangan<br>(Persentase)                                         | 0                | 30        | 35                              | 165.000.000         | 40     | 173.250.000         | 45     | 181.912.500         | 50     | 191.008.125         | 55     | 200.558.531         | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan               |
|                                                                                             | Persentase Pangan<br>Segar yang<br>Memenuhi<br>Persyaratan Mutu<br>dan Keamanan<br>Pangan (Persentase) | 75               | 80        | 82,35                           |                     | 84,7   |                     | 87,05  |                     | 89,4   |                     | 91,75  |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pangan               |
| 2.10 - URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N BIDANG<br>PERTANAHAN                                       |                                                                                                        |                  |           |                                 | 170.392.051.<br>112 |        | 175.376.002.<br>240 |        | 187.689.630.<br>147 |        | 200.369.192.<br>484 |        | 193.081.308.<br>717 |                                                                     |
| 2.10.10 -<br>PROGRAM<br>PENATAGUNAA<br>N TANAH                                              |                                                                                                        |                  |           |                                 | 170.392.051.<br>112 |        | 175.376.002.<br>240 |        | 187.689.630.<br>147 |        | 200.369.192.<br>484 |        | 193.081.308.<br>717 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>ketersediaan<br>lahan untuk<br>kepentingan<br>umum                          | Presentase<br>Kebutuhan Luas<br>Lahan Bagi<br>Kepentingan umum<br>(%)                                  | 81,31            | 83,9<br>7 | 86,9                            | 170.392.051.<br>112 | 90,01  | 175.376.002.<br>240 | 93,21  | 187.689.630.<br>147 | 97,5   | 200.369.192.<br>484 | 100    | 193.081.308.<br>717 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanaha<br>n       |
| 2.11 - URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N BIDANG<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                              |                                                                                                        |                  |           |                                 | 187.000.000.<br>000 |        | 188.500.000.<br>000 |        | 190.700.000.<br>000 |        | 192.500.000.<br>000 |        | 194.200.000.<br>000 |                                                                     |
| 2.11.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                        |                  |           |                                 | 72.000.000.0<br>00  |        | 73.000.000.0<br>00  |        | 75.000.000.0<br>00  |        | 76.500.000.0<br>00  |        | 78.000.000.0<br>00  |                                                                     |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                               | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                        | 100              | 100       | 100                             | 72.000.000.0<br>00  | 100    | 73.000.000.0<br>00  | 100    | 75.000.000.0<br>00  | 100    | 76.500.000.0<br>00  | 100    | 78.000.000.0<br>00  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2.11.02 -<br>PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                  |                                                                                                        |                  |           |                                 | 2.000.000.00<br>0   |        | 2.000.000.00<br>0   |        | 2.000.000.00<br>0   |        | 2.000.000.00<br>0   |        | 2.000.000.00<br>0   |                                                                     |
| Meningkatnya<br>efektivitas<br>kajian                                                       | Persentase<br>Rekomedasi Kajian<br>Lingkungan Hidup                                                    | 100              | 100       | 100                             | 2.000.000.00<br>0   | 100    | 2.000.000.00<br>0   | 100    | 2.000.000.00<br>0   | 100    | 2.000.000.00<br>0   | 100    | 2.000.000.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                   | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                        |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                     |
|                                                                                                                                                      |                                                        |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                     |
| (01)                                                                                                                                                 | (02)                                                   | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                |
| lingkungan<br>untuk<br>memitigasi<br>dampak KRP                                                                                                      | yang<br>Ditindaklanjuti<br>(Persentase)                |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup                                      |
| 2.11.03 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                               |                                                        |                  |           |                                 | 4.500.000.00<br>0 |        | 5.000.000.00<br>0 |        | 5.200.000.00<br>0 |        | 5.500.000.00<br>0 |        | 5.700.000.00<br>0 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>Indeks Kualitas<br>Lingkungan<br>Hidup Daerah                                                                                        | Indeks Kualitas<br>Lingkungan Hidup<br>Daerah (Indeks) | 55,87            | 61,5<br>7 | 61,74                           | 4.500.000.00<br>0 | 61,91  | 5.000.000.00<br>0 | 62,09  | 5.200.000.00<br>0 | 62,26  | 5.500.000.00<br>0 | 62,43  | 5.700.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                                                                                                                      |                                                        |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2.11.04 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGA<br>MAN HAYATI<br>(KEHATI)                                                                         |                                                        |                  |           |                                 | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>pengelolaan<br>keanekaragama<br>n hayati                                                                                 | Persentase RTH<br>(Persentase)                         | 0,5              | 0,55      | 1,11                            | 2.000.000.00<br>0 | 1,66   | 2.000.000.00<br>0 | 2,21   | 2.000.000.00<br>0 | 2,76   | 2.000.000.00<br>0 | 3,31   | 2.000.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2.11.05 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N BAHAN<br>BERBAHAYA<br>DAN BERACUN<br>(B3) DAN<br>LIMBAH<br>BAHAN<br>BERBAHAYA<br>DAN BERACUN<br>(LIMBAH B3) |                                                        |                  |           |                                 | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>penanganan<br>Bahan<br>Berbahaya dan<br>Beracun (B3)                                                                                 | Persentase Limbah<br>B3 yang Terkelola<br>(Persentase) | 60               | 76        | 77                              | 2.000.000.00<br>0 | 78     | 2.000.000.00<br>0 | 79     | 2.000.000.00<br>0 | 80     | 2.000.000.00<br>0 | 81     | 2.000.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang                         |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                     |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                     |
| (01)                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                  | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                |
| Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                                                                                     |                                                                                                                                                       |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Lingkunga<br>n Hidup                                                |
| 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                                                                       |                  |      |                                 | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |                                                                     |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                                    | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) | 75               | 76   | 77                              | 2.000.000.00<br>0 | 78     | 2.000.000.00<br>0 | 79     | 2.000.000.00<br>0 | 80     | 2.000.000.00<br>0 | 81     | 2.000.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                    |                                                                                                                                                       |                  |      |                                 | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |                                                                     |
| Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup                                      | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)                                                    | 14,2             | 14,2 | 22,12                           | 2.000.000.00<br>0 | 27,9   | 2.000.000.00<br>0 | 32,21  | 2.000.000.00<br>0 | 35,64  | 2.000.000.00<br>0 | 40     | 2.000.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                            |                                                                                                                                                       |                  |      |                                 | 500.000.000       |        | 500.000.000       |        | 500.000.000       |        | 500.000.000       |        | 500.000.000       |                                                                     |
| Meningkatnya Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Pencemaran                                                                      | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)                                                                    | 100              | 100  | 100                             | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                   |                  |           | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                     |
|                                                    |                                                                   |                  |           | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                     |
| (01)                                               | (02)                                                              | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                |
| Lingkungan<br>Hidup                                |                                                                   |                  |           |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    |                                                                   |                  |           |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     |                                                                     |
| 2.11.11 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN |                                                                   |                  |           |                                 | 100.000.000.<br>000 |        | 100.000.000.<br>000 |        | 100.000.000.<br>000 |        | 100.000.000.<br>000 |        | 100.000.000.<br>000 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>tata kelola<br>persampahan         | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 50,27            | 50,2<br>8 | 60                              | 100.000.000.<br>000 | 65     | 100.000.000.<br>000 | 70     | 100.000.000.<br>000 | 73     | 100.000.000.<br>000 | 75     | 100.000.000.<br>000 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65        | 67                              |                     | 69     |                     | 71     |                     | 73     |                     | 75     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65        | 67                              |                     | 69     |                     | 71     |                     | 73     |                     | 75     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65        | 67                              |                     | 69     |                     | 71     |                     | 73     |                     | 75     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65        | 67                              |                     | 69     |                     | 71     |                     | 73     |                     | 75     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65        | 67                              |                     | 69     |                     | 71     |                     | 73     |                     | 75     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                    | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65        | 67                              |                     | 69     |                     | 71     |                     | 73     |                     | 75     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                   |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                     |
|                                                                                                        |                                                                   |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                     |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                              | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                                |
|                                                                                                        | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65   | 67                              |                | 69     |                | 71     |                | 73     |                | 75     |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                                                                        | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65   | 67                              |                | 69     |                | 71     |                | 73     |                | 75     |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                                                                        | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65   | 67                              |                | 69     |                | 71     |                | 73     |                | 75     |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                                                                        | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65   | 67                              |                | 69     |                | 71     |                | 73     |                | 75     |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                                                                        |                                                                   |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
|                                                                                                        | Terlaksananya<br>Pengelolaan<br>Sampah di wilayah<br>Kab/Kota (%) | 63,5             | 65   | 67                              |                | 69     |                | 71     |                | 73     |                | 75     |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Lingkunga<br>n Hidup |
| 2.12 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN<br>PENCATATAN<br>SIPIIL |                                                                   |                  |      |                                 | 39.000.000.000 |        | 42.500.000.000 |        | 46.000.000.000 |        | 49.500.000.000 |        | 53.000.000.000 |                                                                     |
| 2.12.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA            |                                                                   |                  |      |                                 | 31.921.515.713 |        | 33.220.153.820 |        | 34.598.927.448 |        | 36.065.651.100 |        | 37.629.237.789 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>pemenuhan                                                                              | Persentase<br>pemenuhan                                           | 100              | 100  | 100                             | 31.921.515.713 | 100    | 33.220.153.820 | 100    | 34.598.927.448 | 100    | 36.065.651.100 | 100    | 37.629.237.789 | Dinas/Bad<br>an yang                                                |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                                                                         |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                           |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                    | 2030                                                                                    |                    |                                                                                                             |
|                                                                |                                                                                           |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET                                                                                  | PAGU               |                                                                                                             |
| (01)                                                           | (02)                                                                                      | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)               | (13)                                                                                    | (14)               | (15)                                                                                                        |
| penunjang<br>perangkat<br>daerah                               | penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                                      |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                    |                                                                                         |                    | menangani<br>Bidang<br>Administra<br>si<br>Kependud<br>ukan dan<br>Catatan<br>Sipil                         |
| 2.12.02 -<br>PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                |                                                                                           |                  |      |                                 | 5.698.399.28<br>7 |        | 7.729.752.68<br>0 |        | 9.670.469.70<br>2 |        | 11.510.885.7<br>65 |                                                                                         | 13.208.277.8<br>18 |                                                                                                             |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>layanan<br>pendaftaran<br>penduduk | Persentase<br>Kepemilikan<br>Identitas<br>Kependudukan<br>Digital (%)                     | 10               | 10   | 20                              | 5.698.399.28<br>7 | 30     | 7.729.752.68<br>0 | 40     | 9.670.469.70<br>2 | 50     | 11.510.885.7<br>65 | 50                                                                                      | 13.208.277.8<br>18 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Administra<br>si<br>Kependud<br>ukan dan<br>Catatan<br>Sipil |
|                                                                | Persentase<br>Kepemilikan Kartu<br>Identitas Anak<br>(Persentase)                         | 60               | 60   | 62                              |                   | 64     |                   | 66     |                   | 68     |                    | 70                                                                                      |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Administra<br>si<br>Kependud<br>ukan dan<br>Catatan<br>Sipil |
| 2.12.03 -<br>PROGRAM<br>PENCATATAN<br>SIPIL                    |                                                                                           |                  |      |                                 | 250.085.000       |        | 275.093.500       |        | 302.602.850       |        | 332.863.135        |                                                                                         | 402.764.393        |                                                                                                             |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>layanan<br>pencatatan sipil        | Persentase Akta<br>Perceraian yang<br>Diterbitkan bagi<br>yang Melaporkan<br>(Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 250.085.000       | 100    | 275.093.500       | 100    | 302.602.850       | 100    | 332.863.135        | 100                                                                                     | 402.764.393        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Administra<br>si<br>Kependud<br>ukan dan<br>Catatan<br>Sipil |
|                                                                | Persentase Akta<br>Kelahiran yang<br>diterbitkan bagi<br>yang melaporkan<br>(%)           | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Administra<br>si<br>Kependud<br>ukan dan |                    |                                                                                                             |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |                                                                                |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                              |                  |      | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030                                                                           |               |                                                                                |
|                                                                   |                                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET                                                                         | PAGU          |                                                                                |
| (01)                                                              | (02)                                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)          | (11)   | (12)          | (13)                                                                           | (14)          | (15)                                                                           |
|                                                                   |                                                                              |                  |      |                                 |               |        |               |        |               |        |               |                                                                                |               | Catatan Sipil                                                                  |
|                                                                   | Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)           | 100              | 100  | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |               |                                                                                |
|                                                                   | Persentase Akta Pengesahaan anak yang terbit bagi yang melaporkan (%)        | 100              | 100  | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |               |                                                                                |
|                                                                   | Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)         | 100              | 100  | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |               |                                                                                |
|                                                                   | Persentase Catatan Pinggir Naturalisasi yang terbit bagi yang melaporkan (%) | 100              | 100  | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100                                                                            |               | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil |
| 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                              |                  |      |                                 | 1.050.000.000 |        | 1.190.000.000 |        | 1.338.000.000 |        | 1.495.600.000 |                                                                                | 1.664.720.000 |                                                                                |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan                   | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)                      | 100              | 100  | 100                             | 1.050.000.000 | 100    | 1.190.000.000 | 100    | 1.338.000.000 | 100    | 1.495.600.000 | 100                                                                            | 1.664.720.000 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Administra                                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                               |     |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                              |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                  |     |                                                                                  |
|                                                                    |                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                  |     |                                                                                  |
| (01)                                                               | (02)                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                                             |     |                                                                                  |
|                                                                    |                                                              |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | si<br>Kependud<br>ukan dan<br>Catatan<br>Sipil                                   |     |                                                                                  |
|                                                                    | Persentase Jaringan dan Aplikasi SIAK dalam Kondisi Baik (%) | 100              | 100  | 100                             |                |        |                | 100    |                |        |                | 100    |                |                                                                                  | 100 | Dinas/Bad an yang menangani Bidang Administra si Kependud ukan dan Catatan Sipil |
|                                                                    | Persentase Peningkatan Kualitas SDM Operator SIAK (%)        | 100              | 100  | 100                             |                |        |                | 100    |                |        |                | 100    |                |                                                                                  | 100 | Dinas/Bad an yang menangani Bidang Administra si Kependud ukan dan Catatan Sipil |
| 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUK AN                 |                                                              |                  |      |                                 | 80.000.000     |        | 85.000.000     |        | 90.000.000     |        | 95.000.000     |        | 95.000.000     |                                                                                  |     |                                                                                  |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan                          | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)                  | 100              | 100  | 100                             | 80.000.000     | 100    | 85.000.000     | 100    | 90.000.000     | 100    | 95.000.000     | 100    | 95.000.000     | Dinas/Bad an yang menangani Bidang Administra si Kependud ukan dan Catatan Sipil |     |                                                                                  |
| 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                              |                  |      |                                 | 23.808.389.429 |        | 24.929.144.839 |        | 25.823.540.404 |        | 26.069.969.709 |        | 26.580.704.930 |                                                                                  |     |                                                                                  |
| 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                              |                  |      |                                 | 11.902.141.320 |        | 12.197.469.853 |        | 12.500.081.598 |        | 12.810.158.639 |        | 13.127.887.604 |                                                                                  |     |                                                                                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                           |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                            |
|                                                                                 |                                                                           |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                            |
| (01)                                                                            | (02)                                                                      | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                       |
| KABUPATEN/K<br>OTA                                                              |                                                                           |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                   | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)           | 100              | 100  | 100                             | 11.902.141.3<br>20 | 100    | 12.197.469.8<br>53 | 100    | 12.500.081.5<br>98 | 100    | 12.810.158.6<br>39 | 100    | 13.127.887.6<br>04 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Masyaraka<br>t dan Desa |
| 2.13.02 -<br>PROGRAM<br>PENATAAN<br>DESA                                        |                                                                           |                  |      |                                 | 1.017.972.36<br>7  |        | 1.043.421.67<br>6  |        | 1.069.507.21<br>8  |        | 1.096.244.89<br>8  |        | 1.123.651.02<br>1  |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>penataan desa                                       | Persentase Desa<br>yang tertata (%)                                       | 0,81             | 0,81 | 2,50                            | 1.017.972.36<br>7  | 5,00   | 1.043.421.67<br>6  | 10,00  | 1.069.507.21<br>8  | 15,00  | 1.096.244.89<br>8  | 20,00  | 1.123.651.02<br>1  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Masyaraka<br>t dan Desa |
| 2.13.03 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJA SAMA<br>DESA                       |                                                                           |                  |      |                                 | 288.025.257        |        | 295.225.889        |        | 302.606.537        |        | 310.171.701        |        | 317.925.994        |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>efektivitas kerja<br>sama desa                                  | Persentase fasilitasi<br>kerjasama desa (%)                               | 0,81             | 0,81 | 2,50                            | 288.025.257        | 5,00   | 295.225.889        | 10,00  | 302.606.537        | 15,00  | 310.171.701        | 20,00  | 317.925.994        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Masyaraka<br>t dan Desa |
| 2.13.04 -<br>PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHA<br>N DESA                   |                                                                           |                  |      |                                 | 7.685.415.07<br>2  |        | 8.405.204.91<br>7  |        | 8.901.779.48<br>7  |        | 8.774.470.36<br>7  |        | 8.868.295.60<br>7  |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa | Persentase desa<br>dengan Tatakelola<br>Pemerintaha Desa<br>yang Baik (%) | 12,2             | 12,2 | 34,55                           | 7.685.415.07<br>2  | 56,91  | 8.405.204.91<br>7  | 79,27  | 8.901.779.48<br>7  | 100    | 8.774.470.36<br>7  | 100    | 8.868.295.60<br>7  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pemberday<br>aan<br>Masyaraka<br>t dan Desa |
| 2.13.05 -<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N LEMBAGA<br>KEMASYARAKA<br>TAN, LEMBAGA |                                                                           |                  |      |                                 | 2.914.835.41<br>3  |        | 2.987.822.50<br>4  |        | 3.049.565.56<br>4  |        | 3.078.924.10<br>4  |        | 3.142.944.70<br>4  |                                                                                            |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                   |                  |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030                                                                           |                |                                                                                |
|                                                                                                         |                                                                   |                  |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                                         | PAGU           |                                                                                |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                              | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)                                                                           | (14)           | (15)                                                                           |
| ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                          |                                                                   |                  |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                |                |                                                                                |
| Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan | Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif (%) | 12,20            | 12,20 | 34,55                           | 2.914.835.413  | 56,91  | 2.987.822.504  | 79,27  | 3.049.565.564  | 100    | 3.078.924.104  | 100                                                                            | 3.142.944.704  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                          |                                                                   |                  |       |                                 | 49.967.323.616 |        | 50.329.807.241 |        | 50.158.380.550 |        | 50.351.741.404 |                                                                                | 50.232.771.303 |                                                                                |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |                                                                   |                  |       |                                 | 20.318.737.216 |        | 19.712.124.871 |        | 19.271.757.362 |        | 19.376.465.962 |                                                                                | 19.379.857.362 |                                                                                |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah                                                       | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)                    | 82,5             | 83,5  | 84,5                            | 20.318.737.216 | 86,5   | 19.712.124.871 | 87,5   | 19.271.757.362 | 88,5   | 19.376.465.962 | 89,5                                                                           | 19.379.857.362 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                                                         | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)               | 100              | 100   | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                |                                                                                |
|                                                                                                         |                                                                   |                  |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian                                 |                |                                                                                |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                    | BASELINE<br>2024 | 2025              | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                         |                  |                   | 2026                            |                    | 2027      |                    | 2028      |                    | 2029      |                    | 2030      |                    |                                                                                                             |
|                                                                                                                   |                                                                                         |                  |                   | TARGET                          | PAGU               | TARGET    | PAGU               | TARGET    | PAGU               | TARGET    | PAGU               | TARGET    | PAGU               |                                                                                                             |
| (01)                                                                                                              | (02)                                                                                    | (03)             | (04)              | (05)                            | (06)               | (07)      | (08)               | (09)      | (10)               | (11)      | (12)               | (13)      | (14)               | (15)                                                                                                        |
|                                                                                                                   |                                                                                         |                  |                   |                                 |                    |           |                    |           |                    |           |                    |           |                    | an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana                                                              |
| 2.14.02 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N PENDUDUK                                                                 |                                                                                         |                  |                   |                                 | 1.296.847.40<br>0  |           | 1.141.455.37<br>0  |           | 1.158.051.18<br>8  |           | 1.172.083.74<br>2  |           | 1.097.502.74<br>1  |                                                                                                             |
| Terkendalnya<br>pertambahan<br>jumlah<br>penduduk                                                                 | Indeks<br>Pembangunan<br>Berwawasan<br>Kependudukan<br>(IPBK) (Indeks)                  | 66,7             | 67,9              | 69,1                            | 1.296.847.40<br>0  | 70,3      | 1.141.455.37<br>0  | 71,5      | 1.158.051.18<br>8  | 72,7      | 1.172.083.74<br>2  | 73,9      | 1.097.502.74<br>1  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana |
|                                                                                                                   | Presentase<br>Ketersediaan Data<br>Menuju Integrasi<br>Satu Data Keluarga<br>(%)        | 1.84-1.84        | 1.84<br>-<br>1.84 | 1.84-1.84                       |                    | 1.84-1.84 |                    | 1.84-1.84 |                    | 1.84-1.84 |                    | 1.84-1.84 |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana |
| 2.14.03 -<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>KELUARGA<br>BERENCANA<br>(KB)                                                |                                                                                         |                  |                   |                                 | 13.471.739.0<br>00 |           | 12.823.727.0<br>00 |           | 13.091.072.0<br>00 |           | 13.323.191.7<br>00 |           | 13.400.411.2<br>00 |                                                                                                             |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan<br>dan peran serta<br>masyarakat<br>dalam<br>pembinaan<br>Keluarga<br>Berencana (KB) | Proporsi Kebutuhan<br>KB yang terpenuhi<br>menurut alat/cara<br>KB Modern (%)           | 1                | 2                 | 3                               | 13.471.739.0<br>00 | 4         | 12.823.727.0<br>00 | 5         | 13.091.072.0<br>00 | 6         | 13.323.191.7<br>00 | 7         | 13.400.411.2<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>Keluarga<br>Berencana |
|                                                                                                                   | Persentase<br>kampung keluarga<br>berkualitas mandiri<br>dan<br>berkelanjutanrga<br>(%) | 1                | 1                 | 1                               |                    | 1         |                    | 1         |                    | 1         |                    | 1         |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan                          |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                             |                  |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                |
|                                                                        |                                                                                             |                  |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                |
| (01)                                                                   | (02)                                                                                        | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                                           |
|                                                                        |                                                                                             |                  |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Keluarga Berencana                                                             |
|                                                                        | Angka Prevelensi Kontrasepsi Mordern / Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)                  | 75,74            | 75,84 | 75,94                           |                | 76,09  |                | 76,24  |                | 76,39  |                | 76,54  |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                        | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program bangga kencana (advokasi dan KIE) (%) | 82,75            | 82,75 | 83,2                            |                | 83,65  |                | 84,1   |                | 84,55  |                | 85     |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                        | Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi / Unmet Need (%)                           | 12,6             | 12,2  | 12,08                           |                | 11,52  |                | 11,16  |                | 10,8   |                | 10,44  |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|                                                                        |                                                                                             |                  |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |                                                                                             |                  |       |                                 | 14.880.000.000 |        | 16.652.500.000 |        | 16.637.500.000 |        | 16.480.000.000 |        | 16.355.000.000 |                                                                                |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat                   | Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan                                        | 38,78            | 39    | 40                              | 14.880.000.000 | 41     | 16.652.500.000 | 42     | 16.637.500.000 | 43     | 16.480.000.000 | 44     | 16.355.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang                                              |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                               | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                    |                  |      | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                                                             |
|                                                                                               |                                                                    |                  |      | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                                                             |
| (01)                                                                                          | (02)                                                               | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                                                        |
| dalam<br>mewujudkan<br>Keluarga<br>Sejahtera (KS)                                             | Ketahanan<br>Keluarga<br>(Persentase)                              |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Pengendi<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>keluarga<br>Berencana                                                  |
|                                                                                               | Presentase<br>Intervensi Keluarga<br>Resiko yang<br>didampingi (%) | 80               | 80   | 80                              |                     | 80     |                     | 80     |                     | 80     |                     | 80     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>keluarga<br>Berencana |
|                                                                                               |                                                                    |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pengendali<br>an<br>Penduduk<br>dan<br>keluarga<br>Berencana |
| 2.15 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N BIDANG<br>PERHUBUNGAN                                      |                                                                    |                  |      |                                 | 168.563.605.<br>279 |        | 176.487.653.<br>312 |        | 184.411.701.<br>344 |        | 212.411.330.<br>000 |        | 238.109.480.<br>000 |                                                                                                             |
| 2.15.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                    |                  |      |                                 | 70.000.000.0<br>00  |        | 70.000.000.0<br>00  |        | 70.000.000.0<br>00  |        | 70.000.000.0<br>00  |        | 70.000.000.0<br>00  |                                                                                                             |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                 | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)    | 100              | 100  | 100                             | 70.000.000.0<br>00  | 100    | 70.000.000.0<br>00  | 100    | 70.000.000.0<br>00  | 100    | 70.000.000.0<br>00  | 100    | 70.000.000.0<br>00  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubung<br>an                                              |
| 2.15.02 -<br>PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN LALU<br>LINTAS DAN<br>ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ)    |                                                                    |                  |      |                                 | 98.563.605.2<br>79  |        | 106.487.653.<br>312 |        | 114.411.701.<br>344 |        | 142.411.330.<br>000 |        | 168.109.480.<br>000 |                                                                                                             |
| Meningkatnya<br>kualitas                                                                      | Rasio Jaringan<br>Konektivitas                                     | 0,41             | 0,41 | 0,55                            | 98.563.605.2<br>79  | 0,63   | 106.487.653.<br>312 | 0,69   | 114.411.701.<br>344 | 0,78   | 142.411.330.<br>000 | 0,80   | 168.109.480.<br>000 | Dinas/Bad<br>an yang                                                                                        |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                   |      |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                            |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                      |      |                                                                |
|                                                                                              |                                                                                                            |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                      |      |                                                                |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                       | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                 |      |                                                                |
| layanan<br>transportasi<br>darat                                                             | Transportasi<br>(Angka)                                                                                    |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | menangani<br>Bidang<br>Perhubung<br>an                                               |      |                                                                |
|                                                                                              | Rasio Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu<br>Lintas Untuk<br>Jaringan Jalan<br>Kabupaten (Rasio) | 0,35             | 0,37 | 0,42                            |                    |        |                    | 0,38   |                    |        |                    | 0,36   |                    |                                                                                      | 0,34 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubung<br>an |
|                                                                                              | Persentase Jumlah<br>Ruas Jalan yang<br>Terfasilitasi (%)                                                  | 0                | 0    | 14%                             |                    |        |                    | 16%    |                    |        |                    | 18%    |                    |                                                                                      | 19%  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubung<br>an |
|                                                                                              | Persentase<br>Keselamatan<br>Transporatsi<br>Kabupaten (%)                                                 | 0                | 0    | 69%                             |                    |        |                    | 72%    |                    |        |                    | 73%    |                    |                                                                                      | 74%  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubung<br>an |
|                                                                                              |                                                                                                            |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                      |      | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perhubung<br>an |
| 2.16 - URUSAN<br>PEMERINTAH<br>AN BIDANG<br>KOMUNIKASI<br>DAN<br>INFORMATIKA                 |                                                                                                            |                  |      |                                 | 73.115.604.0<br>00 |        | 73.405.128.0<br>00 |        | 74.023.271.0<br>40 |        | 74.223.271.0<br>40 |        | 74.423.271.0<br>40 |                                                                                      |      |                                                                |
| 2.16.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>AN DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                            |                  |      |                                 | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |                                                                                      |      |                                                                |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                            | 100              | 100  | 100                             | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Komunikas<br>i dan<br>Informatik<br>a |      |                                                                |
| 2.16.02 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI                                             |                                                                                                            |                  |      |                                 | 5.587.288.00<br>0  |        | 5.837.288.00<br>0  |        | 6.388.271.04<br>0  |        | 6.588.271.04<br>0  |        | 6.788.271.04<br>0  |                                                                                      |      |                                                                |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                     |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                      |
|                                                                                               |                                                                     |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                      |
| (01)                                                                                          | (02)                                                                | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                 |
| DAN<br>KOMUNIKASI<br>PUBLIK                                                                   |                                                                     |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                                      |
| Meningkatnya<br>jangkauan dan<br>kualitas<br>komunikasi<br>publik<br>pemerintah<br>daerah     | Indeks Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi Publik<br>(Nilai) | 98,4             | 94,3 | 95,1                            | 5.587.288.00<br>0  | 95,3   | 5.837.288.00<br>0  | 95,5   | 6.388.271.04<br>0  | 95,7   | 6.588.271.04<br>0  | 96,1   | 6.788.271.04<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Komunikas<br>i dan<br>Informatik<br>a |
| 2.16.03 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>APLIKASI<br>INFORMATIKA                                |                                                                     |                  |      |                                 | 45.528.316.0<br>00 |        | 45.567.840.0<br>00 |        | 45.635.000.0<br>00 |        | 45.635.000.0<br>00 |        | 45.635.000.0<br>00 |                                                                                      |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>pengelolaan<br>aplikasi<br>informatika                            | Persentase<br>penyediaan layanan<br>aplikasi (%)                    | 100              | 100  | 100                             | 45.528.316.0<br>00 | 100    | 45.567.840.0<br>00 | 100    | 45.635.000.0<br>00 | 100    | 45.635.000.0<br>00 | 100    | 45.635.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Komunikas<br>i dan<br>Informatik<br>a |
|                                                                                               | Persentase<br>penyediaan layanan<br>internet (%)                    | 100              | 100  | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Komunikas<br>i dan<br>Informatik<br>a |
| 2.17 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N BIDANG<br>KOPERASI,<br>USAHA KECIL,<br>DAN<br>MENENGAH     |                                                                     |                  |      |                                 | 40.405.284.2<br>96 |        | 41.473.850.1<br>71 |        | 42.461.630.1<br>90 |        | 43.660.568.3<br>86 |        | 44.589.266.3<br>62 |                                                                                      |
| 2.17.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                     |                  |      |                                 | 23.473.081.5<br>89 |        | 23.845.842.3<br>97 |        | 24.227.922.2<br>22 |        | 24.619.554.0<br>47 |        | 25.020.976.6<br>64 |                                                                                      |
| Meningkatnya<br>pemuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                   | Persentase<br>pemuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)       | 100              | 100  | 100                             | 23.473.081.5<br>89 | 100    | 23.845.842.3<br>97 | 100    | 24.227.922.2<br>22 | 100    | 24.619.554.0<br>47 | 100    | 25.020.976.6<br>64 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Koperasi,<br>Usaha                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |                                                                      |             | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                        |                  |       | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030                                                                 |             |                                                                      |
|                                                        |                                                                                                        |                  |       | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET                                                               | PAGU        |                                                                      |
| (01)                                                   | (02)                                                                                                   | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)        | (07)   | (08)        | (09)   | (10)        | (11)   | (12)        | (13)                                                                 | (14)        | (15)                                                                 |
|                                                        |                                                                                                        |                  |       |                                 |             |        |             |        |             |        |             |                                                                      |             | Kecil dan Menengah                                                   |
|                                                        | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)                                                    | 100              | 100   | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |             |                                                                      |
| 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM   |                                                                                                        |                  |       |                                 | 250.000.000 |        | 256.250.000 |        | 262.656.250 |        | 269.222.656 |                                                                      | 275.953.223 |                                                                      |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Persentase Koperasi yang mendapatkan Pelayanan Usaha Simpan Pinjam (%)                                 | 0                | 0     | 12,82                           | 250.000.000 | 25,62  | 256.250.000 | 38,46  | 262.656.250 | 51,28  | 269.222.656 | 64,1                                                                 | 275.953.223 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  |                                                                                                        |                  |       |                                 | 200.000.000 |        | 250.000.000 |        | 300.000.000 |        | 350.000.000 |                                                                      | 400.000.000 |                                                                      |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam | Persentase Koperasi Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus (%)               | -                | 22,22 | 32,48                           | 200.000.000 | 42,74  | 250.000.000 | 52,99  | 300.000.000 | 63,25  | 350.000.000 | 73,50                                                                | 400.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |                                                                                                        |                  |       |                                 | 300.000.000 |        | 400.000.000 |        | 450.000.000 |        | 550.000.000 |                                                                      | 550.000.000 |                                                                      |
| Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi              | Persentase Koperasi predikat Sangat Berkualitas, Berkualitas, Cukup Berkualitas, Tidak Berkualitas (%) | -                | 14,36 | 16,92                           | 300.000.000 | 19,49  | 400.000.000 | 22,05  | 450.000.000 | 24,62  | 550.000.000 | 27,18                                                                | 550.000.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2.17.05 - PROGRAM                                      |                                                                                                        |                  |       |                                 | 450.000.000 |        | 550.000.000 |        | 600.000.000 |        | 750.000.000 |                                                                      | 750.000.000 |                                                                      |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                             | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                  |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                  |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                            |
| (01)                                                                                                     | (02)                                                                                             | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                       |
| PENDIDIKAN<br>DAN LATIHAN<br>PERKOPERASIA<br>N                                                           |                                                                                                  |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>kualitas SDM<br>perkoperasian                                                            | Persentase SDM<br>koperasi yang<br>mendapatkan<br>Pendidikan dan<br>Latihan<br>Perkoperasian (%) | -                | 3,83      | 6,85                            | 450.000.000       | 10,11  | 550.000.000       | 13,38  | 600.000.000       | 16,64  | 750.000.000       | 19,91  | 750.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Koperasi,<br>Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |
| 2.17.06 -<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N DAN<br>PERLINDUNGA<br>N KOOPERASI                               |                                                                                                  |                  |           |                                 | 1.275.000.00<br>0 |        | 1.353.125.00<br>0 |        | 1.431.953.12<br>5 |        | 1.552.965.62<br>5 |        | 1.634.289.76<br>6 |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>produktivitas<br>koperasi                                                                | Persentase<br>Meningkatnya<br>Koperasi yang<br>Berkualitas (%)                                   | -                | 13,8<br>9 | 38,77                           | 1.275.000.00<br>0 | 41,09  | 1.353.125.00<br>0 | 43,40  | 1.431.953.12<br>5 | 45,72  | 1.552.965.62<br>5 | 48,03  | 1.634.289.76<br>6 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Koperasi,<br>Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |
| 2.17.07 -<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N USAHA<br>MENENGAH,<br>USAHA KECIL,<br>DAN USAHA<br>MIKRO (UMKM) |                                                                                                  |                  |           |                                 | 6.907.626.37<br>5 |        | 7.080.317.03<br>4 |        | 7.257.324.95<br>9 |        | 7.438.758.08<br>3 |        | 7.624.727.03<br>5 |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>kapasitas<br>UMKM yang<br>tangguh dan<br>mandiri                                         | Persentase Usaha<br>Mikro yang<br>Bertrasnformasi<br>dari Informal ke<br>Formal (%)              | 3,19             | 3,38      | 3,61                            | 6.907.626.37<br>5 | 3,83   | 7.080.317.03<br>4 | 4,06   | 7.257.324.95<br>9 | 4,29   | 7.438.758.08<br>3 | 4,38   | 7.624.727.03<br>5 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Koperasi,<br>Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |
| 2.17.08 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN UMKM                                                            |                                                                                                  |                  |           |                                 | 7.549.576.33<br>2 |        | 7.738.315.74<br>0 |        | 7.931.773.63<br>4 |        | 8.130.067.97<br>5 |        | 8.333.319.67<br>4 |                                                                                            |
| Meningkatnya<br>daya saing<br>UMKM                                                                       | Proporsi Usaha<br>Mikro Menjaln<br>Kemitraan dan<br>promosi (%)                                  | 1,27             | 1,61      | 2,76                            | 7.549.576.33<br>2 | 3,99   | 7.738.315.74<br>0 | 5,3    | 7.931.773.63<br>4 | 6,69   | 8.130.067.97<br>5 | 8,08   | 8.333.319.67<br>4 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Koperasi,<br>Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |                                                                      |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                            |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030                                                                 |                |                                                                      |
|                                                                       |                                                                            |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                                                               | PAGU           |                                                                      |
| (01)                                                                  | (02)                                                                       | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)                                                                 | (14)           | (15)                                                                 |
|                                                                       | Pertumbuhan Wirausaha (%)                                                  | 2,61             | 2,81 | 2,99                            |                | 3,17   |                | 3,35   |                | 3,53   |                | 3,67                                                                 |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|                                                                       | Persentase Koperasi yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB (%)    | 2,05             | 2,05 | 2,05                            |                | 2,05   |                | 2,05   |                | 2,05   |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                |                                                                      |
|                                                                       | Persentase usaha Mikro yang terfasilitasi Dana pemerintah melalui UPDB (%) | 8,2              | 8,2  | 8,2                             |                | 8,2    |                | 8,2    |                | 8,2    |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                |                                                                      |
| 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                     |                                                                            |                  |      |                                 | 60.238.800.000 |        | 49.880.780.000 |        | 57.445.125.000 |        | 65.362.038.000 |                                                                      | 73.430.300.000 |                                                                      |
| 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                            |                  |      |                                 | 36.480.413.000 |        | 38.385.780.000 |        | 45.920.125.000 |        | 53.487.038.000 |                                                                      | 61.245.300.000 |                                                                      |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah                     | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)                        | 100              | 100  | 100                             | 36.480.413.000 | 100    | 38.385.780.000 | 100    | 45.920.125.000 | 100    | 53.487.038.000 | 100                                                                  | 61.245.300.000 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal                    |
| 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                  |                                                                            |                  |      |                                 | 11.098.387.000 |        | 1.270.000.000  |        | 1.040.000.000  |        | 920.000.000    |                                                                      | 970.000.000    |                                                                      |
| Meningkatnya Kemudahan Investasi                                      | Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)                     | 100              | 100  | 100                             | 11.098.387.000 | 100    | 1.270.000.000  | 100    | 1.040.000.000  | 100    | 920.000.000    | 100                                                                  | 970.000.000    | Dinas/Badan yang menangani Bidang                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                               | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                    |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                    |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                    |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                                               | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                               |
|                                                                                              |                                                                                                                                    |                  |           |                                 |                    |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Penanama<br>n Modal                                                |
| 2.18.03 -<br>PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                                        |                                                                                                                                    |                  |           |                                 | 400.000.000        |        | 600.000.000       |        | 600.000.000       |        | 800.000.000       |        | 800.000.000       |                                                                    |
| Meningkatnya<br>jangkauan<br>promosi<br>penanaman<br>modal                                   | Persentase<br>Peningkatan<br>Investor yang<br>Berinvestasi<br>(Persentase)                                                         | 17               | 19,0<br>5 | 38,1                            | 400.000.000        | 57,14  | 600.000.000       | 71,43  | 600.000.000       | 85,71  | 800.000.000       | 100    | 800.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Penanama<br>n Modal |
| 2.18.04 -<br>PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                                      |                                                                                                                                    |                  |           |                                 | 11.000.000.0<br>00 |        | 8.300.000.00<br>0 |        | 8.500.000.00<br>0 |        | 8.700.000.00<br>0 |        | 8.900.000.00<br>0 |                                                                    |
| Meningkatnya<br>perizinan<br>berusaha<br>berbasis risiko                                     | Persentase Pelaku<br>Usaha yang<br>Memperoleh Izin<br>Sesuai Ketentuan<br>(Persentase)                                             | 89               | 90        | 91                              | 11.000.000.0<br>00 | 92     | 8.300.000.00<br>0 | 93     | 8.500.000.00<br>0 | 94     | 8.700.000.00<br>0 | 95     | 8.900.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Penanama<br>n Modal |
| 2.18.05 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                |                                                                                                                                    |                  |           |                                 | 740.000.000        |        | 775.000.000       |        | 815.000.000       |        | 855.000.000       |        | 895.000.000       |                                                                    |
| Terkendalnya<br>pelaksanaan<br>penanaman<br>modal                                            | Persentase<br>Penyelesaian<br>Permasalahan dan<br>Hambatan yang<br>Dihadapi Pelaku<br>Usaha dalam<br>Membuka Usaha<br>(Persentase) | 39               | 40        | 43                              | 740.000.000        | 43     | 775.000.000       | 43     | 815.000.000       | 43     | 855.000.000       | 43     | 895.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Penanama<br>n Modal |
| 2.18.06 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DATA DAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN<br>MODAL |                                                                                                                                    |                  |           |                                 | 520.000.000        |        | 550.000.000       |        | 570.000.000       |        | 600.000.000       |        | 620.000.000       |                                                                    |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan<br>dan informasi<br>penanaman<br>modal                           | Persentase<br>Pemanfaatan Data<br>dan Informasi<br>Penanaman Modal<br>(Persentase)                                                 | 78               | 80        | 86                              | 520.000.000        | 90     | 550.000.000       | 93     | 570.000.000       | 95     | 600.000.000       | 96     | 620.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Penanama<br>n Modal |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                            | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                 |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                       |
|                                                                                               |                                                                 |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                       |
| (01)                                                                                          | (02)                                                            | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                  |
| 2.19 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N BIDANG<br>KEPEMUDAAN<br>DAN<br>OLAHRAGA                    |                                                                 |                  |      |                                 | 29.171.500.0<br>00 |        | 30.442.000.0<br>00 |        | 30.742.000.0<br>00 |        | 30.792.000.0<br>00 |        | 32.192.000.0<br>00 |                                                                       |
| 2.19.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                 |                  |      |                                 | 13.142.000.0<br>00 |        | 13.142.000.0<br>00 |        | 13.142.000.0<br>00 |        | 13.142.000.0<br>00 |        | 13.142.000.0<br>00 |                                                                       |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                 | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%) | 100              | 100  | 100                             | 13.142.000.0<br>00 | 100    | 13.142.000.0<br>00 | 100    | 13.142.000.0<br>00 | 100    | 13.142.000.0<br>00 | 100    | 13.142.000.0<br>00 | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2.19.02 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>DAYA SAING<br>KEPEMUDAAN                 |                                                                 |                  |      |                                 | 6.150.000.00<br>0  |        | 6.100.000.00<br>0  |        | 6.400.000.00<br>0  |        | 6.450.000.00<br>0  |        | 9.700.000.00<br>0  |                                                                       |
| Meningkatnya<br>daya saing<br>kepemudaan                                                      | Persentase pemuda<br>yang dibina (%)                            | 0                | 45   | 55                              | 6.150.000.00<br>0  | 64     | 6.100.000.00<br>0  | 73     | 6.400.000.00<br>0  | 91     | 6.450.000.00<br>0  | 100    | 9.700.000.00<br>0  | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2.19.03 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>DAYA SAING<br>KEOLAHRAGAA<br>N           |                                                                 |                  |      |                                 | 9.879.500.00<br>0  |        | 11.200.000.0<br>00 |        | 11.200.000.0<br>00 |        | 11.200.000.0<br>00 |        | 9.350.000.00<br>0  |                                                                       |
| Meningkatnya<br>Pembudayaan<br>dan prestasi<br>olahraga                                       | Peningkatan<br>Prestasi Olahraga<br>(%)                         | 0                | 5    | 10                              | 9.879.500.00<br>0  | 11     | 11.200.000.0<br>00 | 20     | 11.200.000.0<br>00 | 10     | 11.200.000.0<br>00 | 11     | 9.350.000.00<br>0  | Dinas/Badan yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepemudaan dan<br>Olahraga |
| 2.20 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N BIDANG<br>STATISTIK                                        |                                                                 |                  |      |                                 | 1.346.336.00<br>0  |        | 1.454.042.88<br>0  |        | 1.570.366.31<br>0  |        | 1.695.995.61<br>5  |        | 1.831.675.26<br>5  |                                                                       |
| 2.20.02 -<br>PROGRAM                                                                          |                                                                 |                  |      |                                 | 1.346.336.00<br>0  |        | 1.454.042.88<br>0  |        | 1.570.366.31<br>0  |        | 1.695.995.61<br>5  |        | 1.831.675.26<br>5  |                                                                       |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |                                                                              |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                               |
|                                                                                                           |                                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                               |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                          |
| PENYELENGGA<br>RAAN<br>STATISTIK<br>SEKTORAL                                                              |                                                                              |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                               |
| Tercapainya kolaborasi integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) | Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral (%)                  | 91,68            | 75   | 76                              | 1.346.336.00<br>0  | 77     | 1.454.042.88<br>0  | 78     | 1.570.366.31<br>0  | 79     | 1.695.995.61<br>5  | 80     | 1.831.675.26<br>5  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Statistik      |
| 2.21 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>PERSANDIAN                                                    |                                                                              |                  |      |                                 | 9.110.710.45<br>5  |        | 9.135.170.45<br>5  |        | 9.239.170.45<br>5  |        | 9.239.170.45<br>5  |        | 9.239.170.45<br>5  |                                                               |
| 2.21.02 -<br>PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN<br>PERSANDIAN<br>UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI             |                                                                              |                  |      |                                 | 9.110.710.45<br>5  |        | 9.135.170.45<br>5  |        | 9.239.170.45<br>5  |        | 9.239.170.45<br>5  |        | 9.239.170.45<br>5  |                                                               |
| Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah                                        | Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)                                    | 55               | 65   | 65                              | 9.110.710.45<br>5  | 70     | 9.135.170.45<br>5  | 70     | 9.239.170.45<br>5  | 70     | 9.239.170.45<br>5  | 75     | 9.239.170.45<br>5  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Persandian     |
| 2.22 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>KEBUDAYAAN                                                    |                                                                              |                  |      |                                 | 1.750.000.00<br>0  |        | 1.750.000.00<br>0  |        | 2.500.000.00<br>0  |        | 2.500.000.00<br>0  |        | 2.500.000.00<br>0  |                                                               |
| 2.22.02 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN<br>KEBUDAYAAN                                                    |                                                                              |                  |      |                                 | 1.750.000.00<br>0  |        | 1.750.000.00<br>0  |        | 2.500.000.00<br>0  |        | 2.500.000.00<br>0  |        | 2.500.000.00<br>0  |                                                               |
| Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan                                         | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) | -                | 0,15 | 0,188                           | 1.750.000.00<br>0  | 0,225  | 1.750.000.00<br>0  | 0,263  | 2.500.000.00<br>0  | 0,3    | 2.500.000.00<br>0  | 0,3    | 2.500.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kebudayaa<br>n |
| 2.23 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>PERPUSTAKAA<br>N                                              |                                                                              |                  |      |                                 | 24.086.297.7<br>03 |        | 24.078.455.1<br>45 |        | 25.023.641.5<br>24 |        | 25.955.107.5<br>62 |        | 26.899.110.2<br>51 |                                                               |
| 2.23.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN                                                               |                                                                              |                  |      |                                 | 19.431.297.7<br>03 |        | 20.141.455.1<br>45 |        | 20.892.641.5<br>24 |        | 21.636.107.5<br>62 |        | 22.394.110.2<br>51 |                                                               |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                      |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                        |                                                                                                      |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                   | (02)                                                                                                 | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |                                                                                                      |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                    |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah                      | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)                                                  | 100              | 100  | 100                             | 19.431.297.703 | 100    | 20.141.455.145 | 100    | 20.892.641.524 | 100    | 21.636.107.562 | 100    | 22.394.110.251 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Prpustaka an     |
| 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                               |                                                                                                      |                  |      |                                 | 4.655.000.000  |        | 3.937.000.000  |        | 4.131.000.000  |        | 4.319.000.000  |        | 4.505.000.000  |                                                    |
| Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat Kabupaten Tangerang (dalam satuan persen) (%) | 2                | 3    | 3                               | 4.655.000.000  | 3      | 3.937.000.000  | 4      | 4.131.000.000  | 4      | 4.319.000.000  | 5      | 4.505.000.000  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Prpustaka an     |
| 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                            |                                                                                                      |                  |      |                                 | 635.000.000    |        | 20.732.000.000 |        | 20.831.000.000 |        | 20.929.000.000 |        | 2.027.000.000  |                                                    |
| 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                    |                                                                                                      |                  |      |                                 | 435.000.000    |        | 502.000.000    |        | 571.000.000    |        | 639.000.000    |        | 707.000.000    |                                                    |
| Meningkatkan pengelolaan arsip daerah                                  | Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)                                                              | 100              | 100  | 100                             | 435.000.000    | 100    | 502.000.000    | 100    | 571.000.000    | 100    | 639.000.000    | 100    | 707.000.000    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan        |
| 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                  |                                                                                                      |                  |      |                                 | 200.000.000    |        | 20.230.000.000 |        | 20.260.000.000 |        | 20.290.000.000 |        | 1.320.000.000  |                                                    |
| Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan sesuai NSPK                 | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)                                  | 20               | 20   | 20                              | 200.000.000    | 20     | 20.230.000.000 | 20     | 20.260.000.000 | 20     | 20.290.000.000 | 20     | 1.320.000.000  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan        |
| 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN               |                                                                                                      |                  |      |                                 | 39.400.000.000 |        | 39.970.000.000 |        | 40.575.000.000 |        | 41.120.000.000 |        | 41.490.000.000 |                                                    |
| 3.25.01 - PROGRAM                                                      |                                                                                                      |                  |      |                                 | 15.300.000.000 |        | 15.300.000.000 |        | 15.300.000.000 |        | 15.300.000.000 |        | 15.300.000.000 |                                                    |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                            | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                 |                  |            | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                             |
|                                                                     |                                                                 |                  |            | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                             |
| (01)                                                                | (02)                                                            | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                        |
| PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                 |                  |            |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                             |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah       | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%) | 100              | 100        | 100                             | 15.300.000.0<br>00 | 100    | 15.300.000.0<br>00 | 100    | 15.300.000.0<br>00 | 100    | 15.300.000.0<br>00 | 100    | 15.300.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
| 3.25.03 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP         |                                                                 |                  |            |                                 | 8.900.000.00<br>0  |        | 8.900.000.00<br>0  |        | 8.900.000.00<br>0  |        | 8.900.000.00<br>0  |        | 8.700.000.00<br>0  |                                                                             |
| Meningkatkan<br>produksi<br>perikanan<br>tangkap                    | Jumlah Produksi<br>Perikanan Tangkap<br>(Ton)                   | 21.962           | 22.0<br>73 | 22.250                          | 8.900.000.00<br>0  | 22.450 | 8.900.000.00<br>0  | 22.675 | 8.900.000.00<br>0  | 22.924 | 8.900.000.00<br>0  | 23.199 | 8.700.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
|                                                                     | Jumlah Produksi<br>Perikanan Tangkap<br>(Ton)                   | 21.920           | 22.0<br>73 | 22.250                          |                    | 22.450 |                    | 22.675 |                    | 22.924 |                    | 23.199 |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
| 3.25.04 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA        |                                                                 |                  |            |                                 | 10.000.000.0<br>00 |        | 10.070.000.0<br>00 |        | 10.175.000.0<br>00 |        | 10.220.000.0<br>00 |        | 10.290.000.0<br>00 |                                                                             |
| Meningkatnya<br>produksi<br>perikanan<br>budidaya                   | Jumlah Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya (Ton)                  | 21.683,79        | 22.0<br>58 | 22.196                          | 9.100.000.00<br>0  | 22.333 | 9.100.000.00<br>0  | 22.471 | 9.100.000.00<br>0  | 22.609 | 9.100.000.00<br>0  | 22.746 | 9.100.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
|                                                                     |                                                                 |                  |            |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
| Meningkatnya<br>produksi                                            | Jumlah Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya (Ton)                  | 21.683,79        | 22.0<br>58 | 22.196                          | 900.000.000        | 22.333 | 970.000.000        | 22.471 | 1.075.000.00<br>0  | 22.609 | 1.120.000.00<br>0  | 22.746 | 1.190.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani                                           |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                     |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                             |
|                                                                                   |                                                                     |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                             |
| (01)                                                                              | (02)                                                                | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                        |
| perikanan<br>budidaya                                                             |                                                                     |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan                                      |
| 3.25.05 -<br>PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>SUMBER DAYA<br>KELAUTAN<br>DAN<br>PERIKANAN |                                                                     |                  |           |                                 | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |                                                                             |
| Meningkatnya<br>kelestarian laut<br>dan<br>keanekaragama<br>n hayati              |                                                                     |                  |           |                                 | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
| 3.25.06 -<br>PROGRAM<br>PENGOLAHAN<br>DAN<br>PEMASARAN<br>HASIL<br>PERIKANAN      |                                                                     |                  |           |                                 | 5.200.000.00<br>0 |        | 5.700.000.00<br>0 |        | 6.200.000.00<br>0 |        | 6.700.000.00<br>0 |        | 7.200.000.00<br>0 |                                                                             |
| Meningkatnya<br>konsumsi ikan<br>oleh<br>masyarakat                               | Angka Konsumsi<br>Ikan (Kg/KAP/TH)                                  | 41,26            | 41,6<br>7 | 42,3                            | 5.200.000.00<br>0 | 42,93  | 5.700.000.00<br>0 | 43,58  | 6.200.000.00<br>0 | 44,23  | 6.700.000.00<br>0 | 44,89  | 7.200.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kelautan<br>dan<br>Perikanan |
| 3.26 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>PARIWISATA                            |                                                                     |                  |           |                                 | 2.319.290.00<br>0 |        | 2.092.259.00<br>0 |        | 2.305.175.00<br>0 |        | 2.365.475.00<br>0 |        | 2.400.000.00<br>0 |                                                                             |
| 3.26.02 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DAYA TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA      |                                                                     |                  |           |                                 | 409.290.000       |        | 482.259.000       |        | 605.175.000       |        | 665.475.000       |        | 700.000.000       |                                                                             |
| Meningkatnya<br>daya tarik<br>destinasi<br>pariwisata                             | Persentase<br>Pertumbuhan<br>Kunjungan<br>Wisatawan<br>(Persentase) | 5                | 5,1       | 6,15                            | 409.290.000       | 7,2    | 482.259.000       | 8,25   | 605.175.000       | 9,3    | 665.475.000       | 9,3    | 700.000.000       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pariwisata                   |
| 3.26.03 -<br>PROGRAM<br>PEMASARAN<br>PARIWISATA                                   |                                                                     |                  |           |                                 | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |        | 1.000.000.00<br>0 |                                                                             |
| Meningkatnya<br>Jangkauan                                                         | Persentase<br>Peningkatan Media<br>Pemasaran                        | 4                | 4,41      | 5,18                            | 1.000.000.00<br>0 | 6,21   | 1.000.000.00<br>0 | 7,25   | 1.000.000.00<br>0 | 8,28   | 1.000.000.00<br>0 | 8,28   | 1.000.000.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani                                           |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                    | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |                                   |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                         |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030                              |                |                                                           |
|                                                                                                 |                                                                                                         |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                            | PAGU           |                                                           |
| (01)                                                                                            | (02)                                                                                                    | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)                              | (14)           | (15)                                                      |
| Pemasaran<br>Pariwisata                                                                         | Pariwisata<br>(Persentase)                                                                              |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |                                   |                | Bidang<br>Pariwisata                                      |
| 3.26.05 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN SUMBER<br>DAYA<br>PARIWISATA<br>DAN EKONOMI<br>KREATIF |                                                                                                         |                  |      |                                 | 910.000.000    |        | 610.000.000    |        | 700.000.000    |        | 700.000.000    |                                   | 700.000.000    |                                                           |
| Meningkatnya<br>Kapasitas SDM<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif                              | Persentase Pelaku<br>Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>yang Aktif dan<br>Tervalidasi<br>(Persentase) | -                | 2,11 | 2,41                            | 910.000.000    | 2,71   | 610.000.000    | 3,01   | 700.000.000    | 3,31   | 700.000.000    | 3,31                              | 700.000.000    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pariwisata |
| 3.27 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N BIDANG<br>PERTANIAN                                          |                                                                                                         |                  |      |                                 | 56.950.000.000 |        | 57.047.500.000 |        | 58.239.875.000 |        | 60.005.368.750 |                                   | 60.649.987.188 |                                                           |
| 3.27.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA       |                                                                                                         |                  |      |                                 | 38.000.000.000 |        | 38.000.000.000 |        | 38.000.000.000 |        | 38.000.000.000 |                                   | 38.000.000.000 |                                                           |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                   | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                         | 100              | 100  | 100                             | 38.000.000.000 | 100    | 38.000.000.000 | 100    | 38.000.000.000 | 100    | 38.000.000.000 | 100                               | 38.000.000.000 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian  |
|                                                                                                 |                                                                                                         |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |                                   |                |                                                           |
| 3.27.02 -<br>PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN SARANA<br>PERTANIAN               |                                                                                                         |                  |      |                                 | 9.950.000.000  |        | 10.347.500.000 |        | 10.764.875.000 |        | 11.203.118.750 |                                   | 11.663.274.688 |                                                           |
| Meningkatnya<br>distribusi dan<br>kualitas sarana<br>pertanian                                  | Persentase<br>Ketersediaan<br>Sarana Pertanian<br>(Persentase)                                          | 15               | 11   | 13                              | 9.950.000.000  | 15     | 10.347.500.000 | 17     | 10.764.875.000 | 19     | 11.203.118.750 | 21                                | 11.663.274.688 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian  |
|                                                                                                 | Persentase<br>Peningkatan<br>Produksi Pertanian<br>(Persentase)                                         | 1                | 0,5  | 0,5                             |                | 0,5    |                | 0,5    |                | 0,5    |                | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani |                |                                                           |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                              |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                          |
|                                                                                                         |                                                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                          |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                     |
|                                                                                                         |                                                                                              |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Bidang<br>Pertanian                                      |
|                                                                                                         | Produktivitas Padi<br>atau Bahan Pangan<br>Utama Lokal<br>Lainnya Per Hektar<br>(Kuintal/Ha) | 49               | 49,4 | 49,6                            |                   | 49,8   |                   | 50     |                   | 50,2   |                   | 50,4   |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian |
| 3.27.03 -<br>PROGRAM<br>PENYEDIAAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN PRASARANA<br>PERTANIAN                    |                                                                                              |                  |      |                                 | 4.500.000.00<br>0 |        | 4.700.000.00<br>0 |        | 5.170.000.00<br>0 |        | 5.687.000.00<br>0 |        | 6.255.700.00<br>0 |                                                          |
| Meningkatnya<br>distribusi dan<br>kualitas<br>prasarana<br>pertanian                                    | Ketersediaan<br>Prasarana<br>Pertanian (Unit)                                                | 3                | 8    | 8                               | 4.500.000.00<br>0 | 8      | 4.700.000.00<br>0 | 8      | 5.170.000.00<br>0 | 8      | 5.687.000.00<br>0 | 8      | 6.255.700.00<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian |
|                                                                                                         | Persentase<br>Peningkatan<br>Produksi Pertanian<br>(Persentase)                              | 1                | 0,5  | 0,5                             |                   | 0,5    |                   | 0,5    |                   | 0,5    |                   | 0,5    |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian |
| 3.27.04 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N KESEHATAN<br>HEWAN DAN<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT<br>VETERINER |                                                                                              |                  |      |                                 | 1.800.000.00<br>0 |        | 1.890.000.00<br>0 |        | 1.984.500.00<br>0 |        | 2.083.725.00<br>0 |        | 2.187.911.25<br>0 |                                                          |
| Meningkatnya<br>pengendalian<br>kesehatan<br>hewan dan<br>kesehatan<br>masyarak<br>veteriner            | Persentase Hewan<br>Sakit yang Dapat<br>Disembuhkan<br>(Persentase)                          | 70               | 70   | 75                              | 1.800.000.00<br>0 | 80     | 1.890.000.00<br>0 | 85     | 1.984.500.00<br>0 | 90     | 2.083.725.00<br>0 | 95     | 2.187.911.25<br>0 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian |
|                                                                                                         | Persentase Produk<br>Hewan yang<br>Memenuhi SNI<br>(Persentase)                              | 80               | 80   | 82                              |                   | 84     |                   | 86     |                   | 88     |                   | 90     |                   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pertanian |
| 3.27.05 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N DAN<br>PENANGGULAN<br>GAN BENCANA<br>PERTANIAN                 |                                                                                              |                  |      |                                 | 200.000.000       |        | 210.000.000       |        | 220.500.000       |        | 231.525.000       |        | 243.101.250       |                                                          |
| Meningkatnya<br>pengendalian<br>dan                                                                     | Persentase area<br>terdampak<br>perubahan iklim                                              | 0                | 0    | 75                              | 200.000.000       | 80     | 210.000.000       | 85     | 220.500.000       | 90     | 231.525.000       | 95     | 243.101.250       | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani                        |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                 |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                        |                   |                                                    |
|                                                                                                      |                                                                                 |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                      | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                                                                 | (02)                                                                            | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                        | (14)              | (15)                                               |
| penanggulan bencana pertanian                                                                        | yang dapat ditangani (%)                                                        |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                             |                   | Bidang Pertanian                                   |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                               |                                                                                 |                  |           |                                 | 2.500.000.00<br>0 |        | 1.900.000.00<br>0 |        | 2.100.000.00<br>0 |        | 2.800.000.00<br>0 |                                             | 2.300.000.00<br>0 |                                                    |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian                                                 | Cakupan Bina Kelompok Petani (Kelompok)                                         | 0                | 1.33<br>1 | 1.331                           | 2.500.000.00<br>0 | 1.331  | 1.900.000.00<br>0 | 1.331  | 2.100.000.00<br>0 | 1.331  | 2.800.000.00<br>0 | 1.331                                       | 2.300.000.00<br>0 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian        |
|                                                                                                      | Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (Persentase)                | 70               | 75        | 75                              |                   | 75     |                   | 75     |                   | 75     |                   | Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian |                   |                                                    |
| 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                        |                                                                                 |                  |           |                                 | 4.645.120.00<br>0 |        | 4.775.000.00<br>0 |        | 4.920.000.00<br>0 |        | 5.080.000.00<br>0 |                                             | 5.185.000.00<br>0 |                                                    |
| 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                               |                                                                                 |                  |           |                                 | 500.000.000       |        | 500.000.000       |        | 500.000.000       |        | 500.000.000       |                                             | 500.000.000       |                                                    |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                     | Persentase Pelaku Usaha yang diawasi pada Sektor Perdagangan (Persentase)       | 0                | 0         | 19,9                            | 500.000.000       | 19,9   | 500.000.000       | 19,9   | 500.000.000       | 19,9   | 500.000.000       | 20,2                                        | 500.000.000       | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan      |
| 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                          |                                                                                 |                  |           |                                 | 45.120.000        |        | 60.000.000        |        | 70.000.000        |        | 75.000.000        |                                             | 75.000.000        |                                                    |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Presentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang Dilakukan pembinaan (%) | 80               | 90        | 92                              | 45.120.000        | 94     | 60.000.000        | 96     | 70.000.000        | 98     | 75.000.000        | 100                                         | 75.000.000        | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan      |
| 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN                                       |                                                                                 |                  |           |                                 | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |        | 2.000.000.00<br>0 |                                             | 2.000.000.00<br>0 |                                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                      | BASELINE<br>2024       | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                        |           | 2026                            |                    | 2027                   |                    | 2028                   |                    | 2029                   |                    | 2030                   |                    |                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                        |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET                 | PAGU               | TARGET                 | PAGU               | TARGET                 | PAGU               | TARGET                 | PAGU               |                                                                |
| (01)                                                                                                                               | (02)                                                                                                                      | (03)                   | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)                   | (08)               | (09)                   | (10)               | (11)                   | (12)               | (13)                   | (14)               | (15)                                                           |
| BARANG<br>PENTING                                                                                                                  |                                                                                                                           |                        |           |                                 |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                                                                |
| Meningkatnya<br>pasar yang<br>dilakukan<br>monitoring<br>terhadap<br>barang<br>kebutuhan<br>pokok dan<br>barang penting<br>lainnya | Persentase<br>Stabilisasi Harga<br>Barang Kebutuhan<br>Pokok Dan Barang<br>Penting (Persentase)                           | 50                     | 75        | 82,5                            | 2.000.000.00<br>0  | 87,5                   | 2.000.000.00<br>0  | 92,5                   | 2.000.000.00<br>0  | 95                     | 2.000.000.00<br>0  | 100                    | 2.000.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perdagang<br>an |
| 3.30.05 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN EKSPOR                                                                                    |                                                                                                                           |                        |           |                                 | 895.000.000        |                        | 900.000.000        |                        | 910.000.000        |                        | 925.000.000        |                        | 930.000.000        |                                                                |
| Meningkatnya<br>pelaku usaha<br>yang<br>berorientasi<br>ekspor                                                                     | Nilai Ekspor Barang<br>(Nilai)                                                                                            | 13.445.516.88<br>2.700 | 0         | 13.446.861.43<br>4.388          | 895.000.000        | 13.448.206.12<br>0.532 | 900.000.000        | 13.582.688.18<br>1.737 | 910.000.000        | 13.584.046.45<br>0.555 | 925.000.000        | 13.585.404.85<br>5.200 | 930.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perdagang<br>an |
| 3.30.06 -<br>PROGRAM<br>STANDARDISA<br>SI DAN<br>PERLINDUNGA<br>N KONSUMEN                                                         |                                                                                                                           |                        |           |                                 | 885.000.000        |                        | 975.000.000        |                        | 1.080.000.00<br>0  |                        | 1.200.000.00<br>0  |                        | 1.280.000.00<br>0  |                                                                |
| Meningkatnya<br>tertib niaga dan<br>mutu produk                                                                                    | Persentase alat-alat<br>ukur, takar,<br>timbang dan<br>perlengkapannya<br>(UTTP) bertanda<br>tera sah yang<br>berlaku (%) | 52                     | 84,1<br>8 | 86,81                           | 885.000.000        | 89,43                  | 975.000.000        | 92,06                  | 1.080.000.00<br>0  | 94,68                  | 1.200.000.00<br>0  | 100                    | 1.280.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perdagang<br>an |
| 3.30.07 -<br>PROGRAM<br>PENGUNAAN<br>DAN<br>PEMASARAN<br>PRODUK<br>DALAM<br>NEGERI                                                 |                                                                                                                           |                        |           |                                 | 320.000.000        |                        | 340.000.000        |                        | 360.000.000        |                        | 380.000.000        |                        | 400.000.000        |                                                                |
| Meningkatnya<br>penggunaan<br>dan pemasaran<br>produk dalam<br>negeri                                                              | Persentase Promosi<br>Produk Lokal yang<br>Difasilitasi/<br>Dilaksanakan<br>(Persentase)                                  | 26,67                  | 30        | 17,97                           | 320.000.000        | 21,24                  | 340.000.000        | 24,51                  | 360.000.000        | 27,78                  | 380.000.000        | 31,05                  | 400.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perdagang<br>an |
| 3.31 - URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N BIDANG<br>PERINDUSTRIA<br>N                                                                      |                                                                                                                           |                        |           |                                 | 25.945.000.0<br>00 |                        | 25.965.000.0<br>00 |                        | 26.015.000.0<br>00 |                        | 26.045.000.0<br>00 |                        | 26.080.000.0<br>00 |                                                                |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                  |
|                                                                                             |                                                                                                |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                  |
| (01)                                                                                        | (02)                                                                                           | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                             |
| 3.31.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                |                  |           |                                 | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |        | 22.000.000.0<br>00 |                                                                  |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                               | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                | 100              | 100       | 100                             | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | 100    | 22.000.000.0<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perindustri<br>an |
| 3.31.02 -<br>PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>DAN<br>PEMBANGUNA<br>N INDUSTRI                      |                                                                                                |                  |           |                                 | 1.800.000.00<br>0  |        | 1.800.000.00<br>0  |        | 1.800.000.00<br>0  |        | 1.800.000.00<br>0  |        | 1.800.000.00<br>0  |                                                                  |
| Meningkatnya<br>realisasi<br>pembangunan<br>industri                                        | Persentase<br>Realisasi Investasi<br>Sektor Indrustri<br>dan Kawasan<br>Indrustri (%)          | 0                | 7,71      | 8,22                            | 1.800.000.00<br>0  | 8,74   | 1.800.000.00<br>0  | 9,25   | 1.800.000.00<br>0  | 9,76   | 1.800.000.00<br>0  | 10,28  | 1.800.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perindustri<br>an |
| 3.31.03 -<br>PROGRAM<br>PENGENDALIA<br>N IZIN USAHA<br>INDUSTRI                             |                                                                                                |                  |           |                                 | 275.000.000        |        | 285.000.000        |        | 300.000.000        |        | 310.000.000        |        | 320.000.000        |                                                                  |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>perizinan<br>berusaha sektor<br>perindustrian                   | Persentase Pelaku<br>Usaha IKM yang<br>memiliki<br>izin/legalitas yang<br>diawasi (Persentase) | 24,95            | 25,0<br>5 | 25,27                           | 275.000.000        | 27,08  | 285.000.000        | 28,88  | 300.000.000        | 30,69  | 310.000.000        | 32,49  | 320.000.000        | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perindustri<br>an |
| 3.31.04 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>INDUSTRI<br>NASIONAL          |                                                                                                |                  |           |                                 | 1.870.000.00<br>0  |        | 1.880.000.00<br>0  |        | 1.915.000.00<br>0  |        | 1.935.000.00<br>0  |        | 1.960.000.00<br>0  |                                                                  |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan<br>informasi<br>industri                                        | Tersedianya<br>Informasi Industri<br>Secara Lengkap,<br>Akurat, dan Terkini<br>(Persentase)    | 100              | 100       | 100                             | 1.870.000.00<br>0  | 100    | 1.880.000.00<br>0  | 100    | 1.915.000.00<br>0  | 100    | 1.935.000.00<br>0  | 100    | 1.960.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perindustri<br>an |
| 3.32 - URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N BIDANG<br>TRANSMIGRASI                                     |                                                                                                |                  |           |                                 | 60.864.000         |        | 60.864.000         |        | 60.864.000         |        | 60.864.000         |        | 60.864.000         |                                                                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                            | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |                                                                      |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                 |                  |      | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030                                                                 |                     |                                                                      |
|                                                                                              |                                                                 |                  |      | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET                                                               | PAGU                |                                                                      |
| (01)                                                                                         | (02)                                                            | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)                                                                 | (14)                | (15)                                                                 |
| 3.32.03 -<br>PROGRAM<br>PEMBANGUNA<br>N KAWASAN<br>TRANSMIGRASI                              |                                                                 |                  |      |                                 | 60.864.000          |        | 60.864.000          |        | 60.864.000          |        | 60.864.000          |                                                                      | 60.864.000          |                                                                      |
| Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pembangunan<br>Transmigrasi                                      | Angka Animo<br>Masyarakat<br>Bertransmigran<br>(Angka)          | 7                | 7    | 7                               | 60.864.000          | 7      | 60.864.000          | 7      | 60.864.000          | 7      | 60.864.000          | 7                                                                    | 60.864.000          | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Transmigr<br>asi      |
| 4.01 -<br>SEKRETARIAT<br>DAERAH                                                              |                                                                 |                  |      |                                 | 196.116.006.<br>940 |        | 209.488.932.<br>050 |        | 223.858.413.<br>391 |        | 239.308.440.<br>020 |                                                                      | 255.930.692.<br>581 |                                                                      |
| 4.01.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                 |                  |      |                                 | 124.714.874.<br>905 |        | 131.113.118.<br>650 |        | 137.818.774.<br>583 |        | 144.847.213.<br>311 |                                                                      | 152.214.573.<br>978 |                                                                      |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%) | 100              | 100  | 100                             | 122.964.874.<br>905 | 100    | 129.113.118.<br>650 | 100    | 135.568.774.<br>583 | 100    | 142.347.213.<br>311 | 100                                                                  | 149.464.573.<br>978 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
|                                                                                              | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%) | 100              | 100  | 100                             |                     | 100    |                     | 100    |                     | 100    |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |                     |                                                                      |
|                                                                                              | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%) | 100              | 100  | 100                             |                     | 100    |                     | 100    |                     | 100    |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |                     |                                                                      |
| Meningkatnya<br>tata kelola<br>organisasi<br>pemerintah<br>daerah                            |                                                                 |                  |      |                                 | 1.750.000.00<br>0   |        | 2.000.000.00<br>0   |        | 2.250.000.00<br>0   |        | 2.500.000.00<br>0   |                                                                      | 2.750.000.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
|                                                                                              | Indeks Kematangan<br>Organisasi (Indeks)                        | 48,23            | 48,5 | 48,75                           |                     | 49     |                     | 49,25  |                     | 49,5   |                     | 49,75                                                                |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
| 4.01.02 -<br>PROGRAM                                                                         |                                                                 |                  |      |                                 | 67.640.921.5<br>30  |        | 74.361.277.6<br>60  |        | 81.751.482.6<br>00  |        | 89.878.411.8<br>95  |                                                                      | 98.815.623.1<br>69  |                                                                      |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                     |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                      |
|                                                                 |                                                                     |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                      |
| (01)                                                            | (02)                                                                | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                 |
| PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                           |                                                                     |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                      |
| Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah |                                                                     |                  |      |                                 | 1.625.338.890  |        | 1.706.605.835  |        | 1.791.936.126  |        | 1.881.532.933  |        | 1.975.609.579  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)                   | 3,36             | 3,41 | 3,6                             |                | 3,79   |                | 3,98   |                | 4,2    |                | 4,36   |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                 | Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)                          | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat            | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 63.946.775.898 | 100    | 70.482.424.747 | 100    | 77.678.687.044 | 100    | 85.601.976.562 | 100    | 94.325.366.071 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                 |                                                                     |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                 | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                 |                                                                     |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
| Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan              | Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)                | 100              | 100  | 100                             | 2.068.806.742  | 100    | 2.172.247.078  | 100    | 2.280.859.430  | 100    | 2.394.902.400  | 100    | 2.514.647.519  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah |
|                                                                 | Persentase Produk Hukum yang                                        | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Dinas/Badan yang                                     |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                           |                  |      | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                           |                  |      | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                                      |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                                      | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                                 |
|                                                                                            | Dihasilkan<br>(Persentase)                                                                                |                  |      |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah                         |
| 4.01.03 -<br>PROGRAM<br>PEREKONOMIA<br>N DAN<br>PEMBANGUNA<br>N                            |                                                                                                           |                  |      |                                 | 3.760.210.50<br>5   |        | 4.014.535.74<br>0   |        | 4.288.156.20<br>8   |        | 4.582.814.81<br>4   |        | 4.900.495.43<br>4   |                                                                      |
| Meningkatnya<br>Kualitas<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Perekonomian<br>dan<br>Pembangunan | Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan<br>(Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 1.326.294.20<br>0   | 100    | 1.458.923.62<br>0   | 100    | 1.604.815.98<br>2   | 100    | 1.765.297.57<br>6   | 100    | 1.941.827.33<br>5   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
|                                                                                            | Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan<br>Pengelolaan<br>Perekonomian dan<br>Pembangunan<br>(Persentase) | 100              | 75   | 80                              |                     | 90     |                     | 95     |                     | 100    |                     | 100    |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>layanan<br>pengadaan<br>barang dan jasa                        | Tingkat<br>Kematangan<br>UKPBJ (Angka)                                                                    | 40               | 40   | 40                              | 1.332.916.30<br>5   | 40     | 1.399.562.12<br>0   | 40     | 1.469.540.22<br>6   | 40     | 1.543.017.23<br>8   | 40     | 1.620.168.09<br>9   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
|                                                                                            | Tingkat<br>Kematangan<br>UKPBJ (Angka)                                                                    | 40               | 40   | 40                              |                     | 40     |                     | 40     |                     | 40     |                     | 40     |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>kebijakan<br>administrasi<br>pembangunan                       | Efektivitas<br>Kebijakan<br>Administrasi<br>Pembangunan<br>(Persentase)                                   | 100              | 100  | 100                             | 1.101.000.00<br>0   | 100    | 1.156.050.00<br>0   | 100    | 1.213.800.00<br>0   | 100    | 1.274.500.00<br>0   | 100    | 1.338.500.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
|                                                                                            | Efektivitas<br>Kebijakan<br>Administrasi<br>Pembangunan<br>(Persentase)                                   | 100              | 100  | 100                             |                     | 100    |                     | 100    |                     | 100    |                     | 100    |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Sekretariat<br>Daerah |
| 4.02 -<br>SEKRETARIAT<br>DPRD                                                              |                                                                                                           |                  |      |                                 | 115.070.661.<br>000 |        | 119.219.995.<br>320 |        | 122.679.451.<br>052 |        | 126.139.852.<br>358 |        | 129.639.852.<br>358 |                                                                      |
| 4.02.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG                                                          |                                                                                                           |                  |      |                                 | 81.235.797.8<br>80  |        | 81.568.192.0<br>10  |        | 82.907.246.1<br>60  |        | 84.220.310.9<br>02  |        | 84.516.112.9<br>01  |                                                                      |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                            | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                 |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                           |                                                                 |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                      | (02)                                                            | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| URUSAN<br>PEMERINTAH<br>AN DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA                   |                                                                 |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                    |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah                         | Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah (Nilai)           | 79,95            | 80   | 80,5                            | 81.235.797.880 | 81     | 81.568.192.010 | 81,5   | 82.907.246.160 | 82     | 84.220.310.902 | 82,5   | 84.516.112.901 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD              |                                                                 |                  |      |                                 | 33.834.863.120 |        | 37.651.803.310 |        | 39.772.204.892 |        | 41.919.541.456 |        | 45.123.739.457 |                                                    |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)             | 100              | 100  | 100                             | 33.723.463.920 | 100    | 37.531.807.990 | 100    | 39.642.753.840 | 100    | 41.779.689.099 | 100    | 44.983.887.100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
|                                                                           | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)              | 84,14            | 85   | 90                              |                | 91     |                | 92     |                | 95     |                | 95     |                | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan                         | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 111.399.200    | 100    | 119.995.320    | 100    | 129.451.052    | 100    | 139.852.357    | 100    | 139.852.357    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD |
| 5.01 - PERENCANAAN                                                        |                                                                 |                  |      |                                 | 43.841.403.158 |        | 43.383.221.533 |        | 44.682.344.459 |        | 44.444.291.073 |        | 46.314.494.414 |                                                    |
| 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                                                                 |                  |      |                                 | 25.906.403.158 |        | 25.348.221.533 |        | 26.547.344.459 |        | 26.209.291.073 |        | 27.279.494.414 |                                                    |
| Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan penunjang perangkat daerah (%)             | 100              | 100  | 100                             | 25.906.403.158 | 100    | 25.348.221.533 | 100    | 26.547.344.459 | 100    | 26.209.291.073 | 100    | 27.279.494.414 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan      |
| 5.01.02 - PROGRAM                                                         |                                                                 |                  |      |                                 | 5.600.000.000  |        | 5.600.000.000  |        | 5.600.000.000  |        | 5.600.000.000  |        | 5.600.000.000  |                                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB             |     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                |     |                                                                |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                |     |                                                                |
| (01)                                                                                                              | (02)                                                                                                                           | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                           |     |                                                                |
| PERENCANAAN<br>,<br>PENGENDALIA<br>N DAN<br>EVALUASI<br>PEMBANGUNA<br>N DAERAH                                    |                                                                                                                                |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                |     |                                                                |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah                                                  | Persentase<br>keselarasan RPJMD<br>dengan Renstra PD<br>(%)                                                                    | 100              | 100  | 100                             | 5.600.000.00<br>0  | 100    | 5.600.000.00<br>0  | 100    | 5.600.000.00<br>0  | 100    | 5.600.000.00<br>0  | 100    | 5.600.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perencana<br>an |     |                                                                |
|                                                                                                                   | Persentase<br>keselarasan RPJMD<br>dengan RKPD (%)                                                                             | 100              | 100  | 100                             |                    |        |                    | 100    |                    |        |                    | 100    |                    |                                                                | 100 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perencana<br>an |
|                                                                                                                   | Persentase<br>Ketersediaan Data<br>Pembangunan (%)                                                                             | 64               | 66   | 68                              |                    |        |                    | 70     |                    |        |                    | 72     |                    |                                                                | 75  |                                                                |
| 5.01.03 -<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>DAN<br>SINKRONISASI<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNA<br>N DAERAH                |                                                                                                                                |                  |      |                                 | 12.335.000.0<br>00 |        | 12.435.000.0<br>00 |        | 12.535.000.0<br>00 |        | 12.635.000.0<br>00 |        | 13.435.000.0<br>00 |                                                                |     |                                                                |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan<br>bidang<br>pemerintahan<br>dan<br>pembangunan<br>manusia | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan Renja PD<br>pada Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Pembangunan<br>Manusia<br>(Persentase) | 100              | 100  | 100                             | 3.700.000.00<br>0  | 100    | 3.800.000.00<br>0  | 100    | 3.900.000.00<br>0  | 100    | 4.000.000.00<br>0  | 100    | 4.800.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perencana<br>an |     |                                                                |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan<br>bidang<br>infrastruktur<br>dan<br>kewilayahan           | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan Renja PD<br>pada Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan<br>(Persentase)           | 100              | 100  | 100                             | 4.100.000.00<br>0  | 100    | 4.100.000.00<br>0  | 100    | 4.100.000.00<br>0  | 100    | 4.100.000.00<br>0  | 100    | 4.100.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Perencana<br>an |     |                                                                |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan                                                            | Persentase<br>Keselarasan RKPD<br>dengan Renja PD<br>pada Bidang                                                               | 100              | 100  | 100                             | 4.535.000.00<br>0  | 100    | 4.535.000.00<br>0  | 100    | 4.535.000.00<br>0  | 100    | 4.535.000.00<br>0  | 100    | 4.535.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang                    |     |                                                                |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                             |                  |           | 2026                            |                     | 2027   |                     | 2028   |                     | 2029   |                     | 2030   |                     |                                                         |
|                                                                                          |                                                                                                             |                  |           | TARGET                          | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                | TARGET | PAGU                |                                                         |
| (01)                                                                                     | (02)                                                                                                        | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)                | (07)   | (08)                | (09)   | (10)                | (11)   | (12)                | (13)   | (14)                | (15)                                                    |
| bidang<br>perekonomian<br>dan sda                                                        | Perekonomian dan<br>SDA (Persentase)                                                                        |                  |           |                                 |                     |        |                     |        |                     |        |                     |        |                     | Perencana<br>an                                         |
| 5.02 -<br>KEUANGAN                                                                       |                                                                                                             |                  |           |                                 | 800.465.008.<br>609 |        | 658.636.605.<br>120 |        | 601.979.610.<br>032 |        | 600.002.583.<br>349 |        | 590.579.732.<br>503 |                                                         |
| 5.02.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                                             |                  |           |                                 | 158.000.000.<br>000 |        | 158.000.000.<br>000 |        | 158.000.000.<br>000 |        | 158.000.000.<br>000 |        | 158.000.000.<br>000 |                                                         |
| Meningkatnya<br>pemuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                              | Persentase<br>pemuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                               | 100              | 100       | 100                             | 130.000.000.<br>000 | 100    | 130.000.000.<br>000 | 100    | 130.000.000.<br>000 | 100    | 130.000.000.<br>000 | 100    | 130.000.000.<br>000 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |
| Meningkatnya<br>pemuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                              | Persentase<br>pemuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                                               | 100              | 100       | 100                             | 28.000.000.0<br>00  | 100    | 28.000.000.0<br>00  | 100    | 28.000.000.0<br>00  | 100    | 28.000.000.0<br>00  | 100    | 28.000.000.0<br>00  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |
| 5.02.02 -<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH                                |                                                                                                             |                  |           |                                 | 618.093.148.<br>984 |        | 475.264.745.<br>495 |        | 417.607.750.<br>407 |        | 414.630.723.<br>724 |        | 404.207.872.<br>878 |                                                         |
| Meningkatnya<br>tata kelola<br>anggaran                                                  | Persentase Belanja<br>Pegawai di Luar<br>Tunjangan Guru<br>yang Dialokasikan<br>melalui TKD<br>(Persentase) | 2,34             | 2,34      | 2,35                            | 1.900.000.00<br>0   | 2,4    | 1.900.000.00<br>0   | 2,45   | 1.900.000.00<br>0   | 2,5    | 1.900.000.00<br>0   | 2,55   | 1.900.000.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |
|                                                                                          | Persentase Alokasi<br>Belanja<br>Infrastruktur<br>Pelayanan Publik<br>(Persentase)                          | 32,78            | 33        | 33,1                            |                     | 33,2   |                     | 33,3   |                     | 33,4   |                     | 33,5   |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |
| Meningkatnya<br>tata kelola<br>perbendaharaan                                            | Persentase<br>Realisasi Anggaran<br>Belanja Urusan<br>Wajib Pelayanan<br>Dasar (Persentase)                 | 95,31            | 95,3<br>3 | 95,35                           | 1.200.000.00<br>0   | 95,37  | 1.200.000.00<br>0   | 95,39  | 1.200.000.00<br>0   | 95,41  | 1.200.000.00<br>0   | 95,43  | 1.200.000.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |
|                                                                                          | Persentase<br>Penurunan SILPA<br>(Persentase)                                                               | 0                | 2,5       | 2,4                             |                     | 2,3    |                     | 2,2    |                     | 2,1    |                     | 2      |                     | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |
| Meningkatnya<br>tata kelola<br>akuntansi dan<br>pelaporan                                | Persentase laporan<br>keuangan tepat<br>waktu (Persentase)                                                  | 100              | 100       | 100                             | 3.100.000.00<br>0   | 100    | 3.100.000.00<br>0   | 100    | 3.100.000.00<br>0   | 100    | 3.100.000.00<br>0   | 100    | 3.100.000.00<br>0   | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Keuangan |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      |                  |             | 2026                            |                 | 2027      |                 | 2028      |                 | 2029      |                 | 2030      |                 |                                                    |
|                                                   |                                                                      |                  |             | TARGET                          | PAGU            | TARGET    | PAGU            | TARGET    | PAGU            | TARGET    | PAGU            | TARGET    | PAGU            |                                                    |
| (01)                                              | (02)                                                                 | (03)             | (04)        | (05)                            | (06)            | (07)      | (08)            | (09)      | (10)            | (11)      | (12)            | (13)      | (14)            | (15)                                               |
| Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah          |                                                                      |                  |             |                                 | 611.893.148.984 |           | 469.064.745.495 |           | 411.407.750.407 |           | 408.430.723.724 |           | 398.007.872.878 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
| 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |                                                                      |                  |             |                                 | 12.439.160.275  |           | 12.439.160.275  |           | 12.439.160.275  |           | 12.439.160.275  |           | 12.439.160.275  |                                                    |
| Meningkatnya tata kelola aset daerah              | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)                  | 4,41             | 4,42        | 4,43                            | 12.439.160.275  | 4,44      | 12.439.160.275  | 4,45      | 12.439.160.275  | 4,46      | 12.439.160.275  | 4,47      | 12.439.160.275  | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
|                                                   | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)               | 0,05             | 1           | 1,1                             |                 | 1,2       |                 | 1,3       |                 | 1,4       |                 | 1,5       |                 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
|                                                   | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)               | 0,5              | 1           | 1,1                             |                 | 1,2       |                 | 1,3       |                 | 1,4       |                 | 1,5       |                 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
| 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                                                                      |                  |             |                                 | 11.932.699.350  |           | 12.932.699.350  |           | 13.932.699.350  |           | 14.932.699.350  |           | 15.932.699.350  |                                                    |
| Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah        | Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD (Rasio)                              | 65.5-66.5        | 66.5 - 67.5 | 67.5-68.5                       | 11.932.699.350  | 68.5-69.5 | 12.932.699.350  | 69.5-70.5 | 13.932.699.350  | 70.5-71.5 | 14.932.699.350  | 71.5-72.5 | 15.932.699.350  | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
|                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Pelayanan (Indeks)   | 90,96            | 91          | 91,25                           |                 | 91,7      |                 | 91,95     |                 | 92,2      |                 | 92,75     |                 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
|                                                   | Persentase Kepatuhan wajib pajak (%)                                 | 78               | 78,2        | 78,5                            |                 | 79        |                 | 79,35     |                 | 79,5      |                 | 79,8      |                 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
|                                                   | Jumlah objek Pajak Baru yang diterbitkan NPWPD dan/atau NOPD (Angka) | 1,353            | 1,853       | 2,353                           |                 | 2,853     |                 | 3,353     |                 | 3,853     |                 | 4,353     |                 | Dinas/ Badan yang menangani Bidang Keuangan        |
| 5.03 - KEPEGAWAIAN                                |                                                                      |                  |             |                                 | 34.773.303.710  |           | 36.080.311.940  |           | 39.465.508.040  |           | 43.186.780.090  |           | 47.137.138.340  |                                                    |
| 5.03.01 - PROGRAM                                 |                                                                      |                  |             |                                 | 28.275.843.470  |           | 29.624.900.000  |           | 32.764.645.000  |           | 36.244.206.450  |           | 40.194.564.700  |                                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                           |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                |
|                                                                     |                                                                                           |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                |
| (01)                                                                | (02)                                                                                      | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                           |
| PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAH<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA |                                                                                           |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                                |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah       | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                           | 100              | 100       | 100                             | 28.275.843.4<br>70 | 100    | 29.624.900.0<br>00 | 100    | 32.764.645.0<br>00 | 100    | 36.244.206.4<br>50 | 100    | 40.194.564.7<br>00 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepegawai<br>an |
| 5.03.02 -<br>PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN<br>DAERAH                       |                                                                                           |                  |           |                                 | 6.497.460.24<br>0  |        | 6.455.411.94<br>0  |        | 6.700.863.04<br>0  |        | 6.942.573.64<br>0  |        | 6.942.573.64<br>0  |                                                                |
| Meningkatkan<br>pengelolaan<br>kepegawaian<br>daerah                | Persentase<br>perencanaan<br>kebutuhan yang<br>sesuai dengan<br>formasi (%)               | 84               | 85        | 86                              | 6.497.460.24<br>0  | 87     | 6.455.411.94<br>0  | 88     | 6.700.863.04<br>0  | 89     | 6.942.573.64<br>0  | 90     | 6.942.573.64<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepegawai<br>an |
|                                                                     | Persentase ASN<br>yang ditingkatkan<br>kompetensinya (%)                                  | 0                | 21,3<br>1 | 38,8                            |                    | 56,28  |                    | 65,03  |                    | 73,77  |                    | 82,51  |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepegawai<br>an |
|                                                                     | Persentase<br>Pengembangan<br>Karir ASN sesuai<br>dengan<br>Kompetensinya<br>(Persentase) | 91,48            | 97,6<br>9 | 98,79                           |                    | 99,34  |                    | 99,78  |                    | 99,89  |                    | 100    |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepegawai<br>an |
|                                                                     | Persentase Pegawai<br>dengan SKP<br>Bernilai Baik<br>(Persentase)                         | 98               | 98,3      | 98,5                            |                    | 98,8   |                    | 99     |                    | 99,3   |                    | 99,5   |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Kepegawai<br>an |
| 5.04 -<br>PENDIDIKAN<br>DAN<br>PELATIHAN                            |                                                                                           |                  |           |                                 | 6.653.210.98<br>0  |        | 6.924.238.98<br>0  |        | 7.212.884.61<br>0  |        | 7.520.236.98<br>0  |        | 7.520.236.98<br>0  |                                                                |
| 5.04.02 -<br>PROGRAM<br>PENGEMBANG<br>AN SUMBER<br>DAYA MANUSIA     |                                                                                           |                  |           |                                 | 6.653.210.98<br>0  |        | 6.924.238.98<br>0  |        | 7.212.884.61<br>0  |        | 7.520.236.98<br>0  |        | 7.520.236.98<br>0  |                                                                |
| Meningkatnya<br>pengembangan<br>kompetensi<br>dasar,                | Persentase ASN<br>yang Mendapatkan<br>Pengembangan<br>Kompetensi Dasar,<br>Manajerial,    | 94               | 95        | 96                              | 6.653.210.98<br>0  | 97     | 6.924.238.98<br>0  | 98     | 7.212.884.61<br>0  | 99     | 7.520.236.98<br>0  | 100    | 7.520.236.98<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Pendidikan      |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                          |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                      |
|                                                                                                                                               |                                                                          |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                      |
| (01)                                                                                                                                          | (02)                                                                     | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                 |
| manajerial,<br>fungsional dan<br>teknis                                                                                                       | Fungsional, dan<br>Teknis (%)                                            |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | dan<br>Pelatihan                                                                     |
| 5.05 -<br>PENELITIAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN                                                                                               |                                                                          |                  |      |                                 | 5.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |                                                                                      |
| 5.05.03 -<br>PROGRAM<br>RISET DAN<br>INOVASI<br>DAERAH                                                                                        |                                                                          |                  |      |                                 | 5.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |        | 6.420.000.00<br>0  |                                                                                      |
| Meningkatnya<br>kajian yang<br>termanfaatkan<br>sebagai<br>kebijakan<br>pembangunan<br>daerah dalam<br>penyelesaian<br>permasalahan<br>daerah | Persentase produk<br>inovasi yang<br>dimanfaatkan (%)                    | -                | -    | 52                              | 5.420.000.00<br>0  | 54     | 6.420.000.00<br>0  | 56     | 6.420.000.00<br>0  | 57     | 6.420.000.00<br>0  | 60     | 6.420.000.00<br>0  | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Penelitian<br>dan<br>Pengemba<br>ngan |
|                                                                                                                                               | persentase hasil<br>kajian yg<br>diterapkan dalam<br>bentuk regulasi (%) | 50               | 50   | 52                              |                    | 54     |                    | 56     |                    | 57     |                    | 60     |                    | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Penelitian<br>dan<br>Pengemba<br>ngan |
| 6.01 -<br>INSPEKTORAT<br>DAERAH                                                                                                               |                                                                          |                  |      |                                 | 59.528.541.6<br>78 |        | 64.548.828.4<br>27 |        | 70.079.682.7<br>93 |        | 76.008.938.3<br>97 |        | 83.112.483.8<br>56 |                                                                                      |
| 6.01.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHA<br>N DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA                                                  |                                                                          |                  |      |                                 | 45.839.414.9<br>57 |        | 48.348.609.4<br>22 |        | 51.045.334.4<br>47 |        | 53.920.169.3<br>21 |        | 56.017.116.6<br>19 |                                                                                      |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                                                                 | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)          | 100              | 100  | 100                             | 45.839.414.9<br>57 | 100    | 48.348.609.4<br>22 | 100    | 51.045.334.4<br>47 | 100    | 53.920.169.3<br>21 | 100    | 56.017.116.6<br>19 | Dinas/Bad<br>an yang<br>menangani<br>Bidang<br>Inspektora<br>t Daerah                |
| 6.01.02 -<br>PROGRAM<br>PENYELENGGA<br>RAAN<br>PENGAWASAN                                                                                     |                                                                          |                  |      |                                 | 8.936.848.42<br>0  |        | 10.710.157.3<br>62 |        | 12.819.870.5<br>05 |        | 15.256.415.9<br>11 |        | 18.800.479.6<br>62 |                                                                                      |





[illegible]

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                              |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                         |                                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                    | (02)                                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pasar Kemis | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pasar Kemis (%) | 100              | 100  | 100                             | 18.092.000.000 | 100    | 18.092.000.000 | 100    | 18.092.000.000 | 100    | 18.092.000.000 | 100    | 18.092.000.000 | Kecamatan Pasar Kemis                              |
|                                                                         |                                                                              |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Sindang Sari                             |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Balaraja    | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Balaraja (%)    | 100              | 100  | 100                             | 11.386.805.929 | 100    | 12.070.014.285 | 100    | 12.794.215.142 | 100    | 13.561.868.050 | 100    | 14.375.580.133 | Kecamatan Balaraja                                 |
|                                                                         |                                                                              |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Balaraja                                 |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kresek      | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kresek (%)      | 100              | 100  | 100                             | 8.000.000.000  | 100    | 8.000.000.000  | 100    | 8.000.000.000  | 100    | 8.000.000.000  | 100    | 8.000.000.000  | Kecamatan Kresek                                   |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang Kecamatan Kronjo                       | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kronjo (%)      | 100              | 100  | 100                             | 8.031.000.000  | 100    | 8.192.000.000  | 100    | 8.320.000.000  | 100    | 8.446.075.000  | 100    | 8.575.301.875  | Kecamatan Kronjo                                   |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Mauk        | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Mauk (%)        | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | Kecamatan Mauk                                     |
|                                                                         |                                                                              |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Mauk Timur                               |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Rajeg       | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Rajeg (%)       | 100              | 100  | 100                             | 11.767.938.000 | 100    | 11.727.938.000 | 100    | 11.711.938.000 | 100    | 11.814.608.000 | 100    | 11.814.608.000 | Kecamatan Rajeg                                    |
|                                                                         |                                                                              |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Sukatani                                 |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang                                        | Persentase pemenuhan penunjang urusan                                        | 100              | 100  | 100                             | 11.785.310.942 | 100    | 12.307.746.315 | 100    | 12.994.047.938 | 100    | 13.574.996.523 | 100    | 14.333.222.789 | Kecamatan Sepatan                                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                            |                  |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                       |                                                                            |                  |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                  | (02)                                                                       | (03)             | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| perangkat daerah Kecamatan Sepatan                                    | pemerintahan Kecamatan Sepatan (%)                                         |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                    |
|                                                                       | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sepatan (%)                       | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Kelurahan Sepatan                                  |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Teluknaga | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Teluknaga (%) | 98,7             | 100  | 100                             | 11.725.000.000 | 100    | 12.025.000.000 | 100    | 12.125.000.000 | 100    | 12.300.000.000 | 100    | 12.350.000.000 | Kecamatan Teluknaga                                |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Cisoka    | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cisoka (%)    | 100              | 100  | 100                             | 9.113.623.929  | 100    | 9.335.889.148  | 100    | 9.522.475.822  | 100    | 9.625.000.000  | 100    | 9.635.000.000  | Kecamatan Cisoka                                   |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pakuhaji  | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pakuhaji (%)  | 100              | 100  | 100                             | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | 100    | 10.000.000.000 | Kecamatan Pakuhaji                                 |
|                                                                       |                                                                            |                  |      |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Pakuhaji                                 |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kosambi   | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kosambi (%)   | 100              | 100  | 100                             | 19.613.016.403 | 100    | 19.634.368.742 | 100    | 19.671.667.903 | 100    | 19.697.717.903 | 100    | 19.700.717.742 | Kecamatan Kosambi                                  |
|                                                                       | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi (%)                       | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Kelurahan Kosambi Barat                            |
|                                                                       | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi (%)                       | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Kelurahan Salembara n Jaya                         |
|                                                                       | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kosambi (%)                       | 100              | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Keluaraha n Dadap                                  |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |                  |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                             |                  |        | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030             |                |                                                    |
|                                                                        |                                                                             |                  |        | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET           | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                   | (02)                                                                        | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)             | (14)           | (15)                                               |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Pagedangan | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan (%) | 100              | 100    | 100                             | 15.106.756.212 | 100    | 15.211.756.212 | 100    | 15.416.756.212 | 100    | 15.621.756.212 | 100              | 16.326.756.212 | Kecamatan Pagedangan                               |
|                                                                        | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Pagedangan (%) | 100              | 100    | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Kelurahan Medang |                |                                                    |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Jambe      | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Jambe (%)      | 90,00            | 100,00 | 90,00                           | 8.557.532.466  | 91,00  | 8.739.585.597  | 91,50  | 9.352.068.436  | 92,00  | 9.563.804.270  | 92,50            | 10.231.284.763 | Kecamatan Jambe                                    |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Jayanti    | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Jayanti (%)    | 100              | 100    | 100                             | 6.885.029.107  | 100    | 7.097.509.844  | 100    | 7.384.775.158  | 100    | 7.542.815.158  | 100              | 7.645.600.445  | Kecamatan Jayanti                                  |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kemiri     | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Kemiri (%)     | 100              | 100    | 100                             | 8.650.000.000  | 100    | 8.650.000.000  | 100    | 8.650.000.000  | 100    | 8.650.000.000  | 100              | 8.650.000.000  | Kecamatan Kemiri                                   |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukadiri   | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sukadiri (%)                       | 100              | 100    | 100                             | 10.599.000.000 | 100    | 10.676.000.000 | 100    | 10.780.000.000 | 100    | 10.890.000.000 | 100              | 10.975.000.000 | Kecamatan Sukadiri                                 |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Cisauk     | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Cisauk (%)     | 100              | 100    | 100                             | 10.599.000.000 | 100    | 10.676.000.000 | 100    | 10.780.000.000 | 100    | 10.890.000.000 | 100              | 10.975.000.000 | Kecamatan Cisauk                                   |
|                                                                        |                                                                             |                  |        |                                 |                |        |                |        |                |        |                |                  |                | Kelurahan Cisauk                                   |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat                             | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan                          | 100              | 100    | 100                             | 7.898.541.351  | 100    | 7.998.137.547  | 100    | 8.295.685.571  | 100    | 8.298.582.868  | 100              | 8.141.582.868  | Kecamatan Sepatan Timur                            |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                               |                  |      | 2026                            |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                 | 2030   |                 |                                                    |
|                                                                          |                                                                               |                  |      | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            |                                                    |
| (01)                                                                     | (02)                                                                          | (03)             | (04) | (05)                            | (06)            | (07)   | (08)            | (09)   | (10)            | (11)   | (12)            | (13)   | (14)            | (15)                                               |
| daerah<br>Kecamatan<br>Sepatan Timur                                     | Kecamatan Sepatan Timur (%)                                                   |                  |      |                                 |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 |                                                    |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sindang Jaya | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Sindang Jaya (%)                     | 100              | 100  | 100                             | 9.808.000.000   | 100    | 9.179.000.000   | 100    | 9.352.000.000   | 100    | 9.578.075.000   | 100    | 9.307.301.875   | Kecamatan Sindang Jaya                             |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Kelapa Dua   | Persentase pemenuhan penunjang Kecamatan Kelapa Dua (%)                       | 100              | 100  | 100                             | 22.352.183.485  | 100    | 22.799.227.154  | 100    | 23.255.211.697  | 100    | 23.720.315.931  | 100    | 24.194.722.250  | Kecamatan Kelapa Dua                               |
|                                                                          |                                                                               |                  |      |                                 |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | Kelurahan Kelapa Dua                               |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Solear       | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Solear (%)       | 100              | 100  | 100                             | 9.000.000.000   | 100    | 9.000.000.000   | 100    | 9.000.000.000   | 100    | 9.000.000.000   | 100    | 9.000.000.000   | Kecamatan Solear                                   |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Mekar Baru   | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Mekar Baru (%)   | 100              | 100  | 100                             | 9.086.170.202   | 100    | 9.279.156.651   | 100    | 9.331.041.622   | 100    | 9.383.180.517   | 100    | 9.436.686.208   | Kecamatan Mekar Baru                               |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Sukamulya    | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Sukamulya (%)    | 100              | 100  | 100                             | 8.338.147.351   | 100    | 8.475.351.867   | 100    | 8.729.612.413   | 100    | 9.893.796.225   | 100    | 10.190.610.101  | Kecamatan Sukamulya                                |
| Meningkatnya pemenuhan penunjang perangkat daerah Kecamatan Gunung Kaler | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Kecamatan Gunung Kaler (%) | 100              | 100  | 100                             | 7.435.000.000   | 100    | 7.785.000.000   | 100    | 8.135.000.000   | 100    | 8.485.000.000   | 100    | 8.685.000.000   | Kecamatan Gunung Kaler                             |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN                      |                                                                               |                  |      |                                 | 153.742.660.918 |        | 157.693.236.699 |        | 161.738.654.079 |        | 165.677.001.194 |        | 170.326.188.410 |                                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |                        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                               |                  |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029                   |                    | 2030   |                    |                                                    |
|                                                                  |                                                                                               |                  |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET                 | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                    |
| (01)                                                             | (02)                                                                                          | (03)             | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)                   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                               |
| PELAYANAN<br>PUBLIK                                              |                                                                                               |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    |                        |                    |        |                    |                                                    |
| Meningkatkan<br>pelayanan<br>publik di<br>kecamatan<br>Tigaraksa | Prosentase<br>infrastruktur dasar<br>dalam kondisi baik<br>Kecamatan<br>Tigaraksa (%)         | 70               | 75   | 80                              | 5.000.000.00<br>0  | 85     | 5.000.000.00<br>0  | 90     | 5.000.000.00<br>0  | 95                     | 5.000.000.00<br>0  | 100    | 5.000.000.00<br>0  | Kecamatan<br>Tigaraksa                             |
|                                                                  | Prosentase<br>terpenuhinya<br>PATEN sesuai<br>dengan standar<br>Kecamatan<br>Tigaraksa (%)    | 100              | 100  | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kecamatan<br>Tigaraksa |                    |        |                    |                                                    |
|                                                                  |                                                                                               |                  |      |                                 |                    |        |                    |        |                    | Kelurahan<br>Tigaraksa |                    |        |                    |                                                    |
| Meningkatkan<br>pelayanan<br>publik di<br>kecamatan<br>Cikupa    | Prosentase<br>infrastruktur dasar<br>dalam kondisi baik<br>Kecamatan Cikupa<br>(%)            | 95               | 95   | 98                              | 12.474.962.7<br>52 | 99     | 13.722.459.0<br>27 | 100    | 15.094.704.9<br>29 | 100                    | 16.604.175.4<br>22 | 100    | 18.264.592.9<br>65 | Kecamatan<br>Cikupa                                |
|                                                                  | Prosentase<br>terpenuhinya<br>PATEN sesuai<br>dengan standar<br>Kecamatan Cikupa<br>(%)       | 100              | 100  | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kecamatan<br>Cikupa    |                    |        |                    |                                                    |
|                                                                  | Prosentase<br>terpenuhinya<br>PATEN sesuai<br>dengan standar<br>Kecamatan Cikupa<br>(%)       | 100              | 100  | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kelurahan<br>Sukamulya |                    |        |                    |                                                    |
|                                                                  | Prosentase<br>terpenuhinya<br>PATEN sesuai<br>dengan standar<br>Kecamatan Cikupa<br>(%)       | 100              | 100  | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kelurahan<br>Bunder    |                    |        |                    |                                                    |
| Meningkatkan<br>pelayanan<br>publik di<br>Kecamatan<br>Panongan  | Persentase<br>pemenuhan PATEN<br>sesuai dengan<br>standar Kecamatan<br>Panongan (%)           | 93               | 94   | 95                              | 3.429.712.50<br>0  | 96     | 3.930.198.12<br>5  | 97     | 4.430.708.03<br>1  | 98                     | 4.931.243.43<br>2  | 99     | 5.431.805.60<br>4  | Kecamatan<br>Panongan                              |
|                                                                  | Persentase<br>pemeliharaan<br>Fasilitas Umum<br>yang terpelihara<br>Kecamatan<br>Panongan (%) | 85               | 86   | 87                              |                    | 88     |                    | 89     |                    | 90                     |                    | 91     |                    | Kecamatan<br>Panongan                              |
| Meningkatkan<br>pelayanan<br>publik di<br>kecamatan<br>Curug     | Prosentase<br>infrastruktur dasar<br>dalam kondisi baik<br>Kecamatan Curug<br>(%)             | 98,15            | 98,3 | 98                              | 5.276.288.20<br>0  | 98,1   | 5.931.288.20<br>0  | 98,15  | 6.586.288.20<br>0  | 98,2                   | 7.241.288.20<br>0  | 98,25  | 7.896.288.20<br>0  | Kecamatan<br>Curug                                 |

[illegible]



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                               |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                   |                   |                                                    |
|                                                        |                                                                               |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                 | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                   | (02)                                                                          | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                   | (14)              | (15)                                               |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pasar Kemis | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pasar Kemis (%)   | 100              | 100  | 100                             | 5.000.000.00<br>0 | 100    | 5.000.000.00<br>0 | 100    | 5.000.000.00<br>0 | 100    | 5.000.000.00<br>0 | 100                    | 5.000.000.00<br>0 | Kecamatan Pasar Kemis                              |
|                                                        | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pasar Kemis (%) | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kecamatan Pasar Kemis  |                   |                                                    |
|                                                        |                                                                               |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kelurahan Sindang Sari |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Balaraja    | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Balaraja (%)      | 88               | 100  | 100                             | 3.000.000.00<br>0 | 100    | 3.100.000.00<br>0 | 100    | 3.400.000.00<br>0 | 100    | 3.600.000.00<br>0 | 100                    | 4.000.000.00<br>0 | Kecamatan Balaraja                                 |
|                                                        | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Balaraja (%)    | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kecamatan Balaraja     |                   |                                                    |
|                                                        |                                                                               |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kelurahan Balaraja     |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kresek      | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kresek (%)        | 100              | 100  | 100                             | 4.000.000.00<br>0 | 100    | 4.000.000.00<br>0 | 100    | 4.000.000.00<br>0 | 100    | 4.000.000.00<br>0 | 100                    | 4.000.000.00<br>0 | Kecamatan Kresek                                   |
|                                                        | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kresek (%)      | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kecamatan Kresek       |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kronjo      | Persentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kronjo (%)      | 100              | 100  | 100                             | 3.560.000.00<br>0 | 100    | 3.560.000.00<br>0 | 100    | 3.560.000.00<br>0 | 100    | 3.560.000.00<br>0 | 100                    | 3.560.000.00<br>0 | Kecamatan Kronjo                                   |
|                                                        | Persentrase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kronjo (%)       | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kecamatan Kronjo       |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Mauk        | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mauk (%)          | 100              | 100  | 100                             | 7.054.500.00<br>0 | 100    | 7.054.500.00<br>0 | 100    | 7.054.500.00<br>0 | 100    | 7.054.500.00<br>0 | 100                    | 7.054.500.00<br>0 | Kecamatan Mauk                                     |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                            |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                              |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                       |                   |                                                    |
|                                                       |                                                                              |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                     | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                  | (02)                                                                         | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                       | (14)              | (15)                                               |
| kecamatan<br>Cisoka                                   | Kecamatan Cisoka (%)                                                         |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                            |                   | Kecamatan<br>Cisoka                                |
|                                                       | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka (%)     | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100                        |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pakuhaji   | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pakuhaji (%)     | 100              | 100  | 100                             | 4.500.000.00<br>0 | 100    | 4.500.000.00<br>0 | 100    | 4.500.000.00<br>0 | 100    | 4.500.000.00<br>0 | 100                        | 4.500.000.00<br>0 | Kecamatan<br>Pakuhaji                              |
|                                                       | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pakuhaji (%)   | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kecamatan<br>Pakuhaji      |                   |                                                    |
|                                                       |                                                                              |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kelurahan<br>Pakuhaji      |                   |                                                    |
|                                                       |                                                                              |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                            |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kosambi    | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kosambi (%)      | 100              | 100  | 100                             | 5.213.954.51<br>0 | 100    | 5.213.954.51<br>0 | 100    | 5.213.954.51<br>0 | 100    | 5.213.954.51<br>0 | 100                        | 5.213.954.51<br>0 | Kecamatan<br>Kosambi                               |
|                                                       | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kosambi (%)    | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kecamatan<br>Kosambi       |                   |                                                    |
|                                                       |                                                                              |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   | Kelurahan<br>Kosambi Barat |                   |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Pagedangan | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Pagedangan (%)   | 90               | 92   | 93                              | 5.250.000.00<br>0 | 94     | 5.280.000.00<br>0 | 95     | 5.300.000.00<br>0 | 96     | 5.330.000.00<br>0 | 97                         | 5.370.000.00<br>0 | Kecamatan<br>Pagedangan                            |
|                                                       | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan (%) | 89,5             | 89,7 | 89,9                            |                   | 90     |                   | 90,3   |                   | 90,5   |                   | 90,7                       |                   | Kecamatan<br>Pagedangan                            |
|                                                       | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Pagedangan (%) | 89,5             | 89,7 | 89,9                            |                   | 90     |                   | 90,3   |                   | 90,5   |                   | 90,7                       |                   | Kelurahan<br>Medang                                |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                            |                  |       | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                    |
|                                                     |                                                                            |                  |       | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                    |
| (01)                                                | (02)                                                                       | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                                               |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Jambe    | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe (%)      | 90,00            | 90,00 | 90,05                           | 2.500.000.000 | 90,15  | 2.500.000.000 | 90,25  | 2.500.000.000 | 90,40  | 2.500.000.000 | 90,50  | 2.500.000.000 | Kecamatan Jambe                                    |
|                                                     | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe (%)    | 89,50            | 89,50 | 89,55                           |               | 90,00  |               | 90,11  |               | 90,15  |               | 90,25  |               | Kecamatan Jambe                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Jayanti  | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jayanti (%)    | 95               | 98    | 98                              | 4.046.728.240 | 100    | 4.220.540.091 | 100    | 4.432.342.205 | 100    | 4.434.342.205 | 100    | 4.435.444.405 | Kecamatan Jayanti                                  |
|                                                     | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jayanti (%)  | 100              | 100   | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Kecamatan Jayanti                                  |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kemiri   | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kemiri (%)     | 100              | 100   | 100                             | 5.000.000.000 | 100    | 5.000.000.000 | 100    | 5.000.000.000 | 100    | 5.000.000.000 | 100    | 5.000.000.000 | Kecamatan Kemiri                                   |
|                                                     | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kemiri (%)   | 100              | 100   | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Kecamatan Kemiri                                   |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukadiri | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukadiri (%)   | 91               | 92    | 93                              | 3.000.000.000 | 94     | 3.000.000.000 | 95     | 3.000.000.000 | 96     | 3.000.000.000 | 97     | 3.000.000.000 | Kecamatan Sukadiri                                 |
|                                                     | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukadiri (%) | 100              | 100   | 100                             |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Kecamatan Sukadiri                                 |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Cisauk   | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)                             | 85,2             | 85,5  | 85,75                           | 4.675.742.000 | 86     | 4.985.000.000 | 86,2   | 5.171.080.000 | 86,5   | 5.291.080.000 | 86,7   | 5.591.080.000 | Kecamatan Cisauk                                   |
|                                                     | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisauk (%)     | 95               | 98    | 98                              |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Kecamatan Cisauk                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                 |                  |           | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                    |
|                                                          |                                                                                 |                  |           | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                    |
| (01)                                                     | (02)                                                                            | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                               |
|                                                          | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisauk (%)        | 100              | 100       | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kecamatan Cisauk                                   |
|                                                          |                                                                                 |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | Kelurahan Cisauk                                   |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sepatan Timur | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sepatan Timur (%)   | 98,15            | 98,3<br>0 | 98,00                           | 3.709.836.70<br>0  | 98,10  | 3.709.722.00<br>0  | 98,15  | 3.710.701.50<br>0  | 98,20  | 3.810.717.45<br>0  | 98,3   | 4.056.080.12<br>0  | Kecamatan Sepatan Timur                            |
|                                                          | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sepatan Timur (%) | 83,00            | 83,5<br>0 | 84,00                           |                    | 84,50  |                    | 85,00  |                    | 85,50  |                    | 86,0   |                    | Kecamatan Sepatan Timur                            |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sindang Jaya  | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sindang Jaya (%)    | 60               | 64        | 66                              | 6.030.000.00<br>0  | 68     | 6.050.000.00<br>0  | 70     | 6.050.000.00<br>0  | 75     | 6.050.000.00<br>0  | 80     | 6.050.000.00<br>0  | Kecamatan Sindang Jaya                             |
|                                                          | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sindang Jaya (%)  | 100              | 100       | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kecamatan Sindang Jaya                             |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Kelapa Dua    | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Kelapa Dua (%)      | 60               | 65        | 70                              | 15.562.727.5<br>20 | 85     | 15.873.982.0<br>70 | 90     | 16.191.461.7<br>12 | 95     | 16.515.290.9<br>46 | 95     | 16.845.596.7<br>65 | Kecamatan Kelapa Dua                               |
|                                                          | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Kelapa Dua (%)    | 100              | 100       | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kecamatan Kelapa Dua                               |
|                                                          |                                                                                 |                  |           |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Solear        | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Solear (%)          | 100              | 100       | 100                             | 5.000.000.00<br>0  | 100    | 5.000.000.00<br>0  | 100    | 5.000.000.00<br>0  | 100    | 5.000.000.00<br>0  | 100    | 5.000.000.00<br>0  | Kecamatan Solear                                   |
|                                                          | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar                             | 100              | 100       | 100                             |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | 100    |                    | Kecamatan Solear                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |                        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                        |                  |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030                   |                |                                                    |
|                                                                             |                                                                                        |                  |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET                 | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                   | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)                   | (14)           | (15)                                               |
|                                                                             | Kecamatan Solear (%)                                                                   |                  |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                |                        |                |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Mekar Baru                       | Persentase pemenuhan PATEN sesuai dengan standar (%)                                   | 60               | 63    | 66                              | 5.302.805.426  | 69     | 5.329.319.453  | 72     | 5.355.966.050  | 75     | 5.382.745.881  | 78                     | 5.409.659.610  | Kecamatan Mekar Baru                               |
|                                                                             | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Mekar Baru (%)             | 55               | 60    | 65                              |                | 70     |                | 75     |                | 80     |                | 85                     |                | Kecamatan Mekar Baru                               |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Sukamulya                        | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Sukamulya (%)              | 100              | 100   | 100                             | 7.287.616.270  | 100    | 7.651.997.083  | 100    | 7.881.556.995  | 100    | 8.118.003.704  | 100                    | 8.361.543.814  | Kecamatan Sukamulya                                |
|                                                                             | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Sukamulya (%)            | 100              | 100   | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Kecamatan Sukamulya    |                |                                                    |
| Meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Gunung Kaler                     | Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler (%)           | 100              | 100   | 100                             | 4.500.000.000  | 100    | 4.500.000.000  | 100    | 4.500.000.000  | 100    | 4.500.000.000  | 100                    | 4.500.000.000  | Kecamatan Gunung Kaler                             |
|                                                                             | Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler (%)         | 100              | 100   | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | Kecamatan Gunung Kaler |                |                                                    |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                |                                                                                        |                  |       |                                 | 77.821.821.859 |        | 80.937.996.160 |        | 84.544.310.017 |        | 86.885.668.345 |                        | 89.302.009.715 |                                                    |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Tigaraksa | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Tigaraksa (%) | 85,00            | 87,00 | 90,00                           | 2.300.000.000  | 100,00 | 2.600.000.000  | 100,00 | 2.900.000.000  | 100,00 | 2.900.000.000  | 100,00                 | 3.000.000.000  | Kecamatan Tigaraksa                                |
|                                                                             |                                                                                        |                  |       |                                 |                |        |                |        |                |        |                |                        |                | Kelurahan Tigaraksa                                |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan                               | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat                                           | 85,00            | 87,00 | 88,00                           | 4.054.333.630  | 90,00  | 4.459.766.993  | 92,00  | 4.905.743.692  | 100,00 | 5.396.318.061  | 100,00                 | 5.935.949.867  | Kecamatan Cikupa                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                          |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                    |                        |
|                                                                                              |                                                                                                          |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                    |                        |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                     | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                               |                        |
| kelurahan<br>Kecamatan<br>Cikupa                                                             | pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Cikupa<br>(%)                                                             |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |                        |
|                                                                                              | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Cikupa<br>(%)    | 78,00            | 85,0<br>0 | 88,00                           |                   | 90,00  |                   | 92,00  |                   | 94,00  |                   | 96,00  |                   |                                                    | Kelurahan<br>Sukamulya |
|                                                                                              | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Cikupa<br>(%)    | 78,00            | 85,0<br>0 | 88,00                           |                   | 90,00  |                   | 92,00  |                   | 94,00  |                   | 96,00  |                   |                                                    | Kelurahan<br>Bunder    |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Panongan | Persentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaan Kec.<br>Panongan (%) | 28,57            | 80,0<br>0 | 80,50                           | 2.716.318.23<br>7 | 81,00  | 2.800.541.30<br>8 | 81,50  | 2.888.975.53<br>3 | 82,00  | 2.981.831.47<br>0 | 82,5   | 3.079.330.20<br>3 | Kecamatan<br>Panongan                              |                        |
|                                                                                              | Persentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaan Kec.<br>Panongan (%) | 28,57            | 80        | 80,5                            |                   | 81     |                   | 81,5   |                   | 82     |                   | 82     |                   | Keluaraha<br>n Mekar<br>Bakti                      |                        |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Curug    | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Curug<br>(%)     | 79               | 80        | 80,5                            | 3.805.689.00<br>0 | 81     | 4.520.689.00<br>0 | 81,5   | 5.235.689.00<br>0 | 82     | 5.950.689.00<br>0 | 82,5   | 6.665.689.00<br>0 | Kecamatan<br>Curug                                 |                        |
|                                                                                              | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Curug<br>(%)     | 79               | 80        | 80,5                            |                   | 81     |                   | 81,5   |                   | 82     |                   | 82,5   |                   | Kelurahan<br>Sukabakti                             |                        |
|                                                                                              | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Curug<br>(%)     | 79               | 80        | 80,5                            |                   | 81     |                   | 81,5   |                   | 82     |                   | 82,5   |                   | Kelurahan<br>Binong                                |                        |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                          |                  |        | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                    |
|                                                                               |                                                                                          |                  |        | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                    |
| (01)                                                                          | (02)                                                                                     | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                                               |
|                                                                               | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Curug (%)       | 79               | 80     | 80,5                            |               | 81     |               | 81,5   |               | 82     |               | 82,5   |               | Kelurahan Curug Kulon                              |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Legok       | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Legok (%)       | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 2.640.000.000 | 100,00 | 2.955.000.000 | 100,00 | 2.955.000.000 | 100,00 | 2.955.000.000 | 100,00 | 2.955.000.000 | Kecamatan Legok                                    |
|                                                                               |                                                                                          |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kelurahan Babakan                                  |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Pasar Kemis | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Pasar Kemis (%) | 85,00            | 85,00  | 85,00                           | 3.700.000.000 | 85,00  | 3.700.000.000 | 85,00  | 3.700.000.000 | 85,00  | 3.700.000.000 | 85,00  | 3.700.000.000 | Kecamatan Pasar Kemis                              |
|                                                                               |                                                                                          |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kelurahan Sindang Sari                             |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Balaraja    | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Balaraja (%)    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 3.783.744.624 | 100,00 | 4.010.769.301 | 100,00 | 4.251.415.459 | 100,00 | 4.506.500.387 | 100,00 | 4.776.890.410 | Kecamatan Balaraja                                 |
|                                                                               |                                                                                          |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kelurahan Balaraja                                 |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kresek      | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Kresek (%)      | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | Kecamatan Kresek                                   |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kronjo      | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Kronjo (%)      | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 1.720.000.000 | 100,00 | 1.720.000.000 | 100,00 | 1.720.000.000 | 100,00 | 1.720.000.000 | 100,00 | 1.720.000.000 | Kecamatan Kronjo                                   |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                       | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember                            | 85,00            | 85,00  | 85,00                           | 1.635.000.000 | 85,00  | 2.366.000.000 | 85,00  | 2.366.000.000 | 85,00  | 2.366.000.000 | 85,00  | 2.366.000.000 | Kecamatan Mauk                                     |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                        |                  |        | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                    |
|                                                                                               |                                                                                        |                  |        | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                    |
| (01)                                                                                          | (02)                                                                                   | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                                               |
| Kecamatan<br>Mauk                                                                             | dayaa Kec. Mauk (%)                                                                    |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kelurahan<br>Mauk<br>Timur                         |
|                                                                                               |                                                                                        |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                                    |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Rajeg     | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Rajeg (%)     | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 2.940.000.000 | 100,00 | 2.940.000.000 | 100,00 | 3.240.000.000 | 100,00 | 3.255.000.000 | 100,00 | 3.255.000.000 | Kecamatan<br>Rajeg                                 |
|                                                                                               |                                                                                        |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kelurahan<br>Sukatani                              |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Sepatan   | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Sepatan (%)   | 90,00            | 90,00  | 90,00                           | 2.531.377.409 | 90,00  | 2.657.946.279 | 90,00  | 2.790.843.593 | 90,00  | 2.930.385.773 | 90,00  | 3.076.905.061 | Kecamatan<br>Sepatan                               |
|                                                                                               | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Sepatan (%)   | 85               | 90     | 90                              |               | 90     |               | 90     |               | 90     |               | 90     |               | Kelurahan<br>Sepatan                               |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Teluknaga | Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Kec. Teluknaga (%) | 99,98            | 100,00 | 100,00                          | 1.000.000.000 | 100,00 | 1.100.000.000 | 100,00 | 1.100.000.000 | 100,00 | 1.100.000.000 | 100,00 | 1.100.000.000 | Kecamatan<br>Teluknaga                             |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Cisoka    | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Cisoka (%)    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 2.500.000.000 | 100,00 | 2.500.000.000 | 100,00 | 2.500.000.000 | 100,00 | 2.500.000.000 | 100,00 | 2.500.000.000 | Kecamatan<br>Cisoka                                |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Pakuhaji  | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Pakuhaji (%)  | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | 100,00 | 2.000.000.000 | Kecamatan<br>Pakuhaji                              |
|                                                                                               |                                                                                        |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                                                    |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat                                                    | Prosentase kelompok masyarakat yang                                                    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 4.605.003.207 | 100,00 | 4.019.241.271 | 100,00 | 4.655.003.207 | 100,00 | 4.570.003.207 | 100,00 | 4.705.003.207 | Kecamatan<br>Kosambi                               |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                  |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                           |                  |            | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                             |                   |                                                    |
|                                                                                                |                                                                                                           |                  |            | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                           | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                                                           | (02)                                                                                                      | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                             | (14)              | (15)                                               |
| desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Kosambi                                                  | mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Kosambi<br>(%)                                                 |                  |            |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                  |                   |                                                    |
|                                                                                                | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Kosambi<br>(%)    | 100              | 100        | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kelurahan<br>Kosambi<br>Barat    |                   |                                                    |
|                                                                                                | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Kosambi<br>(%)    | 100              | 100        | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kelurahan<br>Salembara<br>n Jaya |                   |                                                    |
|                                                                                                | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Kosambi<br>(%)    | 100              | 100        | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Keluaraha<br>n Dadap             |                   |                                                    |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Pagedangan | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec.<br>Pagedangan (%) | 88               | 90         | 91                              | 3.000.000.00<br>0 | 92     | 3.000.000.00<br>0 | 93     | 3.000.000.00<br>0 | 94     | 3.000.000.00<br>0 | 95                               | 3.000.000.00<br>0 | Kecamatan<br>Pagedanga<br>n                        |
|                                                                                                | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec.<br>Pagedangan (%) | 100              | 100        | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Kelurahan<br>Medang              |                   |                                                    |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Jambe      | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Jambe<br>(%)      | 85,00            | 92,0<br>0  | 92,00                           | 1.312.026.31<br>3 | 92,50  | 1.373.951.12<br>0 | 92,75  | 1.455.770.71<br>5 | 93,00  | 1.507.016.83<br>7 | 95,00                            | 1.569.566.49<br>2 | Kecamatan<br>Jambe                                 |
| Meningkatkan<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>desa dan<br>kelurahan<br>Kecamatan<br>Jayanti    | Prosentase<br>kelompok<br>masyarakat yang<br>mendapat<br>pembinaan/pember<br>dayaa Kec. Jayanti<br>(%)    | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 1.727.119.46<br>8 | 100,00 | 1.814.734.49<br>6 | 100,00 | 1.903.891.22<br>1 | 100,00 | 1.904.491.22<br>1 | 100,00                           | 1.906.091.22<br>1 | Kecamatan<br>Jayanti                               |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                       | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                            |                  |        | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                                 |                                                                                            |                  |        | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                            | (02)                                                                                       | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kemiri        | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Kemiri (%)        | 85,00            | 85,00  | 85,00                           | 2.500.000.000  | 85,00  | 2.500.000.000  | 85,00  | 2.500.000.000  | 85,00  | 2.500.000.000  | 85,00  | 2.500.000.000  | Kecamatan Kemiri                                   |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukadiri      | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Sukadiri (%)      | 89               | 89,5   | 90                              | 1.370.000.000  | 90,5   | 1.395.000.000  | 91     | 1.415.500.000  | 91,5   | 1.496.500.000  | 92     | 1.525.000.000  | Kecamatan Sukadiri                                 |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Cisauk        | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)                                             | 85,2             | 85,5   | 85,75                           | 1.370.000.000  | 86     | 1.395.000.000  | 86,2   | 1.415.500.000  | 86,5   | 1.496.500.000  | 86,7   | 1.525.000.000  | Kecamatan Cisauk                                   |
|                                                                                 |                                                                                            |                  |        |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Cisauk                                   |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sepatan Timur | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Sepatan Timur (%) | 79,00            | 80,00  | 80,50                           | 2.845.817.825  | 81,00  | 2.851.692.360  | 81,50  | 2.921.643.130  | 82,00  | 2.955.165.450  | 82,5   | 2.985.007.500  | Kecamatan Sepatan Timur                            |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sindang Jaya  | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaan Kec. Sindang Jaya (%) | 100              | 100    | 100                             | 2.320.000.000  | 100    | 2.320.000.000  | 100    | 2.320.000.000  | 100    | 2.320.000.000  | 100    | 2.320.000.000  | Kecamatan Sindang Jaya                             |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Kelapa Dua    | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Kelapa Dua (%)    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 10.217.505.240 | 100,00 | 10.421.855.345 | 100,00 | 10.630.292.452 | 100,00 | 10.842.898.301 | 100,00 | 11.059.756.267 | Kecamatan Kelapa Dua                               |
|                                                                                 |                                                                                            |                  |        |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Kelapa Dua                               |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Solear        | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pember dayaa Kec. Solear (%)        | 75,00            | 87,00  | 90,00                           | 2.100.000.000  | 100,00 | 2.100.000.000  | 100,00 | 2.100.000.000  | 100,00 | 2.100.000.000  | 100,00 | 2.100.000.000  | Kecamatan Solear                                   |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |                |        |                |                     |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                          |                  |        | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |                | 2029   |                | 2030                |                |                                                    |
|                                                                                |                                                                                          |                  |        | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET              | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                           | (02)                                                                                     | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)                | (14)           | (15)                                               |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Mekar Baru   | Persentase lembaga masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan (%)                  | 55               | 58     | 61                              | 1.382.723.620 | 64     | 1.389.637.238 | 67     | 1.396.585.424  | 70     | 1.403.568.351  | 73                  | 1.410.586.193  | Kecamatan Mekar Baru                               |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Sukamulya    | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pember dayaa Kec. Sukamulya (%)  | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 1.120.163.286 | 100,00 | 1.176.171.449 | 100,00 | 1.211.456.591  | 100,00 | 1.247.800.287  | 100,00              | 1.285.234.294  | Kecamatan Sukamulya                                |
| Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan Gunung Kaler | Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pember day Kec. Gunung Kaler (%) | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 2.625.000.000 | 100,00 | 2.850.000.000 | 100,00 | 3.065.000.000  | 100,00 | 3.280.000.000  | 100,00              | 3.280.000.000  | Kecamatan Gunung Kaler                             |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                   |                                                                                          |                  |        |                                 | 9.486.674.903 |        | 9.785.732.611 |        | 10.063.726.208 |        | 10.370.907.021 |                     | 10.630.584.640 |                                                    |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Cikupa            | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)                 | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 596.750.000   | 100,00 | 656.425.000   | 100,00 | 722.067.500    | 100,00 | 794.274.250    | 100,00              | 873.701.675    | Kecamatan Cikupa                                   |
|                                                                                | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)                 | 100              | 100    | 100                             |               | 100    |               | 100    |                | 100    |                | Kelurahan Sukamulya |                |                                                    |
|                                                                                | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cikupa (%)                 | 100              | 100    | 100                             |               | 100    |               | 100    |                | 100    |                | Kelurahan Bunder    |                |                                                    |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Tigaraksa         | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Tigaraksa (%)              | 100              | 100    | 100                             | 630.000.000   | 100    | 660.000.000   | 100    | 690.000.000    | 100    | 720.000.000    | 100                 | 720.000.000    | Kecamatan Tigaraksa                                |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                      | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                           |                  |            | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                    |
|                                                                                          |                                                                                           |                  |            | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                    |
| (01)                                                                                     | (02)                                                                                      | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)        | (07)   | (08)        | (09)   | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                                               |
|                                                                                          |                                                                                           |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Tigaraksa                             |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Panongan | Persentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan<br>Panongan (%) | 100              | 100        | 100                             | 224.552.895 | 100    | 235.780.539 | 100    | 247.569.566 | 100    | 259.948.044 | 100    | 272.945.447 | Kecamatan<br>Panongan                              |
|                                                                                          | Persentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan<br>Panongan (%) | 100              | 100        | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | Keluaraha<br>n Mekar<br>Bakti                      |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Curug    | Prosentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Curug<br>(%)    | 72,5             | 73         | 73,5                            | 320.021.000 | 74     | 340.021.000 | 74,5   | 360.021.000 | 75     | 380.021.000 | 75,5   | 400.021.000 | Kecamatan<br>Curug                                 |
|                                                                                          | Prosentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Curug<br>(%)    | 72,5             | 73         | 73,5                            |             | 74     |             | 74,5   |             | 75     |             | 75,5   |             | Kelurahan<br>Sukabakti                             |
|                                                                                          | Prosentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Curug<br>(%)    | 72,5             | 73         | 73,5                            |             | 74     |             | 74,5   |             | 75     |             | 75,5   |             | Kelurahan<br>Binong                                |
|                                                                                          | Prosentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Curug<br>(%)    | 72,5             | 73         | 73,5                            |             | 74     |             | 74,5   |             | 75     |             | 75,5   |             | Kelurahan<br>Curug<br>Kulon                        |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Legok    | Prosentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Legok<br>(%)    | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 230.816.643 | 100,00 | 230.816.643 | 100,00 | 230.816.643 | 100,00 | 230.816.643 | 100,00 | 230.816.643 | Kecamatan<br>Legok                                 |
|                                                                                          |                                                                                           |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Babakan                               |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum                          | Prosentase<br>gangguan<br>trantribum yang<br>ditindaklanjuti                              | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 400.000.000 | 100,00 | 400.000.000 | 100,00 | 400.000.000 | 100,00 | 400.000.000 | 100,00 | 400.000.000 | Kecamatan<br>Pasar<br>Kemis                        |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                          |                  |            | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                    |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |            | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                    |
| (01)                                                                                     | (02)                                                                                     | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)        | (07)   | (08)        | (09)   | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                                               |
| Kecamatan<br>pasar Kemis                                                                 | Kecamatan Pasar<br>Kemis (%)                                                             |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Sindang<br>Sari                       |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                    |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Balaraja | Prosentase<br>gangguan<br>trantibum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan<br>Balaraja (%) | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 172.087.502 | 100,00 | 182.412.752 | 100,00 | 193.357.517 | 100,00 | 204.958.968 | 100,00 | 217.256.506 | Kecamatan<br>Balaraja                              |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Balaraja                              |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Kresek   | Prosentase<br>gangguan<br>trantibum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Kresek<br>(%)   | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 79.113.000  | 100,00 | 89.113.000  | 100,00 | 99.113.000  | 100,00 | 109.113.000 | 100,00 | 119.113.000 | Kecamatan<br>Kresek                                |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Kronjo   | Prosentase<br>gangguan<br>trantibum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Kronjo<br>(%)   | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | Kecamatan<br>Kronjo                                |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Mauk     | Prosentase<br>gangguan<br>trantibum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Mauk<br>(%)     | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 420.000.000 | 100,00 | 440.000.000 | 100,00 | 460.000.000 | 100,00 | 480.000.000 | 100,00 | 480.000.000 | Kecamatan<br>Mauk                                  |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Mauk<br>Timur                         |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Rajeg    | Prosentase<br>gangguan<br>trantibum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Rajeg<br>(%)    | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 105.000.000 | 100,00 | 105.000.000 | 100,00 | 105.000.000 | 100,00 | 105.000.000 | 100,00 | 105.000.000 | Kecamatan<br>Rajeg                                 |
|                                                                                          |                                                                                          |                  |            |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Sukatani                              |
| Menurunkan<br>gangguan<br>ketentraman<br>dan ketertiban<br>umum<br>Kecamatan<br>Sepatan  | Prosentase<br>gangguan<br>trantibum yang<br>ditindaklanjuti<br>Kecamatan Sepatan<br>(%)  | 100              | 100        | 100                             | 252.581.700 | 100    | 265.210.785 | 100    | 278.471.324 | 100    | 292.394.890 | 100    | 307.014.634 | Kecamatan<br>Sepatan                               |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                        | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |                           |             | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                             |                  |        | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030                      |             |                                                    |
|                                                                         |                                                                             |                  |        | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET                    | PAGU        |                                                    |
| (01)                                                                    | (02)                                                                        | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)        | (07)   | (08)        | (09)   | (10)        | (11)   | (12)        | (13)                      | (14)        | (15)                                               |
|                                                                         | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan (%)   | 100              | 100    | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | 100                       |             | Kelurahan Sepatan                                  |
| Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Teluknaga | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Teluknaga (%) | 99,88            | 100,00 | 100,00                          | 300.000.000 | 100,00 | 350.000.000 | 100,00 | 400.000.000 | 100,00 | 450.000.000 | 100,00                    | 500.000.000 | Kecamatan Teluknaga                                |
| Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Cisoka    | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka (%)    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00 | 200.000.000 | 100,00                    | 200.000.000 | Kecamatan Cisoka                                   |
| Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Pakuhaji  | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji (%)  | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 500.000.000 | 100,00 | 500.000.000 | 100,00 | 500.000.000 | 100,00 | 500.000.000 | 100,00                    | 500.000.000 | Kecamatan Pakuhaji                                 |
|                                                                         |                                                                             |                  |        |                                 |             |        |             |        |             |        |             |                           |             | Kelurahan Pakuhaji                                 |
| Menurunkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kosambi   | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)   | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 610.250.448 | 100,00 | 610.250.448 | 100,00 | 610.250.448 | 100,00 | 610.250.448 | 100,00                    | 610.250.448 | Kecamatan Kosambi                                  |
|                                                                         | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)   | 100              | 100    | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | Kelurahan Kosambi Barat   |             |                                                    |
|                                                                         | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)   | 100              | 100    | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | Kelurahan Salembaran Jaya |             |                                                    |
|                                                                         | Prosentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)   | 100              | 100    | 100                             |             | 100    |             | 100    |             | 100    |             | Keluarahan Dadap          |             |                                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                              |                  |        | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                    |
|                                                                         |                                                                              |                  |        | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                    |
| (01)                                                                    | (02)                                                                         | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                                               |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Pagedangan | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan (%) | 75               | 80     | 85                              | 300.000.000   | 90     | 300.000.000   | 95     | 300.000.000   | 100,00 | 300.000.000   | 100,00 | 300.000.000   | Kecamatan Pagedangan                               |
|                                                                         | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan (%) | 80               | 85     | 90                              |               | 95     |               | 100    |               | 100    |               | 100    |               | Kelurahan Medang                                   |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Jambe      | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe (%)      | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | Kecamatan Jambe                                    |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Jayanti    | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Jayanti (%)    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | 100,00 | 200.000.000   | Kecamatan Jayanti                                  |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Kemiri     | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kemiri (%)     | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 1.000.000.000 | 100,00 | 1.000.000.000 | 100,00 | 1.000.000.000 | 100,00 | 1.000.000.000 | 100,00 | 1.000.000.000 | Kecamatan Kemiri                                   |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Sukadiri   | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukadiri (%)   | 77               | 79     | 81                              | 180.000.000   | 81,5   | 200.000.000   | 82     | 210.000.000   | 82,5   | 230.000.000   | 83     | 240.000.000   | Kecamatan Sukadiri                                 |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban umum Kecamatan Cisauk     | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) (Nilai)                               | 85,2             | 85,5   | 85,75                           | 180.000.000   | 86     | 200.000.000   | 86,2   | 210.000.000   | 86,5   | 230.000.000   | 86,7   | 250.000.000   | Kecamatan Cisauk                                   |
|                                                                         |                                                                              |                  |        |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kelurahan Cisauk                                   |
| Menurunkan gangguan ketentrman dan ketertiban                           | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti                          | 72,50            | 73,00  | 73,50                           | 183.120.115   | 74,00  | 183.987.400   | 74,50  | 184.818.230   | 75,00  | 185.715.800   | 75,5   | 189.213.800   | Kecamatan Sepatan Timur                            |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                           | BASELINE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                |                  |        | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                             |                                                                                |                  |        | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                        | (02)                                                                           | (03)             | (04)   | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| umum<br>Kecamatan<br>Sepatan Timur                                          | Kecamatan Sepatan Timur (%)                                                    |                  |        |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                    |
| Menurunkan gangguan ketentrangan dan ketertiban umum Kecamatan Sindang Jaya | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sindang Jaya (%) | 100              | 100    | 100                             | 150.000.000    | 100    | 150.000.000    | 100    | 150.000.000    | 100    | 150.000.000    | 100    | 150.000.000    | Kecamatan Sindang Jaya                             |
| Menurunkan gangguan ketentrangan dan ketertiban umum Kecamatan Kelapa Dua   | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Kelapa Dua (%)   | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 446.661.264    | 100,00 | 455.594.489    | 100,00 | 464.706.379    | 100,00 | 474.000.507    | 100,00 | 483.480.517    | Kecamatan Kelapa Dua                               |
|                                                                             |                                                                                |                  |        |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                | Kelurahan Kelapa Dua                               |
| Menurunkan gangguan ketentrangan dan ketertiban umum Kecamatan Solear       | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Solear (%)       | 57,00            | 70,00  | 100,00                          | 500.000.000    | 100,00 | 500.000.000    | 100,00 | 500.000.000    | 100,00 | 500.000.000    | 100,00 | 500.000.000    | Kecamatan Solear                                   |
| Menurunkan gangguan ketentrangan dan ketertiban umum Kecamatan Mekar Baru   | Persentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti (%)                        | 100              | 100    | 100                             | 219.684.390    | 100    | 220.782.812    | 100    | 221.886.726    | 100    | 222.996.160    | 100    | 224.111.140    | Kecamatan Mekar Baru                               |
| Menurunkan gangguan ketentrangan dan ketertiban umum Kecamatan Sukamulya    | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukamulya (%)    | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 486.035.946    | 100,00 | 510.337.743    | 100,00 | 525.647.875    | 100,00 | 541.417.311    | 100,00 | 557.659.830    | Kecamatan Sukamulya                                |
| Menurunkan gangguan ketentrangan dan ketertiban umum Kecamatan Gunung Kaler | Prosentase gangguan trantribum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler (%) | 100,00           | 100,00 | 100,00                          | 200.000.000    | 100,00 | 200.000.000    | 100,00 | 200.000.000    | 100,00 | 200.000.000    | 100,00 | 200.000.000    | Kecamatan Gunung Kaler                             |
| 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                  |                                                                                |                  |        |                                 | 10.577.516.831 |        | 11.134.879.350 |        | 11.598.001.120 |        | 12.123.712.791 |        | 12.515.646.676 |                                                    |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                 | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                      |                  |       | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                    |
|                                                                      |                                                                      |                  |       | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                    |
| (01)                                                                 | (02)                                                                 | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)        | (07)   | (08)        | (09)   | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                                               |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Mauk       | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Mauk (%)       | 100              | 100   | 100                             | 145.000.000 | 100    | 165.000.000 | 100    | 190.000.000 | 100    | 220.000.000 | 100    | 220.000.000 | Kecamatan Mauk                                     |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Rajeg      | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Rajeg (%)      | 100              | 100   | 100                             | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | Kecamatan Rajeg                                    |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Sepatan    | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sepatan (%)    | 70               | 70    | 70                              | 298.979.520 | 70     | 313.928.496 | 70     | 329.624.921 | 70     | 346.106.167 | 70     | 346.106.166 | Kecamatan Sepatan                                  |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Teluknaga  | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Teluknaga (%)  | 100              | 100   | 100                             | 400.000.000 | 100    | 450.000.000 | 100    | 500.000.000 | 100    | 550.000.000 | 100    | 600.000.000 | Kecamatan Teluknaga                                |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Cisoka     | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Cisoka (%)     | 100              | 100   | 100                             | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | 100    | 250.000.000 | Kecamatan Cisoka                                   |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Pakuhaji   | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pakuhaji (%)   | 100              | 100   | 100                             | 145.000.000 | 100    | 165.000.000 | 100    | 165.000.000 | 100    | 165.000.000 | 100    | 165.000.000 | Kecamatan Pakuhaji                                 |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Kosambi    | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Kosambi (%)    | 100              | 100   | 100                             | 300.000.000 | 100    | 300.000.000 | 100    | 300.000.000 | 100    | 300.000.000 | 100    | 300.000.000 | Kecamatan Kosambi                                  |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Pagedangan | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Pagedangan (%) | 100              | 100   | 100                             | 255.000.000 | 100    | 285.000.000 | 100    | 320.000.000 | 100    | 360.000.000 | 100    | 390.000.000 | Kecamatan Pagedanga n                              |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Jambe      | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Jambe (%)      | 85,00            | 85,00 | 86,00                           | 234.000.000 | 87,00  | 228.000.000 | 88,00  | 246.561.902 | 89,00  | 305.000.000 | 90,00  | 340.000.000 | Kecamatan Jambe                                    |



| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                            | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                 |                  |       | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                    |
|                                                                             |                                                                                                 |                  |       | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                    |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                            | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                               |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Mekar Baru        | Prosentase Program Penylaengaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)                                  | 50               | 55    | 60                              | 461.411.250   | 65     | 463.718.306    | 70     | 466.036.898    | 75     | 468.367.082    | 80     | 468.367.082    | Kecamatan Mekar Baru                               |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Sukamulya         | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Kecamatan Sukamulya (%)                             | 100              | 100   | 100                             | 302.500.000   | 100    | 317.625.000    | 100    | 327.153.750    | 100    | 336.968.362    | 100    | 347.077.412    | Kecamatan Sukamulya                                |
| Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan umum kecamatan Gunung Kaler      | Persentase rekomendasi urusan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Kecamatan Gunung Kaler (%) | 100              | 100   | 100                             | 600.000.000   | 100    | 600.000.000    | 100    | 600.000.000    | 100    | 600.000.000    | 100    | 600.000.000    | Kecamatan Gunung Kaler                             |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA               |                                                                                                 |                  |       |                                 | 9.377.390.998 |        | 13.164.401.631 |        | 10.426.052.912 |        | 12.558.414.135 |        | 10.947.134.109 |                                                    |
| Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Tigaraksa | Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Tigaraksa (%)                        | 100              | 100   | 100                             | 460.000.000   | 100    | 470.000.000    | 100    | 480.000.000    | 100    | 490.000.000    | 100    | 500.000.000    | Kecamatan Tigaraksa                                |
| Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Cikupa    | Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Cikupa (%)                           | 90,10            | 90,25 | 90,40                           | 217.784.160   | 91,00  | 304.562.576    | 94,00  | 263.518.834    | 96,00  | 289.870.717    | 98,0   | 318.857.788    | Kecamatan Cikupa                                   |
| Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kecamatan Panongan  | Persentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Panongan (%)                         | 100              | 89,30 | 89,35                           | 146.038.872   | 89,40  | 153.340.815    | 89,45  | 461.007.855    | 89,50  | 469.058.248    | 89,6   | 177.511.161    | Kecamatan Panongan                                 |
| Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa                     | Presentase Desa Dengan Laporan Administrasi baik Kecamatan Curug (%)                            | 89,15            | 89,30 | 89,35                           | 117.698.400   | 89,40  | 142.698.400    | 89,45  | 167.698.400    | 89,50  | 192.698.400    | 89,55  | 197.698.400    | Kecamatan Curug                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                        |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                    |
|                                                                                                 |                                                                                        |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                                                            | (02)                                                                                   | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                               |
| Kecamatan<br>Curug                                                                              |                                                                                        |                  |      |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Legok       | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Legok<br>(%)       | 100              | 100  | 100                             | 180.000.000       | 100    | 300.000.000       | 100    | 180.000.000       | 100    | 300.000.000       | 100    | 180.000.000       | Kecamatan<br>Legok                                 |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Pasar Kemis | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Pasar<br>Kemis (%) | 100              | 100  | 100                             | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | 100    | 500.000.000       | Kecamatan<br>Pasar<br>Kemis                        |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Balaraja    | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan<br>Balaraja (%)    | 100              | 100  | 100                             | 175.829.852       | 100    | 186.379.643       | 100    | 197.562.421       | 100    | 209.416.167       | 100    | 221.981.137       | Kecamatan<br>Balaraja                              |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Kresek      | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Kresek<br>(%)      | 100              | 100  | 100                             | 84.912.000        | 100    | 194.912.000       | 100    | 104.912.000       | 100    | 199.912.000       | 100    | 124.912.000       | Kecamatan<br>Kresek                                |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Kronjo      | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Kronjo<br>(%)      | 100              | 100  | 100                             | 380.000.000       | 100    | 845.000.000       | 100    | 380.000.000       | 100    | 580.000.000       | 100    | 380.000.000       | Kecamatan<br>Kronjo                                |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Mauk        | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Mauk<br>(%)        | 100              | 100  | 100                             | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | 100    | 1.000.000.00<br>0 | Kecamatan<br>Mauk                                  |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Rajeg       | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Rajeg<br>(%)       | 100              | 100  | 100                             | 150.000.000       | 100    | 320.000.000       | 100    | 150.000.000       | 100    | 720.000.000       | 100    | 150.000.000       | Kecamatan<br>Rajeg                                 |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan                                                     | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik                                 | 95               | 95   | 95                              | 172.793.250       | 95     | 561.432.913       | 95     | 190.504.558       | 95     | 200.029.786       | 95     | 210.031.275       | Kecamatan<br>Sepatan                               |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELINE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                       |                  |       | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                                                    |
|                                                                                                |                                                                                       |                  |       | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                                    |
| (01)                                                                                           | (02)                                                                                  | (03)             | (04)  | (05)                            | (06)        | (07)   | (08)        | (09)   | (10)        | (11)   | (12)        | (13)   | (14)        | (15)                                               |
| pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Sepatan                                                   | Kecamatan Sepatan<br>(%)                                                              |                  |       |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                                                    |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Teluknaga  | Persentase tertib<br>administrasi<br>pemerintahan desa<br>Kecamatan<br>Teluknaga (%)  | 99,99            | 100   | 100                             | 650.000.000 | 100    | 700.000.000 | 100    | 750.000.000 | 100    | 800.000.000 | 100    | 850.000.000 | Kecamatan<br>Teluknaga                             |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Cisoka     | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Cisoka<br>(%)     | 100              | 100   | 100                             | 200.000.000 | 100    | 260.000.000 | 100    | 200.000.000 | 100    | 260.000.000 | 100    | 200.000.000 | Kecamatan<br>Cisoka                                |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Pakuhaji   | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan<br>Pakuhaji (%)   | 100              | 100   | 100                             | 350.000.000 | 100    | 550.000.000 | 100    | 450.000.000 | 100    | 630.000.000 | 100    | 550.000.000 | Kecamatan<br>Pakuhaji                              |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Kosambi    | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan<br>Kosambi (%)    | 100              | 100   | 100                             | 239.874.015 | 100    | 389.874.015 | 100    | 239.874.015 | 100    | 239.874.015 | 100    | 239.874.015 | Kecamatan<br>Kosambi                               |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Pagedangan | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan<br>Pagedangan (%) | 100              | 100   | 100                             | 420.000.000 | 100    | 820.000.000 | 100    | 500.000.000 | 100    | 570.000.000 | 100    | 530.000.000 | Kecamatan<br>Pagedangan                            |
|                                                                                                |                                                                                       |                  |       |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             | Kelurahan<br>Medang                                |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Jambe      | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Jambe<br>(%)      | 85,89            | 85,89 | 85,95                           | 140.000.000 | 86,00  | 384.200.000 | 86,10  | 199.372.500 | 86,15  | 336.641.124 | 86,25  | 234.233.525 | Kecamatan<br>Jambe                                 |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa                            | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan Jayanti<br>(%)    | 100              | 100   | 100                             | 88.768.000  | 100    | 194.768.000 | 100    | 101.968.000 | 100    | 108.868.000 | 100    | 265.068.000 | Kecamatan<br>Jayanti                               |





| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELINE<br>2024 | 2025       | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                          |                  |            | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                    |
|                                                                                                  |                                                                                          |                  |            | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                    |
| (01)                                                                                             | (02)                                                                                     | (03)             | (04)       | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                               |
| Kecamatan<br>Solear                                                                              |                                                                                          |                  |            |                                 |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    |                                                    |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Mekar Baru   | Prosentase<br>Pemenuhan<br>Pembinaan Dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan Desa<br>(%)       | 65               | 67         | 70                              | 184.061.250        | 73     | 250.348.556        | 76     | 185.906.464        | 79     | 186.835.996        | 81     | 187.770.176        | Kecamatan<br>Mekar<br>Baru                         |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Sukamulya    | Presentase Desa<br>Dengan Laporan<br>Administrasi baik<br>Kecamatan<br>Sukamulya (%)     | 100              | 100        | 100                             | 583.488.609        | 100    | 812.663.039        | 100    | 631.042.930        | 100    | 849.974.216        | 100    | 669.473.441        | Kecamatan<br>Sukamulya                             |
| Meningkatkan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>pemerintahan<br>desa<br>Kecamatan<br>Gunung Kelar | Persentase tertib<br>administrasi<br>pemerintahan desa<br>Kecamatan Gunung<br>Kaler (%)  | 100              | 100        | 100                             | 300.000.000        | 100    | 300.000.000        | 100    | 300.000.000        | 100    | 300.000.000        | 100    | 300.000.000        | Kecamatan<br>Gunung<br>Kaler                       |
| 8.01 -<br>KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK                                                      |                                                                                          |                  |            |                                 | 39.866.621.7<br>60 |        | 39.866.621.7<br>60 |        | 39.866.621.7<br>60 |        | 39.866.621.7<br>60 |        | 39.866.621.7<br>60 |                                                    |
| 8.01.01 -<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/K<br>OTA         |                                                                                          |                  |            |                                 | 13.971.621.7<br>60 |        | 13.971.621.7<br>60 |        | 13.971.621.7<br>60 |        | 13.971.621.7<br>60 |        | 13.971.621.7<br>60 |                                                    |
| Meningkatnya<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat<br>daerah                                    | Persentase<br>pemenuhan<br>penunjang<br>perangkat daerah<br>(%)                          | 100,00           | 100,<br>00 | 100,00                          | 13.971.621.7<br>60 | 100,00 | 13.971.621.7<br>60 | 100,00 | 13.971.621.7<br>60 | 100,00 | 13.971.621.7<br>60 | 100,00 | 13.971.621.7<br>60 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa<br>dan Politik         |
| 8.01.02 -<br>PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA<br>DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN      |                                                                                          |                  |            |                                 | 12.055.000.0<br>00 |        | 12.055.000.0<br>00 |        | 12.055.000.0<br>00 |        | 12.055.000.0<br>00 |        | 12.055.000.0<br>00 |                                                    |
| Meningkatnya<br>kesadaran<br>masyarakat<br>akan ideologi<br>Pancasila dan                        | Cakupan<br>Penguatan Ideologi<br>Pancasila dan<br>Karakter<br>Kebangsaan<br>(Persentase) | 0,09             | 1          | 2                               | 12.055.000.0<br>00 | 3      | 12.055.000.0<br>00 | 5      | 12.055.000.0<br>00 | 7      | 12.055.000.0<br>00 | 9      | 12.055.000.0<br>00 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa<br>dan Politik         |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELINE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |           | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                    |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                               |                  |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                                                                                                                                                        | (02)                                                                          | (03)             | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                               |
| karakter<br>kebangsaan                                                                                                                                                                      |                                                                               |                  |           |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                    |
| 8.01.03 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN<br>LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANG<br>AN ETIKA<br>SERTA<br>BUDAYA<br>POLITIK |                                                                               |                  |           |                                 | 2.190.000.00<br>0 |        | 2.190.000.00<br>0 |        | 2.190.000.00<br>0 |        | 2.190.000.00<br>0 |        | 2.190.000.00<br>0 |                                                    |
| Meningkatnya<br>etika dan<br>budaya politik                                                                                                                                                 | Persentase<br>Pendidikan Politik<br>pada Kader Partai<br>Politik (Persentase) | 8,61             | 8,61      | 8,61                            | 2.190.000.00<br>0 | 8,61   | 2.190.000.00<br>0 | 8,61   | 2.190.000.00<br>0 | 8,61   | 2.190.000.00<br>0 | 8,61   | 2.190.000.00<br>0 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa<br>dan Politik         |
| 8.01.04 -<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI<br>KEMASYARAKA<br>TAN                                                                                              |                                                                               |                  |           |                                 | 1.640.000.00<br>0 |        | 1.640.000.00<br>0 |        | 1.640.000.00<br>0 |        | 1.640.000.00<br>0 |        | 1.640.000.00<br>0 |                                                    |
| Meningkatnya<br>ketertiban<br>organisasi<br>kemasyarakata<br>n                                                                                                                              | Persentase<br>Organisasi<br>Kemasyarakatan<br>yang Aktif<br>(Persentase)      | 14,29            | 14,2<br>9 | 14,29                           | 1.640.000.00<br>0 | 14,29  | 1.640.000.00<br>0 | 14,29  | 1.640.000.00<br>0 | 14,29  | 1.640.000.00<br>0 | 14,29  | 1.640.000.00<br>0 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa<br>dan Politik         |
| 8.01.05 -<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>DAN<br>PENGEMBANG<br>AN<br>KETAHANAN<br>EKONOMI,<br>SOSIAL, DAN<br>BUDAYA                                                                              |                                                                               |                  |           |                                 | 4.140.000.00<br>0 |        | 4.140.000.00<br>0 |        | 4.140.000.00<br>0 |        | 4.140.000.00<br>0 |        | 4.140.000.00<br>0 |                                                    |
| Meningkatnya<br>ketahanan<br>ekonomi, sosial,<br>dan budaya<br>masyarakat                                                                                                                   | Persentase<br>Kebijakan di<br>Bidang Ketahanan<br>Ekonomi (%)                 | 80               | 80        | 80                              | 4.140.000.00<br>0 | 80     | 4.140.000.00<br>0 | 80     | 4.140.000.00<br>0 | 80     | 4.140.000.00<br>0 | 80     | 4.140.000.00<br>0 | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa<br>dan Politik         |
| 8.01.06 -<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN                                                                                                                          |                                                                               |                  |           |                                 | 5.870.000.00<br>0 |        | 5.870.000.00<br>0 |        | 5.870.000.00<br>0 |        | 5.870.000.00<br>0 |        | 5.870.000.00<br>0 |                                                    |

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       | PERANGK<br>AT<br>DAERAH<br>PENANGG<br>UNG<br>JAWAB |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                   |                  |      | 2026                            |                       | 2027   |                       | 2028   |                       | 2029   |                       | 2030   |                       |                                                    |
|                                                                              |                                                                   |                  |      | TARGET                          | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  | TARGET | PAGU                  |                                                    |
| (01)                                                                         | (02)                                                              | (03)             | (04) | (05)                            | (06)                  | (07)   | (08)                  | (09)   | (10)                  | (11)   | (12)                  | (13)   | (14)                  | (15)                                               |
| PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK<br>SOSIAL |                                                                   |                  |      |                                 |                       |        |                       |        |                       |        |                       |        |                       |                                                    |
| Meningkatnya<br>penanganan<br>konflik sosial<br>yang<br>diselesaikan         | Persentase Konflik<br>Sosial yang<br>Diselesaikan<br>(Persentase) | 35               | 35   | 35                              | 5.870.000.00<br>0     | 35     | 5.870.000.00<br>0     | 35     | 5.870.000.00<br>0     | 35     | 5.870.000.00<br>0     | 35     | 5.870.000.00<br>0     | Badan<br>Kesatuan<br>Bangsa<br>dan Politik         |
| TOTAL<br>KESELURUHAN                                                         |                                                                   |                  |      |                                 | 8.772.215.36<br>9.822 |        | 8.918.889.64<br>8.887 |        | 9.140.039.64<br>8.887 |        | 9.442.189.64<br>8.887 |        | 9.581.314.64<br>8.887 |                                                    |

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

#### 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 berdasarkan target pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2045 utamanya pada Periode 1 (2025-2029).

Tabel 4.2  
Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

| NO  | INDIKATOR                                                           | SATUAN  | TARGET TAHUN |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     |                                                                     |         | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| -1  | -2                                                                  | -3      | -4           | -5    | -6    | -7    | -8    | -9         |
| 1.  | Usia Harapan Hidup (UHH)                                            | (tahun) | 78,90        | 80,12 | 81,37 | 82,63 | 83,89 |            |
| 2.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                            | %       | 5,77         | 6,31  | 6,91  | 7,56  | 8,27  |            |
| 3.  | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur                               | Indeks  | 80           | 82    | 84    | 86    | 88    |            |
| 4.  | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)                                    | Indeks  | 85,68        | 86,24 | 87,38 | 87,96 | 88,54 |            |
| 5.  | Indeks Pendidikan                                                   | Angka   | 0,69         | 0,69  | 0,70  | 0,71  | 0,72  |            |
| 6.  | Tingkat Inflasi                                                     | (%)     | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     |            |
| 7.  | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                       | Indeks  | 79,01        | 79,87 | 80,73 | 81,61 | 82,49 |            |
| 8.  | Tingkat Kemiskinan                                                  | (%)     | 5,59         | 5,27  | 4,96  | 4,67  | 4,40  |            |
| 9.  | Penurunan intensitas emisi GRK                                      | (%)     | 18,55        | 18,9  | 19,26 | 19,62 | 19,99 |            |
| 10. | Indeks Harmoni                                                      | Indeks  | 6,61         | 6,64  | 6,67  | 6,70  | 6,73  |            |
| 11. | Indeks Pembangunan Pemuda                                           | Nilai   | 5,14         | 5,16  | 5,18  | 5,23  | 5,28  |            |
| 12. | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                         | %       | 11,36        | 11,37 | 11,38 | 11,39 | 11,40 |            |
| 13. | Indeks Pelayanan Publik.                                            | Indeks  | 4,27         | 4,30  | 4,34  | 4,37  | 4,40  |            |
| 14. | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                                        | %       | 9,88         | 10,13 | 10,39 | 10,66 | 10,66 |            |
| 15. | Indeks PEMDI                                                        | %       | 1,91         | 2,1   | 2,3   | 2,5   | 2,7   |            |
| 16. | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih                         | %       | 66,25        | 68,75 | 71,25 | 73,75 | 76,25 |            |
| 17. | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | %       | 6,1          | 6,14  | 6,14  | 6,2   | 6,21  |            |
| 18. | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                                 | Indeks  | 52,73        | 53,48 | 54,23 | 54,55 | 56    |            |
| 19. | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional                      | %       | 99,00        | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |            |
| 20. | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                       | %       | 46           | 55    | 61    | 70    | 70    |            |
| 21. | Indeks Perkembangan Harga                                           | Indeks  | 5,14         | 5,16  | 5,18  | 5,23  | 5,28  |            |
| 22. | Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW                          | %       | 96,49        | 96,98 | 97,48 | 98    | 98,52 |            |
| 23. | Indeks Kesejahteraan Sosial                                         | Indeks  | 59           | 60    | 61    | 62    | 63    |            |

| NO  | INDIKATOR                                                                 | SATUAN | TARGET TAHUN |        |        |        |        | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|------------|
|     |                                                                           |        | 2026         | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| 24. | Indeks Infrastruktur                                                      | Angka  | 46,44        | 52,66  | 58,23  | 62,05  | 65,33  |            |
| 25. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                   | poin   | 61,74        | 61,91  | 62,09  | 62,26  | 62,43  |            |
| 26. | Indeks pembangunan literasi masyarakat                                    | Indeks | 61           | 62     | 63     | 64     | 65     |            |
| 27. | Prevalensi Stunting                                                       | %      | 17,5         | 17     | 16,5   | 16     | 15,5   |            |
| 28. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                 | %      | 68,69        | 69,31  | 69,93  | 70,56  | 71,19  |            |
| 29. | Persentase RTH kawasan perkotaan                                          | %      | 21,10        | 22,45  | 21,10  | 22,50  | 25,00  |            |
| 30. | Indek Professionalitas ASN                                                | %      | 82,50        | 82,55  | 82,60  | 82,70  | 83,00  |            |
| 31. | Harapan Lama Sekolah (HLS)                                                | %      | 13,63        | 13,83  | 14,03  | 14,24  | 14,24  |            |
| 32. | Indeks Desa                                                               | Indeks | 78,88        | 79,24  | 79,61  | 79,99  | 80,13  |            |
| 33. | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                           | Indeks | 0,395        | 0,392  | 0,390  | 0,388  | 0,388  |            |
| 34. | Indeks Risiko Bencana                                                     | Indeks | 124,00       | 123,00 | 122,00 | 121,00 | 120,00 |            |
| 35. | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                                 | %      | 74,96        | 75,46  | 75,96  | 76,46  | 76,96  |            |
| 36. | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB                                 | %      | 1,27         | 1,29   | 1,30   | 1,31   | 1,33   |            |
| 37. | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | (%)    | 2,06         | 1,92   | 1,80   | 1,68   | 1,56   |            |
| 38. | Indeks Karakter Masyarakat                                                | Indeks | 73,50        | 78,00  | 82,50  | 87,00  | 91,50  |            |
| 39. | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                     | Index  | 66           | 67     | 68     | 69     | 70     |            |
| 40. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                                | %      | 1,83         | 1,91   | 1,99   | 2,07   | 2,15   |            |
| 41. | Nilai AKIP                                                                | Angka  | 77           | 78     | 79     | 80,10  | 80,20  |            |
| 42. | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB                       | %      | 33,76        | 33,77  | 33,78  | 33,79  | 33,80  |            |
| 43. | Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                        | %      | 92           | 93     | 94     | 95     | 96     |            |
| 44. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                    | Nilai  | 3,400        | 3,420  | 3,450  | 3,480  | 3,500  |            |
| 45. | Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB                               | %      | 27,08        | 27,14  | 27,20  | 27,26  | 27,32  |            |

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing.

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

| NO   | INDIKATOR                                                                   | SATUAN                        | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|      |                                                                             |                               |                        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| (01) | (02)                                                                        | (03)                          | (04)                   | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)       |
| I    | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT                                              |                               |                        |              |       |       |       |       |       |            |
| 1    | Indeks Pendidikan                                                           | Angka                         | 0,68                   | 0,68         | 0,69  | 0,69  | 0,7   | 0,71  | 0,72  |            |
| 2    | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                    | %                             | 5                      | 5,27         | 5,77  | 6,31  | 6,91  | 7,56  | 8,27  |            |
| 3    | Usia Harapan Hidup (UHH)                                                    | (tahun)                       | 75,34                  | 77,7         | 78,9  | 80,12 | 81,37 | 82,63 | 83,89 |            |
| 4    | Tingkat Inflasi                                                             | (%)                           | 1,8                    | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |            |
| 5    | Tingkat Kemiskinan                                                          | (%)                           | 6,55                   | 5,94         | 5,59  | 5,27  | 4,96  | 4,67  | 4,4   |            |
| 6    | Indeks Kesejahteraan Sosial                                                 | Indeks                        | 57,8                   | 58           | 59    | 60    | 61    | 62    | 63    |            |
| 7    | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                               | %                             | -                      | 20           | 46    | 55    | 61    | 70    | 70    |            |
| 8    | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)                                   | %                             | 65,88                  | 68,08        | 68,69 | 69,31 | 69,93 | 70,56 | 71,19 |            |
| 9    | Indeks Desa                                                                 | Indeks                        | 78,15                  | 78,53        | 78,88 | 79,24 | 79,61 | 79,99 | 80,13 |            |
| 10   | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                       | Indeks                        | 0:0                    | 65:0         | 66:0  | 67:0  | 68:0  | 69:0  | 70:0  |            |
| 11   | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)                                             | Indeks                        | ,400                   | 0,397        | 0,395 | 0,392 | 0,390 | 0,388 | 0,388 |            |
| 12   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                     | poin                          | 55,87                  | 61,57        | 64,24 | 66,92 | 69,59 | 72,26 | 72,27 |            |
| 13   | Nilai AKIP                                                                  | Angka                         | 75,2                   | 76,00        | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 80,10 | 80,20 |            |
| 14   | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten | %                             | 0                      | 9,56         | 9,89  | 10,24 | 10,6  | 10,97 | 11,35 |            |
| 15   | Angka Kematian Ibu (AKI)                                                    | (per 100.000 kelahiran hidup) | 66                     | 65           | 64    | 63    | 62    | 61    | 60    |            |
| 16   | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                | %                             | 6,06                   | 6,06         | 5,91  | 5,77  | 5,63  | 5,5   | 5,37  |            |
| 17   | Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten                | %                             | 0                      | 15,33        | 17,37 | 19,67 | 22,28 | 25,24 | 28,59 |            |
| 18   | Indeks Akses Keuangan Daerah                                                | Indeks                        | 3,67                   | 3,75         | 3,78  | 3,82  | 3,86  | 3,9   | 3,91  |            |
| 19   | Indeks Keluarga Sehat                                                       | Angka                         | 0,79                   | 0,79         | 0,8   | 0,81  | 0,82  | 0,83  | 0,83  |            |
| 20   | Rasio Kewirausahaan Daerah                                                  | %                             | 0                      | 2,69         | 2,75  | 2,81  | 2,87  | 2,9   | 2,93  |            |

| NO | INDIKATOR                                                     | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                                                               |            |                        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| 21 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)          | Ribu Orang | 0                      | 77,5         | 81,13 | 84,94 | 88,92 | 93,09 | 97,45 |            |
| 22 | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal    | %          | 0                      | 33,14        | 34,28 | 35,45 | 36,66 | 37,92 | 39,22 |            |
| 23 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita    | %          | 26,4                   | 20,9         | 17,5  | 17    | 16,5  | 16    | 15,5  |            |
| 24 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)          | %          | 98                     | 98           | 99    | 99    | 99    | 99    | 99    |            |
| 25 | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)                        | Nilai      | 84,7                   | 84,9         | 85    | 85,1  | 85,2  | 85,3  | 85,4  |            |
| 26 | Rasio Konektivitas Kabupaten                                  | Rasio      | 0,41                   | 0,41         | 0,55  | 0,63  | 0,69  | 0,78  | 0,8   |            |
| 31 | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB                     | %          | 1,25                   | 1,26         | 1,27  | 1,29  | 1,3   | 1,31  | 1,33  |            |
| 32 | persentase permukiman kumuh                                   | %          | 5,47                   | 5,45         | 5,43  | 5,41  | 5,38  | 5,36  | 5,34  |            |
| 33 | Persentase PPKS yang Berdaya                                  | %          | 1,44                   | 1,13         | 1,22  | 1,29  | 1,34  | 1,36  | 1,41  |            |
| 34 | Rata-Rata Lama Sekolah                                        | Tahun      | 9,06                   | 9,63         | 9,88  | 10,13 | 10,39 | 10,66 | 10,66 |            |
| 35 | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan                      | %          | 76,73                  | 77,73        | 78,73 | 79,73 | 80,73 | 81,73 | 82,73 |            |
| 36 | Harapan Lama Sekolah                                          | Tahun      | 12,88                  | 13,43        | 13,63 | 13,83 | 14,03 | 14,24 | 14,24 |            |
| 37 | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                              | Indeks     | 60,17                  | 60,2         | 60,26 | 60,31 | 60,37 | 60,42 | 60,42 |            |
| 38 | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                               | Indeks     | 91,69                  | 91,71        | 91,73 | 91,75 | 91,77 | 91,79 | 91,79 |            |
| 39 | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                | Indeks     | 64,64                  | 65           | 66    | 67    | 68    | 69    | 69    |            |
| 40 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | %          | 12,6                   | 12,2         | 11,88 | 11,52 | 11,16 | 10,08 | 10,44 |            |
| 41 | Indeks Karakter Masyarakat                                    | Indeks     | -                      | 69           | 73,50 | 78    | 82,50 | 87    | 91,50 |            |
| II | ASPEK DAYA SAING DAERAH                                       |            |                        |              |       |       |       |       |       |            |
| 1  | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur                         | Indeks     | -                      | 78           | 80    | 82    | 84    | 86    | 88    |            |
| 2  | Indeks Ketahanan Pangan (IKP)                                 | Indeks     | 77,6                   | 78,16        | 79,01 | 79,87 | 80,73 | 81,61 | 82,49 |            |
| 3  | Indeks Perkembangan Harga                                     | Indeks     | 4,13                   | 5,11         | 5,14  | 5,16  | 5,18  | 5,23  | 5,28  |            |
| 4  | Ketaatan Rencana Pembangunan terhadap RTRW                    | %          | -                      | 96           | 96,49 | 96,98 | 97,48 | 98    | 98,52 |            |
| 5  | Indeks PEMDI                                                  | %          | -                      | -            | 1,91  | 2,1   | 2,3   | 2,5   | 2,7   |            |
| 6  | Indeks Pembangunan Pemuda                                     | Nilai      | -                      | 5,11         | 5,14  | 5,16  | 5,18  | 5,23  | 5,28  |            |
| 7  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)                           | Indeks     | -                      | 52           | 52,73 | 53,48 | 54,23 | 54,55 | 56    |            |
| 8  | Persentase RTH kawasan perkotaan                              | %          | -                      | 21,1         | 21,1  | 22,45 | 21,1  | 22,5  | 25    |            |
| 9  | Indek Profesionalitas ASN                                     | %          | 81,81                  | 82,4         | 82,5  | 82,55 | 82,6  | 82,7  | 83    |            |
| 10 | Indeks pembangunan literasi masyarakat                        | Indeks     | 52,7                   | 63           | 70    | 75    | 77    | 80,5  | 81    |            |
| 11 | Indeks Karakter Masyarakat                                    | Indeks     | -                      | 69           | 73,5  | 78    | 82,5  | 87    | 91,5  |            |
| 12 | Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB                   | %          | 26,97                  | 27,02        | 27,08 | 27,14 | 27,20 | 27,26 | 27,32 |            |
| 13 | Indeks Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah             | %          | 99,8                   | 91           | 92    | 93    | 94    | 95    | 96    |            |

| NO  | INDIKATOR                                                                                                            | SATUAN    | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|     |                                                                                                                      |           |                        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| 14  | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                               | Nilai     | 3,359                  | 3,370        | 3,400  | 3,420  | 3,450  | 3,480  | 3,500  |            |
| 15  | Indeks Ketahanan Daerah                                                                                              | Angka     | 0,74                   | 0,74         | 0,76   | 0,78   | 0,8    | 0,82   | 0,82   |            |
| 16  | Hubungan Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten                                                                       | Kuantitas | 0                      | 0            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |            |
| 17  | indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi                                                                | %         | 0                      | 6,5          | 6,56   | 6,62   | 6,68   | 6,74   | 6,8    |            |
| 18  | Persentase rumah layak huni                                                                                          | %         | 87,25                  | 89,66        | 90,89  | 92,14  | 93,41  | 94,69  | 95,99  |            |
| 19  | Return on Aset (ROA) BUMD                                                                                            | %         | 0                      | 2,5          | 2,6    | 2,71   | 2,82   | 2,93   | 3,05   |            |
| 20  | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)                                                                                      | %         | 0                      | 17,55        | 18,17  | 18,81  | 19,47  | 20,15  | 20,86  |            |
| 21  | Indeks Demokrasi Daerah                                                                                              | Indeks    | 0                      | Sedang       | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang | Sedang |            |
| 22  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB                                                                                     | %         | 0                      | 2,01         | 2,01   | 2,2    | 2,3    | 2,41   | 2,52   |            |
| 23  | Indeks Inovasi Daerah                                                                                                | Indeks    | 63,15                  | 63,64        | 64,37  | 65,11  | 65,86  | 66,62  | 67,39  |            |
| 24  | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer                                                                                 | %         | 0                      | 24           | 25,36  | 26,79  | 28,31  | 29,91  | 31,6   |            |
| 25  | Indeks Zakat Nasional (IZN)                                                                                          | Poin      | 0,65                   | 0,67         | 0,69   | 0,71   | 0,73   | 0,75   | 0,77   |            |
| 26  | Persentase Desa Mandiri                                                                                              | %         | 0                      | 5            | 5,66   | 6,41   | 7,26   | 8,22   | 9,31   |            |
| 27  | Kontribusi sektor koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB                                                             | %         | 4,12                   | 4,28         | 4,44   | 4,61   | 4,79   | 4,98   | 5,18   |            |
| 29  | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB                                                                            | %         | 6,16                   | 6,07         | 6,1    | 6,14   | 6,14   | 6,2    | 6,21   |            |
| 30  | Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                                                   | Nilai     | 98,4                   | 94,3         | 95,1   | 95,3   | 95,5   | 95,7   | 96,1   |            |
| 31  | Rasio Wirausaha                                                                                                      | %         | 2,66                   | 2,86         | 3,08   | 3,31   | 3,56   | 3,82   | 4,11   |            |
| 32  | Indeks Pelayanan Publik                                                                                              | Indeks    | 3,93                   | 4,23         | 4,27   | 4,3    | 4,34   | 4,37   | 4,4    |            |
| 33  | Persentase penanganan gangguan ketertiban umum, Ketentraman masyarakat, dan pelanggaran Perda/Perkada yang ditangani | %         | 99,69                  | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 34  | Indeks SPBE                                                                                                          | Indeks    | 3,91                   | 3,19         | 3,39   | 3,69   | 3,99   | 4,15   | 4,25   |            |
| 35  | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                                                   | Menit     | 14,67                  | 14,67        | 14,65  | 14,6   | 14,5   | 14,3   | 14,25  |            |
| III | ASPEK PELAYANAN UMUM                                                                                                 |           |                        |              |        |        |        |        |        |            |
| 1   | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)                                                                                     | Indeks    | 84,56                  | 85,12        | 85,68  | 86,24  | 87,38  | 87,96  | 88,54  |            |
| 2   | Penurunan intensitas emisi GRK                                                                                       | (%)       | -                      | 18,21        | 18,55  | 18,9   | 19,26  | 19,62  | 19,99  |            |
| 3   | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih                                                                          | %         | 63,91                  | 65,59        | 71,47  | 83,17  | 87,05  | 88,73  | 90,41  |            |
| 4   | Indeks Infrastruktur                                                                                                 | Angka     | 0                      | 38,98        | 46,44  | 52,66  | 58,23  | 62,05  | 65,33  |            |
| 5   | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB                                                  | %         | 6,16                   | 6,07         | 6,1    | 6,14   | 6,14   | 6,2    | 6,21   |            |
| 6   | Indeks Risiko Bencana                                                                                                | Indeks    | 125,22                 | 125          | 124    | 123    | 122    | 121    | 120    |            |
| 7   | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)                                            | (%)       | -                      | 2,2          | 2,06   | 1,92   | 1,8    | 1,68   | 1,56   |            |



| NO | INDIKATOR                                                                        | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |          |          |          |          |          | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|    |                                                                                  |            |                        | 2025         | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |            |
| 8  | Numerasi SMP                                                                     | %          | 57,41                  | 67,04        | 67,63    | 68,23    | 68,84    | 69,45    | 70,07    |            |
| 9  | Pemenuhan kebutuhan listrik per kapita                                           | kWh        | 0                      | 1.247,8      | 1.313,84 | 1.383,37 | 1.456,58 | 1.533,66 | 1.614,82 |            |
| 10 | Persentase Penyelesaian Tindak Pidana                                            | %          | 70                     | 75           | 77,38    | 79,84    | 82,38    | 85       | 87,7     |            |
| 11 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi | %          | 0                      | 11,73        | 12,05    | 12,37    | 12,71    | 13,05    | 13,4     |            |
| 12 | Nilai Kapabilitas APIP                                                           | Nilai      | 3                      | 4            | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |            |
| 13 | Nilai Literasi SMP                                                               | %          | 63,14                  | 68,12        | 68,88    | 69,64    | 70,42    | 71,2     | 71,99    |            |
| 14 | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman                                          | %          | 0                      | 88,27        | 88,82    | 89,38    | 89,94    | 90,5     | 91,07    |            |
| 15 | Indeks Reformasi Hukum                                                           | Indeks     | 0                      | 86,73        | 87,35    | 87,98    | 88,61    | 89,24    | 89,88    |            |
| 16 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)          | (%)        | 0                      | 90           | 90,79    | 91,6     | 92,4     | 93,22    | 94,04    |            |
| 17 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan                   | (%)        | 0                      | 98,74        | 99,05    | 99,37    | 99,68    | 100      | 100      |            |
| 18 | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi                                          | Indeks     | 0                      | 3,2          | 3,2      | 3,2      | 3,2      | 3,2      | 3,2      |            |
| 19 | Rasio Elektrifikasi                                                              | %          | 97,31                  | 97,66        | 97,77    | 97,89    | 98       | 98,12    | 98,24    |            |
| 20 | Persentase timbulan sampah yang terkelola                                        | %          | 57,53                  | 64,75        | 66,17    | 67,63    | 69,11    | 70,63    | 72,18    |            |
| 21 | Numerasi SD                                                                      | %          | 45,97                  | 46,7         | 47,4     | 48,19    | 48,95    | 49,73    | 50,52    |            |
| 22 | Nilai Sistem Merit                                                               | Indeks     | 296,5                  | 308,31       | 312,35   | 316,44   | 320,59   | 324,79   | 329,05   |            |
| 23 | Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah                                      | %          | 100                    | 100          | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      |            |
| 24 | Nilai Literasi SD                                                                | %          | 56,18                  | 60,6         | 61,45    | 62,31    | 63,18    | 64,06    | 64,96    |            |
| 25 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                                       | %          | 0                      | 1,76         | 1,83     | 1,91     | 1,99     | 2,15     | 2,15     |            |
| 26 | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB                                        | Persentase | 6,16                   | 6,07         | 6,1      | 6,14     | 6,17     | 6,2      | 6,21     |            |
| 27 | Rasio Luas Kawasan Permukiman, Perumahan dan Pemakaman yang layak                | Rasio      | 0,9453                 | 0,9455       | 0,9457   | 0,9453   | 0,9453   | 0,9453   | 0,9453   |            |
| 28 | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Indeks     | -                      | 70           | 75       | 80       | 85       | 90       | 92       |            |
| 29 | Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum                      | Nilai      | 79,07                  | 79,16        | 79,32    | 79,48    | 79,64    | 79,8     | 80       |            |
| 30 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan            | Indeks     | 84,15                  | 84,65        | 85,15    | 85,65    | 86,15    | 86,65    | 87,15    |            |
| 31 | Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB                                      | Persentase | 11,35                  | 11,35        | 11,36    | 11,37    | 11,38    | 11,39    | 11,4     |            |
| 32 | Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                               | Indeks     | 99,8                   | 91           | 92       | 93       | 94       | 95       | 96       |            |
| 34 | Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD                |            | 4,23                   | 4,23         | 4,27     | 4,3      | 4,34     | 4,37     | 4,37     |            |

| NO | INDIKATOR                                                                                          | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|    |                                                                                                    |            |                        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| 35 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                 | %          | 73,96                  | 74,46        | 74,96  | 75,46  | 75,96  | 76,46  | 76,96  |            |
| 36 | V/C Rasio                                                                                          | Angka      | 0,46                   | 0,44         | 0,42   | 0,4    | 0,38   | 0,36   | 0,34   |            |
| 37 | Indeks harmoni                                                                                     | Indeks     | 6,58                   | 6,6          | 6,61   | 6,64   | 6,67   | 6,7    | 6,73   |            |
| 38 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan                                             | %          | 83,32                  | 96,5         | 97,25  | 97,78  | 98,25  | 99,25  | 99,5   |            |
| 39 | Persentase Penduduk Kabupaten Tangerang penerima pemeriksaan kesehatan gratis                      | %          | -                      | 20           | 46     | 55     | 61     | 70     | 70     |            |
| 40 | Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dikembangkan                               | %          | -                      | 10,66        | 11,48  | 12,3   | 12,3   | 13,11  | 13,11  |            |
| 41 | Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB                                                | %          | 33,74                  | 33,75        | 33,76  | 33,77  | 33,78  | 33,79  | 33,8   |            |
| 42 | Persentase Pemuda Yang Berwirausaha                                                                | %          | -                      | 12           | 34     | 56     | 78     | 100    | 100    |            |
| 43 | Nilai Indeks Kemandirian Fiskal                                                                    | Indeks     | 0,544                  | 0,53         | 0,535  | 0,54   | 0,545  | 0,55   | 0,555  |            |
| 44 | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                         | %          | 92,25                  | 87,5         | 87,55  | 87,6   | 87,65  | 87,7   | 87,7   |            |
| 61 | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan                                                         | %          | 4                      | 5,04         | 5,39   | 6,09   | 6,65   | 6,84   | 7      |            |
| 62 | Nilai Kepuasan Masyarakat                                                                          | Nilai      | 89,3                   | 90,5         | 91,9   | 93,5   | 95,3   | 97,3   | 99,5   |            |
| 63 | Persentase Atlet Berprestasi                                                                       | %          | 3                      | 4            | 56     | 62     | 94     | 100    | 100    |            |
| 64 | Jumlah Desa Mandiri                                                                                | Desa       | 78                     | 105          | 113    | 122    | 132    | 143    | 155    |            |
| 65 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                  | Indeks     | 64,71                  | 67,9         | 69,1   | 70,3   | 71,5   | 72,7   | 73,9   |            |
| 66 | Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap                                                             |            | 4,41                   | 4,42         | 4,43   | 4,44   | 4,45   | 4,46   | 4,47   |            |
| 67 | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah                           | %          | 93,95                  | 58,13        | 94     | 94,2   | 94,4   | 94,6   | 94,8   |            |
| 68 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah                                   | Nilai      | 80,26                  | 71           | 71,05  | 71,1   | 71,15  | 71,2   | 71,25  |            |
| 69 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                                                                | Persentase | 1                      | 0,5          | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    | 0,5    |            |
| 70 | Indeks Kualitas Air                                                                                | Indeks     | 55,69                  | 61,86        | 62,06  | 62,26  | 62,46  | 62,66  | 62,86  |            |
| 71 | Persentase Jumlah Cadangan Pangan                                                                  | Persentase | 95,68                  | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |            |
| 72 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                         | Nilai      | 69,34                  | 70           | 72     | 73,5   | 74     | 75,2   | 76     |            |
| 73 | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                                        | Jiwa       | 1,84                   | 1,84         | 1,84   | 1,84   | 1,84   | 1,84   | 1,84   |            |
| 74 | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP) | Ton        | 43.737                 | 44.131       | 44.446 | 44.783 | 45.145 | 45.533 | 45.945 |            |
| 75 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                                 | Poin       | 3,43                   | -            | 3,45   | -      | 3,47   | -      | 3,49   |            |
| 76 | Nilai Realisasi Investasi                                                                          | Angka      | 23,71                  | 24,42        | 25,15  | 25,9   | 26,68  | 27,48  | 28,31  |            |
| 77 | Jumlah Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB)                                                            | Kasus      | 12.391                 | 11.881       | 10.202 | 8.795  | 7.792  | 7.029  | 6.441  |            |
| 78 | Produksi Olahan Perikanan                                                                          | Produk     | 0                      | 22.042       | 22.373 | 22.708 | 23.049 | 23.395 | 23.741 |            |

| NO  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     |                                                                                     |            |                        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |            |
| 79  | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)    | Angka      | 9,5                    | 9,4          | 9,3   | 9,2   | 9,1   | 9     | 9     |            |
| 81  | Peningkatan Produksi Hortikultura                                                   | Persentase | 1                      | 0,5          | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   |            |
| 82  | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N                                               | Persentase | 84,14                  | 85           | 90    | 91    | 92    | 95    | 95    |            |
| 84  | Persentase hasil riset yang dijadikan dasar perumusan kebijakan daerah              | %          | 50                     | 52           | 53    | 54    | 55    | 56    | 57    |            |
| 85  | Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | Indeks     | -                      | 73           | 77    | 81    | 85    | 89    | 93    |            |
| 86  | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                       | Persentase | 13,8                   | 13,5         | 13    | 12,8  | 12,5  | 12    | 11,5  |            |
| 87  | Skor Pola Pangan Harapan                                                            | Nilai      | 89,4                   | 85,5         | 86    | 87    | 88    | 89    | 90    |            |
| 88  | Indeks Tata Kelola Pengadaan                                                        | Indeks     | 86,67                  | 86,8         | 87    | 87,25 | 87,5  | 87,75 | 88    |            |
| 89  | Indeks Kualitas Udara                                                               | Indeks     | 73,33                  | 69,36        | 69,56 | 69,76 | 69,96 | 70,16 | 70,36 |            |
| 90  | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah                                           |            | 0,05                   | 1            | 1,1   | 1,2   | 1,3   | 1,4   | 1,5   |            |
| 91  | Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk Kabupaten Tangerang | %          | 98                     | 98           | 99    | 99    | 99    | 99    | 99    |            |
| 92  | Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD     |            | 2,34                   | 2,34         | 2,35  | 2,4   | 2,45  | 2,5   | 2,55  |            |
| 93  | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan                             | Indeks     | 89                     | 89,05        | 89,1  | 89,15 | 89,3  | 89,45 | 89,6  |            |
| 94  | Indeks Tutupan Lahan                                                                | Indeks     | 23,86                  | 46,67        | 46,74 | 46,81 | 46,88 | 46,95 | 47,02 |            |
| 95  | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern                    | %          | 75,84                  | 75,74        | 75,94 | 76,34 | 76,54 | 76,74 | 76,94 |            |
| 96  | Nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja daerah                                       | Nilai      | 12,02                  | 12,5         | 13    | 13,5  | 14    | 14,5  | 15    |            |
| 97  | Peningkatan Produksi Komoditas Perternakan                                          | %          | 1                      | 0,5          | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   |            |
| 98  | Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                           |            | 32,78                  | 33           | 33,1  | 33,2  | 33,3  | 33,4  | 33,5  |            |
| 99  | Persentase laporan keuangan tepat waktu                                             |            | 100                    | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |            |
| 100 | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Pemda                                      | Nilai      | 25                     | 26           | 27    | 28    | 29    | 30    | 30    |            |
| 101 | Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TB)                                     | %          | 90                     | 90           | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |            |
| 102 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)                                            | poin       | 45                     | 48           | 52    | 55    | 57    | 60    | 62    |            |
| 103 | Persentase Penurunan SILPA                                                          | Persentase | 0                      | 2,5          | 2,4   | 2,3   | 2,2   | 2,1   | 2     |            |

[illegible]

| NO  | INDIKATOR                                                                     | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANGAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|     |                                                                               |        |                        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |            |
| 134 | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1 | %      | 89,14                  | 90,64        | 91,64  | 92,64  | 93,64  | 94,64  | 95,64  |            |
| 135 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni                                         | %      | 97,11                  | 97,22        | 97,33  | 97,44  | 97,55  | 97,65  | 97,76  |            |
| 136 | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya | %      | 100,00                 | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |            |
| 137 | Laju Pertumbuhan Penduduk                                                     | %      | 1,93                   | 1,92         | 1,91   | 1,9    | 1,89   | 1,88   | 1,87   |            |

Sumber : Analisis Penyusun, 2025

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2030

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                               | STATUS  | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANG<br>AN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|      |                                                                                                                                                         |         |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                |
| (01) | (02)                                                                                                                                                    | (03)    | (04)   | (05)                      | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)           |
| 1.   | 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                                                                            |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 2.   | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | positif | %      | 13,43                     | 14,19        | 14,95 | 15,72 | 16,48 | 17,24 | 18,01 |                |
| 3.   | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD                                                                          | positif | %      | 64,99                     | 68,03        | 71,07 | 74,11 | 77,15 | 80,19 | 83,16 |                |
| 4.   | 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                             |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 5.   | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                              | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 6.   | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                                                                                | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 7.   | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                          | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 8.   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                                                                          | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 9.   | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                                     | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 10.  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                               | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 11.  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                                                                                   | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | STATUS    | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANG<br>AN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                   |           |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                |
| (01) | (02)                                                                                                                                                                                              | (03)      | (04)   | (05)                      | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)           |
| 12.  | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                                                   | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 13.  | Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                    | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 14.  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                               | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 15.  | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                                                                                                                                   | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 16.  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                                       | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 17.  | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk                                                                                                                                                    | positif   | %      | 0,86                      | 0,86         | 0,89  | 0,92  | 0,95  | 0,98  | 1,01  |                |
| 18.  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                                                                                                                                 | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 19.  | 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                               |           |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 20.  | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | positif   | %      | 61,25                     | 63,75        | 66,25 | 68,75 | 71,28 | 73,75 | 76,25 |                |
| 21.  | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                             | positif   | %      | 97,02                     | 97,69        | 98,42 | 99,25 | 100   | 100   | 100   |                |
| 22.  | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota                                                                                                                                                                     | positif   | %      | 99,25                     | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 23.  | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                           | positif   | %      | 6,41                      | 6,71         | 6,93  | 7,12  | 7,23  | 7,34  | 7,45  |                |
| 24.  | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                    | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 25.  | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                        | positif   | %      | 74                        | 78           | 80    | 82    | 84    | 86    | 88    |                |
| 26.  | 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                |           |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 27.  | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota                                                                                | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 28.  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)                                                                                                                  | komulatif | %      | 38,44                     | 38,59        | 37,74 | 38,9  | 39,06 | 39,22 | 39,39 |                |
| 29.  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                                                                                                                   | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 30.  | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                                                                                                     | positif   | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 31.  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)                                                                                                                                            | negatif   | %      | 2,89                      | 2,78         | 2,67  | 2,56  | 2,45  | 2,35  | 2,24  |                |



| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                                          | STATUS  | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANG<br>AN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                    |         |        |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                |
| (01) | (02)                                                                                                                                                               | (03)    | (04)   | (05)                      | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)           |
| 52.  | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                                                               | positif | %      | 95,68                     | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 53.  | 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                 |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 54.  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                                                   | positif | Indeks | 55,87                     | 61,57        | 61,74 | 61,91 | 62,09 | 62,26 | 62,43 |                |
| 55.  | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota                  | positif | %      | 75                        | 76           | 77    | 78    | 79    | 80    | 81    |                |
| 56.  | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota                                                                                                               | positif | %      | 63,50                     | 50,28        | 60    | 65    | 70    | 73    | 75    |                |
| 57.  | 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL                                                                                  |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 58.  | Kepemilikan Akta Kelahiran                                                                                                                                         | positif | %      | 92,76                     | 97           | 97,50 | 98    | 98,50 | 99    | 99    |                |
| 59.  | Perekaman KTP elektronik                                                                                                                                           | positif | %      | 99,99                     | 99,4         | 99,42 | 99,44 | 99,46 | 99,48 | 99,48 |                |
| 60.  | Persentase anak usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                                                                                             | positif | %      | 60,73                     | 60           | 55    | 60    | 65    | 70    | 70    |                |
| 61.  | Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama                                                                | positif | %      | 72,88                     | 81,36        | 89,83 | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 62.  | 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                                                                 |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 63.  | Persentase pengentasan desa tertinggal                                                                                                                             | positif | %      | 0                         | 0            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |                |
| 64.  | Persentase peningkatan status desa mandiri                                                                                                                         | positif | %      | 31,71                     | 40,24        | 44,72 | 49,59 | 54,88 | 60,57 | 66,67 |                |
| 65.  | 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                     |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 66.  | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)                                                                                | positif | %      | 78,84                     | 75,74        | 75,94 | 76,34 | 76,54 | 76,74 | 76,94 |                |
| 67.  | 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                      |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 68.  | Rasio konektivitas kabupaten/kota                                                                                                                                  | positif | Rasio  | 0,41                      | 0,45         | 0,55  | 0,60  | 0,69  | 0,78  | 0,80  |                |
| 69.  | 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                       |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 70.  | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                           | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 71.  | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | positif | %      | 92,45                     | 92,5         | 92,75 | 93    | 93,5  | 93,8  | 94    |                |
| 72.  | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      | positif | %      | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 73.  | 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                              |         |        |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 74.  | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                                                                                                             | positif | %      | 8,68                      | 13,89        | 38,77 | 41,09 | 43,3  | 45,72 | 48,03 |                |



[illegible]

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                                                                           | STATUS    | SATUAN     | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KETERANG<br>AN |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                     |           |            |                           | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                |
| (01) | (02)                                                                                                                                                                                                | (03)      | (04)       | (05)                      | (06)         | (07)   | (08)   | (09)   | (10)   | (11)   | (12)           |
| 93.  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat |           | %          | 100,00                    | 70,00        | 71,00  | 72,00  | 73,00  | 74,00  | 75,00  |                |
| 94.  | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan     | positif   | %          | 100,00                    | 70,00        | 71,00  | 72,00  | 73,00  | 74,00  | 75,00  |                |
| 95.  | 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                            |           |            |                           |              |        |        |        |        |        |                |
| 96.  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota                                                                                                                               | positif   | Ton        | 43,737                    | 44,131       | 44,446 | 44,783 | 45,145 | 45,533 | 45,945 |                |
| 97.  | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                                                                                        |           |            |                           |              |        |        |        |        |        |                |
| 98.  | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota                                                                                                                |           | %          | 19,93                     | 20,18        | 20,26  | 20,34  | 20,42  | 20,5   | 20,58  |                |
| 99.  | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                                                                                  | positif   | %          | 19,95                     | 20,10        | 20,15  | 20,19  | 20,24  | 20,29  | 20,34  |                |
| 100. | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                                                                                            | positif   | Nilai      | 96,60                     | 96,68        | 96,76  | 96,84  | 96,93  | 97,91  | 98,01  |                |
| 101. | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                                                                         |           |            |                           |              |        |        |        |        |        |                |
| 102. | Persentase kinerja realisasi pupuk                                                                                                                                                                  |           | %          | 47,52                     | 42,00        | 43,00  | 44,00  | 45,00  | 46,00  | 47,00  |                |
| 103. | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota                                                                                            | positif   | %          | 30,78                     | 10           | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |                |
| 104. | Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun                                                                                                                       | positif   | Ton/Ha     | 4,94                      | 4,94         | 4,96   | 4,98   | 5,00   | 5,02   | 5,04   |                |
| 105. | 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                                       |           |            |                           |              |        |        |        |        |        |                |
| 106. | Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                                                                                        | komulatif | Persentase | 52                        | 84,18        | 86,81  | 89,43  | 92,06  | 94,68  | 100    |                |
| 107. | 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                     |           |            |                           |              |        |        |        |        |        |                |
| 108. | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                                                           |           | %          | 100                       | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |                |
| 109. | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota                                                                                                                                          |           | %          | 22,51                     | 8,12         | 8,35   | 8,47   | 8,52   | 8,84   | 9,02   |                |
| 110. | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                                                           | komulatif | %          | 100                       | 100          | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |                |
| 111. | 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                           |           |            |                           |              |        |        |        |        |        |                |
| 112. | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                                                                                                 | positif   | %          | 35,77                     | 30,00        | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  |                |
| 113. | Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama                                                                                 | positif   | %          | 0                         | 0            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |                |
| 114. | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                                                                | positif   | %          | 38,29                     | 30,00        | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  | 30,00  |                |

| NO   | INDIKATOR                                                                                                                                      | STATUS  | SATUAN   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANG<br>AN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
|      |                                                                                                                                                |         |          |                           | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                |
| (01) | (02)                                                                                                                                           | (03)    | (04)     | (05)                      | (06)         | (07)  | (08)  | (09)  | (10)  | (11)  | (12)           |
| 115. | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah | positif | %        | 22,45                     | 20,00        | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |                |
| 116. | 5.02 - KEUANGAN                                                                                                                                |         |          |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 117. | Manajemen Aset                                                                                                                                 | positif | Kategori | Ada                       | Ada          | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   | Ada   |                |
| 118. | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                                                                  | positif | %        | 13,48                     | 93,7         | 93,8  | 93,9  | 94    | 94,1  | 94,2  |                |
| 119. | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya                                                        | negatif | %        | 10,02                     | 2,81         | 1,96  | 1,11  | 0,26  | -0,59 | -1,44 |                |
| 120. | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)           | positif | %        | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 121. | Opini Laporan Keuangan                                                                                                                         |         | %        | WTP                       | WTP          | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |                |
| 122. | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                                                                                        | negatif | %        | 8,59                      | 8,7          | 8,43  | 8,23  | 8     | 7,90  | 7,80  |                |
| 123. | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )                                                                      | positif | %        | 62,23                     | 84,1         | 84,3  | 84,5  | 84,7  | 84,7  | 84,9  |                |
| 124. | Rasio PAD                                                                                                                                      |         | %        | 54,29                     | 52           | 52,5  | 53    | 53,5  | 54    | 54,5  |                |
| 125. | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                                                                   | positif | %        | 24                        | 120          | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |                |
| 126. | 5.03 - KEPEGAWAIAN                                                                                                                             |         |          |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 127. | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                                    | positif | %        | 22,77                     | 22,87        | 22,97 | 23,07 | 23,17 | 23,27 | 23,37 |                |
| 128. | Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                          | positif | %        | 79,28                     | 79,48        | 79,68 | 79,88 | 80,08 | 80,28 | 80,48 |                |
| 129. | 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                |         |          |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 130. | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                           | positif | %        | 100                       | 100          | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |                |
| 131. | 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                                      |         |          |                           |              |       |       |       |       |       |                |
| 132. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                         | positif | Nilai    | 3,359                     | 3,370        | 3,400 | 3,420 | 3,450 | 3,480 | 3,500 |                |
| 133. | Nilai Kapabilitas APIP                                                                                                                         | positif | Nilai    | 3                         | 4            | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |                |

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

## BAB V PENUTUP

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tangerang untuk periode lima tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah Kabupaten Tangerang periode 2025–2029 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045, serta memperhatikan RPJM Nasional 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Banten. Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Sementara itu, untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, dalam penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya.

### 5.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Untuk mengisi kekosongan RPJMD, maka penyusunan RKPD pada tahun transisi berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2045 yang disesuaikan periode waktunya.
2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten, penyusunan RKPD tahun 2025 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tangerang dan mengacu RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi.
3. RKPD disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Kepala Daerah terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.
4. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

### 5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 mematuhi kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Kaidah-kaidah ini menekankan pada pengarusutamaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Implementasi RPJMD ini akan mengintegrasikan lima pengarusutamaan pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial: Pembangunan di Kabupaten Tangerang akan memastikan bahwa program dan kegiatan dapat diakses dan memberikan manfaat yang setara bagi semua, tanpa memandang jenis kelamin, disabilitas, usia, etnis, atau status sosial.
  - o Pengarusutamaan Gender: Mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.
  - o Inklusi Sosial: Memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.
2. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Seluruh program pembangunan akan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs. RPJMD ini akan berkontribusi pada pencapaian target SDGs melalui program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan lingkungan.
3. Pengarusutamaan Transformasi Digital: Pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
4. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon: Pembangunan akan diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang efektif.
5. Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim: Seluruh rencana pembangunan akan memperhitungkan risiko perubahan iklim, dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi bencana. Hal ini untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan iklim.

Kaidah pelaksanaan disusun untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tangerang, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025–2029 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025 hingga 2029.
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Tangerang, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang

- berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit satuan kerja (Renja SKPD).
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja.
  5. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil RPJMD 2025– 2029, baik tahunan maupun di akhir masa jabatan Kepala Daerah.
  6. Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029.

### 5.3 MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau segala kemungkinan kejadian atau kondisi (risiko) yang berpotensi menghambat atau bahkan menggagalkan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sumber daya, dan faktor eksternal yang tidak selalu bisa dikontrol.

Untuk memastikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan monitoring secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD; mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program Perangkat Daerah; memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang; serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengendalian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah proses menjamin bahwa dokumen RPJMD selalu akurat, relevan, mudah diakses, dan terlindungi dari perubahan yang tidak sah. Hal ini sangat penting karena RPJMD adalah dokumen strategis yang menjadi dasar bagi seluruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di daerah selama lima tahun, meskipun senantiasa terdapat dinamika karena adanya kebijakan nasional maupun daerah sehingga perlu penyesuaian. Pengendalian pelaksanaan dokumen RPJMD untuk memastikan:

- a. Program setiap Perangkat Daerah tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD;
- b. Sumber daya daerah, terutama terkait dengan anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang direncanakan;
- c. Potensi, kendala, hambatan, maupun risiko dapat diidentifikasi lebih awal; serta
- d. Setiap Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan RPJMD.

Selain pengendalian pelaksanaan yang berfokus pada proses untuk memastikan selama periode perencanaan, semua rencana berjalan *on track*, perlu diperhatikan juga evaluasi yang dilakukan pada periode tertentu (tengah atau akhir periode) untuk menilai efektivitas dan efisiensi keseluruhan rencana.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID